



**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 34 TAHUN 2018**

tentang

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018**





**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah, disebutkan bahwa RKPD Tahun 2018 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 merupakan dokumen lanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018, yang disusun karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan hingga Triwulan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, diantaranya :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penentuan Perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Tahun 2018.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 HINGGA TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- BAB III : PERKEMBANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

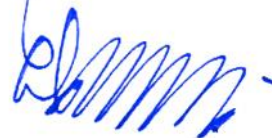
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Juli 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 25 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.3.1. RPJM Nasional	I-4
1.3.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Perubahannya	I-5
1.3.3. RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	I-5
1.3.4. RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031	I-12
1.3.5. RPJMD Kota Magelang	I-12
1.3.6. Rencana Pembangunan Sektoral	I-14
1.3.7. Renja – OPD	I-14
1.4. Maksud dan Tujuan	I-16
1.4.1. Maksud	I-16
1.4.2. Tujuan	I-16
1.5. Sistematika RKPD	I-16
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 DAN CAPAIAN	
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2018.....	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah	II-1
2.1.1.2. Topografi	II-3
2.1.1.3. Geologi	II-4
2.1.1.4. Hidrologi	II-5
2.1.1.5. Klimatologi	II-5
2.1.1.6. Penggunaan Lahan	II-7
2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	II-8
2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana	II-13
2.1.1.9. Aspek Demografi	II-14
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-23
2.1.2.1. Produk Domestik Bruto (PDRB)	II-23
2.1.2.1.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku	II-23
2.1.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	II-25
2.1.2.1.3. Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB	II-26
2.1.2.1.4. PDRB Per Kapita	II-27

2.1.2.1.5.	Inflasi	II-28
2.1.2.1.6.	Investasi.....	II-30
2.1.2.1.7.	Ekspor Impor.....	II-31
2.1.2.1.8.	Index GINI.....	II-31
2.1.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-32
2.1.2.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-32
2.1.2.2.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-33
2.1.2.2.3.	Kemiskinan	II-34
2.1.2.2.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-36
2.1.2.2.5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-36
2.1.2.2.6.	Angka Beban Tanggungan Penduduk (Dependency Ratio – DR)	II-37
2.1.2.2.7.	Konsumsi Rumah Tangga	II-37
2.1.2.3.	Fokus Seni Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Agama	II-38
2.1.2.3.1.	Seni Budaya	II-38
2.1.2.3.2.	Olah raga	II-39
2.1.2.3.3.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	II-40
2.1.2.3.4.	Agama	II-43
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-44
2.1.3.1.	Urusan Pelayanan Wajib	II-44
2.1.3.1.1.	Pendidikan	II-44
2.1.3.1.2.	Kesehatan	II-50
2.1.3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-55
2.1.3.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-62
2.1.3.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-67
2.1.3.1.6.	Sosial	II-73
2.1.3.1.7.	Ketenagakerjaan	II-76
2.1.3.1.8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-80
2.1.3.1.9.	Ketahanan Pangan	II-84
2.1.3.1.10.	Pertanahan	II-86
2.1.3.1.11.	Lingkungan Hidup	II-87
2.1.3.1.12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-91
2.1.3.1.13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-92
2.1.3.1.14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-95
2.1.3.1.15.	Perhubungan	II-100
2.1.3.1.16.	Komunikasi dan Informatika	II-102
2.1.3.1.17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-104
2.1.3.1.18.	Penanaman Modal	II-106
2.1.3.1.19.	Kepemudaan dan Olah raga	II-107
2.1.3.1.20.	Statistik	II-110
2.1.3.1.21.	Persandian	II-111
2.1.3.1.22.	Kebudayaan	II-112

2.1.3.1.23.	Perpustakaan	II-115
2.1.3.1.24.	Kearsipan	II-116
2.1.3.1.25.	Kelautan dan Perikanan	II-117
2.1.3.1.26.	Pariwisata	II-119
2.1.3.1.27.	Pertanian	II-120
2.1.3.1.28.	Energi dan Sumbang Daya Mineral	II-124
2.1.3.1.29.	Perdagangan	II-124
2.1.3.1.30.	Perindustrian	II-126
2.1.3.1.31.	Transmigrasi	II-127
2.1.3.2.	Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan	II-128
2.1.3.2.1.	Fungsi Lain-lain.....	II-128
2.1.3.2.2.	Keuangan	II-130
2.1.3.2.3.	Perencanaan Pembangunan	II-132
2.1.3.2.4.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II-134
2.1.3.2.5.	Penelitian dan Pengembangan	II-136
2.1.3.2.6.	Pengawasan	II-137
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-139
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-140
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-150
2.1.4.2.1.	Ketaatan Terhadap Perda RTRW	II-152
2.1.4.2.2.	Prasarana Jalan	II-154
2.1.4.2.3.	Drainase	II-157
2.1.4.2.4.	Kondisi Permukiman dan Infrastruktur	II-158
2.1.4.2.5.	Sumber Daya Air	II-159
2.1.4.2.6.	Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih	II-160
2.1.4.2.7.	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik	II-162
2.1.4.2.8.	Kondisi Pengelolaan Sampah	II-162
2.1.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	II-164
2.1.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-167
2.1.4.4.1.	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	II-167
2.1.4.4.2.	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	II-169
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rkpd Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II-170
2.2.1.	Evaluasi Hasil Pencapaian Sasaran RPJMD sampai dengan TW II Tahun 2018	II-170
2.2.2.	Evaluasi Hasil pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada TW II tahun 2018	II-184
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-192
2.3.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-192
2.3.1.1.	Pendidikan	II-192
2.3.1.2.	Kesehatan	II-192
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-193
2.3.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-193
2.3.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-194

2.3.1.6. Sosial	II-194
2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-195
2.3.2.1. Tenaga Kerja	II-195
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-195
2.3.2.3. Pangan.....	II-195
2.3.2.4. Pertanahan.....	II-196
2.3.2.5. Lingkungan Hidup	II-196
2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-197
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-197
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-198
2.3.2.9. Perhubungan	II-198
2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika	II-198
2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-199
2.3.2.12. Penanaman Modal	II-200
2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga	II-200
2.3.2.14. Statistik	II-201
2.3.2.15. Persandian	II-201
2.3.2.16. Kebudayaan	II-201
2.3.2.17. Perpustakaan	II-201
2.3.2.18. Kearsipan	II-201
2.3.3. Urusan Pilihan	II-202
2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan	II-202
2.3.3.2. Pariwisata	II-203
2.3.3.3. Pertanian	II-203
2.3.3.4. Pertanian Energi dan Sumber Daya Mineral	II-204
2.3.3.5. Perdagangan	II-204
2.3.3.6. Perindustrian	II-204
2.3.3.7. Transmigrasi	II-205
2.3.4. Fungsi Penunjang Pemerintahan	II-205
2.3.4.1. Perencanaan	II-205
2.3.4.2. Fungsi Penunjang Keuangan	II-206
2.3.4.3. Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat	II-206
2.3.4.4. Fungsi Penunjang Pengawasan	II-207
2.3.4.5. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	II-207
2.4. Isu Strategis	II-207
BAB III PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018.....	III-1
3.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2016 dan Perkiraan Akhir Tahun 2018	III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional TW II Tahun 2018	III-1
3.1.2. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2018 TW II	III-3
3.1.3. Deskripsi Umum Prediksi Perekonomian Kota Magelang Tahun 2017-2018	III-3

3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-8
3.2.1.	Proyeksi Keuangan dan Kerangka Pendanaan	III-10
3.2.2.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-11
3.2.3.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-24
3.2.4.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-29
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1.	Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah.....	IV-1
4.1.1.	Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021	IV-1
4.1.2.	Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021	IV-2
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	IV-6
4.2.	Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018	IV-26
4.2.1.	Tema Pembangunan Tahun 2018	IV-26
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	IV-28
4.3.	Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang.....	IV-133
4.3.1.	Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-133
4.3.2.	Pendekatan Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-133
4.4.	Arah Pengembangan wilayah Terpadu Kota Magelang	IV-136
4.4.1.	Arah Pengembangan Eksternal Wilayah	IV-136
4.4.2.	Arah Pengembangan Internal Wilayah	IV-137
4.5.	Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IV-147
BAB V	PERUBAHAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH	V-1
5.1.	Kategorisasi Rencana Program Prioritas	V-1
5.1.1.	Program Prioritas I.....	V-6
5.1.2.	Program Prioritas II.....	V-31
5.1.3.	Program Prioritas III.....	V-32
BAB VI	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	V-1
6.1.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MAGELANG TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah harus secara strategis mampu dirasakan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat. Pada prinsipnya pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah salah satunya adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur dan mewakili aspek asapek tersebut.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, yang pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan kekhasan daerah.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mendasarkan pada fakta bahwa aturan pelaksanaan di bawah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 belum terbit, maka kiranya masih relevan menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD dijadikan sebagai pijakan penyusunan perencanaan.

Mengacu seluruh regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005, sedang RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015. Sementara itu RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang No 1 Tahun 2016 .

Melihat berbagai asumsi yang terjadi sejauh pelaksanaan hingga triwulan kedua pelaksanaan RKPD Kota Magelang tahun 2018, adalah sebuah keniscayaan untuk dilakukan perubahan perencanaan. Beberapa kriteria yang diamanatkan, secara substansial memenuhi kriteria untuk dilakukannya perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 ini adalah:

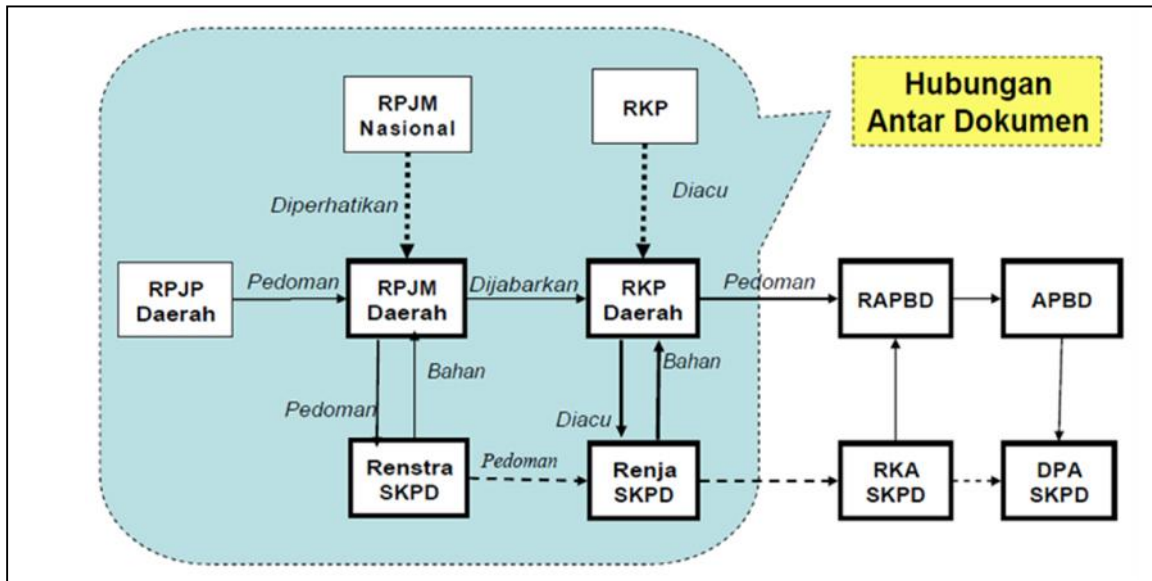
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam melaksanakan core businessnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kota yang berpedoman pada RPJMD Kota tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kota Magelang tahun 2016 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015, mengacu pada RPJMD Provinsi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018, serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

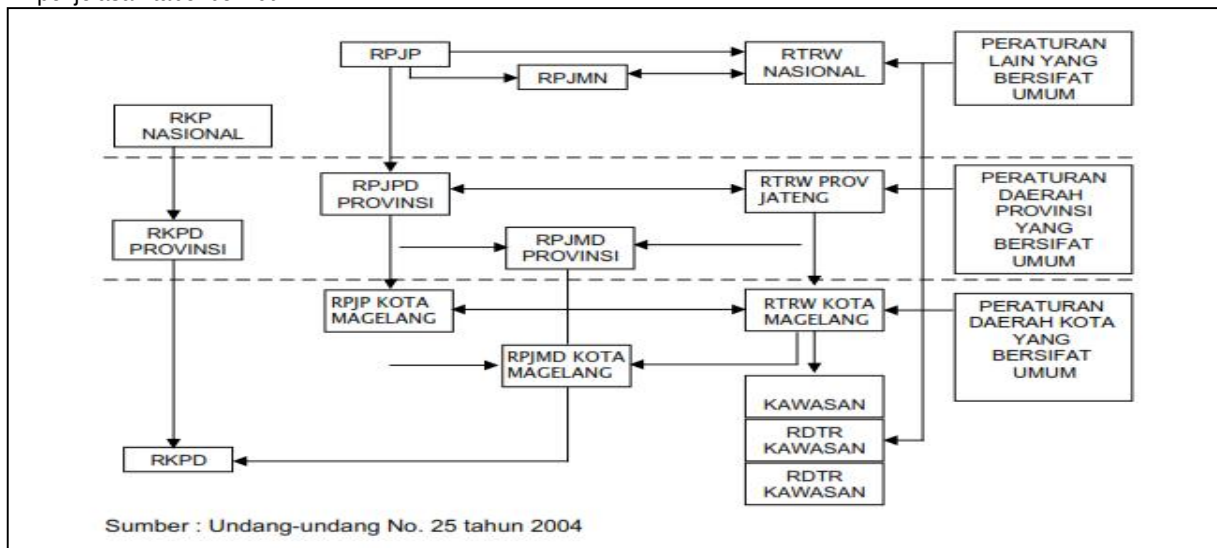
Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2018 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang), yaitu sebagai berikut:



Sumber : UU No 25 Tahun 2004

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya

Selain itu penyusunan RPKD Kota Magelang tidak terlepas dari dokumen tata ruang wilayah sebagaimana penjelasan tabel berikut ini :



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Gambar 1.3 Kedudukan Dokumen RPKD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial

Secara lengkap penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RPKD Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1.3.1 RPJM Nasional

Rujukan penting lainnya adalah RPJM Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Ada 3 (tiga) dokumen

sebagai lampiran dari Perpres Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Agenda Pembangunan Nasional", (ii) Buku II dengan judul: "Agenda Pembangunan Bidang", dan (iii) Buku III dengan judul: "Agenda Pembangunan Wilayah".

Sebagai penjabaran normatif perencanaan kedua RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, dan dengan demikian mengacu pada agenda agenda prioritas nasional, agenda prioritas bidang serta agenda pembangunan kewilayahan, diharapkan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 akan dapat ikut mewarnai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

1.3.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Perubahannya

RKPD Kota Magelang Tahun 2018 juga merujuk pada RKP Tahun 2018. Hal ini merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan sinergitas kebijakan dan dukungan pembangunan daerah Kota Magelang dengan kebijakan nasional. Pemerintah Kota Magelang berupaya semaksimal mungkin agar target target pembangunan nasional dapat tercapai dengan kontribusi yang diberikan dari pembangunan di Kota Magelang Tahun 2018.

1.3.3 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014. Menyesuaikan dengan situasi kondisi terkini serta mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2015-2016 pada tahap ini sedang dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0020975 Tanggal 27 Desember 2016 perihal Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2018, diharapkan setiap daerah agar Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan titik berat sebagai berikut :

1.3.3.1 Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mempedomani pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing (Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan tetap memperhatikan upaya untuk percepatan dan perwujudan sasaran utama pembangunan nasional.
4. Dukungan terhadap upaya perwujudan tujuan pembangunan nasional yaitu menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana dirumuskan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas "NAWA CITA" yang diejawantahkan dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :
 - a. Dimensi Pembangunan Manusia, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter;
 - b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri;
 - c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.
5. Mewujudkan pencapaian sasaran pokok pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018, meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan pada kisaran 5,9 - 6,2 %, melalui upaya peningkatan investasi pada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, memberikan pelayanan perijinan mudah dan cepat, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang kompetitif; pengembangan infrastruktur dan optimalisasi kawasan industri; peningkatan penyaluran kredit perbankan untuk usaha produktif.
 - b. Inflasi diprediksi pada kisaran $4,5 \pm 1$, dengan upaya menjamin kelancaran distribusi, ketersediaan dan pasokan kebutuhan pokok; menjaga ekspektasi positif masyarakat; meningkatkan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Kemiskinan diprediksi pada kisaran 10,40 – 9,93 %, diupayakan melalui :
 - 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
 - 2) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
 - 3) Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil.
 - 4) Sinergitas program nasional, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha dan perguruan tinggi dalam mendukung upaya penanganan kemiskinan.
 - d. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksi pada angka 4,13 %, dengan upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja dari low-skilled industries menjadi skills-based industries, perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja dengan investasi padat karya; serta perlindungan terhadap tenaga kerja.
6. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2016 dan rencana target capaian Tahun 2018, serta dinamika dan lingkungan strategis yang berkembang antara lain dokumen rencana tata ruang dan wilayah; rencana implementasi Sustainable Development Goals/SDGs Tahun 2016-2030.
 7. Membangun dan meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh stakeholder termasuk partai politik dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai bentuk mekanisme check and balances.
 8. Meningkatkan kelengkapan, akurasi dan validasi pemanfaatan data serta informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
 9. Meningkatkan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran; meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; serta mengutamakan belanja publik yang mampu memberikan dampak tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 10. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan inovasi pemungutan pajak dan optimalisasi pemanfaatan aset.

1.3.3.2 Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah

1.3.3.2.1 Isu Strategis Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Tengah, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Penduduk miskin di Jawa Tengah bulan Maret Tahun 2016 sebanyak 4,507 juta jiwa (13,27%) menurun dibandingkan bulan Maret Tahun 2015 sebanyak 4,577 juta jiwa (13,58%). Kecilnya penurunan angka kemiskinan disebabkan antara lain meningkatnya garis kemiskinan sebagai akibat kenaikan harga komponen pembentuk garis kemiskinan, utamanya

pada kelompok bahan makanan, rokok dan tembakau. Di samping itu juga, beberapa intervensi terkendala persyaratan hibah.

2. Pengangguran

Pengangguran di Jawa Tengah pada periode Bulan Agustus Tahun 2016 sebanyak 0,80 juta jiwa (4,63 %) mengalami penurunan disbanding Bulan Agustus Tahun 2015 sebanyak 0,86 juta jiwa (4,99 %). Permasalahan terkait dengan pengangguran antara lain adalah keterbatasan lapangan pekerjaan serta rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang berpengaruh terhadap daya saing dalam pasar kerja.

3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang dominan dan strategis untuk mendukung daya saing wilayah. Permasalahan dalam pembangunan infrastruktur antara lain :

- Masih diperlukan dukungan dari Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan pemerataan kualitas, kapasitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah dan antar kewenangan.
- Tingkat kerawanan infrastruktur akibat bencana atau kerusakan lainnya memerlukan pembangunan jalur-jalur alternative.
- Tingginya pertumbuhan kendaraan dan kecelakaan lalu lintas (terutama di perlintasan sebidang dengan kereta api dan blackspot lainnya) memerlukan pemenuhan sarana prasarana keselamatan jalan serta pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi antar moda dan bersifat massal.
- Pertumbuhan sektor industri, pariwisata dan wilayah perkotaan diperlukan akselerasi pemenuhan cakupan akses kebutuhan air dan sanitasi yang layak.
- Tingginya frekuensi bencana banjir dan kekeringan serta masih dibutuhkannya sumber daya air untuk pertanian memerlukan penanganan sungai, pembangunan/revitalisasi waduk dan embung sebagai sumber air baku serta pembangunan sistem jaringan irigasi pertanian.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan sebagai salah satu isu penting dalam pembangunan Jawa Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain belum memadainya penyediaan infrastruktur sektor pendukung pangan, belum meratanya distribusi dan stabilitas harga pangan, belum berdaulatnya pangan lokal, masih lemahnya pengawasan keamanan pangan dan masih diperlukannya penguatan kelembagaan petani termasuk upaya peningkatan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

5. Kedaulatan Energi

Ketergantungan sumber energi fosil dalam pembangunan industri, penggunaan listrik serta moda transportasi masih cukup tinggi. Di sisi lain, potensi sumber energi alternatif belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan sumber energi baru terbarukan.

6. Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas dan Demokratisasi

Sebagai langkah perwujudan pelayanan publik yang prima dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan komitmen terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disamping hal tersebut, dalam rangka antisipasi pelaksanaan pilkada serentak serta maraknya gerakan radikal diperlukan proporsionalitas antara jumlah penduduk dengan aparat keamanan melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah.

Selanjutnya guna mewujudkan iklim demokrasi masih diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilu. Hal tersebut dilakukan dengan optimalisasi pendidikan politik masyarakat termasuk membuka akses dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui forum rembukan.

1.3.3.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 ditujukan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari”, dengan prioritas meliputi :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
 - b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
 - c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;
 - d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisierja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
 - e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata.
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, dengan fokus pada :
 - a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa : beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu;
 - b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
 - c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja;

- pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
- e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
 - f. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
 - g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015.
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, dengan fokus pada :
- a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB.
 - b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
 - c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB.
 - d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
 - f. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada :
- a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;
 - b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
 - c. Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
 - d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu;
 - e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;
 - f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
 - h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE);
 - i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap energy mix di Jawa Tengah.
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada :
- a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (bottle-neck), ruas penghubung wilayah pantai utara-

- selatan, ruas jalan di perbatasan, peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian.
- b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (blackspot) dan penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan.
 - c. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi, penanganan sungai dan pantai serta penanganan bangunan penampungan air pada daerah lumpung pangan, rawan banjir dan kekeringan.
 - d. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan/TPA.
 - e. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah.
 - f. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana.
 - g. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana.
 - h. Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat.
 - i. Pengembangan masyarakat tangguh bencana.
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada :
- a. Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi.
 - c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu :
 - 1) Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan agent of change (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara.
 - 2) Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online untuk percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
 - 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik.
 - 4) Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural.
 - 5) Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP.
 - 6) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka.
 - 7) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala.

- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun Standart Operasional Prosedure dan penyediaan media pengaduan masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- e. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (merit system).
- f. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- g. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong.
- h. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat.
- i. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkul upaya destruktif.
- j. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri.

Selanjutnya, untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah, agar Kabupaten/Kota memprioritaskan program/kegiatan pembangunan pada Tahun 2018 yang dilaksanakan melalui :

- 1) Pola sharing program dan pendanaan untuk upaya pengurangan kemiskinan, dengan menyediakan :
 - a. Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar.
 - b. Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dengan dukungan sharing Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Akses infrastruktur pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan melibatkan peran aktif dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Dukungan pembangunan "Program 1.000 Embung" sesuai kewenangan Kabupaten/Kota sebagai upaya meningkatkan tampungan cadangan air di wilayah rawan kekeringan.
- 3) Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diprioritaskan pada:
 - a. Peningkatan ruas jalan perbatasan, ruas jalan yang mempunyai akses langsung atau merupakan jalur alternatif jalan nasional/provinsi, peningkatan aksesibilitas daerah terisolir dan kemiskinan tinggi, ruas jalan pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian.
 - b. Peningkatan sistem jaringan irigasi dan pembangunan bangunan penampungan air (embung) pada daerah pertanian produktivitas tinggi/lumbung pangan dan daerah rawan kekeringan.
 - c. Pembangunan sarana prasarana sanitasi komunal, penataan drainase permukiman pada daerah kumuh dan rawan banjir perkotaan serta Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lokal non regional.
 - d. Pengembangan sistem transportasi massal pada daerah perkotaan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana keselamatan lalu lintas pada ruas jalan rawan kecelakaan dan kemacetan terutama di perlintasan sebidang dengan rel kereta api.

- e. Pemenuhan peningkatan kualitas, kapasitas dan jangkauan pelayanan kesehatan berupa pembangunan/rehabilitasi puskesmas, rumah sakit dan sarpras kesehatan lainnya.
- f. Peningkatan daya tarik/amenitas di obyek pariwisata unggulan dan pembangunan sarpras ekonomi kerakyatan berupa pasar tradisional.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
- h. Rintisan Model Desa Berdikari.
- i. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.
- j. Pendampingan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

1.3.4 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 secara konsisten diupayakan untuk memperhatikan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif, berwawasan lingkungan dengan ketaatan terhadap tata dan pola ruang. Dengan demikian pengendalian terhadap pelanggaran dan penggunaan lahan tetap terjaga. Pada akhirnya tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan tetap berwawasan lingkungan dan mampu mengurangi kesejangan antar wilayah di Kota Magelang.

1.3.5 RPJMD Kota Magelang

RKPD Kota Magelang Tahun 2018 ini merupakan tahun kedua perencanaan RPJMD Kota Magelang 2016-2021, untuk dilaksanakan tahun 2018. Tema dasar perencanaan tahun pertama adalah Kreatif dan Inovatif bersama Mitra.

Tema ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2017 untuk diimplementasikan melalui RKPD tahun 2018. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Pada tahun 2017-2018 ini diasumsikan:

- (i) Sudah terbentuk tata kelola organisasi pemerintahan dan manajemen kepegawaian sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (ii) Sudah terbentuk rencana aksi kemitraan.

Fokus prioritas tahap ini:

1) Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel:

- pemerintah Kota Magelang siap membangun berbasis prestasi capaian kinerja yang terukur baik;
- kesiapan menuju operasionalisasi smart city
- Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik
- Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik
- kesiapan manajemen pengelolaan kota berbasis eco green city;

2) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat

- kesiapan menuju kategori baik untuk setiap penilaian indikator kesejahteraan masyarakat

3) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah:

- a. Kesiapan pemenuhan sarpras pendukung daya saing: Tingkat konektivitas yang terintegrasi antara sistem

transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk kondusivitas akses pengembangan usaha; Peningkatan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan

- b. Produktivitas daerah : Peningkatan Produktivitas daerah, kapasitas fiskal daerah, % Investasi daerah, % pertumbuhan PAD
 - c. Kepastian hukum usaha sehat: Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan
 - d. Kesiapan Kualitas SDM: Tingkat pendidikan, kompetensi teknologi dan keterampilan tersertifikasi;
 - e. kondusivitas daerah: keamanan yang terkendali (angka kriminalitas, angka gangguan trantibum, angka pelanggaran perda, dll)
- 4) review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya
- 2) Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
- 3) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat
- 4) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi
- 5) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi
- 6) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 7) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset;
- 8) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota
- 9) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah
- 10) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat
- 11) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan
- 12) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan
- 13) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan
- 14) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan
- 15) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- 16) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender
- 17) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik

Meskipun arah kebijakan pemandu perencanaan tahun 2017 sebagian besar sama dengan yang digunakan pada perencanaan tahun 2016, namu berbeda pada penekanan.Tahun 2016 tekanan pada upaya inisiasi penyiapan kerangka kerja. Fokus arah kebijakan perencanaan tahun 2017 (untuk diimplementasikan tahun 2018) ditekankan pada

tindaklanjutan rencana aksi dari hasil kajian kerangka kebutuhan yang dihasilkan pada tahun 2017 (hasil arah kebijakan perencanaan tahun 2016)

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2017 untuk diimplementasikan tahun 2018 adalah:

- 1) Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- 2) Urusan pendidikan;
- 3) Urusan kesehatan;
- 4) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 5) Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 6) Urusan sosial;
- 7) Urusan komunikasi dan informatika;
- 8) Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 9) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 10) Urusan perdagangan;
- 11) Urusan perpustakaan;
- 12) Urusan perindustrian;
- 13) Urusan pariwisata;
- 14) Urusan pertanian;
- 15) Urusan perikanan dan kelautan.

1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 juga memperhatikan beberapa dokumen pembangunan sektoral baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Magelang. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral dimaksud antara lain : Masterplan Kota Sejuta Bunga, Pencapaian SDGS, Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana dan Pedoman PUG di Jawa Tengah.

1.3.7 Renja – OPD

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2018 yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD Kota Magelang Tahun 2018, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 bersama ini kami sampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2018 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja OPD Tahun 2018 tersebut diharapkan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja OPD Tahun 2018, adalah sebagai berikut:
 - a. Rancangan Perubahan Renja OPD Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja OPD Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018 yang mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

- periode sebelumnya, Triwulan I dan Triwulan II sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- b. Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:
 - 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
 - 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
 - 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2017 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2018; dan/atau
 - 4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
 - c. Mengacu pada hasil pelaksanaan s.d proyeksi Triwulan II RKPD Tahun 2018, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja OPD Tahun 2018, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018.
 - e. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
 - f. Substansi khususnya terkait matriks rancangan Perubahan Renja OPD memuat:
 - 1) program dan kegiatan;
 - 2) lokasi kegiatan;
 - 3) indikator kinerja;
 - 4) kelompok sasaran; dan
 - 5) pagu indikatif dan prakiraan maju
 - g. Penyusunan Perubahan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD.
 - h. Penyusunan program dan kegiatan Perubahan Renja OPD untuk mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
 - i. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Perubahan Renja OPD memperhatikan pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
2. Perubahan Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD, program dan kegiatan yang ada di Perubahan Renja OPD, harus yang tercantum dalam Renstra OPD Tahun Rencana. Apabila ada kegiatan alternatif dan/atau baru, harus memenuhi:
 - a. Program dan kegiatan alternatif yaitu program dan kegiatan OPD, lintas OPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan.
 - b. pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
 - c. Program dan kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra OPD dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
 - 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

3. Memperhatikan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana Lampiran Surat Edaran ini, dengan harapan agar dapat memberikan koridor dan standar format baik dari segi cakupan substansi maupun tingkat kerincian dokumen Renja-OPD sehingga dapat memudahkan proses penelaahan dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018.
4. Untuk mendukung akuntabilitas dari program-kegiatan yang diusulkan dalam Renja OPD harus dilengkapi dengan Pra RKA dengan semaksimal mungkin mengimplementasikan Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Magelang.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2018.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dengan mandasikan pada hasil pencapaian indikator kinerja pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 hingga Triwulan II dan kriteria kriteria yang mengharuskan perlunya dilakukan perubahan RKPD sebagaimana diatur di dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

1.5 Sistematika RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2018 Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, hasil evaluasi dan analisa pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II. Selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian berbagai aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan dan isu strategis hingga Triwulan II Tahun 2018.
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2018 dan perkembangan kondisi ekonomi hingga Trlwulan II tahun 2018, serta tantangan dan target makro ekonomi tahun 2018 yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 hingga triwulan II dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan hingga Triwulan II Tahun 2018, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
BAB VI	PENUTUP Berisi simpulan dan penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Magelang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat agar dimensi waktu pelaksanaan dalam perubahan perencanaan yang hanya pada Triwulan IV Tahun 2018 dapat berjalan secara efektif.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Magelang merupakan salah satu Kota terkecil di wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah Kota Magelang 1.812 Ha (18,12 km²) dan secara administratif terbagi atas 3 kecamatan (Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan) dan 17 kelurahan dengan yang rata-ratanya luas wilayah per kelurahan tidak lebih dari 2 km². Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kota Magelang mendapatkan luasan wilayah terkait dengan perluasan batas wilayah Kota Magelang seluas 0.03 km². Total luasan wilayah Kota Magelang saat ini seluas 1.854 Ha (18,54 km²). Kedudukan Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah di gambarkan pada peta berikut :



Sumber : Dokumen Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Magelang, 2013

Gambar 2 - 1 Peta Kedudukan Kota Magelang terhadap Jawa Tengah

Secara geografis Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang dengan batas wilayah administratif sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan desa Jambewangi, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang; sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Posisi Kota Magelang yang strategis di jalur persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung dan pada persimpangan jalur wisata lokal dan regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass- dataran tinggi Dieng menjadikannya sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam katagori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Purwo-manggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi.

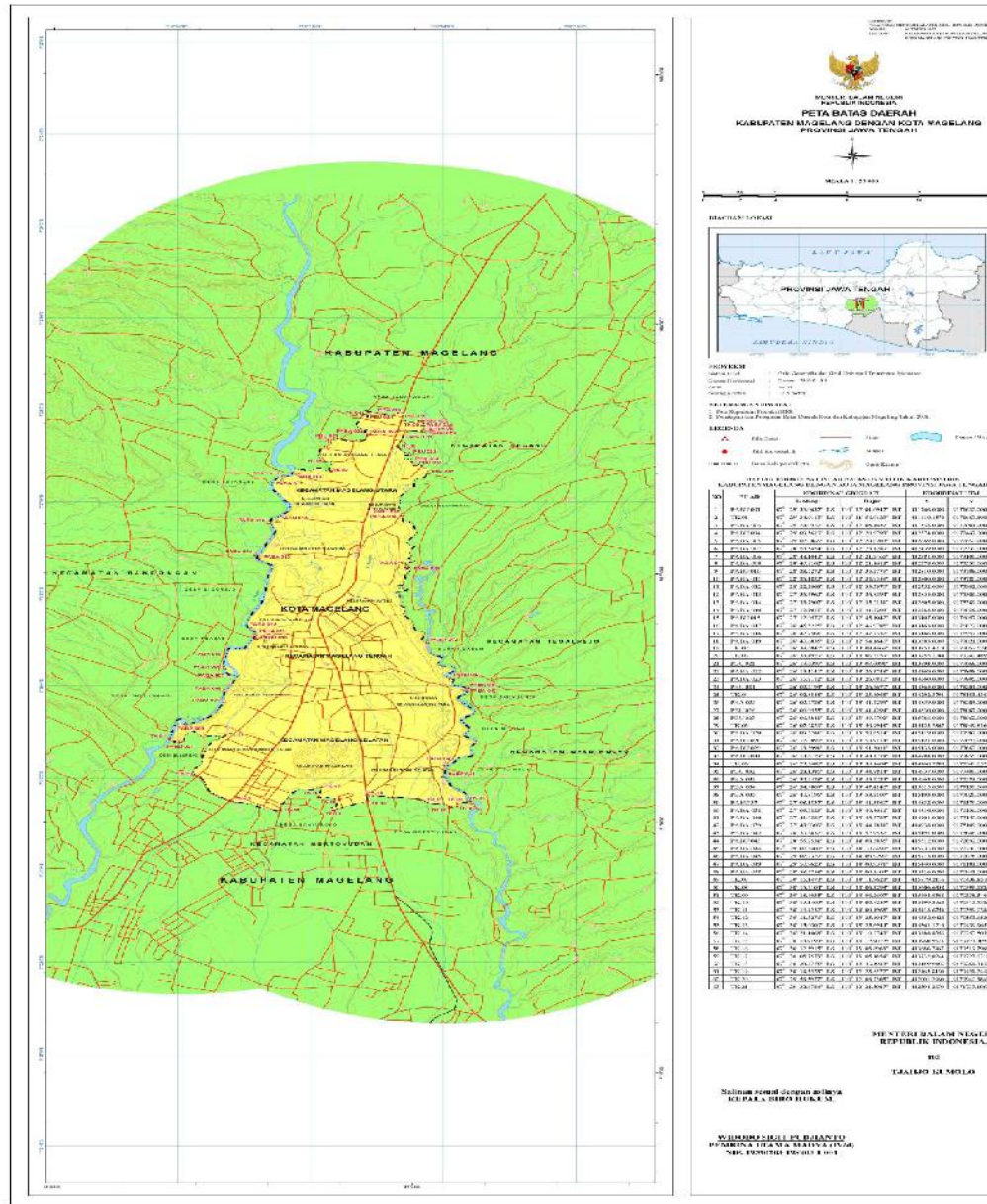
Gambaran secara rinci luas tiap kecamatan/ kelurahan di Kota Magelang Tahun 2017 sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2 - 1
Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (Ha)	Persentase (%)
01.	KEC. MAGELANG SELATAN	713.15	38,47
	1. Kel. Jurangombo Utara	65.66	3.54
	2. Kel. Jurangombo Selatan	212.07	11.44
	3. Kel. Magersari	156.49	8.44
	4. Kel. Tidar Utara	110.11	5.94
	5. Kel. Tidar Selatan	131.51	7,09
	6. Kel. Rejowinangun Selatan	37.31	2,01
02.	KEC. MAGELANG TENGAH	510.11	27.52
	1. Kel. Magelang	123.67	6.67
	2. Kel. Kemirirejo	85.81	4,63
	3. Kel. Cacaban	85.75	4,63
	4. Kel. Rejowinangun Utara	90.50	4.88
	5. Kel. Panjang	35.52	1.92
	6. Kel. Gelangan	88.87	4,79
03.	KEC. MAGELANG UTARA	630.37	34.01
	1. Kel. Wates	118.0	6,37
	2. Kel. Potrobangsari	135.13	7,29
	3. Kel. Kedungsari	132.33	7.14
	4. Kel. Kramat Utara	99.78	5.38
	5. Kel. Kramat Selatan	145.14	7.38
	JUMLAH	1853.64	100,00

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2017.

Luas Kota Magelang berdasarkan Permendagri nomor 64 Tahun 2017 sebesar 1853.64 Ha sedikit lebih luas dari pada luas Kota Magelang pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1812 Ha. Adapun batas wilayah untuk Kota Magelang berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017, sebagai berikut :



Sumber: Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

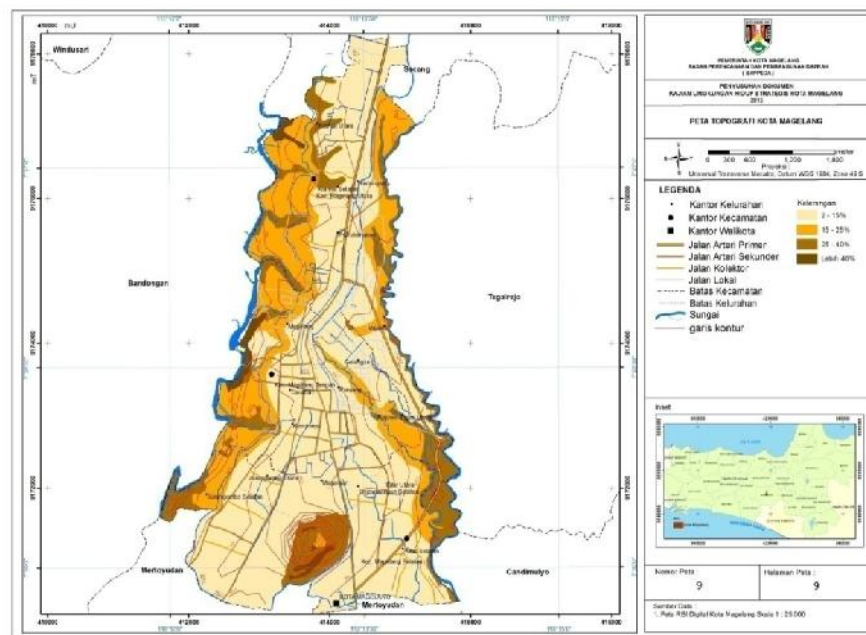
Gambar 2 - 2 Batas Wilayah Kota Magelang sesuai dengan Permendagri 64 Tahun 2017

2.1.1.2 Topografi

Secara topografi dan fisiografis, Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang di kelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing, Pegunungan Ganti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Kemiringan topografi yang terjal berada di bagian barat (sepanjang Sungai Progo) dan di sebelah timur (di sekitar Sungai Elo) sampai dengan kemiringan 15-30%. Di sekitar daerah timur kompleks AKMIL ke Utara hingga daerah di sekitar RSJ Magelang, dengan kemiringan 2-5%.

Morfologi pendataran antar gunung api, medannya landai, berelief sedang-halus. Dilihat dari ketinggiannya, Kota Magelang berada di ketinggian antara 375–500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl. Keberadaan Gunung Tidar selain sebagai kawasan lindung dengan kemiringan hingga 30–40% ini berada di sebelah timur kompleks AKMIL, berfungsi sebagai paru-paru kota yang menjadikan iklim Kota Magelang selalu berhawa sejuk .

Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar.



Sumber : Dokumen Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Magelang, 2013

Gambar 2 - 3 Gambar Peta Topografi Kota Magelang

2.1.1.3 Geologi

Kondisi geologi Kota Magelang tidak bisa dilepaskan dari keberadaannya di tengah wilayah Kabupaten Magelang, dimana secara umum wilayah tersebut tersusun dari 4 formasi batuan, yaitu batuan sedimen, batuan gunung api ,batuan beku trobosan serta batuan endapan alluvial. Dalam klasifikasi tersebut, formasi batuan di Kota Magelang termasuk batuan gunung api, sehingga litologi yang menempati Kota Magelang sebagian besar batu pasir tufaan (lepas) dan breksi.

Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kwarter yang mempunyai sifat sangat poreous (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati nol (0). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5kg/ cm2 – 19 kg/ cm2. Ditinjau dari satuan morfologi, pendataran alluvium tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Tersusun oleh batuan hasil rombakan batuan yang lebih tua, yang bersifat lepas.

Umumnya berada pada ketinggian antara 250 – 350 m, berelief halus dengan kemiringan sebesar 3-8 %. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola Sum Meander.

Kewaspadaan pada resiko bencana terutama pada pembangunan yang dilakukan di daerah bantaran sungai dengan kelerengan curam adalah tanah longsor mengingat sebagian besar tanah berupa batuan pasir dan breksi/ konglomerat yang memiliki kelulusan air yang tinggi serta tingkat kelerengan alam yang cukup curam. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait pengaturan pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan mengingat porositas tanah yang cukup tinggi

2.1.1.4 Hidrologi

Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan air limbah dan air hujan. Potensi air hujan perlu dilestarikan dengan membuat sumur resapan. Sedangkan potensi air tanahnya juga tergantung pada pelestarian pemanfaatan air permukaan yaitu air hujan. Air tanah di Kota Magelang kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan aquifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dikembangkan (dipompa).

Untuk kebutuhan air bersih Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada sumber-sumber air yang ada di luar wilayah Kota Magelang yaitu dari mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan satu-satunya mata air yang berada di Kawasan Kota Magelang adalah Mata Air Tuk Pecah. Di kawasan Kota Magelang juga terdapat 2 (dua) saluran air yaitu: (i) Kali Bening (Kali Kota), dan (ii) Kali Progo Manggis. Berdasarkan data pemakaian air minum pada tahun 2016 sebesar 7.606.319 m³ . Apabila di bandingkan dengan data tahun 2015 sebesar 7.434.942 m³ maka terjadi kenaikan kebutuhan dari penggunaan air PDAM di Kota Magelang. Sementara data tahun 2017 penggunaan air PDAM sebanyak 7.633.558 m³/ tahun. Jumlah pemakaian air minum terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Apabila perkiraan kebutuhan air bersih perorangan adalah sebesar 60 liter/hari maka jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2017 kapasitas mata air yang tersedia masih mampu untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Magelang walaupun masih mengandalkan sumber air yang berasal dari kabupaten Magelang. Namun hal ini perlu menjadi perhatian untuk ke depan mengingat semakin hari kebutuhan akan air bersih akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk padahal untuk memenuhi kebutuhan akan air Kota Magelang masih bergantung pada mata air yang berada di daerah lain.

2.1.1.5 Klimatologi

Kota Magelang termasuk wilayah beriklim sejuk. Data klimatologi pada tahun 2017 menurut Badan Pengelolaan Sumber Daya Air, dalam kurun waktu Tahun 2017 total rata – rata curah hujan sebanyak 238.76 mm sedangkan pada tahun 2016 total curah hujan sepanjang tahun sebanyak 257.85 mm, Jumlah ini relatif lebih tinggi apabila di bandingkan dengan data pada tahun 2015 sebanyak 181.99 mm namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Berdasarkan data iklim rata-rata curah hujan bulanan di kawasan Kota Magelang dalam jangka waktu lima tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 2
Rata-Rata Curah Hujan Per Hari Kota Magelang (mm) Tahun 2012 sd Tahun 2017

Bulan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01. Januari	22.58	19.04	16.61	16.92	6.86	29.71
02. Februari	23.44	18.63	22.05	27.76	20.09	19.57
03. Maret	24.69	22.00	19.21	22.09	16.66	26.29
04. April	20.28	15.74	23.47	22.50	19.05	29.29
05. Mei	11.89	17.94	17.77	6.63	15.86	28.33
06. Juni	20.40	10.44	8.25	44.67	39.27	12.70
07. Juli	10.00	17.00	13.57	0.00	19.09	13.33
08. Agustus	0.00	0.00	5.40	0.00	25	-
09. September	0.00	2.00	2.33	0.00	28.89	32.00
10. Oktober	16.80	20.44	16.91	0.00	25.25	11.50
11. November	20.42	13.00	12.56	12.87	24.2	14.76
12. Desember	17.70	14.25	23.12	28.55	17.63	21.28
Jumlah	188.20	170.48	170.59	181.99	257.85	238.76
Rata-rata	15.68	14.21	14.22	15.17	21.49	19.90

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2017 Diskominsta Kota Magelang, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.

Curah hujan dalam semester pertama tahun 2017, memiliki kecenderungan lebih tinggi apabila di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Rata – rata curah hujan dalam enam bulan pertama di tahun 2017 sebesar 23.55 mm/hari. Rata – rata ini lebih tinggi apabila di bangikan dengan tahun 2016, di mana rata – rata curah hujan per tahunnya sebesar 21.49 mm/hari. Namun kondisi pada semester 2 tahun 2017 rata – rata curah hujan cenderung lebih kecil apabila di bandingkan pada semester pertama tahun 2017 walaupun pada bulan september sempat mengalami peningkatan rata – rata curah hujan yang relait tinggi yaitu 32 mm/hari. Curah hujan pada tahun 2016 lebih tinggi di bandingkan dengan tahun sebelumnya dan merupakan rata-rata curah hujan tertinggi dalam lima tahun terakhir ini. Curah hujan tertinggi pada semester pertama 2017 biasanya terjadi pada bulan – bulan tertentu seperti bulan Januari, Pebruari, Maret dan April, di mana hari hujannya sekitar 20an hari hujan. Hari hujan tertinggi terjadi di bulan Januari dan Pebruari sebanyak 24 hari hujan dan 23 hari hujan. Tingginya curah hujan pada bulan – bulan tertentu di sepanjang tahun 2016 membawa akibat seperti banjir di beberapa ruas jalan yang disebabkan karena resapan yang kurang, bencana yang di sebabkan karena adanya pohon yang tumbang tumbang dan bencana longsor.

Kondisi Topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi Kota Magelang serta posisi Kota Magelang yang dikelilingi oleh sungai dengan kontur wilayah yang curam dan memiliki kemiringan relatif tinggi sehingga Ke depan hal ini menjadi perhatian serta menjadi kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin timbul karena cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan seperti bencana longsor, banjir atau bencana lain seperti wabah penyakit perlu di antisipasi sejak dini terutama pada daerah - daerah dengan kelerengan curam serta sifat tanah yang memiliki kelulusan air yang tinggi.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan di Kota Magelang sesuai dengan karakteristik perkotaan banyak di dominasi oleh pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman. Tingginya kebutuhan akan lahan untuk rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang maupun untuk kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan berpengaruh pada tingginya alih fungsi lahan pertanian. Salah satu sisi lain yang perlu diperhatikan terkait menurunnya tingkat dan fungsi tanah menjadi lahan kritis, menurunnya daya dukung lingkungan dan ketidaktercapaian target 30% dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang serta keterbatasan kebutuhan penyediaan air bersih dan fasilitas umum seiring dengan pertumbuhan bangunan di kota Magelang.

Gambaran penggunaan lahan di Kota Magelang dari tahun 2011 hingga tahun 2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 - 3
Luas Tanah (Ha) Menurut Penggunaannya Tahun 2011-2017

No	Jenis Sawah	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	TANAH SAWAH	201.42	199.96	197.64	194.20	191.76	185.23	183.67
	Pengairan Teknis	201.42	199.96	197.64	194.20	191.76	185.23	183.67
	Pengairan ½ Teknis	-	-	-	-	-	-	-
	Tadah Hujan	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.	TANAH KERING	1,610.58	1,612.03	1,614.35	1,617.79	1,620.23	1,626.76	1,628.33
	Pekarangan/lahan Untuk Bangunan dan Halaman	1.339.31	1.341.48	1.344.45	1.348.13	1.351.14	1.358,85	1.360.75
	Tegal/kebun/Ladang/Huma	10.11	9.25	8.60	8.36	7.79	6.39	6.05
	Tambak	-	-	-	-	-	-	-
	Kolam/Tebat/Empang	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68
	Perkebunan/Hutan Rakyat	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	99.78	99.78
	Industri	51.97	51.97	51.97	51.97	51.97	51.97	51.97
	Lainnya (Makam dll)	102.95	103.09	103.09	103.09	103.09	103.09	103.09
	JUMLAH	1,812.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2017 Diskominsta Kota Magelang data diolah.

Dari luas lahan secara keseluruhan di Kota Magelang pada tahun 2017, terdiri dari lahan untuk penggunaan Tanah Sawah sekitar 183.67 Ha dan Tanah Bukan Sawah (Tanah Kering) sekitar 1.628,33 Ha. Apabila di bandingkan dengan data – data tahun sebelumnya maka alih fungsi lahan pada tahun 2016 relatif lebih kecil. Data dari kantor BPN Magelang mencatat adanya perubahan alih fungsi lahan di tahun 2016 seluas 1.8430 Ha sementara tahun sebelumnya sebesar 7.9331 Ha. Adapun alih fungsi lahan pada tahun 2016 dengan rincian alih fungsi lahan sawah seluas 1.559 Ha

dan tegal/ kebun seluas 0.34 Ha. Kebutuhan terbesar alih fungsi lahan pertanian di dominasi oleh alih fungsi lahan menjadi perumahan/halaman/ bangunan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan permukiman dan fasilitas umum di Kota Magelang. Data dari BPN Kota Magelang mencatat bahwa tanah yang beralih fungsi menjadi perumahan/ halaman/ bangunan seluas 1.897 Ha Ha. Tingginya Alih fungsi lahan pertanian tersebut bisa dilihat dari beberapa tahun terakhir ini. Data Luas lahan pengairan teknis pada tahun 2011 seluas 201.42 Ha menjadi 183.67 Ha pada tahun 2017 atau mengalami penyusutan setiap tahunnya rata-rata seluas ± 2.54 Ha. sementara untuk alih fungsi lahan tegal/kebun/lading/huma berkurang dari 10.11 Ha pada tahun 2011 menjadi 4.06 Ha di tahun 2016 atau mengalami penyusutan sebesar rata-rata seluas ± 0.58 Ha setiap tahunnya

Ke depan Pemerintah Kota Magelan harus berupaya lebih keras dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian selain upaya – upaya yang telah dilakukan selama ini misalnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan – kawasan permukiman yang padat penduduk. selain itu perlu pula lebih cermat terkait dengan perijinan pembangunan yang harus sesuai dengan peruntukkan penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Magelang, sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031 akan lebih diarahkan untuk menjadi kota jasa. Faktor pendukung sebagai kota jasa, adalah posisi strategis kota yang berada pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional yang dipadukan dengan penataan fisik wajah kota, akan menjadi potensi yang dominan dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa.

Kedudukan Kota Magelang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kota Magelang menjadi PKW untuk Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG.

Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a) Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
- b) Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
- c) Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- d) Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
- e) Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
- f) Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
- g) Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem perkotaan terdiri dari beberapa sistem, yakni pusat

pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan, sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya. Sistem pusat-pusat pelayanan terdapat dalam tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mana masing-masing mempunyai fungsi tertentu.

Potensi Pengembangan Kota Magelang sebagaimana terdapat dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Lindung

Arahan penggunaan lahan kawasan lindung Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah:

- Kawasan Perlindungan Setempat meliputi : sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (hutan kota). Kota Magelang memiliki kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kota, yaitu kawasan konservasi Gunung Tidar.
- Kawasan Rawan Bencana Longsor merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Daerah-daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kota Magelang meliputi daerah yang terdapat di sekitar DAS Progo dan Elo.

b. Kawasan Budidaya

Arahan penggunaan lahan kawasan budidaya Kota Magelang berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah :

- Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 701,36$ ha. Secara eksisting perumahan di Kota Magelang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, sehingga pengembangannya dimasa mendatang diarahkan secara vertikal. Kawasan yang masih memungkinkan adanya pengembangan permukiman, BWK III dan V.

- Kawasan Perdagangan/Jasa

Pengembangan kawasan perdagangan/jasa diarahkan di sekitar jalan arteri primer di BWK IV khusus untuk perdagangan/jasa skala regional, jalan arteri sekunder di BWK I, BWK II, BWK IV dan BWK V dan jalan lokal primer/sekunder di BWK I dengan luas keseluruhan $\pm 120,86$ ha.

- Kawasan Perkantoran

Fasilitas perkantoran utama yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi perkantoran pusat pemerintahan, kantor dinas/instansi pemerintahan Kota Magelang, kantor instansi vertikal di Kota Magelang, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas/ kegiatan lain yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/olahraga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 48,76$ ha.

- Kawasan Pendidikan

Pengembangan fasilitas pendidikan diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang agar sistem pelayanan kepada masyarakat merata. Luas keseluruhannya $\pm 107,92$ ha.

- Kawasan Kesehatan

Rencana pengembangan fasilitas kesehatan diarahkan tersebar pada seluruh wilayah perkotaan guna pemerataan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kawasan kesehatan diarahkan di BWK I, BWK II, BWK III dan BWK V dan luas keseluruhan $\pm 42,46$ ha.

- Kawasan Peribadatan

Ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Magelang jika dilihat pada kondisi eksisting yang ada saat ini sudah sangat mencukupi. Sehingga dalam pengembangannya hanya berorientasi pada perbaikan atau peningkatan kondisi dari fasilitas peribadatan yang ada. Pengembangan kawasan peribadatan penting diarahkan di seluruh unit BWK dengan luas keseluruhan $\pm 2,80$ ha.

- Kawasan Rekreasi / Olah Raga

Rencana pengembangan kawasan rekreasi di Kota Magelang diarahkan dalam dua bentuk, yaitu rekreasi terbuka dan rekreasi tertutup. Untuk rekreasi terbuka direncanakan dengan memanfaatkan arena olahraga, lapangan dan taman-taman kota yang direncanakan ada di setiap pusat kawasan. Untuk rekreasi yang tertutup direncanakan berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena permainan dan sebagainya. Fasilitas rekreasi tersebut berada pada kawasan pusat kota dan sub pusat kota, serta kawasan perdagangan terutama yang berupa pasar swalayan.

Fasilitas dan/atau kegiatan lain yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan rekreasi / olahraga antara lain fasilitas rekreasi / olah raga skala lokal, kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, gedung pertemuan, gedung kesenian / pertunjukan, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan rekreasi olah raga diarahkan di BWK II, BWK III dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 89,39$ ha.

- Kawasan Industri / Perdagangan

Dalam penataan ruang untuk industri, diprioritaskan untuk industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang rata-rata berkembang di kawasan permukiman, sehingga perlu diatur dengan dukungan penyediaan prasarana sarana seperti pengelolaan limbah dan showroom sekaligus outlet sebagai sarana promosi dan pemasaran. Pengembangan kawasan industri/ perdagangan diarahkan di BWK IV dengan luas keseluruhan $\pm 68,03$ ha.

- Kawasan Militer

Sebagaimana kondisi yang ada saat ini, di luar kawasan-kawasan milik TNI yang pemanfaatannya untuk fungsi non kemiliteran lain (seperti lapangan golf, gedung pertemuan A. Yani, dan lainnya) berada di BWK II, BWK III dan BWK V. Luas keseluruhan $\pm 151,05$ ha.

- Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian diarahkan di BWK II, BWK III, BWK IV dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 185,56$ ha.

- Kawasan Terbuka Non Hijau

Adapun RTNH yang ada di Kota Magelang, meliputi : plasa, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, pembatas (median jalan), dan koridor rumah. Pengembangan RTNH merupakan salah satu alternatif untuk penganti RTH yang bisa di terapkan pada kawasan-kawasan padat Kota.

- Kawasan Transportasi (Terminal)

Sarana (fasilitas) terminal yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan terminal antara lain meliputi terminal regional, terminal angkutan kota dan terminal barang. Fasilitas dan/atau kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikembangkan di kawasan terminal antara lain fasilitas perdagangan skala lokal (kios), kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan terminal diarahkan di BWK I, BWK II dan BWK IV dengan luas keseluruhan $\pm 4,85$ ha.

- Kawasan Pemakaman

Kawasan pemakaman merupakan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi utama dan satu-satunya sebagai tempat pemakaman umum ataupun taman makam pahlawan. Pengembangan kawasan pemakaman diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada dengan luas keseluruhan $\pm 35,65$ ha.

- Kawasan Khusus Sektor Informal

Pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL secara umum dapat dikembangkan di daerah-daerah yang merupakan simpul-simpul perdagangan, memiliki tingkat aksesibilitas untuk dijangkau dengan berjalan kaki, ruang terbuka aktif, daerah-daerah yang memiliki tingkat keramaian dan merupakan area bebas yang cukup luas dan memiliki potensi untuk dikunjungi penduduk sebagai lokasi untuk bersantai dan melepas lelah. Arahkan pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL dapat dikembangkan dan ditata di kawasan Jalan Jenggolo dengan melakukan penutupan akses di malam hari di Jalan Pajajaran dan Jalan Pajang. Kawasan khusus ini diperuntukkan bagi pedagang kuliner khas Kota Magelang dan sekitar (yang berupa makanan unggulan). Pengembangan PKL di sebelah utara Kota Magelang akan diakomodasi di Kawasan Armada Estate dengan membuka waktu jualan di siang dan malam hari di sekitar tanah kosong milik Armada Estate.

Rencana Tata Ruang Kota Magelang secara umum membagi Kota Magelang menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam penataan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota:

- a. Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
- b. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- c. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. Kawasan strategis sosial budaya.

Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai

jangkauan pelayanan skala kota / regional. Potensi pengembangannya pada masa-masa mendatang sebagai berikut, yaitu :

- a. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, pada kawasan ini direncanakan untuk memwadahi pendirian perguruan tinggi negeri;
- b. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan jasa, pada kawasan ini sudah disiapkan sebidang lahan untuk pembangunan pasar induk yang dipadukan dengan pergudangan;
- c. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan;
- d. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang memwadahi kegiatan rekreasi masyarakat;
- e. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Stadion Madya Moch. Soebroto, dengan kapasitas 15.000 penonton. Selain itu nanti juga akan dibangun kolam renang dengan standar internasional;
- f. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan;
- g. Kawasan Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kawasan, maka pada lokasi sekitar Taman Kyai Langgeng telah dibangun Showroom Mudalrejo yang memwadahi pemasaran hasil-hasil UMKM Kota Magelang.

Rencana sistem perkotaan terdiri dari sistem pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Struktur atau sistem pusat pelayanan merupakan kegiatan-kegiatan fungsional yang mendukung pengembangan Kota Magelang. Kegiatan fungsional sebagai elemen pengisi ruang kawasan diarahkan pengembangannya agar mampu mendukung fungsi-fungsi pengembangan kawasan. Bagian ini akan menjelaskan sistem pusat pelayanan yang ada dalam struktur ruang Kota Magelang. Sistem pusat-pusat pelayanan Kota Magelang memiliki cakupan sebagai berikut:

- a) Pusat Pelayanan Kota Magelang, mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Kota Magelang dan Regional yaitu Kawasan PURWOMANGGUNG sebagai hinterland. Mempunyai makna sebagai fungsi pelayanan eksternal. Pusat pelayanan Kota ditetapkan di BWK I yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, dan sebagian Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, yaitu Kawasan Alun-alun Kota Magelang, delineasi kawasan ada dalam peta pembagian BWK Kota Magelang.
- b) Subpusat Pelayanan Kota Magelang, direncanakan mempunyai cakupan pelayanan subwilayah kota dan terutama mempunyai skala pelayanan kota atau sebagai pengungkapan fungsi kawasan dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kawasan atau masing-masing bagian wilayah kota (fungsi pelayanan internal) adapun pembagian sub pusat pelayanan Kota Magelang meliputi :
 - 1) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK II yaitu Kawasan Kebonpolo terdapat di Kelurahan Wates dan Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara.
 - 2) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK III yaitu Kawasan Taman Kyai Langgeng terdapat di Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dan Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 3) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK IV yaitu Kawasan Sukarno-Hatta, terdapat di Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan.

- 4) Sub Pusat pelayanan kota di BWK V terdapat di Kelurahan Kramata Utara, Kecamatan Magelang Utara yaitu Kawasan Sidotopo.
- c) Pusat Lingkungan mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah di Kota Magelang. Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan skala lingkungan di Bagian Wilayah Kota, meliputi:
- 1) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK I
 - kesatu yaitu Kawasan Karesidenan yang terdapat Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah dan
 - kedua yaitu Kawasan Rejowinangun terdapat di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK II:
 - kesatu yaitu Kawasan Tuguran yang terdapat di Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara.
 - kedua yaitu Kawasan Urip Sumohardjo terdapat di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara.
 - 3) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK III:
 - kesatu yaitu Kawasan Taman Parkir yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
 - kedua yaitu Kawasan Karet terdapat di Kelurahan Jurangombo Selatan.
 - 4) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK IV:
 - kesatu yaitu Kawasan Soka yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
 - kedua yaitu Kawasan Canguk terdapat di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah.
 - 5) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK V:
 - kesatu yaitu Kawasan Menowo yang terdapat di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara.
 - kedua yaitu Kawasan Sambung yang terdapat di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang, perlu kewaspadaan terhadap bencana seperti longsor atau bencana lain khususnya pada daerah dengan kelerengan curam. Bentuk-bentuk bencana yang sering terjadi di Kota Magelang pada umumnya adalah bencana tanah longsor. Kondisi tersebut terutama disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang termasuk dalam wilayah dengan tingkat kelerengan yang cukup tinggi dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat wilayah khusus rawan bencana longsor karena sifat kelerengan tanah dan persungai, yaitu:

- a. Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban;
- b. Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.

Hal yang perlu diwaspadai terkait dengan bencana banjir perkotaan adalah banjir yang diakibatkan banjir limpasan atau limpahan air drainase karena hujan dan drainage tersumbat. Alih fungsi lahan menjadi bangunan rumah tinggal, ruko dan fasilitas umum berkontribusi terhadap meluapnya air hujan ketika curah hujan tinggi. Hal ini disebabkan

karena berkurangnya daya tampung dan daya serap tanah yang sudah tidak maksimal menyerap air hujan karena tertutup oleh bangunan. Penyebab kedua adalah banjir bandang atau banjir kiriman melanda wilayah tepi sungai Progo dan Elo. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi rawan bencana banjir karena faktor air melimpah antara lain adalah: Potrobangsari, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.

Selain Bencana longsor dan banjir, perlu juga di waspadai terkait dengan bahaya kebakaran terutama pada pemukiman yang padat penduduk dengan jalan sempit menyulitkan evakuasi dan pemadaman bencana kebakaran. Kelurahan yang memiliki potensi (rawan) bencana kebakaran karena faktor kepadatan penduduk dan jaringan jalan yang sempit (3-6 meter) yaitu: Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsari, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan. Bencana Kebakaran yang terjadi sampai dengan tengah tahun 2017 sebanyak 3 kejadian dengan kerugian sebanyak 3 rumah dan korban meninggal sebanyak 2. Adapun total kerugian sebesar Rp. 50.000.000, -. Jumlah ini meningkat pada semester 2 tahun 2017. Total Bencana kebakaran pada tahun 2017 sebanyak 17 kejadian dengan kerugian sebanyak 10 rumah dan 7 bangunan lainnya dengan jumlah korban meninggal sebanyak 1 orang dan korban luka – luka sebanyak 1 orang. Total kerugiannya sebesar Rp.2.253.000.000,- Sementara jumlah lokasi bencana yang terjadi di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 sebanyak 22 lokasi. Dengan kerugian sebesar Rp. 355.000.000,00. Bencana Kebakaran ini merupakan salah satu bencana yang identik terjadi di wilayah perkotaan yang rentan padat penduduk seperti di Kota Magelang sehingga ke depan butuh perhatian khusus dari Pemerintah agar nantinya bisa mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan meminimalisir adanya banyak korban dan kerugian material yang disebabkan karena bahaya kebakaran tersebut.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan limbah industri atau jasa yang meresap dalam air bawah tanah serta air permukaan (selokan, kolam dan pemukiman), pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga dan sampah yang tidak tertangani dengan baik.

Bencana lain yang perlu mendapat perhatian dan identik dengan wilayah perkotaan adalah bencana sosial seperti pertikaian antar warga di wilayah Kota Magelang, pertikaian pelajar dan tindak kriminalitas. Indikator penentu prioritas pencegahan dan penanganan bencana sosial perlu dilakukan pada wilayah yang memiliki: pusat perdagangan dan tujuan pergerakan atau transportasi; wilayah dengan tingkat sosial ekonomi yang berada di level pra-sejahtera; wilayah dengan kondisi pemukiman belum tertata atau kumuh, perkembangan kawasan yang kurang sehat dengan tingkat kepadatan tinggi.

2.1.1.9 Aspek Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Magelang jumlah penduduk pada tahun 2018 diproyeksi sebanyak 121.992 jiwa dengan wilayah Kota Magelang seluas 18,12 km², kepadatan penduduk pada tahun 2018 sebanyak 6.732 jiwa/ km². Sementara jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2017 sebanyak 121.673 jiwa. Apabila kita melihat perkembangan tingkat kepadatan penduduk di Kota Magelang pada beberapa tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk di Kota Magelang yang meningkat. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan pada tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup.

Tabel 2 - 4
Kepadatan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2011- 2017 dan proyeksi Tahun 2018

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km2)
2010	118.713	6.551
2011	119.210	6.579
2012	119.647	6.603
2013	120.158	6.631
2014	120.615	6.656
2015	120.952	6.675
2016	121.293	6.694
2017	121.673	6.715
2018	121.992	6.732

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kota Magelang 2010 – 2018 (proyeksi menggunakan data dasar hasil sensus Penduduk 2010)

Kepadatan penduduk yang relatif cukup padat ini merupakan salah satu permasalahan bagi Pemerintah terkait dengan penataan ruang dan kota serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini sekaligus juga merupakan tantangan untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman seperti drainase, sanitasi, air bersih yang layak dan terpenuhi merata bagi penduduk di atas lahan yang terbatas sehingga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang permukiman. Pemukiman padat juga dapat mengakibatkan rentan terjadinya bencana kebakaran. Untukantisipasi terhadap bencana kebakaran, kebijakan Pemerintah Kota Magelang adalah meningkatkan manajemen penanganan bencana kebakaran, peningkatan kapasitas personil di unit pemadam kebakaran, dan meningkatkan kualitas mobil pemadam kebakaran.

Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah di minta untuk lebih tanggap dalam membuat kebijakan terkait pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar bagi masyarakat, pemenuhan sarana prasarana umum, serta kebijakan terkait tata ruang lahan kota yang terbatas. Selain itu Pemerintah juga harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat timbul akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk seperti bencana sosial yang biasa terjadi pada wilayah perkotaan.

Data kepadatan penduduk Kota Magelang berdasarkan DispendukCapil Kota Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.662 jiwa, kepadatan penduduk Kota Magelang pada tahun tersebut sebesar 7.321 jiwa/km2. Data Penduduk pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.261 jiwa, kepadatan penduduk Kota Magelang dengan luas 18.12 km2 sebesar 7.299 jiwa/km2. Sementara penduduk tahun 2017 sesuai dengan hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017, jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 130.857 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar 130.857 jiwa dan luas wilayah sesuai Permendagri 54 tahun 2017 seluas 18.53 km2 maka kepadatan

penduduk pada tahun 2017 sebesar 7.062 jiwa/km². Data kepadatan penduduk secara lebih rinci per kelurahan akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 - 5
Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang Tahun 2013 – 2017

Kecamatn / Kelurahn	2013		2014		2015		2016		2017	
	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)
MAGELANG SELATAN										
Jurangombo Utara	3.848	6.691	4.302	7.482	4.337	7.478	7.198	3.185	4.287	7.391
Jurangombo Selatan	7.821	3.468	6.951	3.070	7.056	3.122	8.582	8.847	7.271	3.217
Magersari	7.834	5.689	8.780	6.376	8.816	6.388	4.328	7.462	8.699	4.859
Tidar Utara	7.672	7.909	8.493	8.756	8.540	8.804	5.837	4.596	8.533	8.796
Tidar Selatan	5.569	4.388	5.748	4.530	5.787	4.567	8.860	6.420	5.854	4.609
Rejowinangun Selatan	7.767	17.938	8.986	20.753	8.965	20.849	8.873	20.635	8.524	19.830
MAGELANG TENGAH										
Magelang	6.963	5.588	7.913	6.351	7.913	6.330	7.992	6.394	8.017	6.414
Kemirirejo	4.993	5.674	6.026	12.606	6.190	7.034	12.563	12.690	5.893	6.696
Cacaban	7.768	9.404	8.214	9.944	8.231	9.917	6.182	7.025	8.141	9.808
Rejowinangun Utara	10.566	10.640	12.518	12.606	12.514	12.640	8.214	9.896	12.536	12.663
Panjang	5.722	16.596	6.766	19.612	6.809	19.454	6.834	19.526	6.781	19.374
Gelangan	7.344	9.022	8.250	10.135	8.298	10.244	8.335	10.290	8.370	10.333
MAGELANG UTARA										
Wates	7.921	6.753	9.188	7.833	9.202	7.865	9.242	7.899	8.925	7.628
Potrobangsari	7.988	6.149	8.992	6.922	8.966	6.897	8.887	6.836	8.620	6.631
Kedungsari	7.191	5.391	7.475	1.334	7.533	5.664	7.605	5.718	7.506	5.644
Kramat Utara	5.730	6.632	4.860	5.625	4.955	5.763	4.966	5.774	4.843	5.631
Kramat Selatan	7.480	5.130	8.061	5.529	8.148	5.581	8.164	5.592	8.057	5.518

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2018 Diskominsta Kota Magelang (sumber data : DispendukCapil)

Sex ratio adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Berdasarkan data BPS terkait proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di atas, maka sex ratio Kota Magelang Tahun 2018 sebesar $(60.064 / 121.992 \times 100) = 96.99$, artinya setiap 100 perempuan dalam suatu kawasan di Kota Magelang, akan terdapat pula sebanyak 97 pria di dalamnya. Rasio perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kota Magelang bisa dikatakan cukup seimbang.

Penduduk Usia kerja di Kota Magelang pada tahun 2017 sebesar 96.103 jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 1,2 % dari tahun 2015. Jumlah ini terdiri dari penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 33.328 jiwa yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,48 % dan 62.775 jiwa merupakan penduduk angkatan kerja yang naik sekitar 2,7 % dari tahun 2015. Prosentase penduduk bekerja terhadap penduduk usia kerja di Kota Magelang sebesar 60.95% dimana jumlah penduduk bekerja pada tahun 2017 sebesar 58.582 jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 2,47 % dari tahun 2015. Jumlah penduduk tidak bekerja/sedang mencari kerja sebesar 4.192 jiwa (4.36%) yang mengalami peningkatan sebesar 6,34 % dari tahun 2015. Kondisi peningkatan usia kerja ini memperlihatkan bahwa fenomena bonus demografi dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk di usia produktif sudah terlihat di Kota Magelang. Pertumbuhan negatif jumlah penduduk bukan angkatan kerja merupakan pergeseran jumlah penduduk bukan angkatan kerja ke penduduk angkatan kerja yang merupakan suatu gerak positif dimana sudah terlihat ada upaya dari penduduk untuk meningkatkan pendapatannya dengan bekerja ataupun mencari pekerjaan. Hal yang mengembirakan adalah menurunnya jumlah angkatan kerja yang merupakan salah satu indikasi bahwa sudah ada pergeseran bagi penduduk bukan angkatan kerja (yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga) untuk memberdayakan dirinya dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Ada keinginan untuk kelompok ini dalam membantu meningkatkan perekonomian rumah tangganya. Akan tetapi peningkatan jumlah penduduk usia kerja berakibat pada peningkatan jumlah penduduk tidak bekerja/sedang mencari pekerjaan.

Tabel 2-6

Penduduk Usia Kerja Usia 15 - 64 tahun di Kota Magelang Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2011-2017

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja / Tenaga Kerja
	Bekerja	Mencari Kerja (Pengangguran)		
2011	58.919	5.319 (5.85%)	26.752	90.990
2012	57.669	5.501 (6.05%)	27.775	90.945
2013	58.110	4.241 (4.69%)	28.101	90.452
2014	59.628	4.754 (5.06%)	29.625	94.007
2015	57.133	3.927 (4.14%)	33 823	94 883
2016*		NA	NA	NA
2017	58.582	4.193 (4,36%)	33 328	96 103

Sumber: Sakernas, BPS

*tidak dilakukan Sakernas dengan sampel untuk estimasi tingkat Kabupaten Kota

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat flungtuatif. TPAK pada tahun 2010 sebesar 68.46% dan dan terus menurun hingga tahun 2015 sebesar 64, 35 dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 65.32%, Dalam beberapa tahun ini kisaran angka TPAK masih sebesar 60-an%.

Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja per tahun pada tahun 2010-2014 sebesar 69%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang usia kerja, yang termasuk Angkatan Kerja kurang lebih 69 orang dan tahun 2017 menurun di sekitar 65 orang. Kondisi ini diindikasikan banyaknya penduduk usia kerja di Kota Magelang yang mencari kerja di luar Kota Magelang untuk bekerja di daerah yang mempunyai kesempatan kerja lebih mapan.

Tabel 2 - 7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Magelang Tahun 2010-2015

Tahun	Penduduk Usia Kerja / Tenaga Kerja (orang)	Angkatan Kerja (orang)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2010	90.490	61.945	68.46
2011	90.990	64.238	70.60
2012	90.945	63.170	69.46
2013	90.452	62.351	68.93
2014	94.007	64.382	68.49
2015	94 883	61 060	64,35
2016*	NA	NA	NA
2017	96 103	62 775	65,32

Sumber : Sakernas, BPS

*tidak dilakukan Sakernas dengan sampel untuk estimasi tingkat Kabupaten Kota

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka ini berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tabel 2 - 8
Pengangguran Terbuka Kota Magelang 2010-2015

Tahun	Mencari Kerja (Pengangguran)	Angkatan Kerja (orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2010	8.226	61.945	13,3
2011	5.319	64.238	8,3
2012	5.501	63.170	8,7
2013	4.241	62.351	6,8
2014	4.754	64.382	7,4

Tahun	Mencari Kerja (Penggangguran)	Angkatan Kerja (orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2015	3 927	61 060	6,43
2016*	NA	NA	NA
2017	4 193	62 775	6,68

Sumber : Sakernas, BPS

*tidak dilakukan Sakernas dengan sampel untuk estimasi tingkat Kabupaten Kota

Tabel di atas memperlihatkan kondisi ketenagakerjaan di Kota Magelang. Kondisi ketenaga kerjaan di tahun 2017 ditandai dengan naiknya angka TPT dari 6,43 di tahun 2015 menjadi 6,68. Kenaikan TPT ini disebabkan bertambah jumlah penduduk yang mencari pekerjaan dari 4,14 % di tahun 2015 menjadi 4,36 % di tahun 2017. Dibandingkan 2015 jumlah penduduk usia kerja mengalami kenaikan, begitu juga dengan angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Akan tetapi kenaikan jumlah penduduk usia kerja ini juga berakibat pada peningkatan jumlah penduduk pencari kerja sehingga berakibat pada angka TPT yang naik. Kondisi ini merupakan efek dari fenomena bonus demografi. Meskipun secara persentase tidak terlalu banyak tetapi secara absolut jumlah tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Untuk menurunkan angka pengangguran, perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk mencari informasi tentang spesifikasi para pencari kerja sehingga pasar kerja bisa disesuaikan dengan spesifikasi ini. Pasar kerja di wilayah Kota Magelang sangat dibutuhkan agar angka TPT bisa terus berkurang . Untuk itu diharapkan bisa untuk mengarahkan potensi tenaga kerja ini ke dalam wilayah, atau dibuat situasi yang kondusif untuk investasi/industri, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.

Tabel 2 - 9

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2010-2017 dan prediksi Tahun 2018 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Laki-Laki	58.686	58.905	59.160	59.384	59.591	59.662	59.864	60.064
Perempuan	60.524	60.742	60.998	61.231	61.361	61.631	61.809	61.928
Jumlah Total	119.210	119.647	120.158	120.615	120.952	121.293	121.673	121.992
Sex Ratio	96,96	96,98	96,99	96,98	97,12	96,81	96,85	96,99
Laju Pertumbuhan (%)	0.42	0.37	0.43	0.38	0.28	0.28	0.31	0.26

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kota Magelang 2010-2018 (menggunakan data dasar hasil sensus Penduduk 2010)

Tabel 2 -10

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang
2010- Tahun 2017 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Laki-Laki	63.185	63.898	64.569	64.462	64.865	65.185	65.375	64.419
Perempuan	65.012	65.658	66.386	66.374	66.838	67.076	67.287	66.438
Jumlah Total	128.197	129.556	130.955	130.836	131.703	132.261	132.662	130.857
Laju Pertumbuhan (%)	-1.91	1.06	1.08	-0.09	0.66	0.42	0.30	-1.36

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

*data penduduk 2017 hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017

Tabel 2 -11

Banyak Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Magelang

Tahun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota RT
2010	128.197	38.490	3
2011	129.556	39.672	3
2012	130.955	40.623	3
2013	130.836	41.246	3
2014	131.703	41.853	3
2015	132.261	42.433	3
2016	132.662	43.026	3
2017*	130.857	42.997	3

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2016. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapli

*data penduduk 2017 hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017.

Data penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Magelang memperlihatkan bahwa komposisi terbesar penduduk pada usia produktif 15 tahun sd 64 tahun adalah pada kelompok umur antara usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun. Hal ini merupakan modal apabila Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbagai kebijakan dan program kegiatan yang dapat mengoptimalkan sumber daya manusianya menjadi sumber daya yang berkualitas dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2 - 12
Banyak Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2011-2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
0 – 4 tahun	8.690	8.732	8.246	8.154	7.968	7.893	7.797
5 - 9 tahun	9.173	9.213	9.601	9.528	9.529	9.395	9.296
10 - 14 tahun	9.524	9.564	10.101	10.234	10.061	10.062	10.016
15 - 19 tahun	10.573	10.621	10.263	10.221	10.365	10.305	10.121
20 - 24 tahun	9.079	9.128	9.954	10.076	10.170	10.333	10.167
25 -29 tahun	9.522	8.566	9.532	9.322	9.338	9.388	9.447
30 - 34 tahun	9.092	9.134	10.962	10.806	10.390	9.866	9.128
35 - 39 tahun	9.103	9.141	10.364	10.410	10.429	10.521	10.394
40 - 44 tahun	9.252	9.288	10.485	10.274	10.180	10.052	9.581
45 -49 tahun	8.724	8.763	9.833	10.158	10.115	10.251	10.092
50 - 54 tahun	7.769	7.803	9.127	9.082	9.241	9.377	9.134
55 - 59 tahun	5.949	3.974	7.431	7.746	7.978	8.133	8.217
60 - 64 tahun	3.710	3.724	5.150	5.618	6.000	6.302	6.494
65 -69 tahun	3.240	3.252	3.207	3.381	3.523	3.758	4.112
70 -74 tahun	2.527	2.533	2.983	2.897	2.880	2.911	2.537
75+	2.878	2.892	3.597	3.796	4.094	4.115	4.324

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapil

*data penduduk 2017 hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017

Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam ,seperti halnya fenomena yang banyak terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani relatif kecil. Penduduk Kota Magelang pada umumnya sebagaimana mata pencaharian penduduk di perkotaan, sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan usaha:

Tabel 2 - 14
Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Magelang Tahun 2011-2017

Mata Pencaharian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	tahun 2017*		
							Jumlah	%	+ / -
Pertanian	206	215	215	217	215	195	179	0.17	(16)
Buruh Tani	54	60	60	61	66	73	69	0.067	(4)
Pengusaha	12.762	12.680	12.476	12.349	12.209	12.275	11.980	11.55	(295)

Mata Pencapaian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	tahun 2017 *		
							Jumlah	%	+ / -
Buruh Industri	23.074	23.599	23.682	24.248	24.835	25.541	25.482	24.56	(59)
Buruh Bangunan	8.932	9.058	9.006	9.096	9.138	9.226	9.088	8.76	(138)
Pedagang	3.022	3.040	3.002	2.978	2.935	2.136	2.087	2.01	(49)
Angkutan	220	227	233	240	251	252	242	0.23	(10)
PNS/TNI/Polri	5.909	5.925	5.825	5.810	5.772	5.696	5.417	5.22	(279)
Guru/ Dosen	1.442	1.436	1.447	1.452	1.473	1.473	1.428	1.38	(45)
Pensiunan	3.813	3.772	3.667	3.608	3.601	3.570	3.465	3.34	(105)
Lain Lainnya	53.961	52.890	53.376	53.962	53.947	40.388	44.311	42.71	3.925
JUMLAH	113.922	112.902	112.989	114.021	114.442	100.825	103.748	100	

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapil

Mata pencaharian terbesar ada di beberapa sektor seperti sektor industri, perdagangan dan perkantoran. Mata pencaharian tertinggi adalah sebagai buruh industri yaitu sebanyak 25.482 jiwa (24.56%), Pengusaha 11.980 jiwa (11.55%), Sedangkan mata pencaharian paling kecil adalah sebagai petani yaitu sebanyak 179 (0,17%) dan buruh tani 69 (0,067%).

'Kondisi Kota Magelang relatif kondusif . Konflik antar umat beragama di Kota Magelang nyaris tidak pernah terjadi di Kota Magelang. Masyarakat hidup berdampingan secara damai dalam keaneka ragaman agama yang mereka peluk. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing – masing yang di akui Pemerintah menjadi prioritas Pemerintah dalam menjamin hak asasi masyarakat dalam berkeyakinan. Hal ini menjadi Modal dasar bagi Pemerintah Kota Magelang dalam mencanangkan Kota Religius dalam periode lima tahun ke depan. Statistik penduduk Kota Magelang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluk di sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 15
Penduduk Berdasarkan Agama dan Keyakinan yang Dipeluk Tahun 2011-2017 di Kota Magelang

Agama /Keyakinan	Jumlah Pemeluk Agama dan Keyakinan						
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017*
Islam	107.627	109.678	109.841	110.856	111.610	112.135	110.877
Kristen	12.904	12.923	12.770	12.711	12.616	12.566	12.276
Katholik	7.525	7.517	7.397	7.232	7.241	7.165	9.957
Hindu	149	146	145	149	150	143	124
Budha	658	664	658	639	620	628	601

Agama /Keyakinan	Jumlah Pemeluk Agama dan Keyakinan						
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017*
Konghuchu	9	8	8	8	7	8	8
Lainnya	23	19	17	17	17	17	22

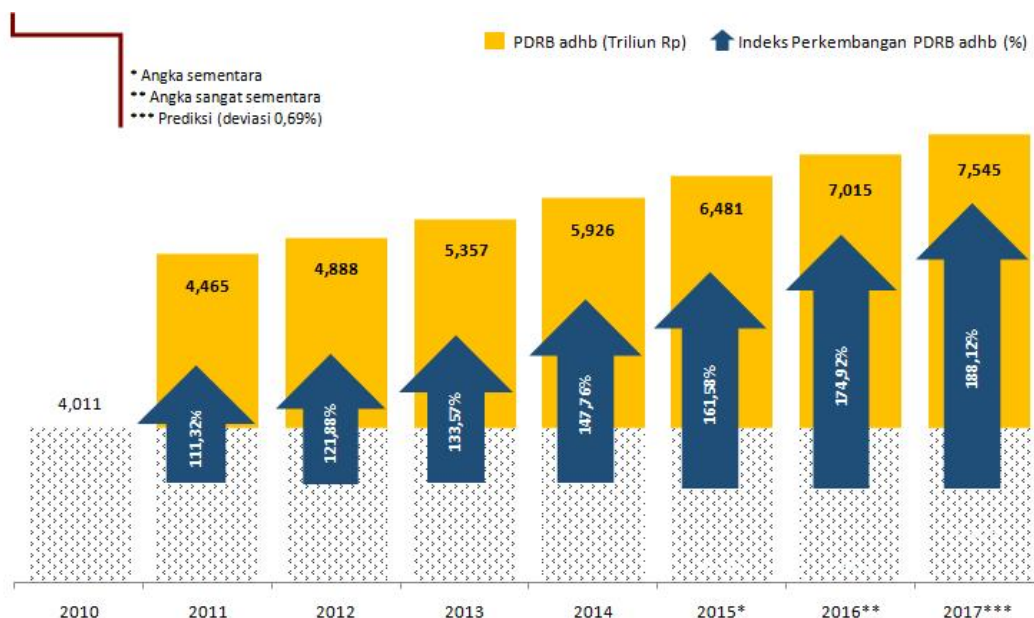
Sumber : Data Strategis Kota Magelang 2009-2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapil

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.2.1.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Perekonomian makro Kota Magelang di tahun 2016 tumbuh 8,25% (atas dasar harga berlaku), sedikit melambat dari tahun 2015 yang berada pada angka 9,35%. Besarnya nominal nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh di tahun 2016 mencapai 7,015 triliun Rupiah, berkembang hampir 1,75 kali lipat dibandingkan kondisi ekonomi di tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan (13,32%), Jasa Keuangan dan Asuransi (13,2%) dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,42%). Meski merupakan sektor andalan di Kota Magelang, namun lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi masih memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum di tahun 2016. Khusus untuk Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha ini memiliki prospek yang sangat baik untuk dapat terus dioptimalkan perannya dalam tahun-tahun mendatang, mengingat lapangan usaha ini merupakan sektor ekonomi penunjang utama bagi pariwisata dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.5. PDRB dan Indeks Perkembangan PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2017

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Kinerja perekonomian makro skala kota untuk tahun 2017 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian diprediksi kondisi ekonomi makro Kota Magelang di tahun 2017 akan terus mengalami pertumbuhan positif dengan perolehan PDRB mencapai 7,545 triliun rupiah (deviasi 0,69%). Di tahun 2017 diprediksi tidak ada pergeseran peran lapangan usaha yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kota Magelang. Hampir seluruh lapangan usaha diprediksi tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya dan Jasa Pendidikan diprediksi akan memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan lapangan usaha lain di tahun 2017.

Tabel 2-16.
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Lapangan Usaha	2016*	2017**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135.991,13	142.454,49
Industri Pengolahan	1.128.331,29	1.239.730,46
Pengadaan Listrik dan Gas	20.361,13	21.160,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	9.601,96
Konstruksi	1.163.178,22	1.262.362,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.288,45	1.060.825,03
Transportasi dan Pergudangan	471.954,33	504.756,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	422.789,76	442.114,98
Informasi dan Komunikasi	334.082,07	367.432,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	366.184,95	380.534,04
Real Estate	224.952,98	236.820,26
Jasa Perusahaan	24.810,72	27.892,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842.640,29	873.126,67
Jasa Pendidikan	529.008,56	604.377,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.466,24	215.370,07
Jasa lainnya	140.360,73	156.238,91
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (deviasi 0,69%)
 Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)
 Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Dari sisi konsumsi, PDRB Kota Magelang di tahun 2016 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,017 triliun Rupiah. Tren perlambatan sebagaimana lapangan usaha juga terjadi dalam penggunaan PDRB. Pada kelompok konsumsi, pertumbuhan konsumsi tertinggi tetap berasal dari konsumsi pemerintah sebesar 7,58%, melambat dari tahun 2015 yang mampu mencapai 14,56%. Konsumsi rumah tangga tumbuh 6,8% sedikit lebih cepat dibandingkan lembaga NPRT yang hanya tumbuh 6,07%. Secara proporsi, peran komponen penggunaan terhadap PDRB di tahun 2017 diprediksi tidak berubah secara signifikan.

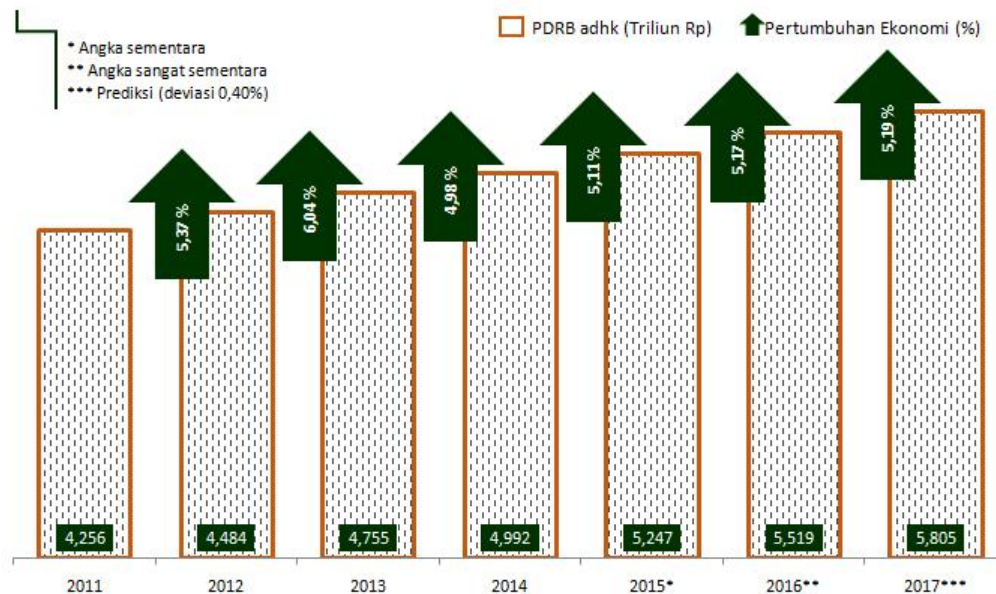
Tabel 2-17.
 PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Pengeluaran
 Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,017,143.51	4,290,309.27
Pengeluaran Konsumsi LNPR	89,900.37	95,357.32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,431,080.68	1,539,556.60
Pengeluaran PMTB	3,459,854.74	3,683,361.36
Pengeluaran Perubahan Inventori	153,174.70	167,302.24
Pengeluaran Ekspor	3,562,619.90	3,758,600.12
Pengeluaran Impor	5,698,393.82	5,989,687.21
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (deviasi 0,69%)
 Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)
 Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Diteropong dari sisi riil, PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,17% setelah di tahun sebelumnya hanya mencapai 5,11%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%), namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi pada skala provinsi Jawa Tengah yang pada tahun tersebut mencapai 5,28%. Berdasar tahun dasar 2010, secara riil PDRB Kota Magelang tahun 2016 mencapai 5,517 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi level sektoral dialami oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (9,46%), Jasa Perusahaan (8,82%) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,75%). Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Magelang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan dan sektor andalan karena dari data historis sektor-sektor ini masih tumbuh relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota secara umum.



Gambar 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2011-2017

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Stabilnya perkembangan harga, akselerasi laju produktivitas di berbagai sektor ekonomi dan kondusifnya iklim investasi sepanjang tahun 2017 memberikan hasil prediksi yang cukup optimis bagi perekonomian Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2017, diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mampu mencapai target RPJMD (4,79%-5,29%) dan berada pada angka 5,19% (deviasi 0,40%).

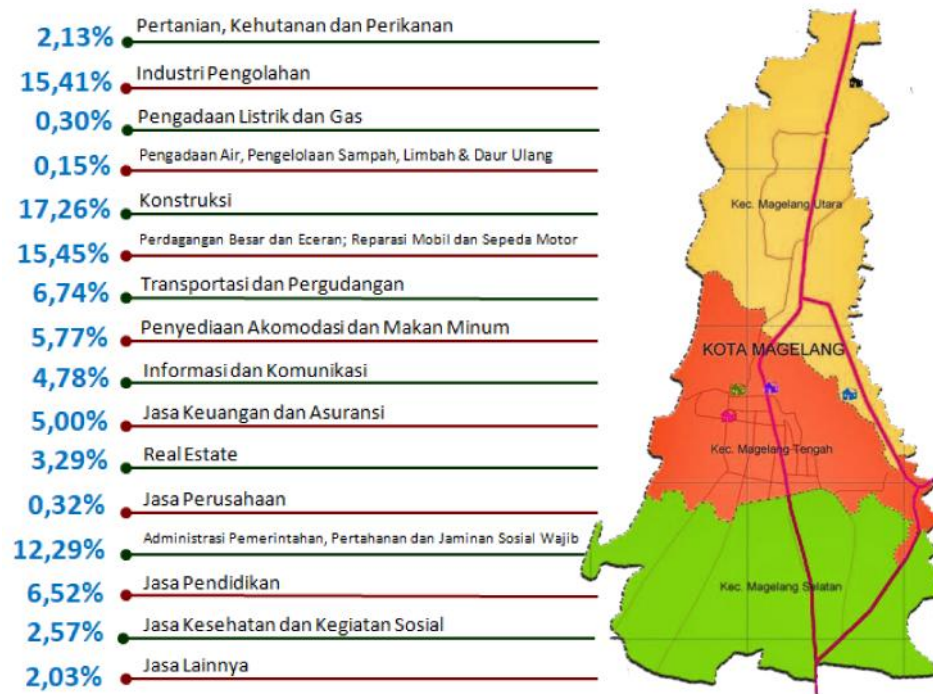
2.1.2.1.3 Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB

Beberapa pergeseran peran lapangan usaha ditilik dari kontribusinya terhadap perekonomian makro Kota Magelang terjadi dalam lima tahun terakhir. Transformasi struktur perekonomian terjadi sejak tahun 2014 dimana lapangan usaha Industri Pengolahan mampu memiliki kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Kota Magelang, menggeser peran lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di tahun 2016 transformasi kembali terjadi setelah melorotnya peran Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Magelang dalam menyumbang nilai tambah produksi barang/jasa dan tergantikan oleh lapangan usaha Jasa Lainnya. Sementara itu, komposisi sektor andalan dan unggulan cenderung konstan dari tahun ke tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian Kota Magelang, 2010-2016

1. Industri Pengolahan	1. Informasi dan Komunikasi
2. Transportasi dan Pergudangan	2. Jasa Pendidikan
3. Informasi dan Komunikasi	3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4. Jasa Pendidikan	

Sumber: Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017

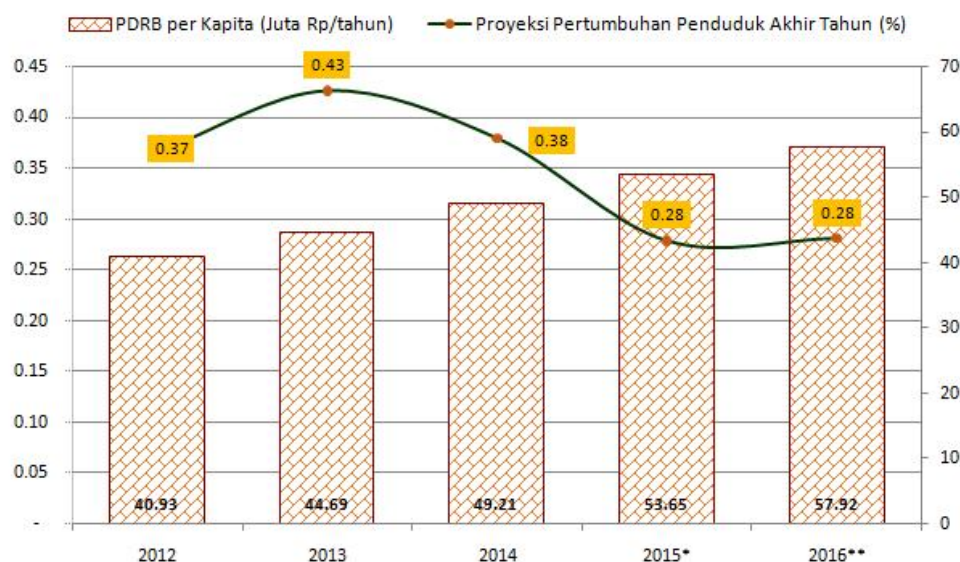


Gambar 2.7. Rata-rata Distribusi Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang (adhb), 2010-2016
Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Ketergantungan aktivitas ekonomi Industri pengolahan khususnya dalam pasokan sumber daya input yang masih dicukupi dari hasil impor dari daerah sekitar merupakan salah satu penyebab mengapa lapangan usaha ini meskipun berkontribusi cukup signifikan dalam pembentukan PDRB Kota Magelang, namun belum cukup kompetitif dalam skala yang lebih luas yaitu provinsi, sehingga belum mampu menjadi sektor andalan. Di tahun 2017 struktur perekonomian Kota Magelang diprediksi memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2016 dengan peningkatan persentase peran di setiap lapangan usaha.

2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur salah satunya dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.112 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 4,827 juta/bulan atau 57,92 juta/tahun (atas dasar harga berlaku). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Di tahun 2017, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada level 5,19% dan prediksi total penduduk tengah tahun sebesar 121.474 jiwa, maka PDRB per kapita Kota Magelang (atas dasar harga berlaku) diprediksi mampu terus tumbuh mencapai 58,92 juta/tahun (4,91 juta/bulan).



Gambar 2.8. PDRB per Kapita (adhb) dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Akhir Tahun Kota Magelang, 2012-2016

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Tabel 2.15. PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Uraian	2016	2017
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	7.015.380,09*	7.478.570,29 **
PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	5.518.684,55*	5.804.917,24 **
Proyeksi penduduk tengah tahun (jiwa)	121.112,00	121.474,00
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp/kapita/tahun)	57,92*	58,92**

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (derivatif)

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Mengingat indikator kesejahteraan ini memiliki beberapa kelemahan, maka dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan ekonomi (khususnya dalam bidang pemerataan pendapatan) yang lebih komprehensif, Kota Magelang juga memperhitungkan statistik kesejahteraan yang lain, diantaranya adalah indeks gini.

2.1.2.1.5 Inflasi

Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2017 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir November 2017 inflasi yang terjadi sebesar 0,16% (3,22% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 3,19%) dan nasional (yoy 3,30%). Akhir Desember 2017 terdapat kenaikan IHK mencapai 129,05 menyebabkan inflasi 0,93% (3,9% year on year). Laju inflasi yang terjadi pada posisi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (3,71%) dan Nasional (3,61%). Hal tersebut merupakan rentetan dampak dari kenaikan harga beras di akhir tahun yang mengakibatkan kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 3,96%.



Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Year on Year Kota Magelang, 2010-2017
Sumber: BPS Kota Magelang, 2018

Kota Magelang memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin menerapkan protokol pengendalian harga dengan baik, sehingga sepanjang tahun 2017 tidak ditemukan gejala harga yang berarti pada seluruh komoditas pengeluaran. Beberapa program dan kegiatan TPID Kota Magelang di tahun 2017 antara lain adalah:

- Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
- Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
- Program pengembangan budidaya perikanan
- Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Pemanfaatan Toko Tani Indonesia (TTI)

Sampai dengan saat ini di Kota Magelang terdapat delapan TTI. TTI menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan/atau Bulog.

- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Pengembangan sistem informasi pasar dengan melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di tiga pasar tradisional (Kebonpolo, Cacaban dan Rejowinangun), toko/warung yang menyediakan bahan pangan di 17 kelurahan dan sembilan pedagang grosir pangan di luar pasar.
- Publikasi perkembangan harga melalui aplikasi Sihati (Sistem Informasi Harga dan Komoditi Jawa Tengah), Magelang FM dan DataGO
- Melaksanakan kegiatan panel harga pangan
- Program peningkatan efisiensi perdagangan melalui kegiatan peningkatan sistem kerja, jaringan informasi perdagangan, pengembangan pasar dan distribusi produk sehingga tersedia informasi perusahaan yang akurat dan meningkatnya pangsa pasar produk-produk UMKM
- Penguatan kelembagaan TPID

Pengendalian harga komoditas pokok di Kota Magelang dalam semester pertama tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik dengan perkembangan harga dari bulan ke bulan yang tidak begitu bergejolak dan capaian inflasi yang rendah. Deflasi sempat terjadi di bulan April sebesar 0,05%. Menyambut bulan Ramadhan tahun 2018 gejolak harga di beberapa pasar di Kota Magelang juga masih terjaga dengan baik. Pada akhir Mei tercatat Kota Magelang hanya mengalami inflasi yang sangat rendah sebesar 0,02% (yoy 2,8%).

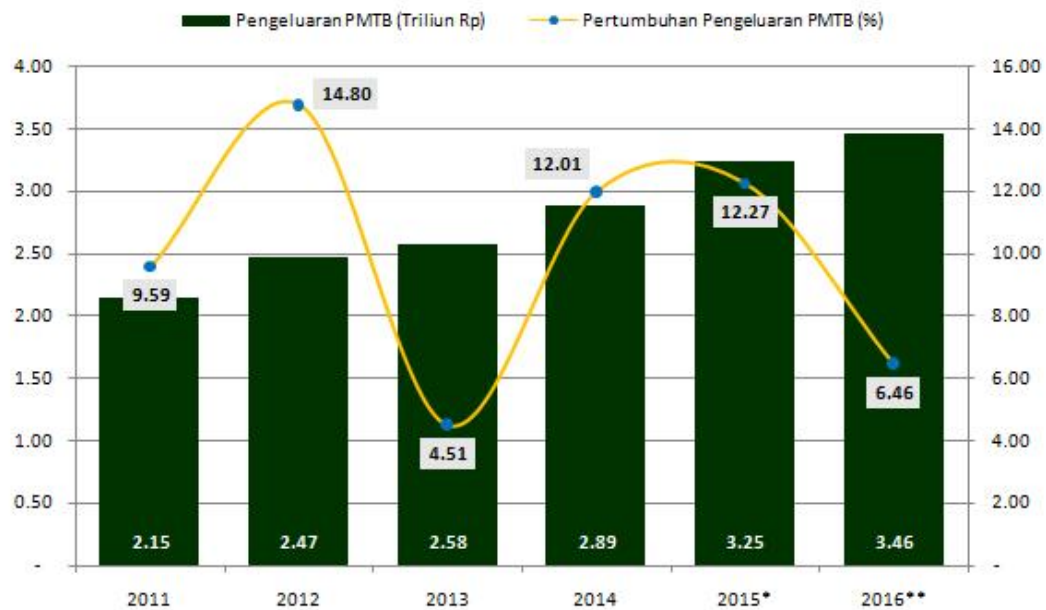
Tabel 2.19
Inflasi Kota Magelang, Januari-Mei 2018

Bulan	Inflasi YoY	IHK	Inflasi Bulanan
Jan 08	3,37	129,96	0,71
Feb 08	3,23	130,42	0,35
Mar 08	3,50	130,64	0,17
Apr 08	3,37	130,58	-0,05
Mei 08	2,80	130,61	0,02

2.1.2.1.6 Investasi

Investasi dalam dokumen ini diukur dengan pendekatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan salah satu komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Menurut BPS, PMTB adalah “pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas”. BPS menjelaskan lebih lanjut bahwa penambahan barang modal yang meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Pada tahun 2016 pengeluaran PMTB di Kota Magelang mencapai 3,460 triliun (adhb). Nilai ini tumbuh sedikit melambat, yaitu hanya sebesar 6,46% setelah di tahun sebelumnya mampu tumbuh 12,27%. Dominasi PMTB di tahun 2016 berasal dari pengeluaran PMTB untuk bangunan yang memiliki distribusi sebesar 87,62%. Kecepatan pertumbuhan PMTB non bangunan sempat tercatat sangat signifikan sepanjang tahun 2011-2012 dan masih lebih cepat dibandingkan dengan PMTB bangunan sampai dengan tahun 2013. Namun kemudian pengeluaran PMTB bangunan mampu mengejar laju PMTB non bangunan dengan rata-rata growth 10,86% per tahun sepanjang tahun 2014-2016. Sementara itu PMTB non bangunan terus melambat dengan rata-rata pertumbuhan hanya 6,28% per tahun selama periode 2014-2016 dan hanya tumbuh 4,30% di tahun 2016.



Gambar 2.10. Pengeluaran PMTB dan Pertumbuhan Pengeluaran PMTB Kota Magelang, 2011-2017

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

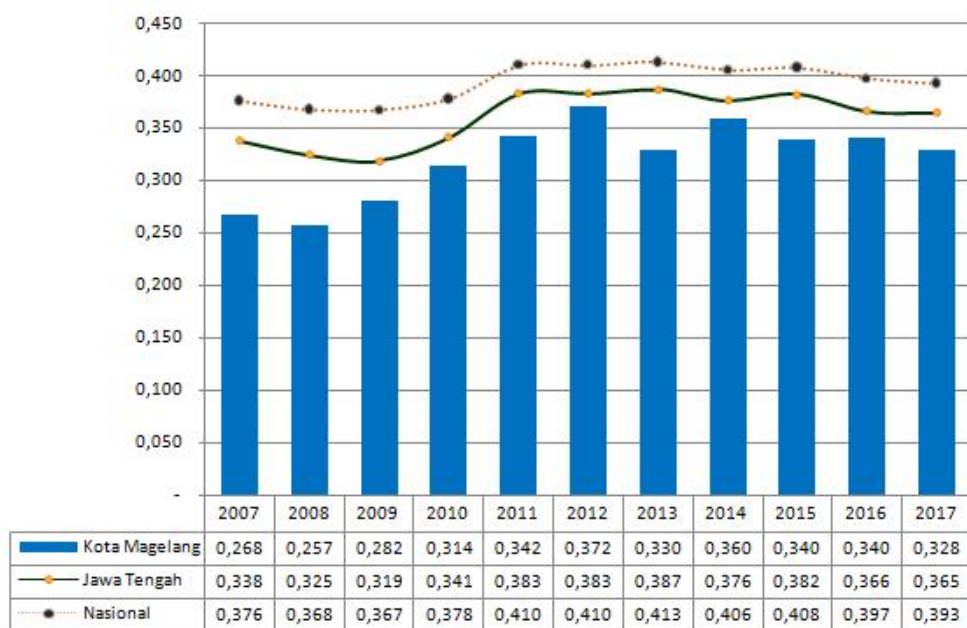
Perkembangan nilai PMTB dan total PDRB selama kurun waktu 2010-2016 menghasilkan ICOR di Kota Magelang yang relatif kecil (5,09). Hal tersebut mengindikasikan bahwa investasi di kota sejuta bunga ini cukup efektif. Untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, rata-rata nominal investasi yang dibutuhkan sebesar 1,583 triliun rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2017 diprediksi pengeluaran PMTB Kota Magelang akan tumbuh positif mencapai 3,683 triliun rupiah.

2.1.2.1.7 Ekspor Impor

Progres yang menggembirakan terjadi pada pertumbuhan ekspor di tahun 2016 yang mencapai 9,91%, jauh lebih cepat dibandingkan pengeluaran impor (5,41%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahan baku produksi dan produk akhir dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat Kota mampu bersaing dan diterima dengan baik di pasar yang berada di luar wilayah. Penurunan tingkat ketergantungan terhadap bahan baku produksi, peningkatan kualitas produk setengah jadi dan produk akhir konsumsi dari seluruh lapangan usaha di Kota Magelang harus terus diupayakan untuk menghindari melebarnya celah dalam neraca perdagangan negatif yang selama ini dialami. Sampai dengan akhir tahun 2017 diprediksi pertumbuhan ekspor akan bertahan dan lebih cepat dibandingkan impor, dengan nominal ekspor mencapai 3,759 triliun Rupiah (deviasi 0,48%) dan impor sebesar 5,990 triliun Rupiah (deviasi 0,37%).

2.1.2.1.8 Index GINI

Keterbatasan sampel dalam Susenas yang dilaksanakan di tahun 2016-2017 menyebabkan perhitungan indeks gini tidak mampu dilakukan pada level Kabupaten/Kota. Data riil diperoleh di tahun 2015 dimana hasil pembangunan di Kota Magelang menunjukkan pola distribusi yang lebih merata, tercatat dari indeks gini yang turun 0,02 poin indeks menjadi 0,340 dari angka di tahun sebelumnya yang mencapai 0,360. Kondisi yang baik ini diprediksi bertahan dengan kecenderungan makin baik di tahun-tahun berikutnya pada interval 0,328-0,340 (deviasi $\pm 0,015$).



Gambar 2.11. Indeks Gini Nasional, Jawa Tengah dan Kota Magelang, 2007-2017
 Indeks Gini Kota Magelang Tahun 2016-2017 adalah Data Prediksi
 Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)
 Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Hakikat pembangunan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga tingkat kesejahteraan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Pada tahun 1990, UNDP telah merancang bagaimana cara mengukur keberhasilan pembangunan Manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia yang disempurnakan metodenya pada tahun 2010.

Untuk itu dalam bahasan ini akan dideskripsikan bagaimana ukuran hasil pembangunan tersebut di Kota Magelang, bagaimana posisinya di wilayah hinterland, regional maupun nasional dan ditinjau dari pembangunan serta pemberdayaan gender-nya. Selanjutnya perlu ditinjau juga kondisi riil di daerah seperti dependency ratio, kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan. Dengan demikian kita akan mampu menarik sebuah catatan penting untuk pembangunan yang lebih baik.

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM di Kota Magelang pada tahun 2017 cukup cepat sebesar 0,88% dengan capaian indeks sebesar 77,84 menempati posisi ke-4 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Surakarta. Nilai ini masuk status pembangunan manusia pada kategori tinggi. Kualitas pembangunan manusia Kota Magelang di tahun 2017 mampu mencapai angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan IPM Jawa Tengah (70,52) dan nasional (70,81).

Pertumbuhan tertinggi komponen pembentuk IPM Kota Magelang pada tahun 2017 berasal dari indikator Pengeluaran per Kapita (penduduk usia lebih dari tujuh tahun) yang tumbuh 3,92%. Sementara itu pertumbuhan Angka

Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (penduduk usia lebih dari 25 tahun) cukup lambat di bawah 1%. Lambatnya pertumbuhan RLS yang hanya berkisar 0,7% per tahun perlu mendapat perhatian khusus terlebih dalam hal penurunan angka putus sekolah dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kota Magelang. Sejak tahun 2010 RLS penduduk usia lebih dari 25 tahun di Kota Magelang stagnan pada angka 10 tahun atau setara jenjang pendidikan tingkat satu sekolah menengah atas.

Tabel 2.20

Komponen Pembentuk IPM Kota Magelang Tahun 2010-2017

Tahun	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (Rp .000,-)	IPM
2010	76,39	12,22	10,08	9.681	73,99
2011	76,44	12,33	10,14	9.922	74,47
2012	76,49	12,49	10,20	10.169	75,00
2013	76,54	12,65	10,22	10.258	75,29
2014	76,57	12,98	10,27	10.344	75,79
2015	76,58	13,10	10,28	10.793	76,39
2016	76,62	13,55	10,29	11.090	77,16
2017	76,66	13,79	10,30	11.525	77,84

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Implikasi dari tidak dilaksanakannya kegiatan Sakernas sampel besar untuk prediksi tingkat kabupaten kota adalah tidak dapat dilakukan penghitungan angka IDG yang salah satu indikatornya adalah adanya data tentang jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk perempuan. Maka angka untuk Indeks tersebut hanya tersedia di terakhir di tahun 2015. Sedangkan untuk angka IPG tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan karena akan ada perbaikan metodologi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Data terakhir di tahun 2015 tercatat bahwa pembangunan berbasis gender di Kota Magelang terus mengalami perbaikan kualitas terlihat dari peningkatan IPG dari 95,45 di tahun 2015 menjadi 95,81. Secara umum peran laki-laki dalam pembangunan manusia di Kota Magelang jauh lebih baik dibandingkan kaum perempuan kecuali dari kualitas kesehatan yang tercermin melalui indikator AHH.

Tabel 2.21

Komponen Pembentuk IPM Berdasar Gender di Kota Magelang Tahun 2014-2015

Tahun	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran (Rp .000,-)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2014	74,52	78,49	13,26	12,88	10,89	9,91	11.868	10.265
2015	74,54	78,51	13,27	12,89	10,90	9,92	12.005	10.651

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017

Pemberdayaan gender di tahun 2015 justru mengalami penurunan kualitas. Hal tersebut terlihat dari penurunan IDG ke angka 75,83 setelah di tahun 2014 mampu mencapai 78,82. Hal tersebut disebabkan karena penurunan yang cukup besar pada persentase keterlibatan perempuan di parlemen.

Tabel 2.18. Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2014-2015

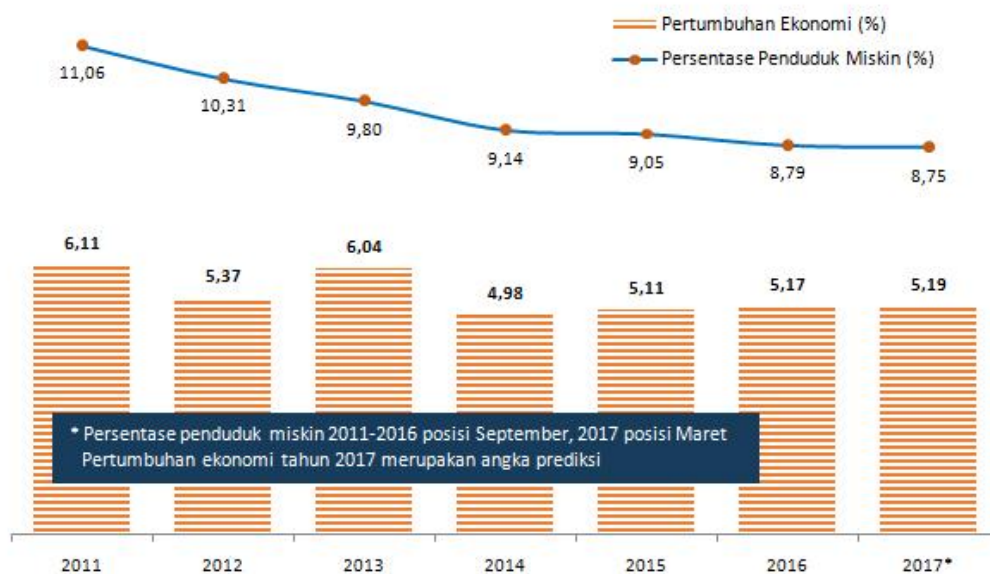
Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
2014	24,00	45,02	41,11
2015	20,00	45,74	41,81

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017

2.1.2.2.3 Kemiskinan

Sampai dengan Maret 2017 persentase penduduk miskin di Kota Magelang berangsur turun mencapai 8,75% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 450.908, yang merupakan garis kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Penurunan ini terbilang sangat kecil dibandingkan posisi September 2016. Pada periode September 2016 sampai dengan maret 2017 pengentasan penduduk miskin di Kota Magelang tercatat hanya sebesar 100 jiwa penduduk. Garis kemiskinan di Kota Magelang terus bergerak naik sedangkan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan meskipun masih lambat. Hal ini menjelaskan meskipun biaya pemenuhan kebutuhan hidup terus meningkat namun penduduk Kota Magelang dapat mengatasinya sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin menurun.

Sementara itu tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Magelang dalam kurun waktu 5 tahun masih fluktuatif dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding 2016 yaitu dari semula 1,20 menjadi 1,30 yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Meskipun demikian persentase kemiskinan di Kota Magelang terus mengalami penurunan.



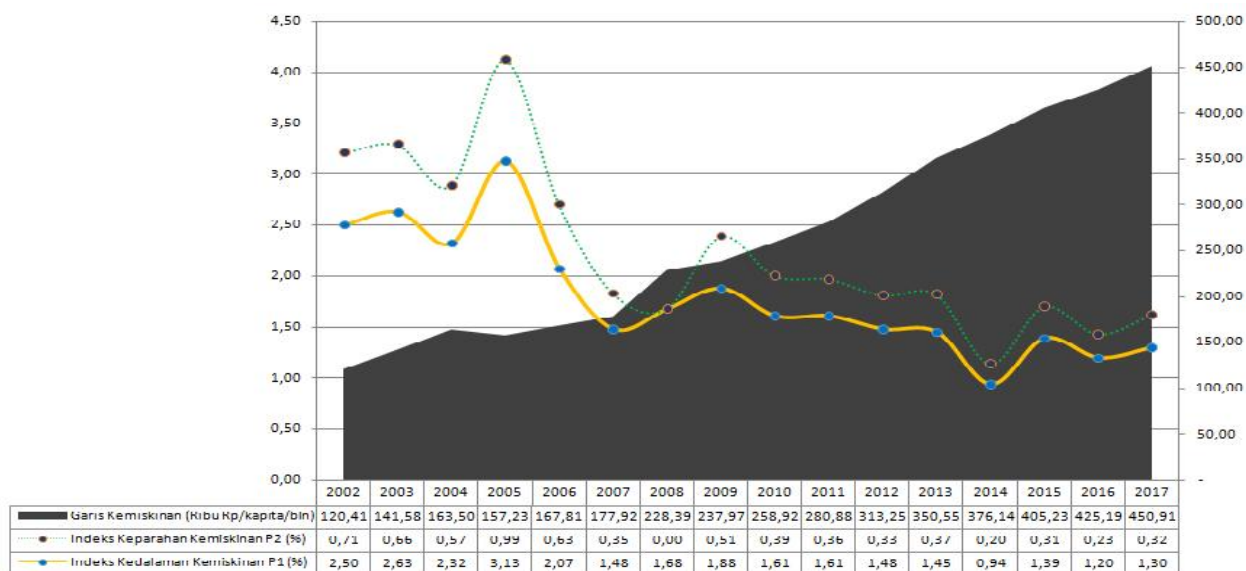
Gambar 2.12. Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2011-2017

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) juga masih terlihat fluktuatif dan perkembangan dari tahun 2016 ke 2017 semula 0,23 menjadi 0,32. P2 ini dapat dianalisa dengan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, dan di tahun 2017 terlihat bahwa indeks semakin naik yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin bertambah. Peningkatan pendapatan dan konsumsi penduduk miskin harus diupayakan agar setidaknya sama cepat dengan pertumbuhan garis

kemiskinan serta merata di seluruh kantong kemiskinan sehingga ketimpangan di antara penduduk miskin tidak semakin melebar.

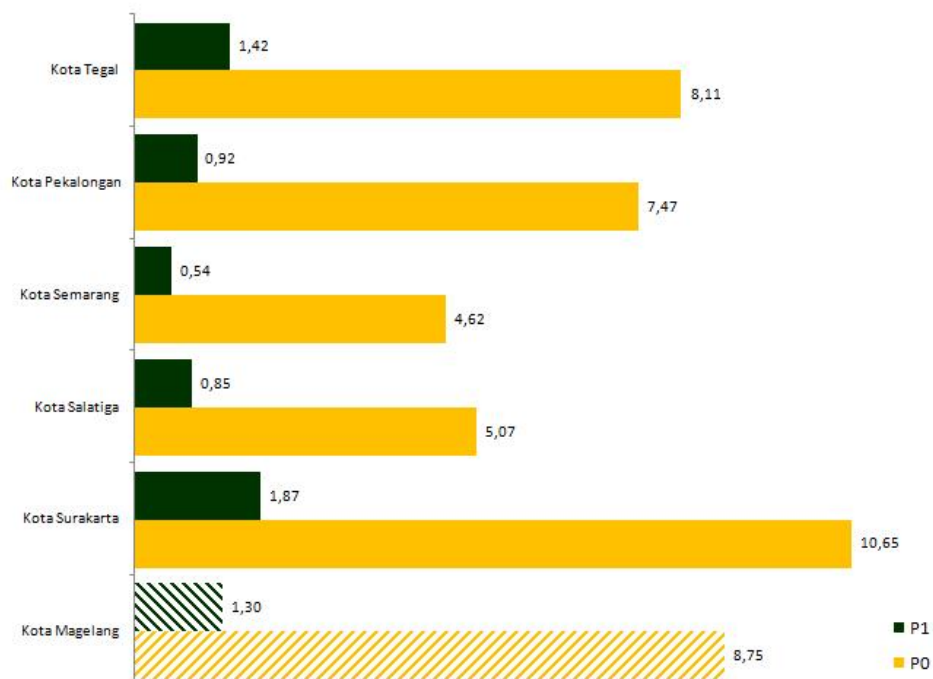


Gambar 2.13. Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Kota Magelang, 2002-2017

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Catatan: data tahun 2017 posisi Maret

Di antara enam wilayah kota yang ada di Jawa Tengah, Kota Magelang merupakan daerah perkotaan dengan garis kemiskinan tertinggi. Bahkan dibandingkan dengan seluruh Kabupaten di Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin Kota Magelang di tahun 2017 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Salatiga, Pekalongan, Semarang dan Tegal. Demikian juga dengan indeks kedalaman dan keparahan. Kualitas kemiskinan di Kota Magelang masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Salatiga, Pekalongan dan Semarang.



Gambar 2.14. Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah, 2017
 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
 Catatan: data tahun 2017 posisi Maret

2.1.2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Keterbatasan sampel Sakernas menjadikan indikator ketenagakerjaan tahun 2016 tidak dapat dibreakdown sampai dengan level Kabupaten/Kota. TPT Kota Magelang pada tahun 2017 naik dari tahun 2015 mencapai 6,68%. Pada periode tersebut (2015-2017) terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja (AK) sebanyak 2,81% (1.715 jiwa) dengan total AK sebanyak 62.775 jiwa. Kenaikan TPT ini disebabkan bertambah jumlah penduduk yang mencari pekerjaan dari 4,14 % di tahun 2015 menjadi 4,36 % di tahun 2017. Meskipun secara persentase tidak terlalu banyak tetapi secara absolut jumlah tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Untuk menurunkan angka pengangguran, perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk mencari informasi tentang spesifikasi para pencari kerja sehingga pasar kerja bisa disesuaikan dengan spesifikasi ini. Kenaikan TPT salah satunya juga ditengarai karena pertumbuhan pengangguran terbuka (6,77%) yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja dengan status bekerja (2,54%), meski di satu sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam periode tersebut mengalami kenaikan dari 64,35% di tahun 2015 menjadi 65,32% di tahun 2017. Pasar kerja di wilayah Kota Magelang sangat dibutuhkan agar angka TPT bisa terus berkurang. Untuk itu diharapkan bisa untuk mengarahkan potensi tenaga kerja ini ke dalam wilayah, atau dibuat situasi yang kondusif untuk investasi/industri, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Namun demikian pengaruh beberapa faktor seperti kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia serta upaya meminimalisir budaya “gengsi” dari pencari kerja di Kota Magelang juga perlu diupayakan dengan lebih optimal. Selain itu, dukungan permodalan khususnya bagi pekerja UMKM juga perlu untuk terus disalurkan dengan efektif dengan pemantauan yang berkelanjutan sehingga usaha yang dijalani dapat terus tumbuh dengan signifikan dan tidak terhenti dalam periode yang pendek sehingga menyebabkan munculnya kembali pencari kerja baru.

Tabel 2.22
 . Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2010-2017

Tahun	Angkatan Kerja (ribu orang)		Angkatan Kerja (ribu orang)	TPT (%)	TPAK (%)
	Bekerja	Pengangguran Terbuka			
2010	53,719	8,226	61,945	13,28	68,46
2011	58,395	7,596	65,991	11,51	71,83
2012	58,542	5,782	64,324	8,99	69,45
2013	59,567	4,313	63,880	6,75	68,37
2014	59,628	4,754	64,382	7,38	68,49
2015	57,133	3,927	61,060	6,43	64,35
2016*	na	na	na	na	na
2017	58,582	4,193	62,775	6,68	65,32

Sumber: BPS, 2018
 * Tidak ada publikasi

2.1.2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami

penurunan. TPAK pada tahun 2010 sebesar 68.46% dan pada tahun 2017 sebesar 65.32%, Dalam beberapa tahun ini kisaran angka TPAK masih sebesar 60-an%. Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja per tahun pada tahun 2010-2014 sebesar 69%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang usia kerja, yang termasuk Angkatan Kerja kurang lebih 69 orang dan tahun 2015 menurun di sekitar 65 orang. Kondisi ini diindikasikan banyaknya penduduk usia kerja di Kota Magelang yang mencari kerja di luar Kota Magelang untuk bekerja di daerah yang mempunyai kesempatan kerja lebih mapan. Dari data penduduk yang mencari kerja di Kota Magelang juga mengalami peningkatan dari 3.927 di tahun 2015 menjadi 4.193 di tahun 2017. Dibandingkan 2015 jumlah penduduk usia kerja mengalami kenaikan, begitu juga dengan angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Akan tetapi pencari kerja juga mengalami kenaikan sehingga berakibat pada angka TPT yang naik. Hal yang mengembirakan adalah menurunnya jumlah angkatan kerja yang merupakan salah satu indikasi bahwa sudah ada pergeseran bagi penduduk bukan angkatan kerja (yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga) untuk memberdayakan dirinya dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Ada keinginan untuk kelompok ini dalam membantu meningkatkan perekonomian rumah tangganya.

2.1.2.2.6 Angka Beban Tanggungan Penduduk (*Dependency Ratio – DR*)

Pada tengah tahun 2018 diproyeksi penduduk Kota Magelang mencapai 121.872 jiwa tumbuh 0,33% dari tengah tahun 2017 atau 0,16% dibandingkan penduduk akhir tahun 2017. Jumlah penduduk usia produktif dalam satu semester di tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 0,325%. Diproyeksi sampai akhir tahun 2018 penduduk Kota Magelang mencapai 121.992 jiwa dengan dominasi kaum perempuan.

Berdasarkan proyeksi kependudukan yang dipublikasi oleh BPS Kota Magelang, dapat diketahui bahwa bonus demografi telah dinikmati oleh Kota Magelang sejak tahun 2010, dimana rasio penduduk usia produktif rata-rata mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk kelompok usia non produktif. Pengendalian jumlah penduduk di Kota Magelang cukup baik dengan laju pertumbuhan penduduk di bawah 0,5% di setiap tahunnya. Angka ketergantungan juga menunjukkan rasio yang semakin rendah dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif di Kota Magelang semakin turun.

Tabel 2.23
Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2010-Tengah Tahun 2018

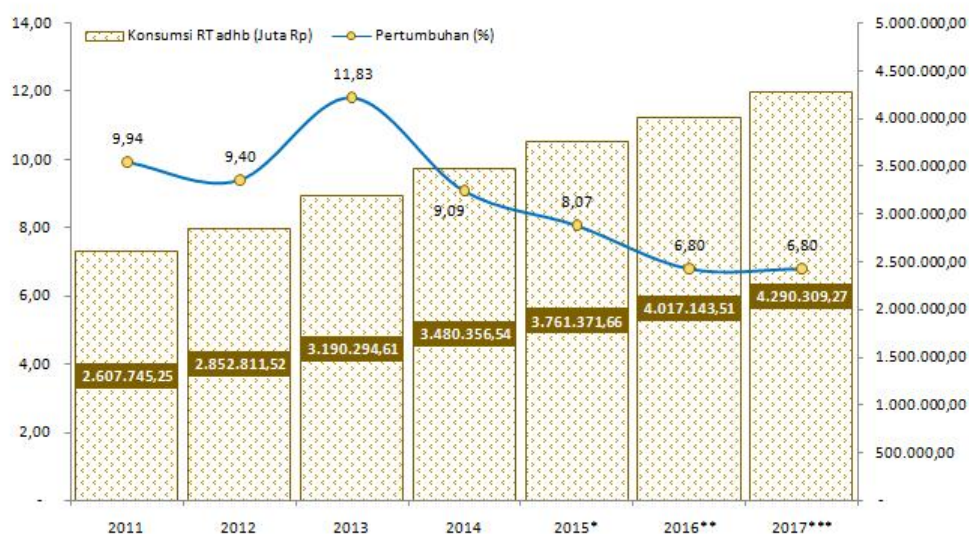
Keterangan	Akhir Tahun 2015	Akhir Tahun 2016	Akhir Tahun 2017	Tengah Tahun 2018
Proyeksi Penduduk Usia 0-14 tahun (jiwa)	26.107	25.897	25.650	25.222
Proyeksi Penduduk Usia 15-64 tahun (jiwa)	85.260	85.534	85.851	86.130
Proyeksi Penduduk usia 65 ke atas (jiwa)	9.585	9.862	10.171	10.520
Proyeksi Penduduk (jiwa)	120.952	121.293	121.673	121.872
Proyeksi Angka Ketergantungan (%)	41,86	41,81	41,72	41,50

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018 (diolah)

2.1.2.2.7 Konsumsi Rumah Tangga

Pola konsumsi rumah tangga di Kota Magelang memiliki pertumbuhan positif meski dengan tren menurun sejak tahun 2014. Pada tahun 2016 konsumsi rumah tangga di Kota Magelang mencapai 4,017 triliun Rupiah atau sebesar 58,04% dari total PDRB. Mayoritas konsumsi berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Rokok (31,9%),

kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya (28,53%) dan kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga (19,53%). Di tahun 2017 diprediksi angka konsumsi ini tumbuh eksponensial sebesar 6,8% dengan nominal 4,290 triliun Rupiah.



Gambar 2-15. Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Pertumbuhannya, 2011-2017
Sumber: BPS, 2017

* Angka sementara ** Angka sangat sementara *** Angka Prediksi
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Agama

2.1.2.3.1 Seni Budaya

Dari data tentang seni budaya yang tersedia, jumlah organisasi kesenian tahun 2018 di Kota Magelang sebanyak 222 kelompok seni budaya, yang terbagi menurut seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa, seni drama, dan seni lainnya. Kelompok-kelompok seni budaya tersebut terdiri dari antara lain: jathilan, calung, keroncong, campursari, rebana, samroh, dangdut, pop, kuda lumping, topeng ireng, kesenian reog, grasak, dayakan, barongsai, kuntulan, kubrosiswo, tarian klasik/modern, paduan suara, geguritan, seni rupa, seni lukis, kethoprak, teater, dagelan, perfilman, dan wayang kulit.

Kelompok seni budaya tersebut tersebar di kelurahan (186 kelompok), binaan sekolah (24 kelompok), dan binaan institusi / lainnya (12 kelompok). Jumlah ini masih belum akurat, karena dimungkinkan masih terdapat kelompok kesenian yang belum terdata, seperti kelompok marching band di sekolah-sekolah. Pengelompokan jumlah seniman juga masih terkendala oleh belum jelasnya definisi dan kriteria seseorang dapat disebut sebagai seniman, selain itu, seorang seniman bisa saja menekuni beberapa bidang seni.

Selain kelompok seni budaya, di Kota Magelang, juga terdapat benda dan/atau bangunan cagar budaya, yang terdiri dari bangunan-bangunan kuno, arsitektur kuno, petilasan, tempat-tempat ziarah, dan sebagainya, yang berjumlah 31 buah.

2.1.2.3.2 Olah Raga

Mulai tahun 2008, Kota Magelang membangun sebuah stadion, yaitu Stadion Madya yang berlokasi di Kelurahan Kramat Selatan. Pada tahun 2015, nama Stadion Madya berganti menjadi Stadion Moch Soebroto. Nama tersebut dipilih dengan maksud untuk mengenang dr. H. Moch Soebroto, mantan Walikota Magelang, yang menjabat tahun 1971-1981. Saat ini, stadion sudah bisa digunakan untuk berlatih dan bertanding cabang olah raga sepak bola dan atletik.

Didukung dengan ketersediaan fasilitas yang dari tahun ke tahun semakin bertambah dan lengkap, maka perkembangan olah raga di Kota Magelang sangat baik yang tergambarkan dengan banyaknya cabang olah raga dengan klubnya masing-masing. Fasilitas yang tersedia pun, tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Magelang tetapi dimanfaatkan pula oleh masyarakat luar Kota Magelang, bahkan klub olah raga bergengsi pun memilih Kota Magelang sebagai base camp untuk berlatih dan bertanding.

Beberapa klub olah raga yang hidup dan berkembang di Kota Magelang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2 - 24

Cabang Olahraga dan Jumlah Klub di Kota Magelang

No.	Cabang Olahraga	Jml Klub	No.	Cabang Olahraga	Jml Klub
01.	Sepak Bola	5	19.	Sepak Takraw	2
02.	Bulu Tangkis	20	20.	Tenis Lapangan	11
03.	Panahan	1	21.	Gulat	2
04.	Panjat Tebing	4	22.	Golf	3
05.	Basket	16	23.	Judo	1
06.	Angkat Besi Binaraga	2	24.	Catur	2
07.	Tarung Derajat	1	25.	Kempo	3
08.	Tenis Meja	2	26.	Karate	5
09.	Tinju	2	27.	Menembak	1
10.	Wushu	1	28.	Billyard	1
11.	Bridge	2	29.	Pencak Silat	5
12.	Dansa	5	30.	Balap Sepeda	2
13.	Tae Kwon Do	10	31.	Renang	4
14.	Atletik	2	32.	Bola Volly	3
15.	Arung Jeram	1	33.	Senam	32
16.	Judo	1	34.	Selam	1
17.	Futsal	20	35.	Paralayang	1

No.	Cabang Olahraga	Jml Klub	No.	Cabang Olahraga	Jml Klub
18.	Sepatu Roda	1	Jumlah		175

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang

2.1.2.3.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi salah satu keunggulan kompetitif di Kota Magelang, dari sisi Sumber Daya Manusia. Beberapa warga Kota Magelang telah mengharumkan nama Kota Magelang baik di tingkat Provinsi, Nasional, bahkan Internasional melalui berbagai prestasi yang berhasil diraih, antara lain:

- Andrew S dan Liwiryon Sudarso, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, memenangkan kontes Imagine Ristek 2011 kategori Rule of Robo Cup tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta, dan mewakili Indonesia ke kontes robot internasional di Istanbul Turki.
- SMP Negeri 1 Kota Magelang Menduduki peringkat pertama nasional dalam perolehan nilai hasil ujian nasional (UN) 2012/2013, dengan nilai rata-rata hasil UN 9,14.
- Jingga Mutiara, siswa SMP 1 Kota Magelang meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional (OSN) mata pelajaran IPS di Padang akhir Mei 2014. Keberhasilan itu mengulangi prestasi kakak kelasnya, Gabriella Krista Anindit, yang juga meraih medali perak OSN mata pelajaran IPS di Batam tahun 2013.
- Fun Nagede Adinsyah (medali perunggu cabang ekonomi), Kurniawati Yuli Ashari (medali perak, cabang ekonomi), dan Husen Wahyu Adi (medali emas, cabang astronomi). Ketiganya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Magelang, mengikuti Olimpiade Sains SMA 2013, yang diselenggarakan oleh ITB.
- Immanuel William Suryowidagdo, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 16 dunia di World Robotic Olimpiade (WRO) Sochi, Rusia (2014).
- Achmad Haulian Yoga, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih juara matematika Sains dan Bahasa Inggris (MSI) tingkat nasional (2014).
- Pada tahun 2015, 2 siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang meraih peringkat 1 pada Olimpiade Sains Nasional, yaitu Nebiba Abdul (bidang Kimia) dan Muhammad Fadlil Ismail (bidang Astronomi).
- Siti Mukaromah, siswa SMK Negeri 2 Kota Magelang, meraih juara 3 Olimpiade Sains Terapan Nasional Siswa SMK bidang lomba Matematika non Teknologi (2015).
- Jingga Mutiara Windyarahma, siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 1 Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMA Bidang Kebumian (2016).
- Annida Naufal Irvania, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 2 Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (2016).
- Reynaldo Vergiawan Ridho, siswa SLB-B YPPALB, meraih peringkat 1 Lomba Keterampilan Siswa SMALB tingkat Provinsi, Mata Lomba Informasi dan Teknologi (2016).
- Shada Sukma Syahidah, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 1 Lomba Karya Inovasi Pelajar (LKIP) IV SMP tingkat Provinsi dengan Judul Makalah "Sosialisasi Teknik Penjernihan Minyak Jelantah pada Penjual Gorengan di Lingkungan Sekolah".

Selain prestasi yang diraih siswa-siswinya, ada pula prestasi yang diraih warga dari aneka kegiatan terkait IPTEK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang melalui kegiatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA). Sejak tahun 2005 hingga 2013 (kecuali tahun 2012), temuan KRENOVA Kota Magelang selalu mendapatkan penghargaan 20 besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 perwakilan Kota Magelang berhasil meraih peringkat 15 dan juara 3 favorit pengunjung laman web Krenova Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai upaya Pemerintah memfasilitasi dan menggali kemampuan sumber daya manusia di lembaga penelitian dan pengembangan baik pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi dan mendorong peran aktif mereka dalam rangka mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan dalam jangka pendek dan menengah, maka mulai tahun 2010 Pemerintah Kota Magelang melaksanakan kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD). Selain itu, RUD dilaksanakan dalam rangka membangun jaringan keterpaduan kerjasama antara peneliti dalam bidang yang sama dan menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan kemajuan teknologi, dan memanfaatkan berbagai sumberdaya riset yang tersedia di daerah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan daerah. Aplikasi RUD yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 25
Daftar Hasil Riset Unggulan Daerah

Tahun	Judul
2010	1. Pembangkit Listrik Terbaru Hybrid Convertible Tenaga Angin dan Matahari untuk Lampu Penerangan yang Tidak Terganggu Kondisi Listrik Byar Pet dari PLN; 2. Peningkatan Pendapatan Petani Bercocok Tanam Tumpang Sari; 3. Pengembangan Model Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan Dasar di Kota Magelang.
2011	Perakitan dan pembuatan kendaraan Spyder, bekerjasama antara BPPT-Putra Agung Setia dan Pemerintah Kota Magelang.
2012	1. Optimalisasi / pemanfaatan LPG kemasan tabung 12 kg untuk bahan bakar kendaraan sebagai solusi penghematan energi sektor transportasi; 2. Tabulampot pada Berbagai Ukuran Pot dan Dosis Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Strawberry guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Magelang; 3. Pembangkit Tenaga Mikrohidro Model Drum.
2013	1. Kajian Program Magelang Kota Sejuta Bunga sebagai Dasar Perancangan Model Pemberdayaan Masyarakat "Multi Directional Cycle". 2. Pemanfaatan Tong "Takashimura" untuk Pembuatan Kompos dalam Skala Rumah Tangga bagi Warga Tidar Baru RT 01/XI Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. 3. Menggali Potensi Aliran Sungai sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan. Studi Kasus: Aliran Kali Manggis dan Kalibening Kota Magelang.

Tahun	Judul
2014	1. Persepsi Masyarakat terhadap City Branding Magelang Kota Sejuta Bunga dan Model Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal. Studi kasus: Peserta didik dan pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah Umum Kota Magelang. 2. Kajian Daya Guna Mesin Pencacah Sampah Organik. 3. Videotron dalam Percepatan Pembangunan. Studi kasus: Peran Videotron dalam Percepatan Pembangunan Kota Magelang.
2015	1. Efektifitas Pelatihan Kerja dalam Pengurangan Pengangguran Kota Magelang. 2. Pengembangan Residu Sampah Plastik Kota Magelang menuju Ketahanan Energi Kota Magelang. 3. Pengaruh Penataan Kuliner Kota Magelang terhadap Pendapatan Masyarakat.
2016	1. Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Parkir Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Gunung Tidar sebagai Destinasi Wisata.

Sumber: Kantor Litbang dan Statistik, 2017

Prestasi lainnya yang diraih Pemerintah Kota Magelang dalam bidang IPTEK dan penerapannya adalah:

- 1) Anugerah prestasi tertinggi di tingkat nasional di bidang IPTEK, yaitu penghargaan Anugerah RISTEK dari Pemerintah Pusat selama 3 tahun berturut-turut (2009-2011). Penghargaan ini diberikan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam membangun IPTEK, sebagai dasar penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah guna mendorong daya saing daerah. Pada tahun 2012 penghargaan yang sebelumnya diberikan kepada Kabupaten/kota dialihkan pada Provinsi, sehingga pemerintah Kota Magelang tidak memiliki peluang mendapatkan Anugerah RISTEK. Pada tahun 2016, penghargaan ini kembali dilaksanakan, dan Kota Magelang berhasil menjadi nominator / finalis (3 besar) peraih penghargaan Budhipraja, serta meraih penghargaan Widigdapura.

Budhipraja adalah apresiasi pemerintah melalui Kemenristekdikti terhadap kabupaten / kota dalam mengimplementasikan teknologi untuk peningkatan daerah yang diukur dalam 6 aspek, yaitu perencanaan dan inisiasi, SDM, infrastruktur, jaringan, dan hasil inovasi.

Widigdapura adalah anugerah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten / kota atas dasar pembinaannya terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten / kota dalam mengembangkan komoditas unggulan daerahnya sehingga meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, terpilih nominasi daerah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna terbaik di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Wonogiri dan Kota Magelang sebagai Daerah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2016.

- 2) Penghargaan 102 Inovasi se Indonesia (tahun 2010 yaitu penghargaan yang diterima oleh Oesman Raliby, ST., M.Eng; Dra. Retno Rudjiati, M.Kes. dengan inovasi pengeringan kerupuk dengan Panas Gas Tungku. Pengeringan merupakan metode pengawetan bahan pangan paling awal. Secara tradisional, pengeringan tergantung oleh sinar matahari, membutuhkan areal yang luas serta waktu yang cukup lama dan tidak higienis. Pengusaha skala kecil yang membutuhkan proses pengeringan butuh solusi yang efisien dan ekonomis. Desain sebuah peralatan pengering yang

berukuran sedang memanfaatkan panas dari gas buangan tungku pembakaran mencoba menjawab kebutuhan tersebut. Lebih spesifiknya desain tungku ini dibuat untuk pengeringan kerupuk, sehingga tidak tergantung pada kondisi cuaca, lebih higienis dan mampu memproses sampai dengan 90 kg kerupuk kering dalam waktu 4 jam.

- 3) Penghargaan 103 Inovasi se Indonesia (tahun 2011), yaitu penghargaan yang diterima oleh Drs. Fence Hendrikus Ohoilulin dengan inovasi Bio-Qita Alternatif Pupuk Organik Lokal yang Murah, Mudah, dan Efisien

Teknologi Bio-Qita berbasis mikroba lokal dikembangkan untuk membantu petani mengolah dan memproduksi pupuk organik secara mandiri. Teknik ini telah teruji dan mampu meminimalkan penggunaan senyawa kimia sintetis. Penggunaan Bio-Qita akan meningkatkan produksi pertanian, menurunkan toksisitas limbah, dan meningkatkan kesehatan tanaman.

- 4) Best Practice APEKSI, 2012

Dari sisi pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Magelang juga telah melengkapi diri dengan beragam teknologi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, beberapa di antaranya adalah:

- Web resmi Pemerintah Kota Magelang, untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat secara cepat.
- Web resmi Perangkat Daerah, dimana di dalam website tersebut terdapat aplikasi dan informasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- Penggunaan Sistem Informasi untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan layanan, seperti e-KTP (KTP Elektronik), SIMPUS (SIM PUSKESMAS), Perijinan, SIM Keuangan, DataGO, dan lain-lain.
- Free-access WiFi & Internet di beberapa tempat umum, seperti Alun-alun.
- Traffic Management Center, yang memantau kondisi lalu lintas di beberapa titik dengan menggunakan CCTV.
- Media sosial Facebook dan Twitter untuk berkomunikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

2.1.2.3.4 Agama

Hidup beragama merupakan hal krusial pengamalan Sila Pertama dari Pancasila. Agama mengandung ajaran hubungan manusia secara vertikal ketuhanan dan horizontal antar sesama. Agama mengajarkan perilaku kehidupan yang baik dan bermanfaat, sehingga kehidupannya terus dijaga dan dikembangkan.

Sebagian besar penduduk Kota Magelang beragama Islam (84,53%), sedangkan lainnya terdiri dari agama Kristen Protestan 9,47%, Kristen Katolik 5,40%, Hindu 0,11%, Budha 0,47%, Konghucu 0,01% dan Penghayat Kepercayaan lainnya 0,01%. Data terakhir tahun 2016, jumlah tempat ibadah terdiri dari : masjid sebanyak 153 buah, musholla 217 buah, gereja katolik 2 buah, gereja protestan 26 Buah, vihara 2 buah, kelenteng 2 buah dan rumah ibadah sebanyak 4 buah.

Jumlah jamaah haji menjadi salah satu tolok ukur hubungan vertikal penduduk beragama Islam. Tahun 2016 berjumlah 160 orang yang terdiri dari 69 pria dan 91 wanita, dengan rentang usia antara 29-82 tahun. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 147 orang.

Hal terpenting agama dalam kehidupan bermasyarakat adalah kerukunan antar umat beragama. Kondisi Kota Magelang relatif kondusif. Konflik antar umat beragama di Kota Magelang tidak pernah terjadi. Masyarakat hidup berdampingan secara damai bahkan saling berinteraksi positif bahu membahu dalam pembangunan. Kegiatan bersama antar umat beragama ini dilaksanakan seperti dalam kegiatan bakti sosial, peringatan hari besar agama, penyuluhan, dll.

Hal ini selaras dengan upaya pencapaian visi Kota Magelang sebagai Kota Religius. Kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar agama dapat dilakukan dengan baik terutama melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh pimpinan dari seluruh agama yang ada.

2.1.3 ASPEK LAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

. Kinerja urusan Pendidikan diukur melalui 8 program 46 indikator kinerja, dengan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 26
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian TW II 2018		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	69%	66%	95.46%	144,63%	●
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	56%	53%	40.53%	76,47%	▼
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/SDLB/MI/Paket A	100%	99.61%	94.77%	95,14%	●
		APK SD/SDLB/MI/Paket A	120%	114%	95.24%	83.54%	●
		APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	84%	78%	84.59%	108,44%	●
		APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	100%	88%	106.29%	120,78%	●
		Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:136	1:136	1 : 132	97,05%	►
		Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	1:290	1:290	1 : 238	82,06%	►
		Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	1:16	1:18	88,88%	►
		Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	1:14	1 : 15	93,33%	►
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	0.01	0.02%	50%	▼
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,04	0.13	0.09%	144,44%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian TW II 2018		
		Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,001	0,002	0.05%	400%	●
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%	150%	149.67%	99,78%	▶
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	165%	157%	144.31%	93%	▶
		Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	65%	100%	153,85%	●
		Penurunan jumlah kenakalan pelajar	24 pelajar	42 pelajar	1 pelajar	4,200%	●
		Cakupan kebijakan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	NA	1	1	100%	●
		Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	NA	85%	100%	117,64%	●
		Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	95%	87%	100%	114,94%	●
		Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	60%	30%	50%	166,66%	●
3	Program Pendidikan Non Formal	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	97,95%	96.99%	98.77%	101,83%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%	100%	100%	100%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%	100%	100%	100%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%	100%	99.07%	99.07%	▶
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	30%	15%	5.00%	33,33%	▼
		Jumlah Juara FASI	1	4	-	100%	▼
		Jumlah Juara MTQ	2	1	-	0%	▼
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36,25%	35.50%	78.33%	107,86%	●
		Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,53%	14.05%	54.75%	120,99%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian TW II 2018		
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88%	85%	85.91%	101.99%	●
		Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	55,15%	53.15%	44.20%	93,19%	▶
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,40%	95.1%	93.57%	100.59%	▶
		Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	68,67%	67.67%	60.74%	100,23%	▶
		Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	80%	65%	68.97%	106,07%	●
		Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	65%	68.42%	105,68%	●
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	2,000	663	33,15%	▼
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	100%	85%	95.00%	111,76%	●
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Propinsi dan Nasional	52	46	3		
		- Provinsi	34	31	3	60%	▼
		- Nasional	18	15	0	0%	▼
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	97%	90%	100.00%	113,23%	●
		Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	100%	97%	95.65%	100%	●
		Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs	90%	45%	100%	100%	●
		Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	85%	35%	100%	100%	●
7	Program Pendidikan Berkelanjutan	Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	100%	92,74%	49.91%	76,82%	▼
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	60%	45%	44.58%	89,21%	▶

Sumber : DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari total 46 indikator urusan pendidikan, 23 indikator di antaranya mampu memenuhi atau bahkan melebihi target capaian kinerja. Sedangkan 14 indikator capaian kinerja belum tercapai tetapi optimis akan mampu dicapai pada akhir tahun 2018. Disisi lain terdapat 9 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal-hal sebagai berikut:

1) APM SD/SDLB/MI/Paket A

APM SD/SDLB/MI/Paket A (Target 99,61%, Realisasi 94,77%), target tidak tercapai sampai dengan triwulan II tahun 2018 disebabkan karena data yang ada masih menggunakan data siswa tahun pelajaran 2017/2018 sedangkan tahun pelajaran 2018/2019 baru berjalan. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2018 target akan dapat tercapai.

2) APK SD/SDLB/MI/Paket A

APK SD/SDLB/MI/Paket A (Target 114%, Realisasi 95,24%), target tidak tercapai sampai dengan triwulan II tahun 2018 disebabkan karena data yang ada masih menggunakan data tahun pelajaran 2017/2018 sedangkan tahun pelajaran 2018/2019 baru berjalan. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2018 target akan dapat tercapai.

3) Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12

Rasio Sekolah SD terhadap Penduduk usia sekolah 7 -12 (Target 1:136, Realisasi 1:132), target tidak tercapai disebabkan oleh tidak adanya program penambahan pembangunan Unit Sekolah Baru SD. Dari 77 Sekolah SD di Kota Magelang melayani 10.157 siswa. Sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Magelang semakin berkurang.

4) Rasio Sekolah SMP terhadap Penduduk usia sekolah 12 – 15

Rasio Sekolah SMP terhadap Penduduk usia sekolah 12 -15 (Target 1:290, Realisasi 1:238), target tidak tercapai disebabkan oleh tidak adanya program penambahan pembangunan Unit Sekolah Baru SMP. Dari 23 Sekolah SMP di Kota Magelang melayani 5.472 siswa. Sedangkan jumlah penduduk usia 12-15 tahun di Kota Magelang semakin berkurang, dan pada sebagian usia 12 tahun masih menjadi siswa pada jenjang Sekolah Dasar.

5) Rasio guru SD terhadap murid SD

Rasio guru SD terhadap murid SD (Target 1:16, Realisasi 1:18), target tidak tercapai sampai dengan triwulan II tahun 2018. Sementara ini data masih menggunakan data tahun pelajaran 2017/2018 dan akan dihitung lagi pada triwulan III ini setelah penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2018/2019. Selain itu banyaknya guru SD yang memasuki masa purna tugas dan belum ada penggantinya juga menyebabkan target indikator ini tidak tercapai.

6) Rasio guru SMP terhadap murid SMP

Rasio guru SMP terhadap murid SMP (Target 1:14, Realisasi 1:15), target tidak tercapai sampai dengan triwulan II tahun 2018 Sementara ini data masih menggunakan data tahun pelajaran 2017/2018 dan akan dihitung lagi pada

triwulan III ini setelah penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2018/2019. Selain itu banyaknya guru SMP yang memasuki masa purna tugas dan belum ada penggantinya juga menyebabkan target indikator ini tidak tercapai.

7) Angka Melanjutkan SD ke SMP

Angka Melanjutkan SD ke SMP (Target 150%, Realisasi 149,67%), target tidak tercapai hanya kurang 0,33% disebabkan oleh berkurangnya jumlah lulusan SD yang masuk ke jenjang SMP, angka ini masih menggunakan data tahun pelajaran 2017/2018 dan akan dihitung lagi pada triwulan III ini setelah penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2018/2019. Namun demikian dapat dipastikan bahwa seluruh lulusan SD semuanya dapat tertampung di jenjang SMP.

8) Angka Melanjutkan SMP ke SMA

Angka Melanjutkan SMP ke SMA (Target 155%, Realisasi 144,31%), target tidak tercapai masih kurang 10,69% disebabkan karena lulusan SMP melanjutkan sekolah ke Sekolah Kejuruan/SMK. Namun demikian karena adanya sistem Zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian siswa lulusan SMP yang berdomisili dari luar Kota tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMA di Kota Magelang.

9) Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C

Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C (Target 100%, Realisasi 99,07%), target indikator ini tidak dapat tercapai disebabkan dari 108 siswa kesetaraan paket C ada 1 orang siswa yang tidak lulus karena tidak mengikuti ujian akhir.

10) Persentase Guru SD bersertifikat Pendidik

Persentase Guru SD bersertifikat Pendidik (Target 53,15%, Realisasi 44,20%), target tidak tercapai masih kurang 8,95%. Dari data Guru SD yang berjumlah 896 baru 396 Guru yang bersertifikat pendidik. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah Guru SD yang bersertifikat pendidik banyak yang pensiun dan adanya perubahan mekanisme yang semakin ketat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud bagi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.

11) Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Target 95,10%, Realisasi 93,57%), target tidak tercapai masih kurang 1,53%. Dari data Guru SMP yang berjumlah 731 sudah 684 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, dan masih 47 Guru SMP yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Hal ini disebabkan Guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang usianya menjelang pensiun enggan untuk melanjutkan studi S1/D-IV.

12) Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik

Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (Target 67,67%, Realisasi 60,74%), target tidak tercapai masih kurang 5,38%. Dari data Guru SMP yang berjumlah 731 baru 444 Guru yang bersertifikat pendidik. Hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme yang semakin ketat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud bagi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.

13) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B dari target 97% Realisasi 95,65%, baru 22 SMP/MTs dari keseluruhan 23 SMP/MTs di Kota Magelang yang berakreditasi minimal B, hal ini disebabkan karena adanya salah satu Sekolah SMP Swasta yang nilai akreditasinya kurang atau sekolah tersebut sudah tidak layak untuk beroperasi. Sementara ini kegiatan akreditasi untuk tahun 2018 masih dalam proses yang hasilnya akan keluar pada sekitar bulan November, sehingga target indikator ini optimis akan tercapai pada akhir tahun 2018.

14) Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching

Indikator kinerja ini tsampai dengan triwulan II telah mencapai 44,58 persen dari target 45 persen pada tahun 2018, sehingga optimis akan tercapai pada akhir tahun 2018.

Disisi lain terdapat 8 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi. Kinerja ke-8 indikator ini belum memuaskan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi

Capaian indikator kinerja Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi sampai dengan Triwulan II tahun 2018 baru mencapai 40,53 persen dari target 53 pesen, baru 77 PAUD dari keseluruhan 190 PAUD di Kota Magelang. Hal ini dikarenakan kegiatan akreditasi masih dalam proses yang hasilnya akan keluar pada sekitar bulan November, sehingga target indikator ini optimis akan tercapai pada akhir tahun 2018.

2) Angka Putus Sekolah SD/MI

Angka Putus Sekolah SD/MI (Target 0,01%, Realisasi 0,02%), terdapat 3 siswa SD/MI yang putus sekolah dari 14.786 jumlah seluruh siswa SD/MI. Angka ini masih menggunakan data tahun pelajaran 2017/2018 dan akan dihitung lagi pada triwulan III ini setelah penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2018/2019.

3) Persentase lembaga PNF yang terakreditasi

Capaian indikator kinerja Persentase lembaga PNF yang terakreditasi sampai dengan Triwulan II tahun 2018 baru mencapai 5 persen dari target 15 pesen, baru 4 PNF dari keseluruhan 80 lembaga PNF di Kota Magelang. Hal ini dikarenakan kegiatan akreditasi masih dalam proses yang hasilnya akan keluar pada sekitar bulan November, sehingga target indikator ini optimis akan tercapai pada akhir tahun 2018.

4) Jumlah Juara FASI

Indikator ini belum dapat memenuhi target karena kegiatan FASI baru akan dilaksanakan pada bulan September Tahun 2018.

5) Jumlah Juara MTQ

Indikator ini belum dapat memenuhi target karena kegiatan MTQ baik tingkat kota maupun provinsi baru akan dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2018.

6) Jumlah Kunjungan ke Desa Buku

Jumlah kunjungan ke Desa Buku (Target 2.000 orang, Realisasi 663 orang), yang baru tercapai 33,15% target tidak tercapai disebabkan oleh :

- a. Pengelolaan desa buku belum optimal.
- b. Aset desa buku tercatat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang, sedangkan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan
- c. Untuk bisa mengakses Desa Buku, Pengunjung harus melalui pintu masuk Taman Kyai Langgeng, sehingga harus membeli tiket terlebih dahulu.
- d. Masyarakat lebih memilih bacaan berbasis on line
- e. Kekurangan sumber daya manusia, terutama yang laki-laki.

7) Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Provinsi dan Nasional

Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Provinsi dan Nasional dari Target 30 di jenjang Provinsi baru tercapai 14 dan di jenjang Nasional dari target 14 baru tercapai 6 hal tersebut disebabkan oleh :

- Target ditentukan masih mengikutkansertakan capaian prestasi pada sekolah SMA/SMK, sedangkan pada tahun 2017 Kewenangan pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi.
- Kurangnya pembimbingan dari tenaga Ahli/Profesional dari kalangan akademisi Perguruan Tinggi untuk Lomba Olimpiade Sains Nasional untuk Cabang Matematika, IPA dan IPS
- Kompetisi perseorangan yang sangat ketat untuk Lomba di Tingkat Provinsi dan Nasional. Namun demikian selain lomba perseorangan untuk Lomba-lomba yang kelembagaan untuk prestasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional/USBN SD Tahun 2017 peringkat 1 (satu) Provinsi Jawa Tengah , SD Tarakanita menjadi Sekolah Adi Wiyata Tingkat Nasiona dan SMP Negeri 1 Kota Magelang untuk Ujian Nasional/UN meraih peringkat 1 (satu) Provinsi Jawa Tengah.

- 8) Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar (Target 66,34%, Realisasi 65%), target tidak tercapai disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan kursus mahir dasar pada tahun 2017. Adapun kursus mahir dasar pramuka bagi pembinaan pramuka diselenggarakan di beberapa sekolah melalui fasilitasi anggaran Bosda.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras

2.1.3.1.2 Kesehatan

Indikator kinerja urusan kesehatan melibatkan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 27

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian TW II 2018		
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	1. Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	●
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%	100%	100%	100%	●
		2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	<20%	6.06%		●
		3. Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	<45%	1.34%		●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian TW II 2018		
		4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15%	<15,4%	0.10%		●
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Cakupan pengawasan obat dan makanan	75%	70%	69,60%	174%	●
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	98%	97%	95,96%	98,92%	▼
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	●
		2. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	●
		3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0,31%	<0,31%	0.23%	310%	●
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Persentase rumah sehat	86,1%	84,3%	0%	0%	▼
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Keluruhan UCI (Universal Child Immunization)	100%	100%	100%	100%	●
		2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100%	100%	100%	100%	●
		3. Angka Kesakitan DBD	<50	<50	7,64		●
		4. Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<101	<104	78,71		●
		5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90	<90	27,1		●
		6. Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,5%	<0,5%	0.01%		●
		7. Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	100%	100%	100%	●
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	100%	82,50%	100%	133,3%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian TW II 2018		
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	92.5%	60%	100%	166,66%	●
		3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	100%	80%	100%	125%	●
		4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	80%	100%	100%	100%	●
		5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	100%	80%	100%	166,66%	●
		6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90%	75%	100%	153,84%	●
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	100%	100%	100%	●
		2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	●
		3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%	15%	100%	32%	●
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1. Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	50%	20%	39,68%	198,4%	●
11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1. Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	76,47%	58,82%	52,94%	90%	▶
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%	85%	100%	117,6%	●
		2. Cakupan Kunjungan Bayi	96%	96%	41.93%	43,67%	▼

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian TW II 2018		
		3. Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	90%	42.06%	46,73%	▼
		4. Cakupan Puskesmas Ramah Anak	35,29%	18%	100%	833,33%	●
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%	75%	48.46%	64,61%	▼
		2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	35,29%	18%	100%	833,3%	●
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	1. Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	90%	87%	0%	0%	▼
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%	95%	43.22%	45,49%	▼
		2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	●
		3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	95%	92%	47.44%	51,56%	▼
		4. Cakupan Pelayanan Nifas	100%	100%	47.38%	47,38%	▼
16	Program Peningkatan Kesehatan BLUD	1. Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA	AA	A	50%	▼

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari ke-41 indikator kinerja urusan kesehatan, terdapat 30 indikator yang telah mencapai target. Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 % atau lebih.

Sedangkan 1 indikator akan tercapai, namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir tahun 2018.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri dengan realisasi baru mencapai 52,94% dari target 58,82%. Hal ini karena baru terdapat 9 kelurahan siaga aktif tingkat mandiri dari 17 kelurahan di Kota Magelang. Sampai dengan akhir 2018 diharapkan terdapat 10 kelurahan siaga aktif tingkat mandiri sehingga target indikator ini dapat tercapai.

Disisi lain terdapat 10 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi. Kinerja ke-10 indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

- 1) Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat sampai dengan akhir triwulan II masih belum dapat memenuhi target 2018 disebabkan karena kegiatan pendataan masih berjalan dan akan selesai pada akhir tahun 2018.
- 2) Indikator Persentase rumah sehat sampai dengan akhir triwulan II belum dapat memenuhi target, hal ini disebabkan karena pendataan masih berjalan dan perubahan cara penilaian rumah sehat di tahun 2018 yaitu mensyaratkan jamban sehat. Dalam hal ini dari sejumlah rumah yang diambil sampelnya, beberapa rumah ditemukan tidak memiliki jamban sehat.
- 3) Cakupan Kunjungan Bayi sampai dengan akhir triwulan II baru mencapai 41,93%, hal ini disebabkan karena sampai dengan akhir triwulan II baru ada 634 bayi lahir hidup dari 1.512 bayi yang diperkirakan lahir di tahun 2018. Perlu menjadi perhatian kita bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 telah terjadi kematian bayi sebanyak 9 kasus.
- 4) Cakupan Pelayanan Anak Balita baru mencapai 42, 06%, hal ini disebabkan karena secara bertahap baru 2.565 balita dari 6.098 balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan. Indikator ini sangat dipengaruhi juga oleh partisipasi masyarakat dalam ikut aktif membawa balitanya ke posyandu. Sampai dengan akhir tahun 2018 diharapkan seluruh balita sudah memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan.
- 5) Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya dengan realisasi capaian baru 48,46% , hal ini karena penghitungan baru berjalan hingga akhir triwulan II. Namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021.
- 6) Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan sampai dengan akhir triwulan II masih belum dapat memenuhi target 2018 disebabkan karena kegiatan pendataan masih berjalan dan hasilnya akan keluar pada akhir tahun 2018.
- 7) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 dengan capaian baru 43,22%, hal ini disebabkan adanya ibu-ibu yang hamil di awal tahun sehingga belum mencapai kunjungan keempat sampai dengan akhir tahun.
- 8) Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) baru mencapai 47,44%, hal ini disebabkan karena baru ada 752 persalinan sampai dengan triwulan II tahun 2018 dari 1.585 sasaran ibu bersalin. Dari 752 persalinan tersebut, semuanya ditolong oleh tenaga kesehatan. Sampai dengan akhir tahun 2018 diharapkan seluruh sasaran ibu bersalin akan memperoleh pertolongan dari tenaga kesehatan. Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 terjadi kematian ibu bersalin sebanyak 2 kasus.

Angka Kematian Ibu seharusnya dapat dicegah dengan mendeteksi secara dini kehamilan dengan memberikan pelayanan antenatal care pada ibu hamil dengan hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan Kunjungan ke-1 (K1) dan Kunjungan ke-4 (K4) dan dengan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Strategi kunci Antenatal Terfokus adalah setiap kunjungan ditangani oleh penyedia tenaga kesehatan yang ahli yaitu bidan, dokter, perawat, atau tenaga kesehatan yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif untuk mencapai setiap wanita hamil menghadapi risiko komplikasi yang bisa mengancam jiwanya. Dengan meningkatnya cakupan K4 dan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan diharapkan AKI dapat ditekan .

- 9) Cakupan Pelayanan Nifas baru mencapai 47,38%, hal ini disebabkan karena baru ada 751 ibu nifas yang telah memperoleh pelayanan nifas sesuai standar sampai dengan triwulan II tahun 2018 dari 1.585 seluruh sasaran ibu nifas. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2018 seluruh sasaran ibu nifas akan memperoleh pelayanan nifas sesuai standar.
- 10) Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan, saat ini baru mencapai nilai A yang merupakan capaian pada tahun 2017. Untuk target AA di tahun 2018 kemungkinan tidak dapat tercapai, karena saat ini ada 2 paket pembangunan gedung di lingkup RSUD Tidar yang sangat mempengaruhi kinerja operasional secara keseluruhan.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras .

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi penanganan sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Penataan Ruang. Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan per sub Urusan antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - 28

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Kinerja Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		
1.	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	2.242 meter	1.342 meter	1.362 meter	101%	
		2. Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	71,9%	66,34%	65,12%	98%	
2.	Program pembangunan saluran	1. Persentase panjang drainase dalam	89%	86%	85%	98%	

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Kinerja Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		
	drainase/gorong-gorong	kondisi baik					
		2. Jumlah shipon yang dibangun	10 bh	7 bh	7 bh	100%	●
3.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	80%	74%	75%	101%	●
4.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	100%	84%	81%	96%	●
5.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Persentase kawasan strategis yang terbangun	4 kawasan	4 kawasan	2 kawasan	50%	▶
6.	Program pengembangan wilayah perbatasan	1. Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	0%	0%	0%	0%	●
7.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1. Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	100%	95%	90%	94%	●
8.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	96%	90%	93%	103%	●
		2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	91%	93%	102%	●
9.	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	1. Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%	100%	0%	0%	●
		2. Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	100%	80%	40%	50%	●
10.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	1. Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga	25%	25%	18%	72%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Kinerja Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		
		ahli, tepat waktu, efisien)					

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Indikator Panjang Jalan Penghubung baru yang dibangun dengan target 1.342 meter capaian kinerjanya sudah melebihi target dengan total panjang jalan baru yang dibangun 1.362 meter yang dicapai dengan telah terbangunnya Jalan Penghubung Jalan Jend. Sudirman dengan Jalan Sarwo Edhie Wibowo.

Indikator prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik dengan target 66,34%, capaian kinerjanya 65,12% atau 98% masih belum mencapai target. Namun dengan telah dimulainya pelaksanaan beberapa pekerjaan perbaikan/peningkatan trotoar pada beberapa ruas jalan diantaranya peningkatan trotoar Jalan Pahlawan dan Jalan Diponegoro target 66,34% optimis dapat tercapai.

Indikator prosentase panjang drainase dalam kondisi baik dengan target 86% capaian kinerjanya masih 85% atau baru tercapai 98% hal ini berarti dengan total panjang drainase 237.830 meter, yang kondisinya baik sepanjang 202.156 meter, untuk mencapai target 86% kegiatan yang dilaksanakan adalah rehabilitasi/peningkatan saluran drainase di beberapa ruas jalan diantaranya yaitu Jalan Sunan Bonang, kawasan Jalan Letjend Suprpto, Jalan Sultan Agung dan Kawasan Jalan Teuku Umar, serta pemeliharaan rutin diseluruh saluran drainase di Kota Magelang untuk menjaga kondisinya selalu dalam keadaan baik.

Indikator jumlah shipon yang dibangun dengan target 7 buah sampai dengan tahun 2018 capaian kinerjanya masih 7 buah, namun akhir tahun capaian target bisa mencapai 8 buah shipon dengan dibangunnya shipon Sanden untuk memperlancar saluuran drainase di Kelurahan Kramat Selatan..

Indikator saluran irigasi dalam kondisi baik dengan target 84% mencapai target 81% atau 100%, hal ini berarti dari panjang saluran irigasi Kalikota yang menjadi kewenangan Kota Magelang sepanjang 5.000 meter, yang dalam kondisi kurang baik yaitu 950 meter, yang menjadi kendala untuk mencapai target 84% adalah dalam pemeliharaan irigasi masih adanya rumah-rumah liar dan bangunan fasum diatas saluran di sepanjang kali kota serta penyempitan saluran disisi selatan yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Indikator persentase kawasan strategis yang terbangun dengan target 4 kawasan yang dibangun di Tahun 2018, capaian kinerjanya hanya membangun 2 kawasan strategis atau 50% dari target, hal ini dikarenakan penataan Kawasan Mantyasih sudah selesai dilaksanakan dan pengelolaan asetnya sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Untuk indikator Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 0% karena pada tahun anggaran 2018 target kinerjanya 0% di RPJMD sehingga tidak dilaksanakan kegiatan.

Indikator prosentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dari target 95% capaian kinerjanya hanya mencapai 90% atau 94% hal ini dikarenakan pada tahun penetapan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengoptimalkan armada yang tersedia tanpa menambah jumlah armada alat berat, namun untuk mencapai target pada perubahan anggaran tahun 2018 akan menambah kendaraan dump truck yang dapat difungsikan untuk pemeliharaan jalan di Kota Magelang.

Indikator prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik dengan target 90% capaian kinerjanya mencapai 93% atau 103% dengan artian dari total jumlah 74 buah jembatan yang kondisinya baik sejumlah 69 buah. Target tersebut dapat dicapai karena tahun 2017 telah dilaksanakan percepatan pembangunan jembatan yang dibangun yaitu jembatan rumkit dr. Soedjono, jembatan jalan Tentara Genie Pelajar, Jembatan Kalimas dan Jembatan Kel. Kedungsari.

Indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik dari target 91% capaian kinerjanya sebesar 93% atau melebihi target 102% berarti dengan total panjang jalan sepanjang 118.915 meter, jalan dengan kondisi baik panjangnya 110.591 meter, namun pada perubahan anggaran tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum mengusulkan untuk memelihara beberapa ruas jalan kota yang diusulkan oleh masyarakat dan kondisinya kurang baik.

Indikator prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi dari target 100% pada 2018 capaian kinerjanya masih 0%, hal ini dikarenakan dari 6 (enam) kegiatan pembangunan gedung fasilitas kota diantaranya pembangunan Kolam Renang, Monumen Tanah Air, Pembangunan Gardu Pandang, Pembangunan Lapangan Tenis, Penataan Lingkungan Rumah Dinas dan Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar masih proses pelaksanaan pembangunan.

Indikator prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas dengan target 80% capaian kinerjanya masih 40%, tolok ukur dari kinerja ini dari kondisi trotoar kota Magelang yang memenuhi standar aksesibilitas yaitu dari panjang 237.830 meter, hanya 95.132 meter yang memenuhi syarat standar, hal ini dikarenakan dari sempitnya beberapa trotoar, di tengah trotoar ditumbuhi pepohonan dan kondisi trotoar yang rusak di beberapa ruas jalan dan perlu rehab dan penataan total keseluruhan trotoar hingga dapat memenuhi standar aksesibilitas.

Indikator prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien dari target kinerja sebesar 25% capaian kinerjanya sudah mencapai 18%, hal ini diraih dengan target di penetapan sebanyak 22 proyek fisik konstruksi yang mencapai sesuai syarat sebesar 4 proyek, karena sudah selesai dilaksanakan.

Sedang Kinerja pembangunan sub urusan Penataan Ruang antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 -29

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2018	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%	50%	8%	16%	▼
		Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	●
		Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	15%	15%	▼
2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	27 %	24%	23.5%	96%	●
		Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	10%	1%	0%	0%	▼
		Rasio surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	40%	30%	27.5%	91%	▶
		Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua		20%	20%	100%	●

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari 7 (tujuh) indikator program yang dilaksanakan oleh Sub Urusan Penataan Ruang di Tahun 2018, hingga triwulan II ada 4 (empat) indikator sesuai target, dan ada 3 (tiga) indikator yang perlu upaya keras.

Untuk Program prioritas perencanaan tata ruang mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, 1 (satu) indikator tercapai 2 (dua) indikator perlu upaya keras penjelasan kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) sampai triwulan IV tahun 2017 baru memiliki 1 dokumen RTRW Kota Magelang atau sekitar 8 % dari total 13 dokumen, sedang target di tahun 2017 sebanyak 6 dokumen yaitu 1 Perda RTRW dan 5 perda RDTRK atau sebesar 50%. Tahun 2018 dokumen RTRW yang ditetapkan melalui Perda nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031 diajukan untuk diajukan revisi, didasari usia Perda RTRW sudah 5 (lima) tahun dan dari hasil Peninjauan Kembali pada Tahun 2016 terdapat penyimpangan terhadap rencana sebesar 20 %, sehingga direkomendasikan dilakukan revisi. Hingga Triwulan II Reperda Revisi RTRW sudah

dilakukan pembahasan di Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPRD) Provinsi Jawa Tengah, diharapkan bulan Agustus 2018 mendapatkan Rekomendasi Gubernur sebagai salah satu persyaratan Persetujuan Subtansi Kementerian ATR/BPN.

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) masih jauh dari raget yang ditetapkan, disisi lain keberadaan dokumen RDTRK dan RTBL yang merupakan dokumen operasional dalam penataan ruang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kota Magelang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Dokumen RDTRK dan RTBL diantaranya sebagai berikut:

1. Panjangnya proses yang harus dipenuhi dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RDTRK, mulai dari penyusunan materi teknis, konsultasi publik, persetujuan DPRD, rekomendasi peta dari BIG, rekomendasi teknis dari BKPRD Provinsi, Persetujuan Subtansi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang, serta penetapan DPRD Kota Magelang. Dari 5 (lima) Raperda RDTR yang diajukan persetujuan subtansi ke provinsi sejak tahun 2014 hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan subtansi.
2. Banyaknya alih fungsi lahan sehingga perlu dilakukan Revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang sebagai dasar penetapan Raperda RDTRK.
3. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang harus diakomodir dalam dokumen Tata Ruang yang belum jelas arahnya di daerah yaitu rencana reaktivasi kembali jalur kereta api dan kewajiban pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Padu serasi antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang terkendala belum sepadatnya batas wilayah sesuai Permendagri 64 Tahun 2017.

Upaya yang harus dilakukan agar target Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) dapat terus tercapai yaitu

1. Tetap konsisten sesuai jadwal dalam memenuhi proses penetapan Dokumen RTRW, RDTRK dan RTBL. Dimana untuk Tahun 2018 ini Raperda revisi Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW harus bisa ditetapkan sehingga 5 (lima) Raperda RDTRK sebagai turunan dari Perda RTRW bisa ditetapkan di Tahun 2019.
2. Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik dengan BKPRD Provinsi yang memberikan rekomendasi teknis serta Kementrian ATR/BPN yang memberikan Persetujuan Subtansi.
3. Segera mengajukan pembahasan ke Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan rekomendasi.
4. KLHS yang menjadi salah satu persyaratan untuk segera dilakukan validasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
5. Koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya harmonisasi pola ruang dan batas wilayah administrasi.

Capaian realisasi indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara OPD teknis yang menangani Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perizinan. Walaupun indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan ini selalu tercapai 100%, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan perijinan, diantaranya sebagian besar masyarakat melakukan ijin setelah ada aktivitas pembangunan, sehingga berdampak kesulitan dalam memberikan arahan kesesuaian peruntukan ruangnya. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW serta meningkatkan pengendalian dan pelayanan informasi penataan ruang.

Indikator tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital hingga triwulan II Tahun 2018 baru tercapai 15 % dari target yang ditetapkan di Tahun 2018 sebesar 100%. Dari 6 dokumen peta yang direncanakan yang terdiri 1 dokumen peta RTRW (1:25.000) dan 5 peta rencana rinci atau RDTRK baru (1 : 5.000) hingga triwulan II Tahun 2018 baru 1 dokumen peta RTRW yang sudah jadi dan terinformasikan ke masyarakat.

Kendala yang dihadapi ini yaitu belum ditetapkannya Raperda tentang RDTRK yang menunggu hasil revisi Perda RTRW Kota Magelang Tahun 2018 ini.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, dengan menginformasikan mengenai peta RTRW Kota Magelang ke Kelurahan dan masyarakat, selain itu informasi mengenai RTRW Kota Magelang juga dipasang di beberapa tempat publik seperti di sekitaran Alon-alon Kota Magelang, Taman badaan, dan Kawasan Pemerintah Kota. Hal ini dapat memberikan informasi atau sosialisasi secara baik kepada masyarakat umum tentang rencana tata ruang Kota Magelang dalam 20 tahun mendatang. Tentunya sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat ikut mendukung rencana tersebut karena hal ini demi keberlanjutan tata ruang Kota Magelang 20 tahun mendatang. Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) perlu dilakukan terus menerus dan lebih luas supaya masyarakat akan lebih memahami Rencana Tata Ruang.

Untuk Program prioritas pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai 4 (empat) indikator kinerja, hingga triwulan II Tahun 2016 2 (dua) indikator tercapai, 1 (satu) indikator akan tercapai, dan 1 (satu) indikator perlu upaya keras, penjelasan kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Indikator Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan ditargetkan 24% di triwulan II Tahun 2018 realisasi sebesar 23,5 % atau 8.479 unit bangunan ber IMB dari 35.455 unit bangunan diseluruh Kota Magelang. Diharapkan hingga akhir Tahun Anggaran 2017 target sebesar 24 % bisa tercapai.

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.
- Pelestarian/pemugaran.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan diantaranya yaitu:

1. Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan sesuai arahan tata ruang masih rendah.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan target Rasio bangunan ber IMB persatuan Bangunan diantaranya:

1. meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.
2. sosialisasi terkait Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung ditiap kecamatan serta memanfaatkan papan informasi yang tersedia.
3. Pemberian keringanan berupa kegiatan Pemutihan IMB kepada masyarakat.

Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1% realisasi hingga triwulan II Tahun 2018 masih 0%, hal tersebut dikarenakan belum adanya Peraturan yang mengatur mengenai ijin mendirikan reklame serta aturan teknis yang mendasarinya. Hingga saat ini semua reklame yang ada di Kota Magelang belum ada IMB, hanya ditarik retribusinya melalui Perda redistribusi pelayanan tertentu. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri, yaitu dengan penyusunan Raperda tentang Reklame. Untuk rancangan Raperda Reklame sudah tersesusun di tahun 2017 tetapi hingga kini belum dapat ditetapkan karena menunggu revisi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang.

Indikator rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB hingga triwulan II Tahun 2018 tercapai 28 % dari target 30 %. Kendala yang dihadapi diantaranya, surat teguran yang dilaksanakan masih terbatas pada bangunan yang sedang dalam proses pembangunan yang belum mengajukan ijin serta pada bangunan yang melanggar peruntukan pola ruangnya. Untuk bangunan yang sudah terbangun tapi belum ber IMB masih belum dijangkau.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target di Tahun 2018 sebesar 30 % yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.

Adapun target indikator Urusan Perumahan dan Realisasi Tahun hingga Triwulan II Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 - 30

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPd Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPd Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian s.d Tw II Tahun 2018		

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian s.d Tw II Tahun 2018		
1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	luas kawasan Kumuh Tertangani	121,17 Ha	63 Ha	55.76 Ha	88.51%	▶
2	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Cacaban	luas kawasan Kumuh Tertangani	5.62 Ha	5 Ha	4.43. Ha	73.83 %	▼
3	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Gelangan	luas kawasan Kumuh Tertangani	3,40 Ha	3 Ha	0.26 Ha	8.60 %	▼
4	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Jurangombo Selatan	luas kawasan Kumuh Tertangani	2,95 Ha	1 Ha	0 Ha	0 %	▼
5	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Jurangombo Utara	luas kawasan Kumuh Tertangani	4,24 Ha	6 Ha	5.75 Ha	95.8 %	▶
6	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kedungsari	luas kawasan Kumuh Tertangani	6,37 Ha	1 Ha	0 Ha	0 %	▼
7	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kemirirejo	luas kawasan Kumuh Tertangani	3,89 Ha	2 Ha	0 Ha	0 %	▼
8	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kramat Selatan	luas kawasan Kumuh Tertangani	9,26 Ha	4 Ha	3.68 Ha	92 %	▶
9	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kramat Utara	luas kawasan Kumuh Tertangani	6.59 Ha	10 Ha	9.59 Ha	95.9 %	▶
10	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Magelang	luas kawasan Kumuh Tertangani	3,84 Ha	2 Ha	1.44 Ha	72 %	▼
11	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Magersari	luas kawasan Kumuh Tertangani	7,55 Ha	13 Ha	12.31 Ha	94.7%	▶
12	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Panjang	luas kawasan Kumuh Tertangani	3,88 Ha	2 Ha	1.09 Ha	54.5 %	▼
13	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Potrobangsari	luas kawasan Kumuh Tertangani	16,20 Ha	13 Ha	12.58 Ha	96.8 %	▶
14	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Rejowinangun Selatan	luas kawasan Kumuh Tertangani	6,71 Ha	1 Ha	0.96 Ha	96 %	▶
15	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Rejowinangun Utara	luas kawasan Kumuh Tertangani	13,62 Ha	5 Ha	1.82 Ha	36.4 %	▼
16	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Tidar Selatan	luas kawasan Kumuh Tertangani	11,98 Ha	4 Ha	1.59 Ha	39.8 %	▼
17	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Tidar Utara	luas kawasan Kumuh Tertangani	8,46 Ha	5 Ha	0.26 Ha	2.8 %	▼

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian s.d Tw II Tahun 2018		
18	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Wates	luas kawasan Kumuh Tertangani	6,60 Ha	2 Ha	0 Ha	0 %	▼
19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk berakses air minum	100%	50%	45%	90%	▶
		Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	90%	50%	30%	60%	▼
		Tersedianya sistem air limbah skala kawasan	12%	8%	6.4%	80%	▼
20	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	5 unit	2 buah (20%)	2 buah (10%)	50%	▼

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Realisasi Kinerja dari Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman didapatkan ada 14 (empat belas) indikator yang memerlukan Upaya Keras dalam merealisasi target Tahun 2018, sedangkan terdapat 8 (delapan) indikator dengan Kriteria Akan Tercapai pada triwulan kedua dan akan bisa diselesaikan pada target Tahun 2018. Adapun keterangan dan dinamika hasil pemantau sampai dengan Triwulan II, secara umum pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program pembangunan infrastruktur perdesaan, dalam kriteria Akan Tercapai, karena merupakan agregat dari program turunan pembangunan yang ada di masing-masing kawasan kumuh yang berhasil ditangani dan tersebar di 17 (tujuh belas) kelurahan. Adapun program turunan tersebut adalah Program Pembangunan Kawasan Permukiman dengan prosentase luasan kawasan kumuh yang tertangani, dimana infrastruktur dalam kondisi baik akan meningkat apabila tingkat keberhasilan penanganan luasan kawasan kumuh bertambah.
2. Program Pembangunan Kawasan Permukiman di 17 Kelurahan, merupakan program pengurangan luasan kawasan kumuh tiap kelurahan, yang outcome-nya dapat diukur secara tahunan. Capaian kinerja program sampai dengan triwulan kedua adalah 6 (enam) program dengan kriteria Akan Tercapai dan 11 (sebelas) program termasuk kriteria Perlu Upaya Keras. Adapun gambaran khususnya sebagai berikut:

- a. Program merupakan tolak ukur dalam mensukseskan gerakan nasional 100-0-100 di Daerah sampai dengan Tahun 2019, dimana 0% yaitu ditempuh melalui program Nasional yaitu Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Magelang berhasil menyusun dan mengesahkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Magelang, dimana terdapat penyesuaian target kinerja pengurangan kawasan kumuh dari semula 121,17 Ha pada Tahun 2015 sudah menjadi tinggal 67,41 Ha pada Akhir Tahun 2017.
 - b. Penyajian tabel perhitungan kedua program dari RPJMD tanpa mengubah esensi capaian, disesuaikan untuk mempermudah dalam monitoring dan evaluasi, seberapa besar luasan yang bisa ditangani. Kesepakatan pengisian target kinerja merupakan agregat/gabungan besaran luasan kumuh tertangani dari target kinerja tahun lalu (Tahun 2017) sampai dengan triwulan II Tahun 2018. Penanganan fisik hasil perhitungan kemudian dikonversi menjadi outcome final (luasan kawasan kumuh tertangani) berdasarkan panduan perhitungan capaian kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - c. Permasalahan dalam pencapaian ini sangat tergantung dengan serah terima hasil pekerjaan, yang sebagian besar dikerjakan oleh pihak ketiga, mengingat program sebagian besar berupa intervensi fisik (rehab rumah, drainase, jalan lingkungan, IPAL komunal/komunil, Air Bersih, pemadam kebakaran dan sebagainya). Adapun yang capaiannya sudah tinggi karena proses administrasi lelang sudah dilakukan dari awal tahun dan pengadaan barang jasa untuk infrastruktur sudah selesai dan diserahterimakan.
 - d. Begitu juga dengan penyesuaian target penanganan kawasan kumuh yang tidak merata, karena memang keterbatasan anggaran dan jumlah personil yang terbatas di lapangan, sehingga penanganan luasan kawasan yang kecil pada Tahun 2018 hanya menampung usulan dasar di tingkat kelurahan, sehingga percepatan akan dilakukan pada Tahun 2019 dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan baik dari Pemerintah Pusat maupun Hibah Luar Negeri.
 - e. Sebagai catatan, ada beberapa capaian program yang sudah melampaui Target Tahun 2021 (Akhir RPJMD), hal tersebut dikarenakan data Tahun 2015 belum memasukkan luasan kawasan yang berkriteria/status pencegahan kawasan kumuh, dimana status pencegahan ini, merupakan suatu kawasan yang tidak teridentifikasi sebagai kawasan kumuh, akan tetapi jika tanpa intervensi kegiatan maka akan berubah menjadi kawasan kumuh dalam kurun waktu 3-5 tahun, sehingga di beberapa kelurahan tertentu target pencapaian keseluruhan saat ini (Tahun 2018) jika dibandingkan target capaian akhir RPJMD 2021 sudah melampaui.
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dimana 1 (satu) dalam kriteria Akan Tercapai yaitu Persentase Penduduk berakses air minum dalam kriteria akan tercapai dan 2 (dua) dalam kriteria Perlu Upaya Keras yaitu Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai dan Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Kawasan. Adapun gambaran khususnya sebagai berikut:
 - a. Capaian Kinerja Penyediaan Air Minum aman dan berkualitas termasuk kriteria akan tercapai, dikarenakan sudah selesainya konstruksi fisik dari program Sumbangan Rumah (SR) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi (Prohamsan) sebanyak 502 SR yang tinggal menunggu verifikasi pusat (CPMU) dan juga dalam tahap pemasangan fisik SR dari sumber dana DAK, maka dengan ini kinerja capaian akhir Tahun 2018 optimis akan

tercapai. Adapun permasalahan yang menghambat dalam implementasi sebagian besar karena data base calon penerima manfaat harus diverifikasi satu-persatu juga berkaitan dengan program yang tidak bisa masuk kedalam rumah-rumah yang teridentifikasi di kawasan squatter area. Sedangkan sampai dengan Triwulan II ini data pelanggan PDAM dari domestik mencapai 27.250 pelanggan.

- b. Permasalahan dari pencapaian akses Air Minum aman dan berkualitas adalah masih terdapat warga masyarakat yang mendapatkan bantuan SR yang tidak menggunakannya karena tarif yang ada dianggap masih kemahalan, sedangkan penyesuaian tarif khusus belum dapat diberlakukan (*willingness to pay*), disini yang lain jika warga kembali menggunakan supply air non perpipaan tidak terjamin tingkat keamanan dan kesehatan dari air minum yang dikonsumsi.
 - c. Pembangunan dan peningkatan Sambungan Rumah bagi masyarakat dan sektor properti perumahan yang terus tumbuh dan kebutuhan investasi mendatang, juga akan dipenuhi dari sisi pasokan hulu yaitu peningkatan kapasitas pengambilan air baku dari mata air dan sisi distribusi berupa pembangunan water torn (menara air) pada Tahun 2018 dan 2019, melalui Program Kota Binaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pengalihan Sumber-sumber pendanaan pembangunan akan terus dilakukan, selain melalui Penanaman Modal Daerah, juga dari Pemerintah Pusat maupun bantuan Luar Negeri melalui Program dan Kerangka Kebijakan Penyediaan Air Minum Perkotaan Nasional.
 - d. Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai termasuk dalam kriteria target yang perlu upaya keras, karena kembali lagi bahwa outcome-nya berupa infrastruktur fisik yang terkait dengan administrasi dokumen perencanaan dan serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga, sedangkan outputnya adalah warga tidak BABS atau ODF. Karena sifatnya yang satu tahun anggaran dan pekerjaannya kontraktual maka optimis pada akhir Tahun 2018 akan tercapai.
 - e. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Kawasan di Kota Magelang disesuaikan dengan kriteria Daerah bahwa tadinya merupakan SPALDT, tanpa mengurangi esensi atau tujuan umum diganti dengan capaian berupa pembangunan IPAL Komunal dimana pemanfaat sejumlah 50 sampai 70 KK. Permasalahan dalam pencapaian target yaitu ketersediaan lahan dan pengembangan anggota kelompok pengelola IPAL Komunal.
 - f. Permasalahan ketersediaan lahan bukan hanya di lokasi akan tetapi juga pada pelayanan pengambilan lumpur tinja dikarenakan armada penyedot lumpur tinja tidak bisa masuk atau tidak menjangkau lokasi IPAL, sehingga ikhwatirkan kedepan akan kurang optimalnya IPAL Komunal terbangun. Disisi lain penambahan kapasitas IPLT Dumpoh juga kurang optimal karena kurangnya pasokan lumpur tinja.
4. Program Pengembangan Perumahan dalam kategori perlu upaya keras dimana pada Tahun 2018 ini mendapatkan bantuan berupa Pembangunan 1 (satu) unit Rusunawa dan 1 (satu) kawasan rumah khusus di Kelurahan Wates dari KEMENPUPR, dimana konstruksi fisik memerlukan syarat bahwa Daerah harus segera melakukan pematangan lahan, saat ini tengah dilakukan pematangan lahan dan hampir selesai pada Triwulan II, hal tersebut yang menjelaskan kenapa belum ada konstruksi fisik, sehingga target capaian keseluruhan baru 50%, hal tersebut juga di Triwulan I, Pemerintah Daerah harus memberikan sosialisasi dan solusi kepada dan bagi warga sekitar yang terkena dampak pembangunan. Perlu untuk diketahui bahwa pembangunan kawasan baik Rusun maupun

Rusus melalui skema Multi-Years, karena bukan hanya bangunan inti saja, akan tetapi dengan lingkungannya (fasum-fasos) pendukung.

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Magelang dijabarkan dalam sepuluh program dengan empat puluh lima indikator. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 - 31
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
1.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1. Terfasilitasinya dialog FKUB, FPBI dengan elemen masyarakat	10	10	8	80%	▶
		2. Terpublikasikannya dialog antar agama	12	6	5	83,33%	▶
		3. Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga social keagamaan	4	2	2	100%	●
		4. Tingkat kerukunan umat beragama	0	0	0	100%	●
		5. Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sector yang terjalin	3	3	4	133,33%	●
2.	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1. Cakupan anggota FKDDM yang terlatih dalam deteksi dini	100%	37,5%	37,5%	100%	●
		2. Persentase ormas yang difasilitasi	9.84%	8,27%	4,07%	49,21%	▼
3.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	80%	72,73%	90,91%	●
		2. Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai nilai religious dan nilai-nilai luhur Pancasila	0	0	0	100%	●
		3. Perda pelarangan	0	1	0	0%	▼

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
		peredaran Narkoba					
		4. Jumlah kampung bebas Narkoba	6	3	2	66,66%	▼
		5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1,47%	2,05%	139,45%	●
		6. Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15,19%	6,08%	4,32%	71,05%	▼
		7. Rasio jumlah siskamling aktif	100%	84,35%	81,42%	96,52%	●
		8. Cakupan petugas patrol Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan kota (per hari)	3	3	3	100%	●
		9. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,96%	6,46%	4%	61,92%	▼
4.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1. Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	47,5%	40%	38,94%	97,35%	●
		2. Cakupan relawan siaga bencana	14,71%	5,88%	20%	340,14%	●
		3. Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	100%	50%	0	0	
		4. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	50%	27,25%	54,5%	▼
		5. Cakupan penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	●
		6. Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	35,29%	11,76%	5,88%	50%	▼

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
		7. Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada	ada	ada	100%	●
5.	Program pendidikan politik masyarakat	1. Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	1	0	0	
		2. Tingkat partisipasi politik	76%	67,02%	76,10%	113.55%	●
6.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1. Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	80%	72,20%	76,67%	106,19%	●
		2. Data base ormas yang akurat	77%	71%	33,74%	47,52%	▼
		3. Persentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	57,39%	35,19%	37,4%	106,28%	●
7.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Cakupan petugas patrol petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota (per hari)	3	3	3	100%	●
		2. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	100%	92%	100%	108.7%	●
		3. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	16,67%	11,67%	21.43%	183.63%	●
		4. Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	98%	95%	100%	105.26%	●
		5. Cakupan petugas Linmas per 10.000 penduduk	77.27	74.25	55.15	74.28%	▼
		6. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	23,97%	14,26%	21.96%	154%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
		7. Cakupan patrol pengamanan wilayah oleh Linmas	21	12	6	50%	▼
8.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit masyarakat	95%	92%	100%	108.7%	●
		2. Perda ketersediaan kebijakan yang mengatur control tempat hiburan	1	1	1	100%	●
		3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	0	1	0		
		4. Jumlah kampung bebas narkoba	0	0	0		
		5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan P4GN	0	0	0		
9.	Program penguatan kehidupan beragama toleransi beragama dan umat	1. Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing-masing di tiap SKPD	75%	35%	37.93%	108.37%	●
		2. Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparat	5%	5%	58.82%	1176.41 %	●
		3. Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	66,67%	60%	33.33%	55.55%	▼
		4. Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	5%	6%	0	0	▼
		5. Persentase tepat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	20%	7%	8.43%	120.43%	●
		6. Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	1	0	0	0%	▼

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
		7. Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	30%	15%	0%	0%	▼
		8. Jumlah ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat	2	0	0	100%	●
10.	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan PEMILU	1. Persentase kelancaran penyelenggaraan Pemilu	100%	100%	100%	100%	●

Sumber: DP4KB Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari keempat puluh lima indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat indikator yang telah mencapai target atau memiliki capaian kinerja sempurna 100% atau bahkan lebih yaitu indikator :

1. Terpublikasikannya dialog antar agama
2. Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga social keagamaan
3. Tingkat kerukunan umat beragama
4. Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sector yang terjalin
5. Cakupan anggota FKDDM yang terlatih dalam deteksi dini
6. Persentase kriminalitas yang tertangani
7. Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai nilai religious dan nilai-nilai luhur Pancasila
8. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN
9. Rasio jumlah siskamling aktif
10. Cakupan petugas patrol Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban,

- ketentraman dan keindahan kota (per hari)
11. Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana
 12. Cakupan tim relawan siaga bencana
 13. Cakupan penanganan korban bencana
 14. Kebijakan terkait penanggulangan bencana
 15. Tingkat partisipasi politik
 16. Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
 17. Persentase peningkatan ormas yang memiliki SKT
 18. Cakupan petugas patrol petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota (per hari)
 19. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda
 20. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat
 21. Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman & ke- tertiban umum (K3)
 22. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas
 23. Persentase penanganan penyakit masyarakat
 24. Perda ketersediaan kebijakan yang mengatur control tempat hiburan
 25. Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing-masing
 26. Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur
 27. Persentase tepat ibadah yang memenuhi standar Kemenag
 28. Persentase kelancaran penyelenggaraan Pemilu.

Adapun beberapa indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaiannya atau dengan capaian dibawah 80% antara lain Persentase ormas yang difasilitasi dengan capaian kinerja 49,21%; Jumlah kampung bebas Narkoba dengan capaian kinerja 66,66%; Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS dengan capaian kinerja 71,05%; Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 61.92% yang kedepan ada triwulan ketiga akan diupayakan proses rekrutmen melalui pelatihan tenaga polisi pamong praja yang tersertifikasi; Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 54.5% yang direncanakan akan dicapai melalui pengadaan peralatan dan pembangunan gudang sarpras melalui anggaran perubahan tahun 2018; Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana 50% yang rencana akan dilaksanakan pemenuhan capaian indicator melalui pembentukan Kelurahan Wates pada triwulan ketiga; Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota 55.55%; Data base ormas yang akurat dengan capaian kinerja 47.52%; Cakupan petugas Linmas per 10.000 penduduk 74.28% yang direncanakan pada triwulan ketiga akan dipenuhi pencapaiannya melalui pembinaan Linmas di tiap-tiap kelurahan dan pengadaan seragam Linmas sebanyak 60 buah pada perubahan anggaran 2018; Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh Linmas dengan capaian 50%; dan Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan P4GN yang direncanakan akan dilakukan optimalisasi pencapaian indicator melalui kegiatan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara rutin dengan sasaran pelajar, Tim Penggerak PKK, generasi muda dan tokoh masyarakat pada triwulan ketiga.

Adapun indicator yang belum terukur atau dimungkinkan pemenuhan pencapaiannya pada triwulan ketiga antara lain Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah; Perda yang mengatur pelanggaran

peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi; Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag; Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan; dan Jumlah ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini hingga akhir tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai dengan target kinerja yang diharapkan, serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator memiliki capaian dengan katagori perlu upaya keras atau dibawah capaian 80%.

2.1.3.1.6 Sosial

Target dan realisasi indikator urusan sosial tahun 2018 sesuai dengan indikator RPJMD Kota Magelang Tahun 2018-2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 adalah tampak pada tabel berikut:

Tabel 2 - 32
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian TW II 2018		
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	100%	95.40%	95.40%	
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40,00%	30%	78,88%	262,93%	
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	100%	86.60%	86.60%	
		Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	16,74%	11%	15%	136,36%	
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	100%	100%	100%	
		Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	7	4	4	100%	
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	30%	0%	0%	
4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	90%	75%	25%	33,33%	

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian TW II 2018		
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	83%	100%	100%	100%	●
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	40%	20%	25,40%	127%	●

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari ke-10(sepuluh) indikator kinerja urusan sosial, terdapat 6 (enam) indikator sudah memenuhi target. Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 % atau lebih. Sedangkan 2 (dua) indikator akan tercapai yaitu Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos dengan kinerja capaian baru mencapai 95,40% dan Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian dengan kinerja capaian baru mencapai 86,60%

Sementara itu 2 (dua) indikator lainnya masih perlu usaha keras untuk dapat mencapai target yaitu indicator Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA dan Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi sasaran utama kegiatan urusan sosial. Data PMKS Tahun 2017 digunakan sebagai database kegiatan Tahun 2018 validasi data dilaksanakan pada akhir tahun 2017.

Adapun secara detail capaian masing masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos

Pada Tahun 2018 total proposal yang masuk sejumlah: 4.182 Sampai dengan akhir Bulan Juni yang telah diverifikasi dan atau terdistribusi sekitar 3.990 proposal. Sementara itu ada proposal yang kembali karena terindikasi sudah menerima bansos pada tahun 2017, sehingga tidak tercapai 100 %

Bagian Kesra bertugas untuk memverifikasi kelengkapan proposal dan mendistribusiakannya ke OPD pemberi rekomendasi. Diharapkan ada sistem aplikasi Hibah Bansos, serta ada link ke OPD dan kelurahan.

2) Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian

Sampai dengan bulan Juni 2018, total jumlah permohonan yang masuk sebanyak 194 orang. Disetujui setelah verifikasi lapangan sebanyak 168 orang. Adapun dari bulan Januari sampai dengan Juni permohonan yang tertolak 1, dicairkan 124 dan sisanya masih dalam proses di BPKAD.

3) Persentase lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Di Tahun 2018 sebanyak 482 orang lanjut usia terlanter telah menerima jaminan sosial berupa uang sebesar Rp. 500.000 setiap bulannya yang berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu ada 611 lanjut usia tidak potensial di Kota Magelang sehingga sudah sebesar 78,88 persen lanjut usia terlanter yang mendapatkan jaminan sosial. Indikator ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 30 persen di tahun 2018 dan meningkat menjadi 35 persen di tahun 2019.

4) Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Di Tahun 2018 PMKS, 750 orang dari 4.928 orang fakir miskin telah menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE yang terfasilitasi dalam 75 KUBE. Dana ini berasal dari pusat sebagai salah satu fungsi pemerintah pusat dalam redistribusi pendapatan. Indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi target Akan tetapi perlu diantisipasi dimulai tahun ini agar pencapaian target tidak menurun di tahun tahun mendatang. Pencanaan e-warung oleh pemerintah pusat diharapkan bisa membantu pencapaian target indikator di masa mendatang disampingantisipasi anggaran dari pemerintah kota sangat diharapkan untuk menstimulasi pencapaian target ini.

5) Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif

Indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Di Kota Magelang terdapat 13 lembaga kesejahteraan sosial yang aktif diantaranya Panti Sosial Asuhan Anak sebanyak 9 buah, Panti Sosial Tresna Wrida 1 buah, Panti Sosial Bina Grahita 2 buah, dan Panti Sosial Bina Laras 1 buah. Keseluruhan lembaga kesejahteraan ini secara aktif membantu instansi sosial dalam penyelenggaraan sarana prasaran kesejahteraan sosial.

6) Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial

Pada tahun 2018 Kesra memfasilitasi dan mengkoordinasikan dana CSR dari berbagai badan usaha. Sampai dengan Triwulan II 2018 ada 4 lembaga yang telah bekeja sama dengan Pemkot dalam penggunaan dana CSR, yaitu dari Bank Magelang, BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah), OHANA dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Tuna Daksa.

7) Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Realisasi indikator Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Pembentukan WKBSM di Kota Magelang sudah dilaksanakan di Kelurahan Rejowinangun Selatan dan di Kelurahan Tidar Selatan, tetapi dari keduanya masih belum dapat menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi agar WKBSM yang telah terbentuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2018 ini Dinas Sosial Kota Magelang akan mulai mengaktifkan kembali WKBSM dan sudah dilaksanakan sosialisasi di 3 kelurahan pada bulan Juli.

8) Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan napza

Target indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II tahun 2018 belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari 240 gelandangan, pengemis, pemulung, WTS dan korban penyalahgunaan napza di Kota Magelang baru 60 orang yang ditangani. Namun demikian Dinas Sosial optimis bahwa target yang ditetapkan tetap mampu untuk dicapai sampai dengan akhir tahun 2018.

9) Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia

Bagian Kesra memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan lembaga / yayasan panti asuhan/panti jompo pada tahun 2018 dengan target sebanyak 10 panti asuhan/panti jompo dan Pondok Pesantren. Panti Asuhan yaitu : - Panti Asuhan/Anak Yatim Muhammadiyah, - Ihsanul Fikri, - Ar Rahman, - Jami'atul Quro'.

Ponpes: - Tahfidzul Qur'an, - Tahfidz Al Falah, - Sirojul Huda, - Al Ichsan, -Tidar Dudan, -Salafiyah Annur. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Ramadhan 1439 H.

10) Persentase penyandang cacat mental dan fisik tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial

Dari 374 orang penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial, baru 95 orang yang mendapatkan bantuan sosial sosial. Meskipun indikator ini telah memenuhi target Tahun 2018, kondisi ini harus menjadi agenda utama urusan sosial dalam pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat tidak potensial yang ada di Kota Magelang. Validasi kebutuhan mereka harus segera dilaksanakan untuk menunjang keberlangsungan hidup pada penyandang cacat tidak potensial. Disinilah peran pemerintah sangat penting dan mendesak.

2.1.3.1.7 Ketenagakerjaan

Upaya pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dengan dana tersebut diatas menghasilkan capaian kinerja hingga Triwulan II Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2 - 33

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase Wirausaha Baru	10%	5 %	0%	0%	▼
		2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	80%	75 %	89.98%	120 %	●
		3. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	80%	70 %	0%	0%	▼
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	7.5%	2 %	0%	0%	▼
		5. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	80%	70%	62.34%	89.1%	▶
		6. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	7.5%	0%	0%	0%	●
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	7. Coverage asuransi tenaga kerja	75%	70%	64.1%	91.6%	▶
		8. Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB	50%	50%	100%	200%	●

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari kedelapan indikator kinerja urusan tenaga kerja, baru 3 (tiga) indikator yang telah mencapai target tahun 2018 sementara 2 (dua) dipastikan akan tercapai di akhir Tahun 2018 dan 3 (tiga) indikator lainnya masih perlu upaya

keras . Upaya penanganan urusan ketenagakerjaan dilakukan dalam 3 (tiga) fungsi yaitu (1) pelatihan kepada pencari kerja dan pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas (2) fasilitasi penempatan tenaga kerja dan (3) fasilitasi dan pembinaan terhadap tenaga kerja.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Wirausaha Baru

Sampai dengan triwulan kedua Tahun 2018 belum ada pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan sehingga belum muncul wirausaha baru. Sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan, pelatihan kewirausahaan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV di Tahun 2018.

2. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Capaian persentase pencari kerja ditempatkan dalam Triwulan II Tahun 2018 ini telah melampaui target yang ditetapkan. Jumlah pencari kerja di Triwulan Kedua Tahun 2018 sebanyak 199 orang sementara jumlah lowongan yang tersedia sebanyak 4.448 jabatan dan yang telah bekerja sebanyak 179 orang pencari kerja terdiri dari 157 orang bekerja di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan 14 orang bekerja di Luar Negeri (Pekerja Migran Indonesia). Adapun secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2-34
Wirausahawan Baru sampai dengan akhir Desember 2017

Uraian	L	P	Total
Pencari kerja terdaftar	102	97	199
Pencari kerja ditempatkan	94	85	179
Lowongan terdaftar	1.640	2.808	4.448

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2018

Pada Tahun 2018 ini telah dilaksanakan JOB FAIR yang merupakan kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, dengan jumlah pelamar dari Kota Magelang sebanyak 553 pencari kerja dan yang berhasil ditempatkan sampai dengan akhir triwulan kedua sebanyak 8 orang. Proses penempatan masih terus berlangsung hingga akhir Agustus 2018.

3. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi dan kewirausahaan

Secara rinci pelatihan ketenagakerjaan dibagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan PERMENAKERTRANS NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan. Capaian untuk pelatihan berbasis kompetensi belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 62.34 persen dari target yang telah ditetapkan (70%) sementara capaian indikator pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan masih 0 (nol) persen karena kegiatan pelatihan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV Tahun 2018.

Adapun jenis pelatihan yang telah diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Kota Magelang di Triwulan Kedua Tahun 2018 beserta jumlah pesertanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2-35

Jenis Pelatihan dan Jumlah peserta Pelatihan Tahun 2017

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peminat		Jumlah Peserta	
A	Diklat Berbasis Kompetensi	154	orang	96	orang
1.	Diklat bahasa asing bagi pencari kerja	16	orang	15	orang
2.	Diklat tata boga bagi pencari kerja	22	orang	10	orang
3.	Diklat bordir bagi pencari kerja	12	orang	10	orang
4.	Diklat komputer	15	orang	11	Orang
5.	Diklat tata rias bagi pencari kerja	45	orang	20	orang
6.	Diklat menjahit	31	orang	20	orang
7.	Diklat Teknisi HP bagi pencari kerja	13	orang	10	orang
JUMLAH		154	orang	96	orang

4. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi

Sampai akhir Triwulan Kedua Tahun 2018 jumlah peserta pelatihan yang tersertifikasi BNSP masih belum tercapai karena pelatihan akan dilaksanakan di Triwulan III. Dari 10 (sepuluh) jenis pelatihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kota Magelang, baru 1 (satu) jenis pelatihan yang telah diikuti sertifikasi kompetensi yaitu Pendidikan dan Pelatihan Perkayuan. Adapun jenis kompetensinya adalah finishing kayu dengan tingkatan kompetensi (1) menyiapkan pekerjaan finishing, (2) Menyiapkan permukaan benda kerja untuk finishing, (3) menyesuaikan warna finishing dan (4) mengerjakan finishing dengan teknik semprot. Dari 20 orang peserta pelatihan perkayuan hanya 5 orang peserta yang memenuhi 4 kriteria kompetensi dimaksud.

5. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP

Meskipun indikator tenaga kerja tersertifikasi BNSP di Tahun 2018 belum ditargetkan akan tetapi pada akhir tahun 2018 diharapkan akan terwujud dikarenakan adanya pelatihan bersertifikasi BNSP.

6. Coverage asuransi tenaga kerja

Capaian pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek yang mencapai 64,1 persen, masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu 70 persen. Dari 13.926 orang tenaga kerja yang terdaftar di 213 perusahaan di wilayah Kota Magelang terdapat 8.922 orang yang telah tercatat sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha telah mulai menerapkan peraturan ketenagakerjaan khususnya norma perlindungan tenaga kerja, namun sebagian kecil lain belum sehingga perlu fasilitasi pemerintah dalam pencapaian kinerja ini. Norma perlindungan tenaga kerja meliputi hak-hak pekerja diantaranya mengenai upah, jaminan sosial tenaga kerja, lembur, waktu kerja dan sebagainya.

7. Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB
 Pada Tahun 2018 ini, kondisi ketenagakerjaan di Kota Magelang cukup kondusif dimana diindikasikan oleh rendahnya jumlah perselisihan pengusaha dengan pekerja. Sampai dengan triwulan kedua ada sebanyak 1 (satu) kasus, dan bisa diselesaikan melalui perjanjian bersama. Sehingga indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Magelang dijabarkan dalam empat program dengan lima belas indikator. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 - 36
 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
1.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	1. Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Ada	Ada	100%	●
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	55,79%	47,37 %	-	-	▼
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan	1. Rasio KDRT	0,040%	0,050%	0,037%	100%	●
		2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan	15	20	16	80%	▼

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
	Perempuan	anak					
		1. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	●
		2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
		3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	100%	100%	100%	●
		4. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
		5. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani	100%	100%	100%	100%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
		yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu					
		6. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	●
		7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	●
		8. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	8%	4%	0,10%		▼
4.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	20%	10%		▼
		2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	35%	23%	10%		▼
		3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	80,00%	78,50%	30%		▼

Sumber: DP4KB Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari kelima belas indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat Sembilan indikator yang telah mencapai target dengan masing-masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 % yaitu indikator :

1. Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
2. Rasio KDRT
3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan,
4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu,
5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS
6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
2. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
3. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Sedangkan enam indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaiannya adalah indikator :

1. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan capaian kinerja 80%
Disatu sisi tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menandakan bahwasannya masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sehingga masyarakat memiliki keberanian untuk mengungkap kasus kekerasan yang dialaminya, namun disisi lain dari jumlah kasus yang ada hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius, walaupun indicator jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Magelang pada triwulan kedua yaitu sebanyak 16 kasus masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 20 kasus. Dalam hal ini diperlukan komitmen dri DP4KB selaku pengemban fungsi/urusan maupun oleh pihak-pihak terkait untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik melalui upaya-paya prefentif, kuratif, maupun rehabilitatif.
2. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas dengan capaian kinerja 2,5%.
Upaya pemenuhan indicator persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas akan diupayakan melalui anggaran perubahan tahun 2018 pada DP4KB melalui kegiatan pelatihan bidang usaha ekonomi produktif terhadap sasaran kelompok rentan atau 175 orang kepala keluarga/perempuan miskin dan korban KDRT.

3. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dengan capaian kinerja 50%, Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta dengan capaian kinerja 43%, dan Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan dengan capaian kinerja 38%.

Sejauh ini data partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah dan swasta, serta angka partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Magelang belum dapat tersaji secara akurat dan komprehensif. Pemenuhan ketiga indikator kinerja dengan capaian rendah tersebut oleh DP4KB akan diupayakan melalui anggaran perubahan tahun 2018 dengan melaksanakan pendataan dan penyusunan data profil perempuan dan anak Kota Magelang Tahun 2018 yang salah satu substansinya menjawab ketersediaan data ketiga indikator diatas.

Disamping beberapa hal tersebut diatas, upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini hingga akhir tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai dengan target kinerja yang diharapkan, serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator memiliki capaian dengan kategori perlu upaya keras atau dibawah capaian 80%.

2.1.3.1.9 Ketahanan Pangan

Indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan melibatkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 37

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian Hingga Triwulan 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	2	1	1	100%	●
		Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%	95%	83%	87,4%	●
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,20%	86,30%	0%	0%	▼
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%	80%	0%	0%	▼

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir

‘ Berdasarkan Capaian kinerja sebagaimana matrik diatas, dapat diketahui bahwa dari ke 4 (keempat) capaian Indikator sampai dengan triwulan II Tahun 2018 tercapai 1 indikator kinerja, 1 indikator kinerja akan tercapai, belum tercapai 2 indikator. Adapun masing masing indikator yang tercapai, akan tercapai / melampaui dan belum tercapai serta perlu usaha keras adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1(satu) Indikator jumlah regulasi ketahanan pangan yang tercapai
2. Adapun Indikator yang belum tercapai dan akan tercapai terdapat 1 (satu) indikator yaitu Presentase ketersediaan informasi pasokan,harga dan akses pangan Indikator Presentase ketersediaan informasi pasokan,harga dan akses pangan masih diposisi (87,4%) dikarenakan dalam sistem kerjanya secara bertahap dan akan tercapai pada akhir tahun 2018
3. Indikator yang perlu upaya keras yaitu
 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum tercapai posisi masih (0%) dikarenakan baru melakukan persiapan dan dalam pelaksanaan tahap entry data , untuk itu perlu usaha keras dalam pencapaian target tahun ini dan akan tercapai, adapun kegiatan ini akan terpenuhi diakhir tahun dikarenakan untuk pendataan data secara berkala
 - Presentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masih diposisi (0%) dikarenakan kegiatan ini belum dilaksanakan dalam hal ini masih dalam taraf persiapan pembelian alat uji yang mana untuk revit tes dan untuk peralatan ini harus ada karena untuk pengambilan sampel.

Pangan yang sehat terutama untuk balita yang sedang dalam masa pertumbuhan untuk pemenuhan kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan sering abaikan makanan dengan memberikan makanan, instan yang mudah didapat akan tetapi makanan yang instan dan siap saji ini akan membahayakan untuk kesehatan dikarenakan banyaknya kandungan kimia yang tertandung, terutama untuk balita dalam hal ini perlu adanya konsumsi pangan lokal daerah, seperti sayur sayuran produksi pangan dalam negeri maupun cadangan pangan nasional. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah urusan ketahanan pangan dilaksanakan untuk mewujudkan ketersediaan, dan yang mudah dijangkau serta pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang

Ketahanan pangan di Kota Magelang berkaitan erat dengan sektor pertanian. Terkait dengan penyelenggaraan urusan ketahanan pangan sampai saat ini adalah masih kurangnya ketersediaan energi dan protein. Hal ini disebabkan rendahnya produksi pangan di Kota Magelang , sebagai akibat dari maraknya alih fungsi lahan pertanian I menjadi non pertanian. Sehingga untuk memenuhi ketersediaan pangan di Kota Magelang yang bergantung pada hasil produksi pangan daerah sekitarnya, seperti Semarang, Yogyakarta, Boyolali, Kabupaten Magelang, Salatiga, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo.

Kondisi petani Kota Magelang yang sebagian besar merupakan petani penggarap sawah dan merupakan tenaga jasa hal ini ,mempengaruhi rendahnya produksi komoditas tanaman pangan. Karena petani penggarap dalam mengolah sawah tergantung dari pemilik lahan dan mengikuti pemilik lahan dalam menentukan jenis tanamannya ,

sementara petani hanya mengerjakan apa yang telah diletakkan oleh pemilik lahan kecuali itu untuk lahan pertanian di Kota Magelang tiap tahun akan berkurang dan semakin menyempit,

Dengan tingginya harga tanah, dikarenakan banyaknya permintaan akan perumahan dan pembangunan di Kota Magelang hal ini merupakan penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan. apabila hal ini tidak diantisipasi maka alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, pertokoan dan industri. Alih fungsi lahan dari tahun ketahun semakin meningkat sebagian besar lahan pertanian di Kota Magelang terancam semakin berkurang dan menjadi bangunan bangunan yang berdiri megah. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Magelang perlu mempertahankan keberadaan lahan pertanian untuk bisa dikelola sebaik-baiknya agar terwujud ketahanan pangan dan pelestarian sumber daya alam.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian diantaranya dengan membuat reviu RT RW supaya lebih jelas keberadaan peruntukan lahan di Kota Magelang dengan membuat lahan tetap hijau antara lain dengan menghidupkan kampung organik yang selama ini dipandang tidak marak seperti dulu dan hal ini perlu adanya Sosialisasi, evaluasi tentang keberadaan kampung organik , ekonomi bagi masyarakat Kota Magelang

Untuk menghidupkan kembali keberadaan kelompok kampung organik yang tidak aktif. Dalam hal ini perlu dukungan dari instansi terkait untuk membangkitkan kembali dengan pembinaan dan pendampingan dan perlu diadakan pemantauan dikelompok tani. Dengan demikian Kota Magelang akan tetap mempunyai Ruang terbuka hijau Dalam hal ini diupayakan untuk membuat lahan pertanian produktif dari lahan milik asset pemerintah Kota dan dikelola menjadi lahan pertanian abadi serta bias menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ketahanan pangan di Kota Magelang selama ini , masih bergantung pada produksi komoditas pangan luar Kota Magelang. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan pangan adalah dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, diantaranya melalui pengembangan urban farming dengan memanfaatkan lahan sempit (tidak terpakai) berbasis budidaya organik. Urban farming dengan menanam sayur dengan media air hydroponic dalam hal ini dapat melibatkan budidaya pertanian, peternakan, maupun perikanan.

2.1.3.1.10 Pertanahan

Indikator kinerja urusan Pertanahan melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 38

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian Hingga TW II 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	100%	30%	30%	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian Hingga TW II 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	100%	30%	30%	100%	●

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2018

Keterangan :

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Indikator kinerja urusan Pertanahan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan tersedianya sistem informasi geografis pertanahan, dapat tercapai 100%. Dari 2 (dua) indikator kinerja urusan Pertanahan terdapat 2 (dua) indikator yang tercapai yaitu tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan tersedianya sistem informasi geografis pertanahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta maka Sistem Informasi Geografis (SIG) pertanahan harus memakai peta yang sudah terkoreksi dan terverifikasi terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGT). Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017, maka terjadi perubahan luas wilayah di Kota Magelang menjadi 18,54 km² sehingga SIG pertanahan perlu menyesuaikan. Hal ini bisa diatasi dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BPN terkait kewilayahan.

2.1.3.1.11 Lingkungan Hidup

Indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup melibatkan 6 (enam) indikator kinerja daerah dan tujuh (tujuh) indikator program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 39

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Hingga Triwulan Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan kedua tahun		
1.		IKLH (Indeks Kualitas)Lingkungan Hidup)	68,5	65	0	0%	▲
2	Program Pengendalian	IPA (Indeks Pencemaran	76,84	75,7	0	0%	▼

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan kedua tahun		
1.		IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68,5	65	0	0%	▶
	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	Air)					
3	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	IPU (Indeks Pencemaran Uda	79,1	70,5	0	0%	▶
4	Program Konservasi Sumber Daya Alam	ITH (Indek Tutupan Vegetasi)	49,56	48,8	0	0%	▶
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	136,7	158,7	280,59	56,55%	▼
6	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau					
		a. Privat	10	10	19,1	191 %	●
		b. Publik	18,50	18,37	19,6	106,7 %	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2018

Keterangan

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari ke 6 (enam) indikator kinerja daerah urusan Lingkungan Hidup sampai triwulan ke 2 (dua) ini, terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target yaitu indikator Ruang Terbuka Hijau dengan kinerja capaian mencapai 191 % untuk Ruang Terbuka Hijau dari Privat dan 106,7% untuk Ruang terbuka Hijau dari Publik.sehingga target dari indikator ini melebihi dari target yang telah ditentukan.

Sedangkan 5 (lima) indikator yang belum tercapai yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IPU (Indeks Pencemaran Udara), ITH (Indek Tutupan Vegetasi), IPA (Indeks Pencemaran Air) dan Volume sampah yang dibuang ke TPSA. Ke 4 (empat) indikator yaitu IKLH, IPA,IPU,dan ITH belum tercapai karena untuk penghitungan ke empat indikator tersebut baru bisa dihitung capaiannya ketika pada akhir triwulan ke 4..

Penghitungan ke empat indikator tersebut menggunakan data beberapa sampel kualitas udara, air dan tutupan vegetase yang baru bisa didapat pada akhir triwulan ke 4 (empat).

Disisi lain terdapat satu indikator yang perlu upaya keras capaiannya yaitu indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA baru tercapai sekitar 55,49 %. Kinerja indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

- a. Masalah utama pengelolaan sampah di Kota Magelang adalah paradigma sistem pengelolaan sampah kumpul – angkut - buang telah membudaya bagi masyarakat Kota Magelang khususnya dan Indonesia umumnya. Selain itu, Sifat masyarakat kita yang masih sangat minim kepeduliannya tentang masalah persampahan
- b. Karena tanpa adanya kesadaran masyarakat maka prinsip dasar gaya hidup ramah lingkungan seperti 3R menjadi sulit untuk diterapkan dan secanggih apapun teknologi yang diterapkan maka hasilnya juga tidak akan pernah optimal yang akhirnya anggaran dana menjadi sia-sia
- c. Sesuai Amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumberdaya. Pendekatan end of pipe diganti dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
- d. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan volume sampah dari sumbernya masih sangat minim. Masyarakat belum begitu paham akan kondisi “darurat sampah” yang tengah menyelimuti permasalahan sampah di Kota Magelang.
- e. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah baik melalui Kampung Organik maupun Bank Sampah. Terlihat dari data yang mauk ke Dinas Lingkungan Hidup baru sekitar 3,91 % atau sekitar 13,68 m3/hari sampah yang terkurangi dari sumbernya baik melalui daur ulang ataupun dibuat kompos.
- f. Pengelolaan sampah TPST 3R yang berada di Kota Magelang juga belum dilaksanakan secara optimal, seharusnya dengan adanya keberadaan 3 TPST 3R bisa dimaksimalkan untuk mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke TPSA

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus benar-benar bekerja keras dalam melakukan berbagai macam terobosan untuk menangani permasalahan sampah ini antara lain:

- a. Masyarakat harus diajak secara paksa untuk mengetahui kondisi riil permasalahan sampah di Kota Magelang yang sudah memasuki masa “darurat sampah”.
- b. Masyarakat harus diajak secara nyata untuk ikut berkontribusi dalam penanganan sampah. Harus sudah saatnya masyarakat berawal dari masing-masing sumbernya melakukan penanganan dan pengelolaan sampah.
- c. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan lebih intensif di masing-masing masyarakat, baik perorangan, kelompok, swasta ataupun pemerintah.
- d. Pemerintah Kota secara nyata mengakomodir hasil pembuatan kompos dan kerajinan daur ulang baik pemanfaatan maupun pemasarannya.
- e. Penambahan pembangunan TPST 3R di tiap-tiap Kelurahan. Pengolahan Sampah Terpadu agar dapat menuntaskan permasalahan sampah yang telah bertahun tahun lamanya. Fasilitas pengelolaan sampah terpadu dirancang dengan tujuan untuk mengelola sampah secara ramah lingkungan serta meningkatkan nilai guna dari sampah melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

Tabel 2.40
Target dan Realisasi Indikator program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2016		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018 sd TW 2		
1	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	Prosentase Rekomendasi pengawasan yang ditaati	100%	40 %	26%	65%	▶
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	●
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	14%	3 %	2,7 %	90%	▶
		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	100 %	88 %	86,06 %	97,7%	▶
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 jenis	6 jenis	1 jenis	16,6%	▶
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100 %	100 %	100 %	100%	●
6	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Luas RTH Kota	20 %	18,37%	19,6 %	106%	●

Keterangan

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari ke 7 (tujuh) indikator program urusan Lingkungan Hidup), terdapat 3 indikator yang telah mencapai target yaitu indikator Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin dengan capaian 100 % , Jumlah Sumber Daya Alam Yang terkonservasi dengan capaian 100 % dan Luas RTH Kota dengan capaian 106 %.

Sedangkan yang akan tercapai adalah indikator Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati, Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya, Prosentase sampah perkotaan yang ditangani, Jumlah akses

informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia dengan kinerja capaian baru mencapai rata-rata 57,325%. Namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir Tahun anggaran 2018..

2.1.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan yang hasilnya digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, informasi administrasi kependudukan memiliki nilai yang sangat strategis bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik, perlu adanya peningkatan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Intervensi program maupun kegiatan yang harus dilakukan sangat diperlukan guna mendorong capaian kinerja yang belum memenuhi target. Dan sebaliknya, capaian kinerja yang telah memenuhi target perlu untuk dipertahankan. Capaian target kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan hingga Triwulan II Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2 - 41
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%	100%	96,25%	96,25%	▶
		Cakupan penduduk memiliki KIA	100%	100%	70,82%	70,82%	▼
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%	88%	97,14%	110,39%	●
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	950	940	955,3	101,63%	●
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase kepemilikan Akte kematian	75%	85%	94,35%	111%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		
		Terbangunnya system pelayanan administrasi terintegrasi	100%	80%	90,91%	113,64%	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2018 pada tabel tersebut, terdapat 1 indikator yang akan tercapai dan 1 indikator yang perlu usaha keras dari total 7 indikator bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kedua indikator tersebut adalah Cakupan penduduk memiliki KTP-el dan Cakupan penduduk memiliki KIA.

Cakupan penduduk memiliki KTP-el sudah hampir mencapai target. Dari target tahun 2018 sebesar 100%, baru tercapai 96,25%. Namun, angka ini masih perlu upaya keras mengingat kondisi pertumbuhan penduduk yang dinamis. Adanya migrasi masuk tentunya akan menambah target cakupan penduduk untuk memiliki KTP-el di Kota Magelang.

Indikator yang belum tercapai adalah Cakupan penduduk memiliki KIA yang masih berada pada 70,82%. Perlu dilakukan upaya yang lebih keras mengingat kondisi jumlah anak yang dinamis. Selain itu, anak yang memasuki usia 16-17 tahun yang belum memiliki KIA sebelumnya enggan untuk mengurus KIA. Mereka menganggap tidak perlu karena mereka akan memiliki KTP. Upaya yang direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan melakukan MoU dengan SLTA/ sederajat di Kota Magelang untuk mempermudah pengurusan KIA lewat sekolah yang bersangkutan.

2.1.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup dengan 6 (enam) program prioritas dengan 12 indikator kinerja, dengan target dan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - 42

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
1.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	6. Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	52.94%	35.29%	35.29%	100%	●
		7. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4	4	0	0	▼
2.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	3. Persentase PL KB yang mendapat pembinaan	100%	100%	100%	100%	●
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	10. LMP berpretasi tingkat Kota	64.71%	47.06%	33.33%	70.82%	●
		11. LMP berpretasi tingkat Provinsi	Peringkat 1	Peringkat 1	Peringkat 2		▶
		12. LMP berpretasi tingkat Nasional	Peringkat 1	Peringkat 1	-	-	▶
		13. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	70.59%	35.29%	47.06%	100%	●
		14. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143	143	143	100%	●
4.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4. Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100%	100%	0	0	▼
5.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan	1. Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-	82,35%	61,18%	0	0	▼

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
	keuangan desa	PKK aktif					
6.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	1. Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	●

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari kesebelas indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, terdapat enam indikator yang telah mencapai target dengan masing-masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100% yaitu indikator:

1. Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat
2. Persentase PL KB yang mendapat pembinaan
3. LMP berpretasi tingkat Kota
4. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang
5. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
6. Persentase PKK Aktif

Sedangkan 2 indikator tidak terukur yaitu indikator LPM berprestasi tingkat provinsi dan tingkat nasional. Adapun 4 indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaiannya adalah indikator :

1. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG) dengan capaian 0%
Pencapaian indikator ini rencana akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018 atau pada triwulan 3 melalui pembinaan warung teknologi yang merupakan wahana untuk menampung dan mengelola teknologi-teknologi tepat guna berbasis masyarakat.
2. LMP berpretasi tingkat Kota
Pencapaian indikator LMP berpretasi tingkat Kota dilaksanakan melalui lomba BBGRM tingkat kota yang dilaksanakan pada bulan Pebruari 2018 dengan terpilihnya 3 nominasi yaitu Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat Selatan dan Kelurahan Cacaban.

3. Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa dengan capaian 0%

Pencapaian indikator ini direncanakan pada triwulan 3 melalui pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.

4. Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif dengan capaian 0%

Indikator Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif terdapat ketidaksesuaian definisi operasional yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan revisi. Pencapaian indikator ini diupayakan melalui pembinaan, penyusunan profil UP2K PKK, dan lomba UP2K tingkat kota dan provinsi yang rencanakan melalui APBD Perubahan 2018.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini hingga akhir tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai dengan target kinerja yang diharapkan, serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator memiliki capaian dengan katagori perlu upaya keras atau dibawah capaian 80%.

2.1.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mencakup 7 (tujuh) program dengan 28 indikator sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 - 43

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
1.	Program Keluarga Berencana	8. Rata-rata jumlah anak per Keluarga	2	2	2	100%	●
2.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	4. Persentase Kehamilan pada Ibu yang berumur kurang dari 20 tahun	1%	2%	2.02%	99%	▶
3.	Program Pelayanan Kontrasepsi	15. Cakupan peserta KB aktif	81%	78%	78%	100%	●
4.	Program Pembinaan	5. Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan	81%	66%	66%	100%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
	peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Keluarga Sejahtera I					
5.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun	2%	3.2%	2.97%		●
6.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1. Presentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15.19%	6.08%	0	0	▼
7.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	1. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	3%	4%	5.1%		▼
		2. Cakupan anggota BKB ber KB	81%	78%	89.23%	114.4%	●
		3. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB	88%	88%	88.28%	100.32%	●
		4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) Kelurahan	100%	100%	176.47%	174.47%	●
		5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap Desa/Kelurahan	100%	100%	111.76%	111,76%	▼
		6. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan	100%	30%	30%	100%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
		masyarakat					
		7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap kelurahan	30%	100%	100%	100%	●
		8. Partisipasi Laki-laki dalam ber KB	13%	11%	10.04%	91.28%	●
		9. Persentase PUS yang ber KB secara mandiri	67%	60%	58.87%	98.12%	●
		10. Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	8%	12%	8.99%		●
		11. Persentase perempuan yang menikah dibawah 20 tahun	2%	2.5%	2.02%		●
		12. Persentase keluarga yang memiliki balita dan ikut dalam kegiatan kelompok BKB	95%	90%	77.25%	85.83%	●
		13. Persentase keluarga mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok BKR	100%	95%	96.83%	101.93%	●
		14. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	100%	100%	100%	●
		15. Persentase Kelurahan yang mempunyai UPPKS aktif	100%	100%	100%	100%	●
		16. Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	2%	3%	3.23%		▼
		17. Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%	1%	2.03%		▼
		18. Persentase wilayah	100%	100%	100%	100%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
		RT, yang mempunyai data mikro					
		19. Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	100%	100%	100%	
		20. Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
		21. Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	93%	89%	85.52%	96.01%	
		22. Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan sasaran dan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	75%	35%	-	0%	

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari dua puluh sembilan indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target dengan masing-masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna atau diatas 100 % yaitu indikator :

1. Rata-rata jumlah anak per Keluarga
2. Cakupan anggota BKB ber KB
3. Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
4. Cakupan anggota BKB ber KB
5. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB

6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) Kelurahan
7. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
8. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap kelurahan
9. Persentase keluarga mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok BKR
10. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif
11. Persentase Kelurahan yang mempunyai UPPKS aktif
12. Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro
13. Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga
14. Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di Kelurahan
15. Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di Kelurahan

Adapun yang akan tercapai adalah indikator Partisipasi Laki-laki dalam ber KB, Persentase PUS yang ber KB secara mandiri, Persentase keluarga yang memiliki balita dan ikut dalam kegiatan kelompok BKB, dan indikator Persentase jumlah Keluarga Sejahtera dengan kinerja capaian diatas 80% sampai dengan kurang dari 100%. Namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir tahun 2018.

1. Persentase Kehamilan pada Ibu yang berumur kurang dari 20 tahun
Angka kehamilan pada ibu berumur kurang dari 20 tahun di Kota Magelang pada triwulan kedua telah melebihi target minimal yang telah ditetapkan, sehingga dalam hal ini diperlukan upaya keras menekan angka pernikahan dini hal tersebut mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan resiko tinggi, karena pada saat kehamilan tingkat emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang. Sementara kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan, karena adanya rasa penolakan secara emosional ketika si ibu mengandung bayinya.
2. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi
Indikator cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi telah melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga dalam hal ini diperlukan komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.
3. Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun dan Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun
4. Indikator presentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun pada triwulan 2 di Kota Magelang telah melebihi target yang ditetapkan (3%) yaitu sebesar 3.23%, sedangkan indikator presentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun pada triwulan 2 di Kota Magelang telah melebihi target yang ditetapkan (1%) yaitu sebesar 2.03%, sehingga dalam hal ini diperlukan upaya keras untuk menekannya, mengingat hal tersebut merupakan salah satu kehamilan yang berisiko atau dikenal dengan 4-T atau “4 Terlalu” (terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran) yang sangat membahayakan bagi kesehatan ibu. Berbagai solusi yang akan diupayakan kedepan antara lain melalui optimalisasi peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Petugas Lapangan/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) yang ada disetiap Kelurahan agar kedepan diharapkan diperoleh pemahaman dan kesadaran yang lebih dari Pasangan Usia Subur dan masyarakat akan Keluarga Berencana.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini hingga akhir tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai dengan target kinerja yang diharapkan, serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator memiliki capaian dengan katagori perlu upaya keras atau dibawah capaian 80%.

Dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdapat 1 program yang tidak sesuai, sehingga kedepan diperlukan revisi atau penghilangan indicator yang kurang relevan dimaksud yaitu indicator presentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS.

2.1.3.1.15 Perhubungan

Indikator kinerja urusan Perhubungan melibatkan 6 (enam) program prioritas dan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 44

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Hlingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018 sd TW II		
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	9. Jumlah Pelayanan Umum	1	1	5	500%	●
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	1. Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	100%	30%	20%	67%	▼
		2. Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata	3	1	1	100%	●
		3. Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	100%	55%	45%	82%	▶
		4. Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	100%	90%	0%	0%	▼
		5. Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	22	18	18	100%	●
3	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	9,25	8,50	8,45	99,41%	▶
		2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	100%	55.56%	44.44%	80%	▼
4	Program peningkatan kelaikan	1. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji	8136	3737	2218	59.35 %	▼

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018 sd TW II		
	pengoperasian kendaraan bermotor	yang laik jalan					
		2. Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	4%	4.00%	8.51%	212,74%	●
5	Program peningkatan pelayanan angkutan	1. Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	1.450.000	1.277.830	88,13%	▶
		2. Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	5%	5.00%	4.86%	97,20%	▶
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	7	7	100%	●

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Berdasarkan tabel diatas, kinerja urusan perhubungan terdapat 5 (lima) indikator yang Tercapai/Melampaui target kinerja pada Tahun 2018, yaitu (1) Jumlah Pelayanan Umum, (2) Jumlah Sub Terminal (Terminal Tipe C) yang Tertata, (3) Jumlah Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Halte), (4) Rasio Kendaraan Bermotor Wajib uji (KBWU) yang Tidak Melakukan Pengujian, dan (5) Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Terpelihara.

Indikator Program dengan kriteria Akan Tercapai sebanyak 4 (empat) indikator yaitu (1) Rasio Prasarana Parkir dengan Kondisi Baik (2) Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Umum (3) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum, (4) Rasio Ketersediaan Angkutan Umum Terhadap Jumlah Penduduk.

Indikator dengan kriteria Perlu Upaya Keras sejumlah 4 (empat) indikator yaitu (1) Prasarana Angkutan Darat berupa Terminal Angkutan Barang dengan Kondisi Baik, (2) Tingkat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, (3) Persentase Pengendalian Lalu Lintas Yang Terintegrasi dan (4) Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan. Dimana OPD optimis akan tercapai pada akhir tahun 2018 sesuai dengan target, berdasarkan hal ini akan ditempuh dengan sosialisasi dan pengelolaan yang lebih intens. Adapaun gambaran khusus Perlu Upaya Keras adalah sebagai berikut:

1. Terminal angkutan barang masih jauh dari kondisi kebutuhan ruang satuan ruang parkir dan bongkar muat yang memadai, sedangkan masih menjadi satu tempat dengan kantor patroli dan pengawasan (PATWAL) dari kepolisian, rencana kedepan sesuai hasil koordinasi dan peninjauan lapangan terminal barang akan dipindahkan ke

sisi selatan Terminal Tidar (Tipe A) dimana sudah ada embrio dengan kebutuhan lahan yang lebih luas dan merupakan Hak Pakai Pemkot.

2. Tingkat Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan akan tercapai pada akhir tahun 2018. Kinerja indikator ini belum maksimal tercapai, karena terdapat kendala antara lain belum berjalannya pengawasan dan evaluasi dari jumlah blok parkir yang telah dikelola. Evaluasi memerlukan waktu dimana terkait dengan standar dan kajian mengenai Tingkat Pelayanan Jalan (arteri dan lokal) yang didalamnya terdapat analisa dari beberapa variabel berupa (1) kestabilan arus, (2) kecepatan perjalanan sesuai rencana, (3) kapasitas jalan, dan (4) tingkat kejenuhan pada masing-masing blok parkir.
3. Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang Terintegrasi terkait dengan ATCS yang sekarang backbone sedang digencarkan berupa pemantau lalu lintas dan adanya pertemuan rutin Forum Lalu Lintas antar pemangku kepentingan tingkat kota .
4. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan dimana capaian berupa tahunan , sehingga target optimis tetap tercapai.

2.1.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Magelang pada tahun 2018, dilaksanakan melalui 5 program prioritas yang diukur dengan 13 indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut terbagi dalam indikator kinerja sasaran, kinerja program unggulan dan kinerja daerah. Indikator kinerja sasaran terdiri atas 2 indikator, indikator program unggulan sebanyak 7 indikator, indikator kinerja daerah berjumlah 2 buah, sedangkan indikator urusan komunikasi dan informatika sebanyak 12.

Satu indikator bisa menjadi tolok ukur bagi satu kinerja tetapi juga dapat menjadi tolok ukur dalam beberapa kinerja, baik sasaran, program unggulan maupun kinerja daerah. Persentase PD yang menerapkan e-Government merupakan indikator kinerja dalam urusan komunikasi dan informatika yang sekaligus menjadi indikator bagi sasaran, program unggulan dan kinerja daerah. Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi merupakan indikator bagi sasaran dan kinerja daerah. Program unggulan dalam urusan komunikasi dan informatika adalah program sarana dan prasarana bidang teknologi dan informatika serta program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi yang seluruh indikatornya sudah tertuang dalam indikator urusan komunikasi dan informatika sehingga tidak memerlukan pembahasan evaluasi tersendiri.

Target dan realisasi indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 - 45

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018	

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
1	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	90%	80%	100%	125%	●
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media:					
		- Radio	60 kali siar / 5 agama & kepercayaan (100%)	60 kali siar / 5 agama & kepercayaan (100%)	181 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan (100%)		●
		- Media Cetak	12 kali / 5 agama & kepercayaan (100%)	12 kali / 5 agama & kepercayaan (100%)	3 kali/ 3 agama dan kepercayaan (100%)		▼
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	6	200%	●
		Cakupan KIM (Jumlah KIM)	100% (17)	100% (17)	100% (21)	100%	●
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	7	7	7	100%	●
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	0	1	6	600%	●
3	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1	1	1	100%	●
4	Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika	Interoperabilitas antar system informasi	4	2	0	0%	▼
		Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	100%	50%	36%	72%	▼
		Cakupan data yang terpusat dan terkendali	100%	70%	50%	71,43%	▼
		Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	100%	100%	100%	●
5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	●

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dalam urusan komunikasi dan informatika sembilan indikator sudah mencapai target sedangkan empat indikator belum memenuhi target. Keempat indikator yang belum memenuhi target yaitu:

- 1) Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media cetak,
- 2) Cakupan WAN (Wide Area Network) kota,
- 3) Cakupan data yang terpusat dan terkendali.

Indikator materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media cetak belum memenuhi target hingga triwulan kedua. Kendala pencapaian target indikator ini terletak pada teknis percetakan media dinamika yang menjadi ruang publikasi .Hingga bulan Juni 2018, Media Dinamika baru terbit sekali karena edisi kedua majalah baru direncanakan terbit di Bulan Juli 2018.

Indikator cakupan WAN juga belum memenuhi karena adanya perubahan kewenangan urusan semenjak diundangkannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekolah Menengah yang semula menjadi target cakupan WAN, kewenangan urusannya ditarik ke Pemerintah Provinsi sehingga tidak bisa direalisasikan. Agar target indikator bisa tercapai, diperlukan revisi indikator agar sesuai dengan kewenangan pemerintah kota.

Realisasi capaian indikator cakupan data yang terpusat dan terkendali juga masih belum memenuhi target hingga triwulan II. Ke depan capaian indikator ini optimis tercapai apabila modul, dashboard dan command center sudah dapat difungsikan dengan baik.

2.1.3.1.17 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Target dan capaian indikator kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga Triwulan II Tahun 2018 yang secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 46

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM	7%	4%	11%	275%	●
		Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%	10%	11.58%	115.8%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (UMKM)	100	100	0	0%	▼
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	7%	3%	18%	600%	●
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	94%	93%	93%	100%	●
		Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	40%	27%	26,04%	96,44%	▶
		Jumlah koperasi	235	228	219	96,05%	▶
		Jumlah koperasi syariah	24	18	14	77,78%	▼

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari keempat program prioritas yang di dalamnya memuat 8 (delapan) indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah, 4 (empat) indikator telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan yaitu d Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM , Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI, Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan dan Prosentase koperasi aktif sedangkan 2 (dua) indikator capaian optimis akan tercapai 100% pada akhir tahun 2018 yaitu Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP dan Jumlah koperasi sedangkan 2 (dua) indikator lainnya yaitu Jumlah wirausaha baru (UMKM) dan Jumlah koperasi syariah perlu upaya lebih keras dalam mencapai target tersebut,

Dari delapan indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah semua optimis bisa tercapai, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

- Dalam mengampu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Modal yang memuat empat indikator capaian utama ada 3 indikator yang perlu perhatian serius yaitu Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP, jumlah koperasi dan jumlah koperasi syariah. **Jumlah SDM yang tersedia dalam penyelenggaraan urusan ini sangat terbatas, kemudian regulasi yang tidak memperbolehkan penyelenggara urusan untuk mengarahkan bentuk koperasi yang akan didirikan untuk berbentuk koperasi syariah atau koperasi konvensional, kemudian pengawasan terhadap koperasi yang telah ada untuk tetap beroperasi sesuai dengan AD/ART Koperasi masih lemah.**

Permasalahan yang dihadapi UKM antara lain:

- Rendahnya daya saing,
- Sarana promosi produk yang mendukung dengan identitas kota magelang belum tersedia dengan layak.
- Masih terbatasnya kemampuan inovasi dan kreativitas, serta kemampuan penguasaan teknologi.
- SDM pengelola koperasi kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan dan solidaritas serta kerja sama antar anggota yang kurang terjalin dengan baik.

Solusi permasalahan :

- Menambah SDM yang mumpuni dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Menambah anggaran belanja yang terfokus pada pemberdayaan pelaku usaha sehingga akan benar – benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.1.18 Penanaman Modal

Indikator kinerja urusan Penanaman Modal melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -47

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	4	3	2	66.67%	▼
2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Pertumbuhan nilai investasi PMA	15%	5%	0%	0%	▼
		Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	3,94%	26.27%	▼
		Jumlah investor baru	200	168	915	545%	●

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari 2 (dua) program utama dengan 4 (empat) indikator, diketahui bahwa 3 (tiga) indikator kinerja perlu upaya yang keras untuk dapat mencapai karena capaian masih jauh di bawah target dan 1 (satu) indikator telah tercapai.

Untuk indikator Jumlah kerjasama pemerintah dan investor dari target yang ditetapkan adalah 3 kerjasama sudah terjalin 2 kerjasama sehingga indikator ini kalau dicermati lebih dalam, target yang ditetapkan tidak akan menemui kendala yang berarti untuk dicapai pada akhir tahun 2018. Untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi PMA, lebih disebabkan karena perusahaan yang ada di Kota Magelang belum / tidak melaporkan kegiatan penanaman modal asing ke kantor PM. Terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melaporkan kegiatan tersebut langsung ke BKPM Pusat, dan di kantor PM hanya sebagai tembusan, maka berdampak pada gambaran riil pertumbuhan Penanaman modal asing yang sebenarnya optimis sesuai target yang diharapkan tidak dapat kita ketahui. Permasalahannya, hanya terhadap ketersediaan laporan dari masing-masing perusahaan PMA yang ada di Kota Magelang yang langsung disampaikan ke BKPM Pusat. Untuk melengkapi data realisasi, kantor PM perlu melakukan tindakan proaktif yaitu menghubungi BKPM pusat untuk mendapatkan data yang akurat sehingga gambaran riil investasi PMA dapat dilihat pencapaiannya.

Untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi PMDN terlihat belum menunjukkan nilai yang signifikan atau bahkan dapat dikatakan tergolong sangat dibawah standart namun demikian jika dihubungkan dengan indikator jumlah investor baru hal ini bertolak belakang, sebab indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun nilai investasi PMDN kecil secara nominal tetapi dapat diasumsikan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan merata pada skala usaha kecil.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

- Kurang validnya informasi potensi investasi yang ada di Kota Magelang.
- kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor.
- ketentuan hukum yang kurang konsisten (masih terdapat overlap antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain).
- pelayanan pengurusan perijinan yang masih membutuhkan waktu lebih dari satu hari, serta terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menangani pelayanan pengurusan perijinan dan investasi di Kota Magelang.

Solusi permasalahan :

- Memverifikasi profil investasi daerah yang memang benar – benar layak untuk mendatangkan investor.
- Obyek – obyek investasi benar – benar clean and clear dari segala hambatan yang mungkin timbul ketika ada ketertarikan investor untuk berinvestasi di daerah.
- Dukungan dari para pengampu kepentingan yang saling sinergi sehingga akan benar – benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga melibatkan 18 (delapan belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 - 48

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		
1	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	7	6	5	83,3%	▶
		Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional:					
		Peringkat di POPDA SD	3	6	5		●
		Peringkat di POPDA SMP	9	15	26		▼
		Peringkat di POPDA SMA	16	20	21		▶
		Peringkat di POPDA Dulongmas	-	-	-		
		Peringkat di PORPROV	-	-	-		
		Jumlah klub olah raga	183	183	183	100%	●
		Jumlah organisasi olah raga	36	35	35	100%	●
2	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91.18%	82,35%	85.71%	104,08%	●
		Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional:					
		Provinsi	8	7	1		▼
		Nasional	1	0	0		●
3	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina / difasilitasi	98%	95%	96,7%	101,79%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		
		Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	1	1	100%	●
		Persentase pengangguran pemuda	5,37%	6,40%			▼
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	29,41%	47,06%	0%	0%	▼
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	89%	71%	87,13%	122,72%	●
5	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase kelompok wirausaha pemuda	75%	75%	0%	0%	▼
6	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1,47%	0%	0%	▼

Sumber : Disporapar Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Realisasi indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan triwulan kedua tahun 2018, terdapat enam indikator yang belum mencapai target dan perlu upaya keras untuk pencapaian target tersebut. Indikator tersebut adalah:

- a. Peringkat di POPDA SMP. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Magelang menargetkan mencapai peringkat 15 dengan realisasi pencapaian pada peringkat 26. Kondisi ini masih jauh dari target dan perlu usaha keras, mengingat pelaksanaan POPDA telah selesai pada bulan April. Persiapan perlu dilakukan lebih matang untuk menghadapi

POPDA SMP tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya karena prestasi yang ditargetkan pada akhir periode RPJM adalah pada peringkat 9 untuk POPDA SMP.

- b. Peringkat di POPDA SMA. Seperti halnya dengan POPDA SMP, prestasi di POPDA SMA tidak mencapai target karena pelaksanaan kegiatan yang sudah selesai. Untuk mengejar target capaian tahun-tahun mendatang, maka diperlukan persiapan yang lebih matang untuk menghadapi kompetisi tersebut.
- c. Prestasi pemuda di tingkat provinsi. Dari target sejumlah 7 orang pemuda berprestasi di tingkat provinsi, hanya 1 orang pemuda yang berprestasi. Gap ini sangat perlu upaya keras dalam pembinaan pemuda agar dapat berprestasi di tingkat provinsi.
- d. Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi. Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II belum ada realisasi. Hal ini dikarenakan lapangan olahraga yang bukan merupakan asset dinas, tetapi kelurahan. Untuk itu, dinas berupaya untuk mengkoordinir pelaksanaan revitalisasi lapangan-lapangan di kelurahan yang menjadi lingkup capaian kinerjanya. Selain itu, dinas juga akan mengajukan revitalisasi lapangan yang ada di dinas untuk direvitalisasi pada anggaran perubahan tahun 2018 ini.
- e. Persentase kelompok wirausaha pemuda. Indikator ini masih menunjukkan angka 0% dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan pada bulan Oktober. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah tidak semua pemuda langsung menindaklanjuti hasil pelatihan, sehingga penambahan jumlah kelompok wirausaha pemuda tidak begitu signifikan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk menindaklanjuti kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan.
- f. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN. Kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator ini baru akan dilaksanakan pada triwulan III. Jumlah peserta, khususnya pemuda, yang hanya mencakup 100 pemuda tidak akan mampu menutup target tahunan. Namun, ketika kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun, akan dapat mencapai target akhir masa RPJMD.

2.1.3.1.20 Statistik

Kinerja Urusan Statistik terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 -49

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018	Status Capaian

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD	Status
			RPJM	Hingga Triwulan kedua		Hingga	
			s.d.	Tahun 2018		Triwulan	
			2021	Target	Capaian	kedua Tahun	
				2018	Hingga	2018	
					Triwulan		
					kedua Tahun		
					2018		
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	95%	95%	92,68%	97,56%	●

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Kinerja urusan statistik hingga triwulan kedua tahun 2018 di Kota Magelang sudah memenuhi target yang ditetapkan. Saat ini telah tersedia 344 variabel data dari 367 variabel yang diperlukan. Dalam penyediaan data statistik, pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan BPS yang secara tupoksi berwenang dalam penyediaan data statistik melalui dokumen-dokumen seperti Daerah Dalam Angka, Analisis PDRB dan lain sebagainya.

2.1.3.1.21 Persandian

Kinerja Urusan Persandian terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 -50

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD	Status
			RPJM	Hingga Triwulan kedua		Hingga Triwulan	
			s.d. 2021	Tahun 2018		kedua Tahun	
				Target	Capaian	2018	
				2018	Hingga		
					Triwulan kedua		
					Tahun 2018		

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ketersediaan SOP persandian	100%	50%	100%	200%	●
		Tingkat kapasitas SDM persandian	100%	100%	75%	75%	▼
		Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	100%	90%	3,45%	3,83%	▼

Sumber : Diskominsta Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Indikator kinerja urusan persandian melalui program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa baru tercapai satu indikator. Ketersediaan SOP persandian sudah disusun pada tahun 2017, akan tetapi baru direncanakan disosialisasikan pada tahun 2019 sehingga untuk indikator persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian belum dapat dicapai. Target indikator ini akan sulit dicapai jika semua OPD diharapkan menerapkan SOP persandian mengingat urusan persandian adalah urusan rahasia yang tidak bisa dibagikan secara umum kepada semua OPD. Perlu dilakukan penyesuaian definisi operasional dari indikator pada saat review RPJMD sehingga target indikator ini dapat dicapai.

Tingkat kapasitas SDM persandian juga masih belum memenuhi target hingga triwulan kedua tahun 2018. Tenaga khusus/ahli di bidang persandian saat ini berjumlah 2 orang dengan kapasitas SDM satu orang 100% dan satu orang 50% sehingga tingkat kapasitasnya baru mencapai 75%. Tenaga ahli di bidang persandian tersebut pada tahun 2018 ini pensiun 1 orang sehingga perlu strategi pemenuhan baik kuantitas maupun kapasitas SDM sandi agar memenuhi target di akhir RPJMD.

2.1.3.1.22 Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 51

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2018		Kinerja RKPd Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian TW II 2018		
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100%	89,74%	89,74%	▶
		Jumlah pengunjung museum	5.600	5.250	3,746	71,35%	▼
		Jumlah koleksi museum	15	12	65	541,66%	●
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	16,67	15,32%	4,02%	26,24%	▼
		Jumlah festival seni dan budaya.	14	12	3	25%	▼
		Cakupan gelar seni 75%	100%	100%	58,33%	58,33%	▼
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	230	225	224	99,55%	●
		Misi kesenian 100%	50%	39%	33,33%	85,46%	▶
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah gedung kesenian	2	1	0	100%	▼
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	15	12	11	91,66%	▶
		Cakupan kajian seni 50%	80	76%	80,00%	105,26%	●
		Cakupan fasilitas seni 30%	45	37%	42,86%	115,83%	●
		Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	80	78%	75,00%	96,15%	▶
		Cakupan tempat 100%	100	100%	54,55%	54,55%	▼
		Cakupan organisasi 34%	100%	100%	100%	100%	●

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari 15 indikator kinerja urusan Kebudayaan, terdapat 5 indikator yang telah mencapai target, sedangkan yang akan tercapai ada 4 indikator. Disisi lain terdapat 6 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi.

Adapun secara detail capaian masing masing indikator kinerja yang belum memenuhi target dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Jumlah pengunjung museum

Target indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II tahun 2018 belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, dari target pengunjung sebanyak 5.250 baru 3.746 orang yang berkunjung. Namun demikian tetap optimis bahwa target yang telah ditetapkan akan mampu untuk dicapai bahkan melebihi target sampai dengan akhir tahun 2018.

2) Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan

Target indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II tahun 2018 belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, dari 224 kelompok seni dan budaya baru 9 kelompok yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan. Diperlukan upaya yang keras untuk mencapai target indikator ini, mengingat dari 224 kelompok seni budaya yang ada, baru 9 kelompok yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan. Sesuai dengan target tahun 2018 paling tidak ada 34 kelompok yang harus difasilitasi/ dibina dan dikembangkan.

3) Jumlah festival seni dan budaya.

Target indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II tahun 2018 belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, dari target 12 festival seni dan budaya baru terlaksana 3 festival seni dan budaya. Hal ini disebabkan karena adanya pemunduran pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dari jadwal yang telah ditetapkan. Namun demikian tetap optimis bahwa target yang telah ditetapkan akan mampu untuk dicapai sampai dengan akhir tahun 2018..

4) Cakupan gelar seni

Target indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II tahun 2018 belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, dari target cakupan 100 persen gelar seni baru terlaksana 58,33 persen gelar seni. Hal ini disebabkan karena adanya pemunduran pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dari jadwal yang telah ditetapkan seperti pagelaran wayang kulit dalam rangka hari jadi Kota Magelang yang baru dilaksanakan pada bulan Juli 2018. Namun demikian target ini optimis akan mampu untuk dicapai sampai dengan akhir tahun 2018..

5) Jumlah gedung kesenian

Capaian indikator kinerja ini belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 1 gedung kesenian pada tahun 2018. Meskipun beberapa kegiatan pagelaran atau pertunjukkan seni dilaksanakan pada gedung pertemuan milik pemerintah seperti gedung Kyai Sepanjang, gedung Wanita, gedung Wiworo Wiji Pinilih dll, saat ini pemerintah kota Magelang belum memiliki gedung yang peruntukannya khusus untuk gedung kesenian. Saat ini telah dibangun Pendopo Mantyasih yang cukup representative untuk digunakan sebagai tempat pertunjukan kesenian, akan tetapi masih berupa panggung terbuka sehingga perlu penyesuaian pada definisi gedung kesenian apabila tempat ini akan dimasukkan pada capaian indikator kinerja.

6) Cakupan tempat 100%

Target indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II tahun 2018 belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, dari target cakupan 100 persen cakupan tempat baru tercapai 54,55 persen cakupan tempat. Namun demikian target ini optimis akan mampu untuk dicapai sampai dengan akhir tahun 2018.

2.1.3.1.23 Perpustakaan

Indikator kinerja urusan melibatkan 6 (enam indikator) dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -52

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD hingga Triwulan kedua Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	1. Persentase peningkatan judul buku	15,99%	5,60 %	1%	17,86 %	▼
		2. Persentase peningkatan jumlah buku	9,89%	6,26 %	1,5%	23,96 %	▼
		3. Persentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	66,35%	52,13 %	0%	0%	▼
		4. Persentase perpustakaan aktif	28,44%	21,33 %	20,9%	97,98 %	●
		5. Cakupan pelayanan melalui e-library	5 %	2%	6,3%	315%	●
		6. Peningkatan promosi layanan perpustakaan	25 %	12,50%	75,47%	603.76 %	●

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari keenam indikator kinerja urusan perpustakaan, terdapat 3 indikator yang telah mencapai target hingga triwulan 2 tahun 2018. Indikator tersebut yaitu indikator persentase perpustakaan aktif, cakupan pelayanan melalui e-library dan peningkatan promosi layanan perpustakaan. peningkatan judul buku , Persentase peningkatan jumlah buku,

Persentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten, Peningkatan promosi layanan perpustakaan Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 %.

Indikator lainnya masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target hingga akhir tahun 2018. Target yang belum memenuhi target tersebut adalah persentase peningkatan judul buku, persentase peningkatan jumlah buku, dan persentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten. Judul buku pada tahun 2018 ditargetkan bertambah 2.098 buah judul, tetapi hingga triwulan kedua tahun 2018 baru bertambah sebanyak 359 judul. Penambahan jumlah buku hingga triwulan kedua tahun 2018 juga baru mencapai 834 eksemplar dari target penambahan 3.378 eksemplar.

2.1.3.1.24 Kearsipan

Indikator kinerja urusan melibatkan 8 (delapan) indikator dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -53

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Hingga Triwulan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD hingga Triwulan Kedua Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
1.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	1. Persentase sarpras arsip yang terpelihara	89%	50 %	50%	100%	●
2.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	1. Cakupan pelayanan akses arsip	82%	67 %	92,31%	137,77 %	●
		2. Tingkat Kompetensi SDM Pengelola Kearsipan	67%	39 %	0%	0%	▼
3.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	100%	52%	34,48%	66,31 %	▼
		2. Persentase Penyelamatan Arsip	73%	53%	50,04%	94,42 %	●
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1. Presentase implementasi e-arsip	100%	52%	25,45%	48,9%	▼

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD hingga Triwulan Kedua Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2018		
		2. Persentase ketersediaan sarpras arsip	60%	30%	0%	0%	▼

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Belum seluruh indikator dalam urusan kearsipan telah mencapai target, meski beberapa diantaranya melampaui target triwulan kedua tahun 2018. Indikator yang masih perlu upaya keras untuk dicapai terkait kompetensi SDM kearsipan, pengelolaan arsip baku, implementasi e-arsip dan ketersediaan sarana prasarana kearsipan.

2.1.3.1.25 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan indikator kinerja urusan yang melibatkan 5 (lima indikator) dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -54

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Hingga Triwulan II Tahun 2018

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018 sd TW II		Kinerja RKPD Th. 2018	Status capaian
				Target 2018	Capaian 2018 sd TW II		
1	2	6		7	8		9
1	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan						
		1. Prosentase unit pengolahan ikan yang telah tersertifikasi SKP	0	0	2 %	200%	●
		2. Jumlah pengolah	6	2	2	100%	●

			ikan yang telah melaksanakan prinsip dasar pengolahan yang benar					
2	Program pengembangan budidaya perikanan							
		3.	Produksi hasil perikanan :Produksi ikan	167.01	50	40	95,24%	▶
		4.	Persentase unit pembenihan ikan bersertifikasi CBIB	70%	40%	40%	100%	●
3	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan							
		5.	Luas lahan perikanan organic	0.6	0.3	0,1	33%	▼

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Tabel di atas menunjukkan capaian indikator kinerja urusan Kelautan dan Perikanan dan diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator, berikut deskripsi dari tabel kinerja diatas:

1. Terdapat 3 (tiga) indikator yang tercapai/melampaui, yaitu (1) Prosentase unit pengolahan ikan yang telah tersertifikasi SKP, (2) Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar, dan (3) Persentase unit Pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB. Khusus untu sertifikasi SKP, dalam ROJMD Tidak ada target kinerja sampai dengan akhir RPJM tahun 2021, sehingga juga tidak terdapat target capaian untuk unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP, akan tetapi OPD sudah memfasilitasi untuk pendaftaran tersebut, walaupun demikian sampai dengan Semester II ini sudah terdapat penambahan 2% dari total pengusaha pengolah ikan yang mendaftar SKP. Adapun permasalahan khusus untuk menuju sertifikasi adalah tempat pengolahan ikan harus terpisah antara tempat pengolahan dengan rumah tinggal. Tetapi kebanyakan tempat pengolahan ikan masih menjadi satu dengan rumah tinggal, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi
2. Adapun indikator yang Akan Tercapai adalah indikator Produksi hasil perikanan: Produksi ikan, hal ini dikarenakan waktu pemanenan hasil perikanan Daerah tidak serentak, hal ini dipengaruhi karena juga waktu tumbuh dan berkembang ikan yang bukan dipengaruhi oleh tanaman musiman seperti hasil dari pertanian. Indikator ini akan tercapai pada akhir Tahun 2018 dimana pembudidaya kolam juga sudah memeperhitungkan hasil, adapun

peningkatan stok produksi ikan pertahun juga meningkat seiring dengan adanya perayaan hari besar keagamaan Idul Fitri pada Semester II.

- Indikator Capaian Kinerja berupa luas lahan perikanan organik termasuk dalam kriteria Perlu Kerja Keras untuk dapat mencapai target kinerja di Tahun 2018 sebesar 0.3 Ha lahan, target ini merupakan target Tahunan karena memang memerlukan proses persiapan dari administrasi sampai dengan kesiapan lokasi, saat ini dari target total RPJMD 2018 sudah ada Lahan seluas 1000 meter persegi yang menuju perikanan organik dengan dinina oleh OPD pertanian dan pangan Kota Magelang, adapun kendala yang muncul dalam perikanan adalah sumber air yang digunakan untuk budidaya masih sulit terbebas dari zat-zat polutan yang masuk karena sebagian besar masih mengandalkan sumber air dari irigasi.

2.1.3.1.26 Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 -55

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Hingga Triwulan Kedua Tahun 2018		
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi Wisata Unggulan	7	4	4*	100%	●
		Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	88,89%	44,44%	70%*	255%	●
2	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	13	10	9*	100%	●
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisatawan	2 - 4 hari	2 - 4 hari	2 - 4 hari	100%	●
		Persentase TIC yang representatif	100%	100%	0%	0%	▼
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.143.954	1.138.140	467.672	41,09%	▼
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5.219	5.193	2.689	51,78%	▼

Keterangan:



: Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)



: Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $>80\%$ target Tahun 2018 atau

Akhir RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 ≤ 80% Triwulan kedua 2018 atau ≤ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Realisasi indikator kinerja urusan Pariwisata sampai dengan triwulan kedua tahun 2018, terdapat 3 indikator yang belum mencapai target dan perlu upaya keras untuk pencapaian target tersebut. Indikator tersebut adalah:

a. Persentase TIC yang representatif.

Pencapaian indikator ini masih 0% dikarenakan belum terbangunnya TIC. Pembangunan TIC sedang diusulkan dengan pembiayaan bersumber dari DAK pada tahun 2019.

b. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Sampai dengan triwulan kedua, persentase capaian indikator ini masih berada pada 41,09%. Kondisi ini masih jauh dari target pencapaian tahun 2018 yaitu sebesar 1.138.140 wisatawan nusantara.

c. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Hampir sama dengan kondisi jumlah kunjungan wisatawan nusantara, indikator ini berada pada angka sedikit lebih tinggi yaitu 51,78%. Tentunya kondisi ini memerlukan usaha untuk menggenjot pariwisata di Kota Magelang untuk dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi.

2.1.3.1.27 Pertanian

Indikator kinerja urusan Pertanian melibatkan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 56

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Hingga Triwulan II Tahun 2018

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN		Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status capaian
					Target 2018	Capaian sd TW II Tahun 2018		
	Urusan Pilihan	Pilihan	Urusan					
1	Program Kesehatan Veteriner		Pelayanan Masyarakat					
			1. Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	4,24%	2.4%	3.42%	142,5%	●
2	Program penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		pemberdayaan					
			2. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	52,94	11,76%	0%	0%	▼
			3. Rasio petani terlatih	85%	85%	0%	0%	▼
3	Program		pengecahan dan					

	penanggulangan penyakit ternak							
		4. Persentase hewan sehat	87	81%	81%	100%	●	
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							
		5. Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	8	5	7	100%	●	
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan							
		6. Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	10%	1%	1%	100%	●	
		7. Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	10	7	7	100%	●	
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan							
		8. Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	4,24	2,74%	3,42%	125%	●	
7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan							
		9. Luas lahan pertanian organik	1,14	0,98	0	0%	▼	
		10. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	72%	51,70%	0	0%	▼	
8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan							
		. Jumlah pelaku usaha peternakan organik:	15	6	3	50%	▶	
		11. Peternak ayam buras/ ayam broiler	5	2	1	50%	▶	
		12. Peternak kelinci	5	2	1	50%	▶	
		13. Peternak kambing/domba	5	2	1	50%	▶	
		14. Rasio peternak Terlatih	90	85%	0%	0%	▼	
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan							

10	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	15. Daging Ruminansia	1.401.690	1.121.350	504.020	45%	▼
		16. Daging Unggas	5.660.315	4.878.650	3.128.419	64%	▶
		17. Telur	500.000	400.000	36.050	10%	▼
		18. Susu	209000	190.000	111.330	59%	▶
		19. Padi	3.380.000	3.180.000	1.495,52	47%	▶
		20. Jagung	11	11	10,20	93%	▶
		21. Ubi kayu	15	13,5	0	0%	▼

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Berdasarkan capaian kinerja Urusan Pertanian sebagaimana matriks di atas dapat diketahui bahwa dari ke 10 Progam 22 Indikator Capaian Indikator sampai dengan triwulan II Tahun 2018 indikator kinerja yang dapat tercapai ada 4 (empat) indikator , belum tercapai 9 (sembilan) indikator dan yang perlu upaya keras ada 9 (sembilan) indikator.

Keempat indikator yang tercapai/melampaui di Tri wulan ke II yaitu antara lain Prosentasi unit usaha yang telah bersertifikasi NKV, prosentase hewan sehat, jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang, prosentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikat halal. Dari keempat indikator ini indikator prosentasi unit usaha yang telah bersertifikasi NKV dan indikator prosentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikat halal tercapai dengan melampaui target artinya ke 2 (dua) indikator ini tidak mengalami kendala dan tidak ada masalah. Adapun jumlah kelompok tanaman hias dan bunga di Kota Magelang sampai saat ini sudah ada peningkatan tahun 2016 ada 3 kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga dan tahun 2018 ada penambahan menjadi 7 kelompok adapun kelompok pembudidaya tanaman hias di Kota Magelang adalah sebagai berikut :

- Sekarsari Kelurahan Kedungsari
- Anggrek Indah, Kemirirejo
- Azahra Kelurahan Potrobangsari
- Puspa Indah , Kelurahan Kemirirejo
- Kelurahan Sanggrahan wates
- Tiza sekar Bogeman

- Mangir Garden Karang kidul.

Sementara itu indikator yang akan tercapai antara lain : Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian, Jumlah Pelaku Usaha Peternakan Organik, Peternak ayam buras/broiler, Jumlah Pelaku Usaha peternak kelinci, Jumlah Pelaku Usaha Peternak Kambing/Domba, Daging Unggas, Susu, Padi, Jagung dari 9 (sembilan) indikator ini akan tercapai, seperti Jumlah komoditas agribisnis pertanian saat ini sudah mencapai 90 % artinya diakhir tahun 2018 akan tercapai. Dari 10 (sepuluh) komoditas ini antara lain : Padi (ramah lingkungan), Tanaman Hias, sayuran organik, tabulapot, jamur, pengolahan jamur, olahan lidah buaya, budidaya lidah buaya dan hidroponik, indikator yang lain juga akan tercapai di akhir tahun sesuai dengan pentahapan pelaksanaan kegiatan, seperti padi untuk saat ini baru tercapai 47% dikarenakan masa tanam dan masa panen yang tidak bersamaan yang menjadikan tidak tercapai, hal ini bukan menjadi kendala dan indikator ini akan tercapai diakhir tahun.

Sedangkan Untuk 9 (sembilan) indikator Capaian Kinerja termasuk dalam kriteria Perlu Kerja Keras untuk dapat mencapai target kinerja di Tahun 2018 yaitu Prosentase Petani yang melaksanakan (Good Agricultural Practices) GAP, Rasio petani terlatih, Prosentase petani yang melaksanakan (Good Handling Practices) GHP, Luas Lahan Pertanian Organik, Prosentase petani yang telah menerapkan teknologi pertanian, Rasio peternak terlatih, Produksi Ubi kayu, Daging ruminansia dan telur

Untuk indikator yang belum tercapai sama sekali dan posisi masih 0 (nol) yaitu :

- Prosentase Petani yang melaksanakan (Good Agricultural Practices) GAP dalam posisi masih 0 (nol) dikarenakan kegiatan belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan disemester 2
- Terkait dengan Good Handling Practices (GHP) posisi masih 0 (nol) dikarenakan pelatihan belum dilaksanakan. Adapun pelatihan dalam satu kegiatan 25 peserta dan tidak semuanya akan melaksanakan GHP dikarenakan kebanyakan petani masih dengan pola lama dalam hal ini petani sulit untuk merubah kebiasaannya untuk melakukan pengerjaan dengan alat modern dan masih dengan alat tradisional, Sebenarnya penerapan GHP ini kalo diterapkan akan sangat menguntungkan bagi petani karena akan mendapatkan hasil yang lebih baik, penerapan ini menitik beratkan penanganan hasilnya lebih berkualitas dibanding dengan alat tradisional akan tetapi para petani masih banyak yang memakai alat itu.,
- Peningkatan produksi daging ruminansia sangat kecil sehingga kesulitan untuk mencapai target.
- Untuk daging ruminansia produksi sangat kecil sehingga sering mengalami kesulitan untuk mencapai target. konsumsi daging sapi masyarakat masih kesulitan, adapun daging ruminansia di Indonesia termasuk dalam tingkat terendah di dunia. Dalam setahun, masyarakat Indonesia mengonsumsi kurang dari 5 kilogram daging. Pendapatan per kapita yang rendah serta pengetahuan yang minim dinilai sebagai salah satu faktor penyebab, Rasio petani terlatih posisi masih 0 (nol) dikarenakan belum dilaksanakan kegiatannya dan akan dilaksanakan pada semester di bulan September dalam hal ini jumlah petani terlatih ada 425 orang yang mana kategorinya sudah mengikuti pelatihan.
- Telur tidak tercapai dan sampai dengan saat triwulan II baru tercapai 1% hal ini dikarenakan adanya kekeliruan angka dalam penulisan target
- Untuk ubi kayu sampai dengan saat ini posisi juga masih (0) yang mana ubi kayu untuk panen jangka waktunya cukup panjang, akan tetapi ubi kayu akan tercapai target bahkan tahun ini akan melampaui target karena masa panen ubi kayu itu jangka waktu tanam sampai berbuah dengan waktu agak panjang.

2.1.3.1.28 Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral melibatkan 1 (satu) indikator kinerja daerah dan 1 (satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 57

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian Hingga TW II Tahun 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum (PJU)	71,89%	62%	62,11%	100,1%	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Satu satunya indikator kinerja dari urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, yaitu rasio ketercukupan penerangan jalan umum yang dilaksanakan pada tahun 2018 tercapai 62,11% dari target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 71,89%. Secara detail pelaksanaan program tahun 2018 yang direncanakan sebesar 62% dari target akhir RPJMD 2021 sebesar 71,89% dapat tercapai 100% sesuai yang ditargetkan.

Memperhatikan target kinerja RPJMD, maka untuk mencapai target akhir ketercukupan penerangan jalan umum sebesar 71,89%, urusan Energi dan Sumberdaya Mineral masih menghadapi tantangan capaian sebesar 9,89 % yang secara bertahap akan dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

2.1.3.1.29 Perdagangan

Indikator kinerja urusan Perdagangan melibatkan 6 (enam) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 58

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program Pembinaan	Cakupan PKL yang dibina	16 %	10 %	19,81 %	198 %	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
	pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah shelter PKL yang dikelola	17	14	18	128 %	●
2	Program Pengelolaan Pasar	Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	54 %	23%	100 %	435 %	●
		Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10 %	10 %	32 %	320 %	●
		Cakupan pedagang pasar yang dibina	16 %	10 %	2 %	20 %	▼
		Persentase pasar tradisional yang dikelola	80 %	80 %	75 %	93.75%	▶
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor produk ke LN	US\$1.250.000	US\$ 1.100.000	US\$ 654.975	59.54 %	▼
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	7 %	4 %	3,37 %	84.25 %	▶
5	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTP yang ditera	3.100	2.800	1,417	28 %	▼
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design	60 %	40 %	20 %	50.6%	▼

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari keenam program prioritas yang di dalamnya memuat 10 (sepuluh) indikator kinerja urusan Perdagangan, 4 (empat) indikator telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan. sedangkan 2 (dua) indikator capaian optimis akan tercapai 100% pada akhir tahun 2018 dan 4 (empat) indikator lainnya perlu upaya lebih keras dalam mencapai target tersebut,

Dari tabel diatas nampak terdapat 4 (empat) indikator lainnya perlu upaya lebih keras dalam mencapai target tersebut, hal tersebut hanya dikarenakan kegiatan – kegiatan pendukung pencapaian indicator tersebut belum dilaksanakan, tinggal langkah konkrit dalam melaksanakan kegiatan pendukung urusan perdagangan ini optimis tercapai.

Namun demikian tetap ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yaitu:

- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan indicator Cakupan PKL yang dibina dan Jumlah shelter PKL yang dikelola menunjukkan capaian target yang cukup tinggi, namun demikian juga perlu diwaspadai daya dukung kota dalam memfasilitasi PKL karena hal ini terkait erat dengan pemanfaatan trotoar kota yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Solusi permasalahan :

- Membatasi pertumbuhan PKL maupun pertumbuhan Shelter PKL.

2.1.3.1.30 Perindustrian

Realisasi yang telah dicapai pada penyelenggaraan urusan perindustrian secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 59

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan daya saing IKM Formal	3,3 %	3,15 %	1,58 %	50.15 %	▼
2	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	15	12	11	91.6%	►
3	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll)	4,30%	4,15 %	4,52%	109 %	●
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,29%	5.09%	5.00%	98.23%	►

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir

RPJMD)

Dari 4 (empat) program prioritas yang di dalamnya memuat 4 (empat) indikator kinerja urusan Perindustrian , 1 (satu) indikator telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan yaitu Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll). sedangkan 2 (dua) indikator capaian optimis akan tercapai 100% pada akhir tahun 2018 yaitu Jumlah sentra industri dan Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna dan 1 (satu) indikator lainnya perlu upaya lebih keras dalam mencapai target tersebut yaitu Peningkatan daya saing IKM Formal.

Namun demikian tetap ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu:

- Peningkatan daya saing IKM formal masih sulit diupayakan dikarenakan perilaku higienis/keselamatan kerja belum menjadi perhatian bagi para pelaku usaha IKM Formal yang mengakibatkan produk yang dihasilkan juga kurang mempunyai daya saing di pasar
- Dukungan para pemangku kepentingan terkait promosi sentra – sentra industry kurang diperhatikan

Solusi permasalahan :

- Melakukan pembinaan intensif kepada para pelaku industry kota magelang terutama terkait dengan masalah management usaha agar produk yang dihasilkan lebih memiliki daya saing di pasar baik regional maupun nasional.
- Pengampu urusan perindustrian perlu mengelola anggaran secara cermat guna mengoptimal potensi perindustrian kota magelang yang tentunya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.1.31 Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, tujuan lain dari transmigrasi sesuai dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor informal, dan mengembangkan potensi sumber daya alam di daerah. Upaya penanganan urusan ketransmigrasian di daerah asal dilakukan dalam 3 (tiga) cara yaitu (1) pengarahan calon transmigran (2) sosialisasi potensi lokal daerah transmigran (3) fasilitasi penempatan transmigrans. Dana yang digunakan sebagai upaya untuk melaksanakan urusan ketransmigrasian di Tahun 2018 adalah Dana APBD Kota Magelang. Total dana yang sebesar Rp 184.234.000,- dengan serapan anggaran sampai dengan akhir triwulan kedua sebesar Rp 18.338.000,- atau 9.95 persen.

Dengan melaksanakan ketiga fungsi tersebut capaian realisasi indikator urusan Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan kedua Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2-60

Target Indikator Realisasi Pencapaian Urusan Ketransmigrasian Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian triwulan kedua Tahun 2018		
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1. Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	100%	100 %	0%	0%	▼
2	Program Transmigrasi Regional	2. Persentase masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%	100 %	0%	0%	▼

Keterangan

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>80\%$ target Triwulan kedua 2018 atau $> 80\%$ target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2018 atau $\leq 80\%$ Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari hasil capaian indikator diatas terlihat bahwa sampai dengan akhir Triwulan Kedua Tahun 2018 kedua target indikator kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan penempatan transmigrasi dilaksanakan pada triwulan IV setelah lokasi penempatan dinyatakan clean and clear (2 C). Sementara untuk kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2018 dengan jumlah peserta 300 orang dari 17 kelurahan di Kota Magelang.

2.1.3.2 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.2.1 Fungsi Lain-lain

Fungsi penunjang lain lain melibatkan 27 indikator dan 9 program. Capaian indikator Fungsi ini sebagaimana tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 2 - 61

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penunjang Fungsi lain Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian Hingga Triwulan II Tahun 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	78%	56%	64%	>100%	●
2	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	100%	0	20%	>100%	●
		Implementasi pemanfaatan SPIPISE	100%	70%	100%	>100%	●
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100%	100	100	100%	●
4	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah review PERDA/PERWAL	0	0	1	>100%	●
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	3	0	0	100%	●
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0	0	0	100%	●
5	Program pengelolaan barang milik daerah	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	80%	60%	72,44%	>100%	●
		Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	●
		Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	50%	50%	100%	●
		Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	50%	<100%	▸
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	100%	100%	●
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan kebijakan penataan daerah	100%	20%	20%	100%	●
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	100%	50%	50%	100%	●
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	88,71%	88,33, %	<100%	▸

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian Hingga Triwulan II Tahun 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	55%	30%	30%	100%	●
		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	100%	80%	80%	100%	●
		Persentase zona integritas yang terbentuk	50%	10%	5%	<100%	►
		Nilai hasil LKJip SKPD	B	CC	CC	100%	●
		Persentase SKPD yang direview LKJip	75%	35%	58,62%	>100%	●
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%	90%	88,73%	<100%	►
		Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	5%	60%	114,29%	>100%	►
		Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	90%	83,45%	<100%	►
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	100%	90%	100%	>100%	●
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	85%	65%	84%	>100%	●
		persentase SPM yang mencapai target nasional	85%	65%	65%	100%	●
		Tingkat pemahaman tentang SAKIP	100%	100%	100%	100%	●

2.1.3.2.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.

Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berbasis AkruaI dimulai tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Pada tahun 2011 -

2014 Pemerintah Kota Magelang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, oleh karena itu perbaikan laporan terutama masalah aset terus diprioritaskan.

Perjuangan dan upaya perbaikan tersebut akhirnya membuahkan hasil yang sangat membanggakan bagi Pemerintah Kota Magelang ketika berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, utamanya kepatuhan kepada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung peningkatan PAD dilakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah, up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, peningkatan manajemen aset daerah dengan penerapan Sistem Informasi Barang Milik Daerah. Selain itu dilakukan optimalisasi pendapatan terkait Pajak Bumi dan Bangunan.

Target dan realisasi indikator urusan Keuangan hingga triwulan II Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 -62

Target dan Realisasi Indikator Urusan Keuangan Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
			s.d. 2021	Target 2018	Capaian 2018 s.d TW II		
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	80%	65%	0%		▼
		2 Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%		●
		3 Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	75%	100%		●
		4 Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%		●
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Persentase pertumbuhan PAD	10,21%	19,18%	7,32%		▼
		2 Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	90%	84%	100%		●
3	Program Peningkatan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah	1 Rasio pajak daerah terhadap PAD	12%	12,56%	12,95%		●
		2 Rasio retribusi daerah terhadap PAD	2,91%	3,63%	2,18%		▶

4	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusda	1	Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD	2,59%	2,52%	1,35%	▶

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2018 atau $\geq$ 100% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $>$ 80% target Triwulan kedua 2018 atau $>$ 80% target Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2018 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2018 atau $\leq$ 80 % Tahun 2018 atau Akhir RPJMD)

Dari sembilan indikator kinerja urusan keuangan, terdapat 6 indikator yang telah mencapai target yaitu indikator asset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang, barang milik daerah yang didayagunakan, pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu, pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu, persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP, dan indikator rasio pajak daerah terhadap PAD. Walaupun sudah melampaui target di tahun 2018 yaitu 89,66% namun masih ada 3 OPD yang belum melaporkan laporan semesteran BMD tepat waktu.

Indikator rasio retribusi daerah terhadap PAD dan indikator rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD optimis akan tercapai di tahun 2018 ini. Penambahan retribusi Gunung Tidar dan retribusi meteorologi (tera ulang) diharapkan dapat meningkatkan rasio retribusi daerah terhadap PAD. Namun demikian masih terdapat 1 indikator yang masih perlu upaya keras untuk mencapai target di tahun 2018 yaitu indikator persentase pertumbuhan PAD.

2.1.3.2.3 Perencanaan Pembangunan

Indikator kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan 12 (dua belas) indikator kinerja dan 7 (tujuh) program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 63

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian Hingga TW II 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100		●
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90	70	70		●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja			Target 2021	Target 2018	Capaian Hingga TW II 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
		Persentase Musrenbang yang terakomodir	BA	Hasil	85	72	74		●
		Persentase Masyarakat Publik	Partisipasi dalam Konsultasi		55	35	36		●
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir			85%	76%	76%		●
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi			100	100	100		●
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang esosial budayai			100	100	100		●
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana			100	100	100		●
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti			4	1	2		●
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan			95	70	75		●
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan			100	100	100		●

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, 2017

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 $\geq$ 100% target 2018 atau $\geq$ 100% target RPJMD)

- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari ke 11 target yang diemban oleh penunjang perencanaan keseluruhan target mampu dilalui dengan baik bahkan terdapat beberapa indikator yang melampaui target. Hal yang harus terus dilakukan adalah kreatifitas dan inovasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sambil mengeliminir berbagai permasalahan yang dihadapi.

2.1.3.2.4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan melibatkan 16 (enam belas) indikator kinerja dan 6 (enam) program utama dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 64
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:					
		Pendidikan S1	49%	46%	45,11%	<100%	▶
		Pendidikan S2	10%	9%	8,70%	<100%	▶
		Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100	100	100,00%	100%	●
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46	41%	45,45%	110,86%	●
		Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	0%	71,43%	100%	●
		Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	5%	100%	>100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
		Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,01%	0,10%	0,20%	>100%	●
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran ASN	100	97%	97,78%	>100%	●
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,18%	0,21%	0,26%	85%	►
3	Program Pendidikan kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	98%	94%	142,66%	>100%	●
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%	80%	100%	>100%	●
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemda	Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%	100%	0%	0%	▼
		Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	90%	80%	78,95%	<100%	►
		Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	97%	80%	175%	>100%	●
5	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan finger print	100%	60%	100%	>100%	●
6	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	92%	85%	78,14%	<100%	►

Sumber: Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 $\geq$ 100% target 2018 atau $\geq$ 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 > 80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 $\leq$ 80% target 2018 atau $\leq$ 80 % target RPJMD)

Dari 16 indikator urusan ini masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, sementara sebagian besar indikator tercapai bahkan sebagian banyak telah melampaui target. Pengampu urusan ini harus terus meningkatkan kinerja pada target target yang belum tercapai.

2.1.3.2.5 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penelitian dan Pengembangan menjadi salah satu posisi kunci dalam siklus perencanaan. Hal ini dikarenakan, sebuah program kegiatan sebaiknya diawali dari sebuah perencanaan yang berbasis penelitian, sehingga kegiatan tersebut memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OPD pengampu fungsi ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sesuai peraturan tersebut, hasil kelitbangan menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi bahan rekomendasi bagi para OPD.

Target dan realisasi indikator urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 - 65

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian Hingga TW II Tahun 2018	Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
1	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Persentase Krenova masyarakat yang berkualitas	23%	11%	3846%	>100%	●
		Presentase Krenova OPD yang berkualitas	12%	4%	25,58%	>100%	●
2	Program Penelitian dan Pengkajian	Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti	50%	30%	33,33%	>100%	●
3	Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK	Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	20%	10%	80%	>100%	●
4	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	Cakupan Monev dan / atau Pengendalian Riset dan / atau Kebijakan	20%	10%	37,6%	>100%	●
5	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	80%	50%	50%	100%	●
6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	15%	0%	0%	100%	●
7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	15%	7%	13,04%	>100%	●
8	Program Penguatan Inovasi Daerah	Cakupan Penguatan SIDA	75%	40%	45%	>100%	●
9	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	75%	40%	46,93%	>100%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 $\geq 100\%$ target 2018 atau $\geq 100\%$ target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 $> 80\%$ target 2018 atau $> 80\%$ Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 $\leq 80\%$ target 2018 atau $\leq 80\%$ target RPJMD)

Dari 9 program dan 10 indikator kinerja urusan kelitbangan, semuanya telah mencapai target, bahkan beberapa indikator telah melampaui target 2018. Melihat kondisi ini, maka besar harapan bahwa di akhir masa periode RPJMD, indikator-indikator kinerjanya dapat tercapai.

Penjaringan Krenova di tingkat masyarakat setiap tahun selalu dilakukan, terutama hasil-hasil temuan yang memiliki nilai dan dampak ekonomi bagi penemu dan masyarakat sekitar. Hasil dari penjaringan ini kemudian diikutsertakan dalam ajang serupa di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan apabila lolos, juga diikutsertakan dalam ajang serupa ke tingkat Pusat. Pada beberapa kesempatan pameran yang diikuti Pemerintah Kota Magelang, beberapa produk temuannya juga diikutsertakan untuk meningkatkan peluang bertemu dengan calon investor, atau calon pembeli. Bagi temuan-temuan yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual, juga difasilitasi untuk registrasinya.

Selain hasil-hasil kreasi dan inovasi dari masyarakat, pemerintah juga menerima hasil-hasil riset yang dilakukan masyarakat, dengan tema-tema strategis yang telah ditentukan, dan seleksi pada proposal riset yang masuk. Pemerintah menyediakan subsidi biaya riset bagi proposal terpilih. Hasil riset ini kemudian dijadikan bahan penyusunan kebijakan / perencanaan lebih lanjut. Untuk lebih mengaplikatifkan hasil-hasil riset yang sudah dilaksanakan, juga dilakukan beberapa kegiatan yang mengevaluasi hasil-hasil penelitian, supaya bisa lebih terasa manfaatnya baik pemerintah maupun masyarakat Kota Magelang.

Untuk lebih memperkenalkan budaya IPTEK di masyarakat, juga rutin dilaksanakan aneka kegiatan lomba terkait IPTEK, seperti lomba Robot dan Roket Air, untuk tingkat SLTP / SLTA. Diharap dengan aneka kegiatan ini, masyarakat sudah mengenal IPTEK sejak dini dan dapat tumbuh menjadi orang-orang yang sadar IPTEK.

Dalam hal kerjasama, telah dijalin kerjasama kelitbangan dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Magelang, dunia usaha, BPPT, dan unsur-unsur masyarakat. Mereka diikutsertakan dalam beberapa kegiatan seperti riset, lomba, seminar, diseminasi, dan FGD.

2.1.3.2.6 Pengawasan

Target dan realisasi indikator urusan Pengawasan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 -66

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Hingga Triwulan II Tahun 2018

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
			Target 2018	Capaian 2018 s.d TW II		

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Persentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	55%	35%	56,29%	●
	2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review	100%	80%	71,43%	●
	3	Persentase zona integritas yang terbentuk	50%	20%	10,34	▶
	4	Nilai hasil LKJiP SKPD	B	BB	B	●
	5	Persentase SKPD yang direview LKJiP	75%	45%	62,07%	●
	6	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	95%	95%	88,73%	●
	7	Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun	5%	50%	114,29%	●
	8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	95%	88,73%	●
	9	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal	100%	95%	100%	●
Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan	1	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, satker dan BUMD plus targetnya)	87%	65%	50%	●
	2	Persentase aparat SPIP aktif	80%	65%	55,17%	●
	3	Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	90%	80%	100%	●
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 3	Level 2	Level 3	●
	2	Persentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat	80%	65%	100%	●
	3	Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	85%	70%	100%	●
Program Sinergitas Penerapan SPI pada PD	1	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP	55%	75%	96,56%	●
	2	Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP	5%	50%	1,01%	▼
	3	Persentase implementasi SPIP	100%	78%	55,17%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi s.d TW II tahun 2018 $\geq$ 80% target 2018 atau $\geq$ 80% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi s.d. TW II tahun 2018 $>$ 50% target 2018 atau $>$ 50% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi s.d TW II tahun 2018 $\leq$ 50% target 2018 atau $\leq$ 50 % target RPJMD)

Dari 18 indikator yang ada, hanya ada 1 indikator yang perlu upaya keras dan sisanya dapat tercapai bahkan melampaui target tahun 2018. Indikator penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target, sedangkan indikator persentase zona integritas yang terbentuk optimis akan tercapai di tahun 2018 ini.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu hal yang mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah yang memiliki daya saing yang tinggi, akan menarik banyak investor untuk masuk ke dalam daerah. Bergairahnya kondisi perekonomian daerah di harapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Kondisi daya saing daerah akan berpengaruh terhadap daya tarik investasi daerah. Daya saing yang relatif rendah tentunya akan menyebabkan daya tarik investor yang akan melakukan investasi di daerah menjadi relatif kecil begitu pula sebaliknya. Kinerja pemerintahan memegang peranan penting dalam penentuan daya saing daerah.

Kemampuan suatu daerah dalam mengenali dan menggali potensi daerah, mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor pembentuk dan penentu daya saing kemudian menuangkannya ke dalam strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing suatu daerah. Selain hal yang mampu meningkatkan daya saing, Pemerintah juga harus jeli dalam memperhatikan hal – hal yang dapat menghambat peningkatan daya saing diantaranya korupsi, birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai bagi pengembangan investasi di daerah, ketidakstabilan politik, keamanan dan ketertiban di daerah, tenaga kerja yang tidak terdidik, etika kerja yang buruk, inflasi, peraturan pajak , buruknya pelayanan birokrasi di daerah dan lain sebagainya. “Reformasi struktural harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah mengingat kinerja pemerintahan memegang peranan penting dalam penentuan daya saing daerah seperti mempermudah proses perizinan dan kejelasan RTRW agar investor dengan mudah menanamkan investasi ke suatu daerah.

Survey Daya saing yang di lakukan pada tahun 2016 mengukuhkan Kota Magelang sebagai Kota dengan peringkat tertinggi dalam daya saing daerah di antara Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dengan indeks 64.75. Survey Daya saing daerah ini menilai daya saing Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dengan tujuh katagori yang mempengaruhi daya saing dan daya tarik investasi daerah sebagai berikut : Kinerja pemerintahan; Lingkungan usaha; Infrastruktur; Sumber Daya Manusia ; Kesehatan; Pendidikan; Pasar Keuangan. Keberhasilan Kota Magelang meraih peringkat pertama tersebut karena didongkrak oleh tiga kategori dari tujuh kategori di atas yakni persepsi iklim usaha, kinerja pemerintah dan infrastruktur. Hal yang menjadi faktor utama Kota Magelang menempati peringkat pertama adalah aspek kelembagaan, lingkungan usaha, basis di pasar tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, pasar keuangan, dan teknologi. Penghargaan ini juga sekaligus mengukuhkan Magelang sebagai salah satu kota yang dinyatakan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Terkait daya saing Kota Magelang ada hal yang perlu mendapat perhatian ke depan yaitu aspek makro ekonomi dan infrastruktur karena berdasarkan indikator pengukuran indeks tersebut, Kota Magelang masih belum unggul dalam pilar makro ekonomi. Upaya peningkatan realisasi investasi di Magelang harus dipertahankan karena investasi dapat berkembang lebih besar dengan adanya daya saing. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan positif antara pertumbuhan ekonomi dan skor daya saing untuk indikator perekonomian daerah

Gap negatif mengindikasikan masih terdapat sektor ekonomi yang belum tereksplor secara optimal. Beberapa strategi pemantapan perekonomian dalam mendukung daya saing dapat ditempuh melalui inovasi, penetrasi teknologi, eksplorasi ekonomi kreatif, mendorong investasi, optimasi sektor andalan dan kompetensi SDM. Tidak kalah penting adalah komitmen untuk menghindari eksternalitas negatif menuju penciptaan kelembagaan yang berkualitas dan akuntabel dalam mewujudkan Kota Magelang yang berdaya saing dan sejahtera secara berkesinambungan meski Magelang tidak memiliki sumber daya alam, Magelang dapat menawarkan jasa terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan suasana kota yang kondusif.

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu Indikator Kinerja Daerah, dimana aspek ini mempunyai empat fokus yaitu:

- a) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah;
- b) Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur;
- c) Iklim Berinvestasi
- d) Sumber Daya Manusia

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukur aspek kemampuan ekonomi daerah sekaligus sebagai indikator pengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita dan tingkat pemerataan pendapatan karena dua hal ini mencerminkan kemampuan daerah untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Kota Magelang. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat apabila diimbangi dengan adanya pemerataan pendapatan. Tabel di bawah ini merupakan tabel PDRB per kapita penduduk Kota Magelang dengan jumlah penduduk tengah tahun berdasarkan perhitungan BPS dengan menggunakan tahun dasar 2010 sebagai berikut :

Tabel 2 - 67
PDRB Per Kapita Kota Magelang Tahun 2010-2016 dan Prediksi Tahun 2017
(menggunakan tahun dasar 2010)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Jumlah Penduduk pada tengah tahun (jiwa)	118.424	119.003	119.416	120.879	120.438	120.792	121.112	121.474
PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)	33.926.45 9,42	37.641.93 2,95	41.086.81 5,37	44.732.06 9,37	49.023.24 3,20	53.538.07 4,04	57.92juta/t h atau 4.827 juta/bln	58.92juta/t h atau 4.91 juta/bln

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
								*
Pertumbuhan adhb (%)		10.95	9.15	8.87	9.59	8.55	8.48	7.55

Sumber : Dinas KOMinfo dan statistik Kota Magelang Tahun 2017

* Angka sementara

** Angka prediksi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita penduduk. PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.112 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 4.827 juta/bulan atau 57.92 juta /tahun (atas dasar harga berlaku). Upaya untuk meningkatkan ukuran dari indikator ini di antaranya melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Kondisi di tahun 2017, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota di level 5.19% dengan prediksi jumlah penduduk tengah tahun 2017 sebesar 121.474 jiwa maka jumlah pendapatan penduduk atas dasar harga berlaku di prediksi tumbuh mencapai 58.92 juta/tahun (4.91 juta/bulan)

Tingkat pemerataan pendapatan di Kota Magelang dalam beberapa tahun ini yang direpresentasikan melalui indeks gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 maka tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 di katakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Indeks gini di Kota Magelang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2012 meningkat kemudian sebaliknya pada tahun 2013 mengalami penurunan. Kondisi ini berulang hingga tahun 2016, dengan kisaran perubahan yang tidak terlalu ketimpangan antar kelompok pendapatan yang cenderung tidak melebar atau dengan kata lain gap antar kelompok pendapatan semakin kecil atau semakin merata. Data Indeks gini dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang semakin meningkat. Indeks Gini dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berada di kisaran 0.3. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan masyarakat di Kota Magelang mendekati merata namun masih menyisakan permasalahan yang berupa distribusi pendapatan yang belum merata.

Tabel 2 - 68
Perbandingan Indeks Gini, Kota Magelang Tahun 2010- 2015

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gini Rasio Kota Magelang	0.3138	0.3418	0.3715	0.330	0.360	0.34

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2016, BPS Kota Magelang 2017

Selain indeks Gini, indikator lain yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan kriteria Bank Dunia, di mana 40% penduduk berpendapatan

rendah. Tingkat ketimpangan masyarakat ini di gambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan terhadap seluruh penduduk yang di golongkan menjadi : a). <12%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi; b). 12%-17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang; dan c). > 17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Tabel 2 - 69
Distribusi Pembagian Pengeluaran Per Kapita 2011-2015

Tahun	40% rendah	40% Menengah	20% Tinggi
2011	19.40	38.24	42.36
2012	16.10	35.74	48.17
2013	19.24	39.24	41.52
2014	17.15	38.75	44.10
2015	17.20	37.09	45.71

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2016, BPS Kota Magelang 2017

Berdasarkan tabel di atas distribusi pengeluaran pada kelas 40% penduduk berpengeluaran rendah selama rentang tahun 2011 sampai dengan 2015 relatif berflutuatif. Pada tahun 2011 ketimpangan relatif rendah pada kisaran 19.40% kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 16.10%. Kondisi di tahun 2013 membaik dengan ketimpangan yang rendah, namun pada tahun 2014 – 2015 , tingkat ketimpangan distribusi pendapatan berkisar pada angka 17%. Angka ini masuk di dalam kriteria ketimpangan tingkat rendah. Kondisi ini masih lebih baik apabila di bandingkan dengan kondisi pada tahun 2012. dimana tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kota magelang masuk di dalam kriteria sedang. Meskipun berapada pada kategori ketimpangan rendah, kelompok penduduk berpengeluaran tinggi mengalami fluktuasi persentase pendapatan, dari 42.36% pada tahun 2011 naik menjadi 48.17% di tahun 2012, menurun di tahun 2013 kemudian naik di tahun 2014 dan tahun 2015.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat di lihat dari prosentase pengeluaran non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka pola konsumsi masyarakat akan bergeser ke konsumsi non makanan dengan artian bahwa semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran konsumsi non makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya di gunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2 - 70
Tabel Perbandingan % Konsumsi Makanan, % Konsumsi Non Makanan dan Rata- rata Pengeluaran Per Kapita Kota Magelang Tahun 2011 – 2016

Tahun	% Konsumsi Non Makanan	% Konsumsi Makanan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita sebulan (Rp)

Tahun	% Konsumsi Non Makanan	% Konsumsi Makanan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita sebulan (Rp)
2011	53.83	46.17	653.780
2012	57.53	42.47	822.561
2013	54.87	45.13	757.919
2014	55.64	44.36	787.022
2015	54.38	45.62	880.508
2016	58.22	41.78	1.125.811

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2016, BPS Kota Magelang 2017

Dari tabel di atas, maka apabila didasarkan dengan teori kesejahteraan dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangannya $\geq 50\%$, menunjukkan kondisi rumah tangga yang baik sedangkan apabila tingkat konsumsi non pangannya menunjukkan nilai 20-49% menunjukkan kondisi sedang dan $\geq$ menunjukkan kondisi yang buruk. Tingkat konsumsi non pangan masyarakat Kota Magelang sejak tahun 2011 menunjukkan trend yang meningkat di atas 50% sehingga apabila di dasarkan dari teori di atas , dapat di golongan ke dalam kondisi rumahtangga yang baik. Proporsi pengeluaran non makanan lebih dari 50% dengan fluktuatif yang mendekati 60%. Tahun 2016 merupakan nilai terkecil untuk persentase pengeluaran makanan atau nilai tertinggi untuk persentase pengeluaran non makanan dalam rentang enam periode. Sementara untuk rata – rata pengeluaran per kapita per bulan selama rentang enam tahun dapat di lihat bahwa rata – rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp. 653.780,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 1.125.811,- di tahun 2016

Kemampuan Ekonomi Daerah juga dapat direpresentasikan melalui produktivitas total daerah yang tercermin pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Kinerja perekonomian ini di prediksi pada tahun 2017 menunjukkan kondisi yang menggembirakan, kondisi perekonomian makro Kota Magelang di prediksi akan mengalami pertumbuhan yang positif dengan perolehan PDRB mencapai 7.545 trilyun. Di tahun 2017 di prediksi tidak ada pergeseran lapangan usaha yang cukup signifikan pada struktur perekonomian di Kota Magelang. Hampir di seluruh usaha diprediksi tumbuh lebih cepat apabila di dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dominasi sektor PDRB yang dominan tetap di sektor jasa dan jasa pendidikan diprediksi akan memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi di dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain pada tahun 2017, sebagaimana nampak pada tabel berikut:

Tabel 2 - 71

PDRB Menurut Lapangan Usaha adhk dan adhb Tahun 2011-2015
dan Prediksi Tahun 2016-2017 (2010=100 dalam Juta Rupiah)

Tahun	PDRB adhb	PDRB adhk

Tahun	PDRB adhb	PDRB adhk
2011	4.464.559,10	4.255.662,20
2012	4.887.646,47	4.484.268,07
2013	5.356.307,45	4.755.269,18
2014	5.915.830,84	4.987.376,46
2015	6.466.971,04	5.241.660,00
2016*	7.015.380, 09	5.518.684,55
2017**	7.544.799, 70	5.804.917,24

Sumber : Dinas KOMinfo dan statistik Kota Magelang Tahun 2017

* Angka sementara

** Angka sangat sederhana

Indikator selanjutnya dari aspek Kemampuan Keuangan Daerah adalah Jumlah bank dan lembaga keuangan non bank yang ada di Kota Magelang. Keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank tersebut diharapkan akan mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Magelang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan luas wilayah 18.53 km², pada tahun 2017 Kota Magelang mempunyai 49 lembaga keuangan perbankan (cabang dan unit lembaga perbankan) yang terdiri dari 4 lembaga bank milik pemerintah , 2 lembaga perbankan milik daerah , serta 22 bank swasta yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Magelang. Berdasarkan jenis, bank yang ada di Magelang meliputi : a). 36 Bank Umum (commercial Bank), terdiri 34 bank konvensional dan 2 bank syariah , b). 13 Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank), yang merupakan jenis konvensional; dan 3). 3 Bank Syariah (Islamic Bank). Selain Lembaga Keuangan perbankan, jasa keuangan Non Bank yang terdapat di Kota Magelang pada tahun 2017 ,terdiri dari 17 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tersebar di 17 Kelurahan dan 15 Perusahaan Asuransi yang terdiri dari 14 perusahaan asuransi jiwa dan 1 perusahaan asuransi kerugian. (sumber, Bagian Perekonomian, SIPD Kota Magelang 2017)

Terkait dengan lembaga keuangan Koperasi yang ada di Kota Magelang pada tahun 2017 terdapat 219 koperasi yang terdiri dari :a). 161 koperasi konsumen dengan jumlah anggota 22.608 orang; b). 9 koperasi produsen, dengan jumlah anggota sebanyak 932 orang; c). 40 koperasi simpan pinjam dengan jumlah anggota sebanyak 31.943 orang; d). 3 koperasi sekunder dan, e). 6 koperasi jasa dengan jumlah 482 orang. Total masyarakat yang menjadi anggota koperasi sebanyak 55.965 orang. Total modal usaha Koperasi – koperasi yang ada di Kota Magelang pada tahun 2017 sebesar Rp.465.629.773.000,-, sementara volume usahanya sebesar Rp. 366.810.970.000,-. Sisa Hasil usaha dari kegiatan koperasi tersebut sebesar Rp. 10.455.438.000,-. Sementara kondisi pada tahun 2016, Modal usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp.445.341.150.000,- dengan volume usahanya sebesar Rp.302.729.304.000,-

Fasilitas perdagangan di Kota Magelang cukup mendukung dan berkontribusi di dalam menambah sektor jasa perdagangan. Pada tahun 2017 di Kota Magelang terdapat 5 pasar tradisional, 20 minimarket, 7 supermarket dan 17 grosir. Keberadaan fasilitas – fasilitas perdagangan di Kota Magelang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Magelang bahkan beberapa fasilitas jasa perdagangan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di sekitar Kota Magelang dan mampu menjadi daya tarik di sektor jasa perdagangan. Jasa Perdagangan di Kota Magelang meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Dengan di dukung fasilitas dan sarana prasarana yang memadai , mampu menarik tenaga kerja yang bergerak pada sektor ini. Jumlah pedagang yang bekerja pada pasar tradisional tahun 2017 sejumlah 6.823 orang dengan perincian: a). pasar kebonpolo sejumlah 663 pedagang; b). pasa cacaban sejumlah 186 pedagang ; c). pasar gotong royong sejumlah 1.152 pedagang; d). pasar Rejowinangun sejumlah 4.295 pedagang dan d). pasar sidomukti sejumlah 527 pedagang. Jumlah pedagang pada tahun 2017 lebih banyak apabila di bandingkan dengan tahun 2016 yaitu sejumlah 5.299 pedagang.

Capaian membanggakan di raih Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2017, dengan di raihnya penghargaan Anugerah Pancawara 2017 dari Kementrian Perdagangan. Penghargaan ini di raih oleh pasar Rejowinangun Magelang. Hasil penilaian tim juri menyatakan, Pasar Rejowinangun layak menjadi pemenang untuk Kategori Pasar Rakyat Pemerintah Daerah Tipe I dan II diraih Pasar Rejowinangun (Magelang) dengan inovasi 'Pengembangan Pasar Rakyat sebagai Ruang Sosial Budaya'. Anugerah Pancawara 2017 merupakan penghargaan yang pertama kalinya diselenggarakan Yayasan Danamon Peduli bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI untuk mengapresiasi pasar tradisional di Indonesia yang dinilai sukses membuat inovasi bagi kemajuan pasar yang dikelolanya. Pemerintah Kota Magelang senantiasa berusaha untuk terus melakukan revitalisasi beberapa sarana jasa perdagangan di Kota Magelang khususnya Pasar – pasar tradisional yang ada di Kota Magelang dengan harapan pasar tradisional ini mempunyai daya saing tersendiri dengan memperhatikan kearifan lokal apabila di bandingkan dengan pasar modern mengingat pasar tradisional mampu menyerap ribuan masyarakat yang bergerak di sektor tersebut. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang pada semester 1 tahun 2017 terdapat 2.953 pedagang yang berjualan di pasar – pasar tradisional yang ada di Kota Magelang. Jumlah ini belum termasuk para penyedia jasa yang bergerak pada sektor perdagangan yang ada di pasar – pasar tradisional.

Indikator lain yang merepresentasikan Aspek Kemampuan Keuangan daerah adalah jumlah penginapan/ hotel yang ada di Kota Magelang beserta sarana pendukung pariwisata di Kota Magelang. Pengembangan wisata di Kota Magelang dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek produk wisata yang meliputi obyek wisata, daya tarik wisata,serta aksesibilitas. Sementara aspek yang kedua adalah pasar wisatawan baik lokal, regional maupun mancanegara. Objek dan daya tarik wisata di Kota Magelang terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata religius/ziarah, wisata alam dan wisata buatan. Adapun fasilitas wisata terutama di dukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata berupa hotel, rumah makan dan fasilitas lainnya.

Tabel 2 - 72

Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Magelang Tahun 2010- Semester 1 2017

Jml Kunjungan	Tahun	Tahun 2011	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Semester 1
Wisata	2010		2012	2013	2014	2015	2016	Tahun
								2017

Jumlah	796.246	716.850	971.163	918.232	994.187	1.139.454	1.020.040	790.066
wisatawan								
Wisatawan Dalam Negeri	795.729	716.206	970.554	913.768	988.622	1.133.373	1.013.138	785.091
Wisatawan Luar Negeri	517	644	609	4.464	5.565	6.081	6.902	4.975

*Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang , SIPPD 2016, Bappeda Kota Magelang
Data Go, Data Strategis Pemerintah Kota Magelang, 2017*

Secara umum potensi dan peluang pengembangan wisata di Kota Magelang sangat besar guna mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bawah ini disajikan tabel kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Magelang, dari sumber pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan.

Tabel 2 - 73

Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2012-2016

Sumber Pendapatan Daerah	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Pajak Hotel	730.319.921,-	1.372.069.102,-	2.027.782.556,-	2.441.943.652,-	2.879.263.958,-	3.304.979.480,-
Pajak Restoran	872.997.547,-	1.364.657.315,-	1.797.050.823,-	2.104.103.322,-	2.431.241.151,-	3.388.469.448,-
Pajak Hiburan	1.019.667.207,-	1.399.359.651,-	1.329.451.348,-	1.459.002.821,-	1.634.690.181,-	1.884.212.564,-
Total pajak hotel, restoran, hiburan	2.622.984.675,-	4.136.086.068,-	5.154.284.727,-	6.005.049.795,-	6.945.195.290,-	8.577.661.492,-
Total PAD	90.986.601.697,-	107.739.838.961,-	164.927.631.230,-	186.677.410.081,-	220.193.738.774,-	233.392.755.573,-
Kontribusi terhadap PAD	2.88%	3.84%	3.13%	3.22%	3.15%	3.68%

Sumber : Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2011- 2017, BPKAD Kota Magelang

Potensi pariwisata di Kota Magelang saat ini belum di imbangi dengan pengembangan dan pemanfaatan yang optimal potensi – potensi pariwisata di Kota Magelang. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kecilnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kota Magelang dan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Magelang. Inventarisasi dan penggalian berbagai potensi, keunikan dan destinasi pariwisata, meningkatkan promosi, informasi dan pemasaran pariwisata, menyelenggarakan berbagai event yang dapat menarik wisatawan hadir ke Kota Magelang serta mengembangkan berbagai fasilitas pendukung kepariwisataan diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Magelang dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD Kota Magelang, Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Hiburan dapat memenuhi target pada semester 1 Tahun 2018. Kontribusi sektor perhotelan, restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester satu tahun 2018 sebesar Rp.5.264.918.120,- atau sebesar 4.33% dari realisasi PAD Semester 1 Tahun 2018 yang sebesar Rp.121.489.614.183,-

Data realisasi kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan hiburan terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan bulan Juni (Semester 1) tahun 2018 di tampilkan pada tabel di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel 2 - 74
Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD
Kota Magelang pada Semester 1 Tahun 2018

Sumber Pendapatan Daerah	Semester 1 Tahun 2018 (Rp)
Pajak Hotel	1.749.692.067,-
Pajak Restoran	2.009.242.940,-
Pajak Hiburan	1.505.983.113,-
Pendapatan dari pajak hotel, restoran, hiburan	8.577.661.492,-
Total PAD	121.489.614.183,-
Kontribusi terhadap PAD	4.33%

Sumber : Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Magelang semester 1 Tahun 2018, BPKAD Kota Magelang

Pada Tahun 2015 fasilitas hotel di Kota Magelang bertambah 2 yaitu Cityhub Hotel dan Hotel Safira. Pada tahun 2017 bertambah 1 hotel di jalan Sriwijaya yaitu hotel Ahava .Dengan bertambahnya 3 hotel tersebut, maka pada Tahun 2017 Kota Magelang memiliki fasilitas Hotel sebanyak 18 hotel, terdiri dari 10 hotel kelas melati, 4 hotel bintang 2 yaitu Hotel Trio, Hotel Borobudur Indah dan Hotel Cityhub, dan Hotel Ahava, 3 hotel kelas Bintang 3 yaitu Hotel Sriti, Hotel Oxalis dan Hotel Safira, 1 buah hotel bintang 4 yaitu Hotel Atria yang terletak di Jalan Jendera Sudirman, serta 1 buah hotel bintang 5 yaitu Hotel Puri Asri yang terletak di tepi sungai Progo dan bersebelahan dengan Taman Kyai Langgeng. Layanan Hotel yang ada di Kota Magelang di rasa cukup untuk menampung wisatawan dan tamu yang berkunjung di Kota Magelang bahkan pada saat event- event tertentu baik yang berskala regional maupun nasional yang di selenggarakan di Kota Magelang. Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri yang menginap di Kota Magelang pada Tahun 2017 sebanyak 189.916 pengunjung, sedangkan jumlah pengunjung luar negeri yang menginap di Kota Magelang sebanyak 1.827 pengunjung.

Fasilitas lain selain hotel yang mendukung jasa pariwisata di Kota Magelang yaitu keberadaan Rumah makan yang tersebar cukup banyak di Kota Magelang yaitu sebanyak 84 buah. Beberapa tahun ini Pemerintah Kota Magelang juga mengembangkan Pusat-pusat Kuliner yang memfasilitasi banyak PKL yang ada di sana. Selain bertujuan pada penataan PKL di Kota Magelang juga bermaksud untuk menciptakan suasana Kota yang tertib, bersih dan rapi dalam mendukung peningkatan pendapatan dari sektor Pariwisata. Data Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2017 terdapat 20 Pusat Kuliner yang tersebar di seluruh penjuru Kota Magelang. Pusat – pusat Kuliner tersebut mampu menampung 964 PKL Kuliner di Kota Magelang (sumber Data Strategis Kota Magelang 2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang)

Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas pariwisata di Kota Magelang. Hotel merupakan fasilitas penunjang pariwisata atau Amenitas yang utama selain rumah makan serta fasilitas

pelayanan pariwisata lainnya. Semakin meningkatnya potensi dan daya tarik Kota diindikasikan dengan semakin bertambahnya jumlah hotel di Kota Magelang.

Tabel 2 -75
Hotel Bintang di Kota Magelang

Nama & Alamat	Klasifikasi	Jumlah Kamar
PURI ASRI Jl. Cempaka 9	B - 5	178
ATRIA HOTEL & CONFERENCE Jl. Jend. Sudirman	B - 4	144
SRITI Jl. Doha 23 Telp. (0293) 363347, 363348	B - 3	31
TRIO Jl. Jend. Sudirman 68 Telp. (0293) 365095, 365096	B - 2	73
BOROBUDUR INDAH Jl. A. Yani 246 Telp. (0293) 364502, 312500	B - 2	39
OXALIS Jl. Cempaka 17 Telp. (0293) 5503151, 310371	B - 3	53
CITY HUB Jl. Gatot Subroto No. 260, Telp. (0293) 311758	B - 2	34
SAFIRA Jl. Gatot SoebrotoNo. 56A, Telp. (0293) 360033	B - 3	54

Sumber: Profil Pariwisata Kota Magelang, 2016

Fasilitas penunjang lainnya adalah jumlah agen perjalanan wisata, yang sampai dengan tahun 2017 tercatat berjumlah 19 agen perjalanan wisata. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan potensi daerah dan memajukan sektor jasa Pariwisata dapat dilihat dengan beberapa kebijakan yang dilaksanakan antara lain penataan dan pengembangan kawasan lembah tidar untuk mendukung wisata religi Gunung Tidar, pengembangan kawasan budaya Mantyasih, serta pengembangan kawasan kuliner di beberapa titik di Kota Magelang.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemantapan kekuatan fiskal daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat strategis, dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif.

Data dari BPPKAD Kota Magelang sampai dengan Tahun 2017 melaporkan bahwa perolehan PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 233.392.755.573,- terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.31.202.704.071,- , Retribusi Daerah

sebesar Rp. 6.149.331.686,- , Hasil Pneggelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 7.711.404.121, - dan Lain –lain PAD yang sah sebesar Rp. 188.329.315.695,-

Tabel 2 - 76

Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2010 – 2017

TAHUN	POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	Prosentase (%) Potensi terhadap realisasi	Prosentase (%) Target terhadap realisasi
2010	62.751.575.900, 00	45.804.070.000,-	59.546.717.600, 00	94.89 %	130%
2011	69.552.144.480, 00	62.100.129.000,-	63.557.701.976, 00	91.38 %	102.35%
2012	91.619.320.000, 00	82.457.388.000,-	90.986.601.697, 00	99.31 %	111.56%
2013	120. 378.596.250, 00	96.302.877.000,-	107.739.838.961, 00	89.50 %	111.88%
2014	172.114.484.610, 00	124.432.498.000,-	164.906.266.142, 00	95.81%	132.53%
2015	207.682.651.625,00	152.806.995.000,-	186.677.410.081, 00	89.89%	122.17%
2016	269.616.256.588,00	197.465.478.000,-	220.217.864.000, 00	81.68%	111.52%
2017	297.261.794.010,00	218.085.185.000,-	233.392.755.573,00	78.51%	107.02%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2010-2017 (BPKAD Kota Magelang)

Berdasarkan tabel di atas, potensi pendapatan daerah menunjukkan trend yang positif dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sementara prosentase realisasi PAD terhadap Potensi PAD cukup berfluktuatif. Peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan terus menggali potensi – potensi pendapatan yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan di daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD Kota Magelang, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang dapat memenuhi target pada semester 1 Tahun 2018. Pendapatan Asli Daerah yang di rencanakan dalam APBD Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2018 sebesar Rp.217.793.794.000,- sampai dengan Bulan Juni 2018 sudah tercapai sebesar Rp. 121.489.614.183, 00 atau sebesar 55.78%

Iklim Investasi yang terus dibangun oleh Pemerintah Kota Magelang diharapkan ke depan akan berdampak pada kenaikan PAD Kota Magelang sehingga mengurangi ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat. tabel di bawah ini menyajikan kenaikan / Penurunan PAD Kota Magelang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 berikut :

Tabel 2 -77

Tabel Kenaikan/ Penurunan PAD Tahun 2010-2017

No	URAIAN	REALISASI PAD (Rp)	% Kenaikan / Penurunan PAD
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2010	59.546.717.600,-	24.8%
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2011	63.557.701.976,-	6.74 %
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2012	90.986.601.697,-	43.16 %
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013	107.739.838.961,-	17.99 %
5	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014	164.906.266.142,-	53.06 %
6	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2015	186.667.410.081, -	13.20 %
7	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016	204.220.414.045, -	9.40 %
8	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2017	233.392.755.573 -	14.28 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA. 2010- 2017 (data diolah)

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Fokus Kedua dari Aspek daya Saing Daerah adalah Fokus Fasilitas Wilayah atau ketersediaan Infrastruktur yang memadai di daerah. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau investor dengan penyediaan sarana dan prasarana. Fasilitas Wilayah yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kota Magelang meliputi sarana perkotaan yaitu sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Prasarana perkotaan meliputi prasarana permukiman; prasarana perhubungan; prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi, serta jaringan utilitas lainnya; serta prasarana persampahan.

Salah satu sarana prasana wilayah yang di sediakan pemerintah dan swadaya masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan Kota Religius adalah ketersediaan tempat - tempat ibadah. Kecukupan sarana prasarana peribadatan di bandingkan dengan jumlah penduduk ini menjadi modal bagi Pemerintah daerah dalam menjamin dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di akui oleh Pemerintah.. Data dari Departemen Agama Kota Magelang yang tersaji di dalam Data Go Kota Magelang menyajikan data ketersediaan tempat ibadah di Kota Magelang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 78
Sarana Peribadatan di Kota Magelang Tahun 2013 – 2017

Tempat Ibadah	2013	2014	2015	2016	2017

Masjid	153	153	153	153	153
Langgar / Mushola	224	210	217	217	217
Gereja Kristen	16	23	26	26	26
Gereja Katholik/Kapel	2	2	2	2	2
Wihara	2	2	2	2	2
Klenteng	2	2	2	2	2
Lainnya	-	-	4	4	4

Sumber : Kemenag Kota Magelang, Data Go, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Rasio tempat ibadah per jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 3.23 jumlah ini telah melebihi dari capaian yang di targetkan pada tahun 2017. Dengan luas wilayah yang relatif kecil maka keberadaan tempat ibadah yang ada di Kota Magelang sudah sangat memadai bagi masyarakat untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing – masing. Selain data tersebut di atas, Kemenag Kota Magelang mencatat ada 6 rumah doa yang berdiri di Kota Magelang. Di dalam indikator RPJMD juga mengamanahkan adanya indikator tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag. Dari target 5% pada tahun 2017, tercapai 4.90%. Dari jumlah tempat ibadah di Kota Magelang yang telah memenuhi standar dari Kemenag sebanyak 21 tempat ibadah. Namun capaian ini masih pada tempat ibadah masjid/mushola mengingat Surat Edaran dari Kemenag Kota Magelang terkait standarisasi/ klasifikasi tempat ibadah, sementara ini dikhususkan terlebih dahulu untuk masjid / mushola se-Kota Magelang.

Untuk mendukung Misi Religius, di tiap OPD mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat ibadah yang memadai. Adapun capaian dari tempat ibadah yang memadai di tiap OPD sebesar 56.82% yang artinya dari 29 OPD yang ada di Kota Magelang, sebanyak 17 OPD. Selain tempat ibadah yang ada di OPD, sekolah yang ada di Kota Magelang juga di amanatkan untuk menyediakan fasilitas ibadah untuk siswa – siswa. Hampir di semua sekolah menyediakan fasilitas ibadah untuk siswa-siswanya. Data pada tahun 2017 terdapat 32 mushola dan 18 masjid yang tersebar di sekolah – sekolah yang ada di Kota Magelang. Jumlah ini belum termasuk ruangan atau tempat yang di sediakan sekolah untuk fasilitas ibadah bagi siswa – siswa mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam memberikan pelayanan lebih bagi masyarakat Kota Magelang dan dalam rangka mendukung Kota Religius maka di perlukan adanya Religius Centre yang akan menjadi pusat – pusat kajian keagamaan dan pemberdayaan umat bagi masyarakat di Kota Magelang dan terkait dengan hal tersebut dalam perencanaan lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Magelang sudah merencanakan keberadaan dari Religius Centre tersebut dengan target minimal 2 religius centre.

Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur diantaranya adalah Ketaatan terhadap RTRW, Prasarana Jalan, Kondisi Permukiman dan Infrastruktur, Sumber daya Air, Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih.

2.1.4.2.1 Ketaatan Terhadap Perda RTRW

Perda RTRW Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011–2031 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. RTRW memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, selain itu juga berisi rencana struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis, memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi :

- a) penyelarasan dan sinkronisasi program-program pembangunan Daerah dengan rencana tata ruang;
- b) peningkatan kejelasan dan perincian dari program-program utama yang telah ditetapkan kedalam implementasi rencana tindak yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Daerah;
- c) penyempurnaan pedoman pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Daerah;
- d) penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan kegiatan dan program pembangunan Daerah secara menerus dan berlanjut berkaitan dengan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang terdapat dalam rencana tata ruang;
- e) penyempurnaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang;
- f) pengoptimalan sistem koordinasi antar instansi terkait dalam penataan ruang.

Rencana Tata Ruang Kota Magelang secara Umum membagi Kota Magelang menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam penataan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Magelang terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota meliputi:

- a) Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
- b) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- c) Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d) Kawasan strategis sosial budaya.

Salah satu wujud ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW maka Pemerintah Kota Magelang senantiasa berupaya untuk memenuhi target pencapaian ruang terbuka hijau sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan oleh - oleh Undang – undang. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan utama perkotaan yang berkaitan langsung dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka mutu lingkungan hidup di perkotaan dapat meningkat, sehingga lingkungan terasa nyaman, segar, indah, bersih dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota Magelang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Target indikator ini adalah 20 % dari luas wilayah Kota Magelang. Penyediaan RTH publik bukan merupakan hal yang mudah untuk suatu kabupaten/kota.

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan pada tahun 2015 baru terealisasi sebesar 18,57%. Kekurangan luasan RTH sebesar 1,43% atau seluas 25,9 hektar sangat sulit dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan di Kota Magelang. Program dan kegiatan pada bidang RTH harus difokuskan pada upaya

peningkatan jumlah (kuantitas) luasan, tidak hanya pada peningkatan kualitas aspek visual (estetika) dari RTH khususnya taman kota. Peningkatan kuantitas lahan RTH dilakukan dengan pembebasan lahan pada sepadan Jalan dan Sungai, pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10% bagi pengembang serta pembebasan melalui pembelian tanah masyarakat untuk RTH.

Tabel 2 - 79

Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang, Tahun 2017 Semester 1

Rinican	Jumlah	Satuan	Luas (Ha)
Taman Kota	60	Buah	8.94
Jalur Hijau	20	titik	263.39
Hutan Kota	1	titik	67.12
TPU	1	Buah	16
Jumlah	84		355.45

Secara perhitungan ideal luasan RTH di Kota Magelang memiliki kekurangan sebanyak 22,41 Ha. Luas ruang terbuka hijau pada tahun 2017 sebesar 355.45 HA Pengembangan RTH terus diupayakan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kota Magelang, dengan melibatkan masyarakat dan instansi-instansi seperti sekolah, perusahaan, pihak swasta dan lain sebagainya.

Belum tercapainya Ruang Terbuka Hijau khususnya publik perlu adanya upaya tersendiri untuk mengotimalkan lahan terbuka yang sudah ada seperti makam dan sempadan sungai seperti memanfaatkan lahan – lahan sempit, lahan marginal dan lahan – lahan yang terabaikan untuk dijadikan RTH publik, melakukan penertiban ternadap bangunan – bangunan liar yang tidak berizin di sempadan sungai, serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan RTH untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencapaian amanat Undang – Undang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang

Sarana informasi tata ruang wilayah Kota Magelang kurang memenuhi target pada tahun perencanaan. Informasi tata ruang kepada masyarakat masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tata ruang. Sarana informasi bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata ruang, Hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga tata ruang dan ikut menegakkan tata ruang di Kota Magelang.

Salah satu indikator yang merepresentasikan terhadap keataan terhadap Peraturan Tata Ruang di Kota Magelang di antaranya indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bappeda (selaku sekretaris BKPRD), KPPT (instansi pemberi ijin tertentu), dan kantor pertanahan (terkait izin IPPT) yang mensyaratkan setiap proses sertifikasi dan alih fungsi lahan.

Beberapa permasalahan terkait dengan penataan ruang daerah selain hal tersebut di atas di antaranya adalah masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum

ada rencana rinci Tata Ruang Kota Magelang yang disebabkan karena proses legalisasi Raperda RDTR masih sangat panjang. Selain itu juga masih banyak ditemui bangunan – bangunan yang belum mempunyai ijin serta bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Masalah yang lain yang juga masih menjadi PR bagi Pemerintah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan ruang sesuai dengan aturan yang ada ditambah dengan belum optimalnya pengembangan sistem informasi kepada masyarakat di bidang tata ruang.

Ketaatan terhadap peraturan perundangan terkait penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan mengingat saat ini degradasi daya lingkungan semakin besar mengingat kebutuhan masyarakat terhadap lahan semakin besar. Kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi terganggu akibat kurang terkendalinya para pelaku pembangunan dalam pemanfaatannya serta kurangnya kepedulian terhadap kaidah – kaidah kelestarian lingkungan alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

2.1.4.2.2 Prasarana Jalan

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khususnya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasan ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street..

Struktur dan kondisi fisik jaringan jalan Kota Magelang secara umum hampir 100% dalam kondisi baik dan terawat baik jalan kota maupun jalan lingkungan. Struktur jalan di Kota Magelang sebagian besar berupa jalan aspal dengan perkerasan hotmix terutama untuk jalan utama kota dan lingkungan serta sebagian dengan perkerasan rigid pavement atau betonisasi untuk jalan-jalan lingkungan. Secara fisik ruas jalan dan jembatan di Kota Magelang sudah dalam keadaan yang baik oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala

Capaian kinerja terkait dengan Kondisi jalan terkait panjang trotoar dalam kondisi baik dengan dari panjang trotoar yang jumlah total panjangnya 81.653 meter terdapat 56.391 meter trotoar yang kondisinya baik. Pada tahun 2016 trotoar yang dibangun adalah trotoar Jl. A. Yani, Trotoar Jl. Abimanyu, Trotoar Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Trotoar Jl. Sudirman. Indikator Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 88,5% dari target 88,5%, artinya dari total panjang jalan kota 122,94 Km terdapat 108,8 Km dalam kondisi baik. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki tambahan ruas jalan perkotaan akibat penurunan status jalan provinsi, yaitu Jl. Tidar, Jl. Kyai Mojo, Jl. Mayjend. Sutoyo, Jl. Aloon – aloon Selatan dan Jl. Gatot Subroto, kelima ruas jalan tersebut kondisinya rusak sedang.

Tabel 2 - 80

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, fungsi dan Status Jalan Di Kota Magelang Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Panjang jalan berdasarkan kelas	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512
a. Jalan Nasional	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
b. Jalan Provinsi	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964
c. Jalan Kabupaten / Kota					
Jenis Permukaan Jalan					
a. Aspal	84.306	84.306	116.352	118.92	118.92
b. Kerikil			-	-	-
c. tanah			-	-	-
d. Tidak di rinci	8.763	9.633	-	-	-
Panjang jalan berdasarkan kondisi					
a. Jalan baik	33.81	38.35	59.64	70.08	70.08
b. Jalan sedang	29.71	29.17	33.37	38.98	36.94
c. Jalan rusak	26.54	23.45	21.56	9.15	11.19
d. Jalan rusak berat	3.00	2.97	1.78	0.7	0.7
Panjang jalan berdasarkan fungsi					
a. Jalan arteri	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574
b. Jalan kolektor	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
Status Jalan					
a. Kabupaten/Kota	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964
b. Nasional	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512
c. Provinsi	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
Kelas Jalan					
a. Kelas I	-	-	-	-	-
b. Kelas II	-	-	-	-	-
c. Kelas III	-	-	-	-	-
d. Kelas IIIA	-	-	-	-	-
e. Kelas IIIB	-	-	-	-	-
f. Kelas IIIC	84.306	84.306	116.35	118.92	118.92
g. Tidak Dirinci	8.763	9.633	-	-	-

Sumber : Kantor DPU Kota Magelang, Profil Daerah Kota Magelang dan DDA Kota Mgl Tahun 2013-2018
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Data Go, Data Strategis Pemerintah Kota Magelang, 2018
Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang
 Dasar : Keputusan Walikota Magelang nomor 621/120/112/2015 tentang Penetapan Status Ruas – ruas jalan Kota dan Jembatan Kota Magelang

Transportasi merupakan salah satu elemen perkotaan yang tidak dapat dipisahkan, dan menjadi struktur utama pembentuk kawasan perkotaan. Transporatsi menjadi tumpuan aktivitas masyarakat dalam beraktivitas serta pengembangan ekonomi dan sosial wilayah perkotaan sehingga pengembangan transportasi menjadi prioritas penanganannya. Pemerintah Kota Magelang mempunyai komitmen dalam peningkatan kualitas jalan.

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khususnya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasan

ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street.

Keberadaan angkutan umum juga sangat mendukung system pergerakan wilayah, Salah satu jenis angkutan umum yang beroperasi di Kota Magelang adalah angkutan perkotaan yang melayani 12 rute yang berkapasitas 12 penumpang, saat ini jumlah angkutan umum yang tercatat masih beroperasi adalah sebanyak 335.

Selain angkutan kota, dikota Magelang juga dilalui angkutan perbatasan sejumlah 173 angkutan perbatasan dengan rincian jumlah armada pada masing-masing trayeknya adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2 - 81
Trayek dan Jumlah Armada Angkutan Perbatasan di Kota Magelang

No	Trayek	Jumlah Armada
1	Magelang-Payaman-Secang	21
2	Magelang-Tanjung-Kalinegoro	12
3	Magelang-Blondo-Borobudur	6
4	Magelang-Blabak-Muntilan	29
5	Magelang-Sorobayan-Tegalrejo	23
6	Magelang-Secang-Grabag	15
7	Magelang-Secang-Pirikan-Grabag	23
8	Magelang-Panca Arga-Salaman	12
9	Magelang-Canguk-Candimulyo-Petung-Krakal-Pogalan	7
10	Magelang-Muntilan-Salam	22
11	Magelang-Tegalrejo-Ngablak	3

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Tipe A yaitu Terminal Tidar mulai Tahun 2016 pengelolaannya diserahkan Provinsi. Sedang untuk Kota Magelang hanya mengelola Terminal Tipe C. Keberadaan Terminal Type C sekarang ini belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan, kedepan perlu ada pembangunan terminal Type C sesuai standar. Pengembangan Terminal Tipe C yaitu Terminal Kawasan Kebonpolo, Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo, Terminal Kawasan Canguk, Terminal Kawasan Sambung, Terminal Kawasan Iklas, dan Terminal Kawasan Jalan Kalimas. Sedangkan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, yaitu Terminal Angkutan Barang berada di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara, belum berfungsi sebagai terminal barang. Kedepan perlu ada pengembangan Terminal Barang yang melayani bongkar muat dan pergudangan.

2.1.4.2.3 Drainase

Jaringan drainase seringkali disebut jaringan air hujan, jaringan pematusan, jaringan pelimpasan, jaringan riol, dan sebagainya. Saluran drainase berfungsi mengalirkan luapan/ limpasan air hujan (run off), yang umumnya berupa saluran terbuka (selokan/got/kanal/sungai) dengan "rute" dari area tangkapan hujan (catcment area) berupa lahan tertutup/ terbangun seperti jalan, halaman, dan lain lain ke muara (out-fall) yang juga bisa berupa sungai, waduk, polder, dan lain lain.

Kondisi jaringan drainase di Kota Magelang mencakup seluruh system jaringan tersebut, diatas dengan pengecualian tidak terdapat waduk penampungan. Dalam hal ini, fungsi waduk penampungan sebagai muara (out fall) seluruh saluran tersebut, digantikan oleh S. Progo dan S. Elo yang sekaligus merupakan saluran primer. Bahkan karakteristik khusus wilayah Kota Magelang yang masih mempertahankan sekitar 12 % luas wilayahnya sebagai area persawahan, dalam kondisi tertentu lahan persawahan tersebut juga dapat berfungsi sebagai penampungan limpasan air hujan.

Di dalam lingkungan permukiman, jaringan drainase dikembangkan di kanan kiri jalan dimanfaatkan sebagian besar untuk pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan air hujan. Sistem jaringan drainase umumnya mencakup seluruh saluran yang ada, mulai dari selokan di halaman bangunan, saluran tersier yang umumnya berupa selokan di tepi jalan, saluran sekunder yang umumnya berupa kanal yang lebih lebar dan menuju saluran primer, hingga saluran primer yang umumnya berupa aliran sungai besar, serta waduk penampungan.

Sistem jaringan drainase di Kota Magelang terdiri dari sistem jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Sistem jaringan drainase tersier merupakan jaringan drainase yang rumah per rumah, jaringan sekunder yang menghubungkan antara jaringan tersier dan primer.

Drainase di Kota Magelang banyak menggunakan drainase tertutup utamanya pada kawasan pusat perdagangan dan jasa. Sistem pengelolaan drainase lingkungan di Kota Magelang pada dasarnya telah diatur sebagaimana pola permukiman yang ada, namun seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk meningkat dan secara fisik mengalami perkembangan terutama adalah target pemenuhan kualitas lingkungan hidup, penurunan permukaan tanah, peningkatan debit air, kerusakan – kerusakan ekologi lingkungan. Secara umum, setiap kawasan permukiman telah memiliki saluran drainase sekunder dan tersier sampai ke tiap – tiap rumah dan terintegrasi ke dalam saluran drainase primer namun genangan pada musim penghujan akibat dari naiknya debit air pada saluran drainase primer dan adanya penurunan sudut elevasi pada saluran drainase sekunder sehingga air yang seharusnya mengalir dari saluran drainase tersier menuju saluran drainase sekunder kemudian berakhir di saluran drainase berbalik arah. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah untuk memperbaiki sarana drainase di Kota Magelang.

Permasalahan yang muncul dalam sistem drainase di Kota Magelang adalah sudut elevasi saluran yang tidak seimbang sehingga permukaan dasar saluran sekunder lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan dasar saluran tersier hal ini dipengaruhi oleh kontur lahan yang cukup bervariasi. Permasalahan lainnya adalah bahwa jaringan drainase perkotaan juga menjadi saluran pembuangan limbah rumah tangga. Jaringan drainase primer di Kota Magelang terdiri dari sungai Manggis dan Sungai Bening yang menampung limpahan air hujan dari seluruh jaringan drainase kota.

Permasalahan lain terkait dengan system drainase di Kota Magelang diantaranya: a).belum optimalnya fungsi dan peran sarana dan prasarana drainase untuk pengendalian banjir dan genangan pada musim hujan, b). jaringan

teknis irigasi masih menjadi tumpuan pembuangan air hujan dan air limbah dari permukiman dan perumahan, c). adanya konversi lahan persawahan ke permukiman/ perumahan baru pada setiap tahunnya, akan mempengaruhi penyediaan saluran irigasi serta d).belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.

Implementasi pengembangan jaringan drainase di Kota Magelang dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi jaringan sungai dan jaringan drainase utama yang ada, berperan sebagai main drain (drainase induk). Pola jaringan drainase yang dikembangkan mengikuti pola jaringan jalan yang dikembangkan. Untuk beberapa kawasan yang cepat mengalami sedimentasi maka perlu adanya normalisasi irigasi (tanggul, saluran) secara bertahap. Upaya untuk perbaikan jaringan drainase perkotaan diupayakan untuk meminimalisir merusak atau mengganggu keberadaan jalur hijau jalan mengingat kita masih mempunyai kewajiban untuk mencapai batas minimal 30% ruang hijau di Kota Magelang.

2.1.4.2.4 Kondisi Permukiman dan Infrastruktur

Pemerintah Kota Magelang mempunyai tantangan di dalam aspek penyediaan sarana permukiman bagi penduduk di atas lahan yang terbatas sehingga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang permukiman. Pemerintah Kota Magelang berusaha mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama di kawasan - kawasan yang padat penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Magelang juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas prasarana pelayanan dasar permukiman perkotaan prasarana permukiman yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dari Pemerintah daerah terkait dengan Key Performance Indicators – akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh 0% dan akses sanitasi layak 100%. Kondisi yang ada di Kota Magelang pada saat ini adalah masih adanya lingkungan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang, belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, belum optimalnya upaya pemeliharaan sarana permukiman yang ada guna mendukung perpanjangan usia pakai sarana tersebut serta masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan yang meliputi prasarana lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan serta prasarana sanitasi lingkungan.

Rumah layak huni secara nasional SPMnya dari Kementerian Perumahan Rakyat 100% dengan kurun waktu tahun 2009-2025, untuk mempercepat terwujudnya indikator kinerja tersebut perlu dukungan kesepakatan kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara PD terkait, dengan maksud agar dilakukan survey data RTLH akan memudahkan untuk melaksanakan program rumah layak huni. Permasalahannya yaitu sebagian besar penanganan RTLH terkendala dengan masalah kepemilikan aset yang belum jelas. Indikator ini memerlukan data jumlah rumah layak huni dan jumlah rumah keseluruhan rumah di suatu wilayah. Untuk mengetahui jumlah rumah layak huni terlebih dahulu ditetapkan kriteria rumah layak huni, setelah itu baru dilakukan survey yang melibatkan PD terkait, seperti DKPTK, DPU, Bappeda, Kantor Statistik, Kantor Litbang dan Statistik, BPMPKB.

Data Statistis Kota Magelang tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 2.157 unit rumah sedangkan rumah layak huni di lokasi perkotaan sebanyak 29.240 unit rumah. sedangkan untuk tahun 2017 jumlah rumah tidak layak huni di kota magelang sebesar 1.934 unit rumah. Sementara luas kawasan kumuh di Kota Magelang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/280/112-310 Tahun 2015 tentang Luasan Kumuh yang diterbitkan pada tahun 2015 seluas 121.17 Ha . Hasil verifikasi di sesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Permukiman dan Perumahan Kumuh, terdapat luasan kumuh seluas 125.34 Ha di Kota Magelang. Satu hal yang juga masih menjadi pemikiran bagi Pemerintah yaitu terkait dengan keberadaan penduduk di permukiman kumuh. Data 2017 menyebutkan bahwa upaya Pemerintah Kota Magelang dalam menyurongi kawasan kumuh telah berhasil mengurangi luasan kumuh 57.935 Ha sehingga saat ini terdapat 2.188 jiwa atau 547 KK yang tinggal di perumahan kumuh seluas 67.405 Ha.

Pertambahan jumlah penduduk di kawasan perkotaan meningkatkan hunian padat yang jika tidak terkendali akan menyebabkan kekumuhan, kegiatan untuk mengurangi kawasan kumuh permukiman baru menyentuh infrastruktur jalan lingkungan, saluran permukiman dan air bersih, sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sanitasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala aturan dan juknis, sehingga penanganannya belum maksimal . Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah sehingga berkurangnya luasan kumuh di Kota Magelang dapat terpacai sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan

Beberapa program pengurangan rumah tidak layak huni yang sudah terlaksana di Kota Magelang melalui pembiayaan APBD Kota, APBD Provinsi, PNPM, dan BSPS. Dalam mensikapi Keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah di wilayah perkotaan menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan di arahkan pada pembangunan rumah susun. Hingga tahun 2015 Pemerintah Kota Magelang sudah memiliki 2 (dua) unit Twin Block Rusunawa yang berada di Kelurahan Porobangsari dan Kelurahan Tidar Utara

Terkait dengan sanitasi rumah tinggal, pada tahun 2016 rumah dengan fasilitas air bersih sebanyak 29.055 unit, rumah yang memiliki pembuangan tinja 28.320 unit sedangkan rumah dengan memiliki tempat pembuangan sampah sebanyak 21.237 unit Tersedianya system air limbah yang memadai, dimana rumah tinggal yang bersanitasi berarti harus memiliki system pengelolaan limbah yang memadai. . Khusus untuk kawasan padat hunian dan bangunan, penyediaan rumah tinggal bersanitasi akan menghadapi masalah ketersediaan tanah. Peran pemerintah sangat strategis untuk penyelesaian masalah ini melalui penyediaan septic tank communal dalam dokumen SSK yang telah disusun.

Partisipasi masyarakat sangat menentukan untuk menyelesaikan program-program untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi, karena masih terdapat kawasan rawan sanitasi di Kota Magelang, yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat masih rendah mengenai BAB. Perlu upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti pola hidup sehat serta untuk bersama – sama Pemerintah menyelesaikan program – program sanitasi di Kota Magelang.

2.1.4.2.5 Sumber Daya Air

Sumber daya air di Kota Magelang terdiri dari dua yaitu Sungai dan Sumber Mata Air. Kota Magelang dibatasi juga oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Elo di sebelah timur yang masuk dalam Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. WS Progo-Opak-Serang

memiliki luas total 4.993,85 km² yang terdiri dari DAS Progo, Opak, Serang, Tangsi, Elo, Oyo. Sungai Progo menurut hasil penelitian geologi yang dilakukan PDAM Kota Magelang didapat bahwa aquifer terdapat di kedalaman 10 – 30 m dan 90 – 120 m, dengan total panjang 138 Km dan luas DAS seluas 2.380 Km². Sementara itu didalam kota sendiri dilalui oleh 2 saluran Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening dengan luas 3.663 Ha.

Sumber air bersih yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Magelang berasal dari 7 sumber dan hanya satu yang berlokasi di wilayah Kota Magelang, yaitu sumber air Tuk Pecah. Sumber air lainnya berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu mata air Kalimas I, mata air Kalimas II, mata air Wulung, mata air Kalegen, mata air Kanoman I, dan mata air Kanoman II. Sumber air di Kota Magelang juga dimanfaatkan untuk sistem irigasi yang berasal dari aliran Kali Bening dan Kali Manggis yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan. Prasarana irigasi di Kota Magelang terdiri dari 5.000 m saluran irigasi Kali Kota, 9.700 m saluran irigasi Kali Manggis, dan 7.850 m saluran irigasi Kali Bening.

Prasarana air bersih di Kota Magelang telah manjangkau ke 17 Kelurahan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian besar penduduk mendapatkan layanan air bersih dari Perusahaan Air minum Kota Magelang. Sampai dengan saat ini kondisi mata air di Kota Magelang cukup banyak, namun yang harus mulai dipikirkan oleh Pemerintah adalah tidak seluruhnya mata air dimanfaatkan dengan baik ketika kebutuhan permukiman meningkat, bahkan terdapat mata air yang ditutup untuk bangunan. Kondisi ini cukup memprihatinkan di mana tingkat kebutuhan air bersih cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu perlunya peningkatan kualitas dari saluran – saluran air agar tidak terjadi kebocoran sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tidak terganggu.

2.1.4.2.6 Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih

Sumber air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Magelang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber air bersih dari air tanah (sumur) dan air bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang. Sebagian besar kebutuhan air bersih penduduk sudah dapat dilayani melalui jaringan perpipaan yang telah menjangkau hampir di seluruh wilayah Kota Magelang.

Sistem jaringan air bersih di Kota Magelang terbagi menjadi sistem perpipaan dan sumur air dalam. Sistem perpipaan dikelola oleh PDAM dengan jumlah pelanggan pada tahun 2017 sebanyak 26.252. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tingkat penggunaan air bersih pada tahun 2017 sebesar 7.633.558 liter/ tahun. Data Strategis Kota Magelang 2017 menyebutkan bahwa pada tahun 2016, jumlah rumah tangga yang menggunakan leding /perpipaan sebanyak 25.103 rumah tangga dengan tingkat penggunaan air bersih 7.606.319 liter/ tahun, sedangkan rumah tangga yang masih menggunakan sumur lindung sebanyak 310 rumah tangga. Total jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum sebanyak 102.228 penduduk. Berdasarkan data strategis Kota Magelang Tahun 2017 Pemakaian terbanyak oleh golongan II yaitu sebanyak 24.039 pelanggan dengan total pemakaian 6.766.784 m³. Jumlah ini sedikit meningkat apabila di bandingkan dengan tahun 2016 di mana jumlah pelanggan kelas 2 sebanyak 22.899 pelanggan, total pemakaian sebanyak 6.741.824 m³.

Tabel 2 - 82

Jumlah Pelanggan Air Minum, Total Pemakaian Air Minum, Jumlah Rumah Tangga dan Prosentase RT yang Menggunakan Air Bersih di Kota Magelang Tahun 2011 – 2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelanggan Air Minum	23.280	23.396	23.785	24.289	24.652	25.103	26.252
Total Pemakaian Air (m ³)	7.652.245	7.202.615	7.507.332	7.405.096	7.434.942	7.606.319	7.633.558
Jumlah Rumah tangga	39.672	40.623	41.246	41.853	42.433	43.026	42.997
Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (Pelanggan PDAM Kota Magelang)	58.61%	57.59%	57.67%	58.03%	58.10%	58.34%	61.06%

Sumber: Sumber : PDAM Kota Magelang, Data Go, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang , jumlah penduduk data Dispenduk Capil Kota Magelang, data diolah

Selain penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan, di Kota Magelang juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air bersih melalui sumur air tanah sementara prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih/Pelanggan PDAM sebesar 61.05%, sedangkan sisanya mendapatkan air bersih dari beberapa hidran umum air bersih yang disediakan Pemerintah Kota Magelang. Sebagian lainnya dengan memanfaatkan mata air baik yang diambil dari sumur maupun dari sumber-sumber mata air lainnya. Beberapa upaya pengembangan sistem jaringan air bersih antara lain adalah sebagai berikut: Pengoptimalan sumber mata air yang sudah ada, Revitalisasi jaringan air bersih perpipaan dan Penyediaan sumber pengaliran air bersih komunal seperti hydrant pada pusat pusat kegiatan dan permukiman.

Dengan semakin banyaknya kebutuhan akan air bersih, maka diperlukan perhatian serius untuk menambah volume atau debit air gunaantisipasi tahun-tahun mendatang. Sistem penyediaan/ pelayanan air bersih pada umumnya terdiri dari bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi air baku, instalasi produksi, jaringan transmisi, bak penampung (reservoir) dan jaringan distribusi. Demikian halnya sistem penyediaan air bersih di Kota Magelang, prasarana pendukung yang ada meliputi:

1. Bangunan pengambil air baku, berada di lokasi sumber air, yaitu masing-masing adalah Mata Air (MA) Kalimas I & II, MA Kanoman I & II, MA Wulung, MA Kalegen, dan MA Citrosono dengan kapasitas total sumber air sebesar $\pm 705,5$ liter/detik.
2. Instalasi produksi merupakan bangunan penampungan, khusus untuk air bersih dari MA Kalegen dan MA Wulung, yaitu BPT Kaputran, BPT Keringan, BPT Tonoboyo dan BPT Bandongan, sementara air bersih dari mata air lainnya langsung didistribusikan. Total kapasitas produksi terpasang air bersih maksimal sebesar ± 425 liter / detik.
3. Reservoir merupakan bangunan penampungan terakhir sebelum air bersih didistribusikan yaitu Reservoir Bandongan (1.400 m3), Reservoir (menara) Alun-alun (1.750 m3), Reservoir Tidar (1.000 m3) dan Reservoir Akmil (500 m3). Total kapasitas seluruh reservoir tersebut adalah ± 4.650 m3.
4. Jaringan perpipaan, meliputi jaringan transmisi air baku atau jaringan transmisi primer ($\varnothing$ 9". 12") jaringan transmisi sekunder ($\varnothing$ 4". 8"), jaringan distribusi primer ($\varnothing$ 1". 3"), jaringan distribusi sekunder hingga sambungan rumah ($<\varnothing$ 1").

2.1.4.2.7 Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik

Pemenuhan kebutuhan listrik penduduk Kota Magelang dipenuhi melalui layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan yang menggunakan jasa layanan listrik negara di Kota Magelang terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik dari tahun per tahun maka PLN terus berupaya untuk memperluas jaringan listrik di wilayah Kota Magelang.

Pada tahun semester 1 2017 jumlah pelanggan listrik di Kota Magelang sebanyak 32.346 dengan jumlah daya listrik yang terpasang 29.495.814 GWH dan jumlah pemakaian listrik pada tahun 2017 sebesar 27.499.522 Gwh. Pemakaian listrik oleh rumah tangga terbanyak menggunakan 900 watt sebanyak 13.914 KK, Rumah tangga yang menggunakan daya 450 watt sebanyak 12.236 KK, yang menggunakan daya 1300 watt sebanyak 3.944 KK, sementara sisanya 2.252 KK menggunakan daya listrik 2200 watt dan > 2200 watt. Hampir 90% pelanggan listrik di Kota Magelang merupakan rumah tangga sementara sisanya merupakan pelanggan dari kelompok usaha, kelompok industri dan umum.

2.1.4.2.8 Kondisi Pengelolaan Sampah

Sistem jaringan persampahan di Kota Magelang dikelola oleh Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup (DPLH). Sistem pengangkutan sampah dilakukan melalui 2 tahap yaitu dari rumah tangga dan kegiatan lain ke transfer Depo/TPS dan dari TPS ke TPA. Pengangkutan sendiri dibagi menjadi dalam beberapa jenis angkutan antara lain adalah Becak Sampah, Dump Truck dan Mini Truck. Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Selain dilihat dari aktivitas yang menghasilkan sampah, bentuk produksi sampah di Kota Magelang dapat diidentifikasi berdasarkan persentase jenisnya. Jumlah persentase sampah terbesar berupa sampah organik 72.6%. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik, karena sampah organik merupakan sampah yang mudah untuk terurai. Sementara untuk bahan non organik yang paling banyak menjadi sampah adalah sampah plastik dengan persentase 9,65%.

Sistem pengangkutan yang dilakukan dikelola oleh beberapa pihak antar lain adalah Dinas Pertamanan dan Tata Kota Magelang, Kelurahan, dan Dinas Pasar. Sistem pengangkutan yang dilakukan diawali dengan pengelolaan sampah oleh rumah tangga atau kegiatan lain secara swadaya untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah dengan gerobak/ truk sampah. Kawasan merupakan kawasan yang seluruhnya dilalui oleh sistem pengangkutan gerobak sampah, sehingga sistem pembuangan sampah di wilayah ini dapat dikatakan cukup baik. Sampah yang diangkut dengan gerobak sampah kemudian diangkut ke TPS atau Transfer Depo, dan dilanjutkan dibawa ke TPA.

Tabel 2 - 83

Prosentase Sampah Terangkut Tahun 2010 - 2017

Tahun	Volume	Terangkut	Prosentase
2010	207.18	170.06	82.08
2011	193.94	164.78	84.96
2012	208.85	172.45	82.57
2013	217.92	186.72	85.68
2014	139.39	118.54	85.04

Tahun	Volume	Terangkut	Prosentase
2015	160.58	136.75	85.16
2016	280.19	240.4	85.80
2017	289.32	249.49	86.23

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2010-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Meningkatnya volume sampah dan keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah industri menyebabkan masalah pengelolaan sampah di Kota Magelang menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Magelang. Hal ini ditambah dengan telah habisnya umur pakai TPSA Banyu urip sehingga saat ini Kota Magelang dalam keadaan darurat sampah dan harus mencari alternatif lain yang akan di jadikan sebagai lokasi TPSA. Terkait permasalahan di bidang pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Magelang sudah melakukan beberapa terobosan dan inovasi seperti pembentukan Kampung Organik serta membudayakan 3R untuk memaksimalkan usia TPA. Jumlah bank sampah dan kampong organik yang terbentuk saat ini ada 124 unit dengan rincian 58 kampung organik dan 66 bank sampah yang tersebar di beberapa RT, RW, sekolah dan instansi di Kota Magelang

Upaya dari Pemerintah ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat utamanya dalam meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah domestik. Perlunya mengoptimalkan kembali kegiatan kegiatan yang sudah ada seperti kampong organik, 3R, pengomposan skala rumah tangga dan bank sampah serta sosialisasi dan penyuluhan mengenai reduksi volume sampah rumah tangga.

Jumlah TPS di Kota Magelang ada 13 buah, sementara jumlah transfer depo ada 12 buah. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sementara transfer depo adalah tempat yan digunakan untuk mentransfer sampah dari gerobak sampah ke truk sampah, sehingga seharusnya di transfer depo tidak terdapat sampah. Jumlah prasarana TPS dan Transfer depo Kota Magelang sebagaimana table berikut:

Tabel 2 - 84
Lokasi TPS dan Transfer Depo

No.	TPS	Transfer depo
1	Maluku (Kebonpolo)	Pasar Cacaban
2	Depok	Kyai Langgeng
3	Getuk Marem	Jl. Tarumanegara
4	Jurangombo	Telagawarna
5	Perum Korpri	Pasar Gotong Royong
6	Dalangan	Jl. Sunan Giri
7	Karet	Tidar Baru

No.	TPS	Transfer depo
8	Cacaban	Lapangan Rindam
9	Sanden	Sekretariat Pemkot
10	Kuncen	Lapangan Parkir MT
11	Magersari	Meteseh
12	Sidotopo	Pajang
13		Shopping/BCA
12 Lokasi		13 Lokasi

Sumber: DLH Kota Magelang, 2017

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kajian daya tarik berinvestai tersebut didasarkan pada persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, nasional maupun multinasional dan menyimpulkan bahwa daya tarik investasi daerah (KPPOD, 2006) dipengaruhi oleh:

- Kelembagaan yang meliputi kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan lokal;
- Keamanan, politik dan sosial budaya;
- Ekonomi daerah yang meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi;
- Tenaga kerja yaitu ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja.
- Infrastruktur fisik baik ketersediaan/ kualitas infrastruktur

Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Iklim Berinvestasi di antaranya adalah Angka Kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, Perda yang mendukung iklim usaha, dengan data sebagaimana tabel tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -85
Kondisi Keamanan Ketertiban Masyarakat Kota Magelang Tahun 2012 – 2017

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Demo /Unjuk Rasa	7	6	5	14	16	10
	a. Unjuk rasa bidang politik	0	0	0	0	0	3
	b. Unjuk rasa bidang ekonomi	7	1	3	2	4	2
	c. Unjuk rasa bidang lainnya	-	5	2	12	12	5
2	Kasus pertikaian antar warga	2	0	0	4	7	3
	a. Antar etnis	-	-	-	-	-	-
	b. Antar wilayah desa	1	-	-	1	1	1
	c. Antar agama	-	-	-	-	-	-
	d. Antar simpatisan partai	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	e. Antar pelajar	1	-	-	-	2	2
	f. Rusuh masal/pengeroyokan	-	-	-	3	4	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-	-
4	Kasus sengketa pengusaha dan pekerja	-	1	-	-	-	5
5	Sarana prasarana keamanan						
	a. Jumlah aparat keamanan (polisi)	550	546	583	597	588	578
	b. Jumlah pos keamanan (polisi)	10	10	13	13	13	10
	c. Jumlah mobil kebakaran	5	5	5	5	5	5
	d. Aparat Pamong Praja	65	56	59	60	60	58
	e. Jumlh patroli petugas satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	154	262	262	262	262	360
	f. Jumlh petugas perlindungan masy	740	782	782	832	832	832
	g. Jumlah pos Siskamling	262	262	262	262	262	262
6	Angka Kriminalitas	15.38	10.99	12.35	14.14	14.02	13.31
7	Jumlah Tindak Kriminal						
	a. Jumlah Kasus Narkoba	6	14	25	26	20	30
	b. Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	0	1	0	0
	c. Jumlah kasus Seksual	3	3	0	1	0	1
	d. Jumlah Kasus Penganiayaan	13	5	3	15	18	12
	e. Jumlah Kasus Pencurian	80	19	20	23	56	69
	f. Jumlah Kasus Penipuan	7	9	1	15	20	10
	g. Jumlah Kasus Pemalsuan uang	0	1	0	0	0	0
	h. Jumlah Kasus lain – lain (pembakaran, senpi, perjudian, pengeroyokan, bawa sajam, KDRT, perlindungan anak dll)	na	na	na	na	na	18
	i. penggelapan	na	na	na	na	na	13
	j. perjudian	na	na	na	na	na	9

Sumber : SIPD Kota Magelang 2017 Bappeda Kota Magelang (Sumber data Badan Kesbangpolinmas dan Polres Magelang Kota)

Terkait dengan Angka kriminalitas di Kota Magelang pada dalam beberapa tahun terkahir ini relatif berfluktuatif. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan KesbangPolinmas Kota Magelang sampai dengan tahun 2017 sebanyak 162 kasus. Gambaran angka kriminalitas di Kota Magelang disajikan tabel berikut.

Tabel 2 - 86
Angka Kriminalitas di Kota Magelang Tahun 2011 – 2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
JUMLAH KEJAHATAN YANG TERJADI DI KOTA MAGELANG	242	184	132	149	171	170	162
JUMLAH PENDUDUK (data Dispendukcapil)	129.556	130.955	130.836	131.703	132.261	132.662	132.911
JUMLAH PENDUDUK (dataBPS)	119.210	119.647	120.158	120.615	120.952	121.293	121.673
ANGKA KRIMINALITAS	18.68 /20.30	14.05/ 15.38	10.09 / 10.99	11.31 / 12.35	12.93 / 14.14	12.81 / 14.02	12.19/ 13.31

Sumber : 1. Bappeda Kota Magelang, Sistem Informasi Profil Daerah Kota Magelang 2015, data diolah
2. Data Strategis Kota Magelang 2011-2017. Dinas Kominfo, data diolah
3. Proyeksi Penduduk Kota Magelang 2010 – 2020, BPS Kota magelang

Data di bawah ini menunjukkan Statistik jumlah kriminalitas selama 2011-2017 sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 2 -87
Data Kriminalitas yang Tertangani di Kota Magelang Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Kriminalitas		Rasio (%)	Angka Kriminalitas yang Tertangani
	Lapor	Selesai		
2011	242	164	67,77	13.75
2012	184	134	72,83	11.20
2013	132	90	68.18	7.49
2014	149	108	72.48	8.95
2015	171	134	78,36	11.08
2016	170	120	70.59	9.89
2017	162	118	72.84	8.88

Sumber : Polres Magelang Kota, 2011-2016

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa berdasarkan kejadian tindak kriminalitas yang dari tahun ke tahun makin menurun, menunjukkan tingkat kondusivitas yang makin baik. Kondisi ini sangat penting bagi iklim usaha yang kondusif dan prasyarat utama menuju daya saing daerah.

Terkait dengan jumlah kriminalitas di Kota Magelang pada dalam beberapa terakhir ini relatif berfluktuatif. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan KesbangPolinmas Kota Magelang dan Polres Magelang Kota sampai dengan tahun 2017 sebanyak 162 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 118 kasus sehingga rasio jumlah kriminalitas yang terselesaikan sebesar 72.84%

Tabel 2 - 88
Jumlah Demo/Unjuk Rasa di Kota Magelang 2010 – 2017

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Demo / Unjuk Rasa	25	9	7	6	5	14	16	10
a	Unjuk rasa bidang politik		2	0	0	0	0	0	3
b	Unjuk rasa bidang ekonomi		7	7	1	3	2	4	2
c	Unjuk rasa bidang lainnya		-	-	5	2	12	12	5

Sumber : Bappeda Kota Magelang, SIPD 2017, data KesbangLinmas dan Polres Magelang Kota data tahun 2010-2017

Demo atau unjuk rasa yang terjadi di Kota Magelang masih dalam batas wajar sebagai penyampaian aspirasi beberapa elemen masyarakat namun demo atau unjuk rasa dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prosedur hingga tidak mengganggu ketertiban dan tidak menimbulkan keresahan massa/merusak fasilitas umum.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Indikator lain yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Sumber Daya manusia adalah Indikator rasio ketergantungan penduduk. Indikator tersebut merupakan indikator yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Angka beban tanggungan penduduk atau yang sering disebut dengan Dependency Ratio (DR) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja dengan penduduk di luar usia kerja. Apabila Dependency Ratio menunjukkan angka yang semakin tinggi maka beban tanggungan penduduk semakin besar karena ini berarti bahwa tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin besar. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kota Magelang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 - 89
Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2010 - 2017

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan	Naik / Turun
	0-14 th	15-64 th	≥ 65 th		
2010	27.283	82.926	8.504	43.16	
2011	27.072	83.435	8.702	42.88	0.28

2012	26.855	83.897	8.896	42.61	0.26
2013	26.604	84.448	9.105	42.29	0.33
2014	26.376	84.903	9.334	42.06	0.23
2015	26.107	85.260	9.585	41.86	0.20
2016	25.897	85.534	9.862	41.81	0.06
2017	25.650	85.852	10.171	41.72	0.09

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Magelang, BPS Kota Magelang, 2016, data diolah

Pada tabel di atas diperlihatkan bahwa Angka Beban Tanggungan penduduk di Kota Magelang relatif stabil walaupun berfluktuatif rendah dan masih pada kisaran angka 41-43. Hal ini juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk berupaya menyediakan lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang produktif dan professional sehingga mempunyai daya saing serta berupaya untuk menekan angka pengangguran. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat di lihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka bebant ketergantungan karena dengan semakin kecilnya angka ketergantungan maka akan memberikan kesempatan yang semaki besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri. Angka Beban Kerja di Kota Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang membaik dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2010 besar angka Beban Tanggungan sebesar 43.16 kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 41.72. Angka ini mempunyai arti bahwa untuk setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 42 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas).

Berdasarkan data publish kependudukan dikeluarkan BPS pada tahun 2017 dengan proyeksi penduduk sebanyak 121.673 jiwa lahu pertumbuhan penduduk mencapai 0.37%. Apabila data ini di kaitkan dengan bonus demografi yang sudah di nikmati penduduk Kota Magelang sejak tahun 2010, di mana rasio penduduk usia produktif rata – rata mencapai dua kali lipat di bandingkan penduduk kelompok usia non produktif sehingga hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk di Kota Magelang yang cenderung semakin kecil dari tahun ke tahun atau memperlihatkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk produktif semakin kecil.

Menurut data BPS pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, rasio ketergantungan yang cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja namun di satu sisi mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka ini yang di katakana usia produktif namu tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja. Data di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah penduduk usia produktif, skitar 70an persen. Hal ini menunjukkan potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan. Potensi yang besar harus di imbangi dengan ekonomi yang cukup dan akhlaq yang baik serta fasilitas yang mendukung seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga nantinya akan menghasilkan penduduk yang berkualitas dan membawa manfaat bagi pembangunan.

2.1.4.4.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat di lihat dari keahlian dan ketrampilan yang di miliki serta ilmu pengetahuan yang di miliki. Adapun hal ini bisa di asumsikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka di harapkan dia akan mempunyai kemampuan/ketrampilan dan keahlian yang tinggi serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga harapannya dia akan lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang di tamatkan juga dapat dipergunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun (wajib 9 tahun)

Tabel 2 - 90

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Lulusan S1/S2/S3	Rasio
1.	2011	129.556	12.315	930
2.	2012	130.955	12.257	936
3.	2013	130.836	12.045	921
4.	2014	131.703	12.053	915
5.	2015	132.261	12.105	915
6.	2016	132.662	12.162	917
7.	2017*	130.857	12.045	920

Data Strategis Kota Magelang 2010-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, data diolah

Penduduk di Kota Magelang berdasarkan data DispendukCapil pada tahun 2016 pada Data Strategis Kota Magelang menyebutkan bahwa pada umumnya minimal sudah mengenyam pendidikan setingkat SMA yaitu sebanyak 35.526 jiwa (41.88%) dan sudah banyak pula penduduk di Kota Magelang yang menempuh pendidikan di universitas/akademi atau sederajat sebanyak 16.604 jiwa (19.57%). Data pada tahun 2017, menunjukkan hal yang sama kondisinya pada tahun 2017, dimana penduduk yang mengenyam pendidikan SMA sebanyak 35.334 jiwa (42.34%). Sementara untuk penduduk yang menempuh pendidikan universitas/akademi sebanyak 16.429 jiwa (19.68%). data dari 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan pendidikan yang di tamatkan di atas pendidikan SMA cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun cukup berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kondisi demikian harus di pertahankan dan terus ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang di miliki Kota Magelang. Tingginya penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja di Kota Magelang sebagai salah satu langkah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sehingga tenaga kerja yang ada di Kota Magelang memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi .

Tabel 2 - 91
Jumlah Penduduk 5 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
di Kota Magelang Tahun 2015-2017

Tahun	Tidak/belum Lulus SD	SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	S1/S2/S3
2015	1.937	17.212	13.950	34.733	424	10.334	11.967
2016	1.870	16.886	13.937	35.526	429	4.013	12.162
2017	1.794	16.270	13.633	35.334	428	3.956	12.045

Data Strategis Kota Magelang 2010-2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, data diolah

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Evaluasi Hasil Pencapaian Sasaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017

Hasil Evaluasi pencapaian sasaran RPJMD sampai tahun berjalan pada tahun 2018 Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2 - 92

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 pada Akhir Tahun 2018 Triwulan II

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
MISI SATU													
1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1	Persentase pegawai berkinerja baik	97%	78,17%	80,59%	78,17%	80,59%	82,63%	85,19%	82,63%	85,19%	BPKPP
2		Capaian SPM Kota Magelang	60%	65,00%	108,33%	65,00%	108,33%	65,00%	108,33%	86,09%	143,48%	Tapem	
3		Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	48%	13,06%	27,21%	41,59%	86,65%	45,97%	95,78%	47,00%	97,92%	Disperpusip	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	50,00%	WTP	100,00%	WTP	100,00%	WTP	100,00%	BPKAD
2		Indeks EKPPD	3	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3,215	107,17%	Tapem	
3		Hasil implementasi SAKIP	CC (54,00)	55,78	103,30%	55,78	103,30%	55,78	103,30%	55,78	103,30%	Organisasi	
4		Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	45%	34,00%	75,56%	34,83%	77,41%	38,33%	85,19%	65,08%	144,61%	Kecamatan	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab	
					I		II		III		IV			
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian		
		5	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	35,00%	35,00%	50,00%	50,00%	75%	75,00%	100%	100,00%	Hukum	
1	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive	1	Persentase dengan pelayanan baik	PD nilai	48,48%	48,28%	99,58%	48,28%	99,58%	48,28%	99,58%	48,28%	99,58%	Setda
2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1	Persentase menerapkan e-Gov	PD	80%	100,00%	125,00%	100,00%	125,00%	100,00%	125,00%	100,00%	125,00%	Diskominfo
		2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi		60%	100,00%	166,67%	100,00%	166,67%	100,00%	166,67%	100,00%	166,67%	Diskominfo
3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja		90%	45,00%	50,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%		0,00%	Bappeda
		2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan		60%	87,89%	146,48%	89,09%	148,48%	90,55%	150,92%	90,99%	151,65%	Diskominfo

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggun jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
4	Terwujudnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informasi	1	Cakupan penduduk memiliki KTP el	100%	98,50%	98,50%	98,10%	98,10%	98,84%	98,84%	101,64%	101,64%	Capil
		2	cakupan penduduk memiliki KIA	100%	42,80%	42,80%	48,20%	48,20%	53,21%	53,21%	104,67%	104,67%	Capil
		3	Presentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80%		0,00%	79,14%	98,93%	80,00%	100,00%	85%	106,25%	Capil
		4	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	930	911,4	98,00%	918,6	98,77%	925,7	99,54%	937,1	100,76%	Capil
		5	Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	Capil
		6	Persentase kepemilikan akta kematian	45%	50,58%	112,40%	54,62%	121,38%	54,62%	121,38%	79,82%	177,38%	Capil
		7	Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	15%		0,00%	50,00%	333,33%	50,00%	333,33%	50,00%	333,33%	Capil
1	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1	Derajat Otonomi Fiskal	22,52%	7,56%	33,57%	28,77%	127,75%	25,68%	114,03%	34,80%	154,53%	BKPAD
		2	Rasio ketergantungan	73,66%	22,27%	30,23%	30,12%	40,89%	60,42%	82,03%	61,18%	83,06%	BKPAD

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penangg ung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
			keuangan daerah terhadap dana pusat										
1	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat kemitraan dan	1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60%	58,00%	96,67%	60,00%	100,00%	60,00%	100,00%		0,00%	Bappeda
		2	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	58,62%	55,17%	94,12%	55,17%	94,12%	55,17%	94,12%		0,00%	Bappeda
		3	Persentase perkembangan kerjasama daerah	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	33,33%	8,82%	288,24%	Tapem
1	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	46%	6,00%	13,04%	6,00%	13,04%	6,00%	13,04%	87,24%	189,65%	BP4KB
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional:										

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab	
			I		II		III		IV			
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian		
	a. Regional	4	6	150,00%	6	150,00%	6	150,00%	6	150,00%	Disporapar	
	b. Nasional	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Disporapar	
	c. International	0	0		0		0				Disporapar	
2	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional											
	a. Regional	10	43	430,00%	79	790,00%	120	1200,00%	125	1250,00%	Disporapar	
	b. Nasional	5	3	60,00%	10	200,00%	15	300,00%	19	380,00%	Disporapar	
	c. International	2	1	50,00%	1	50,00%	1	50,00%	19	950,00%	Disporapar	
MISI 2												
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1	Rata-rata lama sekolah	10,41	9,14	87,80%	9,14	87,80%	9,14	87,80%	Dikbud	
2		Persentase sekolah berstandar nasional										
		a. SD	40,66%	41,33%	101,66%	41,33%	101,66%	41,33%	101,65%	41,33%	101,65%	Dikbud
		b. SMP	70%	72,73%	103,90%	72,73%	103,90%	72,73%	103,90%	72,73%	103,90%	Dikbud
3		Angka Melek Huruf	97,67%	96,67%	98,98%	96,67%	98,98%	96,67%	98,98%	98,57%	100,92%	Dikbud

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penangg ung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
	4	Persentase kunjungan perpustakaan	72,52%	20,18%	27,83%	35,86%	49,45%	51,77%	71,39%	81,10%	111,83%	Disperpusip	
	5	Jumlah kunjungan perpustakaan	96.200	26.689	27,74%	47.434	49,31%	68.474	71,18%	107.260	111,50%	Disperpusip	
2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	53,85%	46,15%	85,46%	46,15%	85,46%	53,85%	100,00%	97,00%	180,14%	DKK
	2	Angka Harapan Hidup	76,71	76	99,07%	76	99,07%	76,00	99,07%	76	99,07%	DKK	
	3	AKI/ 1.000 KH	126	63	200,00%	63	200,00%	96,90	130,03%	192,43	152,72%	DKK	
	4	AKB/ 1.000 KH	14,5	14,29	101,47%	9,19	157,78%	7,75	187,05%	12,18	119,05%	DKK	
	5	AKABA	15,5	17,14	90,43%	10,49	147,76%	9,69	159,96%	1,92	805,48%	DKK	
	6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,21	147,62%	0,21	147,62%	0,22	138,70%	0,21	147,62%	DKK	
	7	Angka Kesakitan DBD	50	23,14	216,08%	37,75	132,45%	46,05	108,58%	54,65	91,49%	DKK	
	8	Angka Prevalensi Kasus TB	105	83,54	125,69%	83,54	125,69%	83,54	125,69%	83,54	125,69%	DKK	
	9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,05%	0,0085%	588,24%	0,0130%	384,62%	0,0130%	384,62%	0,03%	166,67%	DKK	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penang- gung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
		10	Persentase Rumah Tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	97%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%		0,00%	DKK
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	16,15%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	Perindag
4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	1	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)	20%	20,00%	100,00%	50,00%	250,00%	50%	250,00%	50%	250,00%	Dikbud
		2	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	10%	42,86%	428,60%	42,86%	428,60%	42,86%	428,60%		0,00%	DKK
		3	Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	20%	20,00%	100,00%	20,00%	100,00%	20%	100,00%		0,00%	Perindag
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Pencemaran Air	75,65	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	46,47	61,43%	DLH

SASARAN			INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penangg ung jawab
						I		II		III		IV		
						K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
			2	Indeks Pencemaran Udara	61,8	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	85,67	138,62%	DLH
			3	Indeks Tutupan Vegetasi	48,55	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	57,24	117,90%	DLH
			4	Volume sampah yang dibuang ke TPSA (m3)	158,7	240,15	66,08%	240,89	65,88%	246,35	64,42%	249,66	157,32%	DLH
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau		1	Persentase Ruang Terbuka Hijau										
			a. Privat	10%	0,00%	19,11%	191,10%	19,11%	191,10%	19,11%	191,10%	DLH		
			b. Publik	18,37%	0,00%	19,25%	104,79%	19,25%	104,79%	19,60%	106,70%	DLH		
3	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana		1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	6,68%	2,83%	42,40%	4,72%	70,67%	4,85%	72,61%	4,92%	73,70%	Satpol
			2	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	5,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	101,42%	Satpol	
4	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang		1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	24%	23,03%	95,96%	23,10%	96,25%	23,20%	96,67%	23,33%	97,20%	DPUPR
MISI TIGA														

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
1	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1	Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	82%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,62%	100,76%	DPUPR
2	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1	Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12%	12,80%	106,67%	12,80%	106,67%	12,80%	106,67%		0,00%	Perkim
		2	Tercapainya 100 - 0 - 100										
		a.	Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	92,30%	85,24%	92,35%	87,00%	94,26%	87,88%	95,21%	87,88%	95,21%	Perkim
		b.	Luas kawasan kumuh (Ha)	39,65	96,87	40,93%	96,87	40,93%	96,87	40,93%	67,4	58,83%	Perkim
		c.	Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	3%	7%	42,86%	7,00%	42,86%	7,00%	42,86%	3,73%	80,40%	Perkim
		3	Prosentase RTLH	2,90%	4,20%	144,83%	4,20%	144,83%	4,20%	144,83%	65,76%	2267,60%	Perkim

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8,25%	8,22%	99,64%	8,22%	99,64%	8,33%	100,97%	8,40%	101,82%	Dishub
1	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1	Pertumbuhan investasi										
			a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	3,80%	DPMPTSP
			b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	8,50%	56,67%	10,40%	69,33%	13,60%	90,67%	16,85%	112,33%	DPMPTSP
2	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	75%	70%	93,33%	70%	93,33%	80%	106,67%	75%	100,00%	Perindag

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan									OPD Penanggung jawab	
			I		II		III		IV				
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian			
	2	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	28%	18%	64,29%	16%	56,61%	49,18%	175,66%	30,84%	110,14%	Litbang	
3	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.831	13.501	105,22%	13.501	105,22%	13.501	105,22%	13.637	106,28%	Pertanian
1	Meningkatnya lapangan kerja	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	65%		0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	65%	100,00%	Disnaker
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunannya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1	Persentase Penurunan PMKS	15%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61%	64,04%	Dinsos
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	DP4KB
1	Menurunnya kesenjangan gender	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%	0,05%	0,29%	0,05%	0,29%	0,05%	0,29%	6,37%	37,48%	DP4KB
		2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%	0,06%	0,30%	0,06%	0,30%	0,06%	0,30%	14,06%	70,30%	DP4KB
		3	Rasio KDRT	0,060%	0,011%	545,45%	0,017%	352,94%	0,017%	352,94%	0,035%	169,04%	DP4KB
MISI EMPAT													

SASARAN			INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggu ng jawab
						I		II		III		IV		
						K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14%	13,51%	96,53%	13,51%	96,53%	14,86%	106,14%	15,00%	107,14%	Dikbud	
		2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	5	35	700,00%	35	700,00%	35	700,00%	35	700,00%	Dikbud	
1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1	Jumlah Wisatawan											
		a. Nusantara (orang)	1.136.435	1.043.435	91,82%	1.524.769	134,17%	2.279.199	200,56%	3.447.841	303,39%	Disporapar		
		b. Mancanegara (orang)	5.185	6.625	127,77%	8.525	164,42%	10.963	211,44%	17.162	330,99%	Disporapar		
MISI LIMA														
1	Terbentuknya karakter religius dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%	75,27%	2508,83%	62,19%	2073,03%	42,40%	1413,43%	27,21%	906,95%	Satpol	
2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1	Angka kriminalitas	13%	3,78%	28,77%	7,31%	55,67%	10,85%	82,56%	13,31%	101,33%	Kesbang	
		2	Prosentase	3%	0,00%	0,00%	1,50%	50,00%	6,00%	200,00%	6,00%	200,00%	Kesbang	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2018	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penangg ung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
		penurunan kasus narkoba											
	3	Angka kriminalitas yang tertangani	11,50%	2,88%	25,01%	5,42%	47,17%	7,97%	69,32%	9,70%	84,33%	Kesbang	
	4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kesbang	
1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3,22%	125,78%	3,22%	125,78%	3,22%	125,78%	3,22%	125,78%	Kesra
		2	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	0								Kesbang	

2.2.2 Evaluasi Hasil pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada periode tahun 2018

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi RPJMD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Kota Magelang 2005-2025.

Pada prinsipnya secara berjenjang pencapaian indikator kinerja dimulai dari eksekusi indikator output kegiatan, indikator kinerja outcome program, indikator kinerja intermediate outcome sasaran hingga indikator kinerja ultimate outcome. Evaluasi pencapaian sasaran pada RPJMD untuk periode tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 - 93

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Triwulan II Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	TW II 2018	2019	2020	2021	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	5,04% ± 0,25%	5,19%	5,05% ± 0,25%	4,99-5,39	5,11% ± 0,25%	5,21% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%
2	PDRB per Kapita (tahun dasar 2010, Rp/kapita/tahun)	53.543.836,59*	63.394.588,17	58.920.000,00	68.656.817,64	8.109.601,36	74.314.414,01	80.296.686,81	86.475.098,49	86.475.098,49
3	Laju Inflasi	2,7%	3,36% - 4,94%	3,9 %	3,15% - 4,73%	3,26-4,23	2,93% - 4,51%	2,72% - 4,30%	2,51% - 4,09%	2,51% - 4,09%
4	Indeks Gini	0,3438 - 0,3762	0,343 - 0,3569	0,328	0,3421 - 0,3523	0,312-0,340	0,341 - 0,3489	0,3397 - 0,3461	0,338 - 0,3438	0,338 - 0,3438
5	Indeks Williamson	0,0806	0,0804	0,0798	0,0725	NA	0,0653	0,0588	0,0530	0,0530
2	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan	9,05%	7,41% – 8,09%	8,75%	6,98% – 7,38%	NA	6,65% - 6,90%	6,42% - 6,61%	6,12% - 6,40%	6,12% - 6,40%
2	Indeks Pembangunan Manusia	76,39	76,9	77,26	78,56	77,61	78	78,37	78,37	78,37
	a. Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,41 Tahun	10 tahun	10,46 Tahun	10,29%	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
	b. Harapan Lama Sekolah	13,08 Tahun	13,45 Tahun	13,88 tahun	13,63 Tahun	NA	13,82 Tahun	14 Tahun	14,19 Tahun	14,19 Tahun
	c. Angka Harapan Hidup	76,58 Tahun	76,71 Tahun	77 Tahun	76,76 Tahun	76,66	76,8 Tahun	76,85 Tahun	76,9 Tahun	76,9 Tahun
	d. Pengeluaran per Kapita (Rp.)	10.793.000	11.083.570	11.384.000	11.281.140	NA	11.478.710	11.676.290	11.873.860	11.873.860
3	Indeks Pembangunan Gender	95,66	95,9	96,45	95,99	NA	96,45	96,16	96,23	96,23
4	Indeks Pemberdayaan Gender	78,83	79,2	79,3	79,35	NA	79,3	86,95	87,15	87,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6% - 5%	6,68 %	5,8% - 5%	5,77%	6,68 %	5,2% - 5%	5% – 4,5%	5% – 4,5%
6	Angka Pertumbuhan Penduduk	0,337%	0,244%	-1,36%	0,384%	NA	-1,36%	0,137%	0,133%	0,133%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar									
a	Pendidikan									
1	Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,29%	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	TW II 2018	2019	2020	2021	
	2 Persentase sekolah berstandar nasional									
	- SD	30,66%	40,66%	98,66%	40,66%	57.14%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
	- SMP	60%	70%	72,73%	72.0%	78.26%	80%	85%	90%	90%
3	APM SD	96,51%	97,31%	82,84%	97,71%	94,77%	98,11%	98,51%	98,91%	98,91%
4	APK SD	108,15%	112%	126,70%	114%	95,24%	116%	118%	120%	120%
5	APM SMP	74,62%	76%	74,96%	78%	84,59%	80%	82%	84%	84%
6	APK SMP	81,92%	85%	94,19%	88%	106,29%	90%	96%	100%	100%
7	Angka Melek Huruf	97%	97,67%	98,57%	97,99%	98.7 %	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
8	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	50%	30%	50%	40%	50%	60%	60%
b	Kesehatan									
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	0	5 buah (15%)	100%	7 buah (54%)	100%	10 buah (77%)	13 buah (100%)	13 buah (100%)	13 buah (100%)
2	Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH	187,5	126	192,43	120	0 %	110	95	70	70
3	Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	15,63	14,5	12,18	14	9.36%	13,5	13	12,5	12,5
4	Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	0,63	0,155	0,1920	0,15	9.36 %	0,145	0,14	0,135	0,135
5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,19	0,31	0,23%	0,31	0,31	0,31	0,31
7	Angka Kesakitan DBD	130.93	<50	54,65	<50	3.82	<50	<50	<50	<50
8	Angka Prevalensi TB	128.33	<105	156	<104	32.86	<103	<102	<101	<101
9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,5%	0,03%	<0,5%	0,05%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
10	Persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	97%	95,96%	97%	0,0%	98%	98%	98%	98%
11	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	10%	39,68%	20%	39.68%	30%	40%	50%	50%
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau									
	- Privat	10%	10%	19,10%	10%	19.10%	10%	10%	10%	10%
	- Publik	18,37%	18,37%	19,60%	18,42%	19.62%	18,44%	18,46%	18,50%	18,50%
	2. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	24%	24%	25%	23.58%	26%	27%	33%	33%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	TW II 2018	2019	2020	2021	
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12%	100%	11,5%	0,0%	11%	10,5%	10%	10%
2	Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	82,30%	92,30%	87,88%	97,30%	0,0%	100%	100%	100%	100%
3	Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	39,65 Ha	59,21%	12,12 Ha	0,0%	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
4	Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	3%	3,73%	2%	0,0%	0%	0%	0%	0%
5	Prosentase RTLH	4,40%	2,90%	2,49%	2,30%	0,0%	1,70%	1,0%	0%	0%
e	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	6,68%	6,71%	9,38%	6,93%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
2	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	5,80%	6,00%	11,76%	5,88%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
3	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	28,98%	3%	3%	3%	3%
4	Angka kriminalitas	14,14%	13,14%	11,21%	12,64%	7,21%	12,14%	11,64%	11,14%	11,14%
5	Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	72,84%	12%	524,62%	12%	12,50%	12,50%	12,50%
6	Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04%	3%	6%	3%	63%	3%	3%	3%	3%
f	Sosial									
1	Persentase Penurunan PMKS	14%	15%	9,61%	16%	0	17%	18%	19%	19%
2	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3%	3,22%	3%	3,22%	3%	3%	3%	3%
3	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	0	1	2
2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar									
a	Tenaga Kerja									
1	Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	65%	65%	65%	77,77%	65%	70%	70%	70%
b	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Rasio KDRT	0,07%	0,060%	0,04%	0,055%	0,37%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	17%	6,37%	20%	10%	23%	26%	30%	30%
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	20%	14,05%	23%	8,70%	26%	30%	35%	35%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	TW II 2018	2019	2020	2021	
c	Pangan									
1	Ketersediaan pangan utama beras	12.729 Ton	12.831 Ton	13.637 ton	12.882 Ton	7.350 ton	12.933 Ton	12.985 Ton	13.037 Ton	13.037 Ton
d	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,12	62	62,54	65	0	67,51	68	68,5	68,5
2	Indeks Pencemaran Air	68,9	75,65	46,47	75,7	0	75,8	76,79	76,84	76,84
3	Indeks Pencemaran Udara	45,3	61,8	85,67	70,5	0	77,7	77,9	79,1	79,1
4	Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,55	57,24	48,8	0	49,05	49,31	49,56	49,56
5	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	158,7	249,66	155,7	280,59	153,7	151,7	136,7	136,7
e	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	58,62%	58,62%	65,52%	58,62%	75,86%	82,76%	89,66%	89,66%
2	Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	46%	87,24%	47%	67,03%	48%	49%	50%	50%
f	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak
g	Perhubungan									
1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8,25	8,40	8,5	8,40	8,75	9	9,25	9,25
h	Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	60%	100%	70%	100%	80%	90%	100%	100%
i	Penanaman Modal									
1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	0,19%	5%	0	10%	10%	15%	15%
2	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	16,85%	15%	3,94%	15%	15%	15%	15%
j	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5 buah	6 buah	6	7 buah		7 buah	8 buah	8 buah	8 buah
	- Regional	4 buah	4 buah	4	5 buah	1	5 buah	6 buah	6 buah	6 buah

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	TW II 2018	2019	2020	2021	
	- Nasional	1 buah	2 buah	2	2 buah	0	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah
	- internasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14 buah	17 buah	163	17 buah		17 buah	17 buah	20 buah	20 buah
	- Regional	8 buah	10 buah	125	10 buah	74	10 buah	10 buah	11 buah	11 buah
	- Nasional	4 buah	5 buah	19	5 buah	16	5 buah	5 buah	6 buah	6 buah
	- internasional	2 buah	2 buah	19	2 buah	0	2 buah	2 buah	3 buah	3 buah
k	Statistik									
1	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	91%	70%	93,73%	80%	90%	100%	100%
l	Kebudayaan									
1	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	13%	14%	14%	14,5%	NA	15%	15,5%	16%	16%
2	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	14%	15%	14,5%	4,02%	15%	15,5%	16%	16%
3	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	5	35	10	35	15	20	25	25
m	Perpustakaan									
1	Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	72,52%	81,10%	74,25%	38,47%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%
2	Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	96.200	107,261	98.500	50.883	100.113	102.230	104.305	104.305
n	Kearsipan									
1	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	48%	47%	52%	50,04%	65%	68%	72%	72%
3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan									
a	Pariwisata									
1	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	3,20%	3,60%	7,93%	3,80%	NA	4,00%	4,20%	4,40%	4,40%
2	Jumlah Wisatawan									
	- Nusantara (orang)	1.133.373	1.136.435	1.269.949	1.138.140	381.448	1.139.961	1.141.899	1.143.954	1.143.954

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	TW II 2018	2019	2020	2021	
	- Mancanegara (orang)	5.171	5.185	6.341	5.193	1346	5.201	5.210	5.219	5.219
b	Perdagangan									
1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	16,15%	20,75%	16,43%	NA	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
2	Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%
3	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	75%	80%	80%	80%	80%
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a	Perencanaan									
1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	90%	93,18%	93%	93,18%	95%	98%	100%	100%
2	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	60%	60%	62%	60%	65%	68%	70%	70%
b	Keuangan									
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,40%	26,34%	34,81%	30,33%	NA	32,55%	34,21%	36,35%	36,35%
2	Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	25,86%	25,82%	29,82%	36,64%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
3	Rasio ketergantungan Keuangan Daerah terhadap dana pusat	83,60%	73,66%	61,18%	69,67%	67,28%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
4	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
c	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Persentase pegawai berkinerja baik	96%	97%	82,63%	97%	0	97,5%	97,9%	98%	98%
d	Penelitian dan Pengembangan									
1	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	28%	30,84%	29%	25,44%	30%	31%	32%	32%
e	Fungsi Lain									

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	TW II 2018	2019	2020	2021	
	1 Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	60%	86,09%	70%	86,09%	80%	100%	100%	100%
	2 Indeks EKPPD	2,92	3	3,215	3,1	3,215	3,12	3,13	3,14	3,14
	3 Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (54,00)	B(60,05)	CC (56,00)	B (60,05)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
	4 Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	45%	65,08%	55%	62,78%	65%	75%	85%	85%
	5 Persentase perkembangan kerjasama daerah	1,05%	3,06%	8,82%	3,96%	6,76%	0	5,45%	6,03%	6,03%
	6 Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	48,48%	48,28%	60,60%	60,60%	72,72%	84,84%	100%	100%
	7 Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%
C	APEK DAYA SAING DAERAH									
	1 Indeks Reformasi Birokrasi	50,26	57,00	68,22	57,51	68,22*	58,00	58,51	59,00	59,00
	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71 (B)	75 (B)	78,19 (B)	77 (B)	78,19 (B)*	78 (B)	79 (B)	80 (B)	80 (B)
	3 Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	79%	82%	82,62%	83%	82,62%*	84%	85%	86%	86%
	4 Tingkat Kematangan Kota Cerdas	Scattered (48,89)	Scattered (51,6 – 54,5)	Integrated (63,7)	Scattered (54,6 – 57,5)	Integrated *(63,7)	Scattered (57,6 – 59,9)	Integrative (60 – 62,5)	Integrative (62,6 – 65)	Integrative (62,6 – 65)
	5 Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	100%	100%

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas permasalahan yang akan disolusikan ditentukan oleh aspek urgensi dan konektivitas dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari mandat kebijakan nasional/provinsi yang bersifat harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan.

Mekanisme identifikasi permasalahan pembangunan daerah tersebut dilakukan agar permasalahan paling prioritas atau isu strategis daerah, sudah mengakomodasi informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dinamika lingkungan eksternal dan isu-isu regional, nasional maupun global.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berbagai urusan pemerintahan hingga tahun 2017 masih menyisakan permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi antara lain sebagai berikut:

2.3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.3.1.1 Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu:

1. Rendahnya insentif bagi pendidik PAUD.
2. Belum meratanya kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4, dan sebagian pendidik belum bersertifikat pendidik
3. Kurangnya tenaga guru kelas di jenjang sekolah dasar karena memasuki masa pensiun
4. Kurangnya sumber daya, kompetensi dan kualifikasi pustakawan dan laboran.
5. Kurang memadainya sarana prasarana dan tenaga pendidikan pada pendidikan non formal.
6. Belum efektifnya pendidikan karakter di sekolah diindikasikan dengan masih adanya vandalisme, kurangnya ketertiban dan kedisiplinan siswa.

2.3.1.2 Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu:

1. Angka kematian Ibu (AKI) di Kota Magelang masih tinggi bila dihitung per 100.000 kelahiran Hidup, pada Tahun 2017 ada 3 kasus kematian ibu sedangkan jumlah kelahiran hidup ada 1.559, sehingga apabila dihitung AKI nya diperoleh angka 192,43. Angka ini lebih dari target tahun 2017 sebesar 126.
2. Angka Kematian bayi (AKB) juga masih tinggi apabila dihitung per 1.000 Kelahiran Hidup. Pada Tahun 2017 terdapat 19 kasus kematian bayi, maka apabila dihitung AKB nya diperoleh angka 12,18. Meskipun angka ini masih dibawah target tahun 2017 sebesar 14,5 akan tetapi dengan adanya 19 kasus kematian bayi tersebut tetap menjadi perhatian.

3. Angka balita pendek dan sangat pendek di Kota Magelang masih cukup tinggi berdasarkan hasil survei Pemantauan Status Gizi (PSG) di Kota Magelang yang mencakup 326 responden yang diambil secara acak, didapatkan balita sangat pendek ($TB/U < -3SD$) = 3,99% dan balita pendek ($TB/U = -2SD$) = 13,8%
4. Banyak TUPM yang tidak memiliki sertifikat Laik Sehat
5. Masih banyak warga yang belum akses ke jamban Sehat (berseptic tank)
6. Dari hasil survei PHBS, hasil penilaian indikator ke-2 yaitu tidak merokok dalam rumah masih rendah (49%)
7. Kelurahan Siaga Aktif dengan Strategis mandiri, baru di 7 kelurahan
8. Angka prevalensi kasus TB yang tinggi serta angka penemuan kasus TB yang rendah dikarenakan gaya hidup masyarakat yang kurang sehat serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan
9. Data penyakit jiwa dan penyakit tidak menular belum tertangani khususnya penyakit tidak menular di rumah sakit, puskesmas dan dokter praktek swasta karena belum terbangunnya integrasi data antar fasilitas pelayanan kesehatan

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang:

1. Perlu percepatan penyusunan Perda RDTRK dengan melakukan peninjauan kembali Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang.
2. Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum ada rencana rinci Tata Ruang Kota Magelang sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum. Proses menuju legalisasi raperda RDTR sangat panjang.
3. Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan ruang sesuai arahan tata ruang masih rendah.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
5. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.
6. Sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pengendalian tata ruang masih kurang.
7. Konflik pemanfaatan ruang daerah perbatasan
8. Masih perlunya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan saluran drainase yang sudah ada.
9. Secara fisik ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala, khususnya yang di bawah pengelolaan pemerintah Kota Magelang.
10. Masih perlunya penambahan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan baru, terutama pada wilayah perbatasan di sisi Barat dan Timur wilayah Kota Magelang.
11. Kondisi drainase kota yang sudah cukup baik tetapi masih tercampur dengan air limbah rumah tangga.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan permukiman yaitu:

1. Masih adanya rumah tinggal yang belum terlayani air minum dan belum bersanitasi layak serta kawasan kumuh, yang menjadi tuntutan untuk mencapai akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%, di akhir RPJMN 2015-2019.
2. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.
3. Masih adanya lingkungan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang.
4. Belum optimalnya upaya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut.
5. Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu:

1. Masih adanya potensi ancaman terorisme, konflik SARA dan gerakan laten/ radikalisme
2. Masih adanya kasus penyakit masyarakat seperti tawuran pelajar, vandalisme, prostitusi dan kriminalitas lainnya.
3. Masih adanya peredaran/ penyalahgunaan miras dan narkoba.
4. Belum terbentuknya beberapa regulasi penting terkait penanggulangan bencana, kontrol tempat hiburan, pelaksanaan ibadah dan sebagainya.
5. Berkurangnya jiwa kebangsaan, kepedulian sosial, solidaritas dan gotong royong di masyarakat.
6. Masih perlu peningkatan pendidikan politik untuk meningkatkan kedewasaan politik masyarakat.

Selain permasalahan umum tersebut, terdapat beberapa permasalahan teknis dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

1. Keterbatasan personil Satpol PP dan Linmas
2. Masih perlunya peningkatan kapasitas bagi personil SATPOL PP dan LINMAS.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sistem penanggulangan bencana, mengingat kondisi geologis Kota Magelang banyak terdapat tanah lereng yang memungkinkan terjadinya bencana longsor.

2.3.1.6 Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial yaitu:

1. Belum optimalnya dukungan anggaran untuk penambahan jumlah lanjut usia terlanter tidak potensial yang mendapatkan jaminan sosial.
2. Belum adanya anggaran pemberdayaan sosial bagi PMKS

3. Belum adanya anggaran yang mendukung pelaksanaan WKBSM sehingga tersedia sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
4. Kurangnya anggaran yang mendukung bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial

2.3.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan adalah:

1. Masih rendahnya minat pencari kerja untuk berwirausaha/menjadi wirausahawan
2. Belum adanya jenis pelatihan unggulan berbasis kompetensi yang menjadi rujukan daerah sekitar.
3. Belum optimalnya utilisasi Balai Latihan Kerja
4. Belum tersertifikasinya para lulusan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja sesuai standar BNSP
5. Belum tersertifikasinya para pekerja sesuai dengan standar BNSP
6. Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan tentang kewajiban mengikutsertakan tenaga kerjanya di BPJS ketenagakerjaan.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Masih adanya perbedaan persepsi atas peran/kedudukan, partisipasi, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Masih adanya perbedaan persepsi atas Definisi/kriteria kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Masih rendahnya porsi/peran/partisipasi perempuan dalam kebijakan pembangunan.
4. Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam hal pembiayaan dan proses penyelesaian visum maupun pengecekan DNA bagi korban pemerkosaan dan visum atas korban KDRT.

2.3.2.3 Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan yaitu:

1. Rendahnya produksi komoditas pangan (tanaman, ternak, dan ikan) asal Kota Magelang, sebagai akibat dari konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.

2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan yang tidak terpakai di rumah tangga untuk budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan;
3. Adanya potensi kerawanan pangan dan gizi, akibat masih tingginya jumlah penduduk miskin;
4. Tingginya fluktuasi harga beberapa komoditas pangan, seperti: daging sapi, daging unggas, telur, cabe, dan bawang merah;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Magelang mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
6. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai pangan utama, sehingga skor PPH Kota Magelang masih berada di angka 95%. Sementara, target PPH Nasional pada tahun 2020 adalah sebesar 100%.
7. Masih beredarnya pangan yang mengandung zat aditif (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat, dan anti gumpal) dan berbahaya di pasaran, termasuk lingkungan sekolah .
8. Adanya pencemaran bahan kimia (pestisida) pada beberapa komoditas pangan segar seperti: sayur, dan buah-buahan.

2.3.2.4 Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yaitu:

1. Belum optimalnya data asset tanah milik Pemerintah Kota Magelang
2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia pemerintah dalam proses pengadaan lahan
3. Keterbatasan lahan di Kota Magelang sehingga perlu mengelola pemanfaatan lahan secara efektif dan tepat guna agar diperoleh hasil dan manfaat yang optimal
4. Aset tanah pemerintah Kota Magelang belum semuanya bersertifikat
5. Belum adanya penjelasan atau aturan kewenangan OPD yang melaksanakan pengadaan tanah

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yaitu:

1. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industry, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha.
2. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan
3. Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL.

4. Keterbatasan lahan untuk membangun IPAL terpadu industri kecil.
5. Belum adanya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Adanya regulasi bantuan hibah yang sulit untuk diterapkan di masyarakat.
7. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
8. Belum adanya komisi amdal daerah karena kurangnya persyaratan personil yang memiliki kompetensi penilai amdal
9. Minimnya persentase pengurangan sampah dari sumbernya disebabkan peran serta masyarakat masih kurang karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah domestik
10. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, diindikasikan dengan belum terpenuhinya RTH publik sehingga perlu optimalisasi lahan terbuka yang sudah ada seperti makam dan sempadan sungai,
11. Ketersediaan RTH publik di Kota Magelang belum memenuhi amanah Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
12. Secara teknis TPA Banyuwirip sudah tidak bisa menampung sampah lagi.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu:

1. Perlunya peningkatan peran aktif publik untuk memberikan saran, masukan, bahkan komplain atas pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada.
2. Perlunya peningkatan Sumber daya manusia baik dari unsur teknis maupun manajerial.
3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi.
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Teknologi Informasi maupun Manajemen Informatika.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Belum optimalnya peran lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta dalam meningkatkan kemandirian masyarakat (swadaya, swakarsa dan swakelola) yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan teknis, kesadaran hingga permasalahan-permasalahan personal (psikologis).
2. Belum sinerginya kinerja antar lembaga masyarakat (LPM, LKM, LKK, PNPM dan lain sebagainya).
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah setempat.
4. Belum akuratnya Data Profil Kelurahan dalam mencerminkan potensi yang ada berikut langkah pengembangannya.
5. Kurangnya perhatian (fasilitasi/insentif) terhadap Kader Pemberdayaan Masyarakat.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu:

1. Rendahnya kepesertaan KB pria adanya persepsi yang kontra produktif terhadap pemahaman KB pada kaum pria.
2. Kurangnya tenaga penyuluh KB, idealnya 1 orang per kelurahan sedangkan saat ini baru terdapat 15 orang PLKB dari 17 yang dibutuhkan.
3. Masih adanya remaja perempuan (ibu Muda) berusia 15-19 tahun yang hamil.
4. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan KB-KS.
5. Meningkatnya angka pernikahan dini

2.3.2.9 Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan yaitu:

1. Terminal angkutan barang yang ada belum memadai (kurangnya lahan, kurang fasilitas dan bercampur dengan fungsi lain
2. Belum tersedianya terminal type C di wilayah perbatasan.
3. Sarana tempat pemberhentian angkutan umum di Kota Magelang masih belum memadai
4. Tingginya volume pergerakan/mobilitas terutama pada jam-jam sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk terjadinya kemacetan dan potensi peningkatan kecelakaan lalu lintas.
5. Load faktor angkutan penumpang umum semakin menurun
6. Usia kendaraan angkutan umum yang lebih dari umur ekonomis
7. Belum tersedianya terminal barang di Kota Magelang.
8. Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku.
9. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih belum optimal.
10. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena parkir.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika yaitu:

1. Masih terdapat perbedaan persepsi dengan DPRD terkait indikator publikasi hasil kegiatan dewan. Fokus materi publikasi diharapkan hanya pada hasil kegiatan tidak pada proses pelaksanaan kegiatan. Upaya komunikasi sudah dilakukan dengan Ketua DPRD Kota Magelang agar kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator ini dapat diwujudkan pada tahun mendatang.
2. Diskominfo selaku OPD pelaksana pencapaian indikator persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah baik melalui radio maupun media cetak kesulitan dalam pengadaan materi publikasi. Upaya kerjasama dengan narasumber tokoh agama sudah dilaksanakan melalui Kantor Kemenag dan Forum Komunikasi Umat Beragama akan tetapi masih belum membuahkan hasil positif untuk materi agama Budha, Hindu, Konghuchu dan kepercayaan. Pelaksanaan publikasi melalui media cetak sebanyak 12 kali untuk 5 agama juga terkendala oleh jangka waktu terbit Majalah Dinamika setiap triwulan (4 kali dalam setahun) sebagai media cetak milik Pemerintah Kota Magelang.
3. Titik yang belum terealisasi cakupan WAN sebagian besar berlokasi di pinggir yang secara lokasi maupun spesifikasi membutuhkan teknik khusus sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan kebutuhan dana dalam upaya pencapaian target cakupan WAN kota.
4. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan komunikasi dan informatika tidak mencakup pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi, padahal secara aturan (PERDA) kajian izin penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Magelang masih melekat di Diskominfo. Secara kewenangan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Rekomendasi Izin Menara lebih dekat dengan penyelenggaraan penataan ruang prasarana, sarana, dan utilitas. Hal ini memerlukan kajian agar pelaksanaan penyelenggaraan menara telekomunikasi ke depan dapat dilakukan dengan tepat.
5. Operasional LPPL saat ini masih melekat dalam APBD dan belum ada pemasukan iklan, sehingga sepenuhnya masih bergantung pada anggaran daerah. Hingga saat ini belum ada kajian mengenai kelembagaan yang tepat terkait operasional LPPL.
6. Hingga saat ini belum ada dasar hukum integrasi aplikasi dan sistem informasi yang menjadi tugas Diskominfo sehingga hingga saat ini pengembangan aplikasi dan sistem informasi masih dilakukan secara mandiri oleh OPD.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

1. Modal yang terbatas yang menyebabkan volume usaha terbatas dan kurang bisa memelihara asetnya,
2. SDM pengelola yang kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan dan solidaritas antar anggota yang kurang terjalin,

Sedangkan permasalahan yang dihadapi UKM antara lain:

1. Rendahnya daya saing,
2. terbatasnya modal dan masih terbatasnya akses perbankan bagi UKM,

3. kurangnya wilayah pemasaran, sarana promosi produk, kemampuan akses usaha, kemampuan manajerial sumberdaya manusia pengelolanya,
4. kemampuan inovasi dan kreativitas, dan kemampuan penguasaan teknologi yang masih terbatas

2.3.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

1. Kurangnya informasi dan promosi terhadap potensi investasi yang ada di Kota Magelang;
2. kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor,
3. ketentuan hukum yang kurang konsisten (masih terdapat overlap antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain),
4. pelayanan pengurusan perijinan yang masih membutuhkan waktu lebih dari satu hari, serta terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menangani pelayanan pengurusan perijinan dan investasi di Kota Magelang.
5. masih rendahnya rasio penyerapan tenaga kerja

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga yaitu:

1. Ketatnya persaingan dengan daerah lain.
2. Kurangnya kompetisi olahraga yang berjenjang dan agenda kompetisi tidak menentu.
3. Lemahnya pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga.
4. Kurangnya penghargaan dan perlindungan terhadap atlet berprestasi berakibat terjadinya mutasi olahragawan berprestasi dari Kota Magelang ke daerah lain.
5. Fasilitas olahraga belum memadai dan memenuhi standar.
6. Rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan olahraga.
7. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah disebabkan rendahnya pengetahuan, ketrampilan, daya tangkal, kepedulian, keterbatasan akses dan kemitraan, serta lemahnya lembaga kepemudaan.
8. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda.
9. Lemahnya sistem informasi dan database pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
10. Kurangnya sarana prasarana bagi pemuda seperti gedung pemuda, pusat eksplorasi potensi, sekretariat pemuda, jejaring informasi dan komunikasi.

2.3.2.14 Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik yaitu:

1. Masih perlunya peningkatan ketersediaan data dasar dan data makro yang akurat dan up to date.
2. Masih adanya inkonsistensi dan validitas data dari Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya kerjasama antar Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan penyediaan data;
4. Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap unit kerja.
5. Masih terdapat data-data penting yang sulit didapatkan/dihitung secara akurat dan tepat waktu.
6. Belum efektifnya manajemen pengumpulan data dan sistem informasi data.
7. Masih terjadinya perbedaan data antar sumber-sumber data.

2.3.2.15 Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian yaitu:

1. Keterbatasan SDM persandian dalam hal kualitas maupun kuantitas
2. Infrastruktur jaringan belum cukup memadai
3. Fungsi persandian belum dipahami secara menyeluruh oleh birokrasi sebagai suatu fungsi teknis pemerintahan yang memberikan proteksi terhadap nilai kerahasiaan informasi pemerintahan
4. Masih ada beberapa tenaga persandian yang belum didiklat, kaderisasi SDM persandian perlu dilakukan.
5. Kurangnya pemahaman SDM di OPD tentang persandian.

2.3.2.16 Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan yaitu:

1. Cagar budaya belum terdokumentasikan dengan baik karena belum ada Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikasi dan mengakibatkan belum berjalannya Sistem Register Cagar Budaya
2. Belum adanya kesepahaman antara pemilik bangunan, pemerintah baik pusat maupun daerah, dan komunitas pemerhati dalam pengelolaan dan pengembangan cagar budaya.
3. Masih kurangnya perhatian terhadap kondisi dan pengembangan museum dan pusat informasi sejarah.
4. Masih kurangnya pengembangan dan promosi karya kreatif seniman lokal agar memiliki manfaat dan nilai ekonomi tinggi.
5. Belum adanya gedung kesenian yang dilengkapi sarana prasarana yang memadai untuk pentas seni.

6. Sangat terbatasnya dokumentasi sejarah dan legenda lokal, seiring makin berkurangnya narasumber sejarah.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Magelang tentang sejarah dan legenda kota Magelang.
8. Masih kurangnya jalinan komunikasi interaktif antara Kelompok Penghayat Kepercayaan dengan pemerintah. Kota Magelang.
9. Masih kurangnya pembinaan seni dan budaya bagi kaum muda
10. Budaya belum dipandang sebagai sarana pendidikan budi pekerti dan pembentukan karakter bangsa

2.3.2.17 Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan yaitu:

1. Perlunya optimalisasi untuk lebih meningkatkan minat baca di dalam masyarakat
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah).
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
4. Perpustakaan digital belum menjadi fokus program

2.3.2.18 Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan yaitu:

1. Belum optimalnya sistem kearsipan yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan;
2. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi kearsipan yang memadai.
3. Digitalisasi arsip belum menjadi fokus kebijakan

2.3.3 URUSAN PILIHAN

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan yaitu:

1. Rendahnya produksi perikanan Kota Magelang, sebagai akibat dari alih fungsi lahan perikanan menjadi perumahan, industri, dan fasilitas umum lainnya.
2. Belum adanya kelompok masyarakat perikanan yang bersertifikasi CBIB, CPIB dan Kelayakan Pengolahan.
3. Belum berkembangnya perikanan yang ramah lingkungan di Kota Magelang, sehingga merusak kelestarian dan mengganggu keamanan ekosistem air tawar.

4. Belum berkembangnya budidaya perikanan di lahan sempit (tidak terpakai) di Kota Magelang.
5. Belum optimalnya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pelaku utama perikanan (pembudidaya, pemasar dan pengolah)

2.3.3.2 Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata yaitu:

1. Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal, disebabkan belum optimalnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata promosi yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan masih relatif kecil.
2. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana kepariwisataan dan sumber daya manusia pengelola pariwisata.
4. Kurangnya kreativitas, kreasi, atraksi dan berbagai fasilitas pendukung destinasi pariwisata
5. Belum optimalnya penyelenggaraan even pariwisata yang dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang menarik dan atraktif serta berskala luas yang mampu menarik wisatawan berkunjung.
6. Masih lemahnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat masih belum terjalin dengan baik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata serta rendahnya partisipasi masyarakat.
7. TIC belum representatif.
8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Magelang sebagai Kota Jasa termasuk kecil.
9. Promosi dan informasi pariwisata belum cukup efektif.
10. Lemahnya daya dukung terwujudnya Desa Wisata dan obyek wisata yang memiliki daya tarik.
11. Kurangnya informasi terkait obyek wisata (sejarah/rincian obyek, rute/peta, fasilitas, keterkaitan antar obyek, dsb).
12. Kurangnya produk spesifik cenderamata.

2.3.3.3 Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah:

1. Pelaksanaan Agricultural Practices (GAP) yang masih sulit untuk diterapkan pada petani Kota Magelang karena petani kota Magelang sebagai penjual jasa atau penggarap sawah.

2. Kurangnya pendampingan dan monitoring evaluasi pasca pelatihan sehingga berdampak pada tidak dimanfaatkannya hasil pelatihan untuk meningkatkan taraf hidupnya, tetapi yang ada justru kecenderungan masyarakat untuk selalu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan tanpa sekalipun memanfaatkannya.
3. Banyaknya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian diperkotaan
4. Dalam penerapan teknologi belum dilaksanakan secara maksimal, petani penggarap sawah sebagian masih menggunakan alat manual / tradisional dan masih terbatasnya alat sehingga tidak maksimal dalam pengerjaannya.
5. Dengan tidak tercapainya produksi padi disini dikarenakan faktor iklim/cuaca yang tidak mendukung seperti adanya cuaca ekstrim, angin kencang yang menjadikan padi pada roboh sebelum dipanen walau tidak menutup kemungkinan produksi padi akan naik dan tetap akan tercapai pada pencapaian target yang akan datang.
6. Belum adanya sarana pemasaran pasar bunga di Kota Magelang sehingga belum optimal dalam pengembangan agribisnis tanaman hias di masyarakat Kota Magelang.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Urban Farming, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan urban farming dan belum berkembangnya pertanian perkotaan (Urban farming) dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan untuk usaha pertanian , peternakan dan perikanan.
8. Pola pikir petani yang praktis dalam budidaya tanaman dan menggunakan bahan kimia tanpa memikirkan efek terhadap lingkungan. Dalam hal ini pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Magelang masih bersifat konvensional, sehingga berdampak negative bagi lingkungan yang berupa kerusakan lingkungan air ,udara maupun makhluk hidup
9. Biaya produksi pertanian lebih tinggi dari nilai jual hasil produksi

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral yaitu:

1. Belum optimalnya upaya penghematan energi
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan

2.3.3.5 Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yaitu:

1. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
2. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
3. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah

2.3.3.6 Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu:

1. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
2. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
3. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
4. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.
5. Semakin menurunnya daya serap tenaga kerja pada sektor industri menengah.

2.3.3.7 Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah:

1. Penentuan jumlah transmigran yang dikirim dan lokasi penempatan masih menjadi kewenangan pusat yang tidak dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah baik propinsi maupun kab/kota
2. Rendahnya minat penduduk Kota Magelang untuk bertransmigrasi
3. Belum adanya terobosan dari Kota Magelang untuk mengikuti program transmigrasi swakarsa, dimana pemerintah daerah pengirim bertanggung jawab dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar hidup kepada calon transmigrans.
4. Pelatihan bagi calon transmigrans masih dilakukan secara klasikal belum mengarah pada minat dan bakat serta skill/kemampuan. Perlu adanya koordinasi dengan bidang pelatihan dan produktivitas untuk pelatihan teknis dan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam pemberian wawasan berwirausaha

2.3.4 FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

2.3.4.1 Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan adalah:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik. Sebagai contoh untuk Pokok pokok pikiran DPRD sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, diamanatkan untuk disampaikan kepada Eksekutif dalam hal ini Bappeda sejak Rancangan Awal RKPD Tahun rencana (Januari), namun demikian selama ini hal tersebut belum bisa terwujud. Sehingga capaian indikator Tingkat Ketersediaan Pokok Pikiran Dewan tepat waktu baru dapat tercapai 50%
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.

4. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global .

2.3.4.2 Fungsi Penunjang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan adalah:

1. Belum optimalnya sistem pajak online
2. Law enforcement belum sepenuhnya dijalankan, yaitu denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya
3. Belum optimalnya penilaian kembali atas tanah dan bangunan
4. Belum adanya peta zona nilai tanah tahun terbaru sebagai perhitungan nilai pasar
5. Belum optimalnya penggunaan instrumen Analisis Standar Biaya (ASB) perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran
6. Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis accrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
7. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah yang menangani pendapatan.

2.3.4.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan diklat sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum semuanya memuaskan
2. Pengisian jabatan ASN belum seluruhnya berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja
3. Layanan kepegawaian belum sepenuhnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
4. Belum optimalnya evaluasi layanan kepegawaian
5. Belum terpenuhinya sarana prasarana penunjang layanan kepegawaian
6. Penegakan disiplin pegawai belum didukung dengan penerapan sistem reward dan punishment yang terintegrasi

2.3.4.4 Fungsi Penunjang Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pengawasan yaitu:

1. Manajemen pengawasan lemah disebabkan pemeriksaan belum berbasis resiko, pengendalian internal dan quality assurance
2. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan
3. SPIP tidak efektif disebabkan belum optimalnya pembinaan dan peran Satgas SPIP
4. Pencegahan KKN lemah disebabkan rendahnya komitmen aparatur pemerintah daerah

2.3.4.5 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Masih minimnya jumlah MoU antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kementrian/LNDP/pembina terkait penelitian & pengembangan
2. Belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk hasil kreativitas dan inovasi masyarakat
3. Rendahnya proporsi SDM pengelola Kelitbangan
4. Kurang kuatnya dalam menjalani fungsi koordinasi
5. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di Kota Magelang
6. Belum terimplementasikannya online jurnal system di Kota Magelang
7. Belum adanya payung hukum yang mengatur Penguatan Sistem Inovasi Daerah
8. Belum optimalnya fungsi Forum Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Jarlitbangrap IPTEK)

2.4 ISU STRATEGIS

Dari hasil kajian terhadap kondisi Kota Magelang dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi maupun global, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Magelang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat

Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan..

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyandingkan:

- 1) Sasaran pokok pembangunan daerah dalam UU No 23 tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah;
- 2) RPJPD Kota Magelang 2005-2025, yaitu terwujudnya Kota Magelang: (i) sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai; (ii) masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; (iii) daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas; (iv) perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (v) good governance dan clean government dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran;
- 3) RTRW Kota Magelang 2011-2031: arah kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang kota;
- 4) Dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 yaitu (i) Kemananan dan Ketertiban; (ii) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; (iii) Pemerataan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah; (iv) Kepastian dan penegakan hukum, (v) Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan; (vi) Pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (vii) Revolusi Mental; (viii) Politik dan Demokrasi;
- 5) RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dengan isu: Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran, Pembangunan Infrastruktur, Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah;
- 6) Hasil evaluasi RPJMD Kota Magelang 2010-2015, ditemukan hal-hal yang masih harus dikejar dari penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 7) Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kota Magelang Tahun 2016-2021, yang mengusung isu: peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan perlunya peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama.

Kriteria yang digunakan untuk penentuan isu strategis yaitu: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan tugas dan tanggungjawan Pemerintah Daerah; (iii) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; (iv) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap

pembangunan daerah; (v) Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan (vi) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat isu strategis sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja
2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial
3. Penguatan reformasi birokrasi
4. Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah
5. Pengelolaan persampahan
6. Peningkatan koperasi, usaha mikro dan perdagangan
7. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah
8. Peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama
9. Penerapan prinsip-prinsip kota cerdas
10. Penguatan kemitraan dalam pembangunan daerah
11. Peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata
12. Penguatan implementasi Branding Magelang Kota Sejuta Bunga
13. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah
14. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
15. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
16. Peningkatan ketahanan pangan
17. Keadilan gender dan perlindungan anak
18. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
19. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Dari isu-isu strategis tersebut, dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok payung besar isu strategis Kota Magelang yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
- c. Penguatan reformasi birokrasi;
- d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
- g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

BAB III PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018 tidak dapat terlepas dari rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2018 sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2018. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Di sisi lain kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2018. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi tahun 2018 akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Magelang. Namun demikian seiring dengan pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 hingga triwulan kedua pelaksanaan terdapat beberapa deviasi yang mendasar yang melibatkan asumsi yang berbeda dalam perjalanan implementasi kebijakan keuangan daerah.

3.1 Kondisi Ekonomi Triwulan II Tahun 2018 dan Perkiraan Akhir Tahun 2018

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional Triwulan II Tahun 2018

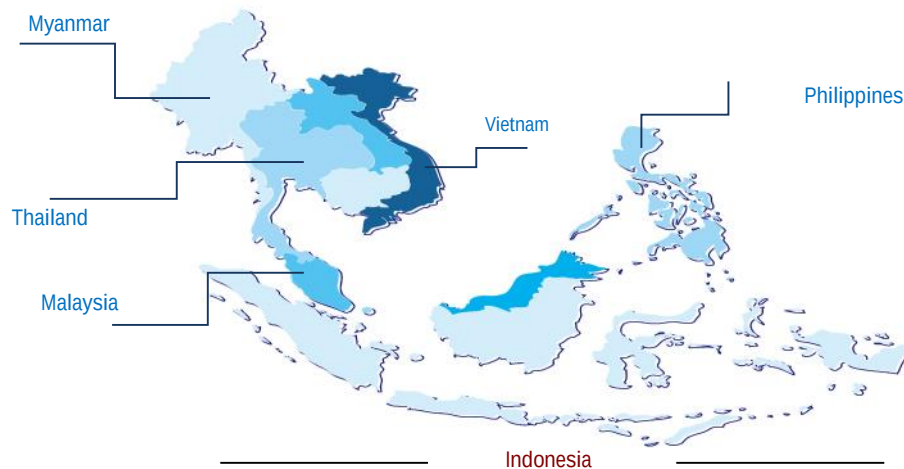
Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2017 sangat baik dengan progress capaian indikator makro yang terbilang signifikan. Hampir seluruh indikator makro menunjukkan posisi yang baik. Inflasi mengalami sedikit peningkatan di akhir tahun namun masih dalam batas wajar dan masuk dalam target yang ditetapkan.

Tabel 3-1
Capaian Indikator Makro Nasional, 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,88	5,02	5,07	5,06	2018 data Triwulan I (y-o-y)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,18	5,61	5,50	5,13	2018 data Februari
IPM (%)	69,55	70,18	70,81	-	
Inflasi (%)	3,35	3,02	3,61	3,12	2018 data Juni (y-o-y)
Indeks Gini (Maret)	0,408	0,397	0,393	-	
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,13	10,70	10,12	-	Data September

Sumber: Kementerian Keuangan RI
* Data resmi BPS

Fokus pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok tanah air terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memicu kenaikan investasi skala nasional. World Bank mengemukakan bahwa pertumbuhan investasi di Indonesia di tahun 2017 mencapai nilai tertinggi dalam empat tahun terakhir. Demikian pula dengan jumlah arus masuk investasi asing langsung yang mencapai nilai terbesar dalam tujuh tahun terakhir. Gebrakan yang baik dalam reformasi birokrasi juga menuai hasil yang signifikan dengan meningkatnya peringkat *ease of doing business* dari posisi 120 ke posisi 72 di tahun 2017. Kabar gembira juga muncul dari naiknya peringkat utang jangka panjang dalam mata uang asing dan lokal menjadi BBB dengan outlook stabil. Stabilitas makro ekonomi dari sisi moneter juga terjaga dengan baik sepanjang tahun 2017. Nilai tukar terjaga dengan volatilitas kurs pada kisaran 3%.



Gambar 3-1
Estimasi dan Forecast Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ASEAN
Sumber: World Bank

Kemiskinan tercatat memiliki tren menurun. Sampai dengan September 2017 persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 10,12% atau 26,58 juta jiwa. Angka ini menurun dari posisi Maret 2017 dengan pengentasan kemiskinan sebesar hampir 1,19 juta penduduk. Pendapatan juga mengalami distribusi yang lebih merata dengan tren menurun sejak tahun 2014. Capaian indeks gini Indonesia pada September 2017 sebesar 0,391, turun 0,002 poin dari Maret 2017. Kondisi ekonomi yang terkendali juga berimbas pada menguatnya Rupiah di awal tahun 2018.

Tabel 3-2
Target Makro Nasional Tahun 2018 dan Realisasi Semester I 2018

Indikator Makro	Capaian 2017	Target APBN 2018	Realisasi Sampai Semester I 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,4	5,06
Inflasi (%)	3,61	3,5	3,12
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	13.384	13.400	14,409
Harga Minyak (US\$/barrel)	50	48	70,36

Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	801	800	771
Lifting gas (ribu barrel/hari)	1.129	1.200	1,152

Sumber: diolah dari berbagai sumber

3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2018 Triwulan II

Sampai dengan akhir tahun 2017 BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,27% dengan tingkat inflasi sampai dengan akhir tahun cukup rendah di angka 3,71%. Pemerataan pendapatan membaik meski dengan penurunan indeks gini yang cukup lambat. Sampai dengan triwulan I 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus menguat dengan capaian sebesar 5,41%.

Jumlah penduduk miskin pada September 2017 mencapai 4,197 juta jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 337.657. Secara porsi, besarnya persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2017 (12,23%) masih lebih tinggi dari persentase pada skala nasional dan menduduki peringkat ke-13 tertinggi se-Indonesia setelah DI Yogyakarta (12,36%). Pada skala Kabupaten/Kota posisi Maret 2017 persentase penduduk miskin terbesar berada di Kabupaten Wonosobo, Kebumen dan Brebes. Mayoritas penduduk miskin di kantong kemiskinan terbesar di Jawa Tengah adalah berasal dari pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian.

4

Tabel 3-3
Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	5,28	5,27	5,41	2018 data Triwulan I (y-o-y)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,99	4,63	4,57	-	
IPM (%)	69,49	69,98	70,52	-	
Inflasi (%)	2,73	2,36	3,71	2,72	2018 data Juni
Indeks Gini (Maret)	0,382	0,366	0,365	-	
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,58	13,27	12,23	-	Data September

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

TPT di Jawa Tengah mampu turun di tahun 2017. Dengan total angkatan kerja sebanyak 18,016 juta jiwa, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih ditemui sebesar 823.938 jiwa atau mencapai 4,57% dari total angkatan kerja. TPT tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 8,19% sedangkan wilayah dengan TPT terkecil adalah Kabupaten Semarang yang hanya mencapai 1,78%.

3.1.3 Deskripsi Umum Prediksi Perekonomian Kota Magelang Tahun 2017-2018

Berdasarkan uraian kinerja makro ekonomi dan sosial dari hasil pembangunan yang telah dicapai Pemerintah Kota Magelang di tahun 2017 sebagaimana diuraikan dalam Bab II pada dokumen ini, maka sub bab ini akan membahas outlook kondisi ekonomi Kota Magelang sampai dengan akhir tahun 2018 dari beberapa indikator makro pada Tabel 3.4.

Tabel 3-4
Realisasi dan Prediksi Capaian Indikator Makro Kota Magelang, 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	5,11	5,17	5,19	4,99-5,39	2017-2018 prediksi (deviasi $\pm 0,40\%$)
TPT (%)	6,43	na	6,68	5,77	2018 prediksi
IPM (%)*	76,39	77,16	77,84	78,56	2018 prediksi
Inflasi (%)*	2,70	2,25	3,90	3,26-4,23	2018 prediksi
Indeks Gini*	0,340	0,325-0,340	0,314-0,340	0,312-0,340	2016-2018 prediksi
Persentase Penduduk Miskin (%)*	9,05	8,79	8,75	8,32	2011-2016 data September, 2017 data Maret 2018 prediksi (deviasi $\pm 0,71$)

Kota Magelang, 2018
Prediksi Indikator Bertanda Bintang oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018
Prediksi TPT oleh Pusdatin Naker, 2017

3.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto

3.1.3.1.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Besarnya PDRB Kota Magelang atas dasar harga berlaku di tahun 2018 diprediksi tumbuh positif 7,49%. Dengan komposisi peran lapangan usaha yang cenderung sama dari tahun ke tahun diprediksi beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum antara lain adalah: Industri Pengolahan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Perekonomian masih ditopang kokoh oleh sektor-sektor andalan yaitu Industri Pengolahan (16,65%), Konstruksi (16,75%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,81%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11,41%).

Tabel 3-5
Prediksi PDRB Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2018

LAPANGAN USAHA	2018***
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146.733,01
Industri Pengolahan	1.350.081,12
Pengadaan Listrik dan Gas	22.293,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.307,93
Konstruksi	1.358.571,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.120.227,80
Transportasi dan Pergudangan	539.086,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	473.799,62
Informasi dan Komunikasi	401.070,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	407.474,95
Real Estate	251.447,95
Jasa Perusahaan	31.390,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	924.920,40
Jasa Pendidikan	664.042,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	235.068,85
Jasa lainnya	173.084,68
PDRB	8.109.601,36

Sumber: Prediksi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

3.1.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

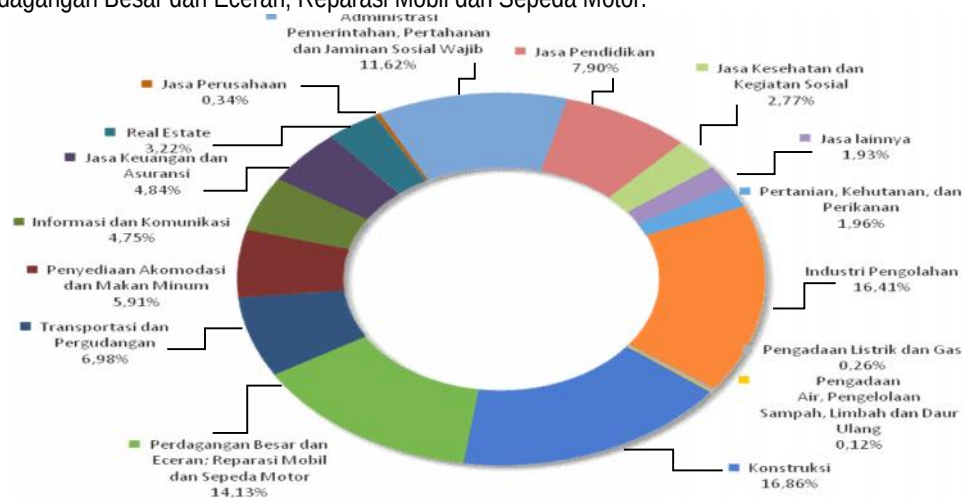
Pada tahun 2018 dengan asumsi perolehan PDRB adhb sebesar 8,110 triliun Rupiah, perekonomian riil Kota Magelang diprediksi mencapai 4,99%-5,39%. Prediksi ini cukup optimis sejalan dengan target RPJMD pada tahun berkenaan yang ditetapkan pada range 4,79%-5,29%. Secara riil PDRB diprediksi mencapai 6,118 triliun Rupiah. Dari sisi lapangan usaha beberapa sektor diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti Jasa Pendidikan (11,33%), Informasi dan Komunikasi (9,28%), Jasa Perusahaan (8,11%) dan Transportasi dan Pergudangan (7,16%). Dengan asumsi prediksi tersebut tercapai, maka jika dibandingkan dengan data proyeksi penduduk tengah tahun Kota Magelang di tahun 2018 sebesar 121.872, besarnya PDRB per kapita Kota Magelang diprediksi tumbuh 1,7% (adhb) mencapai 59,92 juta/tahun.

3.1.3.1.3 Pemerataan Pendapatan

Keterbatasan data resmi yang dipublikasi BPS menjadikan indikator pemerataan pendapatan yang diproksi melalui indeks gini tidak tersedia dengan historis yang mencukupi. Data terakhir di tahun 2015 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Magelang masuk dalam klasifikasi ketimpangan sedang dengan indeks sebesar 0,340. Pada tahun-tahun ke depan pemerataan tersebut diprediksi makin baik dengan indeks di tahun 2018 pada interval 0,312-0,340 dengan kecenderungan menurun.

3.1.3.1.4 Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB

Komposisi peran lapangan usaha dalam perekonomian Kota Magelang tahun 2018 diprediksi masih cenderung stagnan dengan dominasi nilai tambah bruto (NTB) dari sektor Konstruksi, Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.



Sumber: Prediksi oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Gambar 3-2

Prediksi Struktur Perekonomian Kota Magelang, Tahun 2018

3.1.3.2 Perkembangan Harga (Inflasi)

Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2017 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir November 2017 inflasi yang terjadi sebesar 0,16% (3,22% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 3,19%) dan nasional (yoy 3,30%). Akhir Desember 2017 terdapat kenaikan IHK mencapai 129,05 menyebabkan inflasi 0,93% (3,9% year on year). Laju inflasi yang terjadi pada posisi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (3,71%) dan Nasional (3,61%). Hal tersebut merupakan rentetan dampak dari kenaikan harga beras di akhir tahun yang mengakibatkan kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 3,96%.

Pengendalian harga komoditas pokok di Kota Magelang dalam semester pertama tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik dengan perkembangan harga dari bulan ke bulan yang tidak begitu bergejolak dan capaian inflasi yang rendah. Deflasi sempat terjadi di bulan April sebesar 0,05%. Menyambut bulan Ramadhan tahun 2018 gejolak harga di beberapa pasar di Kota Magelang juga masih terjaga dengan baik. Pada akhir Mei tercatat Kota Magelang hanya mengalami inflasi yang sangat rendah sebesar 0,02% (yoy 2,8%).

Tabel 3-6
Inflasi Kota Magelang, Januari-Mei 2018

Bulan	Inflasi YoY	IHK	Inflasi Bulanan
Jan 08	3,37	129,96	0,71
Feb 08	3,23	130,42	0,35
Mar 08	3,50	130,64	0,17
Apr 08	3,37	130,58	-0,05
Mei 08	2,80	130,61	0,02

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018

3.1.3.3 Ekspor dan Investasi

Neraca perdagangan negatif memang tidak dapat dihindari di Kota Magelang mengingat keterbatasan sumber daya dan luas wilayah. Namun demikian diprediksi ekspor (perdagangan ke luar wilayah) Kota Magelang di tahun 2018 mampu tumbuh mengimbangi bahkan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan impor. Celah yang tercipta dalam pos ekspor netto terhadap PDRB diprediksi makin mengecil dengan perolehan nilai ekspor diprediksi 3,968 triliun rupiah (deviasi 0,48%) di tahun 2018 dengan outlook meningkat stabil. Sementara itu Investasi dari pendekatan PMTB di tahun 2018 diprediksi tumbuh 6,46% dengan nominal mencapai 3,921 triliun rupiah.

3.1.4 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2018

3.1.4.1 Tantangan Perekonomian Kota Magelang 2017

Berdasarkan dinamika nasional, regional yang mempengaruhi kinerja dan kondisi perekonomian Kota Magelang masih akan menghadapi tantangan yang semakin tidak ringan pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

- a. Menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan khususnya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor basis dan optimasi lapangan usaha potensial ekspor.
- b. Meningkatkan daya saing lokal dalam menghadapi kompetisi bebas dalam segala bidang khususnya dalam meningkatkan sektor ekonomi makro.
- c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
- d. Mengoptimalkan dan meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses pada infrastruktur dasar.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik.
- f. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta penjangkaran riset inovatif untuk meningkatkan daya saing Kota Magelang.
- g. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan.
- h. Meningkatkan program pro-poor dan pemerataan pembangunan untuk memperkecil kesenjangan dalam menekan kemiskinan.
- i. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.
- j. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan variasi infrastruktur yang berkualitas.
- k. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Magelang.
- l. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Magelang sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- m. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
- n. Mengelola inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

3.1.4.2 Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2018

Berdasar kondisi historis dan penetapan statistik indikator makro yang telah diprediksi sebelumnya, maka prospek perekonomian Kota Magelang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi tumbuh sekitar 4,99%-5,39%.
- b. Inflasi diperkirakan pada kisaran angka 3,26-4,23% kecenderungan menurun.
- c. Laju pertumbuhan penduduk diprediksi terkendali pada angka 0,262%.
- d. PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan mencapai Rp 8,109 triliun (deviasi $\pm 0,68\%$).
- e. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp. 5,539 juta per bulan (d disesuaikan dengan asumsi prediksi pertumbuhan PDRB).

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal dan terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian. Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran-besaran belanja dalam APBD.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal dari pusat ke daerah, maka pemerintah pusat melakukan Kebijakan Desentralisasi Fiskal ke Daerah dengan maksud untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Pelaksanaan Kebijakan Fiskal juga merupakan salah satu upaya Pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan dana-dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah untuk kemudian dibelanjakan / diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja.
- d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ada dua hal penting yang perlu terus dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal seyogyanya menjadikan salah satu pemacu pemerintah Kota Magelang dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2018 di Kota Magelang diarahkan untuk:

- a. Melakukan sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kota Magelang dengan Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Magelang,
- b. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya (diutamakan urusan wajib dan urusan pilihan),
 - a. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah,
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan,

- c. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termajinalkan) yang bersumber dari APBD maupun kemitraan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per Kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain:
- 1) Meningkatkan SDM Kota Magelang dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk.
 - 2) Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 3) Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.
- d. Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal guna mendukung program Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Implementasi Masterplan Smart City, dan Sustainable Development Goals.

6.1.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam sebagai berikut:

Tabel 3-7
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2015 - 2018
(dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	APBD TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	186,677,410,081	220,315,848,702	233,557,714,356	217,823,794,000	225,315,532,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	26,185,301,675	25,974,837,133	31,206,960,485	30,096,800,000	30,096,800,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,999,474,592	6,663,308,913	6,243,021,736	4,780,203,000	4,960,300,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,598,774,537	6,182,279,953	7,711,404,121	7,458,617,000	8,693,811,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	146,893,859,277	181,495,422,703	188,396,328,014	175,488,174,000	181,564,621,000
1.2	Dana Perimbangan	462,804,716,465	567,636,707,545	553,115,007,612	582,806,750,000	583,609,549,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	18,772,034,465	30,333,059,082	26,685,769,289	29,517,443,000	30,321,942,000
1.2.2	DAU	418,257,922,000	447,909,575,000	440,041,244,000	440,041,244,000	440,041,244,000
1.2.3	DAK	25,774,760,000	89,394,073,463	86,387,994,323	113,248,063,000	113,246,363,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	131,853,672,963	52,090,070,278	122,853,140,952	82,128,757,000	93,150,056,000
1.3.1	Hibah	0	0	24,050,844,059	16,768,200,000	18,268,200,000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	36,869,367,174	37,179,177,579	41,855,667,000	47,110,557,000	53,555,256,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	79,988,204,000	0	47,039,466,000	18,250,000,000	18,250,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	14,964,620,257	14,146,495,000	9,701,162,500	0	0
1.3.6	Pendapatan lainnya	31,481,532	764,397,699	206,001,393	0	0
	PENDAPATAN DAERAH	781,335,799,509	840,042,626,525	909,525,862,920	882,759,301,000	902,075,137,000

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2015- 2017 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang APBD Kota Magelang TA. 2018

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Prediksi kemampuan keuangan daerah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Daerah diperkirakan naik dengan interval kenaikan diasumsikan antara 3 – 4 %.
- b. Kenaikan Retribusi Jasa Umum, adanya kenaikan dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Pasar: Pelataran, dan Kios.
- c. Kenaikan Retribusi Jasa Usaha, adanya kenaikan dari: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik, dengan adanya kenaikan dari: Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.
- e. Dana Perimbangan mengalami kenaikan: Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak naik, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan NO. 30/PMK.07/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 7 Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 ttg Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Hibah menyesuaikan dengan adanya Surat Menteri Keuangan republik Indonesia No. S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air minum Perkotaan dari sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2018 kepada Pemerintah Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya naik menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang APBD 2018.

6.1.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Sementara, sejauh ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 60 persen dari total pendapatan APBD, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama, khususnya setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2017 meningkat dan diharapkan tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Selama kurun waktu 2012-2017 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-8
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Selama Tahun 2012-2017 (dalam rupiah)

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
01.	2012	91,314,601,697.00	397,902,089,711.00	90,500,755,421.00	579,717,446,829.00
02.	2013	107,739,838,961.00	431,113,288,290.00	95,906,857,889.00	634,759,985,140.00
03.	2014	164,927,631,230.00	459,785,205,171.00	110,403,278,006.00	735,116,114,407.00
04.	2015	186,677,410,081.00	462,804,716,465.00	131,853,672,963.00	781,335,799,509.00
05.	2016	220,315,848,702.00	567,636,707,545.00	52,090,070,278.00	840,042,626,525.00
06.	2017	233,557,714,356.00	553,115,007,612.00	122,853,140,952.00	909,525,862,920.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012 – 2017 merupakan realisasi anggaran.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Magelang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Magelang.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

6.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1, angka 18 dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6, ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1), Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- (i) Pajak Daerah;
- (ii) Retribusi Daerah;
- (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), masuk dalam komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peranan pajak dan retribusi daerah sangat penting dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, oleh karena itu pemerintah Kota Magelang harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada studi potensi yang sudah dibuat, bekerja sama dengan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang.
- b. Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- c. Melakukan Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- d. Memperkuat proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- e. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung.
- f. Penggunaan e-tax (Pajak Online) dalam pelayanan pajak daerah, untuk mempercepat, mempermudah dan menyederhanakan prosedur melalui sarana teknologi informasi berbasis "web service" sehingga Wajib pajak dapat mengakses pembayaran pajak dengan mudah, murah dan cepat.
- g. Meningkatkan pengawasan, dengan melakukan audit wajib pajak sebagai dasar optimalisasi penerimaan pendapatan melalui laporan keuangan.
- h. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- i. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2012-2017 di Kota Magelang, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-9
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2012-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi (%)
01.	2012	91,314,601,697.00	579,717,446,829.00	15.75
02.	2013	107,739,838,961.00	634,759,985,140.00	16.97
03.	2014	164,927,631,230.00	735,116,114,407.00	22,44
04.	2015	186,677,410,081.00	781,335,799,509.00	23,89
05.	2016	220,315,848,702.00	840,042,626,525.00	26,23
06.	2017	233,557,714,356.00	909,525,862,920.00	25,68

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012 - 2017 merupakan realisasi anggaran.

Gambaran secara rinci obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-10
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2012-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi (%)
01.	2012	12,546,890,184.00	91,314,601,697.00	13,74
02.	2013	18,829,673,340.00	107,739,838,961.00	17,48
03.	2014	22,107,435,949.00	164,927,631,230.00	13,40
04.	2015	26,185,301,675.00	186,677,410,081.00	14,03
05.	2016	25,974,837,133.00	220,315,848,702.00	11,79
06.	2017	31,206,960,485.00	233,557,714,356.00	13,36

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-11
Kontribusi Retribusi Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2012-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi (%)
01.	2012	6,969,707,010.00	91,314,601,697.00	7,63
02.	2013	7,357,207,773.00	107,739,838,961.00	6,83
03.	2014	6,058,580,948.00	164,927,631,230.00	3 ,67

No.	Tahun	Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi (%)
04.	2015	6,999,474,592.00	186,677,410,081.00	3,75
05.	2016	6,663,308,913.00	220,315,848,702.00	3,02
06.	2016	6,243,021,736.00	233,557,714,356.00	2,67

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-12
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi (%)
01.	2012	5,017,783,848.00	91,314,601,697.00	5,50
02.	2013	5,872,500,274.00	107,739,838,961.00	5,45
03.	2014	6,242,609,307.00	164,927,631,230.00	3,79
04.	2015	6,598,774,537.00	186,677,410,081.00	3,53
05.	2016	6,182,279,953.00	220,315,848,702.00	2,81
06.	2017	7,711,404,121.00	233,557,714,356.00	3,30

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-14
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2012-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi (%)
01.	2012	66,780,220,655.00	91,314,601,697.00	73,13
02.	2013	75,680,457,574.00	107,739,838,961.00	70,24
03.	2014	130,519,005,026.00	164,927,631,230.00	79,14
04.	2015	146,893,859,277.00	186,677,410,081.00	78,69
05.	2016	181,495,422,703.00	220,315,848,702.00	82,38

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi (%)
06.	2017	188,396,328,014.00	233,557,714,356.00	80,66

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2017 merupakan realisasi anggaran.

Pajak Daerah menduduki posisi yang paling penting peranannya dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, meskipun yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, namun sebagian besar merupakan pendapatan BLUD yang penggunaannya adalah untuk operasional BLUD itu sendiri. Oleh karena itu Peran Pajak Daerah di Kota Magelang terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Magelang sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari realisasi pendapatan Pajak Daerah di Kota Magelang selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun 2013-2017 besarnya terus mengalami kenaikan meskipun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah naik turun (fluktuatif), hal ini dikarenakan kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terus mengalami kenaikan utamanya berasal dari Pendapatan BLUD, diharapkan tahun-tahun berikutnya akan tetap naik, baik besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

6.1.2.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2017) rata-rata berkisar 60 - 70 persen dari total Pendapatan Daerah. Di tahun 2017 proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun adalah yang terkecil, hal ini menunjukkan bahwa proporsi pendapatan asli daerah semakin meningkat Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-15
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2012-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi (%)
01.	2012	397,902,089,711.00	579,717,446,829.00	68.64

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi (%)
02.	2013	431,113,288,290.00	634,759,985,140.00	67,92
03.	2014	459,785,205,171.00	735,116,114,407.00	62,55
04.	2015	462,804,716,465.00	781,335,799,509.00	59,23
05.	2016	567.636.707.545.00	840.042.626.525.00	67,57
06.	2017	553,115,007,612.00	909,525,862,920.00	60,81

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Gambaran Dana Perimbangan berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-16
Kontribusi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2012-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi (%)
01.	2012	28,736,086,711.00	397,902,089,711.00	7,22
02.	2013	24,609,560,290.00	431,113,288,290.00	5,71
03.	2014	20,207,973,171.00	459,785,205,171.00	4,40
04.	2015	18,772,034,465.00	462,804,716,465.00	4,06
05.	2016	30.333.059.082.00	567.636.707.545.00	5,34
06.	2017	26,685,769,289.00	553,115,007,612.00	4,82

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-17
Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2012-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi (%)
01.	2012	348,498,193,000.00	397,902,089,711.00	87,58
02.	2013	385,859,241,000.00	431,113,288,290.00	89,50
03.	2014	417,211,449,000.00	459,785,205,171.00	90,74

No.	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi (%)
04.	2015	418,257,922,000.00	462,804,716,465.00	90,37
05.	2016	447.909.575.000.00	567.636.707.545.00	78,91
06.	2017	440,041,244,000.00	553,115,007,612.00	79,56

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-18
Kontribusi Dana Alokasi Khusus
terhadap Dana Perimbangan Tahun 2012-2017
(dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2012	20,667,810,000.00	397,902,089,711.00	5,19
02.	2013	20,644,487,000.00	431,113,288,290.00	4,79
03.	2014	22,365,783,000.00	459,785,205,171.00	4,86
04.	2015	25,774,760,000.00	462,804,716,465.00	5,57
05.	2016	89,394,073,463.00	567.636.707.545.00	15,75
06.	2017	86,387,994,323.00	553,115,007,612.00	15,62

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

6.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Magelang bersumber dari:

- (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- (iii) Dana Penyesuaian; dan
- (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Magelang masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Magelang.

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kota Magelang selama kurun waktu tahun 2011 – 2014 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan APBD yang mengalami kenaikan. gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-19
Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi (%)
01.	2012	90,500,755,421.00	579,717,446,829.00	15.61
02.	2013	95,906,857,889.00	634,759,985,140.00	15.11
03.	2014	110,403,278,006.00	735,116,114,407.00	15.02
04.	2015	131,853,672,963.00	781,335,799,509.00	16.88
05.	2016	52,090,070,278.00	840,042,626,525.00	6,20
06.	2017	122,853,140,952.00	909,525,862,920.00	13,51

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Gambaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-20
Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2012-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2012	21,818,681,421.00	90,500,755,421.00	24,11
02.	2013	19,546,928,516.00	95,906,857,889.00	20,38
03.	2014	26,421,159,000.00	110,403,278,006.00	23,93

No.	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
04.	2015	36,869,367,174.00	131,853,672,963.00	27,96
05.	2016	37.179.177.579.00	52.090.070.278.00	71,37
06.	2017	41,855,667,000.00	122,853,140,952.00	34,07

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-21
Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2012-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan yang Daerah Sah (Rupiah)	Proporsi (%)
01.	2012	46,539,535,000.00	90,500,755,421.00	51,42
02.	2013	63,049,373,000.00	95,906,857,889.00	65,74
03.	2014	74,974,179,000.00	110,403,278,006.00	67,91
04.	2015	79,988,204,000.00	131,853,672,963.00	60,66
05.	2016	0	52.090.070.278.00	0,00
06.	2017	47,039,466,000.00	122,853,140,952.00	38,29

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-22
Kontribusi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2012-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi (%)
01.	2012	22,142,539,000.00	90,500,755,421.00	24,47
02.	2013	13,310,556,373.00	95,906,857,889.00	13,88
03.	2014	9,007,940,006.00	110,403,278,006.00	8,16
04.	2015	14,964,620,257.00	131,853,672,963.00	11,35

No.	Tahun	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi (%)
05.	2016	14.146.495.000.00	52.090.070.278.00	27,16
06.	2017	9,701,162,500.00	122,853,140,952.00	7,90

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-23
Kontribusi Pendapatan Lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Pendapatan Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi (%)
01.	2012	0	90,500,755,421.00	0,00
02.	2013	0	95,906,857,889.00	0,00
03.	2014	0	110,403,278,006.00	0,00
04.	2015	31,481,532.00	131,853,672,963.00	0,02
05.	2016	764,397,699.00	52,090,070,278.00	1,47
06.	2017	206,001,393.00	122,853,140,952.00	0,17

Dari berbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2015-2019, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.24
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2015 - 2018
(dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	APBD TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
1.1	Pendapatan Asli Daerah	186,677,410,081	220,315,848,702	233,557,714,356	217,823,794,000	225,315,532,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	26,185,301,675	25,974,837,133	31,206,960,485	30,096,800,000	30,096,800,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,999,474,592	6,663,308,913	6,243,021,736	4,780,203,000	4,960,300,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,598,774,537	6,182,279,953	7,711,404,121	7,458,617,000	8,693,811,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	146,893,859,277	181,495,422,703	188,396,328,014	175,488,174,000	181,564,621,000
1.2	Dana Perimbangan	462,804,716,465	567,636,707,545	553,115,007,612	582,806,750,000	583,609,549,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	18,772,034,465	30,333,059,082	26,685,769,289	29,517,443,000	30,321,942,000
1.2.2	DAU	418,257,922,000	447,909,575,000	440,041,244,000	440,041,244,000	440,041,244,000

1.2.3	DAK	25,774,760,000	89,394,073,463	86,387,994,323	113,248,063,000	113,246,363,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	131,853,672,963	52,090,070,278	122,853,140,952	82,128,757,000	93,150,056,000
1.3.1	Hibah	0	0	24,050,844,059	16,768,200,000	18,268,200,000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	36,869,367,174	37,179,177,579	41,855,667,000	47,110,557,000	53,555,256,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	79,988,204,000	0	47,039,466,000	18,250,000,000	18,250,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	14,964,620,257	14,146,495,000	9,701,162,500	0	0
1.3.6	Pendapatan lainnya	31,481,532	764,397,699	206,001,393	0	0
	PENDAPATAN DAERAH	781,335,799,509	840,042,626,525	909,525,862,920	882,759,301,000	902,075,137,000

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2015- 2017 merupakan realisasi anggaran.

1. Perda tentang APBD Kota Magelang TA. 2018

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2012-2017, maka diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang dapat meningkat lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut::

1. Intensifikasi PAD melalui:

- Optimalisasi system pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa tapping box (alat perekam transaksi) atau instrument lain yang dapat digunakan untuk merekam trnsaksi dalam rangka meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
- Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar kepada wajib pajak.
- Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
- Optimalisasi SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
- Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
- Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
- Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.

2. Ekstensifikasi melalui:

- a. Perubahan tarif pajak daerah dan tariff retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
- b. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
- c. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah.

6.1.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

6.1.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Magelang tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Magelang tidak menganggarkan belanja subsidi.
- d. Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- e. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/ pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Magelang tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

6.1.3.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja ini merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang

yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Yang termasuk dalam kategori belanja barang/jasa adalah Belanja Pengadaan barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

- c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :
1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
 2. pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 3. perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
 4. pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap/asset lainnya.

Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kota Magelang Tahun 2012-2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-25
Struktur Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)
01.	2012	296,610,099,484.00	239,738,589,918.00	536,348,689,402.00
02.	2013	313,072,355,985.00	317,778,361,372.00	630,850,717,357.00
03.	2014	340,526,165,129.00	341,697,705,278.00	682,223,870,407.00
04.	2015	357,657,431,281.00	378,683,006,469.00	736,340,437,750.00
05.	2016	350,201,266,658.00	521,657,863,945.00	871,859,130,603.00
06.	2017	284,175,957,991.00	595,231,223,156.00	879,408,181,147.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3-26
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Magelang

Tahun 2012-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Proporsi (%)
01.	2012	287,833,633,184.00	536,348,689,402.00	53.67
02.	2013	304,116,683,985.00	630,850,717,357.00	48.21
03.	2014	333,318,007,729.00	682,223,870,407.00	48.86
04.	2015	345,555,340,681.00	736,340,437,750.00	46,93
05.	2016	344,173,396,158.00	871,859,130,603.00	39,48
06.	2017	270,261,944,831.00	879,408,181,147.00	30,73

Sumber : 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2012-2017 merupakan realisasi anggaran.

Penganggaran Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (core competence), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Gambaran Prediksi Belanja di Kota Magelang selama kurun waktu 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-27
Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2015 - 2018
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	APBD TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	357,657,431,281	350,201,266,658	284,176,957,991	326,136,404,000	340,965,418,000
	Belanja Pegawai	345,555,340,681	344,173,396,158	270,261,944,831	310,620,578,000	308,798,097,000

Belanja Bunga	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	9,688,650,000	1,486,806,000	8,297,155,620	9,181,194,000	11,181,194,000
Belanja Bantuan Sosial	866,950,000	3,192,264,000	4,926,411,000	3,556,255,000	7,806,255,000
Belanja Bantuan Keuangan	479,575,600	641,828,500	560,702,000	560,703,000	560,703,000
Belanja Tak Terduga	1,066,915,000	706,972,000	130,744,540	2,217,674,000	12,619,168,000
2.2 BELANJA LANGSUNG	378,683,006,469	521,657,863,945	595,231,223,156	643,080,477,000	724,817,709,000
BELANJA DAERAH	736,340,437,750	871,859,130,603	879,408,181,147	969,216,881,000	1,065,783,127,000
Surplus/Defisit	44,995,361,759	-31,816,504,078	30,117,681,773	-75,457,580,000	-163,707,990,000

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2015- 2017 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang APBD Kota Magelang TA. 2018

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang tahun 2018 masih tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.

4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang secara umum seperti yang disebutkan di atas, pada tahun 2018 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Memenuhi pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah sesuai amanat PP 48 tahun 2008 dan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10%.
3. Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perhitungan gaji untuk tiap tahunnya ditambah acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib dan urusan pilihan terlebih dahulu.
5. Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diutamakan untuk memenuhi/mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan fasilitas umum pemukiman.
6. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun.
7. Melaksanakan kegiatan yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota magelang dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. yaitu program kegiatan yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan E-Government secara Komprehensif dan Integral: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.

2.1.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Dana Bergulir; dan
8. Penerimaan Hasil Penarikan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pemberian Dana Bergulir.

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2014 -2017 selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-28
Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang
Tahun 2015-2018 (dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	APBD TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	357,657,431,281	350,201,266,658	284,176,957,991	326,136,404,000	340,965,418,000
	Belanja Pegawai	345,555,340,681	344,173,396,158	270,261,944,831	310,620,578,000	308,798,097,000
	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
	Belanja Hibah	9,688,650,000	1,486,806,000	8,297,155,620	9,181,194,000	11,181,194,000
	Belanja Bantuan Sosial	866,950,000	3,192,264,000	4,926,411,000	3,556,255,000	7,806,255,000
	Belanja Bantuan Keuangan	479,575,600	641,828,500	560,702,000	560,703,000	560,703,000
	Belanja Tak Terduga	1,066,915,000	706,972,000	130,744,540	2,217,674,000	12,619,168,000
2.2	BELANJA LANGSUNG	378,683,006,469	521,657,863,945	595,231,223,156	643,080,477,000	724,817,709,000
	BELANJA DAERAH	736,340,437,750	871,859,130,603	879,408,181,147	969,216,881,000	1,065,783,127,000
	Surplus/Defisit	44,995,361,759	-31,816,504,078	30,117,681,773	-75,457,580,000	-163,707,990,000

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2015- 2017 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang APBD Kota Magelang TA. 2018

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2018 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2018 diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah
- 4.1.1 Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 merupakan penjabaran atas pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun Kedua, yaitu perencanaan tahun 2017 untuk dilaksanakan pada tahun 2018. Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

SEJAH“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT TERA DAN RELIGIUS”.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut adalah :

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV.1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kota Jasa yang Modern dan Cerdas	Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada.Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik:(a) Masyarakat sejahtera dalam financial;(b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum);(c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya). Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) Smart Governance yaitu: pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) Smart infrastructure yaitu:pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) Smart Economy, yaitu: pengembangan city branding, pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) Smart environment yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) Smart people yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.
Sejahtera	Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju

UNSUR VISI	PENJELASAN
Religius	masyarakat yang berdaya dan mandiri. Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota asyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

4.1.2 Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas, profesionalitas, integritas, produktivitas, responsifitas, dan etos kerja aparatur di jajaran Pemerintah Kota Magelang dengan cara melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan yang mencakup: (a) Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (b) Tatalaksana (Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance); (c) Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan); (d) Sumber daya manusia aparatur (SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (e) Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN); (f) Akuntabilitas (Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi); (g) Pelayanan Publik (Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha); dan (h) Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (culture set) (Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan bahasa budaya kerja).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (penggunaan internet) di lingkungan pemerintah dan masyarakat, maka upaya reformasi birokrasi juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana teknologi sebagai alat untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di Kota Magelang. Pengembangan dan aplikasi E-Government melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah (seperti Wide Area Network, Internet, Mobile Computing, dan sebagainya) sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan guna mendukung jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan TI akan memungkinkan pemerintah untuk: (a) mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan dalam suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, tepat, bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi (Good Corporate Governance); (b) memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan; dan (c) mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Pada aspek organisasi perlu dilakukan langkah-langkah penguatan yang meliputi: struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi. Selain itu, perlu pula dilakukan pembenahan terhadap sistem, yang terdiri dari: kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Juga diperlukan komitmen bersama (collective commitments) yang mencakup seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama; dan kepemimpinan yang kondusif (conducive leadership), kepemimpinan yang kondusif merupakan kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan luas bagi setiap elemen organisasi yang dapat menyelenggarakan suatu pengembangan kapasitas dan reformasi keputusan.

Dengan dukungan partisipasi masyarakat, pada giliran berikutnya, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya, serta memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Dalam perspektif ini, good corporate governance juga akan mengarahkan kepada pengembangan inovasi daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setidaknya terdapat 4 (empat) kategori inovasi, yakni: (1) tata kelola pemerintahan; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing daerah.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perkotaan dan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya secara lebih modern akan dilakukan disertai dengan langkah-langkah inovasi dan kreatifitas dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menjamin adanya kesehatan lingkungan, mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan, dan pelibatan aktif masyarakat sebagai “komunitas hijau”, dengan mendasarkan kepada perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Misi ini mengamanatkan adanya pengelolaan isu lingkungan hidup, sosial-budaya, dan ekonomi dapat ditangani dengan seimbang, sehingga pertumbuhan kota dapat terkendali dan tertata dengan baik dengan pelibatan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder. Kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ruang tata hijau dan penerapan gaya hidup ramah lingkungan demi keberlangsungan sebuah kota perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi oleh pemerintah dan komunitas. Masyarakat dan pemerintah harus dapat berjalan beriringan dan memiliki visi yang sama dalam pelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pada misi ini, pemenuhan ketersediaan infrastruktur perkotaan di seluruh wilayah Kota Magelang, baik yang berlokasi di jantung kota, pinggir kota maupun

terutama di lokasi-lokasi sekitar perbatasan dengan Kabupaten Magelang merupakan hal sangat urgen demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama, maka dari itu pemerataan pendapatan (redistribusi pendapatan/ distribution of income) menjadi hal yang krusial untuk dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi merata mungkin diantara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas daerah.

Selain penyediaan infrastruktur, upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilakukan antara lain dengan cara: (a) Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah; (b) kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas; (c) padat karya dan pengembangan usaha atau industri kecil; (d) bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility (CSR), sehingga golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (corner of privilege); dan sebagainya.

Lebih dari itu, pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan untuk: (a) mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (b) memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri; (c) berbasis kerakyatan dan kekeluargaan; (d) koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; (e) menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di mana setiap orang (tanpa diskriminasi) memperoleh apa yang menjadi haknya. Ini lantas berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal, sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Kota Magelang. Semua itu dilakukan secara berkesinambungan (sustainable) dan diupayakan mereduksi dan mengeliminasi adanya dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada upaya pelestarian budaya dan kesenian tradisional daerah secara berkelanjutan, sekaligus juga mencakup langkah-langkah penggalian dan pengembangan budaya kreatif dan kesenian kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman sebagai salah satu potensi kekayaan dan keanekaragaman pariwisata di Kota Magelang. Termasuk dalam kaitan ini adalah industri kreatif dan inovatif yang tengah marak berkembang di Kota Magelang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang telah merasuk ke hampir seluruh relung sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pengembangan dalam rangka pelestarian budaya dan kesenian merupakan gerakan sosial dan moral yang dilakukan oleh segenap pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menumbuhkembangkan

kembali budaya daerah dalam rangka mewujudkan identitas dan jatidiri yang bermartabat. Berkembangnya kebudayaan daerah dapat menumbuhkan kearifan lokal dan memperkaya peradaban umat manusia. Terpeliharanya khazanah sejarah dan budaya akan berkontribusi kepada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perjuangan dan tanggung jawab masa depannya. Dalam konteks pembangkitan spiritualitas masyarakat, perlu dibangun cara pandang bahwa pariwisata merupakan jendela mensyukuri nikmat Tuhan, pusat-pusat keagamaan dapat menjadi obyek kunjung yang memiliki daya tarik, dan upacara-upacara keagamaan sebagai atraktif yang dapat mengundang pesona.

Upaya pemberdayaan budaya dan kesenian dapat disarikan antara lain: (a) Meningkatkan pengelolaan kebudayaan daerah meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup; (b) Meningkatkan industri dan karya budaya yang mengacu pada nilai-nilai luhur budaya bangsa; (c) Meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat; (d) Mengikuti event-event regional, nasional, dan internasional dalam rangka memupuk persahabatan dan promosi kebudayaan; (e) Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta pengembangan sistem informasi kebudayaan; dan (f) Mengembangkan SDM bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta sumber daya budaya itu sendiri. Sementara itu, pengembangan industri kreatifitas masyarakat dalam berbagai segi kehidupan diarahkan kepada upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan sanggar-sanggar seni budaya, bermunculannya pusat-pusat kerajinan tangan, berkembangnya dapur-dapur kreatif yang membuat aneka jenis makanan daerah dan tradisional, terciptanya suasana yang kondusif bagi kreatifitas kaum muda yang kreatif, dan terbinanya berbagai keahlian yang menopang langsung terhadap perkembangan pariwisata

Dalam perspektif ini, maka pariwisata (seni budaya daerah) dan industri kreatif bisa dijadikan sebagai unsur utama perekonomian daerah, apalagi bila kita ingin mengembangkan industri pariwisata sebagai alat dukung untuk meningkatkan harkat dan martabat daerah di tengah pergaulan di tingkat regional, nasional, dan dunia internasional yang memiliki daya saing.

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Secara umum tolerensi umat beragama di Kota Magelang telah berjalan dengan baik. Sikap tenggang rasa yang berarti rukun dan tidak menyimpang dari aturan dimana seseorang harus saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya sudah menjadi salah satu kharakter masyarakat Kota Magelang. Toleransi beragama sangat diperlukan pada kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan yang harmonis, rukun dan sejahtera. Modal sosial kerukunan antara umat beragama itu harus dijaga dan dipelihara, serta ditingkatkan intensitasnya sehingga bisa memberi sumbangan yang lebih nyata bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah di Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada langkah-langkah guna memupuk dan memperkuat jiwa toleransi beragama dan membudidayakan hidup rukun antar umat beragama melalui sikap dan tindakan seperti: (1) Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama; tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan agama; (2) Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda; (3) Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan

akhlakul karimah; (4) Dalam pergaulan sosial, menghindari jauh-jauh sikap egoisme dan fanatisme dalam beragama sehingga menyalahkan pemeluk agama atau penganut kepercayaan yang lain; (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan; dan (6) Peningkatan sarana-prasarana peribadatan. Selebihnya, guna meredam radikalisme yang mengatasnamakan agama (termasuk terorisme), dalam toleransi beragama perlu diadakannya dialog dengan cendekiawan dan para tokoh agama dan merangkul mereka untuk melakukan reinterpretasi atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif sehingga konsep multikulturalisme dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat.

Sikap toleransi dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat dalam suasana kehidupan yang harmonis, rukun dan sejahtera merupakan pijakan untuk mewujudkan masyarakat madani akan mengarahkan kepada sikap dan perilaku yang saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi guna mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi;
3. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara patisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan;
4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif;
- 3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive;

- 4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik;
- 5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
- 6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 7) Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan;
- 8) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional.

2. Misi 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
- b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment;

Sasaran :

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah;
- 4) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern;
- 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 6) Meningkatnya ruang terbuka hijau;
- 7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- 8) Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang.

3. Misi 3: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- c. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan;
- d. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat;
- 2) Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- 3) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan;
- 4) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- 5) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif;
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 7) Meningkatnya lapangan kerja;
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS;
- 9) Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan;
- 10) Menurunnya kesenjangan gender.

4. Misi 4: Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Tujuan :

- a. Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah;
- b. Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata.

Sasaran :

- 1) Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan;
- 2) Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.

5. Misi 5: Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Tujuan :

- a. Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religious;
- b. Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Sasaran :

- 1) Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan;
- 2) Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan.

Dalam pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, pencapaian tujuan hingga indikator sasaran saling terhubung secara hirarkis sebagaimana ditunjukkan Tabel IV.1. Sedangkan keterkaitan Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD ditunjukkan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Realisasi dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021
pada Perencanaan Tahun Kedua (RKPD Kota Magelang tahun 2018)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat											
1	1 Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%
				2 Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
				3 Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%	72%
			2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1 Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2 Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14
				3 Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
				4 Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	30%	45%	55%	65%	75%	85%	85%
				5 Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi tehnologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	1 Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	1000%	1000%
				2 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1 Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%
			2 Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi		NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
			3 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1 Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	3	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	2 Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
				1 Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
				2 Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	83,60 %	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
	4	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	1 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
				2 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83	51,72	58,62	65,52	75,86	82,76	89,66	89,66
				3 Persentase perkembangan kerjasama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
	7	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	1 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
				2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	5	6	6	7	7	8	8	8
			2 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	Regional	4	4	4	5	5	6	6	6
				Nasional	1	2	2	2	2	2	2	2
6	7	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	International	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14	17	17	17	17	17	20	20
				Regional	8	10	10	10	10	10	11	11
				Nasional	4	5	5	5	5	5	6	6
7	7	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	International	2	2	2	2	2	2	3	3

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2	Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan													
2	1	Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indek Pembangunan Manusia	1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1 Rata-rata lama sekolah	10,32	10,36	10,41	10,46	10,50	10,55	10,59	10,59	
					2 Persentase sekolah berstandar nasional									
						a. SD	30,66%	35,66%	40,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
						b. SMP	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
					3 Angka Melek Huruf	97%	97,35%	97,67%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%	
				4 Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%		
				5 Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305		
				2 Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	3 bh (23%)	5 bh (15%)	7 bh (54%)	10 bh (77%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	
					2 Angka Harapan Hidup	76,58	76,67	76,71	76,76	76,8	76,85	76,9	76,94	
					3 AKI/ 1.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70	
					4 AKB/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5	
					5 AKABA	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135	
					6 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
					7 Angka Kesakitan DBD	130,93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
					8 Angka Prevalensi Kasus TB	128,33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101	
					9 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	
					3 Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	10 Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%
						1 Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
				4 Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan		1 Persentase sarana penyedia	NA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)												
				2 Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	0%	10%	20%	30%	40%	50%	50%				
				3 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%				
	2	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment	IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84			
					2 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1			
					3 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56			
					4 Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7			
				2 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	3 Persentase Ruang Terbuka Hijau											
					a. Privat	10	10	10	10	10	10	10	10			
																b. Publik
							3 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
								2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
			4 Pemanfaatan lahanberkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%	33%				
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat															
3	1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan	1. Indeks Gini 2. Indeks Williamson	1 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%			
				2 Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok	1 Tercapainya 100 - 0 -100											

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	aksesibilitas		pendapatan	a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%	100%
				b. Rasio Luas kawasan kumuh	121.27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
				c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	6%	6%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
				2 Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%
			3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,25
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Laju Inflasi	1 Meningkatkan kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1 Pertumbuhan investasi								
				a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%
				b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
			2 Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
				2 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
			3 Meningkatnya ketahanan pangan	1 Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.729	12.780	12.831	12.882	12.933	12.985	13.037	13.037
3	Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	1. TPT 2. Angka Kemiskinan	1 Meningkatnya lapangan kerja	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
			2 Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%
4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat	Angka Pertumbuhan Penduduk	1 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Meningkatkan kesetaraan gender	1. IPG 2. IDG	1 menurunnya kesenjangan gender	1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%
				2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%
				2 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM			
						2016	2017	2018	2019	2020	2021				
4	Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang														
4	1	Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
					2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25	
	2	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1	Jumlah Wisatawan a. Nusantara b. Mancanegara	1.133.373 5.171	1.134.846 5.178	1.136.435 5.185	1.138.140 5.193	1.139.961 5.201	1.141.899 5.210	1.143.954 5.219	1.143.954 5.219
5	Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani														
5	1	Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	1	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
				2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1	Angka kriminalitas	14,14	13,64	13,14	12,64	12,14	11,64	11,14	11,14
						2	Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
						3	Angka kriminalitas yang tertangani	11,08	11,5	11,5	12	12	12,5	12,5	12,5
						4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56	3	3	3	3	3	3	3
				2	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1	2		

Tabel IV.3
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021 pada Perencanaan Tahun Kedua (RKPD Kota Magelang Tahun 2018)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1 :Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat								
1 Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesiona dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya	v	v	v	v		
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi		2 Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	v	v	v			
		3 Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah			v	v	v	v
		4 Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat			v	v	v	v
		5 Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat	v	v	v	v	v	v
3 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	2 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi	6 Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi	v	v	v	v	v	
		7 Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi	v	v	v	v	v	
4 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah	3 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	8 Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	v	v	v	v	v	v

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	4 Peningkatan kinerja pengelolaan BMD yang didukung oleh aparatur profesional	9 Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset	v	v	v	v	v	v
5 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi	10 Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota	v	v	v	v	v	v
6 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan								
7 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasiona dan internasional								
Misi 2 :Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan								
1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	6 Peningkatan akses sumber ilmu pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan PAUD, Dasar, dan Non Formal	11 Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah		v	v	v	v	v
2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7 Peningkatan kualitas layanan kesehatan berkeadilan dan pemasyaraakatan budaya perilaku hidup sehat	12 Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat	v	v	v	v	v	v
		13 Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan	v	v	v	v	v	v
3 Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	8 Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri usaha mikro dan perdagangan dan sektor jasa kota lainnya	14 Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan		v	v	v	v	
4 Terwujudnya sarana prasarana perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern	9 Pengembangan infrastruktur perdagangan, kesehatan, pendidikan yang maju , inklusif dan berwawasan lingkungan							
5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10 Pengendalian pemanfaatan ruang dan aktivitas pembangunan untuk pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan dan antisipasi resiko bencana	15 Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk		v	v	v		
6 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau								

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana		menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan							
8 Pemanfaatan lahan sesuai regulasi tata ruang									
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat									
1 menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	11 Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan	16 Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan	v	v	v	v	v	v	v
2 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang sesuai rasio kebutuhan masyarakat									
3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik dan ramah lingkungan									
4 Terjaganya kondusifitas kesejahteraan ekonomi masyarakat	12 Peningkatan investasi, daya saing produk/jasa, dan kontribusi sektor sektor-ekonomi bagi perekonomian daerah	17 Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.	v	v	v	v			
5 Meningkatnya ketahanan pangan	13 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penurunan kemiskinan secara berkeadilan	18 Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: ketahanan pangan, peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender	v	v	v	v	v	v	v
6 Meningkatnya kesejahteraan sosial									
7 Meningkatnya lapangan kerja									
8 Menurunnya angka kemiskinan									
9 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan									

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 Menurunnya kesenjangan gender								
Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang								
1 Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan	14 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kreativitas seni budaya daerah, kearifan lokal, dan inovasi destinasi pariwisata	19 Pengembangan sistem Komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata			v	v	v	v
2 Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata baik alam maupun sejarah yang potensial								
Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani								
1 Terbentuknya karakter religius masyarakat landasan moral dan etika pembangunan	15 Internalisasi kesadaran religius pada Aparatur dan masyarakat untuk bermitra menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama menuju lingkungan masyarakat kota Magelang yang kondusif, tertib, aman, nyaman, dan antisipatif terhadap konflik sosial	20 Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik		v	v	v	v	v
2 Mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat								
3 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kebebasan beribadah dan pemilihan tempat peribadatan sesuai standar								

Kota Magelang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban mengintegrasikan sasaran pembangunan nasional dan provinsial ke dalam pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, menyatakan bahwa pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pasal 260 menyatakan bahwa rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kesesuaian sasaran pembangunan Kota Magelang yang menjadi dasar RKPD 2018 dengan sasaran pembangunan Nasional dan pembangunan provinsi Jawa Tengah digambarkan dalam matrik berikut.

Tabel IV.4
Matrik Kesesuaian Sasaran Pembangunan

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
1.1.	1.1.1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	6.3	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	3.a.	Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi dan berintegritas serta sistem pola karier yang jelas;
					3.j.	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
			6.4.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah	3.c	Meningkatnya cakupan layanan pengukuran ISO terhadap unit pelayanan publik
			12.2.	Bidang Aparatur		
	1.1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	6.2	Penegakan hukum	3.k.	k. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
			6.3.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	3.f.	f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
					3.i.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
1.2.	1.2.1.	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	6.3	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah	3.b.	Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
			12.2.	Bidang apartur		
			13.3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		
1.2.	1.2.2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart	14.10	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan	7.e.	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
		City dalam pemerintahan dan pelayanan publik		Pembangunan : Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya		
			9.1.	Pembangunan Iptek		
			14.13.	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Tercapainya tingkat TIK literasi nasional		
			14.14.	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Tersedianya layanan e-Pemerintahan dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional dengan memperhatikan prinsip keamanan cyber nasional		
	1.2.3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	13.10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	5.c.	Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah
			8.15	Data dan Informasi Statistik		
1.3.	1.3.1	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	8.2.	Kuangan negara	3.g.	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
					3.h.	Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
1.4.	1.4.1	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	13.10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	5.a.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
	1.4.2.	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2.	Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat	5.a.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
					4.e.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
					4.f.	Meningkatnya peran partai politik organisasi masyarakat dalam proses demokrasi
			2.6.	Pembangunan Masyarakat		
			7.7.	Kesejahteraan sosial		
	1.4.3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	7.4.	Pemuda an Olahraga	4.d.	Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik;dengan arah kebijakan d. Meningkatkan fasilitas dukungan sarpras keolahragaan guna menunjang prestasi olahraga
2.1	2.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	2.2.	Pendidikan	2.k	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
	2.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	2.3.	Kesehatan	6.a.	Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan;
	2.1.3	Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	8.9	Perdagangan dalam negri	2.e.	Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM
			8.7.	Ekonomi Kreatif		
			8.5.	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi		
	2.1.4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	13.7.	Kawasan strategis	7.d.	Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat
			14.18	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur : Menjadikan skema KPS sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor.		
	2.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3.5.	Sasaran pembangunan sektor unggulan: Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7.f	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan
			15.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan		

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
				Lingkungan Hidup:		
			15.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian		
			15.10	Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan		
	2.2.2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	15.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:	7.f	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH
			15.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian		
	2.2.3	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	15.10	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	7.9	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
					7.c	Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai;
	2.2.4	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	15.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian	3.k.	Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3	3.1.1	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	7.7.	Kesejahteraan Sosial	6.f.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, perumahan layak huni;
			3.5.	Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		
	3.1.2	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	4.	Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan	5.b	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
			4.1.	Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi		
			5	Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah		

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
			5.1.	Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah		
	3.1.3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	14.9	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN GRK) di sektor transportasi	7.a	Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
					7.b.	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi;
	3.2.1	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	8.	Sasaran Bidang Ekonomi	1.a.	Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno;
					2.h.	Meningkatnya realisasi investasi
					3.d.	Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
			8.5	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi		
			8.8	Penguatan Investasi		
	3.2.2	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	8.7.	Ekonomi Kreatif	2.g.	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas;
	3.2.3	Meningkatnya ketahanan pangan	15.1.	Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan	2.c.	Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal
			3.1.	Kedaulatan Pangan		
3.3.	3.3.1	Meningkatnya lapangan kerja	4.2.	Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif	2.b.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
	3.3.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	7.7.	Kesejahteraan Sosial	2.l	Meningkatnya kualitas dan Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.
			4.2.	Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif		
3.4.	3.4.1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung	2.	Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat	6.b	Menurunnya Drop Out (DO) KB dan Unmet Need serta meningkatnya peserta KB aktif/Contraceptive

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
		lingkungan				Prevalence Rate (CPR);
			2.1.	Kependudukan dan Keluarga Berencana		
3.5.	3.5.1	menurunnya kesenjangan gender	2.4.	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.i	i. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;
					2.j	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus
4.1.	4.1.1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	7.5	Kebudayaan	4.b.	Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa;
					4.c.	Meningkatnya upaya revolusi mental dan jiwa kebhinekaan guna membangun karakter bangsa;
					4.g.	Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;
					4.h.	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa;
					4.i.	Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat
	4.2.1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	8.6.	Pariwisata	2.b.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan arah kebijakan Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata
			3.4.	Pariwisata dan Industri Manufaktur		
5.1.	5.1.1	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	7.6	agama	4.c.	Meningkatnya upaya revolusi mental dan jiwa kebhinekaan guna membangun karakter bangsa;
	5.1.2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	10.1.	Politik Dalam Negeri	4.a.	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
			2.6.	Pembangunan masyarakat	4.b.	Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa;
					4.d.	Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik;
5.2.	5.2.1	Terpenuhinya kebutuhan	7.6.	Agama		

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
		masyarakat dalam peribadatan				

.Dari matrik di atas nampak bahwa semua sasaran pembangunan kota Magelang 2016-2021 yang menjadi dasar RKPD 2018 memiliki keterkaitan dengan semua sasaran pembangunan nasional 2014-2019 yang menjadi dasar RKP 2018.

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2018

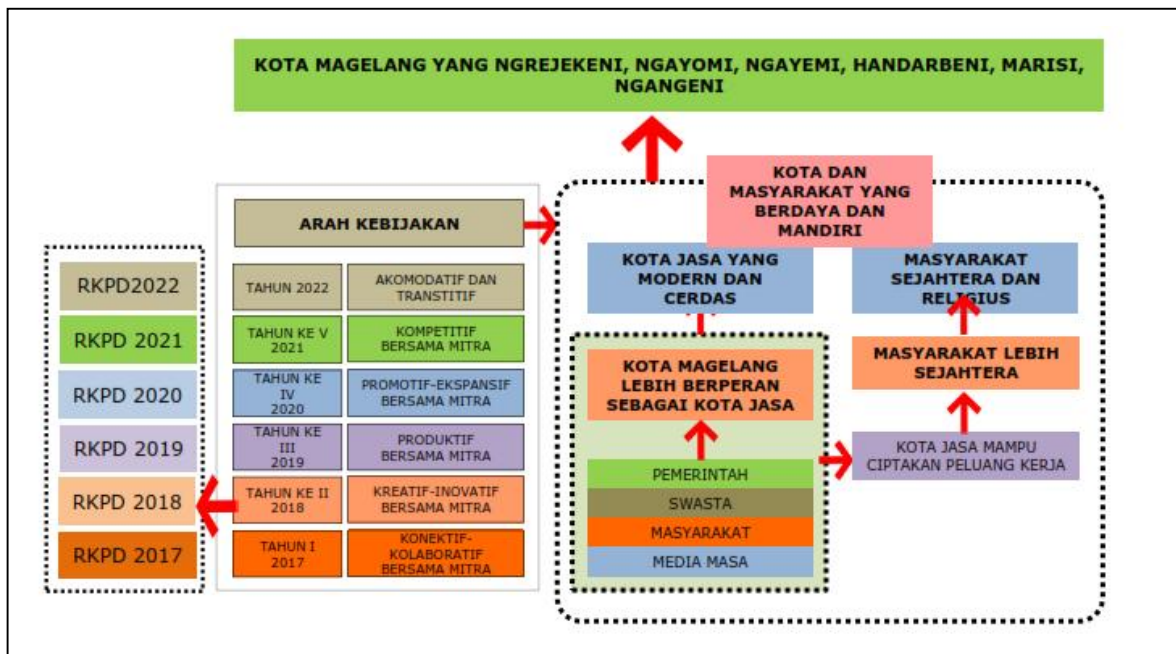
Dalam RKP Tahun 2018, tema pembangunan yang diusung adalah **Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan**. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Sedangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah, tema pembangunan pada tahun 2018 adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari. Tema dimaksudkan untuk mencapai Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi.

Dengan pendekatan yang sama tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2018 adalah Kreatif dan Inovatif Bersama Mitra Tema ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2017 untuk diimplementasikan melalui RKPD tahun 2018. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Pada tahun 2017-2018 ini diasumsikan:

- (i) Sudah terbentuk tata kelola organisasi pemerintahan dan manajemen kepegawaian sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (ii) Sudah terbentuk rencana aksi kemitraan.

. Deskripsi komprehensif atas Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2018 nampak pada gambar berikut :



Gambar IV.1

Gambar Tema dan Arah kebijakan Tahun 2018

Selain itu Kota Magelang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dan mendorong serta selaras dengan pencapaian tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional . Gambaran keselarasan antar tema pembangunan nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.5

Keterkaitan antar tema Pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kota Magelang Tahun 2018

Tema RKP Tahun 2018	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2018	Benang Merah keterkaitan

Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari	Kreatif dan Inovatif bersama Mitra	Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya dengan memberi daya dorong pada perwujudan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun pada RKP Tahun 2018

4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Prioritas pembangunan merupakan pilihan keputusan lokasi dan distribusi sumberdaya yang dimiliki daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan daerah secara terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembanguan daerah. Harmonisasi tersebut diatur dalam amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor : 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Disebutkan bahwa perlu dilakukan integrasi dan penyelarasan prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas secara berjenjang berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara RPJMD-RKPD Kabupaten/Kota dengan RPJMD-RKPD Provinsi dan RPJMN-RKP, serta RPJMD-RKPD Provinsi dengan RPJMN-RKP.

Matrik berikut akan memaparkan peta harmonisasi prioritas pembangunan kota Magelang dengan prioritas nasional dan provinsi. Matrik berikut sebagai ringkasan yang akan dijabarkan pada penjelasan berikutnya.

Tabel IV.6
Harmonisasi Prioritas Pembangunan Kota Magelang tahun 2018 dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Kode	Prioritas Kota Magelang 2018	Harmonisasi			
		Kode	Prioritas & Program Prioritas nasional	Kode	Prioritas & Program Prioritas Provinsi
1.	Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;	4.20	Reformasi Birokrasi	6	Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
1.1.	pemerintah Kota Magelang siap membangun berbasis prestasi capaian kinerja yang terukur baik;	4.20.1	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;	6.c.	Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan
1.2.	kesiapan menuju operasionalisasi smart city	3.15.4	Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK;	6.c.8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun Standart Operasional Prosedure dan penyediaan media pengaduan masyarakat
1.3.	Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik	4.20.2	Penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan;	6.f	Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.4.	Kesiapan manajemen pengelolaan kota berbasis eco green city;	3,15,3	Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana	5.	Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana
2.	Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat	3.15.5	Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota.	2	Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin
2.1.	Kesiapan menuju kategori baik untuk setiap penilaian indikator kesejahteraan masyarakat	1.2.	Kesehatan	2	Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin
		1.3.	Pendidikan		
		1.4.	Perumahan dan Permukiman		
		2.5.	Pangan	4	Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan
		3.15	Perkotaan		
		3.15.2	Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP);		

Kode	Prioritas Kota Magelang 2018	Harmonisasi			
		Kode	Prioritas & Program Prioritas nasional	Kode	Prioritas & Program Prioritas Provinsi
3.	Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah:	3.16	Konektivitas	1.	Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
		1.1.3.	Peningkatan kemandirian ekonomidan daya saing bangsa		
3.1.	Kesiapan pemenuhan sarpras pendukung daya saing: Tingkat konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk kondusivitas akses pengembangan usaha; Peningkatan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan	3.16.2	Pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah;	5.a.	Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (bottle-neck), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan, peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian
		3.10.4	Perkuatan basis perekonomian		
3.2.	Produktivitas daerah : Peningkatan Produktivitas daerah, kapasitas fiskal daerah, % Investasi daerah, % pertumbuhan PAD	2.8	Pembangunan Pariwisata	1.a	Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang
		2.8.1	Promosi wisata indonesia	1.e	Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata
		2,8,5	Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat; (Promosi Wisata Indonesia)		
		2.8.6	Jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata.		
		3.10.	Antar Kelompok Pendapatan		
		3.10.1	Perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan		

Kode	Prioritas Kota Magelang 2018	Harmonisasi			
		Kode	Prioritas & Program Prioritas nasional	Kode	Prioritas & Program Prioritas Provinsi
			koperasi;		
		3.10.2	Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;		
		3.10.3	Pengembangan kewirausahaan;		
		5.	Pembangunan ekonomi		
		5.21.	Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha	1.c.	Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan kluster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi
		5.23.	Reformasi Fiskal (Pengoptimalan Pendapatan Negara)		
		5.23.1	Pengoptimalan Perpajakan;		
		5.23.5	Perbaikan pelaksanaan anggaran		
		5.23.6	Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif		
		5.23.8	Belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran		
3.3.	Kepastian hukum usaha sehat: Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan	1.1.	Revolusi Mental		
		1.1.1	Reformasi birokrasi pemerintahan;	6.c.5	Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP
		4.17	Kepastian dan penegakan hukum		
		5.	Pembangunan ekonomi		
		5.21	Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha		
		5.21.1	Peningkatan kemudahan berusaha;		
		5.21.2	Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah;		
		5.21.3	Pengembangan layanan perizinan terpadu;		

Kode	Prioritas Kota Magelang 2018	Harmonisasi			
		Kode	Prioritas & Program Prioritas nasional	Kode	Prioritas & Program Prioritas Provinsi
		5.21.4	Peningkatan persaingan usaha yang sehat;		
		5.21.5	Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi;		
3.4.	Kesiapan Kualitas SDM: Tingkat pendidikan, kompetensi teknologi dan keterampilan tersertifikasi;	1.3.	Pendidikan	6.e.	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (merit system).
		1.3.2.	Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan	3	Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar
		2.9	PercepatanbPertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi	1.a.	Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
		2.9.4.	SDM industri yang Kompeten dan Disiplin;		
		2.8.	Pembangunan Pariwisata		
		2.8.3	SDM dan kelembagaan pariwisata		
3.5.	kondusivitas daerah: keamanan yang terkendali (angka kriminalitas, angka gangguan trantibum, angka pelanggaran perda, dll)	1.1.	Revolusi Mental	6.a	Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi.
		1.1.2.	Penegakan hukum dan kelembagaan politik;	6.b.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi
		4.17	Kepastian dan penegakan hukum		
		4.17.3	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan		
		4.18	Stabilitas keamanan dan ketertiban		
		4.18.1	Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme;		
		4.19	Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi		

Kode	Prioritas Kota Magelang 2018	Harmonisasi			
		Kode	Prioritas & Program Prioritas nasional	Kode	Prioritas & Program Prioritas Provinsi
		4.19.4	Pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme		
4.	Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.	5.21.	Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha	6.c.7	Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala
		5.21.2	Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah		
		5.23.	Reformasi Fiskal (Pengoptimalan Pendapatan Negara)		
		5.23.2	Dukungan Regulasi		
		1.1.	Revolusi Mental		
		1.1.2	Penegakan hukum dan kelembagaan politik;		
		3.11.	Reforma Agraria		
		3.11.1	Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;		
		4.17.	Kepastian dan penegakan hukum		

Sumber: Racangan RKP, RKPd Provinsi Jawa Tengah, dan SEB Mendagri dan MPPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016

Paparan selanjutnya menjabarkan latar belakang dan keterkaitan antar prioritas tersebut.

4.2.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014-2019

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 bahwa di dalam Buku I RPJM Nasional disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi misi nasional tersebut dan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Mempertegus kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kesembilan agenda prioritas tersebut diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- 1) Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- 2) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- 3) Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- 4) Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pemerataan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2018, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6,1 %;
2. Laju inflasi sebesar 3,5±1%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;
4. Indeks Gini sebesar 0,38;
5. Tingkat kemiskinan sebesar 9,0 – 10,0 %;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,38%;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3 – 5,5%.

4.2.2.2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2018

Secara lebih spesifik dalam RKP Tahun 2018, tema yang diusung adalah Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan manusia dan masyarakat yang diprioritaskan pada Revolusi Mental, pembangunan kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Permukiman
- 2) Pembangunan Sektor unggulan diprioritaskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kemaritiman dan kelautan, pembangunan kedaulatan energy, pembangunan pariwisata, percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK)
- 3) Pemerataan dan kewilayahan meliputi pemerataan antar kelompok pendapatan, reformasi agrarian, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, pembangunan konktivitas nasional
- 4) Pembangunan politik hukum pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, Stabilitas keamanan dan ketertiban, Konsolidasi demokrasi dan Efektifitas Demokrasi, Reformasi Birokrasi
- 5) Pembangunan Ekonomi diprioritaskan pada Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, peningkatan ekspor non migas, Reformasi Fiskal

Selain itu dalam RKP Tahun 2018 juga diprioritaskan pembangunan bidang yang meliputi :

1. Pengarusutamaan dan pembangunan Lintas Bidang meliputi : Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan Tata Kelola pemerintahan yang baik, Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan AntiNarkoba, Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim.
2. Bidang Pembangunan Sosisl Budaya dan Kehidupan Beragama meliputi : Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan kesehatan, Pendidikan, Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,
3. Bidang pembangunan Ekonomi : meliputi Stabilitas Harga, Usaha Mikro Kecil menengah dan Koperasi, Perdagangan Dalam negeri, Kerjasama Ekonomi Nasional, Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Data dan informasi statistic, Ketenagakerjaan.
4. Bidang Iptek meliputi : Peningkatan Ikapasitas Iptek, NSPK Pembangunan Iptek, Kerangka Regulasi,
5. Bidang Pembangunan Bidang Politik

6. Bidang aparatur : Aparatur Negara,
7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang
8. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
9. Bidang Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

4.2.2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Tahun 2018 yang merupakan tahun keempat RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari”, dengan prioritas meliputi :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
 - b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
 - c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;
 - d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisikerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
 - e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata.
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, dengan fokus pada :
 - a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa : beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu;
 - b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
 - c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
 - e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
 - f. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
 - g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015.
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, dengan fokus pada :
- a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB.
 - b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
 - c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB.
 - d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
 - f. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada :
- a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;
 - b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
 - c. Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
 - d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu;
 - e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;
 - f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
 - h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE);
 - i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap energy mix di Jawa Tengah.

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada :
 - a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (bottle-neck), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan, peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian.
 - b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (blackspot) dan penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan.
 - c. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi, penanganan sungai dan pantai serta penanganan bangunan penampungan air pada daerah lumbung pangan, rawan banjir dan kekeringan.
 - d. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan/TPA.
 - e. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah.
 - f. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana.
 - g. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana.
 - h. Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat.
 - i. Pengembangan masyarakat tangguh bencana.
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada :
 - a. Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi.
 - c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu :
 - 1) Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan agent of change (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara.
 - 2) Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online untuk percepatan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan.
 - 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik.
 - 4) Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural.
 - 5) Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP.

- 6) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka.
- 7) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala.
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun Standar Operasional Prosedur dan penyediaan media pengaduan masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual.
- e. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (merit system).
- f. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- g. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong.
- h. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat.
- i. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif.
- j. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri.

Selanjutnya, untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah, agar Kabupaten/Kota memprioritaskan program/kegiatan pembangunan pada Tahun 2018 yang dilaksanakan melalui :

- 1) Pola sharing program dan pendanaan untuk upaya pengurangan kemiskinan, dengan menyediakan :
 - a. Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar.
 - b. Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dengan dukungan sharing Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Akses infrastruktur pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan melibatkan peran aktif dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Dukungan pembangunan "Program 1.000 Embung" sesuai kewenangan Kabupaten/Kota sebagai upaya meningkatkan tampungan cadangan air di wilayah rawan kekeringan.
- 3) Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diprioritaskan pada:

- a. Peningkatan ruas jalan perbatasan, ruas jalan yang mempunyai akses langsung atau merupakan jalur alternatif jalan nasional/provinsi, peningkatan aksesibilitas daerah terisolir dan kemiskinan tinggi, ruas jalan pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian.
- b. Peningkatan sistem jaringan irigasi dan pembangunan bangunan penampungan air (embung) pada daerah pertanian produktivitas tinggi/lumbung pangan dan daerah rawan kekeringan.
- c. Pembangunan sarana prasarana sanitasi komunal, penataan drainase permukiman pada daerah kumuh dan rawan banjir perkotaan serta Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lokal non regional.
- d. Pengembangan sistem transportasi massal pada daerah perkotaan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana keselamatan lalu lintas pada ruas jalan rawan kecelakaann dan kemacetan terutama di perlintasan sebidang dengan rel kereta api.
- e. Pemenuhan peningkatan kualitas, kapasitas dan jangkauan pelayanan kesehatan berupa pembangunan/rehabilitasi puskesmas, rumah sakit dan sarpras kesehatan lainnya.
- f. Peningkatan daya tarik/amenitas di obyek pariwisata unggulan dan pembangunan sarpras ekonomi kerakyatan berupa pasar tradisional.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
- h. Rintisan Model Desa Berdikari.
- i. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.
- j. Pendampingan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD).

4.2.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2018

RKPD Kota Magelang Tahun 2018 ini merupakan tahun kedua perencanaan RPJMD Kota Magelang 2016-2021, untuk dilaksanakan tahun 2018. Tema dasar perencanaan tahun pertama adalah Kreatif dan Inovatif bersama Mitra.

Tema ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2017 untuk diimplementasikan melalui RKPD tahun 2018. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Pada tahun 2017-2018 ini diasumsikan:

- (i) Sudah terbentuk tata kelola organisasi pemerintahan dan manajemen kepegawaian sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (ii) Sudah terbentuk rencana aksi kemitraan.

Fokus prioritas tahap ini:

1) Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel:

- pemerintah Kota Magelang siap membangun berbasis prestasi capaian kinerja yang terukur baik;
- kesiapan menuju operasionalisasi smart city
- Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik
- Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik

- kesiapan manajemen pengelolaan kota berbasis eco green city;
- 2) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat
- kesiapan menuju kategori baik untuk setiap penilaian indikator kesejahteraan masyarakat
- 3) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah:
- a. Kesiapan pemenuhan sarpras pendukung daya saing: Tingkat konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk kondusivitas akses pengembangan usaha; Peningkatan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan
 - b. Produktivitas daerah : Peningkatan Produktivitas daerah, kapasitas fiskal daerah, % Investasi daerah, % pertumbuhan PAD
 - c. Kepastian hukum usaha sehat: Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan
 - d. Kesiapan Kualitas SDM: Tingkat pendidikan, kompetensi teknologi dan keterampilan tersertifikasi;
 - e. kondusivitas daerah: keamanan yang terkendali (angka kriminalitas, angka gangguan trantibum, angka pelanggaran perda, dll)
- 4) review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Fokus prioritas pembangunan Tahun 2018 ini diharapkan mampu mencapai target prioritas sebagai berikut :

Tabel IV.7
Keterkaitan antara Fokus prioritas dalam upaya pencapaian target indikator Daerah

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA DAERAH (BAB IX RPJMD)
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesejahteraan masyarakat	▪ Tingkat kemiskinan ▪ Pdrb perkapita ▪ Tingkat pengangguran terbuka ▪ Prosentase penyerapan tenaga kerja ▪ Prosentase rutilahu ▪ Prosentase penurunan penyakit masyarakat ▪ Persentase penurunan pmks ▪ Tingkat kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama
Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	▪ Cakupan pd yang mempunyai mitra dengan forum warga ▪ Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah ▪ Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah ▪ Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi ▪ Persentase kecamatan yang memenuhi standar iso 9001:2008 ▪ Indeks reformasi birokrasi
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah	▪ Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design) ▪ Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 rs, 5 puskesmas, 1 lab kesda) ▪ Pertumbuhan nilai investasi pma dan pmdn (minimal loi siap ditindaklanjuti)

	▪ Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan ▪ Persentase sarana perdagangan menuju standar inklusivitas (universal design) ▪ Rasio kemandirian keuangan daerah ▪ Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti ▪ Tingkat kematangan kota cerdas
Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman	▪ Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design) ▪ Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan ▪ Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam rpjmd, rkpd, renstra, renja ▪ Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi

4.2.2.4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2018

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya
- 2) Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
- 3) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat
- 4) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi
- 5) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi
- 6) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 7) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset;
- 8) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota
- 9) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah
- 10) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat
- 11) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan
- 12) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan
- 13) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan
- 14) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan
- 15) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.

- 16) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender
- 17) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik

Meskipun arah kebijakan pemandu perencanaan tahun 2017 sebagian besar sama dengan yang digunakan pada perencanaan tahun 2016, namun berbeda pada penekanan. Tahun 2016 tekanan pada upaya inisiasi penyusunan kerangka kerja. Fokus arah kebijakan perencanaan tahun 2017 (untuk diimplementasikan tahun 2018) ditekankan pada tindak lanjut rencana aksi dari hasil kajian kerangka kebutuhan yang dihasilkan pada tahun 2017 (hasil arah kebijakan perencanaan tahun 2016)

Hubungan antara fokus prioritas dengan arah kebijakan dapat disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel IV.8
Keterkaitan antara isu strategis dengan Arah Kebijakan Tahun 2018

FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesejahteraan masyarakat	▪ Peningkatan kemitraan pemerintah - swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang paud, dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah ▪ Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat ▪ Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan ▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan pmks, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender ▪ Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan
Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	▪ Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya ▪ Penataan organisasi perangkat daerah (sotk) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur ▪ Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ▪ Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset;
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu	▪ Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan

untuk kesiapan daya saing daerah

kemajuan dan kesejahteraan kota

- Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan
- Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang kum, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik sara, sosial, ekonomi, dan politik
- Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan

Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman

- Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat
- Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi
- Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi

Jika dikaitkan dengan isu strategis, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2018 ini akan mampu menjawab isu strategis dengan keterkaitan sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.9

Konsistensi Fokus Prioritas dalam Menjawabn Isu Strategis

FOKUS PRIORITAS	ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2016-2021
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesejahteraan masyarakat	▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	▪ Penguatan reformasi birokrasi
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah	▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal ▪ Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk	• Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah

4.2.2.4.2 Prioritas Urusan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2018

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2017 adalah:

- 1) Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- 2) Urusan pendidikan;
- 3) Urusan kesehatan;
- 4) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 5) Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 6) Urusan sosial;
- 7) Urusan komunikasi dan informatika;
- 8) Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 9) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 10) Urusan perdagangan;
- 11) Urusan perpustakaan;
- 12) Urusan perindustrian;
- 13) Urusan pariwisata;
- 14) Urusan pertanian;
- 15) Urusan perikanan dan kelautan.

4.2.2.4.3 Program Unggulan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2018

Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2018 adalah:

- 1) Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
- 2) Program peningkatan daya saing daerah;
- 3) Program kota cerdas;
- 4) Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
- 5) Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
- 6) Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
- 7) Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani dan media masa dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan.

Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2018 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi Walikota Magelang, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

Tabel IV. 10
Koneksitas antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Tengah, Prioritas Tema Pembangunan Kota Magelang Tahun 2018, dan isu strategis

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
1. Pembangunan manusia dan masyarakat yang diprioritaskan pada Revolusi Mental, pembangunan kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Permukiman	3 Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, dengan fokus pada : a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB. b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB. d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana	A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar dengan fokus pada : 1. Penurunan Angka kemiskinan 2. Pengurangan pengangguran dan penciptaan lagan kerja 3. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan 4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan B. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi). 1. Pemuda dan Olah Raga 2. Membangun Kemitraan 3. Penerapan dan perwujudan keadilan gender dan perlindungan anak 4. Pemerataan Pembangunan C. Pengembangan dan pemanfaatan potensi	1) Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel: - pemerintah Kota Magelang siap membangun berbasis prestasi capaian kinerja yang terukur baik; - kesiapan menuju operasionalisasi smart city - Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik - Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik - kesiapan manajemen pengelolaan kota berbasis eco green city;

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	Rumah Sakit. e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). f. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.	daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan: 1. Pengelolaan sampah D. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; 1. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah 2. Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi 3. Smart City 4. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Branding Kota Magelang	2) Kesiapansistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat • kesiapan menuju kategori baik untuk setiap penilaian indikator kesejahteraan masyarakat
II. Pembangunan Sektor unggulan diprioritaskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kemaritiman dan kelautan, pembangunan	1. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang diidukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada : a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi	E. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri 3. Ketahanan Pangan	3) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah: • Kesiapan pemenuhan sarpras pendukung daya

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
kedaulatan energy, pembangunan pariwisata, percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK)	lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai; b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran; c. Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai; d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu; e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing; f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi; h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE); i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap energy mix di Jawa Tengah.		saing: Tingkat konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk kondusivitas akses pengembangan usaha; Peningkatan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan • Produktivitas daerah : Peningkatan Produktivitas daerah, kapasitas fiskal daerah, % Investasi daerah, % pertumbuhan PAD • Kepastian hukum usaha sehat: Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
			perijinan dan non perijinan • Kesiapan Kualitas SDM: Tingkat pendidikan, kompetensi teknologi dan keterampilan tersertifikasi; • kondusivitas daerah: keamanan yang terkendali (angka kriminalitas, angka gangguan trantibum, angka pelanggaran perda, dll)
	1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada : f. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas	F. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri 1. Industri Perdagangan 2. Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan G. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan; 1. Kebudayaan 2. Pariwisata	4) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah: • Kesiapan pemenuhan sarpras pendukung daya saing: Tingkat konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk kondusivitas akses pengembangan usaha;

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang; g. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan kekuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal; h. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi; i. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisikerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;		Peningkatan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan • Produktivitas daerah : Peningkatan Produktivitas daerah, kapasitas fiskal daerah, % Investasi daerah, % pertumbuhan PAD • Kepastian hukum usaha sehat: Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan • Kesiapan Kualitas SDM: Tingkat pendidikan, kompetensi teknologi dan keterampilan tersertifikasi; • kondusivitas daerah: keamanan yang terkendali

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	j. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata.		(angka kriminalitas, angka gangguan trantibum, angka pelanggaran perda, dll)
III. Pemerataan dan kewilayahan meliputi pemerataan antar kelompok pendapatan, reformasi agraria, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, pembangunan konektivitas nasional	5 Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada : a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (bottle-neck), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan, peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian.	H. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi). 4.Pemerataan Pembangunan I. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan: 1. Pengelolaan sampah	5) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah: • Kesiapan pemenuhan sarpras pendukung daya saing: Tingkat konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk kondusivitas akses pengembangan usaha; Peningkatan aktivitas Perbankan dan Lembaga

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (blackspot) dan penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan. c. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi, penanganan sungai dan pantai serta penanganan bangunan penampungan air pada daerah lumbung pangan, rawan banjir dan kekeringan. d. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan/TPA. e. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah. f. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana. g. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana. h. Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat.		Keuangan • Produktivitas daerah : Peningkatan Produktivitas daerah, kapasitas fiskal daerah, % Investasi daerah, % pertambahan PAD • Kepastian hukum usaha sehat: Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan • Kesiapan Kualitas SDM: Tingkat pendidikan, kompetensi teknologi dan keterampilan tersertifikasi; • kondusivitas daerah: keamanan yang terkendali (angka kriminalitas, angka gangguan trantibum, angka

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	i. Pengembangan masyarakat tangguh bencana.		pelanggaran perda, dll)
	2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, dengan fokus pada : a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa : beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu; b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif; c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS; d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja;	J. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar dengan fokus pada : 5. Penurunan Angka kemiskinan 6. Pengurangan pengangguran dan penciptaan lagan kerja 7. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan 8. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan K. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri 1. Industri Perdagangan 2. Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan 3. Ketahanan Pangan	3. Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah: • Kesiapan pemenuhan sarpras pendukung daya saing: Tingkat konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk kondusivitas akses pengembangan usaha; Peningkatan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan • Produktivitas daerah : Peningkatan Produktivitas daerah, kapasitas fiskal daerah, % Investasi daerah, % pertumbuhan PAD

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi; e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah; f. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar; g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015.		• Kepastian hukum usaha sehat: Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan • Kesiapan Kualitas SDM: Tingkat pendidikan, kompetensi teknologi dan keterampilan tersertifikasi; • kondusivitas daerah: keamanan yang terkendali (angka kriminalitas, angka gangguan trantibum, angka pelanggaran perda, dll) 2. Kesiapansistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat • kesiapan menuju kategori baik untuk setiap penilaian

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
			indikator kesejahteraan masyarakat
IV Pembangunan politik hukum pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, Stabilitas keamanan dan ketertiban, Konsolidasi demokrasi dan Efektifitas Demokrasi, Reformasi Birokrasi	6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada : - Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi. - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi. - Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu : - Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan agent of change (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara. - Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK;	C. Penguatan reformasi birokrasi - Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan - Pengelolaan Aset Daerah - Peningkatan Kualitas Layanan Publik - Penataan Organisasi - Penataan Tatalaksana - Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur - Penguatan Pengawasan - Penguatan Akuntabilitas Kinerja L. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah	1). Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel: - pemerintah Kota Magelang siap membangun berbasis prestasi capaian kinerja yang terukur baik; - kesiapan menuju operasionalisasi smart city - Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik - Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik - kesiapan manajemen

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online untuk percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik. 4) Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural. 5) Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi		pengelolaan kota berbasis eco green city; 2. Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat • kesiapan menuju kategori baik untuk setiap penilaian indikator kesejahteraan masyarakat

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	informasi dan pembentukan PTSP. 6) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, professional, dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka. 7) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala. 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun Standart Operasional Prosedure dan penyediaan		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	media pengaduan masyarakat. d. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. e. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (merit system). f. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. g. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong. h. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat. i. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan,		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif. j. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri.		
VI. Pembangunan Ekonomi diprioritaskan pada Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, peningkatan ekspor non migas, Reformasi Fiskal	1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada : a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan	M. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; 6. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah 7. Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi 8. Smart City 9. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 10. Branding Kota Magelang	3) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah: Kesiapan pemenuhan sarpras pendukung daya saing: Tingkat konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk kondusivitas akses pengembangan usaha; Peningkatan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	teknis dan magang; b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal; c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi; d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisikerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya		• Produktivitas daerah : Peningkatan Produktivitas daerah, kapasitas fiskal daerah, % Investasi daerah, % pertambahan PAD • Kepastian hukum usaha sehat: Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan • Kesiapan Kualitas SDM: Tingkat pendidikan, kompetensi teknologi dan keterampilan tersertifikasi; • kondusivitas daerah: keamanan yang terkendali (angka kriminalitas, angka gangguan trantibum, angka pelanggaran perda, dll)

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2018	Prioritas Daerah Tahun 2018
	tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata.		

4.2.1.3.5 Koneksitas Sasaran, Program Prioritas Pembangunan Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Jika dilihat dari Sasaran dan Program Prioritas Kota Magelang terhadap dukungan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2018 dan Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6

KONEKSITAS PRIORITAS SASARAN, PROGRAM KOTA MAGELANG TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	Persentase pegawai berkinerja baik	97%	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Persentase kehadiran ASN	97%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,21%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
				2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,08%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
				1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase unit kerja yang menerapkan finger print	79%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang dan Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan:				Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
							- Pendidikan S1	47%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
							- Pendidikan S2	9%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
						2	Persentase ASN yang mengikuti diklat yang	100	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					diselenggarakan oleh BKD					
				Program Pendidikan Kedinasan	1 Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	95%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
					2 Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
				3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	1 Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	85%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
				1 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas	1 Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	90%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	1 Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	96%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Capaian SPM Kota Magelang	60%	1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1 persentase SPM yang mencapai target nasional	70%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Tata Organisasi/ Tapem	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	48%	1 Optimalisasi sistem persandian daerah	1 Ketersediaan SOP persandian	100%	Persandian	PD Urusan Persandian	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
					2 Tingkat kapasitas SDM persandian	100%	Persandian	PD Urusan Persandian		
					3 Persentase SKPD yang mengimplementasikan SOP Persandian	90%	Persandian	PD Urusan Persandian		
				1 Program peningkatan kualitas pelayanan arsip	1 Cakupan pelayanan akses arsip	67%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
					2 Tingkat Kompetensi SDM Pengelola Kearsipan	39%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan		
				1 Program Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	1 persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarpras Kearsipan	1 Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,5	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	1	Persentase Penyelamatan Arsip	53%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	1	Cakupan ijin penggunaan arsip	90%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	1	Publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Persentase penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	95%	Penunjang pemerintahan	PD Penunjang Pemerintahan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Indeks EKPPD	3	2	Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan	2	Persentase penyelenggaraan urusan berkinerja sangat tinggi	90%	Penunjang pemerintahan	PD Penunjang Pemerintahan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Hasil implementasi SAKIP	CC (54,00)	1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Nilai hasil evaluasi LKJip SKPD	BB	Penunjang Pemerintahan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	45%	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Penurunan temuan kasus LKPD	1	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	84%	Penunjang Keuangan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	2 Tingkat kapasitas pemahaman tentang SAKIP	85%	Penunjang Pemerintahan	PD Penunjang Setda Bagian Tata Organisasi	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1 Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 Prosentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	80%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 rasio laporan APBD, DAK, Bankeu tepat waktu	90%		PD Penunjang Setda Bagian Pembangunan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	BB	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Prosentase jumlah SKPD yang di review LkjiP	45%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	30%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
				1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	35%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	35%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Temuan ketidakpatuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
						3	Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
						4	Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
				1	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 2	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	65%	Penunjang Pengawasa n	PD Penunjang Pengawasan		
						3	Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	70%	Penunjang Pengawasa n	PD Penunjang Pengawasan		
				1	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	Cakupan pemeriksaaan	65%	Penunjang Pengawasa n	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Persentase implementasi SPIP	78%	Penunjang Pengawasa n	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Persentase Temuan Administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP menurun	75%	Penunjang Pengawasa n	PD Penunjang Pengawasan		
						3	Persentase Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIP menurun	50%	Penunjang Pengawasa n	PD Penunjang Pengawasan		
				1	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	Persentase Aparat SPIP aktif	65%	Penunjang Pengawasa n	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Persentase Zona Integritas yang dibentuk	20%	Penunjang Pengawasa n	PD Penunjang Pengawasan		
1.3	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan 70ndemi yang responsif	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	48,48%	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Nilai survey kepuasan pengguna layanan PD	95	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Organisasi	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				3		2	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	56%	Penunjang/ Fungsi Lain	:PTSP	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Tingkat ketersediaan pokok-pokok pikiran Dewan	100%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				2	Program Pengembangan Data/ Informasi	1	Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				3	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1	Persentase Penyebaran Informasi	80%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.4	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart	Persentase PD menerapkan e-Gov	80%	1	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1	Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Umum	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%	Admindak dan Capil	PD Urusan Admindak dan Capil	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
							Cakupan penduduk memiliki KIA	100%				
						2	Persentase implementasi SOP dalam pelayanan administrasi kependudukan	15%	Admindak dan Capil	PD Urusan Admindak dan Capil		
				1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 penduduk	935	Admindak dan Capil	PD Urusan Admindak dan Capil	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase kepemilikan KK	100%	Admindak dan Capil	PD Urusan Admindak dan Capil	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase kepemilikan Akta Kematian	50%	Admindak dan Capil	PD Urusan Admindak dan Capil	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
1.4	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart	Persentase PD menerapkan e-Gov	80%	1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Interoperabilitas antar system informasi	2	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
	City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	60%									
				1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	50%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	70%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
						2	Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo		
				2	Program Fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1	Peningkatan SDM bidang kominfo	80%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang tehnologi informasi	80%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo			

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46	Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	1	Persentase implementasi e-arsip	52%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
1.5	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	90%	1	Program perencanaan Pembangunan Daerah	1	Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Persentase Pokok Pikiran DPRD yang diakomodir	75	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		
		Persentase Publikasi data dan 73ndemic73 i sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%			3	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	78%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				2 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1 cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				3 Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				4 Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				5 Perencanaan bidanag fisik prasarana	1 Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik prasarana	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.6	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan 75ndem daerah			6.	Program Penguatan Inovasi Daerah	1	Cakupan Penguatan SIDA	45%	Penelitian dan Pengembangan	PD Urusan Penelitian dan Pengembangan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1	Program pengembangan data/informasi/75ndemic75i daerah	1	Persentase pemenuhan data	95%	Statistik	PD Urusan Statistik	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Derajat Otonomi Fiskal	25,86%	1	Peningkatan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah	1	Rasio pajak daerah terhadap PAD	12,56%	Penunjang	PD Penunjang Keuangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
						2	Rasio retribusi daerah terhadap PAD	3,63%	Penunjang	PD Penunjang Keuangan		
		Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	73,66%	1	Program Peningkatan kinerja dan pengembangan pengelolaan perusda	1	Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD	2,52%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Perekonomian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Persentase pertumbuhan PAD	19,18%	Penunjang	PD penunjang Keuangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	65%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan	Pembangunan Ekonomi	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2 Barang milik daerah yang didayagunakan	100%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
						3 Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	75%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
						4 Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
1.7	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60%	1	Program perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	75	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	58,62			2 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	40	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		
		Persentase perkembangan kerjasama daerah	3,06%	1	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1 Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	14%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							Presentase krenova OPD yang berkualitas	6%				
				2	Program Penelitian dan Pengkajian	1	Persentase hasil riset/kajian yang ditidakanjuti	35%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembang an	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				3	Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK	1	Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	12%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembang an		
				4	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	1	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	45%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembang an	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				5	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	1	Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	12%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembang an	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	1	Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	5%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembang an		
				7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	1	Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	10%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembang an	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.8	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			8	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	1	Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	60%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan		
				1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Jumlah KIM per kelurahan	1	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Informasi dan Komunikasi	Pemerataan dan Kewilayahan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan untuk interaksi	7	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Informasi dan Komunikasi		
											Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	1	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	Penunjang Pemerintah an umum	PD Penunjang Pemerintah umum	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				2	Program Kerjasama Pembangunan	1	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3	Penunjang Perencanaa n Pembangunan	PD Penunjang Perencanaan Pembangunan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
		Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan	3,06%	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Cakupan LPM berprestasi	47%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		bersama pemerintah		2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100,00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				4	Program Infrastruktur Pedesaan	1	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				5	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	1	PKK aktif	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				2	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	1	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
1.9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional	6	1	Peningkatan peran serta kepemudaan	1	Prosentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95,00%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		dan internasional	4									
		a. Regional				2	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		b. Nasional		2			3	Prosentase pengangguran pemuda	6,40%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	
		c. International	0	1	Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda	1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	82%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	17	2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup bagi pemuda	1	Persentase kelompok wirausaha pemuda	75	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		a. Regional	10	1	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		b. Nasional	5			2	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	71%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		c. International	2	2	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1	Peningkatan cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						3	Jumlah klub olahraga	183	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
						4	Jumlah organisasi olahraga	35	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
Misi 2 : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan												
2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	Rata-rata lama sekolah	2	1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	APM SD/SDLB/MI/Paket A	99,61%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2	APK SD/SDLB/MI/Paket A	114%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan			
					3	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	78,00%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan			
					4	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	88,00%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan			

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					5 Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:136	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					6 Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	1:290	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					7 Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					8 Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					1 Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					2 Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,13	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					3 Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9 Tahun	0,002	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					4 Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		Persentase sekolah berstandar nasional			5 Angka Melanjutkan SMP ke SMA	157%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		a. SD	2		6 Persentase sekolah yang menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai 83ndemic83i dan pendidikan karakter bagi siswa	65%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		b. SMP	70%		7 Penurunan angka kenakalan pelajar	42 pelajar	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		Angka Melek Huruf	70%		8 Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa		Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		Persentase kunjungan perpustakaan	72,52%		9 Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	85%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		Jumlah kunjungan perpustakaan	96.200		10 Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	87%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					11 Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	30%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
				1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD	66%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1	Program Pendidikan Non Formal	1	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96,99%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						3	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						4	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						5	Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15,00%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35,50%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						1	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,05%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					1 Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					1 Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	53,15%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					1 Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,10%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					1 Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	67,67%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	90%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
					2 Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	97%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					3 Prosentase sekolah melaksanakan CBT SD/MI	30%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					4 Prosentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs	45%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1 Program Pendidikan Berkelanjutan	1 Persentase pandemic pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	92,74%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	45%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1 Persentase peningkatan judul buku	5,60	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Persentase peningkatan jumlah buku	6,26	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					3 Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	52,13	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					4 Presentase perpustakaan aktif	21,33	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					5 Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					6 Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12,50%	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					7 Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					8 Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	85%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
2.2	Meningkatnya kualitas sarana, layanan dan derajat kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	7 bh (54%)	1 Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	1 Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	AA	Kesehatan	RSU Tidar	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)		2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1 Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	60%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	82%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Angka Harapan Hidup	76,71	4 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1 Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		AKI/ 1.000 KH	126	5 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1 Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		AKB/ 1.000 KH	14,5	6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		AKABA	0,155	1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4	95%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31		2 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Angka Kesakitan DBD	0,31		3 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	92%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Angka Prevalensi Kasus TB	<105			4	Cakupan Pelayanan Nifas	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,05%	2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1	Cakupan pandemic dengan komplikasi yang ditangani	85%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	98%			2	Cakupan Kunjungan Bayi	96%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						3	Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						3	Prevalensi Gizi Buruk	<0.31	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				4	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1	Penemuan dan penanganan Penderita DBD	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Angka Kesakitan DBD	<50	Kesehatan	PD Urusan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
								Kesehatan		
				5 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1 Angka Prevalensi (Case Notification Rate = CDR) TB	90	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Success Rate = TSR) TB	90%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
					3 Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
					4 Prevalensi Hiv dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
					3 Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarkes strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				8	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	1 Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	87%			Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				9	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1 Cakupan pengawasan obat dan makanan	70%			Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				10	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1 Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%			Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				11	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1 Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	97%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				12	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1 Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2 Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
2.3	Meningkatnya kontribusi sektor 91ndemic91 usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	16,15%	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	1 prosentase peningkatan kualitas pelaku UKM		Wajib Koperasi UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	program peningkatan kemampuan teknologi industri	1 Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,09%	Pilihan – perindustrian	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1 Prosentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	4%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1 Prosentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%	Wajib –	PD Urusan Koperasi UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
							Koperasi UKM				
				1	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	1 Prosentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	3%	Wajib –	PD Urusan Koperasi UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
								Koperasi UKM			

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
				1	Program pengelolaan pasar	1	persentase pasar tradisional yang dikelola	80%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
						2	Persentase penurunan kejadian pandemik di lingkungan pasar	2%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
						3	Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
						4	Cakupan Pedagang Pasar yang dibina	10%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
				1	Program pembinaan PKL dan asongan	1	Cakupan PKL yang dibina	10%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
						2	Jumlah shelter PKL yang dikelola	14	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
2.4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)	16,15%	1	Program wajar dik das 9 tahun	1	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	30%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	10%	1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1	Persentase Sarana Prasarana Kesehatan memenuhi universal design	20%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	
		Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	20%	1	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Persentase Sarana Prasarana Perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang yang memenuhi universal design	40%	Perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
2.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	75,65	1	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan
				1	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	Persentase Sumber Daya Alam yang terkonservasi	57,7%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Indeks Pencemaran Udara	61,8	1 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	1 Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 buah	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
		Indeks Tutupan Vegetasi	48,55	1 Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1 Jumlah Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
		Volume sampah yang dibuang ke TPSA	158,7							
				1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	4,3	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	89%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1 Persentase rumah sehat	84,3%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1 Luas lahan pertanian organik	0,98	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
					2 Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	51,7%	Pertanian	PD Urusan Pertanian		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1 Jumlah pelaku usaha peternakan 95ndemic:				Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
					a. Peternak ayam buras/ ayam broiler	2	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
					b. Peternak kelinci	2	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
					c. Peternak kambing/domba	2	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
					d. Rasio peternak terlatih	85%	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
				2 Program pengembangan system penyuluhan perikanan	1 Luas lahan perikanan organik	0,3	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
2.6	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau		1 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1 Luas RTH Kota	18%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
		a. Privat	10							
		b. Publik	18,37							

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
2.7	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	18,37	1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1	Cakupan masyarakat paham mitigasi bencana	50%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	5,80%			2	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	40%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
						3	cakupan peningkatan penanggulangan bencana	50%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		
						4	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		
						1	Cakupan penanganan korban bencana	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		
				1	Program penataan peraturan perundangan	1	Ketersediaan kebijakan terkait penanggulangan bencana	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				2	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran	100%	Perumahan dan Pemukiman (bencana alam)	PD Urusan Perumahan dan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
						2	Persentase tingkat waktu tanggap response	100%	Perumahan dan Pemukiman (bencana alam)	PD Urusan Perumahan dan Permukiman		
2.8	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	24%	1	Program Perencanaan Tata Ruang	1	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PD Urusan PU dan Tata Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
						2	Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						3	Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					4 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	25%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					5 Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	6%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					6 Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	33%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				2 Program Pemanfaatan Ruang	1 Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	80%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				3 Program pengembangan wilayah perbatasan	1 Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	90%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat										

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.1	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12%	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	1342 m	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	91%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
						2	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	88,5%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	66,34%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	1	Rasio ketercukupan PJU	65%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sektor Unggulan	Ketahanan Pangan dan Energi
				1	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1	prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	86%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	jumlah shipon yang dibangun	7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				1	Program pembangunan jalan dan jembatan	1	Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	66,34%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				2	Program rehabilitasi/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong		prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	86%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	1	Prosentase perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				2	Program pengaturan jasa konstruksi	2	Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	80%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				3	Program pengawasan jasa konstruksi	1	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	74%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						1	Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien)	25%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.2	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Tercapainya 100 – 0 - 100		1	Program Pengembangan Perumahan	1	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan an Kemiskinan
		a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	92,30%									
		b. Rasio Luas kawasan kumuh	39,65 Ha	1	Program Pengelolaan Area Pemakaman	1	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	26,6%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
		c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	3%	1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1	Prosentase penduduk berakses air minum	97%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		Prosentase RTLH	2,90%									

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan			1 Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1 Rasio Luas kawasan kumuh	1 ha	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	89	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
					2 Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	9	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
3.3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8,25	1 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan umum	8	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
					2 Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi (ITS)	60%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
				1 Program peningkatan pelayanan angkutan	1 jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	5%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				2 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1 Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	50%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
					2 Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	2	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
					3 Rasio prasarana parker dengan kondisi baik	66%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
					4 Tingkat pelayanan parker di tepi jalan umum	86	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
					5 Rasio prasarana dengan kondisi baik	66%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
					6 Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	18	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
				3 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasara dan fasilitas LLAJ	1 Jumlah prasaran dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				4 Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1 Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	7.986	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					2 Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	4	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
3.4	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan investasi		1 Program penataan peraturan perundang-undangan	1 Jumlah review PERDA/ PERWAL	1	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%		2 Jumlah RAPERDA/ RAPERWAL baru tentang investasi	0	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Hukum		
		b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1 Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	3	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
				2 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1 Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
					2 Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15,00%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
					3 Jumlah investor baru	168	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1 Implementasi pemanfaatan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik)	75%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	0	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
				2 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	1 Jumlah wirausaha baru	100 UMKM	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
					2 Prosentase peningkatan kualitas pelaku usaha KUM	3%	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM		
				1 Program pengembangan 105ndemic105 kecil dan menengah	1 Peningkatan daya saing IKM Formal	3,15%	Perindustria n	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				2 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1 Persentase koperasi aktif	93,40%	Perdaganga n	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Persentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	27%	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM		
				3	program pengembangan sentra-sentra 106ndemic106 potensial	1	Jumlah sentra industri	12	Perindustria n	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1	Jumlah IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI dll)	4,15%	Perindustria n	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1	Jumlah ekspor produk LN	US\$1.100.000	Perdaganga n	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1	Jumlah alat UTTP yang ditera	2.800	Perdaganga n	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1	Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	11,76%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1	Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	3%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				4	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1	Rasio petani terlatih	85%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1 Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	1,82	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				1 Program pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	1 Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	2,42%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				1 Program pengembangan budidaya perikanan	1 Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	50%	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
					2 Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	40%	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan		
				2 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1 Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP	0	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
					2 Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan		
				1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1 Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	5	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.5	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	75%	1 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1 Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	14%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Presentase krenova OPD yang berkualitas	6%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan		
					3 Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti	35%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan		
		Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	28%	2 Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				3 Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah			Penunjang Sekretariat	PD Penunjang Setda Bagian Tapem	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				4 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Persentase kawasan strategis yang terbangun	4 kawasan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				7 Program pembinaan PKL dan asongan	Cakupan PKL yang dibina	10%			Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
					Jumlah shelter PKL yang dikelola	14				

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.6	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaa n pangan utama beras (ton)	12.831	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	1	Jumlah regulasi ketahanan pangan	2	Pangan	PD Urusan Pangan	Pembangunan Sektor Unggulan	Ketahanan Pangan dan Energi
					2	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%	Pangan	PD Urusan Pangan			
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,3	Pangan	PD Urusan Pangan			
					3	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%	Pangan	PD Urusan Pangan			
				2	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1	Produksi tanaman pangan:				Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
							a. Padi	3180	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
							b. Jagung	11				
							c. Ubi kayu	13,5				
				3	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1	Produksi hasil peternakan:		Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
							a. Daging Ruminansia	1.233.486				
							b. Daging Unggas	5.366.516				
							c. Telur	440.000				
							d. Susu	197.600				

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1 Persentase hewan sehat	83	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				4 Program pengembangan budidaya perikanan	1 Produksi hasil perikanan:		Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
					a. Ikan	160,65	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan		
3.7	Meningkatnya lapangan kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	65%	1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1 Persentase pencari Kerja ditempatkan	70%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja	Pemerataan dan Kewilayahan	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
					2 Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	60%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
					3 Pertumbuhan wirausaha baru	75 UMKM	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
					4 Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	75%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
					5 Persentase Tenaga Kerja tersertifikasi BNSP	60%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
				2 Program Perlindungan pengembangan ketenagakerjaan	1 Cakupan tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial	20,00%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja	Pemerataan dan Kewilayahan	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
					2 Prosentase perselisihan	50%	Urusan Tenaga	PD Urusan Tenaga Kerja		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					hubungan industrial yang bisa terselesaikan melalui perjanjian bersama		Kerja			
				1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1 Persentase (%) calon transmigrasi yang ditempatkan	100%	Transmigrasi	PD Urusan Transmigrasi	Pemerataan dan Kewilayahan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				2 Program Transmigrasi Regional	1 Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%	Transmigrasi	PD Urusan Transmigrasi	Pemerataan dan Kewilayahan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
3.8	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	Persentase Penurunan PMKS	15%	1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	10,00%	Sosial	PD Urusan Sosial	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				2 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1 Persentase penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	15%	Sosial	PD Urusan Sosial	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2 Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20,00%	Sosial	PD Urusan Sosial	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				4 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1 Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	70%	Sosial	PD Urusan Sosial	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20%	Sosial	PD Urusan Sosial		
				4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	Sosial	PD Urusan Sosial	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1 Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	50%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	1 Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Ekonomi	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya						
				3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	3	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
3.9	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	1 Program Keluarga Berencana	1 Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1 Persentase perempuan di bawah 19 tahun yang menjadi ibu dan atau melahirkan anak pertama	2%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				3 Program pelayanan kontrasepsi	1 Cakupan peserta KB aktif	77,50%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	64%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				5	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				6	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	77%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5%	5%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	77%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						4	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	88%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					5 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					6 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					7 Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					8 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					9 Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	10%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					10	Prosentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	57%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					11	Prosentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	13%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					12	Prosentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					13	Prosentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	88%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					14	Prosentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	95%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					15	Prosentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					16	Prosentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					17	Prosentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					18	Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					19	Prosentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	2%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					20	Prosentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					21	Prosentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						22	Prosentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
3.10	Menurunnya kesenjangan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%	1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	1	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				2	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%			2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
		Rasio KDRT	20%			3	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
				2	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1	Rasio KDRT	0,055%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							n Anak	anak		
					2	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
					3	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
					4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					5 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
					6 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
					7 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					8 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang										
4.1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkandan situs cagar budaya yang dilestarikan	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	20%	1 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1 Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	223	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	5	2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1 Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14,86%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Jumlah festival seni dan budaya.	11	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
				3 Program Pengembangan Nilai Budaya	1 Jumlah gedung kesenian	1	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	11	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
					3 Cakupan kajian seni 50%	75%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						4	Cakupan fasilitas seni 30%	35%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						5	Cakupan gelar seni 75%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						6	Misi kesenian 100%	38%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						7	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						8	Cakupan tempat 100%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						9	Cakupan organisasi 34%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
				1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Jumlah pengunjung museum	5150	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						3	Jumlah koleksi museum	11	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
4.2	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	Jumlah Wisatawan		1	Program pengembangan destinasi pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1136435	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
a. Nusantara		1.136.435			2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5185	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata			
b. Mancanegara		5.185			3	Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	3	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata			

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Lama Kunjungan Wisatawan	2-3 hari	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
						2	Persentase TIC yang representatif	0	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata		
				2	Program pengembangan kemitraan	1	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	9	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani												
5.1	Terbentuknya karakter 123ndemic123i masyarakat landasan moral dan etika pembangunan	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%	1	Program penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Antar Umat Beragama	1	Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial	1	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				2	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama	1	jumlah kegiatan hari besar keagamaan tingkat kota	53,33	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				3	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah		Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1 Jumlah Kebijakan / peraturan tentang pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat	0	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 124ndemic124 Tahun	1 Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berakar budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	0	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Adanya kurikulum muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berakar bagi siswa	1	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1 Program Peningkatan Mutu pendidikan dasar Sembilan tahun	1 Prosestase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	40%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Prosentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	60%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program pendidikan Non Formal	1 Persentase Sekolah yang menerapkan kegiatan Bina Suasana yang menumbuhkan nilai religious dan pendidikan karakter bagi siswa	60%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program pendidikan Non Formal	1 Penurunan jumlah pelaku kenakalan dan tindak kriminalitas pelajar	25%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Jumlah Pelajar berprestasi	1	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				2 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	2 Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1	Pemuda dan Olahraga	PD Urusan Pemuda dan Olahraga	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1 Prosentase peningkatan jumlah keluarga sejahtera	87%	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1 Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	23	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				2	Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1	Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	20%	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1	Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	1	Cakupan kelompok Sadar Ketahanan Keluarga	44,74%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD UrusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1	Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan bina suasana dan kegiatan – kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing – masing di tiap SKPD	25%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1	Prosentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur	5%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
5.2	Terwujudnya lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat	Angka kriminalitas	13,14									

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Prosentase penurunan kasus narkoba	3%							
		Angka kriminalitas yang tertangani	3%							
		Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100%							
				1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 Keberadaan kebijakan yang mengatur control informasi media massa	1	Kominfo	PD Urusan Kominfo dan PD Urusan Trantibum Linmas (Kesbangpolin mas dan Satpol PP)	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham – paham yang tidak sesuai dengan nilai 127ndemic127i dan nilai –nilai luhur Pancasila	0	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1 Perda yang mengatur Kontrol Tempat Hiburan	-	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas dan PD Urusan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					Perda yang mengatur Pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi	-		Pariwisata		
				1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Keberadaan Perda yang mengatur pelarangan peredaran narkoba	-	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas dan PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa	1 Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	Komunikasi dan Informasi	PD Urusan Komunikasi dan Informasi	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program pengembangan wawasan kebangsaan	1 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,60%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					1 Rasio jumlah siskamling aktif	0,78	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas		
				1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	90%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					2 Cakupan 129ndemi petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	90%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)		
					3 Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	94,50%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)		
					4 Jumlah Satpol PP	NA	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)		
				1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Prosentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1,13%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1 Prosentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		
				1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	1 Prosentase penanganan penyakit masyarakat	90%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas(Kesbangpolinmas, Satpol PP)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas(Satpol PP)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
					2 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	70,47	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)		
					2 Cakupan 130ndemi pengamanan wilayah oleh linmas	9	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)		
					3 Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11,27%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)		
					4 Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	NA	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Satpol PP)		
				1 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1 Cakupan anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang terlatih dalam deteksi dini	18,75%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program Pendidikan Politik Masyarakat	1 Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas dan bagian Kesra)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Tingkat partisipasi politik	0	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		
				1 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Frekuensi Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	8	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas dan Bagian Kesra)		
				1 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Frekuensi dialog yang dipublikasikan	5	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1 Persentase ormas yang difasilitasi	7,87%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2018	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
5.3	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3	1 Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama)	1 Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	5%	Sosial	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Bagian Kesra)		
				1 Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama)	1 Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	1	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
		Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	0	1 Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama)	1 Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	0	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Cakupan ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap PD	20%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 132ndemic132 Tahun	1 Prosentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	85%	Sosial	PD Urusan Pendidikan dan PD Urusan Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang

4.3.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir Tahun 2015. Setelah tahun 2016 yang merupakan transisi post MDGs menuju Sustainable Development Goals (SDGs), maka Proposal SDGs 2015-2030 melibatkan 17 Goals dan 169 indikator. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kehidupan yang layak di segala umur.
4. Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil langkah-langkah yang urgen untuk memerangi perubahan iklim dan akibat-akibatnya.
14. Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan, mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

4.3.2 Pendekatan Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai milestones baru menuju SDGs, persiapan implementasi SDGs di Kota Magelang harus dilakukan dengan baik dan melalui pendekatan perencanaan yang tepat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi

pencapaian target MDGs di Kota Magelang sampai dengan tahun 2015. Beberapa pendekatan kebijakan dan strategi SDGs dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun

Tujuan memberantas kemiskinan didekati antara lain melalui : a) Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha, b) peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal, c) pemberian akses permodalan, d) perluasan akses pasar/promosi, e) peningkatan akses pada pelayanan dasar seperti papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan

2. Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.

Dilaksanakan melalui program : a) Peningkatan ketahanan pangan, b) Program peningkatan produksi pertanian melalui pola urban farming, serta c) peningkatan penerapan teknologi pangan, peternakan dan perikanan.

3. Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kehidupan yang layak di segala umur.

Dilaksanakan melalui program : a) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, b) Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita, c) peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan, d) Pelayanan kesehatan masyarakat; e) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan; f) penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.

4. Tujuan 4: Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Program yang dilakukan antara lain : a) Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), b) pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, c) peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, d) perbaikan manajemen pendidikan, serta e) Peningkatan minat baca masyarakat

5. Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan

Pendekatan program yang dilakukan melalui pendekatan: a) Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, b) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

6. Tujuan 6: Memastikan ketersediaan dan manajemen berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.

Hal ini dapat dilakukan melalui : a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, b) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), c) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan d) Program Lingkungan Sehat Perumahan.

7. Tujuan 7: Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Upaya upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui: a) perkuatan sistem inovasi daerah, b) fasilitasi riset unggulan daerah terkait energi alternatif dan terbarukan.

8. Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja yang layak untuk semua.

Program peningkatan kesempatan kerja; b) Perlindungan Pengembangan Lembaga Kesempatan Kerja, c) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Peningkatan Promosi dan Investasi, d) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, e) Pengembangan Destinasi Wisata, f) Pengembangan Pemasaran Wisata, g) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, h) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

9. Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.

Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan cara : a) Program pembangunan jalan dan jembatan, b) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, c) program pembangunan infrastruktur pedesaan, d) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

10. Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.

Di level daerah kombinasi pendekatan di tujuan ke delapan dan ke sembilan akan cukup memberikan akselerasi dalam mengurangi ketimpangan. Perkuatan SDM dan perhatian kepada kesamaan pendidikan juga akan mampu mengurangi kesenjangan. Index Gini dan Index Williamson yang berkualitas untuk pertumbuhan dan pemerataan.

11. Tujuan 11: Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan menuju smart city menjadi bagian penting pada perencanaan tahun 2016. Perlu dirancang sebuah masterplan membangun kota yang cerdas ditinjau dari berbagai aspek. Program konvensional yang sudah ada sebelumnya perlu dilakukan intensifikasi misalnya: a) Program Pengembangan Perumahan, b) Program Lingkungan sehat perumahan, c) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum perumahan

12. Tujuan 12: Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.

13. Tujuan 13: Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.

14. Tujuan 14: Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk sumber daya kelautan Kota Magelang tidak memiliki keunggulan komparatif. Namun demikian pengembangan perikanan darat masih terus diupayakan melalui : a) program Pengembangan budidaya perikanan, b) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

15. Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.

Dapat dilaksanakan melalui: a) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, b) Program rehabilitasi hutan dan lahan, Program konservasi sumber daya alam.

16. Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.

Pendekatan reformasi birokrasi secara komprehensif, pengembangan e-governance yang menjamin transparansi, serta penciptaan keamanan.

17. Tujuan 17: Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

Dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar daerah antar negara, pemanfaatan kerjasama secara sister city serta peningkatan menjalin networking dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN yang melibatkan ke empat pilar pembangunan terutama pemerintah, swasta, perguruan tinggi.

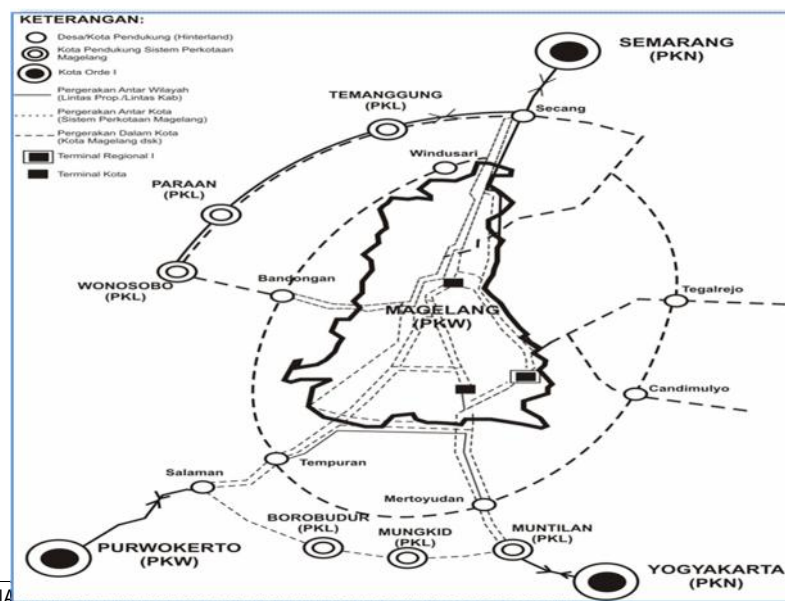
4.4 Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari sudut pandang Pengembangan Wilayah. Berdasar dokumen Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang Tahun 2015-2020, pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan Kota Magelang..

4.4.1 Arah Pengembangan Eksternal Wilayah

Mengacu pada UU Penataan Ruang No. 26/ 2007, secara umum telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota-kota, baik yang mempunyai status otonomi maupun tidak, merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Adapun Gambaran mengenai Sistem Perwilayahan Eksternal Kota Magelang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar IV.2

Konstelasi Kota Magelang Terhadap Kawasan Sekitarnya

Beberapa daerah yang berada di PKW Kota Magelang antara lain Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG. Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
- b. Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
- c. Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- d. Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
- e. Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
- f. Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
- g. Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten;

Arah pengembangan Kota Magelang untuk meningkatkan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), diantaranya:

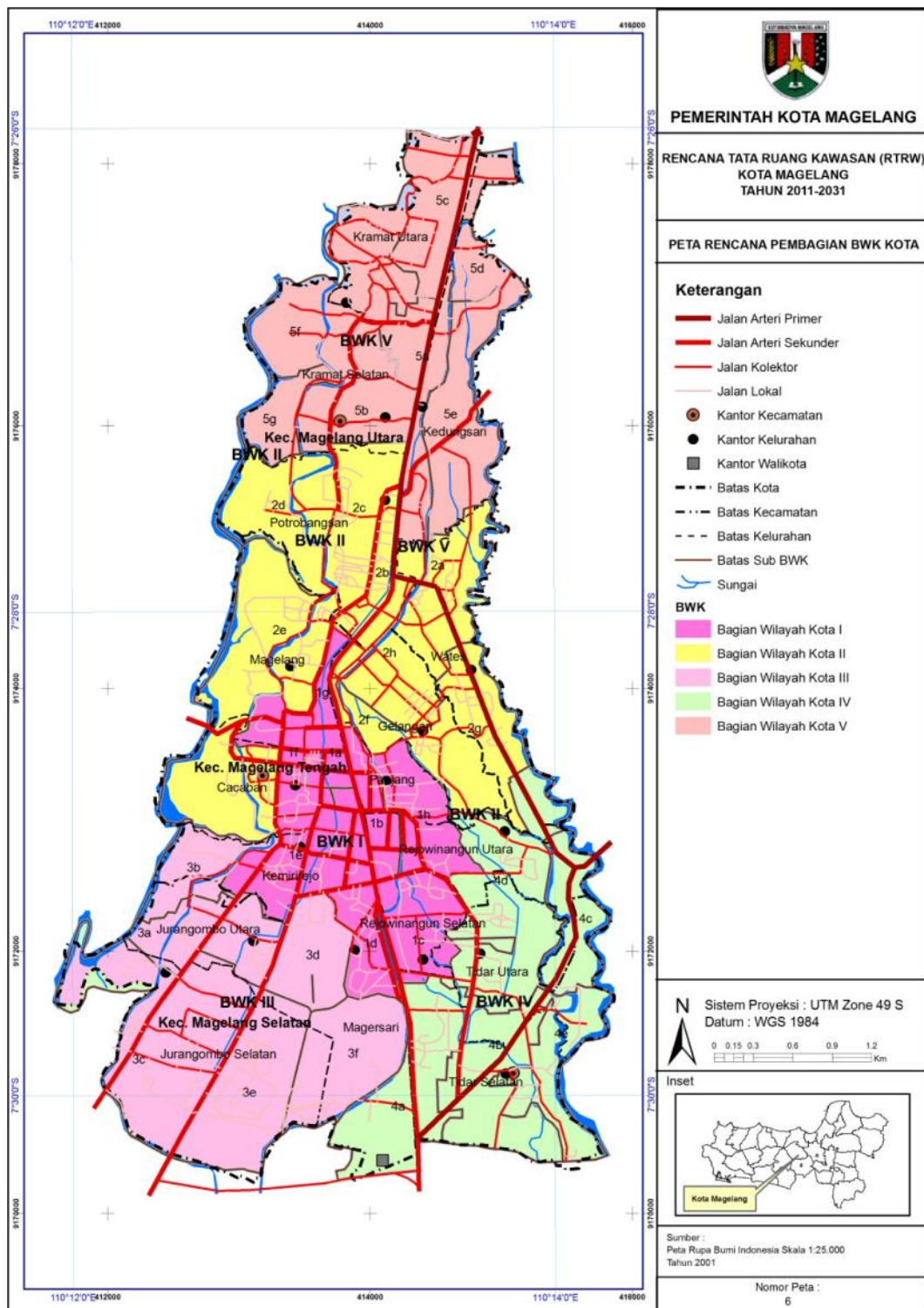
- a. pengembangan secara vertikal kawasan komersial 10 lantai;
- b. alokasi ruang pada kawasan strategis Daerah (jalur utama pergerakan transportasi Semarang-Yogyakarta), yaitu untuk perdagangan-jasa skala kota dan regional (Purwomangung), meliputi blok peruntukan ruang di Jalan Pemuda, Jalan A.Yani, Jalan Sudirman, sebagian Jalan Urip Sumohardjo, dan sebagian Jalan Sukarno Hatta, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Pahlawan.
- c. pengembangan sarana perekonomian daerah, berupa hipermarket, supermarket, perkantoran, perbankan, perhotelan, pasar tradisional, jasa hiburan, rumah makan, dan kawasan mix use (campuran) berupa rumah-toko (ruko) dan rumah kantor.
- d. Pengembangan kawasan perdagangan-jasa yang layak dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan estetika lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka publik berupa ruang hijau dan non hijau.
- e. pengembangan pariwisata dipusatkan pada BWK III, dan pengembangan potensi wisata pada kawasan lain sebagai pendukung wisata kota.
- f. Pengembangan pendidikan menengah dan tinggi, dengan peningkatan kualitas dan keberagaman jurusan/keahlian, dengan tetap mendukung keberadaan Akademi Militer.
- g. Pengembangan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan.

4.4.2 Arah Pengembangan Internal Wilayah

Dalam rangka optimalisasi pengembangan, kemudahan pengelolaan, peningkatan fungsi pelayanan, pengurangan kesenjangan, serta penentuan kawasan-kawasan yang akan dilakukan pengembangan, maka di Kota Magelang dilakukan pembagian wilayah kota dalam unit-unit lingkungan atau kedalam kawasan fungsional yang lebih kecil. Unit lingkungan perkotaan yang lebih kecil tersebut dikenal sebagai Bagian Wilayah Kota (BWK). Pertimbangan dalam Penetapan BWK di Kota Magelang berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan fungsi (homogenitas) dan dominasi kegiatan tertentu, dimana pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu satuan wilayah akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan segala kegiatan yang terjadi.
- b. Batasan kemampuan jangkauan pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial ekonomi skala BWK.
- c. Adanya batas fisik yang jelas seperti jalan, sungai dan lain-lain.
- d. Kekompakan wilayah terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan, sehingga tercapai efisiensi .

- e. Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan integrasi antara kota lama dengan kawasan pengembangan (efisiensi sistem pergerakan).
- f. Memantapkan peran BWK dengan meningkatkan sarana-prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya (efisiensi pelayanan sarana umum).
- g. Kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan masing-masing wilayah fungsional.

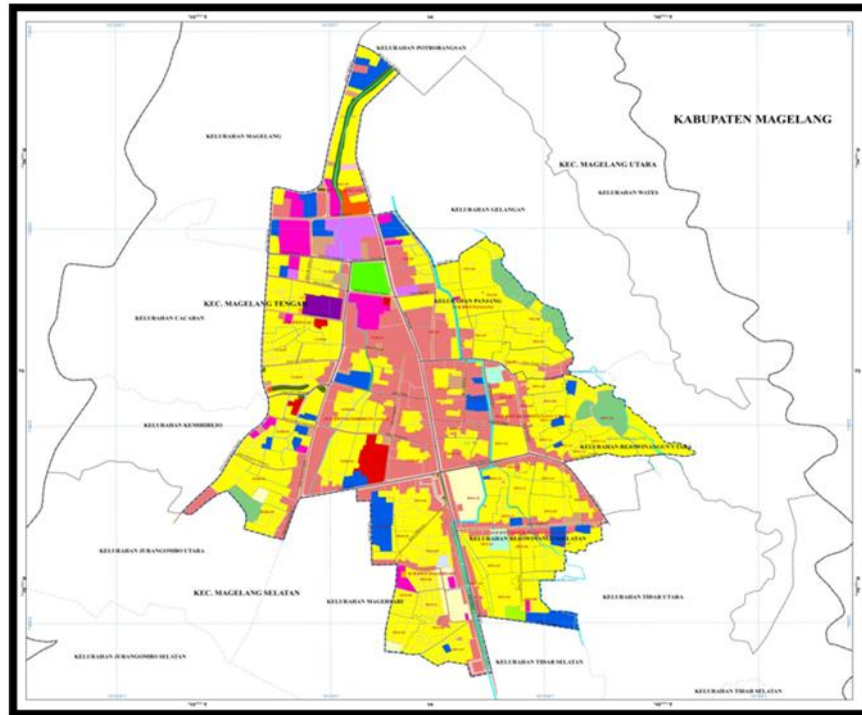


Gambar IV.3
Peta Rencana Pembagian BWK

Pada setiap BWK dialokasikan pusat-pusat kegiatan dengan pengarahannya. Adapun pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) dan unit lingkungan yang ada di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

4.4.2.1 Bagian Wilayah Kota I (BWK I)

Dengan luas kurang lebih 255 Ha, BWK I memiliki fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, seluruh Kelurahan Rejowinangun Selatan, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Cacaban. Karakteristik BWK Pusat Kota adalah lokasi di tengah wilayah kota dan mempunyai daya jangkau yang relatif merata dari semua sudut kota. Fasilitas pelayanan dasar khususnya fasilitas ekonomi dan sosial kota, tersedia dan tersebar cukup merata di BWK I. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sangat tinggi, sehingga dimasa yang akan datang harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan secara vertikal.



Gambar IV.4
Peta Pola Ruang BWK I

Sedangkan Arahan Pengembangan BWK I adalah sebagai berikut:

- mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;
- mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- mewujudkan RTH taman kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau

Di BWK I ada beberapa Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu:

- #### 4.4.2.2 Bagian Wilayah Kota II (BWK II)

BAB IV - 141

Pola Ruang BWK II

Arahan Pengembangan BWK II :

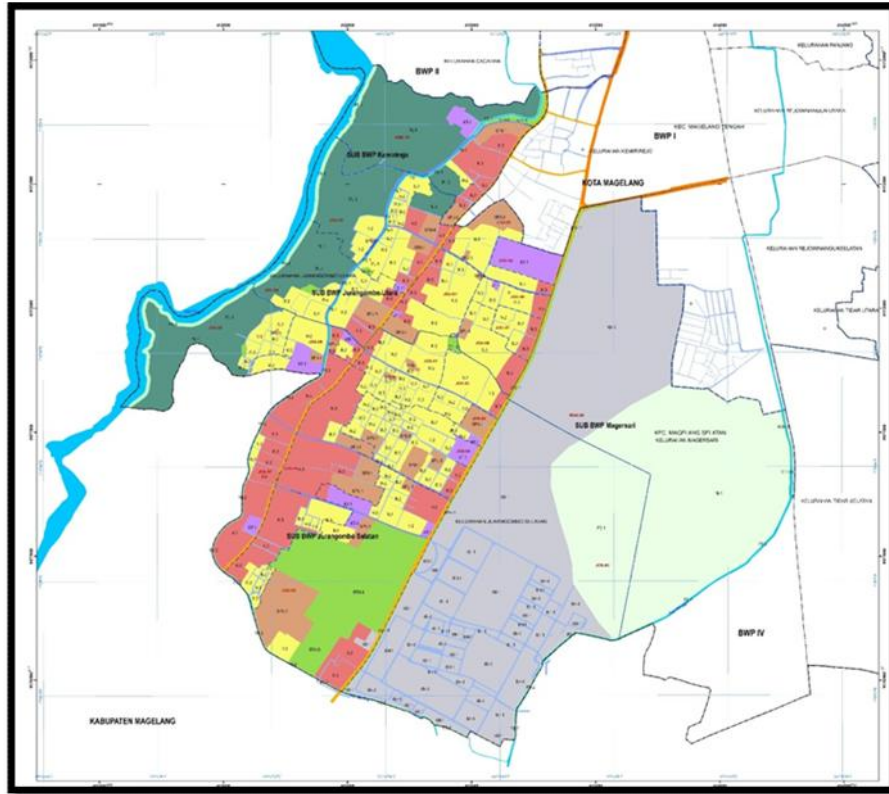
- a. mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan tinggi dan sedang, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat;
- b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Di BWK II ada Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu: Kawasan Mantiasih. Yang berfungsi sebagai kawasan sejarah cikal bakal Magelang yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan dengan skala pelayanan daerah dan regional. Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:

- a. Penataan kawasan Mantiasih;
- b. Peningkatan aksesibilitas kawasan;
- c. Pengembangan destinasi pariwisata.

4.4.2.3 Bagian Wilayah Kota III (BWK III)

BWK III dengan luas kurang lebih 383 Ha, dengan arahan fungsi dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkatan darat, dan permukiman dengan kepadatan rendah, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan, sebagian Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kemirirejo, Kawasan perkotaan pada BWK III harus dipertahankan rasio antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau. Prediksi pemanfaatan lahan dimasa depan tidak begitu banyak bergeser dari alokasi lahan saat ini. Sedangkan pengembangan bidang kepariwisataan sangat potensial untuk diarahkan di kawasan BWK III tersebut. Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung kota berlokasi di BWK III. Kekuatan pasar akan mendesak penggunaan lahan Gunung Tidar atau sebagian lahan gunung tersebut untuk kegiatan ekonomi dan wisata



Gambar IV.6
Peta Pola Ruang BWK III

Arahan Pengembangan BWK III :

- mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan rendah dan sedang, rekreasi kota/wisata alam, dan pendidikan angkatan darat
- mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- mewujudkan kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hutan kota;
- mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

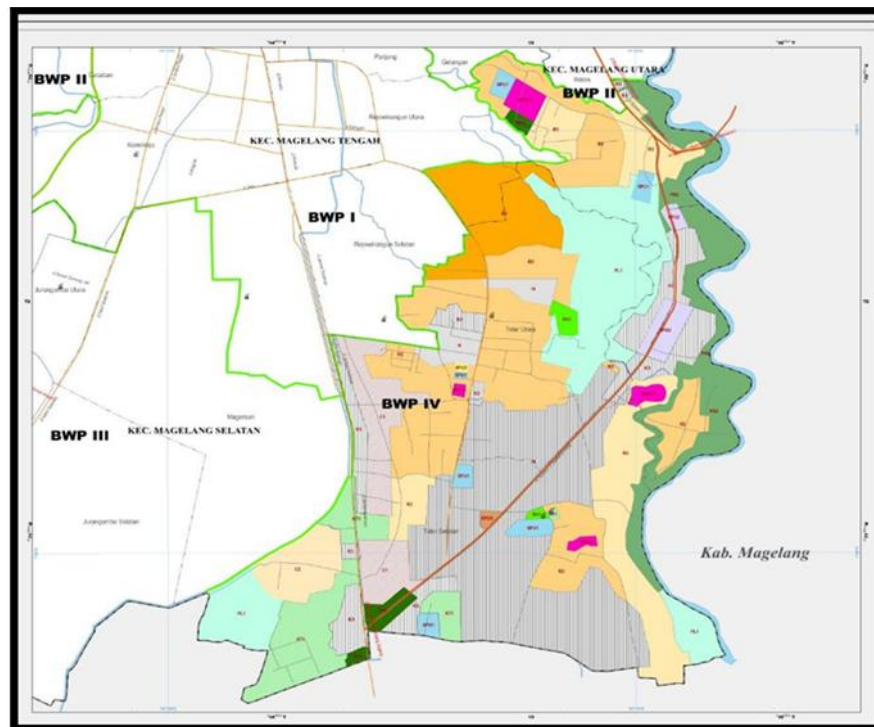
Di BWK III ada Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu: Kawasan Gunung Tidar, Fungsi kawasan adalah sebagai kawasan plasma nutfah Daerah dan pengembangan destinasi pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam.

Rencana penanganan kawasan prioritas kawasan Gunung Tidar dilakukan dengan:

- penegasan batas kawasan lindung Gunung Tidar dengan kawasan budidaya yang ada di seputar kawasan;
- revitalisasi kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan plasma nutfah Daerah;
- reboisasi pohon di Kawasan Gunung Tidar secara bertahap dan berkala;
- pengembangan kawasan sebagai kawasan pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam masih dimungkinkan selama tidak mengganggu dan mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung; dan
- pengembangan secara terbatas sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jalan setapak dan harus mempunyai kejelasan fungsi dari pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

4.4.2.4 Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV)

BWK IV dengan luas kurang lebih 437 Ha, dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan permukiman kepadatan tinggi, dan terdiri dari sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Wates, dan seluruh Kelurahan Tidar Utara dan seluruh Kelurahan Tidar Selatan. Keberadaan Terminal Tidar ikut menjadi faktor pengungkit/pendorong perkembangan di kawasan tersebut. Peningkatan kegiatan perdagangan di BWK IV dimasa yang akan datang akan menjadi dominan, terutama dengan berkembangnya Kawasan Soekarno-Hatta; Kawasan Cangkuk, serta berkembangnya Kawasan Mertoyudan (kawasan perbatasan) yang berada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan perdagangan dan perkantoran. Pada BWK IV ini terdapat simpul-simpul kawasan yang merupakan gerbang pintu masuk kota dari arah selatan dan timur. Sehingga penataan ruang pada kawasan tersebut memerlukan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas ruang kota.



Gambar IV.7
Peta Pola Ruang BWK IV

Arahan Pengembangan BWK IV :

- Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWK IV Kota Magelang sebagai subpusat pelayanan kota;

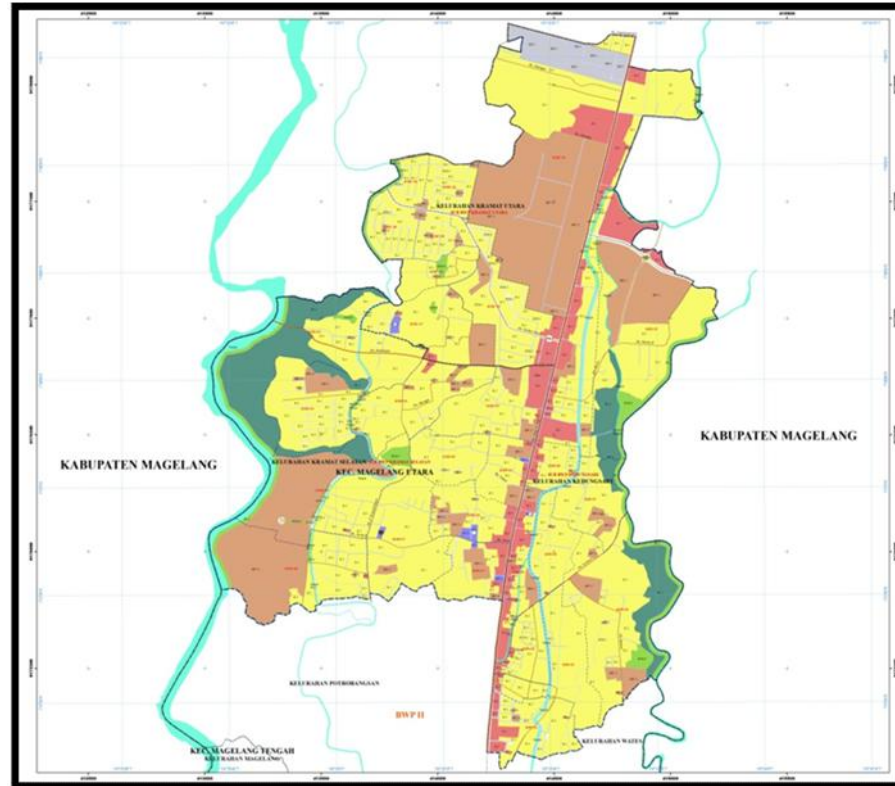
- b. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.
- c. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan permukiman;
- e. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWK IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWK IV Kota Magelang sebagai sub pusat pelayanan kota;
- g. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.
- h. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- i. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan permukiman;
- j. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWK IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan.

Di BWK IV ada Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa dan pergudangan dengan skala pelayanan daerah dan regional yaitu: Kawasan Sukarno Hatta . Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:

- a. Pengembangan Terminal Bongkar Muat;
- b. Pembangunan fasilitas pergudangan;
- c. Penataan RTH kawasan;

4.4.2.5 Bagian Wilayah Kota V (BWK V).

BWK V dengan luas kurang lebih 365 Ha, dengan arahan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial-budaya, olahraga, dan rekreasi. BWK V terdiri dari seluruh Kelurahan Kramat Utara, seluruh Kelurahan Kramat Selatan, dan seluruh Kelurahan Kedungsari. BWK V mempunyai 2 (dua) kawasan strategis yaitu Kawasan Sidotopo yang diarahkan sebagai salah satu kawasan yang mampu kegiatan ekonomi skala kota dan regional dan Kawasan GOR Samapta yang mempunyai arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan olah raga dan rekreasi kota, regional, dan nasional.



Gambar IV.8
Peta Pola Ruang BWK V

Arahan Pengembangan BWK V:

- a. mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;
- b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
- c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
- e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Dari 2 (dua) kawasan strategis di BWK V, Kawasan strategis Gor Samapta yang akan dilakukan pengembangan di Tahun 2016- 2021, dengan rencana pengembangan sebagai berikut:

- a. penyelesaian pembangunan Stadion Moch. Subroto;
- b. revitalisasi Gor Samapta dan sekitarnya;
- c. penataan RTH Kawasan.

4.5 Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 juga memasukkan Pokok –pokok Pikiran DPRD Kota Magelang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendekatan politis Penyusunan RKPD. Pokok pokok pikiran DPRD ini setelah melalui penelaahan baik oleh Bappeda Kota Magelang maupun perangkat Daerah terkait, kemudian dimasukkan dalam skenario Rencana Kerja OPD.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Dalam Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 ini memuat program-program prioritas sebagaimana tema perencanaan yang diusung pada tahun 2018. Program prioritas merupakan program utama yang diselenggarakan oleh OPD yang secara langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

5.1 Kategorisasi Rencana Program Prioritas

Dalam implementasinya, mengingat urgensi dan kapasitas keuangan daerah maka program-program yang telah dijabarkan dibagi menjadi tiga porsi utama, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Definisi masing-masing prioritas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel V.1
Kategorisasi Program Prioritas

No	Prioritas	Terminologi
1	Prioritas I	merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2018 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan kepala daerah, Kesepakatan Hasil Musrenbang, Hasil Telaahan Pokok Pikiran Dewan serta Program Intervensi yang bersifat Nasional/Provinsi, dan hasil hasil Focuss Group Discussion (FGD)
2	Prioritas II	Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
3	Prioritas III	merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD

Program Prioritas pembangunan merupakan pilihan keputusan distribusi sumberdaya yang dimiliki daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan daerah secara terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Harmonisasi tersebut diatur dalam amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor : 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Disebutkan bahwa perlu dilakukan integrasi dan penyelarasan program prioritas secara berjenjang berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara RPJMD-RKPD Kabupaten/Kota dengan RPJMD-RKPD Provinsi dan RPJMN-RKP, serta RPJMD-RKPD Provinsi dengan RPJMN-RKP.

Matrik berikut memaparkan peta harmonisasi program prioritas pembangunan kota Magelang dengan prioritas nasional dan provinsi. Matrik berikut sebagai ringkasan yang akan dijabarkan pada penjelasan berikutnya.

Tabel V.2

Harmonisasi Program Pembangunan Kota Magelang tahun 2018 dengan Program Nasional dan Program Provinsi Jawa Tengah

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Kode	Program Nasional	Kode	Program Provinsi Jawa Tengah
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah	Program Peningkatan disiplin aparatur	1.1.2	Penegakan hukum dan kelembagaan politik;	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			5.4.3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pendidikan kedinasan	4.20.1	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;	5.4.3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			4.20.1.2	Manajemen ASN		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	4.20.1	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;	5.4.3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			4.20.1.2	Manajemen ASN		
2	Peningkatan daya saing daerah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	3.13.2	Peningkatan aksesibilitas	5.1.3.a	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	3.15.1	Mewujudkan sistem perkotaan;	5.1.3.c	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
			3.15.2	Peningkatan Konektivitas & Pengembangan PKN, PKW dan Kawasan Strategis Lainnya		
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	3.16.7.	Pembangunan dan pengembangan transportasi umum masal perkotaan	5.1.3.c	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1.1.1	Reformasi birokrasi pemerintahan	5.1.12.b	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
			1.1.1.2.	Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting, E-	5.2.12.b	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Kode	Program Nasional	Kode	Program Provinsi Jawa Tengah
				reporting dan Complaint Center		
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.20.3	Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan	5.4.2.a	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program peningkatan pelayanan kesehatan	1.2.2.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	5.1.2.c	Program Pelayanan Kesehatan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1.3.6.	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	5.1.1.d	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	3.14.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas	5.13.b.	Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1.1.4.	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa;	5.1.13.d	Program Pembinaan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	3.14.3	Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;	5.1.16.b.	Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.1.4.	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa;	5.1.16.a	Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya
3	Kota cerdas	Program sarana dan prasarana bidang tehnologi informatika	3.15.4	Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK;	5.4.5.d	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Program Pemanfaatan Ruang	3.15.3	Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;	5.1.3.l	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	1.1.3.	Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa;	5.2.1.a	Program Peningkatan Kesempatan Kerja

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Kode	Program Nasional	Kode	Program Provinsi Jawa Tengah
		Menengah				
					5.2.1.b	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			3.10.3	Pengembangan kewirausahaan;		
			3.14.6	Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa – kota;	5.2.11.b	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal
4	Pemerintahan responsif dan partisipatif	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.1.5	Daya rekat sosial dalam kemajemukan.	5.2.10.b	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
		Program perencanaan Pembangunan Daerah	4.20.1	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;	5.4.1.c.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.3.3.	Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;	5.1.1.d	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			1.3.2.	Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;		
			1.3.4.	Pengembangan pembelajaran yang berkualitas;		
			1.3.6.	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas		
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.3.9	Peningkatan relevansi pendidikan	5.1.1.e.	Program Pendidikan Berkelanjutan
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1.2.1	Penguatan promotif dan preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat”;	5.1.2.f	Program Promosi dan Pemberdayaan
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3.10.6	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.	5.1.6.1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Kode	Program Nasional	Kode	Program Provinsi Jawa Tengah
		lainnya				
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	3.10.6	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.	5.1.6.2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.10.6	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.	5.1.6.2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	3.15.3	Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana	5.2.6.e.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			2.5.4.	Penanganan gangguan terhadap produksi pangan.		
			2.8.6.	Jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata.		
6	Pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	3.15.3.	Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;	5.2.5.a.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.14.7	Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.	5.2.5.b.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.9.6.	Ketersediaan infrastruktur dan energi;	5.2.5.a.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
			2.9.6.3	Ketersediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan		
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi	3.14.7	Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan	5.2.5.b	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Kode	Program Nasional	Kode	Program Provinsi Jawa Tengah
7		sumber daya alam dan lingkungan hidup		termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.		
		Program peningkatan pengendalian polusi	3.15.3.	Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;	5.2.5.a.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
		Program peningkatan pengelolaan RTH	3.15.3	Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;	5.2.5.c.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Program Kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat nadani dan media massa dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan		3.15.5.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota	5.3.2.c	Program Pengembangan Kemitraan

Sumber: Racangan RKP, RKPD Provinsi Jawa Tengah, dan SEB Mendagri dan MPPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016

Paparan selanjutnya menjabarkan latar belakang pemilihan program dan keterkaitan antar program tersebut.

5.1.1 Program Prioritas I

5.1.1.1 Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2018

Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Tema dasar perencanaan tahun pertama adalah Kreatif dan Inovatif bersama Mitra.

Program yang sesuai dengan Tema Perencanaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel V.3
Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2018

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	
			Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	
			Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan: - S1 - S2	

		Program Pendidikan kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional dan teknis	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
			Persentase ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	Persentase ASN yang mengikuti diklat prajabatan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2	Peningkatan daya saing daerah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	DPU PR
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kawasan strategis yang terbangun	DPU PR
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Setda
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pertumbuhan PAD	BPKAD
		Program peningkatan pelayanan kesehatan	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Prosentase sekolah melaksanakan CBT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat regional, nasional, dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program pembinaan dan pemasarakatan olahraga	Peningkatan cabang olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Kota cerdas	Program sarana dan prasarana bidang tehnologi informatika	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Persentase PD yang menerapkan e-government	
			Interoperabilitas antar system informasi	
			Cakupan WAN (Wide Area Network) Kota	
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	DPU-PR
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan jenis usaha ekonomi kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Pemerintahan responsif dan partisipasif	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah KIM per kelurahan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan interaksi	

		Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Bappeda
5	Pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/SDLB/MI/Paket A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	
			APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	
			APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Dinas Sosial
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	Dinas SOSial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	Satpol PP
			cakupan peningkatan penanggulangan bencana	
			Cakupan penanganan korban bencana	
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	
6	Pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
			Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah akses informasi lingkungan hidup dan data sda dan lingkungan hidup yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah pemantauan GRK di lima sektor	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pengelolaan RTH	Luas RTH kota	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat nadani dan media massa dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan			

5.1.1.2 Akomodasi Hasil Musrenbang

Salah satu prioritas yang harus diakomodir adalah Prioritas Hasil Musrenbang. Makna Musrenbang Kota Magelang dari waktu ke waktu semakin dipersepsikan baik oleh masyarakat dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pada setiap level Musrenbang

5.1.1.3 Prioritas Program Hasil FGD

Dalam penyusunan Program, salah satu upaya pendalaman berbagai isu strategis adalah melalui Focus Group Discusion (FGD). FGD dilaksanakan dengan melibatkan OPD terkait bersama stakeholders, LSM dan delegasi masyarakat dari kelurahan dan kecamatan.

Dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 beberapa FGD sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.4

Tema FGD dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2018

No	FGD	Isu yang dibahas
1	Penanggulangan Kemiskinan	Membahasn langkah langkah yang bersifat perencanaan dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan di bawah angka saat ini dengan target 6,98-7,38 %
2	Magelang sebagai Kota Layak Anak	Memperkuat Kota Magelang sebagai Kota yang nyaman dan layak bagi anak
3	Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan	Meningkatkan implementasi manajemen persampahan untuk mengatasi permasalahan persampahan kota
4	Penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Memperkuat implementasi atas Masterplan MKSB dari hasil evaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan
5	Implementasi RAD Masyarakat Ekonomi ASEAN	Menggagas positioning Kota dalam memberikan langkah antisipatif dan kontributif dalam skema kebebasan arus barang, arus jasa, arus modal, arus SDM dari dan ke Kota Magelang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
6	Smart City	Upaya meningkatkan eksekusi atas Smary city Model yang dikembangkan di Kota Magelang agar meningkat dari Scattered ke level berikutnya
7	Mempertegas Skenario Kemitraan	Upaya membangun skenario Kemitraan baik Government to Government, Government to Business, dan Governemnt to Society
8	Menggagas Blueprint Universal Design	Menemukan skema Univesal Design secara lebih komprehensif dan integral
9	Penguatan Program 100 0 100	Memperkuat program kegiatan untuk target 100 0 100. 100 % akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi
10	Sustainable Development Goals	Mencari format terbaik bagi upaya mendukung pencapaian target indikator SDGs

Program program yang diprioritaskan berdasarkan hasil FGD yang akan dilaksanakan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

5.1.1.3.1 Penanggulangan Kemiskinan

Tabel berikut menunjukkan rencana program penanggulangan kemiskinan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2018 dengan indikasi program :

Tabel V. 5
Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1. Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian 2. Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	Dinas Sosial
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan obat dan makanan	Dinas Kesehatan
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Keluruhan UCI (Universal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HIV 8. Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS	Dinas Kesehatan
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan
12	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	Dinas Kesehatan
13	Program peningkatan	1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang	Dinas Kesehatan

	elayanan kesehatan lansia	mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat Persentase kawasan strategis yang terbangun	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
17	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
18	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	Dinas Sosial
19	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif 2. Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial 3. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Setda
20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase wirausaha baru 2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 3. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja
21	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan
22	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
23	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase (%) calon transmigrasi yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja
24	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
25	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Luas lahan pertanian organik 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
26	Program penciptaan	1. Persentase peningkatan kualits pelaku UKM	SETDA

	iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	
27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1. Persentase penduduk berakses air minum 2. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 3. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	Dinas Lingkungan Hidup
28	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
30	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
32	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
33	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
34	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi Tingkat kota Tingkat provinsi Tingkat nasional 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1. Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat 2. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	PKK Aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian

			Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	Disperindag
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
41	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda

5.1.1.3.2 Program Kota Layak Anak

Kepala Daerah berkomitmen untuk menjadikan Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak, tujuan kota layak anak ini adalah agar dapat membangun anak-anak yang berkualitas dengan berusaha untuk memenuhi hak sesuai dengan kebutuhan serta perlindungan anak.

Kebutuhan anak yang harus dipenuhi tak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga fisik mau pun non fisik. Dari sedikitnya 31 hak anak, ada empat hal utama yang harus menjadi perhatian ekstra, yakni hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi, dan keterlibatan unsur anak harus dimulai sejak proses perencanaan, untuk itu program prioritas Magelang menuju Kota Layak Anak yang akan dilaksanakan di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel V.6
Program Kota Layak Anak

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase peningkatan judul buku 2. Persentase peningkatan jumlah buku 3. Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten 4. Presentase perpustakaan aktif 5. Cakupan pelayanan melalui e-Library 6. Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan
15	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	Dinas Kesehatan
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 2. Cakupan Kunjungan Bayi 3. Cakupan Pelayanan Anak Balita 4. Cakupan Puskesmas Ramah Anak	Dinas Kesehatan
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
18	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
19	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	Dinas Sosial
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	Dinas Kesehatan
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HIV 8. Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS	
22	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
23	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
24	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
25	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	Satuan Polisi Pamong praja
26	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1. Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana 2. Cakupan tim relawan siaga bencana 3. Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana 4. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 5. Cakupan penanganan korban bencana	Satuan Polisi Pamong praja
27	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
30	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Persentase kriminalitas yang tertangani 2. Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila 3. Perda pelarangan peredaran narkoba 4. Jumlah Kampung Bebas Narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN 6. Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk	Badan Kesbangpolinmas

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		HIV/AIDS 7. Rasio jumlah siskamling aktif 8. Frekuensi Patroli Satpol PP 9. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	
31	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPROV 3. Jumlah klub olah raga 4. Jumlah organisasi olah raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
32	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi 2. Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
37	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi 2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) 3. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 6. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun 8. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 9. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri 10. Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out) 11. Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun 12. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 13. Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) 14. Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif 15. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif 16. Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun 17. Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun 18. Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro 19. Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga 20. Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan 21. Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera 22. Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
41	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
			dan Keluarga Berencana
42	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda

5.1.1.3.3 Manajemen Persampahan

Sampah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat perkotaan khususnya Kota Magelang. Keterbatasan lahan dan prediksi masa hidup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuwir yang secara teknis berakhir mendorong pemerintah dan seluruh elemen mencari inovasi dari permasalahan tersebut. Dapat dikatakan pada tahun 2018 ini Kota Magelang sudah darurat sampah. FGD Manajemen Persampahan dilaksanakan sebagai salah satu upaya menghimpun usulan dan inovasi dari berbagai pihak. Selain strategi 3 R (Reduce, reuse dan recycle) yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif masyarakat, terobosan yang tak kalah penting adalah dengan pengembangan kampung-kampung organik. Kampung organik ini dimaksudkan sebagai upaya lebih lanjut atas bagaimana manajemen persampahan berbasis masyarakat dapat menjangkau aspek ekonomi sosial serta lingkungan hidup. Pada Tahun 2018 seluruh Kelurahan di Kota Magelang ditargetkan telah semakin intensif mengembangkan secara baik kampung-kampung organik dimaksud. Rencana program-program prioritas mendukung Manajemen Persampahan berbasis masyarakat antara lain sebagai berikut:

Tabel V.7
Program Manajemen Persampahan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonservasi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengelolaan Pasar	1. Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar 2. Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional 3. Cakupan pedagang pasar yang dibina 4. Persentase pasar tradisional yang dikelola	Dinas Perindag

5.1.1.3.4 Penguatan Implementasi Magelang Kota Sejuta Bunga

Penetapan branding Kota Magelang dengan “Kota Sejuta Bunga” sejak tahun 2011 berdampak pada perwujudan branding tersebut sampai saat ini. Makna Kota Sejuta Bunga sebagai identitas atau branding Kota Magelang dalam mengemas Kota Magelang sebagai Kota Jasa. Adapun bentuk nyata dari Kota Sejuta Bunga ini adalah terwujudnya Kota Magelang sebagai kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman dengan bunga sebagai ikon utama.

Dengan kota yang lebih menarik maka akan semakin terbuka peluang usaha dan investasi, yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Dan seiring dengan peningkatan peran dan fungsi sebagai kota jasa, maka akan memberi peningkatan kepada kesejahteraan masyarakat.

Di Tahun 2018, penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga , dengan program-program prioritas yang mendukung adalah:

Tabel V.8
Program Penguatan Implementasi MKSB

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	Dinas Perhubungan
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH Kota	Dinas Lingkungan Hidup

	(RTH)		
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1. Prosentase Petani yang melaksanakan GHP 2. Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonservasi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah pemantauan GRK di lima sektor	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
11	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Dinas Pertanian dan Pangan
12	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Program Pemberdayaan	1. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	Dinas Pertanian dan Pangan

	Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	2. Rasio petani terlatih	
16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Lama Kunjungan Wisatawan 2. Persentase TIC yang representative 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Destinasi Wisata Unggulan 2. Persentase destiasi wisata yang memenuhi sapta pesona	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
18	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
20	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Jumlah gedung kesenian 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Cakupan kajian seni 50% 4. Cakupan fasilitas seni 30% 5. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% 6. Cakupan tempat 100% 7. Cakupan organisasi 34%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5.1.1.3.5 Penguatan Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam rangka menghadapi yang berlangsung mulai akhir tahun 2015, Kota Magelang telah secara antisipatif menyiapkan RAD menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana terdapat kebebasan arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja, diperlukan kesiapan dalam menghadapinya agar pasar bebas tersebut dapat kita manfaatkan untuk kemajuan daerah. Untuk penguatan implementasinya beberapa program prioritas yang mendukung antara lain:

Tabel V.9

Penguatan Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program perencanaan pembangunan daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

		5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi 2. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi 3. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	Dinas Tenaga Kerja
3	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	Sekretariat Daerah
4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	Sekretariat Daerah
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
7	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	Bappeda

5.1.1.3.6 Penguatan Implementasi Menuju Smart City

Dalam rangka penguatan implementasi atas Masterplan Smart City Kota Magelang , hasil FGD menunjukkan beberapa pendekatan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel V.10
Penguatan Implementasi Smart City

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
2	Program peningkatan dan		Dinas Tenaga Kerja

	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan 2. Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	Dinas Perhubungan
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
7	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Persentase LKJIP OPD dengan nilai baik 2. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh OPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 3. Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar 4. Persentase LKJIP OPD dengan nilai baik 5. Penurunan kasus temuan LKPD 6. Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu 7. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh OPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 8. Nilai survey kepuasan penggunaan layanan PD 9. Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	Semua Perangkat Daerah
9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	- Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: - Radio - Media cetak - Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin - Jumlah KIM - Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. - Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa - Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
11	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Lama Kunjungan Wisatawan - Persentase TIC yang representative - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara - Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
12	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
13	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	- Implementasi SIPID (Sistim Invormasi Potensi Investasi Daerah) - Implementasi pemanfaatan SPIPISE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
14	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	- Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik - Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata - Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik - Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum - Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	Dinas Perhubungan
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	- Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: - Radio - Media cetak - Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin - Jumlah KIM - Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika

		5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi	
17	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku 2. Persentase arsip dan risalah 3. Persentase Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKP 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.1.1.3.7 Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda paska MDGS yang diratifikasi oleh Indonesia adalah Sustainable Development Goals. Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian gloab SDGS telah menetapkan titik berat program yang akan ditempuh sebagai berikut :

Tabel V.11
Program Prioritas SDGs

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HIV 8. Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS	Dinas Kesehatan
8	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	Dinas Kesehatan
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		3. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Luas lahan pertanian organik 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1. Jumlah pelaku usaha peternakan organik: Pernak ayam buras/ ayam broiler Pernak kelinci Pernak kambing/domba 2. Rasio peternak terlatih	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
19	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

			Keluarga Berencana
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KIP/A dan PPT / PKT di RS 6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
25	Program	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan	Bappeda

	perencanaan sosial budaya	pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	

5.1.1.3.7 Program 100 0 100

Program 100 0 100 merupakan program pemerintah pusat dalam rangka mencapai target 100% akses air minum, 0 % kawasan kumuh serta 100 % sanitasi baik. Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian program 100 0 100 ini menempuh program sebagai berikut :

Tabel V.12
Program 100 0 100

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk berakses air minum Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rasio luas kawasan kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.1.1.4 Prioritas Program Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok pokok Pikiran DPRD Kota Magelang disampaikan bersamaan dengan Penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang. Melalui hasil telaahan baik oleh Bappeda Maupun oleh perangkat Daerah terkait maka dapat ditampilkan program yang merupakan akomodasi Pokok Pikiran Dewan.

5.1.2 Program Prioritas II

Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD serta pencapaian indikator daerah.

5.1.3 Program Prioritas III

Merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/ fungsi tiap OPD.

Gambaran lengkap program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator baik pada level makro daerah, sasaran, outcome maupun output disajikan dalam Matriks Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel V.13
Matrik Perubahan Renja OPD se Kota Magelang Tahun 2018

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.718.379.000
2	Dinas Kesehatan	47.419.111.000
3	BLUD RSUD Tidar	236.853.947.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.043.697.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	51.158.455.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.334.218.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.284.145.000
8	Dinas Sosial	2.800.832.000
9	Dinas Tenaga Kerja	4.490.664.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	41.455.147.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.705.055.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.358.958.000
13	Dinas Perhubungan	9.973.779.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10.584.584.000
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.680.156.000
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12.404.617.000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.701.518.000
18	Dinas Pertanian dan Pangan	8.672.843.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.785.276.000
20	Sekretariat Daerah	29.709.662.000
21	Sekretariat DPRD	26.593.042.000
22	Kecamatan Magelang Selatan	8.388.282.000
23	Kecamatan Magelang Tengah	8.194.284.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
24	Kecamatan Magelang Utara	8.050.115.000
25	Inspektorat	3.291.072.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.482.224.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.084.732.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.086.446.000
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.512.469.000
	TOTAL	724.817.709.000

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 URUSAN : Pendidikan; Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.247.695.000		2.254.066.000		2.295.714.000				
1	1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya informasi yang disampaikan	600 surat	504.000	600 surat	504.000	600 surat	504.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
2	1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 bulan	224.980.000	12 bulan	224.980.000	12 bulan	224.980.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
3	1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Operasional berjalan lancar	48 unit	26.200.000	48 unit	24.000.000	48 unit	24.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
4	1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi keuangan	137 orang	842.581.000	137 orang	849.181.000	137 orang	849.181.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
5	1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	100	168.672.000	100	179.484.000	100	190.762.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
6	1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	47 item	80.000.000	47 item	80.000.000	47 item	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	15 item	71.030.000	15 item	68.450.000	15 item	68.450.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
8	1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	18 item	9.622.000	18 item	9.622.000	18 item	9.622.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
9	1.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	4 item	5.970.000	4 item	5.970.000	4 item	5.970.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
10	1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	458 eks	17.768.000	458 eks	17.168.000	458 eks	17.168.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
11	1.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas	1 tahun	2.400.000	1 tahun	1.920.000	1 tahun	1.920.000	Dinas Pendidikan K	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
12	1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	129.480.000	1 tahun	129.480.000	1 tahun	129.480.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
13	1.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	11140 kali per orang	387.545.000	11140 kali per orang	344.120.000	11140 kali per orang	354.440.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
14	1.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak tetap	10	229.668.000	10	297.912.000	10	317.962.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
15	1.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pendataan manajemen kepegawaian	1 kegiatan	51.275.000	1 kegiatan	21.275.000	1 kegiatan	21.275.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	ExBAU
	1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.275.361.000		814.049.000		1.271.669.000				
					174,237,168,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarannya gedung kantor (gordin, Papan nama/pengumuman, Plakat)	150	40.350.000	150	18.050.000	150	68.620.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dana Alokasi Umum	91	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
2	1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhiya peralatan gedung kantor (LCD Proyektor, Printer Laserjet, Scanner, Handycam, AC, Kipas Angin, Sound System, PC, Laptop, Kamera)	30 item	192.504.000	30 item	146.950.000	30 item	196.950.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
3	1.1.2.10	Pengadaan mebelur	Terpenuhiya mebelur kantor/ Rak Arsip, Kursi Staff dan Rak Serba Guna	20	80.000.000	20	14.135.000	20	28.185.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Pemeliharaan Taman, Pengecatan Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	1	55.600.000	1	51.050.000	1	151.050.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
5	1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	48 unit	584.112.000	48 unit	521.349.000	48 unit	521.349.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
6	1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	25 item	68.000.000	25 item	43.700.000	25 item	63.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
7	1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yberfungsi dengan baik	19 unit	49.145.000	19 unit	18.815.000	19 unit	38.815.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
8	1.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Rehab ruang PGTK, Rehab Kamar Mandi, Pavingisasi depan R. Arsip, Rehab Pos Satpam)	5	205.650.000	5	0	4	203.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
	1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			123.058.000		123.387.000		123.387.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	24 buku	12.310.000	24 buku	12.030.000	24 buku	12.030.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4 buku	5.515.000	4 buku	5.467.000	4 buku	5.467.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	4 buku	18.149.000	4 buku	18.042.000	4 buku	18.042.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 kegiatan	19.884.000	2 kegiatan	18.876.000	2 kegiatan	18.876.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersusun	2 kegiatan	52.500.000	2 kegiatan	54.272.000	2 kegiatan	54.272.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	1.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	terciptanya laporan keuangan yg akuntabel	10 buku	14.700.000	10 buku	14.700.000	10 buku	14.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			720.920.000		912.169.000		872.922.000				
			APK PAUD	65%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	51%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Mutu Pendidik PAUD meningkat	235 pendidik	95.000.000	235 pendidik	95.000.000	235 pendidik	95.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
2	1.1.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana	2 kegiatan	32.393.000	2 kegiatan	32.393.000	2 kegiatan	32.393.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
3	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat	100	22.000.000	100	24.832.000	100	30.585.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
4	1.1.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	100 lembaga	12.500.000	100 lembaga	12.500.000	100 lembaga	12.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
5	1.1.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama lembaga PAUD	1 kegiatan	103.940.000	1 kegiatan	25.400.000	1 kegiatan	25.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
6	1.1.15.65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Masyarakat Kota Magelang memperoleh informasi tentang pentingnya PAUD	100 orang	13.500.000	100 orang	13.000.000	100 orang	13.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak
7	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Meningkatnya kreatifitas anak usia dini	7 macam lomba	73.500.000	7 macam lomba	72.356.000	7 macam lomba	72.356.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.1.15.71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	Terlaksanya Lomba bercerita/mendongeng guru TK	6 kegiatan	35.000.000	6 kegiatan	26.305.000	6 kegiatan	26.305.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak
9	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) PAUD	70 tenaga admin paud	18.000.000	70 tenaga admin paud	18.000.000	70 tenaga admin paud	18.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
10	1.1.15.83	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksannya gebyar PAUD	5 lomba	73.500.000	5 lomba	66.955.000	5 lomba	66.955.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak
11	1.1.15.88	Penyediaan Operasional PAUD	Tersalurnya Dana Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD sesuai Juknis	1 lembaga	0	1 lembaga	322.200.000	1 lembaga	277.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	95	Kota Layak Anak
12	1.1.15.89	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda paud	2 kegiatan	15.505.000	2 kegiatan	15.505.000	2 kegiatan	15.505.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
13	1.1.15.80	Pelatihan pembuatan AP PAUD	Terlaksananya pelatihan pembuatan Alat Peraga Edukatif PAUD	235 pendidik	78.082.000	235 pendidik	39.723.000	235 pendidik	39.723.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak
14	1.1.15.87	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksananya Program PAUD	100%	148.000.000	100%	148.000.000	100%	148.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			799.000.000		816.835.000		876.766.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah gedung kesenian	1									
			Sarana penyelenggara seni dan budaya	11									
			Cakupan kajian seni 50%	75									
			Cakupan fasilitas seni 30%	35									
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	77									
			Cakupan tempat 100%	100									
			Cakupan organisasi 34%	100									
			DISPORA		330,000,000								
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terfasilitasinya upacara adat (nyadran) di Kampung	100	270.200.000	100	293.975.000	100	353.906.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Pokok Pikiran DPRD
2	2.16.15.5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terfasilitasinya pementasana seni budaya di Kota Magelang	1 kegiatan	385.000.000	1 kegiatan	385.000.000	1 kegiatan	385.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.16.15.6	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah se Kota Magelang	3 lomba	143.800.000	3 lomba	137.860.000	3 lomba	137.860.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			57.366.000		57.366.000		57.366.000				
					1,106,484,000								
			Persentase peningkatan judul buku	2,57									
			Persentase peningkatan jumlah buku	2,64									
			Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	47,39									
			Presentase perpustakaan aktif	18,96									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	1%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	8.33%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.17.15.25	Grand event desa buku	Masyarakat terfasilitasi untuk membaca	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.17.15.26	Peningkatan pelayanan desa buku	meningkatkan kinerja	1 kegiatan	27.366.000	1 kegiatan	27.366.000	1 kegiatan	27.366.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			21.246.088.000		22.017.354.000		25.228.174.000				
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	98.61%									
			APK SD/SDLB/MI/Paket A	112%									
			APM SMP/SMPLB/M Ts/Paket B	76.00%									
			APK SMP/SMPLB/M Ts/Paket B	85.00%									
			Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	0,1361									
			Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	0,2431									
			Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14									
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01									
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,18									
			Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,002									
			Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%									
			Angka Melanjutkan SMP ke SMA	155%									
			Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	60%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar	46 pelajar									
			Adanya kebijakan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	1									
			Persentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	80%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	85%									
			Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	20%									
1	1.1.16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Tersusunnya perangkat kurikulum	220 tenaga pendidik	47.000.000	220 tenaga pendidik	46.900.000	220 tenaga pendidik	46.900.000	KOTA MAGELANG	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	1.1.16.67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD	4	109.448.000	4	127.880.000	4	129.133.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak
3	1.1.16.68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Warga belajar Paket B menjadi terampil	5	205.250.000	5	223.682.000	5	224.935.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak
4	1.1.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Tersampaikan informasi-informasi pendidikan dasar	100 sekolah	51.345.000	100 sekolah	51.345.000	100 sekolah	51.345.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	1.1.16.88	Tes pengendali mutu SD	Terukurnya kemampuan siswa	2500 siswa	147.619.000	2500 siswa	147.619.000	2500 siswa	147.619.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.1.16.89	Tes pengendali mutu SMP	Terukurnya kemampuan siswa SMP	3320 siswa	189.000.000	3320 siswa	189.000.000	3320 siswa	189.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
7	1.1.16.97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.352.000	100	121.152.000	100	126.289.000	SD Negeri Kedungsari 1	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
8	1.1.16.98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	86.854.000	100	77.054.000	100	79.685.000	SD Negeri Kedungsari 2	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
9	1.1.16.99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	135.340.000	100	125.540.000	100	129.299.000	SD Negeri Kedungsari 3	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
10	1.1.16.100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	154.432.000	100	144.632.000	100	148.391.000	SD Negeri Kedungsari 4	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
11	1.1.16.101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	279.744.000	100	229.712.000	100	230.310.000	SD Negeri Kedungsari 5	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
12	1.1.16.102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.176.000	100	98.148.000	100	102.085.000	SD Negeri Kramat 1	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
13	1.1.16.103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	79.836.000	100	88.468.000	100	92.916.000	SD Negeri Kramat 2	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
14	1.1.16.104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	87.392.000	100	78.992.000	100	81.498.000	SD Negeri Kramat 3	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
15	1.1.16.105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	114.592.000	100	104.792.000	100	107.298.000	SD Negeri Kramat 4	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
16	1.1.16.106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.530.000	100	97.730.000	100	98.983.000	SD Negeri Kramat 5	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
17	1.1.16.107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	70.158.000	100	60.358.000	100	62.327.000	SD Negeri Potrobangsari 1	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	1.1.16.108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	154.558.000	100	144.758.000	100	147.264.000	SD Negeri Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
19	1.1.16.109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	152.698.000	100	142.898.000	100	146.710.000	SD Negeri Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
20	1.1.16.110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	93.934.000	100	84.134.000	100	88.234.000	SD Negeri Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
21	1.1.16.111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	138.436.000	100	128.636.000	100	128.800.000	SD Negeri Wates 1	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
22	1.1.16.112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	148.262.000	100	138.882.000	100	145.273.000	SD Negeri Wates 2	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
23	1.1.16.113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	99.170.000	100	89.370.000	100	93.129.000	SD Negeri Wates 3	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
24	1.1.16.114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	151.380.000	100	141.580.000	100	146.717.000	SD Negeri Wates 4	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
25	1.1.16.115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.236.000	100	71.436.000	100	74.684.000	SD Negeri Wates 5	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
26	1.1.16.119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	164.312.000	100	154.512.000	100	159.139.000	SD Negeri Cacaban	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
27	1.1.16.120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	140.500.000	100	130.700.000	100	133.895.000	SD Negeri Cacaban	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
28	1.1.16.121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	139.818.000	100	145.018.000	100	151.283.000	SD Negeri Cacaban	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
29	1.1.16.122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	134.604.000	100	124.804.000	100	129.341.000	SD Negeri Cacaban	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	1.1.16.123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	149.640.000	100	139.840.000	100	144.288.000	SD Negeri Cacaban	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
31	1.1.16.124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	104.456.000	100	94.656.000	100	98.962.000	SD Negeri Gelangan	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
32	1.1.16.125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.734.000	100	71.934.000	100	73.954.000	SD Negeri Gelangan	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
33	1.1.16.126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	125.338.000	100	115.538.000	100	120.854.000	SD Negeri Gelangan	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
34	1.1.16.127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	174.964.000	100	165.164.000	100	168.923.000	SD Negeri Gelangan	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
35	1.1.16.128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.584.000	100	97.784.000	100	104.236.000	SD Negeri Gelangan	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
36	1.1.16.129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.034.000	100	71.234.000	100	74.429.000	SD Negeri Gelangan	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
37	1.1.16.130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	280.444.000	100	248.844.000	100	255.109.000	SD Negeri Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
38	1.1.16.131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	303.740.000	100	272.140.000	100	279.605.000	SD Negeri Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
39	1.1.16.132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	278.402.000	100	246.802.000	100	252.503.000	SD Negeri Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
40	1.1.16.133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	143.596.000	100	133.796.000	100	138.244.000	SD Negeri Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
41	1.1.16.134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	136.390.000	100	126.590.000	100	131.038.000	SD Negeri Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	1.1.16.135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	105.132.000	100	95.332.000	100	96.852.000	SD Negeri Magelan	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
43	1.1.16.136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	280.610.000	100	249.010.000	100	256.885.000	SD Negeri Magelan	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
44	1.1.16.137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	114.808.000	100	104.223.000	100	108.232.000	SD Negeri Rejowina	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
45	1.1.16.138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	77.050.000	100	82.250.000	100	85.623.000	SD Negeri Rejowina	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
46	1.1.16.139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	68.242.000	100	58.442.000	100	60.948.000	SD Negeri Rejowina	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
47	1.1.16.140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	127.254.000	100	117.454.000	100	123.245.000	SD Negeri Rejowina	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
48	1.1.16.141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	138.086.000	100	128.286.000	100	129.331.000	SD Negeri Rejowina	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
49	1.1.16.142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	147.064.000	100	137.264.000	100	142.365.000	SD Negeri Rejowina	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
50	1.1.16.151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	142.174.000	100	132.374.000	100	132.408.000	SD Negeri Jurangor	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
51	1.1.16.152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	146.584.000	100	136.784.000	100	140.543.000	SD Negeri Jurangor	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
52	1.1.16.153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	175.996.000	100	168.574.000	100	172.362.000	SD Negeri Jurangor	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
53	1.1.16.154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	162.522.000	100	152.722.000	100	158.369.000	SD Negeri Jurangor	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	1.1.16.155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	88.420.000	100	93.620.000	100	99.921.000	SD Negeri Magersari	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
55	1.1.16.156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	143.062.000	100	133.262.000	100	137.235.000	SD Negeri Magersari	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
56	1.1.16.157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	79.482.000	100	84.682.000	100	113.094.000	SD Negeri Magersari	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
57	1.1.16.158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	149.788.000	100	139.985.000	100	143.487.000	SD Negeri Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
58	1.1.16.159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	168.256.000	100	158.456.000	100	161.579.000	SD Negeri Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
59	1.1.16.160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	108.270.000	100	98.470.000	100	103.482.000	SD Negeri Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
60	1.1.16.161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	136.704.000	100	126.904.000	100	128.138.000	SD Negeri Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
61	1.1.16.162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	156.738.000	100	146.938.000	100	152.022.000	SD Negeri Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
62	1.1.16.163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	131.854.000	100	122.054.000	100	124.560.000	SD Negeri Tidar 1	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
63	1.1.16.164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	148.240.000	100	138.440.000	100	140.946.000	SD Negeri Tidar 3	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
64	1.1.16.165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.536.000	100	122.736.000	100	123.406.000	SD Negeri Tidar 4	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
65	1.1.16.166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	170.670.000	100	161.396.000	100	165.493.000	SD Negeri Tidar 5	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	1.1.16.167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.966.000	100	123.166.000	100	126.925.000	SD Negeri Tidar 6	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
67	1.1.16.168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	116.010.000	100	106.770.000	100	110.529.000	SD Negeri Tidar 7	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
68	1.1.16.172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	776.811.000	100	679.019.000	100	690.297.000	SMP Negeri 1 Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
69	1.1.16.173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	833.940.000	100	733.235.000	100	745.766.000	SMP Negeri 2 Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
70	1.1.16.174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	783.441.000	100	685.041.000	100	685.164.000	SMP Negeri 3 Magelang	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
71	1.1.16.175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	559.936.000	100	486.336.000	100	494.211.000	SMP Negeri 4 Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
72	1.1.16.176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	739.198.000	100	645.198.000	100	653.412.000	SMP Negeri 5 Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
73	1.1.16.177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	571.130.000	100	489.270.000	100	496.099.000	SMP Negeri 6 Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
74	1.1.16.178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	Terselenggaranya pendidikan	100	621.563.000	100	544.763.000	100	554.788.000	SMP Negeri 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Kota Layak Anak
75	1.1.16.179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	735.283.000	100	638.483.000	100	649.761.000	SMP Negeri 8 Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
76	1.1.16.180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	677.964.000	100	588.364.000	100	595.258.000	SMP Negeri 9 Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
77	1.1.16.181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	699.905.000	100	615.905.000	100	616.618.000	SMP Negeri 10 Magelang	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	1.1.16.182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	611.707.000	100	534.907.000	100	545.110.000	IP Negeri 11 Magela	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
79	1.1.16.183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	570.258.000	100	493.458.000	100	500.812.000	IP Negeri 12 Magela	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
80	1.1.16.184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	782.286.000	100	678.686.000	100	688.711.000	IP Negeri 13 Magela	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
81	1.1.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi Pagar Sekolah	4	360.000.000	4	0	4	324.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum dan dak	80	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
82	1.1.16.204	Penyediaan Jasa GTT/PTT dan Tenaga Administrasi bagi Sekolah Dasar (SD)	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi bagi Sekolah Dasar (SD)	61 sekolah		61 sekolah		61 sekolah	0	SD Negeri	Dana Alokasi Umum	80	Pokok Pikiran DPRD
83	1.1.16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi rumah penjaga SD	5	320.000.000	5	0	5	351.900.000	SDN Gelangan 1, SD	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
84	1.1.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya pembangunan Grountank dan Tower Air di Sekolah	1	0	1	0	1	76.100.000	SDN Jurangombo 2	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
85	1.1.16.91	Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)	Tersaluranya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima	13	943.250.000	13	0	13	0	Kota Magelang	DBHCHT	100	
86	1.1.16.92	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)	Tersaluranya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima	2	629.600.000	2	0	2	0	Kota Magelang	DBHCHT	100	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	1.1.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitas ruang kelas sekolah	8	0	8	377.955.000	8	798.830.000	SD Kedungsari 2, SD	Dana Alokasi Khusus (D A K)	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
88	1.1.16.3	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya penambahan ruang kelas	4	480.000.000	4	574.867.000	4	773.217.000	SMP N 10, SMP N 4	Dana Alokasi Khusus (D A K)	75	Rencana
89	1.1.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Terpenuhinya alat praktik / lcd di SD dan SMP, alat lab SMP	5 sekolah	330.000.000	5 sekolah	1.883.900.000	5 sekolah	1.883.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
90	1.1.16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya rehab Taman, Halaman dan Tempat Parkir di Sekolah	5 sekolah		5 sekolah		5 sekolah	656.700.000	SMP N 2, SDN Jurat	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
91	1.1.16.50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	Terlaksananya rehab ruang Aula Sekolah	1 ruang		1 ruang		1 ruang	194.850.000	SMP N 12	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
92	1.1.16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Terlaksananya pengadaan pakaian seragam sekolah	4948 stel seragam		4948 stel seragam	2.025.880.000	4948 stel seragam	2.025.880.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
93	1.1.16.1	Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya pembangunan pagar, ruang baca dan bermain di sekolah	5 sekolah		5 sekolah		5 sekolah	585.100.000	SDN Kedungsari 4,	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
94	1.1.16.194	Pengadaan Tanah untuk Sekolah	Sertifikasi Tanah SD Kedungsari 4	1 sekolah		1 sekolah		1 sekolah		SDN Kedungsari 4	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
95	1.1.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terlaksananya pengadaan buku dan alat tulis siswa	sekolah		sekolah	610.198.000	sekolah	610.198.000	SD dan SMP	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	1.1.16.35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	sekolah		sekolah	118.241.000	sekolah	158.685.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Program prioritas RPJM
97	1.1.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Terlaksananya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia					1 kegiatan	0	Dinas Pendidikan d	Dana Alokasi Umum	105	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			646.590.000		567.985.000		918.380.000				
			Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100									
			Jumlah pengunjung museum	5,150									
			Jumlah koleksi museum	11									
1	2.16.16.5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terpeliharanya kondisi museum foto dan dokumen sejarah serta partisipasi dalam pameran museum	12	142.614.000	12	52.314.000	12	93.254.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.16.16.6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terwujudnya wahana promosi seni budaya Kota Magelang di tingkat Provinsi	8 kegiatan	57.386.000	8 kegiatan	133.054.000	8 kegiatan	133.054.000	Kota Semarang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.16.16.7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Tersedianya profil kebudayaan	50 buku profil	12.260.000	50 buku profil	12.260.000	50 buku profil	12.260.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.16.16.8	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal	1 film	98.367.000	1 film	98.367.000	1 film	98.367.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.16.16.11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terselenggaranya pengiriman peserta Kemah Budaya	30 orang	21.040.000	30 orang	19.852.000	30 orang	19.852.000	Kab/Kota di Jawa T	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.16.16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Tersebarluasnya sejarah Kota Magelang dikalangan masyarakat dan dunia pendidikan	40 orang	34.483.000	40 orang	34.483.000	40 orang	34.483.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.16.16.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Keikutsertaan Kota Magelang dalam pentas seni di TMII	1 kegiatan	133.160.000	1 kegiatan	124.675.000	1 kegiatan	124.675.000	TMII Jakarta	Dana Alokasi Umum	101	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
8	2.16.16.13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya rekomendasi cagar budaya	35 unit	147.280.000	35 unit	92.980.000	35 unit	92.980.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.16.16.4	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terlaksananya Sosialisai Budaya dan Pelantikan Pengurus KSBM	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan	49.455.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
10	2.16.16.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Tersedianya Sound dan Lighting di Mantyasih					2	260.000.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	80	Rencana
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			344.560.000		601.558.000		601.558.000				
			DISPORA		2,295,018,000								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14,86									
			Jumlah festival seni dan budaya.	11									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya malam resepsi HUT RI	1 kegiatan	115.000.000	1 kegiatan	154.000.000	1 kegiatan	154.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.17.3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terwujudnya ajang aspirasi pengembangan seni budaya	2 kegiatan	40.377.000	2 kegiatan	38.911.000	2 kegiatan	38.911.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.16.17.4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih	9 kegiatan	70.000.000	9 kegiatan	70.000.000	9 kegiatan	70.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Pengiriman Duta Seni Parade Budaya	1 kegiatan	119.183.000	1 kegiatan	113.804.000	1 kegiatan	113.804.000	Kab/Kota di Jawa T	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.16.17.9	Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval	Terlaksananya karnaval dan pawai budaya	1 KEGIATAN		1 KEGIATAN	224.843.000	1 KEGIATAN	224.843.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			665.503.000		826.712.000		826.712.000				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.67%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%									
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	10.00%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Juara FASI	-									
			Jumlah Juara MTQ	1									
1	1.1.18.3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Kursus di PKBm berjalan dengan lancar	2 kegiatan	46.000.000	2 kegiatan	143.165.000	2 kegiatan	143.165.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
2	1.1.18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Tersalurnya hasil produk warga buta aksara dan terlaksananya Pameran HAI Tk. Provinsi Jateng	2 kegiatan	90.916.000	2 kegiatan	88.385.000	2 kegiatan	88.385.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
3	1.1.18.5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan memiliki keahlian dan ketrampilan	60 warga belajar	72.053.000	60 warga belajar	72.053.000	60 warga belajar	72.053.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
4	1.1.18.20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	Terselenggaranya Akreditasi lembaga PKBM	2 kegiatan	25.000.000	2 kegiatan	23.025.000	2 kegiatan	23.025.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
5	1.1.18.21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	Jumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra UNPK	170 warga belajar	22.500.000	170 warga belajar	22.500.000	170 warga belajar	22.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
6	1.1.18.22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur	290 warga belajar	31.348.000	290 warga belajar	81.811.000	290 warga belajar	81.811.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.1.18.29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	Peserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD	175 peserta	24.000.000	175 peserta	23.260.000	175 peserta	23.260.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
8	1.1.18.31	Pelaksanaan Pra UNPK	Terlaksananya pra UNPK Paket B	120 warga belajar	14.500.000	120 warga belajar	14.500.000	120 warga belajar	14.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
9	1.1.18.32	Replikasi Kelurahan Vokasi	Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada Kelurahan Vokasi	2 kegiatan	60.301.000	2 kegiatan	60.169.000	2 kegiatan	60.169.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
10	1.1.18.33	Pelatihan Kursus	Peningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing Kursus	90 pengelola dan pembimbing	38.577.000	90 pengelola dan pembimbing	37.577.000	90 pengelola dan pembimbing	37.577.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
11	1.1.18.41	Penyelenggaraan Paket C	Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA	3 kelompok	240.308.000	3 kelompok	260.267.000	3 kelompok	260.267.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			179.907.000		303.489.000		303.489.000				
					2,789,566,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	223									
			Misi kesenian 100%	38%									
1	2.16.18.3	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam Munas Apeksi	1 kegiatan	179.907.000	1 kegiatan	303.489.000	1 kegiatan	303.489.000	Kota se Indonesia	Dana Alokasi Umum	101	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	2.16.18.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring Evaluasi Pengembangan Budaya dan Penyusunan Pokir Kebudayaan Daerah	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan	14.189.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			44.296.000		40.891.000		40.891.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0									
1	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunnya rancangan peraturan pelaksanaan Perda Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2010	1	44.296.000	1	40.891.000	1	40.891.000	dinas pendidikan	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.628.385.000		1.535.678.000		1.843.181.000				
			DISDIK		2,224,211,000								
			Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35%									
			Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	13, 87%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	84%									
			Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	53%									
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95%									
			Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	67%									
			Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35.75%									
			Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14.23%									
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86%									
			Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	54.15%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95.20%									
			Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	67.97%									
			Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama	60%									
			Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	60%									
1	1.1.20.1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	diperolehnya sertifikat pendidik guru profesional	440 orang	45.500.000	440 orang	43.615.000	440 orang	43.615.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.1.20.4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah dasar	450 org	407.500.000	450 org	105.500.000	450 org	105.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
3	1.1.20.14	Pembinaan MGMP SMP	Peningkatan mutu pendidik jenjang SMP	100	294.700.000	100	312.132.000	100	313.385.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.1.20.17	Pembinaan KKPS	meningkatnya kemampuan pengawas se kota magelang	100	20.000.000	100	22.474.000	100	22.680.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.1.20.36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	guru mampu menghasilkan karya pengembangan profesi	75 org	60.000.000	75 org	55.600.000	75 org	55.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
6	1.1.20.52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	Meningkatnya wawasan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	192 org	53.685.000	192 org	110.144.000	192 org	110.144.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
7	1.1.20.57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Terpilihnnya pendidik dan tenaga kependidikan non formal	10 org	60.000.000	10 org	56.610.000	10 org	56.610.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
8	1.1.20.58	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Terpilihnnya calon kepala sekolah dan pengawas sekolah yang baru dan berlisensi	2 kegiatan	192.000.000	2 kegiatan	191.683.000	2 kegiatan	191.683.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.1.20.59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	meningkatnya prestasi guru, kepala sekolah dan pengawas	11 org	108.000.000	11 org	99.370.000	11 org	99.370.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
10	1.1.20.61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	Tersedianya data peserta ujian nasional	100 sekolah	45.800.000	100 sekolah	42.640.000	100 sekolah	42.640.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
11	1.1.20.70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	Meningkatnya mutu pendidikan taman kanak-kanak se Kota Magelang	100	137.400.000	100	151.960.000	100	153.004.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	1.1.20.71	Lomba Olimpiade SAINS Nasional Guru	bertambahnya kompetensi profesional guru sains di kota magelang	1 kegiatan	65.000.000	1 kegiatan	64.480.000	1 kegiatan	64.480.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
13	1.1.20.79	Pengembangan Karakter SDM Guru	Terlaksananya pengembangan karakter SDM Guru	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	80.000.000	Dinas Pendidikan d	Dana Alokasi Umum	80	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	1.1.20.65	Pemberian Kesejahteraan Pendidik PAUD	Terpenuhinya kesejahteraan pendidikan PAUD	400	0	400	0	400	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana, Pokok Pikiran DPRD
15	1.1.20.19	Pembinaan MKKS SMP	Terlaksananya kegiatan pembinaan MKKS SMP	22 org	43.400.000	22 org	42.270.000	22 org	42.270.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
16	1.1.20.18	Pembinaan KKKS SD	Terlaksananya kegiatan pembinaan KKKS SD	77 org	95.400.000	77 org	94.600.000	77 org	94.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	1.1.20.75	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	Terlaksanannya Kelompok Kerja Kepala Sekolah TK	73 orang		73 orang	93.600.000	73 orang	93.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
18	1.1.20.74	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	Bertambahnya jumlah Assessor sesuai dengan rasio guru yang dinilai	120 Guru		120 Guru	49.000.000	120 Guru	49.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
19	1.1.20.78	Fasilitasi Penyiapan Pengawas Sekolah	Terlaksanannya fasilitasi penyiapan pengawas sekolah	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	75.000.000	Dinas Pendidikan d	Dana Alokasi Umum	80	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.1.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			1.850.796.000		1.998.415.000		2.084.067.000				
			Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :	44									
			a. Propinsi	30 pelajar									
			b. Nasional	14 pelajar									
			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	88%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	96%									
			Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	30%									
			Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	20%									
1	1.1.22.7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	100	15.000.000	100	13.635.000	100	13.635.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	1.1.22.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100	11.000.000	100	10.700.000	100	10.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.1.22.11	Penerimaan siswa baru	Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar	100	163.500.000	100	159.570.000	100	159.570.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	1.1.22.13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Beasiswa tepat sasaran	100	206.380.000	100	206.380.000	100	206.380.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Penanggulangan Kemiskinan
5	1.1.22.22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	Terlaksanya fungsi kontroling	100	98.600.000	100	98.600.000	100	98.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.1.22.23	Sidak pelajar	Meningkatnya disiplin pelajar	100	46.100.000	100	37.913.000	100	37.913.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
7	1.1.22.24	Pelaksanaan asistensi APBS	Administrasi sekolah berjalan lancar	100	78.763.000	100	78.763.000	100	78.763.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	1.1.22.25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah	84	30.642.000	84	30.642.000	84	30.642.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	1.1.22.26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	Tersusunnya buku RKSM	25	30.600.000	25	30.064.000	25	30.064.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	1.1.22.29	Manajemen pengelolaan ICT center	Informasi Pendidikan secara online dan terlaksananya pendataan pendidikan berbasis masyarakat	12	46.936.000	12	66.364.000	12	68.870.000	Kota Magelang dan	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
11	1.1.22.30	Penyusunan buku selayang pandang	Tersebar nya informasi Pendidikan	100	24.900.000	100	24.196.000	100	24.196.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	1.1.22.33	Penilaian kinerja kepala sekolah	Termotivasinya Kepala Sekolah untuk bekerja lebih baik	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
13	1.1.22.35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	meningkatkan kinerja guru dan pengawas	100	74.000.000	100	73.520.000	100	73.520.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	1.1.22.38	Manajemen pendataan pendidikan	Sistem informasi berbasis masyarakat	100	0	100	0	100	35.000.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	75	SDGs
15	1.1.22.41	Penyusunan Kalender Pendidikan	Tersedianya kalender pendidikan	100	16.000.000	100	15.196.000	100	15.196.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
16	1.1.22.42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	Penggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis	100	32.500.000	100	31.390.000	100	31.390.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
17	1.1.22.47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Terselesainya pengelolaan data pokok pendidikan	100	50.000.000	100	48.580.000	100	48.580.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
18	1.1.22.49	Akreditasi Sekolah	Terlaksananya akreditasi sekolah	20	36.385.000	20	36.385.000	20	36.385.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
19	1.1.22.52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA	100	14.936.000	100	13.986.000	100	13.986.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
20	1.1.22.77	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	100	436.174.000	100	436.174.000	100	436.174.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Pemberantasan Korupsi
21	1.1.22.78	Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)	Terlaksananya Pelatihan E-Raport					1 kegiatan	13.721.000	Dinas Pendidikan d	Dana Alokasi Umum	80	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1.1.22.2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	180.000.000	2	130.899.000	2	154.065.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
23	1.1.22.76	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	terlaksananya program Gerakan Peduli Siswa di sekolah	100	40.000.000	100	39.900.000	100	39.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
24	1.1.22.79	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA	100	169.380.000	100	47.986.000	100	47.986.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
25	1.1.22.57	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	terlaksannya monitoring	74 sekolah		74 sekolah	205.284.000	74 sekolah	207.790.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Kota Layak Anak
26	1.1.22.58	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	120 orang		120 orang	34.000.000	120 orang	41.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
27	1.1.22.59	Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset/barang sekolah	100 sekolah		100 sekolah	79.288.000	100 sekolah	80.541.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.1.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			1.810.842.300		2.044.644.000		2.044.644.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	40%									
1	1.1.23.1	Lomba cerdas cermat SD	Terlaksananya lomba cerdas cermat	5 Kegiatan	55.760.000	5 Kegiatan	53.870.000	5 Kegiatan	53.870.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	1.1.23.5	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	Siswa mempunyai prestasi di bidang MIPA/Astronomi	100	84.348.000	100	82.845.000	100	82.845.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	1.1.23.9	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	Terselenggaranya lomba dokter kecil	100	45.645.800	100	44.499.000	100	44.499.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	1.1.23.11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	Meningkatnya kebersihan dan kesehatan sekolah	100	40.175.000	100	40.175.000	100	40.175.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	1.1.23.17	Pelaksanaan Pra US SD	Terlaksananya pra us sd	100	106.665.000	100	152.865.000	100	152.865.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	1.1.23.18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	Terukurnya kemampuan siswa	100	168.404.000	100	249.092.000	100	249.092.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
7	1.1.23.19	Pelaksanaan Pra UN SMP	Terukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti UN	100	182.382.500	100	181.883.000	100	181.883.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.1.23.20	Pelaksanaan US dan UN SMP	Siswa mengikuti US dan UN SMP	3300	141.582.000	3300	189.042.000	3300	189.042.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
9	1.1.23.21	Lomba Cerdas Cermat SMP	Melatih daya ingat dan kecerdasan berfikir	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
10	1.1.23.27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	Terselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP	4	403.756.000	4	394.006.000	4	394.006.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
11	1.1.23.28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	Meningkatnya disiplin siswa	100	181.311.000	100	181.311.000	100	181.311.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
12	1.1.23.31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Siswa mampu menerapkan ilmu kesehatan remaja	100	33.621.000	100	33.216.000	100	33.216.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
13	1.1.23.32	Lomba PBB siswa SD/SMP	Terlaksananya lomba PBB siswa SD/SMP	2	30.015.000	2	30.015.000	2	30.015.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
14	1.1.23.33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	meningkatkan prestasi bidang agama islam	100	298.752.000	100	285.852.000	100	285.852.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
15	1.1.23.25	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	meningkatkan prestasi siswa	100	13.425.000	100	13.110.000	100	13.110.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
16	1.1.23.34	Lomba Drum Band	Terlaksananya lomba drum band sekolah tingkat kota	2 kegiatan		2 kegiatan	87.863.000	2 kegiatan	87.863.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.25	Program Pendidikan Berkelanjutan			150.000.000		150.700.000		150.700.000				
			Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	66.34%									
			Meningkatkan nasionalisme dan pendidikan karakter bagi siswa										
1	1.1.25.3	Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan	Terlaksananya Nasionalisme dan Pendidikan Berkelanjutan di Sekolah sekolah	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	150.700.000	1 kegiatan	150.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
	1.1.26	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			0		16.768.200.000		21.153.759.000				
1	1.1.26.47	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	168.800.000	1 sekolah	197.940.000	SDN Jurangombo 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
2	1.1.26.31	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	296.800.000	1 sekolah	356.734.000	SDN Kemirirejo 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
3	1.1.26.32	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	307.200.000	1 sekolah	401.692.000	SDN Kemirirejo 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.1.26.73	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 sekolah		1 sekolah	549.000.000	1 sekolah	573.245.000	SMPN 12	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
5	1.1.26.20	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	150.400.000	1 sekolah	193.368.000	SD Negeri Cacaban	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
6	1.1.26.41	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	100.800.000	1 sekolah	126.710.000	SD Rejowinangun U	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
7	1.1.26.33	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	152.000.000	1 sekolah	215.803.000	SD Negeri Magelan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
8	1.1.26.34	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	131.200.000	1 sekolah	171.456.000	SD Negeri Magelan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
9	1.1.26.40	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	66.400.000	1 sekolah	81.404.000	SD Rejowinangun U	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
10	1.1.26.35	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	121.600.000	1 sekolah	205.841.000	SD Negeri Magelan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
11	1.1.26.22	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	144.000.000	1 sekolah	231.476.000	SD Negeri Cacaban	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
12	1.1.26.36	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	317.600.000	1 sekolah	373.708.000	SD Negeri Magelan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	1.1.26.21	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di sekolah	1 sekolah		1 sekolah	141.600.000	1 sekolah	171.015.000	SD Negeri Cacaban	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
14	1.1.26.25	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	95.200.000	1 sekolah	151.706.000	SD Negeri Gelangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
15	1.1.26.38	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	124.800.000	1 sekolah	165.719.000	SD Negeri Rejowina	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
16	1.1.26.68	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	568.000.000	1 sekolah	683.423.000	SMP Negeri 7 Magel	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
17	1.1.26.7	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	73.600.000	1 sekolah	118.384.000	SDN Kramat 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
18	1.1.26.6	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	144.800.000	1 sekolah	172.642.000	SDN Kramat 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
19	1.1.26.8	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	80.800.000	1 sekolah	101.084.000	SDN Kramat 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
20	1.1.26.9	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	109.600.000	1 sekolah	137.394.000	SDN Kramat 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
21	1.1.26.10	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	122.400.000	1 sekolah	243.846.000	SDN Kramat 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1.1.26.26	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	58.400.000	1 sekolah	115.058.000	SD Negeri Gelangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
23	1.1.26.11	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	74.400.000	1 sekolah	108.619.000	SDN Potrobangsari	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
24	1.1.26.12	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	185.600.000	1 sekolah	280.205.000	SDN Potrobangsari	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
25	1.1.26.27	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	107.200.000	1 sekolah	123.941.000	SD Negeri Gelangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
26	1.1.26.13	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	153.600.000	1 sekolah	207.876.000	SDN Potrobangsari	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
27	1.1.26.14	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	96.000.000	1 sekolah	118.929.000	SDN Potrobangsari	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
28	1.1.26.28	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	164.000.000	1 sekolah	226.572.000	SD Negeri Gelangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
29	1.1.26.15	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	143.200.000	1 sekolah	182.387.000	SDN Wates 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
30	1.1.26.55	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	136.800.000	1 sekolah	157.858.000	SD Negeri Rejowinangun	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	1.1.26.16	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	123.200.000	1 sekolah	243.374.000	SDN Wates 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
32	1.1.26.17	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	52.800.000	1 sekolah	73.144.000	SDN Wates 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
33	1.1.26.18	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	117.600.000	1 sekolah	148.959.000	SDN Wates 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
34	1.1.26.19	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	59.200.000	1 sekolah	73.808.000	SDN Wates 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
35	1.1.26.56	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	153.600.000	1 Sekolah	160.883.000	SDN Tidar 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
36	1.1.26.29	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	127.200.000	1 sekolah	151.057.000	SD Negeri Gelangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
37	1.1.26.30	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	57.600.000	1 sekolah	78.446.000	SD Negeri Gelangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
38	1.1.26.42	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	141.600.000	1 sekolah	158.209.000	SDN Rejowinangun	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
39	1.1.26.43	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	131.200.000	1 sekolah	137.683.000	SDN Rejowinangun	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	1.1.26.23	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	135.200.000	1 sekolah	181.842.000	SD Negeri Cacaban	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
41	1.1.26.24	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	157.600.000	1 sekolah	234.732.000	SD N Cacaban 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
42	1.1.26.44	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	162.400.000	1 sekolah	241.779.000	SDN Jurangombo 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
43	1.1.26.45	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	125.600.000	1 sekolah	240.621.000	SDN Jurangombo 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
44	1.1.26.46	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	162.400.000	1 sekolah	205.870.000	SDN Jurangombo 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
45	1.1.26.57	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	151.200.000	1 Sekolah	197.777.000	SDN Tiadr 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
46	1.1.26.58	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	148.000.000	1 Sekolah	172.524.000	SDN Tidar 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
47	1.1.26.51	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	150.400.000	1 sekolah	180.751.000	SDN Rejowinangun	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
48	1.1.26.59	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di sekolah	1 sekolah		1 sekolah	161.600.000	1 sekolah	220.263.000	SDN Tidar 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	1.1.26.52	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	152.000.000	1 sekolah	180.701.000	SDN Rejowinangun	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
50	1.1.26.53	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	110.400.000	1 sekolah	133.379.000	SDN Rejowinangun	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
51	1.1.26.54	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	140.000.000	1 sekolah	174.461.000	SDN Rejowinangun	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
52	1.1.26.60	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	114.400.000	1 Sekolah	142.836.000	SDN Tidar 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
53	1.1.26.61	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	120.000.000	1 Sekolah	205.725.000	SDN Tidar 7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
54	1.1.26.62	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	711.000.000	1 Sekolah	798.857.000	SMPN 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
55	1.1.26.63	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	769.000.000	1 Sekolah	974.743.000	SMPN 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
56	1.1.26.64	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	726.000.000	1 Sekolah	732.148.000	SMPN 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	1.1.26.65	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	531.000.000	1 Sekolah	621.016.000	SMPN 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
58	1.1.26.1	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	157.600.000	1 sekolah	178.194.000	SDN Kedungsari 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
59	1.1.26.67	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	545.000.000	1 Sekolah	707.577.000	SMPN 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
60	1.1.26.66	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 sekolah		1 sekolah	680.000.000	1 sekolah	719.377.000	SMPN 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
61	1.1.26.2	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	99.200.000	1 sekolah	139.413.000	SDN Kedungsari 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
62	1.1.26.39	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	75.200.000	1 sekolah	93.691.000	SDN Rejowinangun	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
63	1.1.26.3	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	131.200.000	1 sekolah	160.856.000	SDN Kedungsari 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
64	1.1.26.4	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	163.200.000	1 sekolah	195.019.000	SDN Kedungsari 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
65	1.1.26.69	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 sekolah		1 sekolah	708.000.000	1 sekolah	934.300.000	SMPN 8	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	1.1.26.5	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	296.000.000	1 sekolah	652.386.000	SDN Kedungsari 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
67	1.1.26.70	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 sekolah		1 sekolah	623.000.000	1 sekolah	798.375.000	SMPN 9	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
68	1.1.26.37	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 sekolah		1 sekolah	291.200.000	1 sekolah	358.524.000	SDN Magelang 2/7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
69	1.1.26.71	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 sekolah		1 sekolah	627.000.000	1 sekolah	629.084.000	SMPN 10	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
70	1.1.26.72	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 sekolah		1 sekolah	551.000.000	1 sekolah	583.285.000	SMPN 11	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
71	1.1.26.74	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 sekolah		1 sekolah	721.000.000	1 sekolah	910.319.000	SMPN 13	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
72	1.1.26.48	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	91.200.000	1 Sekolah	107.117.000	SDN Magersari 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
73	1.1.26.49	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	145.600.000	1 Sekolah	176.592.000	SDN Magersari 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM
74	1.1.26.50	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah	84.800.000	1 Sekolah	148.027.000	SDN Magersari 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan											
	2.4.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			0		0		25.000.000				
			Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	30%									
			Tersedianya Sertifikat Kepemilikan Tanah	1	25.000.000								
1	2.4.16.8	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Tersedianya sertifikat kepemilikan tanah		0		0	1	25.000.000	SDN Kedungsari 4	Dana Alokasi Umum	80	Rencana, Akomodasi Musrenbang
				TOTAL	33.790.367.300		51.833.498.000		60.718.379.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

SKPD : Dinas Kesehatan
 URUSAN : Kesehatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.883.163.000		1.892.905.000		1.950.162.000				
1	1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item surat yang terkelola	5 item	3.180.000	5 item	3.180.000	5 item	3.180.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
2	1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	249.600.000	12 bulan	249.600.000	12 bulan	249.600.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
3	1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berizin	49 unit	30.950.000	49 unit	30.950.000	49 unit	30.950.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
4	1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	33 orang	340.672.000	33 orang	361.336.000	33 orang	361.336.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
5	1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan yang tersedia	25 item	229.073.000	25 item	51.207.000	25 item	53.606.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
6	1.2.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah item peralatan kerja yang diperbaiki	8 item	13.290.000	8 item	13.290.000	8 item	15.790.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia	55 item	37.033.000	55 item	22.937.000	55 item	22.937.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
8	1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	18 item	13.595.000	18 item	12.189.000	18 item	12.189.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
9	1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan yang tersedia	9 item	8.633.000	9 item	8.633.000	9 item	8.633.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
10	1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	14.488.000	12 bulan	14.488.000	12 bulan	14.488.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
11	1.2.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	12 bulan	13.464.000	12 bulan	13.464.000	12 bulan	9.724.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
12	1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah item makanan dan minuman yang tersedia	60 orang	62.873.000	60 orang	62.873.000	60 orang	62.873.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
13	1.2.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	205	230.127.000	205	179.941.000	205	186.871.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
14	1.2.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga kontrak dan honorer yang ada	44 orang	604.774.000	44 orang	837.406.000	44 orang	886.574.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	1.2.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 bulan	31.411.000	12 bulan	31.411.000	12 bulan	31.411.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1.2.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			11.850.040.000		587.668.000		1.376.220.000				
			Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%									
1	1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	51 unit	307.448.000	51 unit	0	1 paket	264.640.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	110 unit	103.862.000	110 unit	0	1 paket	215.990.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
3	1.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 unit	41.988.000	4 unit	51.178.000	4 unit	66.178.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
4	1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	49 unit	389.805.000	49 unit	389.805.000	49 unit	389.805.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
5	1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	43 unit	27.965.000	43 unit	27.965.000	44 unit	27.965.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
6	1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	115 unit	118.720.000	115 unit	118.720.000	115 unit	84.820.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
7	1.2.2.33	Pengadaan Papan Informasi	Jumlah papan nama yang diadakan	1 unit	18.000.000	1 unit	0	1 unit	5.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	58 unit	878.680.000	58 unit		0 60 unit	200.872.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
9	1.2.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 unit	21.750.000	2 unit		0 1 unit	36.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
10	1.2.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah m2 gedung kantor yang direhab	1	6.500.000.000	1		0 1	0	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	34	
11	1.2.2.3	Pembangunan gedung kantor	Renovasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Magelang	2 paket	3.441.822.000	2 paket		0 2 paket		Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	106	Rencana
12	1.2.2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung/bangunan yang dibangun	6	0	6		0 6	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	
13	1.2.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi	Terpenuhinya peralatan komunikasi					1 paket	19.950.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
14	1.2.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terpenuhinya jaringan/instalasi listrik/air/komunikasi					1 paket	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
	1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			40.000.000		43.155.000		43.155.000				
1	1.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek cara pembuatan DUPAK	50	7.500.000	50	7.320.000	50	7.320.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya	450	24.750.000	450	24.285.000	450	24.285.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
3	1.2.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Jumlah surat izin praktek dan surat izin kerja yang diterbitkan	150	7.750.000	150	11.550.000	150	11.550.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
	1.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			55.452.000		55.452.000		55.452.000				
1	1.2.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat	4	22.468.000	4	22.468.000	4	22.468.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	80	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.2.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	2	9.020.000	2	9.020.000	2	9.020.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.2.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	2	18.004.000	2	18.004.000	2	18.004.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
4	1.2.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	85	
5	1.2.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP SKPD yang disusun	1	5.960.000	1	5.960.000	1	5.960.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.2.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			2.498.769.000		1.821.641.000		1.821.641.000				
1	1.2.15.1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya Obat dan Bahan Perbekalan Kesehatan	5	2.310.000.000		1.584.969.000		1.584.969.000	Dinas Kesehatan	DAK DAN DAU	70	Program prioritas RPJM
2	1.2.15.4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah peserta penyuluhan untuk tenaga farmasi di RS dan apotek	50	8.800.000		8.669.000		8.669.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
3	1.2.15.5	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah petugas pengelola obat di puskesmas, pustu, RB dan BP yang dibina dan buku formularium obat puskesmas	60	16.388.000		10.471.000		10.471.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
4	1.2.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev farmasi yang tersusun	12	1.760.000		1.892.000		1.892.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
5	1.2.15.7	Pengadaan bahan kimia	Jumlah bahan kimia yang dibeli	40 jenis	135.927.000		135.927.000		135.927.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
6	1.2.15.8	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan yang dikelola	340	25.894.000		25.399.000		25.399.000	UPTD Instalasi Farmasi	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.2.15.9	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	Jumlah bulan pelaksanaan pendistribusian obat dan e-logistik	12 bulan			54.314.000		54.314.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Program prioritas RPJM
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			11.254.000		11.254.000		11.254.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.28	Pengelolaan website	Jumlah bulan pengelolaan website	12	11.254.000	12	11.254.000	12	11.254.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			21.509.782.500		17.436.366.000		23.437.635.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%									
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%									
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%									
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%									
1	1.2.16.2	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Jumlah peserta pertemuan askep rawat jalan puskesmas dan pertemuan kontrasepsi pasca keguguran	94	12.637.000		0		0			50	
						94		94		Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.2.16.4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah penyemprotan lalat di TPA yang dilaksanakan	52 kali	18.600.000		19.100.000		19.100.000	TPA Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
				52 kali				52 kali					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.2.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah guru peserta sosialisasi program UKS dan siswa peserta pelatihan dokter kecil	404 orang	54.927.000	404 orang	54.927.000	404 orang	54.927.000	Kota Magelang	DBHCHT	80	Program prioritas RPJM
4	1.2.16.10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah petugas yang dilatih untuk melayani korban bencana	30 orang	9.384.000	30 orang	17.885.000	30 orang	17.885.000	Kota Magelang	DBHCHT	55	Penanggulangan Kemiskinan
5	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah kegiatan P3K yang dilaksanakan	180 kali	60.093.000	180 kali	59.543.000	180 kali	59.543.000	Kota Magelang	DBHCHT	65	Program prioritas RPJM
6	1.2.16.13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah pengambilan sample lingkungan dan reagensi untuk pemeriksaan air bersih, air minum, air kolam renang, alat medis dan udara	2000	250.000.000	2000	248.598.000	2000	309.545.000	Kota Magelang	DBHCHT	75	Program prioritas RPJM
7	1.2.16.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	1.2.16.18	Pengadaan alat laboratorium	Jumlah alat laboratorium yang terpenuhi	5	319.000.000	5	282.903.000	5 jenis	2.358.917.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	50	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.2.16.21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	Jumlah posko kesehatan yang dilaksanakan	2 posko	27.463.000	2 posko	27.111.000	2 posko	37.836.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	1.2.16.22	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	Jumlah pekerja formal dan informal yang dibina	100 orang	11.874.000	100 orang	11.874.000	100 orang	11.874.000	Kota Magelang	DBHCHT	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	1.2.16.23	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	Jumlah nakes remaja dan siswa SBH yang dibina	375 orang	47.100.000	375 orang	48.360.000	375 orang	48.360.000	Kota Magelang	DBHCHT	70	Program prioritas RPJM
12	1.2.16.24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	Jumlah pelayanan kesehatan swasta yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	1 laporan	3.034.000	1 laporan	3.034.000	1 laporan	3.034.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
13	1.2.16.25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	1 laporan	2.420.000	1 laporan	2.420.000	1 laporan	2.420.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	1.2.16.28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	Jumlah pengambilan sampel saluran PDAM dan sumur	100 sampel	13.184.500	100 sampel	12.825.000	100 sampel	12.825.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
15	1.2.16.36	Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi	29 unit	45.000.000	29 unit	44.340.000	29 unit	44.340.000	Kota Magelang	DBHCHT	60	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	1.2.16.38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa	1000 sampel	106.000.000	1000 sampel	160.000.000	1000 sampel	334.970.000	Kota Magelang	DBHCHT	70	Program prioritas RPJM
17	1.2.16.42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta Jamkesda yang terlayani	23400	11.120.792.000	23400	7.568.940.000	23400	7.605.344.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Penanggulangan Kemiskinan
18	1.2.16.44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan SPGDT	12	482.623.000	12	548.650.000	12 bulan	636.965.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
19	1.2.16.45	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	1 kali	13.598.000	1 kali	13.598.000	1 kali	13.598.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
20	1.2.16.46	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesehatan	Jumlah raperda kesehatan yang tersusun		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	
21	1.2.16.48	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah puskesmas pelaksana kegiatan BOK	5 puskesmas	965.000.000	5 puskesmas	2.744.637.000	5 puskesmas	2.744.637.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Program prioritas RPJM
22	1.2.16.49	Pendataan Perencanaan Integrasi Penduduk Miskin Peserta Jamkesda ke Dalam Program JKN	Jumlah peserta jamkesda yang masuk BPJS	Masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas yang masuk BPJS	173.480.000	Masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas yang masuk BPJS	265.520.000	Masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas yang masuk BPJS	287.821.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	1.2.16.52	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	Jumlah bulan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di RB Paten	12	162.896.000	12	162.896.000	12	162.896.000	Rumah Bersalin Paten	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
24	1.2.16.53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah peserta sosialisasi PTM, peningkatan kapasitas SDM, kapasitas kader posbindu, dan pemeriksaan pengemudi	335	122.000.000	335	121.310.000	335	121.310.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	75	Program prioritas RPJM
25	1.2.16.54	Pelayanan kesehatan Jiwa	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan jiwa	150	26.500.000	150	26.005.000	150	26.005.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
26	1.2.16.55	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Kesehatan	Jumlah raperwal Jamkesda dan integrasi yang tersusun	1 dokumen	23.439.000	1 dokumen	13.089.000	1 dokumen	13.089.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
27	1.2.16.3	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi	8 paket	7.413.738.000	0	0	2 paket	1.629.627.000	Kota Magelang	DBHCHT	80	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	1.2.16.56	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan STBM, UKK, Kesehatan Olahraga, Posbindu, Sosialisasi HIV/AIDS, P2 DBD, P2 TB, Germas	8 kegiatan		8 kegiatan	548.935.000	8 kegiatan	548.935.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Program prioritas RPJM
29	1.2.16.57	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan askep rawat jalan umum, rawat jalan gigi di puskesmas dan pertemuan askep pasca keguguran	94 orang		94 orang	12.637.000	94 orang	12.637.000	Kota Magelang	DBHCHT	75	Program prioritas RPJM
30	1.2.16.50	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah sarana prasarana klinik yang terpenuhi				0	1 paket	348.740.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
31	1.2.16.20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	Jumlah sarana prasarana puskesmas yang terpenuhi			8 paket	4.392.229.000	8 paket, kanopi 1 unit, puskesmas keliling 1 unit, EKG 2 unit, Coldchain 2 unit, PC 5 unit, tablet 25 unit.	5.945.455.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Program prioritas RPJM
	1.2.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan			100.961.000		98.594.000		123.964.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan pengawasan obat dan makanan	68%									
1	1.2.17.1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sampel jajanan anak sekolah yang diuji, sampel makanan dan minuman menjelang hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2019	500 sampel	25.550.000	500 sampel	25.298.000	500 sampel	25.298.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
2	1.2.17.2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa	550 sampel	57.000.000	550 sampel	57.000.000	550 sampel	82.370.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
3	1.2.17.7	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	Jumlah apotek dan industri rumah tangga yang dibina	80 apotek dan IRTP	18.411.000	80 apotek dan IRTP	16.296.000	80 apotek dan IRTP	16.296.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			735.163.000		615.654.000		632.254.000				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.19.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih membuat media promosi kesehatan	15	81.169.000	15	0	15	0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50	
2	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah peserta penyuluhan pola hidup sehat	2160	182.600.000	2160	163.100.000	2160	163.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
3	1.2.19.10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	Jumlah bulan pelaksanaan pengembangan SIMPUS	12	54.290.000	12	54.290.000	12	54.290.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	1.2.19.11	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	Jumlah rumah tangga yang didata PHBS	34000	102.910.000	34000	102.580.000	34000	119.180.000	kelurahan	DBH Pajak Rokok	75	Program prioritas RPJM
5	1.2.19.14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Jumlah kader posyandu dan pengobat tradisional yang dibina dan dilatih	100 orang	111.650.000	100 orang	98.290.000	100 orang	98.290.000	Kota Magelang	DBHCHT	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	1.2.19.15	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi perokok					0		0	Kota Magelang	-	0	
7	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang dibina	1235 orang	139.825.000	1235 orang	134.675.000	1235 orang	134.675.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	1.2.19.19	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi JPKM	510 orang	62.719.000	510 orang	62.719.000	510 orang	62.719.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Penanggulangan Kemiskinan
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			200.266.000		200.011.000		200.011.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100									
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100									
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31									
1	1.2.20.3	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Jumlah peserta orientasi gizi buruk bagi kader, orientasi anemia bagi kader, orientasi antropometri bagi petugas kesehatan, monitoring pelacakan dan penanganan kasus balita gizi buruk, pelacakan garam beryodium	130 orang	163.570.000		163.570.000		163.570.000			75	
						130 orang		130 orang		Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
2	1.2.20.4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah kader yang dibina tentang PSG kadarzi	54 orang	15.028.000		14.773.000		14.773.000			75	
						54 orang		54 orang		Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.2.20.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah puskesmas yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	5 laporan	21.668.000	5 laporan	21.668.000	5 laporan	21.668.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	1.2.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			95.933.000		77.346.000		77.346.000				
			Persentase rumah sehat	84%									
1	1.2.21.5	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	Jumlah tempat-tempat umum yang diawasi	3 kegiatan	15.427.000	3 kegiatan	15.202.000	3 kegiatan	15.202.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
2	1.2.21.6	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	Jumlah peserta sosialisasi penyehatan perumahan, sanitasi industri dan tempat kerja	17 kelurahan	80.506.000	17 kelurahan	62.144.000	17 kelurahan	62.144.000	Kota Magelang	DBHCHT	70	Program prioritas RPJM
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1.180.029.000		1.573.943.000		1.577.873.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<105									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah fogging fokus	100 fokus	196.851.000	100 fokus	196.851.000	100 fokus	196.851.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	SDGs, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.22.6	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	jumlah kegiatan pemantauan jentik berkala di 17 kelurahan, pertemuan penyakit endemik dan epidemik, pencetakan leaflet	2720 rumah	113.851.000	2720 rumah	113.113.000	2720 rumah	113.113.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
3	1.2.22.8	Peningkatan Imunisasi	Jumlah anak yang diimunisasi, jumlah petugas yang dilatih	20194 anak	124.724.000	20194 anak	527.930.000	20194 anak	527.930.000	Kota Magelang	DAK dan Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.2.22.9	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	Jumlah penyelidikan epidemiologi penyakit menular	200 kasus	12.200.000	200 kasus	12.200.000	200 kasus	12.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
5	1.2.22.12	Pengamanan kesehatan Haji	jumlah pemeriksaan kesehatan haji [yang dilaksanakan	300 orang	30.940.500	300 orang	37.215.000	300 orang	37.215.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Rencana
6	1.2.22.13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Anak sekolah kelas 1-3 SD/MI/ sederajat mendapatkan imunisasi DT dan TT	10500 anak	70.276.500	10500 anak	69.977.000	10500 anak	69.977.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan IMS yang dilaksanakan	13 kegiatan	420.655.000	13 kegiatan	419.317.000	13 kegiatan	423.247.000	Kota Magelang	DBHCHT	105	Program prioritas RPJM
8	1.2.22.18	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan surveilans PD3I	50 orang	83.006.000	50 orang	70.692.000	50 orang	70.692.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	105	Program prioritas RPJM
9	1.2.22.5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Tersusunnya dokumen RAD dan cetak Form pencatatan pelaporan TB	1 dokumen	127.525.000	1 dokumen	126.648.000	1 dokumen	126.648.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
	1.2.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1.326.363.350		1.098.271.000		1.106.661.000				
			Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	75%									
			Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	40%									
			Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	75									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	100									
			Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	60%									
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	65									
1	1.2.23.3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang didata	60 dokumen	8.800.000	60 dokumen	8.662.000	60 dokumen	8.662.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.2.23.8	Pembinaan Sarana Kesehatan	Jumlah pelayanan sarana kesehatan yang dibina	4 laporan	39.050.000	4 laporan	38.690.000	4 laporan	38.690.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
3	1.2.23.9	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	Jumlah tenaga kesehatan yang terpilih	15 orang	27.500.000	15 orang	27.200.000	15 orang	27.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.2.23.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana kapitasi dan dievaluasi	12 laporan	105.252.350	12 laporan	65.524.000	12 laporan	65.524.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.2.23.13	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Jumlah puskesmas dan labkes yang telah melaksanakan akreditasi	6 UPTD	494.015.000	6 UPTD	309.224.000	6 UPTD	309.224.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Program prioritas RPJM
6	1.2.23.14	Pembinaan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang dibina	5 puskesmas	185.545.000	5 puskesmas	184.510.000	5 puskesmas	184.510.000	Kota Magelang	DBHCHT	75	Program prioritas RPJM
7	1.2.23.15	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan	1 dokumen	23.100.000	1 dokumen	22.920.000	1 dokumen	22.920.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
8	1.2.23.16	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan penyusunan laporan kerja sama di bidang kesehatan	12 laporan	443.101.000	12 laporan	441.541.000	12 laporan	441.541.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
9	1.2.23.17	Fasilitasi Kegiatan Adinkes	Terlaksananya kegiatan adinkes					1 Tahun	8.390.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1.2.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			8.472.000		8.472.000		8.472.000				
			Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%									
			Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%									
1	1.2.24.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah peserta pertemuan monev	4 buku	8.472.000	4 buku	8.472.000	4 buku	8.472.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Penanggulangan Kemiskinan
	1.2.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			1.100.000.000		1.654.900.000		1.879.900.000				
1	1.2.25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang direhab	1 paket	1.100.000.000	1 paket	1.100.000.000	1 paket	1.100.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	50	Program prioritas RPJM
2	1.2.25.25	Pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi	Jumlah sarana prasarana instalasi farmasi yang terbeli	57 unit		57 unit	554.900.000	57 unit, garasi dan kanopi instalasi farmasi 1 unit	779.900.000	instalasi farmasi	Dana Alokasi Khusus (D A K)	45	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.2.25.18	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	
	1.2.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			50.015.000		50.015.000		50.015.000				
			Persentase kelurahan siaga aktif tigtat mandiri	52,94%									
1	1.2.28.2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Jumlah peserta pertemuan (penyakit menular) tingkat kelurahan	680 orang	45.560.000	680 orang	45.560.000	680 orang	45.560.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	75	Program prioritas RPJM
2	1.2.28.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev yang tersusun	3 dokumen	4.455.000	3 dokumen	4.455.000	3 dokumen	4.455.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			117.683.000		19.175.000		111.225.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	12%									
1	1.2.29.4	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah tenaga kesehatan dilatih MTBS dan SDIDTK	69 orang	19.340.000	69 orang	19.175.000	69 orang	19.175.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, SDGs, Program prioritas RPJM
2	1.2.29.9	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan anak balita yang terpenuhi	3 paket	98.343.000	3 paket	0	3 paket	92.050.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			40.001.000		137.887.000		137.887.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	12%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah kader lansia yang dibina	5	10.518.000	5	0	5	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	
2	1.2.30.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan lansia	5 laporan	2.518.000	5 laporan	2.518.000	5 laporan	2.518.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
3	1.2.30.8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Jumlah lansia yang disuluh	240 orang	26.965.000	240 orang	135.369.000	240 orang	135.369.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.2.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan			45.886.000		46.558.000		46.558.000				
			Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	86%									
1	1.2.31.2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah sampel air industri rumah tangga pangan yang diperiksa	80 sampel	14.486.000	80 sampel	15.174.000	80 sampel	15.174.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
2	1.2.31.3	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Jumlah restoran yang diperiksa	30 restoran	7.150.000	30 restoran	6.240.000	30 restoran	6.240.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
3	1.2.31.5	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	80 IRTP	24.250.000	80 IRTP	25.144.000	80 IRTP	25.144.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			797.701.000		1.463.064.000		1.463.064.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%									
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%									
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%									
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Jumlah kader yang dilatih tentang risiko tinggi kehamilan	151 orang	98.837.000	151 orang	92.717.000	151 orang	92.717.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs, Program prioritas RPJM
2	1.2.32.5	Pembinaan dukun bayi	Jumlah dukun bayi yang dibina	12 orang	6.056.000	12 orang	6.656.000	12 orang	6.656.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
3	1.2.32.6	Audit Maternal Perinatal	Jumlah pertemuan AMP yang dilaksanakan	2 kegiatan	62.553.000	2 kegiatan	62.553.000	2 kegiatan	62.553.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
4	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah kelurahan peserta penyuluhan	17 kelurahan	168.231.000	17 kelurahan	168.231.000	17 kelurahan	168.231.000	Kota Magelang	DBHCHT	75	SDGs, Program prioritas RPJM
5	1.2.32.8	Jaminan Persalinan	Jumlah ibu yang mendapatkan jaminan persalinan	175 orang	462.024.000	175 orang	1.132.907.000	175 orang	1.132.907.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	SDGs, Program prioritas RPJM
	1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			6.394.413.000		6.484.668.000		11.308.362.000				
			Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A									
1	1.2.33.5	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Selatan	12 bulan	1.350.295.000	12 bulan	1.350.295.000	12 bulan	2.158.000.000	Puskesmas Magelang Selatan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.33.6	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Jurangombo	12 bulan	1.188.080.000	12 bulan	1.188.080.000	12 bulan	1.703.120.000	Puskesmas Jurangombo	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	Program prioritas RPJM
3	1.2.33.7	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Tengah	12 bulan	1.602.000.000	12 bulan	1.624.941.000	12 bulan	2.971.555.000	Puskesmas Magelang Tengah	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	Program prioritas RPJM
4	1.2.33.8	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Kerkopan	12 bulan	743.749.000	12 bulan	743.749.000	12 bulan	1.328.434.000	Puskesmas Kerkopan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	Program prioritas RPJM
5	1.2.33.9	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Utara	12 bulan	1.510.289.000	12 bulan	1.577.603.000	12 bulan	3.147.253.000	Puskesmas Magelang Utara	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	Program prioritas RPJM
				TOTAL	50.041.346.850		35.376.999.000		47.419.111.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang
 URUSAN : Kesehatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			74.223.903.000		74.223.903.000		74.223.903.000				
			Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	10%									
1	1.2.26.32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Sakit	100%	2.870.527.000	100%	2.870.527.000	100%	2.870.527.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Program prioritas RPJM
2	1.2.26.28	Pembangunan rumah sakit (DAK)	Tersedianya Bangunan Rumah sakit	100 %	31.353.376.000	100 %	31.353.376.000	100 %	31.353.376.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	89	Program prioritas RPJM
3	1.2.26.1	Pembangunan rumah sakit	Tersedianya Bangunan Rumah sakit	100%	40.000.000.000	100%	40.000.000.000	100%	40.000.000.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
	1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			160.000.000.000		160.000.000.000		162.630.044.000				
			Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.33.3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar					0		0	RSUD Tidar Kota Magelang	-	0	
2	1.2.33.3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan Rujukan	100%	160.000.000.000		160.000.000.000		162.630.044.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
				TOTAL	234.223.903.000	100%	234.223.903.000	100%	236.853.947.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 URUSAN : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBI	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.276.727.000		1.286.747.000		1.325.682.000				
1	1.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksanannya administrasi surat menyurat	12	200.000		200.000		200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						12		12					
2	1.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	159.083.000		184.083.000		176.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						12		12					
3	1.3.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor	1	27.855.000		28.099.000		28.099.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						1		1					
4	1.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12	46.400.000		46.400.000		37.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						12		12					
5	1.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksanannya jasa pengelola keuangan	12	250.240.000		314.858.000		314.858.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						12		12					
6	1.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12	108.197.000		113.177.000		119.173.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						12		12					
7	1.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	41.747.000		36.000.000		36.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						12		12					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	32.520.000	12	27.795.000	12	27.795.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
9	1.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12	10.060.000	12	10.060.000	12	10.060.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
10	1.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	12	3.960.000	12	2.760.000	12	2.760.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
11	1.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya isi ulang tabung gas	12	1.860.000	12	1.860.000	12	1.860.000	DPU Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
12	1.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat dan tamu	12	47.232.000	12	47.232.000	12	42.942.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
13	1.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	12	337.290.000	12	254.180.000	12	296.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
14	1.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	tersedianya jasa tenaga honoror daerah	12	201.074.000	12	211.034.000	12	223.026.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
15	1.3.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	terlaksananya administrasi kepegawaian	12	9.009.000	12	9.009.000	12	9.009.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	1.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			5.824.772.450		1.835.244.000		3.017.952.000				
1	1.3.2.2	Pembangunan rumah dinas	terbangunnya rumah dinas walikota yang representatif		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	
2	1.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12	279.121.000	12	185.440.000	12	265.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	1.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeluharnya kendaraan dinas/operasional	12	424.429.000	12	423.196.000	12	409.946.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	16.594.000	12	16.594.000	12	6.301.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	12	16.770.000	12	16.410.000	12	20.410.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
6	1.3.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	terpeliharanya alat berat	12	153.627.000	12	153.627.000	12	153.627.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
7	1.3.2.3	Pembangunan gedung kantor	tersedianya garasi alat berat	1	4.221.231.450	1	0	1	215.785.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
8	1.3.2.32	Pengadaan Alat-alat pertukangan	terpenuhinya alat-alat pertukangan	12	0	12	10.000.000	12	10.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
9	1.3.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	tersedianya sumur pompa gedung	1	0	1	0	1 paket	37.250.000	Gedung Wanita Kota magelang	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
10	1.3.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kendaraan dinas operasional	1	285.800.000	1	0	1	460.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
11	1.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	1	107.850.000	1	0	1	127.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
12	1.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	1	171.150.000	1	0	1	205.125.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
13	1.3.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor		148.200.000		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
14	1.3.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terbangunnya kanopi parkir kendaraan	1	0	1	0	1	16.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
15	1.3.2.16	Perencanaan Bangunan Gedung	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan gedung wanita dan gedung kantor DPUPR	1		1	169.381.000	2 dokumen	229.412.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	1.3.2.35	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terbangun dan tertatanya taman dan lingkungan rumdin Walikota	1		1	860.596.000	1	860.596.000	Rumah Dinas Walikota	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			0		0		148.764.000				
1	1.3.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD				0	1 Kegiatan	148.764.000	DPUPR Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	1.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			176.191.000		76.719.000		76.719.000				
1	1.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	4	27.356.000	4	27.356.000	4	27.356.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	1.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis	1	7.093.000	1	7.093.000	1	7.093.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	1.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	1	7.070.000	1	7.070.000	1	7.070.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	1.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	2	11.256.000	2	11.256.000	2	11.256.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA dan DPA	2	18.685.000	2	18.685.000	2	18.685.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
6	1.3.6.19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan OPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan	1	82.265.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
7	1.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya LKj IP	1	5.259.000	1	5.259.000	1	5.259.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
8	1.3.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	tersusunnya dokumen renstra OPD	1	17.207.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
	1.3.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			12.004.075.000		4.000.000.000		4.000.000.000				
					24,440,748,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	942 m									
			Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	64.39%									
1	1.3.15.7	Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar Kota Magelang	terbangunnya jalan penghubung		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	
2	1.3.15.11	Pembangunan Trotoar Jalan Kalimas	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
3	1.3.15.12	Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Sarwo Edhie Wibowo dengan Jl. Jendral Sudirman	terbangunnya jalan penghubung		3.123.425.000		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
4	1.3.15.13	Perencanaan/DED Pembangunan jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar-Jl. Perintis Kemerdekaan	terbangunnya jalan penghubung		2.000.000.000		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
5	1.3.15.14	Pembangunan jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar - Jl. Perintis Kemerdekaan	terbangunnya median jalan	2300	0	2300	0	2300	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
6	1.3.15.15	Pembangunan Jl. Penghubung Tentara Pelajar Genie -Jl. Perintis Kemerdekaan	terbangunnya jalan penghubung	600	4.000.000.000	600	4.000.000.000	600	4.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.3.15.12	Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Sarwo Edhie Wibowo dengan Jl. Jendral Sudirman	terbangunnya jalan penghubung		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
8	1.3.15.17	Pembangunan trotoar Jl. Sukarno Hatta	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
9	1.3.15.16	Pembangunan trotoar Jl. S. Parman	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
10	1.3.15.18	Pembangunan Jl. penghubung Jl. jend. Sudirman-Tidar Baru	terbangunnya jalan penghubung		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
11	1.3.15.19	pembangunan trotoar Jl. Tidar Campur	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	1.3.15.22	Pembangunan trotoar Jl. Beringin VII	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki		2.823.325.000		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
13	1.3.15.1	Perencanaan pembangunan jalan	Terciptanya perencanaan pembangunan jalan yang baik		57.325.000		0		0		Dana Alokasi Umum	95	
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			30.166.000		7.544.000		7.544.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggara n pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Website yang selalu ter update	1	7.544.000	1	7.544.000	1	7.544.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.10.15.28	Pengelolaan website	tersedianya website yang update	12	22.622.000	12	0	12	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			5.000.000		0		0				
			DKPT		5,000,000								
			PERPUS		50,000,000								
			Presentase implementasi e-arsip	34%									
			Persentase ketersediaan sarpras arsip	20%									
1	2.18.15.3	Pengklasifikasikan data	terklasifikasikan data IMB	200	5.000.000	200	0	200	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			27.971.000		0		0				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%									
1	4.3.15.31	Penyusunan database bidang kebinamargaan	Tersedianya Database Bidang Bina Mrga	1	11.541.000		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
2	4.3.15.32	Penyusunan database bidang pengairan, drainase dan ESDM	Tersedianya Database Bidang Pengairan, Drainase dan ESDM	1	16.430.000		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			16.070.000		16.070.000		16.070.000				
1	4.4.15.88	Penaksiran barang milik daerah	terpenuhinya nilai barang milik daerah hasil penaksiran	12	16.070.000		16.070.000		16.070.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			2.457.477.000		1.492.728.000		1.493.928.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	85%									
			Jumlah shipon yang dibangun	6									
1	1.3.16.13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	terpeliharanya sarpras drainase kota	3	476.827.000	3	492.728.000	3	493.928.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.16.14	Pembuatan Afur dan Bak Kontrol Saluran Drainase	terbangunnya afur dan bak kontrol yang dapat mengatasi genangan air permukaan	50	230.650.000	50	0	50	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
3	1.3.16.15	Perencanaan/DED Peningkatan saluran drainase Jl. Diponegoro	terbangunnya shipon dan saluran drainase		0		0		0		Dana Alokasi Umum	94	
4	1.3.16.16	Perencanaan/DED Rehabilitasi saluran drainase Jalan Sultan Agung	terbangunnya shipon dan saluran drainase	417	1.750.000.000	417	0	417	0		Dana Alokasi Umum	94	
5	1.3.16.18	Perencanaan/DED Pembangunan Shipon Sanden dan Saluran drainase Kel. Kramat Selatan	terbangunnya shipon dan saluran drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
6	1.3.16.17	Peningkatan saluran drainase Jl. Sarwo Edi Wibowo	terbangunnya shipon dan saluran drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
7	1.3.16.20	Pembangunan Shipon Sanden dan Saluran drainase Kel. Kramat Selatan	Terbangunnya Shipon dan Saluran Drainase	1 paket		1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			0		0		0				
			Indeks Kualitas Air,	76%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Indeks Kualitas Udara	78%									
			Indeks Tutupan Hutan	48%									
			Jumlah SDA yang terkonservasi	47,7									
			Jenis flora	8 Jenis									
			Jenis fauna	2 Jenis									
1	2.5.17.8	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA		1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			1.171.650		43.740.000		46.139.000				
			PERPUS		25,000,000								
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,4									
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terkelola dan tersimpannya arsip	12	1.171.650	12	43.740.000	12	46.139.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			880.748.000		25.723.315.000		32.497.605.000				
			Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	86%									
			Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	86%									
			Rasio ketercukupan PJU	62%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%									
			Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	40%									
1	1.3.18.3	Pemeliharaan Jalan	terpeliharanya jalan, kansteen dan trotoar di Kota Magelang	30428	880.748.000	30428	882.080.000	30428	854.688.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.18.23	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	meningkatnya kualitas jalan di Kota Magelang	6	0	6	13.562.760.000	6	13.562.760.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.18.83	Peningkatan trotoar Jl. Diponegoro	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki	1 paket		1 paket	2.620.475.000	1 paket	2.620.475.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.18.100	Rehab/Peningkatan Jalan Jend. Sarwo Edhie Wibowo	Terbangunnya leuneng saluran drainase	1 paket		1 paket	0	1 paket	234.225.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.3.18.102	Peningkatan Trotoar Jl. Dr. Koesen Hirohoesodo	Terbangunnya trotoar Jl. Dr. Koesen Hirohoesodo				0	1 paket	432.875.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	1.3.18.99	Perencanaan/DED Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	69.987.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.3.18.98	Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	42.572.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
8	1.3.18.97	Perencanaan/DED Rehabilitasi/Peningkatan jalan Kalibening III	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	34.572.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.3.18.96	Perencanaan/DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota Magelang	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	54.987.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	1.3.18.82	Peningkatan trotoar Jl. Pahlawan	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki	1 paket		1 paket	5.000.000.000	1 paket	5.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	1.3.18.84	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan kelurahan Kedungsari	Terbangunnya Leuneng	1 paket		1 paket	340.000.000	1 paket	340.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	1.3.18.8	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Jurangombo Utara	Terbangunnya jalan yang baik	1 paket		1 paket	818.000.000	1 paket	818.000.000	Kel. Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
13	1.3.18.87	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Penghubung Jl. Sarwo Edi Wibowo-Jl. Jend. Sudirman	Terbangunnya Jalan	1 paket		1 paket	2.000.000.000	1 paket	2.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	1.3.18.88	Peningkatan/rehab jalan Ismoyo	Terbangunnya Jalan	1 paket		1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
15	1.3.18.76	Peningkatan median jalan Soekarno Hatta	terbangunnya median jalan	1 paket		1 paket	0	1 paket	536.175.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
16	1.3.18.75	Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK)	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	106.827.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
17	1.3.18.70	Perencanaan/DED rehab/pemeliharaan jembatan (DAK)	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	55.237.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
18	1.3.18.73	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang	Terbangunnya Jalan	1 paket		1 paket	0	1 paket	5.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
19	1.3.18.101	Rehab/Peningkatan Jalan Gintung	terbangunnya/terpeliharanya jalan				0	1 paket	234.225.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		0		0				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0									
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	tersusunnya perda reklame		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
2	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	tersusunnya draft perwal reklame		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan			0		0		0				
1	1.3.20.5	Inventarisasi Aset Kawasan Jembatan Gantung Progo-Karangwuni	terinventarisasi nya aset		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	
2	1.3.20.6	Inventarisasi Aset Kawasan Cangkuk	terinventarisasi nya aset		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			840.615.200		6.137.764.000		6.671.472.000				
					4,337,464,000								
			Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4									
			Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	65%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.21.7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	1	840.615.200	1	738.884.000	1	803.892.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.13.21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya lapangan tenis indoor outdoor, pos jaga, pagar dan pintu stadion	3 paket		3 paket	5.398.880.000	3 paket	5.867.580.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			84.108.000		81.507.000		81.507.000				
			Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	81%									
1	1.3.24.10	Pemeliharaan jaringan irigasi	terpeliharanya jaringan irigasi	3	84.108.000	3	81.507.000	3	81.507.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			85.577.000		500.000.000		609.144.000				
			Prosentase sungai dan suber daya air dalam keadaan baik	100%									
1	1.3.26.8	Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang					0		0	Kota Magelang	-	0	
2	1.3.26.8	Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang	terinventarisasi nya pemanfaatan ESDM dan air bawah tanah	1	85.577.000	1	0	1	0		Dana Alokasi Umum	54	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.26.12	DED Rehabilitasi/Peningkatan Talud Sungai	Tersedianya dokumen perencanaan				0	1	54.572.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.26.10	Pembangunan Talud Sungai	terbangunnya talud	1 paket		1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.3.26.13	Perencanaan/DED pembangunan talud Sungai Elo	Tersedianya dokumen perencanaan					1 paket	54.572.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			0		0		0				
			Persentase penduduk berakses air minum	92									
			Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	88									
			Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	8									
1	1.3.27.10	Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan					0		0	RW I dan RW III Kelurahan Magelang	-	0	
	1.3.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			8.119.245.000		18.312.510.000		15.414.224.000				
			Persentase kawasan strategis yang terbangun?	2 kawasan									
1	1.3.29.61	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR) Tahap II	terbangunnya gerbang dan interior		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
2	1.3.29.7	Pembangunan Kolam Renang (Lanjutan)	terbangunnya kolam renang prestasi dan rekreasi		0		0		0	Kota Magelang	PAD	96	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.29.6	Pembangunan Stadion Madya (Lanjutan)	terbangunnya pintu gerbang, pagar lingkungan tribun timur	1	4.221.231.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	
4	1.3.29.35	Penataan Kawasan Budaya Mantyasih	tertatanya kawasan budaya mantyasih		0		0		0		Bantuan Keuangan dari Provinsi	96	
5	1.3.29.62	Penataan Ruang Terbuka Kawasan Gunung Tidar	terbangunnya lampu penerangan stadion	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	91	
6	1.3.29.63	Penataan Ruang Terbuka Kawasan Gunung Tidar	tertatanya kawasan budaya gunung tidar	1	3.148.014.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	
7	1.3.29.64	Penataan Kawasan Budaya Mantyasih (Lanjutan)	tertatanya kawasan budaya dan religi di Kota Magelang		750.000.000		0		0		Dana Alokasi Umum	96	
8	1.3.29.36	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 5)	terbangunnya kolam renang	1 paket		1 paket	12.000.000.000	1 paket	12.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	1.3.29.67	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	tersedianya taman dan ruang terbuka	1 paket		1 paket	1.114.610.000	1 paket	1.114.610.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	1.3.29.69	Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar	Terbangunnya tempat parkir yang representatif	1 paket		1 paket	5.197.900.000	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	1.3.29.72	Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	Terbangunnya gardu pandang	1 paket		1 paket	0	1 paket	2.109.130.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	1.3.29.76	Perencanaan/DED Pembangunan Kolam Renang Tahap 6	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	56.371.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
13	1.3.29.77	Perencanaan/DED Pembangunan Gardu Pandang Tahap 2	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	41.371.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	1.3.29.78	Perencanaan/DED Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket		0 1 paket	56.371.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
15	1.3.29.79	Perencanaan/DED Penataan Kawasan Makam Kyai Dudo	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket		0 1 paket	36.371.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1.3.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi			177.758.000		147.016.000		147.016.000				
			Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	72%									
1	1.3.31.4	Pembinaan jasa konstruksi	jumlah perusahaan konstruksi yang dibina	110	75.957.000	110	47.937.000	110	47.937.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.31.5	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	tersedianya buku analisa harga standar bangunan konstruksi	30	23.220.000	30	21.268.000	30	21.268.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.31.6	Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi	tersedianya buku profil penyedia jasa konstruksi	100	49.581.000	100	48.811.000	100	48.811.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.31.2	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	rekomendasi teknis	12	29.000.000	12	29.000.000	12	29.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.33	Program pengawasan jasa konstruksi			455.194.000		434.194.000		434.194.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%									
1	1.3.33.6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstruksi	12	434.194.000	12	434.194.000	12	434.194.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Pemberantasan Korupsi
2	1.3.33.1	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	jumlah proyek konstruksi yang sesuai standar undang-undang	4	21.000.000	4	0	4	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
	1.3.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			5.124.320.000		7.256.500.000		7.846.163.000				
1	1.3.51.10	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Tidar Selatan	terbangunnya drainase		5.124.320.000		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
2	1.3.51.17	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Cacaban	terbangunnya drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
3	1.3.51.21	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Gelangan	terbangunnya drainase		0		0		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	94	
4	1.3.51.41	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Singosari	terbangunnya drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
5	1.3.51.42	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl Sunan Ampel	terbangunnya drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.3.51.43	Pembuatan Afur dan Bak Kontrol Saluran Drainase Kota Magelang	terbangunnya afur dan bak kontrol yang dapat mengatasi genangan air di permukaan	50	0	50	0	50	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
7	1.3.51.44	Rehabilitasi / Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Tidar Salakan	terbangunnya saluran drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
8	1.3.51.65	Perencanaan DED Peningkatan Saluran Drainase Jl. Tobong	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	71.572.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	1.3.51.67	Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Merbabu	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	39.572.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
10	1.3.51.68	Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Perintis Kemerdekaan	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket		1 paket	0	1 paket	64.572.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	1.3.51.69	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Jl. Rejotumoto	Terbangunnya saluran drainase	1 paket		1 paket	0	1 paket	234.375.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	1.3.51.45	Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Beringin IV	terbangunnya shipon dan saluran drainase	360	0	360	0	360	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
13	1.3.51.46	Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl.Sriwijaya	terbangunnya shipon dan saluran drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
14	1.3.51.47	Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprpto	terbangunnya drainase		0		0		0		Dana Alokasi Umum	94	
15	1.3.51.48	Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl.Pahlawan	terbangunnya drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
16	1.3.51.49	Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Kelurahan Wates	terbangunnya drainase		0		0		0		Dana Alokasi Umum	94	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	1.3.51.50	Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kelurahan Kramat Utara	terbangunnya drainase		0		0		0		Dana Alokasi Umum	94	
18	1.3.51.0	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	terbangunnya drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
19	1.3.51.51	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl.Sriwijaya	terbangunnya drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
20	1.3.51.52	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprpto	terbangunnya drainase	1 paket	0		1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Akomodasi Musrenbang
21	1.3.51.53	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl.Pahlawan	terbangunnya drainase		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
22	1.3.51.54	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Kelurahan Wates	terbangunnya drainase	1 paket	0		210.000.000	1 paket	210.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Akomodasi Musrenbang
23	1.3.51.55	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kelurahan Kramat Utara	terbangunnya drainase	1 paket	0		1.300.000.000	1 paket	1.300.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
24	1.3.51.1	Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Bonang	Terbangunnya saluran drainase	1 paket			2.221.500.000	1 paket	2.221.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
25	1.3.51.57	Rehabilitasi saluran drainase Jalan Sultan Agung	Terbangunnya saluran drainase	1 paket			1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Akomodasi Musrenbang
26	1.3.51.58	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Teuku Umar	Terbangunnya saluran drainase	1 paket			525.000.000	1 paket	525.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Akomodasi Musrenbang
27	1.3.51.70	Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran drainase Perkotaan	dokumen rehab saluran drainase dalam kondisi baik	1 dok			0	1 dok	100.000.000	kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	104	Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
28	1.3.51.66	Perencanaan/DED Pemeliharaan Saluran Drainase Kelurahan Kramat Utara	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket			0	1 paket	79.572.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
	1.3.52	Program Perencanaan Tata Ruang			1.309.148.000		642.141.000		643.588.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	50%									
			Persentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%									
			Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%									
			Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%									
			Rasio luas kawasan kumuh	2 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	2 ha									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio luas kawasan kumuh	3,5 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh										
			Rasio luas kawasan kumuh	2 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	2,5 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	3,88 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	5 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	2 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	5 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	4 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	3 ha									
			Rasio luas kawasan kumuh	2 ha									
1	1.3.52.18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	jumlah raperda revisi RTRW yang ditetapkan	5	400.000.000	5	336.198.000	1	285.845.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.52.25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	200.734.000	12	179.185.000	12	180.985.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.52.55	Penyusunan Dokumen KLHS RTRW	tersusunnya dokumen KLHS RTRW		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.3.52.57	Penyusunan Raperwal Garis Sempadan Bangunan	Tersusunnya Raperwal Garis Sempadan Bangunan	1 Raperwal		1 Raperwal	62.872.000	1 Raperwal	112.872.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.3.52.18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	jumlah raperda RTRW, RDTR, RTBL	5	400.000.000	5	0	5	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	100	
6	1.3.52.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	200.734.000	12	0	12	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	85	
7	1.3.52.43	Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang	terbangunnya sistem informasi tata ruang	80	107.680.000	80	63.886.000	80	63.886.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.53	Program Pemanfaatan Ruang			238.000.000		194.765.000		214.765.000				
			Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	24%									
			Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	3%									
1	1.3.53.1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	rekomendasi teknis IMB	200	173.000.000	200	109.900.000	200	129.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.53.5	Survey dan pemetaan	jumlah dokumen peta	5	20.000.000	5	33.136.000	5	33.136.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.53.2	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang	tersedianya media sosialisasi bagi IMB	2000	20.000.000	2000	0	2000	0		Dana Alokasi Umum	54	
4	1.3.53.7	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang	300 ora	25.000.000	300 orang	51.729.000	300 orang	51.729.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			163.700.000		233.688.000		233.688.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	30%									
1	1.3.54.5	Pengawasan pemanfaatan ruang	tersedianya laporan pengawasan ruang	24	100.000.000	24	148.574.000	24	148.574.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.54.9	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	tersedianya kajian teknis andal teknis	12	33.700.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.54.1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	tersusunnya rekomendasi siteplan kavling	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.54.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan monev IMB	12	15.000.000	12	0	12	0		Dana Alokasi Umum	59	
5	1.3.54.11	Penyusunan Raperwal Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan	Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Penataan Ruang	200 arsip		200 arsip	40.114.000	200 arsip	40.114.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan			1.017.047.000		0		0				
			Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	92.85%									
1	1.3.23.6	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	GET RENJA P 2	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.3.23.4	Pengadaan alat-alat berat	tersedianya alat berat Self Loader	1	1.017.047.000	1	0	1 paket		Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.9	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan			2.000.000.000		0		0				
1	1.3.9.1	Kegiatan peningkatan jalan daerah perbatasan	meningkatkan akses jalan di daerah perbatasan	10	2.000.000.000	10	0	10	0		Dana Alokasi Umum	96	
2	1.3.9.2	Pembangunan/peningkatan jembatan daerah perbatasan	meningkatkan kondisi jalan dalam keadaan baik		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	
	1.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur			14.525.000		0		0				
1	1.3.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	pengadaan pakaian kerja lapangan untuk jasa tenaga keamanan dan kebersihan	10	14.525.000	10	0	10	0		Dana Alokasi Umum	59	
	1.3.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan			0		0		117.533.000				
1	1.3.22.6	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Geografis (SIG) Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data Sistem Informasi Geografis Jalan, Jembatan, Drainase dan Irigasi					2 sistem	110.344.000	DPUPR Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.22.5	Penyusunan data dan profil OPD	Tersedianya data dan profil OPD					1 dokumen	7.189.000	DPUPR Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
				TOTAL	42.329.606.300		68.422.192.000		75.043.697.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 URUSAN : Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			712.481.000		736.586.000		824.899.000				
1	1.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat	12	80.000	12	80.000	12	80.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhi ya jasa listrik, air, telepon dan internet	12	63.600.000	12	63.600.000	12	73.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.4.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Perlengkapan Hut RI	1	6.177.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
4	1.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan KIR kendaraan bermotor	12	12.200.000	12	9.400.000	12	9.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhi ya jasa pengelolaan keuangan	12	174.525.000	12	173.661.000	12	179.661.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
6	1.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12	64.308.000	12	67.296.000	12	70.894.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	1.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12	16.720.000	12	16.720.000	12	16.720.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	1.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	5.579.000	12	5.579.000	12	5.579.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	1.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan 3 jenis koran	12	3.360.000	12	3.360.000	12	3.360.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	1.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	refil tabung gas	12	1.800.000	12	1.476.000	12	1.476.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	1.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum pegawai	12	20.219.000	12	20.219.000	12	20.219.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	1.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah	12	149.410.000	12	208.492.000	12	268.812.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	1.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Terpenuhi nya jasa tenaga honorar daerah	2	156.816.000	2	129.024.000	2	137.419.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	1.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	administrasi kepegawaian (KGB, kenaikan pangkat, SKP, pensiun, cuti, PUPNS, sekolah)	12	13.687.000		13.679.000		13.679.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			459.075.000		307.368.000		343.294.000				
1	1.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharaan ya gedung kantor	12	123.559.000		123.559.000		123.559.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharaan ya kendaraan dinas/operasional	12	204.587.000		172.369.000		172.369.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharaan ya perlengkapan gedung kantor	12	3.629.000		3.630.000		3.630.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	1.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharaan ya peralatan gedung kantor	12	7.810.000		7.810.000		7.810.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	1.4.2.3	Pembangunan gedung kantor	Gedung kantor	1	0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
6	1.4.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	kendaraan operasional kantor	8	0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor	5	0	5	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	1.4.2.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur kantor	2	0	2	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	1.4.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Terpeliharanya alat berat	12	0	12	0	12	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
10	1.4.2.32	Pengadaan Alat-alat pertukangan	Alat alat survey	6	0	6	0	6	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
11	1.4.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Tambah daya jaringan listrik dinas PERKIM	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	1.4.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	pagar belakang kantor	3	119.490.000	3	0	1	35.926.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	1.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor (desktop 2, GPS, printer)	4	0	4	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			125.474.000		125.239.000		125.239.000				
1	1.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja	4	17.486.000	4	17.484.000	4	17.484.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.4.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis	1	6.630.000	1	6.622.000	1	6.622.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.4.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun	1	9.202.000	1	9.178.000	1	9.178.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja OPD	2	37.279.000	2	37.263.000	2	37.263.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	1.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan DPA	2	36.621.000	2	36.436.000	2	36.436.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	1.4.6.19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan OPD	Laporan keuangan bulanan	12	0	12	0	12	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
7	1.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKJIP	1	4.463.000	1	4.463.000	1	4.463.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	1.4.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Laporan hibah/bansos	1	13.793.000	1	13.793.000	1	13.793.000	Disperkim	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			0		0		0				
					24,440,748,000								
			Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	942 m									
			Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	64.39%									
1	1.3.15.10	Perencanaan / DED Pembangunan jalan penghubung Jl Jendral Sarwo Edhie Wibowo dengan Jalan Jend Sudirman					0		0	Kota Magelang	-		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.15	Program Pengembangan Perumahan			8.934.247.000		5.365.557.000		6.769.424.000				
			Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	96									
			Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	2									
1	1.4.15.14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Terkelolanya bangunan rusunawa	2	1.000.560.000	2	1.062.128.000	2	1.093.307.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.4.15.17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan Kawasan permukiman	12	434.061.000	12	434.061.000	12	434.061.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.4.15.33	Pendataan Perumahan Komersil	tersedianya data perumahan komersial (developer)					1 paket	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
4	1.4.15.3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Peraturan Perundang-undangan tentang rusunawa/juknis	1	0		0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
5	1.4.15.11	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya	Pendampingan teknis dan fasilitasi bagi masyarakat MBR yang menerima bantuan RTLH dari Kemen PU	200	0			Tersedianya tempat parkir, taman RTH, ruang terbuka publik dan jaringan listrik dan air di rusunawa	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.4.15.10	Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)	Parkir, pagar (potro), taman RTH (potro), ruang terbuka publik (wates), pengadaan jaringan listrik dan air	0	0	0	0	Tersedia nya tempat parkir, taman RTH, ruang terbuka publik dan jaringan listrik dan air di rusunawa	415.843.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	1.4.15.18	DED/Perencanaan Pematangan Lahan Rusunawa	Muncul lokasi rusunawa	1	82.317.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
8	1.4.15.19	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP KP)	Jalan menuju rusunawa	1	1.676.100.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
9	1.4.15.20	Operasional Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pendampingan teknis dan fasilitasi bagi masyarakat MBR yang menerima bantuan RTLH dari provinsi	12	210.000.000	12	234.732.000	6	140.232.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.4.15.21	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Terpenuhi ya sarana dan prasarana infrastruktur perumahan yang baik	17	3.270.000.000	17	1.425.000.000	14	1.425.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Penanggulang an Kemiskinan
11	1.4.15.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Data RTLH		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
12	1.4.15.36	Pembangunan Talud dan Sarpras Rusus Wates	tersedianya talud dan srpras rusus wates					1 paket	230.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulang an Kemiskinan
13	1.4.15.25	Pembangunan Jalan Menuju rusunawa	Terpenuhi ya sarana dan prasarana infrastruktur perumahan yang baik	1	1.676.100.000	1	1.624.100.000	1	1.624.100.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	1.4.15.12	Penyusunan Database Perumahan	Tersusunnya Database bidang perumahan (5 kelurahan Magelang Selatan)	1	82.317.000	1	68.575.000	5	235.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
15	1.4.15.13	BOP bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya	Terpenuhi ya perumahan layak huni	17	210.475.000	17	0	17	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	1.4.15.23	DED/Perencanaan Prototype Penyediaan Perumahan	Terpenuhiya sarana dan prasarana infrastruktur perumahan yang baik	12	210.000.000	12	0	12	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
17	1.4.15.24	Studi Kelayakan Pengembangan Rusunawa	Terpenuhiya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman yang baik	1	82.317.000	1	68.575.000	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
18	1.4.15.26	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Tersedianya Dokumen Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 20 Tahun	0	0	1	448.386.000	1	448.386.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	1.4.15.32	DED Pematangan Lahan Rusunawa/Rusus	Tersedianya perencanaan lahan rusunawa (Gelangan) dan Rusus (Kedungsari)					1 paket	100.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulang an Kemiskinan
20	1.4.15.35	Pembangunan Jalan Menuju Rusus Wates	Tersedianya jalan menuju rumah khusus (p 200m)					1 paket	235.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulang an Kemiskinan
21	1.4.15.34	Penyusunan Rencana Perwal Bansos RTLH	tersedianya rancangan peraturan walikota di bidang bansos RTLH					1 paket	22.960.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulang an Kemiskinan
22	1.4.15.37	Pembangunan Talud Rusunawa Wates	Teramanaknnya lahan rusunawa					1 paket	229.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulang an Kemiskinan
23	1.4.15.31	Penyusunan Rencana Perwal Serah Terima Fasum dan Fasos Perumahan Komersil	Tersedianya peraturan erubahan status lahan fasum dan fasos perumahan komersial					1 aket	22.960.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	1.4.15.38	Penyusunan Data Backlog Perumahan	Tersedianya data backlog Perumahan					1	68.575.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		7.346.000		2.746.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangun an dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Pengelolaan website	4	0	4	7.346.000	4	2.746.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		0		0				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%									
1	4.3.15.33	Penyusunan database bidang keciptakarya dan perumahan	Database bidang Cipta Karya	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			3.003.900.000		6.482.163.000		8.288.602.000				
					4,783,517,000								
			Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat										
1	1.4.16.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Data hasil evaluasi sanitasi	1	33.650.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.4.16.8	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	perencanaan dan pengawasan pembangunan ipal setempat	1	96.600.000		35.424.000	1	35.424.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0100
3	1.4.16.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	MCK UMUM	3	750.000.000	1	2.638.150.000	1	2.638.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0100
4	1.4.16.16	Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Pendampingan SLBM, Sanimas	2	240.000.000	2	203.939.000	1	203.939.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0100
5	1.4.16.17	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Magelang					0		0	Kota Magelang	-		
6	1.4.16.18	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Rejowinangun Selatan					0		0	Kota Magelang	-		
7	1.4.16.19	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Cacaban					0		0	Kota Magelang	-		
8	1.4.16.20	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Panjang					0		0	Kota Magelang	-		
9	1.4.16.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	IPAL Komunal	6	1.100.000.000	2	3.575.000.000	2	3.575.000.000	Kelurahan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0100
10	1.4.16.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Data hasil evaluasi	1	33.650.000	1	29.650.000	1	29.650.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	1.4.16.22	Pembangunan sistem sanitasi setempat	Tangki Septic	3	600.000.000	3	0	3	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
12	1.4.16.23	Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	Pemeliharaan apras sanitasi	17	150.000.000	17	0	17	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
13	1.4.16.46	Perencanaan/ DED Pematangan Lahan untuk IPAL Tahu di Kelurahan Tidar Selatan	Dokumen Perencanaan IPAL Tahu					1	50.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0100

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	1.4.16.45	Perencanaan/ DED Pembangunan IPAL Komunal (Banprov)	tersedianya DED perencanaan IPAL Komunal (Banprov)					1	61.850.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
15	1.4.16.42	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan Kramat Selatan	Tersedianya DED Rehab / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong RW III Kelurahan Kramat Selatan					1	0	RW III Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
16	1.4.16.28	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Selatan	Meningkatnya kesehatan masyarakat					1 unit	562.140.000	Kecamatan Magelang Selatan	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Program 100-0-100
17	1.4.16.44	Perencanaan/ DED Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	tersedianya DED perencanaan IPAL komunal (DAK)					1	61.850.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
18	1.4.16.43	Perencanaan/ DED Pembangunan IPAL setempat (Banprov)	tersedianya DED perencanaan IPAL setempat (Banprov)					1	61.850.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	1.4.16.39	Perencanaan/ DED Pembangunan IPAL setempat (DAK)	tersedianya DED perencanaan IPAL setempat (DAK)					1	61.850.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
20	1.4.16.41	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Kramat Selatan	Tersedianya DED Rehab/peningkatan Jalan dan Jembatan RW III,V Kelurahan Kramat Selatan					1	38.837.000	RW III , V Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
21	1.4.16.40	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan Wates	Tersedianya Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan Wates					1	33.337.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
22	1.4.16.34	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan Kemirirejo	Tersedianya DED Rehab/peningkatan Saluran drainase/ gorong-gorong RW VII Kelurahan Kemirirejo					1	33.337.000	RW VII Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	1.4.16.37	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan Jurangombo Selatan	Tersedianya DED Rehab/peningkatan Jalan dan Jembatan RW IV Kelurahan Jurangombo Selatan					1	36.337.000	RW IV Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
24	1.4.16.38	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan Jurangombo Selatan	Tersedianya DED Rehab/peningkatan Saluran drainase/gorong-gorong RW VIII, IX dan RW IV Kelurahan Jurangombo Selatan					2	74.674.000	RW VII, IX dan RW IV Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
25	1.4.16.36	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Magersari	Tersedianya DED Rehab/peningkatan Saluran drainase/gorong-gorong RW III Kelurahan Magersari					1	33.337.000	RW III Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Rencana
26	1.4.16.35	Pembangunan MCK Kelurahan Kramat Utara	MCK Kelurahan Kramat Utara					1	75.900.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	1.4.16.47	Penyusunan Profil IPAL	Profil IPAL Kota Magelang					1 dokumen	59.000.000	17 kelurahan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
28	1.4.16.29	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Tengah	Meningkatnya kesehatan masyarakat					1 unit	562.140.000	Kecamatan Magelang Tengah	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Program 100-0-100
	2,4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan											
	2.4.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			11.778.642.000		5.830.551.000		14.713.761.000				
			Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	30%									
1	2.4.16.11	Penilaian Harga Tanah	Adanya harga tanah	2	160.121.000	2	0	2	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
2	2.4.16.12	Sosialisasi Pengadaan Tanah	Sosialisasi warga yang lahannya terkena pembebasan	1	16.881.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
3	2.4.16.3	Pengadaan tanah	Tersedianya lokasi tapak pembangunan Rusunawa dan Sport Center	1	8.270.588.000	1	1.000.000.000	2	9.860.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.4.16.9	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Dokumen inventaris tanah	1	52.410.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2.4.16.7	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Peningkatan status tanah	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
6	2.4.16.13	Studi kelayakan pengembangan lahan rusunawa	Jumlah bidang yang tersedia untuk pembangunan rusunawa	1	0	1	0	1	0		Dana Alokasi Umum		
7	2.4.16.14	Pematangan Lahan/Tanah	Tersedianya lokasi tapak pembangunan Rusunawa dan Rusus	1	0	1	4.778.141.000	2	4.778.141.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	2.4.16.15	Pembangunan lahan rusunawa	pengembangan rusunawa baru	1	3.278.642.000	1	0	1	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum		
9	2.4.16.8	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Teersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah			1	52.410.000	1	52.410.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	2.4.16.17	Penyusunan Rencana Perwal Pertanahan	Tersedianya peraturan i bidang pengadaan tanah					1 dokumen	22.960.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan			182.092.000		134.509.000		134.509.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.4.17.8	Sosialisasi Keciptakaryaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam sosialisasi permukiman dan perumahan dan baliho	200	40.625.000	200	52.777.000	400 orang	52.777.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0100
2	1.4.17.6	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	Terwujudnya perumahan rakyat yang layak huni	1	97.401.000	1	37.666.000	1	37.666.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.4.17.12	Koordinasi dan evaluasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (P2KPKP)	Terlaksananya evaluasi P2KPKP	4	44.066.000	4	44.066.000	Terlaksananya evaluasi P2KPKP	44.066.000	17 kelurahan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0100
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			6.900.000		6.900.000		6.900.000				
			PERPUS		25,000,000								
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,4									
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	100	6.900.000	100	6.900.000	100	6.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			569.926.000		637.252.000		612.671.000				
1	1.3.30.5	Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan	jalan dan saluran air lingkungan	1	260.980.000	1	260.980.000	1	410.980.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Tolak ukur kineja	3	308.946.000	3	308.946.000	3	100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.30.23	Perencanaan/ DED IPAL Domestik siiG	DED IPAL Domestik siiG					1	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
4	1.3.30.20	Penyusunan DED jalan lingkungan Kelurahan Magelang	Rehab saluran drainase		0		0		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum		
5	1.3.30.21	Penyusunan DED/Perencanaan Infrastruktur Kelurahan	rehab jalan kelurahan		0		0		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum		
6	1.3.30.22	Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang	terwujudnya tertib administrasi			12	67.326.000	12	61.691.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1.3.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari			891.452.000		1.499.822.000		1.679.322.000				
1	1.3.35.74	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	rehab saluran	1	209.430.000	1	232.000.000	1	232.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
2	1.3.35.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran drainase dan jalan lingkungan	1	682.022.000	1	638.022.000	1	638.022.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
3	1.3.35.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan dan jalan lingkungan	2	0	2	0	2	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.3.35.71	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran drainase dan gorong-gorong	1		1	273.300.000	1	273.300.000	RW V Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
5	1.3.35.61	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Jalan dan jembatan kelurahan	1		1	146.000.000	1	146.000.000	RW VIII Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
6	1.3.35.62	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Jalan dan jembatan kelurahan	1		1	50.000.000	1	50.000.000	RW IX Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
7	1.3.35.75	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Saluran drainase dan gorong-gorong	1		1	160.500.000	1	160.500.000	RW IX Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
8	1.3.35.70	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Rehab Saluran	1		1		1	57.500.000	RW IV Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
9	1.3.35.76	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Rehab saluran	1		1		1	122.000.000	RW X Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.3.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara			1.145.213.000		1.087.363.000		914.213.000				
1	1.3.36.42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I					0		0	Kota Magelang	-		
2	1.3.36.43	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Saluran drainase dan gorong-gorong	1	75.000.000	1	74.850.000	1	74.850.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
3	1.3.36.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1	250.000.000	1	839.363.000	1	839.363.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.36.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	2	646.713.000	2	0	2	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.3.36.38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Jalan Lingkungan	0	173.500.000	0	173.150.000	0	0	RW V Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan			800.000.000		751.100.000		751.100.000				
1	1.3.37.56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan dan salurn drainase	2	800.000.000	2	751.100.000	2	751.100.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.37.56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 2,3	0	RW 2,3	0	RW 2,3	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		
	1.3.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara			1.424.550.000		1.517.250.000		1.816.350.000				
1	1.3.38.78	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII					0		0	Kota Magelang	-		
2	1.3.38.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 5,12,13	0	RW 5,12,13	0	RW 5,12,13	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		
3	1.3.38.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas Jalan dan saluran lingkungan	1	180.500.000	1	227.750.000	1	227.750.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
4	1.3.38.59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	rehab saluran lingkungan	1	421.200.000	1	420.000.000	1	420.000.000	RW VI Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
5	1.3.38.60	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	RABAT BETON DAN PAVING	1	345.150.000	1	343.950.000	1	343.950.000	RW VII KELURAHAN TIDAR UTARA	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.38.61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	REHAB JALAN PAVING	1	187.200.000	1	186.800.000	1	186.800.000	RW VIII KELURAHAN TIDAR UTARA	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.3.38.70	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Saluran drainase dan gorong-gorong	1	100.000.000	1	99.850.000	1	99.850.000	RW IV Kelurahan tidar utara	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
8	1.3.38.76	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Saluran Drainase dan Gorong-gorong	1	190.500.000	1	190.300.000	1	190.300.000	RW.X	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
9	1.3.38.68	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Saluran drainase / gorong-gorong			1	48.600.000	2	137.350.000	RW II	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
10	1.3.38.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	1		1		1	57.200.000	RW II Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
11	1.3.38.64	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Rehabilitasi jalan lingkungan	1		1		1	77.250.000	RW XI Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
12	1.3.38.75	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong RW IX					1 paket	75.900.000	RT 5 RW IX Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan			668.772.000		624.472.000		1.137.062.000				
1	1.3.39.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	2	668.772.000	2	624.472.000	2	624.472.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.39.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 1,2	0	RW 1,2	0	RW 1,2	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		
3	1.3.39.62	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Rehabilitas Saluran Lingkungan	1		1		1	148.600.000	RW I Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.3.39.63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Rehabilitas Saluran lingkungan				0	1	0	RW II Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
5	1.3.39.68	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehabilitas Saluran Lingkungan	1		1		1	0	RW VII Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
6	1.3.39.53	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Rehabilitas Jalan Lingkungan	1		1		1	35.900.000	RW IV Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.39.52	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Rehabilitas Jalan Lingkungan	1		1		1	232.090.000	RW III Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
8	1.3.39.64	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Rehabilitas Saluran Lingkungan	1		1		1	96.000.000	RW III Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.3.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates			970.700.000		1.376.600.000		1.893.655.000				
1	1.3.40.17	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V					0		0	Kota Magelang	-		
2	1.3.40.19	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Saluran drainase dan gorong-gorong	1	165.500.000	1	165.100.000	1	165.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
3	1.3.40.23	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI					0		0	Kota Magelang	-		
4	1.3.40.63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Rehabilitas saluran lingkungan				0	1	35.125.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
5	1.3.40.73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII					0		0	Kota Magelang	-		
6	1.3.40.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	1	242.000.000	1	310.650.000	1	310.650.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.3.40.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 1,5,6	0	RW 1,5,6	0	RW 1,5,6	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		
8	1.3.40.53	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	REHAB JALAN LINGKUNGAN	1	110.000.000	1	109.250.000	2	269.705.000	RW IV Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
9	1.3.40.56	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	REHAB JALAN LINGKUNGAN	1	187.200.000	1	186.850.000	1	186.850.000	RW VII Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
10	1.3.40.73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	rehab saluran lingkungan	1	164.000.000	1	163.600.000	1	163.600.000	RW XII Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
11	1.3.40.7	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan	1	102.000.000	1	101.850.000	1	101.850.000	RW VII Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
12	1.3.40.67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Rehabilitas saluran lingkungan			1	99.850.000	1	99.850.000	RW VI Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
13	1.3.40.66	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Rehabilitas saluran lingkungan			1	89.850.000	1	89.850.000	RW V Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
14	1.3.40.71	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Rehabilitas saluran lingkungan			1	149.600.000	1	149.600.000	RW X Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
15	1.3.40.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Rehabilitas Jalan dan jembatan kelurahan	1		1		1	124.400.000	RW VI Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
16	1.3.40.69	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Rehabilitas saluran lingkungan	1		1		1	41.500.000	RW VIII	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
17	1.3.40.65	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Rehabilitas saluran lingkungan	1		1		1	78.300.000	RW IV Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
18	1.3.40.51	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Jalan dan Jembatan Kelurahan	1		1		1	77.275.000	RW II Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.3.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari			637.300.000		601.150.000		801.922.000				
1	1.3.41.37	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I					0		0	Kota Magelang	-		
2	1.3.41.39	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Rehabilitas saluran lingkungan				0	1	35.124.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
3	1.3.41.44	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1	234.000.000	1	432.250.000	1	432.250.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.41.44	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 1,5,6	234.000.000	RW 1,5,6	0	RW 1,5,6	0	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		
5	1.3.41.40	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Talud	1	62.200.000	1	168.900.000	2	218.300.000	RW IV kelurahan potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
6	1.3.41.11	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Saluran drainase dan gorong-gorong	1	50.600.000		0	1	0	RW IV kelurahan potrobangsari	Dana Alokasi Umum		
7	1.3.41.11	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Talud	1	56.500.000		0	1	0		Dana Alokasi Umum		
8	1.3.41.33	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Jalan dan jembatan kelurahan	1		1		1	46.000.000	RW IV Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
9	1.3.41.32	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Jalan dan Jembatan Kelurahan	1		1		1	70.248.000	RW III Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari			933.305.000		1.009.790.000		1.221.590.000				
1	1.3.42.48	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII					0		0	Kota Magelang	-		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.3.42.62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitasi jalan lingkungan	RW 2	0	RW 2	0	RW 2	0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		
3	1.3.42.62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitasi saluran lingkungan	1	200.000.000	1	199.600.000	1	199.600.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.42.42	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	REHAB JALAN LINGKUNGAN	1	116.265.000	1	115.850.000	1	115.850.000	RW I Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.42.11	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Saluran Drainase dan Gorong-gorong	1	160.000.000	1	159.600.000	1	159.600.000	RT. 5,6 RW. I Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
6	1.3.42.15	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran Drainase dan Gorong-gorong	1	120.400.000	1	119.600.000	1	119.600.000	RT.1,2 RW. V Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
7	1.3.42.19	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Saluran Drainase dan Gorong-gorong	1	280.140.000	1	278.940.000	1	278.940.000	RT. 4,5 RW. IX Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
8	1.3.42.61	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Saluran drainase dan gorong-gorong	1	56.500.000	1	56.350.000	1	56.350.000	RW. X	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
9	1.3.42.53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Rehabilitasi saluran lingkungan			1	79.850.000	2	186.650.000	RW II Kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
10	1.3.42.58	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehabilitasi saluran lingkungan	1		1		1	105.000.000	RW VII Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.3.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara			457.000.000		456.050.000		536.050.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.3.43.6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI					0		0	Kota Magelang	-		
2	1.3.43.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 8	0	RW 8	0	RW 8	0	Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
3	1.3.43.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran dan jalan lingkungan	1	223.000.000	1	222.450.000	1	222.450.000	KELURAHAN KRAMAT UTARA	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.43.47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	rehab saluran lingkungan	1	234.000.000	1	233.600.000	1	233.600.000	RW 7 Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
5	1.3.43.48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehabilitas saluran lingkungan	1		1		1	80.000.000	RW VII Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.3.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan			1.057.315.000		620.215.000		716.715.000				
1	1.3.44.68	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 2,3,4,5	400.000.000	RW 2,3,4,5	0	RW 2,3,4,5	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		
2	1.3.44.68	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	1	536.915.000	1	500.215.000	1	500.215.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.44.13	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Saluran Drainase dan Gorong-gorong	1	120.400.000	1	120.000.000	1	120.000.000	RT. 2 RW.III	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
4	1.3.44.62	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	saluran drainase dan gorong-gorong	1		1		1	96.500.000	RW VI kelurahan kramat selatan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.3.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo			580.577.400		479.850.000		621.200.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.3.45.56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1	233.321.400	1	479.850.000	1	479.850.000	RW I,II,III Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.45.56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	530	347.256.000	530	0	530	0	RW I,II,III Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		
3	1.3.45.45	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	jalan lingkungan	1		1		1	88.650.000	RW VIII Kelurahan kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.45.51	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	saluran dan gorong-gorong	1		1		1	52.700.000	RW V Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.3.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban			670.083.600		894.533.000		1.167.278.000				
1	1.3.46.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 6	0	RW 6	0	RW 6	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		
2	1.3.46.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas Saluran	1	203.760.000	1	203.360.000	1	203.360.000	RW III, V, VI, IX, X, XI Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.46.58	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Rehab jalan	1	248.973.600	1	247.773.000	1	247.773.000	RW IX Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.46.10	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Jalan lingkungan	1	74.350.000	1	74.200.000	1	74.200.000	RW X Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.46.22	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Saluran drainase dan gorong-gorong	1	143.000.000	1	142.600.000	1	142.600.000	RW X Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
6	1.3.46.63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	saluran drainase dan gorong-gorong			1	226.600.000	1	226.600.000	RW II Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.3.46.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	jalan lingkungan	2		2		1	230.600.000	RW VI Kelurahan VI	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
8	1.3.46.67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	saluran drainase dan gorong-gorong	1		1		1	42.145.000	RW VI Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.3.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara			341.600.000		572.750.000		1.121.600.000				
1	1.3.47.87	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II					0		0	Kota Magelang	-		
2	1.3.47.128	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1	0	1	0	1	93.600.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.47.128	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 13,21	0	RW 13,21	0	RW 13,21	0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum		
4	1.3.47.33	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Pembangunan drainase	1	45.000.000	1	44.700.000	1	44.700.000	RW XII Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
5	1.3.47.98	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII	Rehab jalan	1	136.600.000	1	136.200.000	1	136.200.000	RW XIII	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.47.100	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XV	Rehab jalan dan leneng	1	98.000.000	1	97.700.000	1	97.700.000	RW XV	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.47.124	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII	Saluran drainase dan gorong-gorong	1	62.000.000	1	61.850.000	1	61.850.000	RW XVIII Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
8	1.3.47.127	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XXI	Rehabilitas saluran lingkungan			1	232.300.000	1	232.300.000	RW XXI Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.3.47.103	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XVIII	Rehabilitas jalan lingkungan	2		2		1	224.150.000	RW XVIII kelurahan rejoyinangun utara	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
10	1.3.47.104	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX	Rehabilitas jalan lingkungan	1		1		1	231.100.000	RW XIX kelurahan rejoyinangun utara	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang			1.022.500.000		1.017.050.000		1.282.650.000				
1	1.3.48.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II					0		0	Kota Magelang	-		
2	1.3.48.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 12	0	RW 12	0		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		
3	1.3.48.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 10,12	0	RW 10,12	0		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		
4	1.3.48.71	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Rehab saluran drainase	1	200.000.000	1	196.200.000	1	196.200.000	RW V Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.48.72	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Rehab saluran gorong-gorong	1	225.000.000	1	224.600.000	1	224.600.000	RW VI Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
6	1.3.48.73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehab saluran gorong-gorong	1	197.000.000	1	196.800.000	1	196.800.000	RW VII Kelurahan magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
7	1.3.48.61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Rehab jalan	1	124.000.000	1	123.600.000	1	123.600.000	RW VIII Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
8	1.3.48.54	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	rehab jalan	1	115.000.000	1	114.600.000	1	114.600.000	RW I Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
9	1.3.48.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Jalan Lingkungan	1	75.000.000	1	74.850.000	2	134.450.000	RW II Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.3.48.66	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII	talud	1	86.500.000	1	86.400.000	1	86.400.000	RW XIII Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
11	1.3.48.7	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	jalan dan jembatan	1		1		1	64.750.000	RW VII kelurahan magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
12	1.3.48.65	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	jalan dan jembatan	1		1		1	75.550.000	RW XII kelurahan magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
13	1.3.48.67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Saluran drainase/ gorong-gorong RW I					1	65.700.000	RW I Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang			537.943.000		511.500.000		783.400.000				
1	1.3.49.42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I					0		0	Kota Magelang	-		
2	1.3.49.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan dan saluran drainase	2	250.543.000	2	125.050.000	2	361.050.000	Kelurahan Panjang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.49.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 3,7	0	RW 3,7	0	RW 3,7	0	Kelurahan Panjang	Dana Alokasi Umum		
4	1.3.49.42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Rehab saluran drainase	1	119.400.000	1	119.000.000	1	119.000.000	RW I Kelurahan Panjang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
5	1.3.49.37	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	leneng	1	168.000.000	1	167.600.000	1	167.600.000	RW IV	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.49.48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	rehab saluran drainase				99.850.000	1	99.850.000	RW VII kelurahan panjang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
7	1.3.49.41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	jalan dan jembatan	1		1		1	35.900.000	RW VIII kelurahan panjang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.3.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan			706.920.000		704.370.000		760.520.000				
1	1.3.50.53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II					0		0	Kota Magelang	-		
2	1.3.50.62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 3,5	0	RW 3,5	0	RW 3,5	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		
3	1.3.50.62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan		0		0		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		
4	1.3.50.57	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Rehab saluran drainase	1	245.700.000	1	244.500.000	1	244.500.000	RW VI Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
5	1.3.50.58	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehab saluran drainase	1	112.320.000	1	111.920.000	1	111.920.000	RW VII Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
6	1.3.50.59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Rehab saluran drainase	1	128.700.000	1	128.300.000	2	184.450.000	RW VIII	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.50.18	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran drainase dan gorong-gorong	1	145.200.000	1	144.800.000	1	144.800.000	RW VIII Kelurahan gelangan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
8	1.3.50.17	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Saluran drainase dan gorong-gorong	1	75.000.000	1	74.850.000	1	74.850.000	RW VII Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			6.900.000		0		0				
			PERPUS		25,000,000								
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,4									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	100	6.900.000	100	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		0		0				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	90%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertamanan dan ketertiban umum (K3)	94.50%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11.27%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9									
1	1.5.15.5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah petugas jaga keamanan	10	0	10	0	10	0	Disperkim	Dana Alokasi Umum		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			7.544.000		0		0				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan keperca yaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca yaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Jumlah website yang terupdate	1	7.544.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			0		0		0				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Luas taman kantor	450	0	450	0	450	0	Disperkim	Dana Alokasi Umum		
	2,4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan											
	2.4.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			0		0		0				
			Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	30%									
1	2.4.18.1	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Sistem Informasi Pertanahan		0		0		0	Disperkim	Dana Alokasi Umum		
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.3	Program peningkatan disiplin aparatur			0		0		0				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatkan Disiplin Aparatur										
1	1.4.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian aparaturnya Pemadam kebakaran dan pakaian tahan panas	22	0	22	0	22	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
	2,4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan											
	2.4.15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah			0		0		0				
1	2.4.15.1	Penyusunan sistem pendaftaran tanah	Sistem Pendaftaran Tanah		0		0		0	Disperkim	Dana Alokasi Umum		
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			0		0		0				
1	4.3.21.54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Renstra		0		0		0	Disperkim	Dana Alokasi Umum		
2	4.3.21.55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Renja	2	0	2	0	2	0	Disperkim	Dana Alokasi Umum		
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			0		0		0				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.4.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran	200	0	200	0	200	0		Dana Alokasi Umum		
	2,4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan											
	2.4.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			0		0		0				
			Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	30%									
1	2.4.18.1	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Tersedianya sistem informasi pertanahan		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			127.006.000		1.761.200.000		1.761.200.000				
			Persentase penduduk berakses air minum	92									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	88									
			Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	8									
1	1.3.27.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	SPAM	0	0	100	1.652.000.000	100	1.652.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.3.27.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemantauan kualitas air SPAM	1	0	1	109.200.000	1	109.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.3.27.14	Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan	Fasilitas sanitasi		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		
4	1.3.27.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)	Kualitas air spam	1	127.006.000	1	0	1	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum		
	1.3.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan			76.233.000		76.083.000		300.583.000				
1	1.3.34.92	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitasi jalan lingkungan	3	0	3	0	3	0	Kelurahan Rejo Selatan	Dana Alokasi Umum		
2	1.3.34.92	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitasi saluran lingkungan	3	76.233.000	1	76.083.000	3	76.083.000	Kelurahan Rejo Selatan	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.34.68	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	rehabilitas jalan lingkungan					1	98.200.000	RW VII kelurahan rejowinangun selatan	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.3.34.81	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran Drainase dan Gorong-gorong	1		1		1	56.100.000	RW V Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
5	1.3.34.66	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	rehabilitas jalan lingkungan					1	70.200.000	RW V Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.34.73	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	rehabilitas jalan lingkungan					1	0	RW XII kelurahan rejoyinangun selatan RW XII	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan			0		70.000.000		70.000.000				
1	1.3.20.4	Identifikasi Jalan di Kota Magelang	Dokumen inventarisasi jalan lingkungan	0	0	1	70.000.000	1	70.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	38.835.651.000		35.264.619.000		51.158.455.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja
 URUSAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			633.648.000		595.908.000		718.557.000				
1	1.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rek listrik, air, telp dan internet	12	59.300.000		59.262.000		66.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	1.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/ops	35	23.420.000		23.420.000		26.615.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	1.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunya laporan laporan keuangan dan SPJ	12	72.000.000		72.000.000		76.050.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	1.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta petugas kebersihan	25 Jenis	44.431.000		46.275.000		48.674.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	1.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	39	17.120.000		17.120.000		24.018.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	1.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat listrik kantor	20	5.176.000		5.176.000		6.032.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
7	1.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan media Cetak	2	2.376.000		2.376.000		2.376.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	1.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	24	3.260.000		3.260.000		3.260.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan pembuatan minuman dan sncak rapat	12 bulan	22.999.000	12 bulan	28.625.000	12 bulan	37.324.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	1.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	50	192.434.000	50	146.522.000	50	221.772.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
11	1.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksanannya pembayaran upah tenaga kontrak dan penjaga kantor	6	181.132.000	6	182.129.000	6	183.329.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
12	1.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	200000	5.000.000	200000	4.743.000	200000	4.743.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
13	1.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya penataan arsip pegawai	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	17.964.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	1.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			4.657.483.000		365.959.000		1.150.796.000				
					7,016,410,000								
1	1.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	3 unit	62.326.000	3 unit	61.276.000	2 unit	77.593.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
2	1.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30	296.358.000	30	296.358.000	30	383.195.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
3	1.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	23 unit	6.475.000	23 unit	2.925.000	23 unit	6.120.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23 unit	13.725.000	23 unit	5.400.000	23 unit	7.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.5.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung ruang Ka. Bid dan gedung peralatan	2	4.278.599.000	2	0	2	210.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM
6	1.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor (brankas, locker, valbed)	23 unit	0	23 unit	0	23 unit	122.898.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
7	1.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya PC, LCD, Notebook, printer	14	0	15	0	1 Laptop ,4 P	90.458.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
8	1.5.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersediannya mebeleur kantor	23 unit	0	23 unit	0	23 unit	70.037.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
9	1.5.2.33	Pengadaan Papan Informasi	Terpasangnya papan informasi	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	
10	1.5.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan operasional	9 Unit	0	5 Unit	0	2 unit moto	61.750.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
11	1.5.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi	Tersedianya alat komunikasi dan kelengkapannya	100 persen		100 persen	0	6 Horn Ampl	109.315.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
12	1.5.2.40	Revisi Perencanaan Bangunan Gedung	Penyesuaian rencana pembangunan gedung kantor					100 persen	12.130.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM
1.5.3		Program peningkatan disiplin aparatur			303.536.000		184.136.000		195.636.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersediannya PDL Linmas Inti dan Banpol	56	67.686.000	56	0	56	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
2	1.5.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya PDH Satpol dan Damkar	113	133.050.000	113	81.336.000	113	81.336.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
3	1.5.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersediannya pakaian Olahraga untuk kegiatan kesamaptaan	65 set	102.800.000	65 set	102.800.000	65 set	114.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
	1.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			25.498.000		24.198.000		24.198.000				
1	1.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya RFK, Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja	12	6.270.000	12	6.270.000	12	6.270.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	1.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis semesteran	4	2.800.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	1.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	3	2.550.000	3	2.550.000	3	2.550.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	1.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja dan Renja Perubahan	9	4.500.000	9	4.500.000	9	4.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	1.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPKA	12	7.250.000	12	7.250.000	12	7.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	1.5.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Tersusunnya Renstra OPD		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
7	1.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP, LKJP dan LPPD	6	2.128.000	6	2.128.000	6	2.128.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			3.571.825.000		3.556.136.000		4.283.690.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	90%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	94.50%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11.27%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9									
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya PAM pengamanan objek vital, tersedianya tenaga Linmas inti, tersedianya tenaga Bantuan Pol PP (Banpol)	54	1.721.006.000		1.808.512.000		2.013.006.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
						54		54					
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta Linmas yang mengikuti pelatihan	50	28.265.000		23.774.000		23.774.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
						50		50					
3	1.5.15.4	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksannnya kegiatan penertiban PKL	4	63.800.000		60.900.000		60.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
						4		4					
4	1.5.15.5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksannnya PAM Satpol PP, Linmas Jambore tramtib, Deputasi upacara dan gelar pasukan	1	1.362.313.000		1.311.962.000		1.408.302.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
						1		1					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.5.15.11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya giat peningkatan kapasitas anggota, Peningkatan kemampuan / kapasitas anggota	100	134.411.000	100	116.056.000	100	164.509.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
6	1.5.15.13	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Illegal	Tersusunnya laporan penanganan informasi cukai palsu	100 per	112.030.000	100 persen	110.480.000	100 persen	110.480.000	Kota Magelang	DBHCHT	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
7	1.5.15.14	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	Terkelolanya sistem informasi geospasial, peningkatan modul SIG	1	0	1	12.202.000	1	71.527.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
8	1.5.15.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum	Revisi Perda PPNS dan raperda kewenangan Satpol PP	2	150.000.000	2	63.610.000	2	63.610.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
9	1.5.15.12	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	Terwujudnya penegakan perda	2 giat		2 giat	48.640.000	2 giat	71.570.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
10	1.5.15.16	Peningkatan kapasitas tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya peralatan / perlengkapan olah raga, Terlaksananya pelatihan kepemimpinan , kerjasama dan kemandirian, Peningkatan kemampuan fisik dan stamina personil	100 persen		100 persen		100 persen	296.012.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0		0				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraa n pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website					0		0	Kota Magelang	-	0	
2	2.10.15.28	Pengelolaan website	Terlaksannya update website	4	0	4	0	4	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
3	2.10.15.14	Pembentukan tim pengumpul data website	Terlaksannya update website	4	0	4	0	4	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
4	2.10.15.16	Pembangunan data center	Tercapainya penambahan fitur penuyusnan laporan tiap tiap kewangan	2	0	2	0	2	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
1,4		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			940.209.000		1.045.467.000		1.827.203.000				
			Cakupan wilayah pelayanan penanggulanga n kebakaran	100%									
			Persentase tingkat waktu tanggap response	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.4.19.9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksannya isi ulang APAR	150	55.350.000	150	55.350.000	150	56.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.4.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Penyesuaian upah sesuai UMR	12	822.139.000	12	932.127.000	12	914.590.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.4.19.5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Peningkatan kemampuan personil damkar	20	20.043.000	20	20.363.000	20	163.715.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
4	1.4.19.7	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peserta penyuluhan	50	9.177.000	50	7.452.000	50	7.452.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	Program prioritas RPJM
5	1.4.19.8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan pelayanan penanggulangan n kebakaran	100 per	0	100 perser	0	100 persen	483.028.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
6	1.4.19.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan monev sarana dan prasarana penanggulan kebakaran	12	13.500.000	12	12.900.000	12	12.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	Program prioritas RPJM
7	1.4.19.14	dst???????	Jumlah peserta simulasi (simulasi penggulangan kebakran)	50	20.000.000	50	0	50	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	
8	1.4.19.2	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Simulasi penanggulanga n kebakaran di pasar, Pelatihan penggunaan APAR	100		100	17.275.000	100	189.118.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			95.620.000		91.320.000		190.847.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	18.75%									
			Persentase ormas yang difasilitasi	7.87%									
1	1.5.19.1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terlaksananya rekrutmen anggota linmas non inti	100 per	95.620.000	100 persen	91.320.000	100 persen	190.847.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			405.534.000		214.035.000		240.475.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	90%									
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	-									
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	-									
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.20.2	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Terlaksananya penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi		117.790.000		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
2	1.5.20.9	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	Terlaksananya operasi penegakan perda/perwal (5 aturan)	36	109.306.000	36	108.976.000	36	119.316.000	Kota Magelang	DBH Rokok	64	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
3	1.5.20.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya monev penegakan perda (IMB,Tibum,Hiburan)	1	14.448.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
4	1.5.20.10	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Terlaksananya kegiatan operasi pemberantasan Penyakit masyarakat	12 giat	163.990.000	12 giat	105.059.000	12 giat	121.159.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			148.626.000		195.151.000		365.773.000				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	37.50%									
			Cakupan tim relawan siaga bencana	2,94									
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	25%									
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	25%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan penanganan korban bencana	100%									
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	5,88%									
			#NAME?	1									
			#NAME?	0									
			#NAME?	0									
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada									
1	1.5.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah leaflet informasi bencana	2500	10.021.000	2500	9.841.000	2500	9.841.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
2	1.5.22.5	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	Jumlah peserta pelatihan tenaga pengendali bencana	300	58.140.000	300	112.470.000	300	112.470.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
3	1.5.22.6	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah peserta simulasi penanggulangan bencana	300	30.465.000	300	19.790.000	300	19.790.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
4	1.5.22.10	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana	Tersedianya sarana mobilitas dan peralatan penanggulangan bencana	1	50.000.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
5	1.5.22.11	Kontijensi Mitigasi bencana	Terbentuknya elurahan tangguh bencana	1	0	1	0	1	27.052.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
6	1.5.22.7	Penyusunan Peta Rawan Bencana	terwujudnya peta daerah rawan bencana		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.5.22.3	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Tersedianya peralatan penanggulangan bencana	100		100	4.200.000	100	30.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
8	1.5.22.9	Koordinansi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Terbentuknya kelurahan tangguh bencana	1 Kelurahan		1 Kelurahan	48.850.000	1 Kelurahan	166.020.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			60.973.000		57.123.000		79.753.000				
			SATPOL PP		2,622,130,000								
			KESBANGPOL		256,987,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	-									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.13%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,78									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Tersedianya pakaian tactical PPNS	10 Stel	60.973.000	10 Stel	57.123.000	70 Stel	79.753.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
	1.5.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum			462.162.000		331.000.000		257.290.000				
1	1.5.23.4	Penyediaan pakaian Linmas untuk Pam Pemilihan Umum	Jumlah PDL Linmas Pam Pemilu	120	122.217.000	120	122.197.000	120	122.197.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
2	1.5.23.5	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	Jumlah peserta Gelar pasukan PAM Pemilu	627	25.095.000	627	26.457.000	627	26.457.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	GET RENJA P	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.5.23.6	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	Jumlah anggota Linmas Pam pemilu	189 ora	279.850.000	189 orang	149.686.000	189 orang	75.976.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
4	1.5.23.3	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum	Jumlah Linmas peserta pelatihan PAM Pemilu	300 ora	35.000.000	300 orang	32.660.000	300 orang	32.660.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	11.305.114.000		6.660.433.000		9.334.218.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 URUSAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			477.727.000		449.524.000		455.998.000				
1	1.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko	250	800.000	250	800.000	250	800.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	1.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	4 jenis/ 12	51.000.000	4 jenis/ 12	51.000.000	4 jenis/ 12	50.600.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	1.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	14	5.850.000	14	5.850.000	14	5.850.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	1.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan dan barang daerah serta laporan keuangan dan barang OPD	10 orang / bulan serta 12	72.163.000	10 orang / bulan serta 12	72.163.000	10 orang / bulan serta 12	72.163.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	1.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan serta jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	2 orang / bulan serta 37	44.262.000	2 orang / bulan serta 37	46.254.000	2 orang / bulan serta 37	48.653.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	1.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	46	20.000.000	46	20.000.000	46	20.000.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	9 jenis dan 45190	20.000.000	9 jenis dan 45190	20.000.000	9 jenis dan 45190	20.000.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
8	1.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat/komponen listrik	13	5.240.000	13	5.240.000	13	5.240.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
9	1.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3	3.660.000	3	4.980.000	3	4.980.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
10	1.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas 12 kg	6	900.000	6	900.000	6	900.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
11	1.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan-minum rapat dan tamu serta minum harian pegawai	46 kegiatan dan 12	46.707.000	46 kegiatan dan 12	46.707.000	46 kegiatan dan 12	38.463.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
12	1.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	45	172.273.000	45	138.766.000	45	149.086.000	Diluar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
13	1.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Jasa penjaga malam kantor dan pengemudi	2 orang / 12 bulan	34.872.000	2 orang / 12 bulan	36.864.000	2 orang / 12 bulan	39.263.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	1.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			154.519.000		154.519.000		227.405.000				
					7,016,410,000								
1	1.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung dan pemeliharaan gedung kantor	1481 m2 dan 1	9.810.000	1481 m2 dan 1	9.810.000	1481 m2 dan 1	9.810.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	1.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14	126.074.000	14	126.074.000	14	134.438.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	1.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5	6.400.000	5	6.400.000	5	6.400.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	1.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	6	10.535.000	6	10.535.000	6	10.535.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	1 set	1.700.000	1 set	1.700.000	1 set	1.700.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	1.5.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	01 unit	0	01 unit	0	0 unit	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	1.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 jenis	0	2 jenis	0	4 jenis	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
8	1.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	4 jenis	0	4 jenis	0	4 jenis	34.522.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
9	1.5.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pekerjaan rehab gedung kantor	1	0	1	0	1	0	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	49	
10	1.5.2.10	Pengadaan mebeleur	kursi putar	6	0	6	0	6	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
	1.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			42.088.000		42.088.000		42.088.000				
1	1.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	LKPJ-LPPD, LKJ, Lap Realisasi fisik dan keuangan OPD	34	11.702.000	34	11.702.000	34	11.702.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
2	1.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	3	4.337.000	3	4.337.000	3	4.337.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	1.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2	6.300.000	2	6.300.000	2	6.300.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
4	1.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA, DPPA	30	15.347.000	30	15.347.000	30	15.347.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
5	1.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKj IP OPD	1	4.402.000	1	4.402.000	1	4.402.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
6	1.5.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Renstra OPD		0		0		0	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	70	
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			964.159.000		963.155.000		963.155.000				
			SATPOL PP		2,622,130,000								
			KESBANGPOL		256,987,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai-nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	-									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.13%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,78									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Laporan kegiatan Komunitas Intelijen Daerah	12	144.000.000	12	148.514.000	12	148.514.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
2	1.5.16.4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Peserta penyuluhan sistem keamanan lingkungan	200	21.550.000	200	21.550.000	200	21.550.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
3	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rencana Aksi Daerah penanganan konflik sosial	30	131.964.000	30	129.251.000	30	129.251.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
4	1.5.16.7	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	Buku laporan eks G 30 S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survey/riset	6	9.099.000	6	9.099.000	6	9.099.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.5.16.8	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Rakor pengawasan orang asing, sosialisasi pengawasan orang asing dan laporan orang asing	12 kali, 200 orang dan 24	98.051.000	12 kali, 200 orang dan 24	97.541.000	12 kali, 200 orang dan 24	97.541.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
6	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan keamanan wilayah	365	119.762.000	365	119.762.000	365	119.762.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Program prioritas RPJM
7	1.5.16.10	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jumlah operasi P4GN	12	43.540.000	12	43.540.000	12	43.540.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
8	1.5.16.11	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Peserta penyuluhan P4GN dan test urine	1700 orang dan 100	239.837.000	1700 orang dan 100	239.492.000	1700 orang dan 100	239.492.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
9	1.5.16.12	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah peserta penyuluhan penanggulanga n narkoba, PMS dan HIV/AIDS	300	34.203.000	300	34.203.000	300	34.203.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
10	1.5.16.13	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta test urine untuk deteksi narkoba	500	67.340.000	500	67.340.000	500	67.340.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
11	1.5.16.14	Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	Peserta sosialisasi tentang kampung anti narkoba dan operasi P4GN	100 orang dan 4	54.813.000	100 orang dan 4	52.863.000	100 orang dan 4	52.863.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			10.375.000		10.375.000		10.375.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan penyelamatan arsip OPD	2000 arsip dan 10 arsip inaktif	10.375.000	2000 arsip dan 10 arsip inaktif	10.375.000	2000 arsip dan 10 arsip inaktif	10.375.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			211.190.000		208.391.000		178.333.000				
			DISNAKERTRANS		50,000,000								
			KESBANGPOL		113,200,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%									
			Database ormas yang akurat	69.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peserta dialog peningkatan kerukunan antar umat beragama	180	26.490.000		26.293.000		26.293.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
2	1.5.17.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Peserta sosialisasi	200	28.109.000	200	27.912.000	200	27.912.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta dialog tentang wasbang	180	30.151.000	180	29.954.000	180	29.954.000	SMA/SMK Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
4	1.5.17.5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif pengembangan nilai-nilai Pancasila dan peringatan hari lahir Pancasila	100 dan 1 giat	40.525.000	100 dan 1 giat	40.252.000	100 dan 1 giat	40.252.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
5	1.5.17.8	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	Verifikasi Ormas dan Data profil ormas	12 bulan dan 30	66.582.000	12 bulan dan 30	64.844.000	12 bulan dan 30	34.786.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
6	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya peringatan hari bela negara	1 giat	19.333.000	1 giat	19.136.000	1 giat	19.136.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM
	1.5.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			136.748.000		135.187.000		135.187.000				
			Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	8									
			Terpublikasikannya dialog antar agama	5									
			Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	1									
			Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
1	1.5.18.1	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta sosialisasi kerukunan kehidupan beragama di masyarakat	220	27.997.000	220	27.800.000	220	27.800.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
2	1.5.18.2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta diskusi wawasan kebangsaan	150	28.751.000	150	28.615.000	150	28.615.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
3	1.5.18.7	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	Rakor FKUB	4	31.000.000	4	30.454.000	4	30.454.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
4	1.5.18.8	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	Rakor FPBI	4	34.000.000	4	33.454.000	4	33.454.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
5	1.5.18.10	Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme	Jumlah dialog dan peserta	1 kali dan 120	15.000.000	1 kali dan 120	14.864.000	1 kali dan 120	14.864.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM
	1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			109.997.000		91.084.000		91.084.000				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	18.75%									
			Persentase ormas yang difasilitasi	7.87%									
1	1.5.19.2	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Pengiriman anggota organisasi kemasyarakatan	50	36.957.000	50	31.649.000	50	31.649.000	Kab/Kota se-Jateng	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM
2	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah rakor dan laporan FKDM Kota Magelang	4 kali dan 12	73.040.000	4 kali dan 12	59.435.000	4 kali dan 12	59.435.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM
	1.5.21	Program pendidikan politik masyarakat			172.449.000		166.320.000		166.320.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1									
			Tingkat partisipasi politik	NA									
1	1.5.21.1	Penyuluhan kepada masyarakat	Peserta dialog interaktif masyarakat dengan forpimda	180	32.164.000	180	31.967.000	180	31.967.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
2	1.5.21.3	koordinasi forum-forum diskusi politik	Peserta Forum Diskusi Politik	36	48.953.000	36	44.456.000	36	44.456.000	Hotel Safira	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
3	1.5.21.6	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Berita acara kelengkapan persyaratan bantuan keuangan parpol	9	24.000.000	9	23.803.000	9	23.803.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
4	1.5.21.4	Penyusunan data base partai politik	Data Profil Partai Politik	60	19.160.000	60	18.766.000	60	18.766.000	Badan Kesbang Pol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
5	1.5.21.7	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	Peserta sosialisasi pemilu dan pam posko desk pemilu	200 orang dan 2	48.172.000	200 orang dan 2	47.328.000	200 orang dan 2	47.328.000	Badan Kesbang Pol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	49	Program prioritas RPJM
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			14.200.000		14.200.000		14.200.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.28	Pengelolaan website	data informasi opd	48	14.200.000	48	14.200.000	48	14.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	76	ExBAU
				TOTAL	2.293.452.000		2.234.843.000		2.284.145.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Sosial
 URUSAN : Sosial

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			411.138.000		394.168.000		457.104.000				
1	1.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah peranko dan pengiriman surat	200	2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	1.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon kantor	12	35.100.000		47.400.000		47.400.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	1.6.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	10	4.600.000		4.600.000		6.500.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	1.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	10	78.633.000		69.578.000		69.578.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	1.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12	30.000.000		28.097.000		29.309.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	1.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12	20.000.000		19.000.000		19.000.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	1.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	1.6.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik	12	4.433.000		4.433.000		4.433.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.6.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya spanduk dan alat dapur	4	1.366.000	4	7.366.000	4	7.366.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	1.6.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	1.6.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12	1.680.000	12	1.680.000	12	1.920.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	1.6.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu dinas	12	20.000.000	12	20.000.000	12	24.878.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	1.6.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas	55 kegiatan	110.000.000	55 kegiatan	99.000.000	55 kegiatan	150.070.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	1.6.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak	36 ob	53.208.000	36 ob	55.296.000	36 ob	58.932.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	1.6.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	tertib administrasinya kepegawaian	12	30.118.000	12	15.718.000	12	15.718.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	1.6.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			291.953.000		207.460.000		277.995.000				
					2,442,212,000								
1	1.6.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	penyediaan perlengkapan gedung kantor	7 jenis	10.000.000	7 jenis	13.000.000	7 jenis	39.050.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	1.6.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor yang terpelihara	12	75.000.000	12	49.700.000	12	24.325.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	1.6.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara	10	110.000.000	10	110.000.000	10	114.599.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	1.6.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	6 jenis	8.000.000	6 jenis	3.579.000	6 jenis	3.579.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	1.6.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan gedung yang terpelihara	6	15.000.000	6	6.630.000	6	6.630.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	1.6.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas	1	24.951.000	1	20.951.000	1	20.951.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.6.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	penyediaan peralatan gedung kantor	4 jenis	49.002.000	4 jenis	0	4 jenis	40.261.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	1.6.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	8 jenis		8 jenis	3.600.000	8 jenis	3.600.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	1.6.2.36	Rehab sedang/berat gedung kantor	Tersedianya tandon air bersih					1 paket	25.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
	1.6.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			142.125.000		133.681.000		133.681.000				
1	1.6.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tersusunnya capaian kinerja	4	16.496.000	4	12.490.000	4	12.490.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	1.6.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	6	14.112.000	6	14.112.000	6	14.112.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	1.6.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2	6.520.000	2	5.357.000	2	5.357.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	1.6.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya dokumen RKA	2	29.541.000	2	29.541.000	2	29.541.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.6.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	tersusunnya monev dan pelaporan hibah bansos	12	60.180.000	12	57.422.000	12	57.422.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	34	Penanggulangan Kemiskinan
6	1.6.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	pembuatan laporan capaian kinerja	1	4.123.000	1	4.123.000	1	4.123.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	1.6.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	11.153.000	1	10.636.000	1	10.636.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	1.6.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			137.591.000		128.876.000		128.876.000				
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	10.00%									
1	1.6.15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin yang terfasilitasi	1	74.547.000	1	73.777.000	1	73.777.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	55	Penanggulangan Kemiskinan
2	1.6.15.7	Pemberdayaan KUBE dan PMKS	KUBE PMKS yang mendapat fasilitasi	70	17.920.000	70	17.920.000	70	17.920.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	86	Penanggulangan Kemiskinan
3	1.6.15.2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin terlatih	153	45.124.000	153	37.179.000	153	37.179.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	55	Penanggulangan Kemiskinan
	1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			914.162.000		797.284.000		821.884.000				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%									
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20.00%									
1	1.6.16.2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah korban terlayani dan terlindungi	180	30.534.000	180	28.734.000	180	28.734.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.6.16.3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mendapat kampanye sosial/konseling	60	36.741.000	60	30.075.000	60	30.075.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
3	1.6.16.4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Jumlah peserta pelatihan	20	28.504.000	20	25.200.000	20	25.200.000	Dinas Sosial	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40	Rencana
4	1.6.16.10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah tagana dan unsur masyarakat terlatih	100	47.500.000	100	47.230.000	100	71.830.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
5	1.6.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan KUBE	12 bulan	38.522.000	12 bulan	37.214.000	12 bulan	37.214.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
6	1.6.16.12	Penanganan orang terlantar	Jumlah orang terlantar yang ditangani	150	18.485.000	150	18.508.000	150	18.508.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
7	1.6.16.14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Jumlah lanjut usia dan keluarga yang terbina	68	19.156.000	68	14.282.000	68	14.282.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
8	1.6.16.15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	Jumlah veteran dan keluarga yang terbina	25	6.347.000	25	6.497.000	25	6.497.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
9	1.6.16.16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	2	28.071.000	2	27.420.000	2	27.420.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Penanggulangan Kemiskinan
10	1.6.16.17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang taruna yang dibimbing	51	27.500.000	51	15.396.000	51	15.396.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
11	1.6.16.25	Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial	Data desa rawan bencana dan rawan sosial	2	38.855.000	2	25.100.000	2	25.100.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
12	1.6.16.18	Pembinaan keluarga muda mandiri	Jumlah keluarga mandiri terbina	20	43.546.000	20	17.294.000	20	17.294.000	Dinas Sosial	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40	Rencana
13	1.6.16.29	Verifikasi dan validasi Data Kemiskinan	pemutakhiran data BDT	2 kegiatan	350.000.000	2 kegiatan	306.074.000	2 kegiatan	306.074.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	1.6.16.30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	monev pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	12 bulan	134.679.000	12 bulan	134.679.000	12 bulan	134.679.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Penanggulangan Kemiskinan
15	1.6.16.34	Penanganan Korban dan Penatausahaan Logistik Bencana	kejadian bencana tertangani	20 kegiatan	21.249.000	20 kegiatan	21.249.000	20 kegiatan	21.249.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
16	1.6.16.35	Monitoring dan Evaluasi KUBE e-Warong	terbinanya KUBE E-Warong	5 e-warong	18.794.000	5 e-warong	18.794.000	5 e-warong	18.794.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Penanggulangan Kemiskinan
17	1.6.16.36	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	PRS yang mendapat pelatihan	24	25.679.000	24	23.538.000	24	23.538.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Penanggulangan Kemiskinan
	1.6.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			128.982.000		117.507.000		141.007.000				
			Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	15%									
1	1.6.18.3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penca dan eks trauma terdidik terlatih	15	24.109.000	15	23.909.000	15	23.909.000	Dinas Sosial	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	60	Penanggulangan Kemiskinan
2	1.6.18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penca dan eks trauma yang terdayagunakan	57	104.873.000	57	93.598.000	57	117.098.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	70	Penanggulangan Kemiskinan
	1.6.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			18.666.000		11.713.000		11.713.000				
			Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	50%									
1	1.6.19.8	Pembinaan yayasan / panti asuhan	jumlah peserta pembinaan	13	18.666.000	13	11.713.000	13	11.713.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	55	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.6.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			161.734.000		161.564.000		168.064.000				
			Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	70%									
1	1.6.20.1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang terlatih	15	60.630.000	15	60.630.000	15	60.630.000	Dinas Sosial	DBHCHT	60	Penanggulangan Kemiskinan
2	1.6.20.6	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	Jumlah PGOT dan PSK tertangani	110	101.104.000	110	100.934.000	110	107.434.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	1.6.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			616.694.000		601.746.000		638.906.000				
			Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%									
			Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	3									
			Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.6.21.1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	20	15.211.000	20	96.913.000	20	96.913.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
2	1.6.21.3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah PSM yang terbina	70	151.845.000	70	120.870.000	70	139.770.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
3	1.6.21.4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	terbinanya organisasi lansia, Tagana dan KUBE,	3	26.447.000	3	24.932.000	3	24.932.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
4	1.6.21.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Area Makam Pahlawan yang terpelihara	5500	311.105.000	5500	271.715.000	5500	289.975.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
5	1.6.21.8	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	terlaksananya ziarah ke makam mantan walikota dan wakil walikota	1 kegiatan	92.086.000	1 kegiatan	72.216.000	1 kegiatan	72.216.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
6	1.6.21.9	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	WKSBM terbina	3	20.000.000	3	15.100.000	3	15.100.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Penanggulangan Kemiskinan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			21.602.000		21.602.000		21.602.000				
			DISNAKERTRANS		50,000,000								
			KESBANGPOL		113,200,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%									
			Database ormas yang akurat	69.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	penyelenggaraa n upacara peringatan hari pahlawan	1	21.602.000	1	21.602.000	1	21.602.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
				TOTAL	2.844.647.000		2.575.601.000		2.800.832.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Tenaga Kerja
 URUSAN : Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja											
	2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			517.344.000		560.121.000		626.464.000				
1	2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	310	1.800.000		1.110.000		1.110.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan SDA	12	80.400.000		80.400.000	12 bulan	107.700.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	2.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	18	6.850.000		6.850.000	18 unit	8.350.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	92.084.000		92.774.000	10 orang	92.774.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
5	2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	12	82.475.000		104.891.000	2 komponen	110.886.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	21.000.000		21.000.000	37 item	21.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	20.040.000		20.040.000	3 keg	20.040.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	63	ExBAU
8	2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	12.657.000		9.700.000	12 item	9.700.000	Disnaker Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	2	1.344.000	2	2.688.000	2 buah	2.688.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	3.960.000	12	3.960.000	2 jenis	3.960.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	2.700.000	12	4.740.000	12 tabung	4.740.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum karyawan	11	12.348.000	11	13.368.000	3 keg	13.368.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	2.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	72	101.642.000	72	98.140.000	75 kegiatan	123.693.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	2.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	69.744.000	12	92.160.000	12 bulan	98.155.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	2.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	8.300.000	12	8.300.000	12 bulan	8.300.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			347.416.000		364.810.000		437.349.000				
1	2.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional					0		0	Kota Magelang	-	0	
2	2.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1	0	1	0	3 jenis	49.280.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	2.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana kerja	1		1	0	1	9.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	400	26.950.000	400	26.750.000	400	26.750.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional / dinas	18	111.536.000	18	107.772.000	18	122.031.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2	6.875.000	2	6.875.000	2	6.875.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	6	12.055.000	6	11.535.000	6	11.535.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	2.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	190	190.000.000	190	211.878.000	190	211.878.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
	2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			27.087.000		27.463.000		27.463.000				
1	2.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan	12	6.444.000	12	6.444.000	12	6.444.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1	3.851.000	1	3.851.000	1	3.851.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya dokumen rencana kerja OPD	2	6.838.000	2	6.814.000	2	6.814.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya rencana kerja dan anggaran OPD	2	6.913.000	2	7.313.000	2	7.313.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
5	2.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya laporan kinerja OPD	1	3.041.000	1	3.041.000	1	3.041.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	2.1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1.356.739.000		887.616.000		800.870.000				
			Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	2%									
			Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	65%									
			Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	0%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.1.15.3	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Tersedianya peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	5 jenis			0		43.050.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	75	Rencana
2	2.1.15.7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Terpeliharanya prasarana Balai	1 unit	20.000.000		0	1 unit	53.217.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	45	Rencana
3	2.1.15.8	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	Terpeliharanya gedung BLK	0	0	0	0	1 unit	35.750.000	Balai Latihan Kerja	DBHCHT	44	Penanggulangan Kemiskinan
4	2.1.15.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring lulusan pelatihan tahun 2016 di Kota Magelang	122	4.910.000		4.910.000		4.910.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Penanggulangan Kemiskinan
5	2.1.15.11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan menjahit	20	62.371.000		57.840.000	20 orang	57.840.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	89	Penanggulangan Kemiskinan
6	2.1.15.12	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan bordir	30	102.774.000		100.740.000	30 orang	100.740.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	65	Penanggulangan Kemiskinan
7	2.1.15.13	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	Terbinanya LPK di Kota Magelang	13	11.750.000		0	13	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Penanggulangan Kemiskinan
8	2.1.15.16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan montir	20	155.444.000		147.908.000	20 orang	147.908.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	89	Penanggulangan Kemiskinan
9	2.1.15.17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata boga	20	67.196.000		61.929.000	20 orang	65.924.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	89	Penanggulangan Kemiskinan
10	2.1.15.18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata rias	20	80.636.000		80.636.000	20 orang	80.636.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	89	Penanggulangan Kemiskinan
11	2.1.15.19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan komputer	11	55.199.000		51.991.000	11 orang	51.991.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	89	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	2.1.15.20	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknis HP bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan teknis HP	11	51.246.000	11	48.988.000	11 orang	48.988.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	89	Penanggulangan Kemiskinan
13	2.1.15.24	Pelatihan Bahasa Asing	Pencaker yang dilatih pelatihan bahasa asing	50	174.272.000	50	149.522.000	50 orang	100.416.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	89	Penanggulangan Kemiskinan
14	2.1.15.25	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan Las	30	70.436.000	30	67.298.000	30 orang	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	89	Penanggulangan Kemiskinan
15	2.1.15.26	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan perkayuan	30	109.314.000	30	106.354.000	30 orang	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	94	Penanggulangan Kemiskinan
16	2.1.15.27	Penyuluhan dan sosialisasi produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya sosialisasi produktivitas tenaga kerja sektor jasa	15	22.159.000	15	9.500.000	30 orang	9.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulangan Kemiskinan
17	2.1.15.1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersusunya perencanaan tenaga kerja	1	369.032.000	1	0	1	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	64	
	3,8	Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi											
	3.8.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			190.834.000		150.734.000		150.734.000				
			Persentase (%) calon transmigrasi yang ditempatkan	100%									
1	3.8.15.2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya penjajagan	2	74.377.000	2	50.477.000	2 kegiatan	50.477.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Penanggulangan Kemiskinan
2	3.8.15.5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Calon Transmigrasi yang terkirim	5	66.703.000	5	65.003.000	5 KK	65.003.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.8.15.6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	2	49.754.000	2	35.254.000	2 lokasi	35.254.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Penanggulangan Kemiskinan
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja											
	2.1.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			4.299.114.000		2.151.171.000		2.227.702.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase wirausaha baru	5%									
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan	70%									
			Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan										
1	2.1.16.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Laporan IPK	12	143.650.000	12	150.140.000	12 laporan	310.220.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	65	Program prioritas RPJM
2	2.1.16.3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Pembinaan dan monitoring evaluasi	2	35.220.000	2	21.990.000	2 kegiatan	21.990.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DHCHT	40	Penanggulangan Kemiskinan
3	2.1.16.5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Peserta Pelatihan	10	118.905.000	10	85.850.000	10 orang	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	94	Penanggulangan Kemiskinan
4	2.1.16.8	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	Lokasi survey perencanaan padat karya	17	15.265.000	17	15.265.000	17 lokasi	15.265.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Penanggulangan Kemiskinan
5	2.1.16.11	Perluasan kerja sistem padat karya	Lokasi padat karya infrastruktur	17	1.621.693.000	17	1.258.556.000	17 lokasi	1.258.556.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	94	Penanggulangan Kemiskinan
6	2.1.16.12	Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)	Peserta pelatihan	60	265.135.000	60	83.036.000	60 orang	95.552.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94	Penanggulangan Kemiskinan
7	2.1.16.13	Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial	Tersedianya laporan profil ketenagakerjaan	4	10.215.000	4	10.215.000	0	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	
8	2.1.16.14	Job Fair	Pencari kerja terfasilitasi	750	285.245.000	750	243.195.000	750 orang	243.195.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	91	Program prioritas RPJM
9	2.1.16.15	Padat Karya Non Bahan	Lokasi padat karya	17	1.694.636.000	17	191.254.000	17 lokasi	191.254.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	96	Penanggulangan Kemiskinan
10	2.1.16.17	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	Sertifikat ISO 9001 : 2008	1	109.150.000	1	91.670.000	1 sertifikat	91.670.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2.1.16.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Perencanaan tenaga kerja daerah	-	0	-	0	-	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	-	58	
	2.1.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			298.176.000		277.256.000		186.582.000				
			Coverage asuransi tenaga kerja	69%									
			Persentase Perselisihan Hub Industrial terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	50%									
1	2.1.17.2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian kasus perselisihan HI	10	14.582.000	10	14.522.000	10 kasus	14.522.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	74	Program prioritas RPJM
2	2.1.17.4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Peserta sosialisasi	120	15.500.000	120	14.800.000	240 orang	14.800.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
3	2.1.17.9	Sidang Dewan Pengupahan	Terlaksananya sidang	10	32.572.000	10	32.302.000	10 sidang	32.302.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
4	2.1.17.10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya sidang	4	26.019.000	4	25.749.000	4 kali	25.749.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
5	2.1.17.11	Peningkatan peran Lembaga Kerjasama Tripartit					0		0	Disnakertransos Kota Magelang	-	0	
6	2.1.17.12	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK	Pelaksanaan survey	8	69.538.000	8	69.133.000	0	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
7	2.1.17.14	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	Pelaksanaan pembinaan	2	8.035.000	2	7.900.000	2 kegiatan	7.900.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
8	2.1.17.15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	Terlaksananya sosialisasi	2	22.352.000	2	20.698.000	2 kegiatan	20.698.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
9	2.1.17.18	Bulan Bhakti K3	Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti K3	1	21.541.000	1	21.541.000	0	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	
10	2.1.17.19	Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus	0	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2.1.17.20	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Laporkan Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	
12	2.1.17.22	Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	
13	2.1.17.23	Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek	Terselesainya penanganan kecelakaan kerja dan kasus Jamsostek	34	9.354.000	34	0	34	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	
14	2.1.17.25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Peserta Pelaksanaan pelatihan	30	21.148.000	30	20.113.000	120 orang	20.113.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
15	2.1.17.26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	Terlaksananya pemantauan upah minimum	30	15.035.000	30	14.915.000	30 perusahaan	14.915.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
16	2.1.17.21	Penyuluhan peraturan perundangan ketenagakerjaan	Peserta penyuluhan	200	27.500.000	200	20.583.000	200 orang	20.583.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
17	2.1.17.27	Fasilitasi hari buruh internasional	Terfasilitasinya peringatan Hari Buruh Internasional	1	15.000.000	1	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
	3,8	Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi											
	3.8.17	Program Transmigrasi Regional			33.500.000		33.500.000		33.500.000				
					236,607,000								
			Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%									
1	3.8.17.1	Penyuluhan transmigrasi regional	peserta penyuluhan	300	33.500.000	300	33.500.000	300 kk	33.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
				TOTAL	7.070.210.000		4.452.671.000		4.490.664.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 URUSAN : Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.336.432.000		1.334.173.000		1.347.579.000				
1	2.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangkat dan pengiriman surat	21	900.000		900.000		900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
						21		21 lembar					
2	2.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik/air/telefo n	12	129.100.000		115.440.000		117.090.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
						12		12 bulan					
3	2.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasio nal	68	59.843.000		63.943.000		63.943.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
						68		68 unit					
4	2.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelaksanaan Tertib Administrasi Keuangan dan Barang SKPD	12	180.888.000		155.098.000		155.098.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
						12		12 bulan					
5	2.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28	40.183.000		23.743.000		24.650.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
						28		28 jenis					
6	2.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	46	30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
						46		46 jenis					
7	2.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan	11	16.070.000		16.070.000		21.070.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	ExBAU
						11		11 jenis					
8	2.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik	9	4.220.000		4.220.000		4.220.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
						9		9 jenis					
9	2.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan surat kabar dan majalah	12	5.700.000		5.700.000		4.680.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
						12		12 bulan					
10	2.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas 3 dan 12 kg	25	4.410.000		2.700.000		2.190.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
						25		21 kali					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai	5	211.227.000	5	284.496.000	5 jenis	285.768.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
12	2.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	12	300.000.000	12	255.000.000	12 bulan	265.320.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
13	2.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga malam	14	327.600.000	14	351.012.000	18 orang	346.799.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
14	2.5.1.25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	PBB tanah TPA	1	2.000.000	1	2.000.000	1 tahun	2.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	ExBAU
15	2.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Arsip data pegawai	100	24.291.000	100	23.851.000	100 bendel	23.851.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
	2.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			3.100.259.000		2.232.244.000		1.678.951.000				
1	2.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan dan pengecatan gedung kantor	4	89.191.000	4	89.191.000	4 unit	89.191.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
2	2.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional	54	2.243.175.000	54	2.105.748.000	42 unit	1.406.455.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
3	2.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan AC dan sound system/wireless	6	4.800.000	6	4.800.000	6 unit	4.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor	48	32.220.000	48	30.155.000	48 unit	30.155.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
5	2.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	20	2.373.000	20	2.350.000	20 unit	2.350.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
6	2.5.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Tersedianya jaringan air bersih, listrik serta pengadaan PABX	3	0	3	0	3	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	30	
7	2.5.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5	450.000.000	5	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5	2.500.000	5	0	6 unit	47.050.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	Rencana
9	2.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	3	195.000.000	3	0	2 unit	16.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
10	2.5.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeluer kantor	7	81.000.000	7	0	7 unit	82.550.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
	2.5.3	Program peningkatan disiplin aparatur			146.012.000		182.956.000		182.956.000				
1	2.5.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pakaian kerja lapangan, mantel hujan, sepatu boot, topi, masker, kaus tangan	358	146.012.000	358	182.956.000	358 set	182.956.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Tema RKPD 2019
	2.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			63.859.000		86.657.000		86.657.000				
			Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD										
1	2.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja fisik dan keuangan per bulan	12	12.844.000	12	35.642.000	12 buku	35.642.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
2	2.5.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	6	3.830.000	6	3.830.000	6 bendel	3.830.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
3	2.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	6	3.992.000	6	3.992.000	6 bendel	3.992.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
4	2.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun 2016	4	6.656.000	4	6.656.000	4 bendel	6.656.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
5	2.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2017	2	9.329.000	2	9.329.000	2 dokumen	9.329.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA Perubahan 2017, DPPA 2017, RKA 2018, DPPA 2018	30	20.545.000	30	20.545.000	30 buku	20.545.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
7	2.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKj IP Tahun 2016	6	6.663.000	6	6.663.000	6 buku	6.663.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	ExBAU
8	2.5.6.17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	12	0	12	0	12	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			22.295.297.000		18.836.432.000		20.251.998.000				
					24,049,322,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	88%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3%									
1	2.5.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tempat Sampah Pemilah, Kendaran Dump Truck, Kendaraan Bermotor Roda 4 Pick Up, Kendaraan Roda 3, Bin Beroda, Gerobag Sampah, Bak Pemilah Sampah, arm roll, timbangan, mesin pencacah, mesin pengepres	121	1.689.335.000	121	1.689.335.000	138 buah	1.689.335.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Reparasi gerobak dan bin roda, rehab transfer depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5, Pemeliharaan Transfer Depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5, TPST Jurangombo Utara, TPST Rusunawa, Bank Sampah Kota	86 unit,	268.000.000		268.000.000	86 unit, 8 paket pemeliharaan	495.978.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	2.5.15.6	Bimbingan teknis persampahan	Sosialisai dan pembinaan pengelolaan sampah	18	161.386.000	18	161.386.000	18 kali	161.386.000	Kelurahan dan TPA di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
4	2.5.15.7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Terlaksananya sosialisasi	100	64.204.000	100	64.204.000	100 orang	64.204.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
5	2.5.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Lomba pengelolaan sampah	3	68.683.000	3	68.683.000	3 keg	68.683.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
6	2.5.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan pengelolaan persampahan	12	24.980.000	12	24.980.000	12 buku	24.980.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
7	2.5.15.24	Penanganan sampah kota	Terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah	45000	3.464.385.000	45000	3.464.385.000	45000 m3	3.752.891.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	100	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2.5.15.25	Pengelolaan sampah TPA	Terlaksananya penataan dan pola pencatatan sampah di TPSA	73000	1.800.552.000	73000	1.800.552.000	73000 m3	2.152.264.000	TPA Banyuurip Kab.Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs
9	2.5.15.42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	Jumlah peserta daur ulang	60	24.670.000	60	24.670.000	60 orang	24.670.000	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	91	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
10	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM	45	44.028.000	45	44.028.000	45 lokasi	44.028.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
11	2.5.15.48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	Jumlah peserta pelatihan	70	39.863.000	70	39.863.000	70 orang	39.863.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
12	2.5.15.49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	Peran serta aktif dari kader lingkungan/pekerjaan bergerak lingkungan	12	197.105.000	12	197.105.000	12 bulan	332.835.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
13	2.5.15.50	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	Operasional TPST Jurangombo dan Tidar Selatan	12	719.182.000	12	719.182.000	12 bulan	688.307.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
14	2.5.15.51	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik	12	48.800.000	12	48.800.000	12 bulan	10.675.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	86	SDGs
15	2.5.15.52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	Pengelolaan TPS 3 R Magersari	12	50.182.000	12	50.182.000	12 bulan	54.622.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
16	2.5.15.54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya ekspose dan koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	5	394.472.000	5	394.472.000	5 kegiatan	775.672.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs
17	2.5.15.55	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Lokasi bank sampah yang dipantau	17	33.544.000	17	33.544.000	17 kelurahan	33.544.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	2.5.15.58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	Tersusunnya buku volume sampah harian	1	37.437.000	1	37.437.000	1 dokumen	37.437.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
19	2.5.15.1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Dokumen kajian survey dan analisa darurat sampah Kota Magelang	1	68.103.000	1	68.103.000	1	68.103.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
20	2.5.15.61	Pengadaan Tanah	Tersedianya Akses jalan ke tempat pengelolaan sampah	6400	6.000.000.000	6400	6.000.000.000	6400 m2	6.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
21	2.5.15.64	Penyiapan lahan jalan menuju TPST	Terbangunnya TPST berbasis teknologi	3	3.458.865.000	3	3.458.865.000	1 lokasi	3.458.865.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
22	2.5.15.18	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	Sarana Pengelolaan Sampah (mesin Ayak, Mesin Pencacah dan Gerobak Sorong)	7 unit dan	178.656.000	7 unit dan	178.656.000	101 unit	273.656.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	99	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
23	2.5.15.62	Penyiapan Lahan TPST	Tertatanya lahan TPST Bojong	1	3.458.865.000	1		1		Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			32.900.000		32.900.000		32.900.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggara n pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.28	Pengelolaan website	Informasi kegiatan	20	32.900.000	20	32.900.000	20 kali	32.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	66	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			1.002.148.000		979.269.000		1.332.014.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kerja bakti	2400	36.475.000	2400	36.475.000	2400 orang	36.475.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.5.16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sampel yang diperiksa	54	63.011.000	54	44.611.000	54 sampel	44.611.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.5.16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya	20	70.786.000	20	53.689.000	20 keg	53.689.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	SDGs
4	2.5.16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pengelolaan air lindi	1	9.330.000	1	9.330.000	1 paket	9.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.5.16.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Laporan pengelolaan sampah TPSA Banyuwirip	12	19.985.000	12	19.985.000	12 buku	19.985.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.5.16.17	Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan	70	7.276.000	70	7.090.000	70 peserta	7.090.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	SDGs
7	2.5.16.24	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah sampel yang diperiksa	20	87.549.000	20	77.211.000	20 sampel	77.211.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.5.16.26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	Kasus yang tertangani	4	10.722.000	4	10.722.000	6 kasus	10.722.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	SDGs
9	2.5.16.29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	Jumlah sampel yang diperiksa	56	42.697.000	56	42.197.000	56 sampel	42.197.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	2.5.16.33	Pemantauan Kualitas Mata Air	Jumlah sampel yang diperiksa	40	29.656.000	40	41.116.000	40 sampel	41.116.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	SDGs
11	2.5.16.35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Pelaksanaan penyambutan dan tasyakuran Adipura	2	238.067.000	2	229.832.000	2 laporan	221.832.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
12	2.5.16.38	Pengelolaan Gas Methan	Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip	12	34.840.000	12	193.403.000	12 bulan	193.403.000	TPSA Banyuurip	Dana Alokasi Umum	91	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
13	2.5.16.41	Pelayanan Penyedotan Kakus	Jumlah kakus masyarakat yang disedot septictank	60	33.250.000	60	63.455.000	60 lokasi	65.963.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	SDGs
14	2.5.16.42	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Terverifikasinya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	120 dok	35.508.000	120 dokumen	30.608.000	120 dokumen	30.608.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	SDGs
15	2.5.16.52	Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan	Terwujudnya raperda pencabutan perda izin gangguan					1 raperda	39.931.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs
16	2.5.16.43	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Terperiksanya dokumen lingkungan	6	77.995.000	6	77.995.000	6 dokumen	39.325.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	SDGs
17	2.5.16.44	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terverifikasinya dokumen Perizinan PPLH	6 dokumen	77.995.000	6 dokumen	41.550.000	6 dokumen	41.550.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	81	SDGs
18	2.5.16.51	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Laboratorium Lingkungan	Pencapaian Target indeks Kualitas Udara	1 unit	127.006.000	1 unit	0	1 unit	127.006.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
19	2.5.16.39	Penyusunan UKL/UPL TPST	Dokumen UKL UPL					1 dokumen UKL UPL	50.000.000	TPST Rusunawa Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	99	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
20	2.5.16.40	Penyusunan DED TPST	DED TPST					1 dokumen DED	50.000.000	TPST Rusunawa Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	99	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
21	2.5.16.53	Penyusunan Dokumen Lingkungan TPST	Penyusunan dokumen lingkungan					3 dokumen lingkungan	130.000.000	TPST Rusunawa Potrobangsar, TPST Dumpoh, TPST Cacaban	Dana Alokasi Umum	99	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			414.903.000		390.217.000		390.217.000				
			Indeks Kualitas Air,	76%									
			Indeks Kualitas Udara	78%									
			Indeks Tutupan Hutan	48%									
			Jumlah SDA yang terkonservasi	47,7									
			Jenis flora	8 Jenis									
			Jenis fauna	2 Jenis									
1	2.5.17.39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	Peserta aksi lingkungan	90	26.931.000	90	30.865.000	90 orang	30.865.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	SDGs
2	2.5.17.43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	Peserta sosialisasi dan ekspose Adiwiyata Sekolah, peserta pelatihan hyperlink data isian Adiwiyata sekolah	9	100.492.000	9	92.007.000	200 orang	92.007.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs
3	2.5.17.44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	8	67.630.000	8	57.455.000	8 keg	57.455.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	SDGs
4	2.5.17.45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Juara lomba KE	42	170.417.000	42	160.457.000	42 peserta	160.457.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
5	2.5.17.42	Pengadaan Sumur Resapan	Pembuatan sumur resapan	8	49.433.000	8	49.433.000	10 titik	49.433.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	SDGs
	3,5	Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral											
	3.5.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			7.749.845.000		7.165.245.000		8.442.228.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3.5.17.2	Pemasangan instalasi jaringan PJU	Panel surya, panel surya integrated, lampu hias kota, pemasangan titik lampu PJU	3	600.000.000	3	411.002.000	3 paket	1.226.464.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	3.5.17.3	Pemeliharaan lampu PJU	Terpeliharanya lampu PJU	5200	560.469.000	5200	654.963.000	5200 buah	936.484.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	3.5.17.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	Laporan pemeliharaan PJU	12	25.000.000	12	25.000.000	12 buku	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi MKSB
4	3.5.17.8	Penyediaan Jasa Listrik PJU	Tertib administrasi rekening listrik PJU	12	6.002.280.000	12	6.074.280.000	12 bulan	6.074.280.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Memperkuat Implementasi MKSB
5	3.5.17.10	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Penambahan fasilitas tiang dan lampu PJU Kota	100	525.000.000	100	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	3.5.17.12	Pendataan Inventarisasi Lampu PJU	Tertatanya Inventarisasi Lampu PJU	100	37.096.000	5000 titik	0	5000 titikl	180.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			936.108.000		850.433.000		850.433.000				
			Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 buah									
1	2.5.19.1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya pameran dan lomba foto lingkungan	2	74.160.000	2	74.160.000	2 kali	74.160.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.5.19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	1	38.425.000	1	40.875.000	1 dokumen	40.875.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.5.19.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen evaluasi ijin gangguan	1	51.062.000	1	0	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	
4	2.5.19.18	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran	Dokumen kualitas air	1	54.832.000	1	54.600.000	1 dokumen	54.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.5.19.19	Pemeriksaan Sampel Tanah	Jumlah sampel yang diperiksa	20	19.545.000	20	14.745.000	20 sampel	14.745.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	SDGs
6	2.5.19.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	Dokumen kualitas air	1	33.301.000	1	32.900.000	1 dokumen	32.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.5.19.21	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Tersedianya profil keanekaragaman hayati	1	48.425.000	1	48.425.000	1 dokumen	48.425.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	SDGs
8	2.5.19.22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	22.450.000	1	22.450.000	1 dokumen	22.450.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.5.19.24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	iklan infromasi layanan masyarakat, spanduk papan nama	167	157.700.000	167	126.070.000	167 buah	126.070.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
10	2.5.19.25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	Fasilitasi bantuan hukum	1	436.208.000	1	436.208.000	1 tahun	436.208.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Tema RKPD 2019
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.20	Program pengelolaan areal pemakaman			938.656.000		1.077.674.000		1.181.239.000				
			DISNAKERTRAN SOS		200,000,000								
			DKPT		436,950,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	29,20%									
1	1.4.20.5	Pemberian perijinan pemakaman	Meningkatnya tertib administrasi perijinan pemakaman di TPU Giriloyo	100	33.410.000	100	65.910.000	100	65.910.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.4.20.6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Tersedianya Lahan parkir	3	445.015.000	3	447.125.000	3	515.125.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.4.20.7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Meningkatnya kebersihan dan keindahan sarana/prasarana pemakaman	100	409.131.000	100	495.539.000	100	527.804.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	66	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.4.20.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pengelolaan TPU Giriloyo	12	36.100.000	12	54.100.000	12	57.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.4.20.14	Verifikasi Data Pemakaman	Surat teguran pemakaman	180	15.000.000	180	15.000.000	180	15.000.000	TPU Giriloyo	Dana Alokasi Umum	71	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			66.278.000		61.378.000		61.378.000				
			Persentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100%									
1	2.5.20.18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	Tersedianya data gas rumah kaca	1	53.524.000	1	53.524.000	1	53.524.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.5.20.19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	Tersedianya data bahan perusak ozon dan limbah B 3	6 Usaha	12.754.000	6 Usaha/ke	7.854.000	6 Usaha/kegiatan	7.854.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	SDGs
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			4.388.299.000		3.924.108.000		5.536.597.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Taman kota	39	2.344.692.000	24958 bata	2.362.224.000	41 buah	2.773.991.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi MKSB
2	2.5.24.9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	100	78.023.000	1 Lomba ta	79.223.000	17 kel 23 opd	79.223.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi MKSB
3	2.5.24.10	Monitoring dan evaluasi	Tersedianya evaluasi pengelolaan RTH	100	22.500.000	100	22.500.000	12 buku	22.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB
4	2.5.24.18	Penataan Taman Aloon-aloon	Peningkatan keindahan kota	7 jenis t	120.000.000	7 jenis tana	0	800 m2	120.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	Memperkuat Implementasi MKSB
5	2.5.24.24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan RTH Kota	100	294.499.000	1 unit mob	285.499.000	1 Unit Mesin Pompa, 8 Unit Chain Saw, 623 Buah Umbul-umbul, Bendera, Spanduk, Banner, Back drop, 1 Unit Mobil Sampah Aloon-Aloon	285.499.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi MKSB
6	2.5.24.25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah	1300 bu	68.143.000	1300 buah	68.143.000	3200buah	128.143.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.5.24.26	Perawatan Pohon Peneduh	Terlaksananya pemangkasan pohon peneduh jalan	200 poh	97.766.000	200 pohon	47.766.000	525 pohon	83.766.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	106	Memperkuat Implementasi MKSB
8	2.5.24.29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	Terpeliharanya tiang bendera kelompok	212 Bua	37.553.000	212 Buah	37.553.000	212 Buah	37.553.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	76	Memperkuat Implementasi MKSB
9	2.5.24.30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah	11 bh	75.492.000	11 bh	75.492.000	17 bh	135.492.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB
10	2.5.24.36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	Tersedianya suplai bibit tanaman dan sarana di kebun bibit Kota Magelang	100	51.651.000	10 jeni tan	51.651.000	9 jenis	51.651.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB
11	2.5.24.45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	Meningkatnya keteduhan di Kota Magelang	100	81.550.000	448 tabepu	509.627.000	100%	509.627.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB
12	2.5.24.85	Penanganan Pohon Tumbang	Penanganan Pohon Tumbang	5	36.410.000	5	36.410.000	10 keg	36.410.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi MKSB
13	2.5.24.87	Pembuatan Taman Bermain dan Skate Park Lembah Tidar	Tersedianya asuransi pohon se Kota Magelang	1 Paket	65.000.000	1 Paket	325.000.000	1 Paket	325.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi MKSB
14	2.5.24.74	Penataan Taman Jalan Pemuda	Peningkatan pengelolaan RTH	46 pot	20.000.000	4 jenis tana	0	46 pot	20.000.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi MKSB
15	2.5.24.94	Penataan Taman Vertikal Garden	Tertatanya Taman Vertikal Garden	100	180.000.000	9 jenis tana	0	5 unit	180.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB
16	2.5.24.92	Penataan Taman Depan RSJ	Tertatanya Taman Jalan RSJ	100	198.000.000	8 jenis tana	0	1900 m2	176.597.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB
17	2.5.24.93	Penataan jalan Sidatan	Tertatanya Jalan Sidatan	100	198.000.000	8 jenis tana	0	900 m2	170.450.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB
18	2.5.24.95	Penataan Taman Jalan Soekarno Hatta	Tertatanya Taman Jalan Soekarno Hatta	100	198.000.000	8 jenis tana	0	82 m2	179.675.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB
19	2.5.24.96	Penataan Taman Jalan Gatot Subroto	Tertatanya Taman Jalan Gatot Subroto	100	198.000.000	8 jenis tana	0	1750 m2	198.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	2.5.24.91	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Mobil Toilet	Tersusunnya Perwal Penggunaan Mobil Toilet	1	23.020.000	1	23.020.000	1 dok	23.020.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	SDGs
	2,4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan											
	2.4.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			0		0		80.000.000				
			Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	30%									
1	2.4.16.11	Penilaian Harga Tanah	Dokumen Besaran Harga Tanah di Sidotopo					1 dokumen	80.000.000	Sidotopo Kedungsari Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	42.470.996.000		37.153.686.000		41.455.147.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 URUSAN : Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			574.414.000		570.645.000		626.568.000				
1	2.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	kelancaran kegiatan OPD	340	1.750.000	340	1.750.000	340	1.750.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kelancaran kegiatan OPD	12	192.660.000	12	160.200.000	3	154.200.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.6.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13	8.260.000	13	8.260.000	13	8.260.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kelancaran kegiatan OPD	12	76.473.000	12	76.474.000	12	76.474.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
5	2.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kelancaran kegiatan OPD	966,32	37.785.000	966,32	39.777.000	966,32	42.176.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	kelancaran kegiatan OPD	63	22.458.000	63	22.458.000	63	22.458.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran kegiatan OPD	8	15.000.000	8	14.491.000	8	14.491.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	2.6.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran kegiatan OPD	11	5.476.000	11	5.472.000	11	5.472.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
9	2.6.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	kelancaran kegiatan OPD	3	747.000	3	776.000	3	776.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.6.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kelancaran kegiatan OPD	2	3.480.000	2	2.640.000	2	2.640.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.6.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	kelancaran kegiatan OPD	1	2.964.000	1	3.988.000	1	3.988.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.6.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	kelancaran kegiatan OPD	310	17.361.000	310	34.682.000	310	34.958.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	2.6.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kelancaran kegiatan OPD	121	190.000.000	121	144.381.000	121	200.030.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	2.6.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	kelancaran kegiatan OPD	0	0	0	55.296.000	0	58.895.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.6.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			271.438.000		509.071.000		1.154.885.000				
					1,732,930,000								
1	2.6.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	2	0	2	0	03 Jenis	163.962.000	Jl. Veteran no 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.6.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	2419	50.742.000	2419	61.035.000	2419	74.785.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	2.6.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13	138.626.000	13	138.626.000	13	138.626.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.6.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	24	14.960.000	24	14.855.000	24	14.855.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.6.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	76	67.110.000	76	93.136.000	76	93.136.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.6.2.3	Pembangunan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD		0		0	3 jenis	241.340.000	Jl. veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.6.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD		0		0		0	Jl. Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
8	2.6.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	12	0	12	201.419.000	9	425.931.000	Jl. Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
9	2.6.2.10	Pengadaan mebeleur	Kelancaran Kegiatan OPD					1 jenis	2.250.000	Jl. Veteran no. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.6.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50.174.000		50.174.000		50.174.000				
1	2.6.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	4	11.650.000	4	11.650.000	4	11.650.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1	4.023.000	1	4.023.000	1	4.023.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.6.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1	6.769.000	1	6.769.000	1	6.769.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.6.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2	9.425.000	2	9.425.000	2	9.425.000	Jl. Veteran no. 7 magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.6.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2	13.063.000	2	13.063.000	2	13.063.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.6.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1	5.244.000	1	5.244.000	1	5.244.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.6.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1	0	1	0	1	0	Jl. Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			2.140.088.000		1.790.501.000		1.873.428.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA										
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	930									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	45%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	15%									
1	2.6.15.3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Tertib Administrasi Kependudukan	150	108.130.000	150	108.131.000	150	113.039.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	6	38.105.000	6	36.733.000	6	36.733.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	18000	317.999.000	18000	329.681.000	18000	336.877.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.6.15.9	Pengembangan data base kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	30	29.539.000	30	0	30	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
5	2.6.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan		20.300.000		21.292.000	petugas posyandu dan PKK RW	21.292.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.6.15.13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	2720	131.194.000	2720	143.504.000	2720	143.504.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.6.15.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertib Administrasi Kependudukan	4	15.892.000	4	15.890.000	4	15.890.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.6.15.17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	Tertib Administrasi Kependudukan	40	24.766.000	40	18.277.000	40	18.277.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.6.15.19	Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil	Tertib Administrasi Kependudukan	1000	27.370.000	1000	0	1000	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
10	2.6.15.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran	Tertib Administrasi Kependudukan	2459	127.811.000	2459	171.694.000	2459	198.327.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	2.6.15.28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	Tertib Administrasi Kependudukan	21	10.560.000	21	11.963.000	21	11.963.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	2.6.15.29	Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	Tertib Administrasi Kependudukan	12	211.243.000	12	229.675.000	12	232.275.000	Jl. Veteran no 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
13	2.6.15.30	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan	Tertib Administrasi Kependudukan	0	0	0	57.773.000	0	57.773.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	2.6.15.32	Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	6	68.765.000	6	68.765.000	6	68.765.000	Jl.VeteranNo. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	2.6.15.33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4	15.133.000	4	13.466.000	4	13.466.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
16	2.6.15.34	Operasi Yustisi Kepemilikan KTP elektronik bagi Warga Kota Magelang	Tertib Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	0	0	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
17	2.6.15.35	Pendataan Penduduk Non Permanen	Tertib Administrasi Kependudukan	3	54.533.000	3	62.793.000	3	62.793.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
18	2.6.15.36	Pemutakhiran Database dan Dokumen Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	9000	72.404.000	9000	65.494.000	9000	65.494.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
19	2.6.15.38	Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	Tertib Administrasi Kependudukan	6	144.810.000	6	179.478.000	6	219.076.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
20	2.6.15.44	Supervisi pemanfaatan data kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	1	55.200.000	1	0	1	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
21	2.6.15.5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4	16.800.000	4	15.697.000	4	15.697.000	Jl. Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
22	2.6.15.40	Digitalisasi Dokumen Catatan Sipil	Tertib Administrasi Kependudukan				24.513.000	1000	24.513.000	Jl. Veteran no. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
23	2.6.15.7	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tertib Administrasi Kependudukan	0	38.161.000	0	121.778.000	03 Jenis	123.770.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
24	2.6.15.23	Pelayanan Penerapan E - KTP	Tertib Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	0	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
25	2.6.15.39	Pelayanan Proaktif Akta Kematian	Tertib Administrasi Kependudukan	2	31.632.000	2	26.323.000	2	26.323.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
26	2.6.15.41	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	1	86.250.000	1	28.251.000	1	28.251.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	2.6.15.42	Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain Berbasis IT	Tertib Administrasi Kependudukan	1	0	1	26.690.000	1	26.690.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
28	2.6.15.43	Penyusunan Buku Data Penduduk	Tertib Administrasi Kependudukan	1	0	1	12.640.000	1	12.640.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
29	2.6.15.45	Pelayanan kartu identitas penduduk mobile	Tertib Administrasi Kependudukan	1	72.450.000	1	0	1	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
30	2.6.15.46	Pelayanan terintegrasi	Tertib Administrasi Kependudukan	1	55.000.000	1	0	1	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
31	2.6.15.47	Aktualisasi Data Kelahiran, Kematian, Perkawinan	Tertib Administrasi Kependudukan	3	16.199.000	3	0	3	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
32	2.6.15.48	Pelayanan Proaktif Akta Kematian	Tertib Administrasi Kependudukan	340	43.050.000	340	0	340	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	49	
33	2.6.15.49	Sosialisasi Percepatan Pencatatan Kematian	Tertib Administrasi Kependudukan	340	0	340	0	340	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
34	2.6.15.50	Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	Tertib Administrasi Kependudukan	1	207.792.000	1	0	1	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
35	2.6.15.51	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tersusunnya dokumen Study Kelayakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	99.000.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	
36	2.6.15.52	Sosialisasi penataan administrasi kependudukan berbasis IT	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis IT	3	0	3	0	3	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	2.6.15.53	Peningkatan kapasitas pengelola database, jarkomdat dan aplikasi	Terseleggaranya kursus pengelolaan Database, Jarkomdat & Aplikasi	5	0	5	0	5	0	Lembaga Pelatihan	Dana Alokasi Umum	70	
38	2.6.15.54	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan	Terlaksananya Supervisi Pelayanan Adminduk Online di Kecamatan	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
39	2.6.15.58	Pembinaan Menuju Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan	Tertib administrasi Kependudukan					38 RW	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			43.073.000		0		0				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a.??????? Radio	60 kali siaran/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraa n pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.28	Pengelolaan website	Tertib Administrasi Kependudukan	1	27.755.000	1	0	1	0	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
2	2.10.15.31	Peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan pihak lain berbasis IT	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan pihak lain	3	15.318.000	3	0	3	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.10.15.33	Optimalisasi jaringan komunikasi data kependudukan	Meningkatnya daya guna, keamanan Jaringan Komunikasi Data Kependudukan	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
4	2.10.15.34	Pelayanan adminduk di kecamatan berbasis IT	Terselenggaranya pelayanan Adminduk di Kecamatan secara online	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			0		0		0				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	1	0	1	0	1	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		0		0				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0									
1	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tertib Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	0	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			49.133.250		0		0				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%									
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	56%									
1	4.1.17.10	Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan	Tertib Administrasi Kependudukan		0		0		0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
2	4.1.17.13	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tertib Administrasi Kependudukan	1	0	1	0	1	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
3	4.1.17.16	Penanganan aduan masyarakat berbasis IT	Terselesaikannya Aduan Masyarakat secara online	1	49.133.250	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	
				TOTAL	3.128.320.250		2.920.391.000		3.705.055.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pemberdayaan Perempuan dan Anak; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			676.864.000		658.505.000		713.420.000				
1	2.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1 tahun	2.850.000	1 tahun	2.850.000	1 tahun	2.850.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	2.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya langganan listrik, air, internet dan telepon kantor	12 bulan	103.920.000	12 bulan	105.840.000	12 bulan	120.840.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	2.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan kir kendaraan dinas	41 unit	55.350.000	41 unit	55.600.000	41 unit	55.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	2.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai aturan	12 bulan	113.710.000	12 bulan	99.310.000	12 bulan	99.310.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	2.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	47.211.000	12 bulan	49.203.000	12 bulan	51.602.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	2.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	17.630.000	12 bulan	17.630.000	12 bulan	17.630.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	2.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	16.467.000	12 bulan	16.467.000	12 bulan	16.467.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
8	2.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik untuk kantor	14 jenis	14.955.000	14 jenis	16.305.000	14 jenis	16.305.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 2018	RENJA 2018	ARGET APBD 2018	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	12 bulan	4.200.000	12 bulan	4.200.000	12 bulan	4.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
10	2.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya langganan tabung gas	20 tabung	2.975.000	20 tabung	2.788.000	20 tabung	2.788.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
11	2.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya snack dan makan bagi tamu dan rapat	12 bulan	32.746.000	12 bulan	37.906.000	12 bulan	37.906.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
12	2.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	149.995.000	12 bulan	125.675.000	12 bulan	155.995.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
13	2.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Tersedia tenaga penjaga malam dan pengemudi	12 bulan	106.416.000	12 bulan	110.892.000	12 bulan	118.088.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
14	2.7.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannaya tertib administrasi kepegawaian	12 bulan	8.439.000	12 bulan	13.839.000	12 bulan	13.839.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	2.7.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			369.780.000		342.724.000		383.438.000				
1	2.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	90.000.000	1 tahun	80.000.000	1 tahun	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	2.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	41 unit	187.248.000	41 unit	196.989.000	41 unit	196.903.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	2.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	69 unit	48.880.000	69 unit	38.235.000	69 unit	38.235.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	2.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	79 unit	5.050.000	79 unit	1.900.000	79 unit	1.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	2.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya CPU, printer dan komputer	7 unit	0	7 unit	10.779.000	7 unit	33.579.000	Dinas P4KB	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
6	2.7.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya Papan nama dan kamera, pompa air	6 unit	38.602.000	6 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.7.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya kursi kerja dan meja kerja, meja beroda, kursi tamu set	12 unit	0	12 unit	9.821.000	12 unit	27.821.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
8	2.7.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya sumur bor dan pompa di Gedung Wanita Kota Magelang	1 unit		1 unit	0	1 unit	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
	2.7.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			5.600.000		5.600.000		5.600.000				
1	2.7.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi penyuluh KB	15 oran	5.600.000	15 orang	5.600.000	15 orang	5.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	2.7.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			61.964.000		65.424.000		65.424.000				
1	2.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja	4 keg	10.170.000	4 keg	14.130.000	4 keg	14.130.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	2.7.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya laporan prognosis realisasi anggaran	1 keg	4.255.000	1 keg	4.255.000	1 keg	4.255.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	2.7.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 keg	8.471.000	1 keg	8.271.000	1 keg	8.271.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	2.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja OPD	2 keg	9.153.000	2 keg	9.153.000	2 keg	9.153.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	2.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya dokumen RKA	2 keg	9.347.000	2 keg	9.347.000	2 keg	9.347.000	BPMPKB	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	2.7.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Terlaksananya sinkronisasi aset dan laporan keuangan	1 keg	15.482.000	1 keg	15.382.000	1 keg	15.382.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan LKJIP	1 keg	5.086.000	1 keg	4.886.000	1 keg	4.886.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			275.375.000		166.545.000		230.475.000				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya forum pertemuan LPM di tingkat Kota dan Kelurahan	2 keg	194.975.000	2 keg	86.850.000	2 keg	127.480.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
2	2.7.15.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi kader pembangunan masyarakat	1 keg	36.400.000	1 keg	35.895.000	1 keg	35.895.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.7.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	Tersedianya buku profil Kelurahan	21 buku	44.000.000	21 buku	43.800.000	21 buku	43.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
4	2.7.15.8	Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi Keuangan kader UP2K PKK	17 kel	0	17 kel	0	17 kel	23.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			366.128.000		721.372.000		721.372.000				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2									
1	2.8.15.2	Pelayanan KIE	Tersampaiannya informasi tentang KB kepada masyarakat	3 keg	20.047.000	3 keg	32.597.000	3 keg	32.597.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.8.15.3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terwujudnya pelayanan ppsmear bagi masyarakat Kota Magelang	75 oran	15.825.000	75 orang	15.825.000	75 orang	15.825.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pertemuan koordinasi pelayanan KB	87 oran	12.900.000	87 orang	12.300.000	87 orang	12.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.8.15.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana	tersedianya tablet komunikasi bagi petugas lapangan KB	17 unit	103.906.000	17 unit	85.000.000	17 unit	85.000.000	Dinas P4KB	Dana Alokasi Khusus (D A K)	54	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	2.8.15.16	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	Terpenuhiya dukungan operasional Balai Penyuluhan KB, Distribusi Alikon dan Kampung KB	1 tahun	213.450.000	1 tahun	575.650.000	1 tahun	575.650.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			121.912.000		88.683.000		88.683.000				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%									
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20.00%									
1	1.6.16.14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Terlaksananya pembinaan dan perayaan HUT Lansia	630 ora	54.280.000	630 orang	44.851.000	630 orang	44.851.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 2018	RENJA 2018	ARGET APBN	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.6.16.23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	Terlaksananya peningkatan peran lansia dalam pembangunan	100 ora	67.632.000	100 orang	43.832.000	100 orang	43.832.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			565.798.000		463.157.000		529.458.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	44.74%									
1	2.2.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A	12 bulan	304.928.000	12 bulan	203.833.000	12 bulan	209.829.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
2	2.2.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan gerakan pugar untuk ruang anak	17 kel	57.700.000	17 kel	56.875.000	17 kel	92.180.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Kota Layak Anak
3	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak	250 ora	75.510.000	250 orang	68.710.000	250 orang	68.710.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Kota Layak Anak
4	2.2.16.7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi PUG tingkat Nasional	250 ora	68.000.000	250 orang	65.500.000	250 orang da	65.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
5	2.2.16.21	Penyusunan Profil Anak dan Perempuan	Tersedianya data pekerja perempuan dan anak Kota Magelang	2 buku	0	2 buku	0	2 buku	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Kota Layak Anak
6	2.2.16.8	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Tersusunnya buku evaluasi kota layak anak	300 ora	31.100.000	300 orang	40.129.000	300 orang da	40.129.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.2.16.11	Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak	Terlaksananya sosialisasi perda perlindungan anak	300 ora	28.560.000	300 orang	28.110.000	300 orang	28.110.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan			130.380.000		62.100.000		62.100.000				
1	2.7.16.2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan administrasi LKK	3 keg	31.380.000	3 keg	24.000.000	3 keg	24.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
2	2.7.16.9	Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan penjangkaran TTG	4 keg	99.000.000	4 keg	38.100.000	4 keg	38.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			11.782.000		11.782.000		11.782.000				
			Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%									
1	2.8.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja	80 oran	11.782.000	80 orang	11.782.000	80 orang	11.782.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			102.040.000		43.640.000		53.640.000				
			Rasio KDRT	0.06%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	23									
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%									
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%									
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%									
			Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%									
			Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%									
			Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	3%									
1	2.2.17.1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Peningkatan fokus perempuan berpolitik Indonesia	100 ora	77.040.000	100 orang	18.840.000	100 orang	28.840.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.2.17.10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya data perempuan di lembaga swasta	225 ora	25.000.000	225 orang	24.800.000	225 orang	24.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			1.055.382.000		381.751.000		898.201.000				
1	2.7.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Lomba Kelurahan tingkat Provinsi	3 keg	48.325.000	3 keg	55.700.000	3 keg	55.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
2	2.7.17.6	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan dan KB	17 kel	25.500.000	17 kel	23.644.000	17 kel	23.644.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.7.17.14	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terselenggaranya Kegiatan TMMD	3 Kel	679.750.000	3 Kel		3 Kel	501.600.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	95	Penanggulangan Kemiskinan
4	2.7.17.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	terlaksananya kegiatan temu kader DPMP4KB	1 keg	39.000.000	1 keg	39.000.000	1 keg	43.320.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
5	2.7.17.13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan di lokasi TMMD (3 kelurahan)	3 kel	262.807.000	3 kel	263.407.000	3 kel	273.937.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Penanggulangan Kemiskinan
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.17	Program pelayanan kontrasepsi			61.659.000		61.659.000		61.659.000				
			Cakupan peserta KB aktif	77,5%									
1	2.8.17.1	Pelayanan konseling KB	Tersampaiannya informasi yang benar tentang KB di tempat pelayanan KB	213 ora	21.252.000	213 orang	21.252.000	213 orang	21.252.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Penanggulangan Kemiskinan
2	2.8.17.2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat	125 ora	9.730.000	125 orang	9.730.000	125 orang	9.730.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
3	2.8.17.4	Pelayanan KB medis operasi	Terlayannya masyarakat menjadi peserta KB MO	25 oran	30.677.000	25 orang	30.677.000	25 orang	30.677.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			110.540.000		109.715.000		109.715.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya Lomba BBGRM di tingkat kelurahan	17 kel	110.540.000	17 kel	109.715.000	17 kel	109.715.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			226.711.000		222.311.000		222.311.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%									
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,00%									
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya lomba Posyandu, PHBS, LBS, HKG PKK	4 keg	132.842.000	4 keg	128.842.000	4 keg	128.842.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
2	2.2.18.7	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	meningkatnya penganggaran responsif gender setiap OPD	50 orang	32.669.000	50 orang	32.469.000	50 orang	32.469.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.2.18.8	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	peringatan hari anak nasional	500 anak	61.200.000	500 anak	61.000.000	500 anak	61.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Kota Layak Anak
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.8.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			179.541.000		176.441.000		178.840.000				
			Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	64%									
1	2.8.18.1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terpenuhinya operasional kader PPKBD, sub PPKBD	213 ora	133.305.000	213 orang	130.205.000	213 orang	132.604.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.8.18.2	Koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	41 keg	26.036.000	41 keg	26.036.000	41 keg	26.036.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.8.18.4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	terlaksananya update data pendataan keluarga	17 kel	20.200.000	17 kel	20.200.000	17 kel	20.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			16.064.000		15.864.000		15.864.000				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya pelatihan dan penyusunan profil posyandu	100%	16.064.000	100%	15.864.000	100%	15.864.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	SDGs
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			526.542.000		1.198.892.000		2.659.952.000				
					1,103,852,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	29%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	10									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	41%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	24%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		143								
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	87.50%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK aktif	54%									
			PKK Aktif		100%								
1	2.7.19.1	Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi perempuan	175 ora	0	175 orang	0	175	30.000.000	Kota Magelang	DAU	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.7.19.2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita	2 organ	180.234.000	2 organisasi	123.184.000	2 organisasi	123.184.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK)	1 organ	346.308.000	1 organisasi	1.075.708.000	1 organisasi	2.506.768.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			215.692.000		198.582.000		198.582.000				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100									
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD 2018	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31									
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah anak yang diberi tambahan makanan dan vitamin	950 anak	215.692.000	950 anak	198.582.000	950	198.582.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Kota Layak Anak
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			31.650.000		31.450.000		31.450.000				
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%									
1	2.8.20.1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Terbentuknya PIK Remaja	3 keg	24.000.000	3 keg	23.800.000	3 keg	23.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.8.20.2	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terpenuhinya operasional pelayanan di PIK Remaja	3 keg	7.650.000	3 keg	7.650.000	3 keg	7.650.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.8.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga			11.696.000		11.596.000		11.596.000				
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	5%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	77%									
			Cakupan PUS peserta KB Anggot gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	88%									
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%									
			Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%									
			Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%									
			Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	10%									
			Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	57%									
			Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	13%									
			Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%									
			Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	88%									
			Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	95%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%									
			Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%									
			Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%									
			Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	2%									
			Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%									
			Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%									
			Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%									
			Persentase peningkatan jumlah keluarga sejahtera	87%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2018	ARGET APB	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	20%									
1	2.8.23.2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kelompok tribina	17 kel	11.696.000	17 kel	11.596.000	17 kel	11.596.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			0		99.400.000		105.396.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada									
1	2.2.15.5	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	Terlaksananya perlindungan anak di Kota Magelang	50 orang	0	50 orang	99.400.000	50 orang	105.396.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Kota Layak Anak
				TOTAL	5.123.100.000		5.137.193.000		7.358.958.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Perhubungan
 URUSAN : Perhubungan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan											
	2.9.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			746.429.000		892.991.000		1.089.645.000				
1	2.9.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	102.600.000		168.396.000		155.760.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, ExBAU
2	2.9.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	27	9.940.000		9.940.000		14.440.000	Dihub	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
3	2.9.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	146.652.000		147.958.000		147.958.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
4	2.9.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	101.010.000		107.645.000		113.651.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	63	ExBAU
5	2.9.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	24.000.000		24.000.000		24.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.9.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	2	15.806.000		15.810.000		13.830.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.9.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.	1	15.962.000		15.962.000		15.962.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
8	2.9.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.	3	6.400.000		7.250.000		49.250.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.9.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	3	5.760.000	3	5.760.000	3	5.760.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.9.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
11	2.9.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	49.813.000	1 tahun	58.129.000	1 tahun	50.754.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.9.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	152.574.000	1	173.389.000	1	183.709.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	84	ExBAU
13	2.9.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honor daerah/tidak tetap	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	6	104.616.000	6	147.456.000	6	157.065.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	84	ExBAU
14	2.9.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	8.446.000	1	8.446.000	1	154.656.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	94	ExBAU
15	2.9.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat dinas	1	1.050.000	1	1.050.000	1 jenis	1.050.000	Dinas Perrhubungan	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
	2.9.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			475.101.000		716.769.000		1.384.179.000				
1	2.9.2.3	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	0	2	198.200.000	2	198.200.000	Jl. Jend Sudirman no 84	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	2.9.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	0	1	0	1	0	Dishub	Dana Alokasi Umum	84	
3	2.9.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 jenis (	0	2 jenis (Filli	0	2 jenis (Fillin	33.000.000	Dishub, Terminal Magersari	Dana Alokasi Umum	44	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.9.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (komputer)	2 jenis	0	2 jenis	0	2 jenis	54.500.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, ExBAU
5	2.9.2.10	Pengadaan mebeleur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 set	0	3 set	0	3 set	44.000.000	Dishub, Terminal Magersari	Dana Alokasi Umum	34	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, ExBAU
6	2.9.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15	0	15	0	15	0	Dishubkominfo	Dana Alokasi Umum	40	
7	2.9.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	132.662.000	2	115.262.000	3	369.062.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	50	ExBAU
8	2.9.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	27	193.449.000	27	212.162.000	27	233.162.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, ExBAU
9	2.9.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	10.180.000	5	14.430.000	5	14.430.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
10	2.9.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11	26.275.000	11	64.225.000	11	64.225.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
11	2.9.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	14	112.535.000	14	112.490.000	14	284.440.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	2.9.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	0	1	0	1	89.160.000	Pos Artos	Dana Alokasi Umum	60	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
	2.9.3	Program peningkatan disiplin aparatur			34.320.000		41.850.000		41.850.000				
1	2.9.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai	57	34.320.000	57	41.850.000	57	41.850.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
	2.9.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			82.966.000		82.966.000		72.156.000				
1	2.9.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	12	24.981.000	12	24.981.000	12	24.981.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	95	ExBAU
2	2.9.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	2	14.250.000	2	14.250.000	2	14.250.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
3	2.9.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	2	18.079.000	2	18.079.000	2	18.079.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
4	2.9.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	0	10.810.000	0	10.810.000	0	0	Dishub	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.9.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	1	7.850.000	1	7.850.000	1	7.850.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
6	2.9.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	2	6.996.000	2	6.996.000	2	6.996.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	2.9.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			1.463.102.000		1.263.775.000		1.295.006.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DISHUB		59,288,000								
			Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	40%?									
			Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata	1									
			Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	55%									
			Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	86									
			Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	17									
1	2.9.15.2	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	2	289.088.000		261.688.000		261.688.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	94	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.9.15.7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Tercapainya target hasil pengelolaamn dan retribusi jasa pelayanan terminal	3	192.360.000		25.920.000		27.121.000	Terminal	Dana Alokasi Umum	90	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.9.15.9	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	15	585.500.000	15	610.400.000	15	640.430.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	2.9.15.11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1	74.990.000	1	67.833.000	1	67.833.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	ExBAU
5	2.9.15.12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1	69.890.000	1	65.672.000	1	65.672.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, ExBAU
6	2.9.15.13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	4	29.325.000	4	37.625.000	4	37.625.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
7	2.9.15.14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1	20.600.000	1	13.100.000	1	13.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, ExBAU
8	2.9.15.15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	10	97.079.000	10	96.579.000	10	96.579.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.9.15.16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1	30.580.000	1	30.580.000	1	30.580.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	84	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	2.9.15.17	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan	Pemutakhiran Data base urusan perhubungan	6	43.320.000	6	43.320.000	6	43.320.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	34	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
11	2.9.15.18	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	Pengelolaan media sosial	12	30.370.000	12	11.058.000	12	11.058.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2.9.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			166.300.000		137.800.000		258.050.000				
			Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7									
1	2.9.16.5	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan terminal dan prasarana fasilitas perhubungan	10	166.300.000	10	137.800.000	10	137.800.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.9.16.4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	terpeliharanya sarana dan prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	1 pelan	0	1 pelandaia	0	1 pelandaia	71.500.000	Terminal Magersari	Dana Alokasi Umum	94	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.9.16.2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai pengujian kendaraan bermotor	terpeliharanya sarana dan prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	6 blower	0	6 blower	0	6 blower	48.750.000	Dishub, Ged PKB	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.9.17	Program peningkatan pelayanan angkutan			596.797.000		543.609.000		543.609.000				
			Jumlah arus penumpang angkutan umum	2,900,000									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	5%									
1	2.9.17.3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Peningkatan pelayanan angkutan	270	27.953.000	270	27.953.000	270	27.953.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	84	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.9.17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Peningkatan Pelayanan Angkutan	15	105.070.000	15	123.320.000	15	123.320.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	89	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
3	2.9.17.6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Peningkatan Pelayanan Angkutan	3	124.244.000	3	124.244.000	3	124.244.000	Terminal	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	2.9.17.9	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal			0		0		0	Terminal	-	0	
5	2.9.17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	15.442.000	1	11.642.000	1	11.642.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	2.9.17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	117.180.000	2	142.885.000	2	142.885.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
7	2.9.17.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Peningkatan Pelayanan Angkutan	65	27.362.000	65	27.362.000	65	27.362.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	90	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
8	2.9.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Peningkatan pelayanan angkutan	60	21.546.000	60	21.119.000	60	21.119.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
9	2.9.17.18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Peningkatan pelayanan angkutan	630	158.000.000	630	65.084.000	630	65.084.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Kota Layak Anak, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.9.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			2.776.082.000		2.726.982.000		3.856.982.000				
			DISHUB		3,306,977,000								
			Jumlah pelayanan umum	1									
1	2.9.18.1	Pembangunan gedung terminal	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	
2	2.9.18.2	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	2	45.750.000		172.150.000		172.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.9.18.4	Pengadaan Papan Nama Jalan	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1	0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	
4	2.9.18.6	Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	3000	171.630.000		2.430.000		2.430.000	Perencanaan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	2.9.18.7	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	6	63.212.000		63.212.000		63.212.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	2.9.18.9	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	12	395.490.000		389.190.000		389.190.000	Dishubkominformo	Dana Alokasi Umum	79	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
7	2.9.18.10	Pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana Perhubungan	Tersedianya luasan lahan terminal	400	2.100.000.000		2.100.000.000		3.230.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
8	2.9.18.8	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal	Tersedianya DED terminal	1	0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	
	2.9.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			3.444.285.000		833.760.000		1.163.410.000				
			DISHUB		6,005,133,000								
			Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	7,78?									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	45%?									
1	2.9.19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	50	41.075.000	50	41.075.000	50	64.025.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, ExBAU, Pokok Pikiran DPRD
2	2.9.19.2	Pengadaan marka jalan	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	6915 m	121.748.000	6915 m	149.198.000	6915 m	194.898.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Pokok Pikiran DPRD
3	2.9.19.4	Pengadaan lampu flashing/kedip	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	3 unit	91.876.000	3 unit	61.276.000	3 unit	91.276.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Pokok Pikiran DPRD
4	2.9.19.5	Pengadaan Traffic Light	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	3 unit	2.712.140.000	3 unit	176.350.000	3 unit	176.350.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Pokok Pikiran DPRD
5	2.9.19.7	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	3 jenis	252.935.000	3 jenis	141.350.000	3 jenis	321.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.9.19.8	Pembangunan ATCS	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	3 jenis	150.000.000	3 jenis	196.350.000	3 jenis	247.550.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
7	2.9.19.9	Pengadaan VMS KOTA MAGELANG	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
8	2.9.19.10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	5	57.980.000	5	57.980.000	5	57.980.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
9	2.9.19.11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	1	16.531.000	1	10.181.000	1	10.181.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
10	2.9.19.12	Pengadaan Fasilitas Pengawasan dan Penyidikan Kendaraan Angkutan			0		0		0	Kota Magelang	-	0	
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		0		0				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0									
1	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota			0		0		0	Kota Magelang	-	0	
	2,9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.9.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			220.213.000		236.370.000		268.892.000				
					5,577,615,000								
			DISHUB		248,742,000								
			Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	7,936									
			Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	4									
1	2.9.20.4	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	4300	204.879.000	4300	221.036.000	4300	244.558.000	Dishub PKB	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.9.20.5	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	6 kegiatan	15.334.000	6 kegiatan	15.334.000	6 kegiatan	24.334.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	10.005.595.000		7.476.872.000		9.973.779.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 URUSAN : Komunikasi dan Informatika; Statistik; Persandian

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.837.311.000		2.633.289.000		2.673.283.000				
1	2.10.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat pada Diskominfo	2 jenis	1.760.000	2 jenis	530.000	2 jenis	530.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	2.10.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Langganan telepon, air, listrik, sewa bandwith dan internet	4 jenis	1.139.832.000	4 jenis	2.193.012.000	4 jenis	2.193.012.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
3	2.10.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktifitas dan mobilitas	15 unit	6.660.000	15 unit	5.550.000	15 unit	5.550.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	2.10.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan laporan administrasi keuangan	12 bulan	106.507.000	12 bulan	105.597.000	12 bulan	107.697.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	2.10.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan ruangan dan lingkungan gedung Diskominsta	12 bulan	78.244.000	12 bulan	30.811.000	12 bulan	32.068.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	2.10.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD	42 jenis	22.500.000	42 jenis	22.500.000	42 jenis	22.500.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	2.10.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	17 jenis	10.438.000	17 jenis	10.438.000	17 jenis	10.438.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
8	2.10.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	2 jenis	9.950.000	2 jenis	9.500.000	2 jenis	9.500.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.10.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	1	17.500.000	1	0	1	0	Dikominfo dan statistik	Dana Alokasi Umum	75	
10	2.10.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi aparat Diskominsta	5 jenis	8.472.000	5 jenis	8.472.000	5 jenis	8.472.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
11	2.10.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja	1 jenis	1.800.000	1 jenis	2.280.000	1 jenis	2.280.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
12	2.10.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran aktifitas kerja	12 bulan	19.000.000	12 bulan	19.840.000	12 bulan	19.840.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
13	2.10.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	70 kegiatan	333.640.000	70 kegiatan	148.063.000	70 kegiatan	182.186.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
14	2.10.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Keamanan dan kenyamanan lingkungan	2 orang	52.308.000	2 orang	36.864.000	2 orang	39.378.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
15	2.10.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	2 dokumen	6.200.000	2 dokumen	19.732.000	2 dokumen	19.732.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
16	2.10.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	2 jenis	22.500.000	2 jenis	20.100.000	2 jenis	20.100.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	2.10.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.031.729.000		391.830.000		1.836.150.000				
1	2.10.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan mobilitas dan aktifitas kerja bagi aparat Diskominsta	3 unit	54.383.000	3 unit	0	1 motor	20.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	2.10.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kelancaran aktivitas kerja pegawai	3 jenis	1.000.000	3 jenis	0	3 jenis	49.353.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	2.10.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	15 unit	123.732.000	15 unit	115.270.000	15 unit	115.270.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	2.10.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang terpelihara	3 jenis	4.245.000	3 jenis	4.245.000	3 jenis	4.245.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2.10.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang terpelihara	14 jenis	272.415.000	14 jenis	272.315.000	14 jenis	208.315.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	2.10.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terpenenuhinya kebutuhan ruang/tempat yang layak bagi aktifitas kerja unit aparat Diskominsta	100	0	100	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	
7	2.10.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kelancaran aktivitas kerja pegawai	15	512.094.000	15	0	48 jenis	1.357.203.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
8	2.10.2.10	Pengadaan mebeleur	Kelancaran aktivitas pegawai	4	63.860.000	4	0	4	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	
9	2.10.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi	Meningkatkan kelancaran aktifitas kerja dengan adanya komunikasi yang memadai	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	
10	2.10.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung dan lingkungan Diskominsta	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	81.764.000	Jalan Pahlawan, Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
11	2.10.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kenyamanan dan kelancaran tugas	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
	2.10.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			122.039.000		70.655.000		70.655.000				
1	2.10.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Pencapaian target kinerja	12 dokumen	23.593.000	12 dokumen	22.577.000	12 dokumen	22.577.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	2.10.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	2 dokumen	14.641.000	2 dokumen	14.625.000	2 dokumen	14.625.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	2.10.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA/RKPA	2 dokumen	18.084.000	2 dokumen	17.748.000	2 dokumen	17.748.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.10.6.9	Penyusunan LAKIP OPD	Adanya LAKIP 2017	4	0	4	0	4	0	Diskominsta	-	44	
5	2.10.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan akhir tahun	2 dokumen	7.729.000	2	7.721.000	2	7.721.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	2.10.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Capaian Kinerja	1	7.992.000	1	7.984.000	1 dokumen	7.984.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	2.10.6.5	Asistensi Penyusunan LAKIP	ergrgtr	12	50.000.000	12	0	12	0	diskominsta	Dana Alokasi Umum	104	
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			2.033.223.000		1.500.075.000		1.737.068.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperc ayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraa n pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terwujudnya peningkatan koordinasi bidangkomunik asi dan informasi di tingkat SKPD	17	284.838.000	17	0	17	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	
2	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Peningkatan peran KIM dalam pembangunan Kota Magelang	17	205.563.000	17	200.763.000	17 kelompok	200.763.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.10.15.6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kota Magelang	6	116.102.000		143.823.000		143.823.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	2.10.15.8	Siaran Radio	Meningkatnya arus informasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah	12	434.513.000		493.254.000		500.619.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	2.10.15.10	Penerbitan majalah	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi tentang kota magelang	4	100.940.000		101.220.000		101.220.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
6	2.10.15.5	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Tersedianya CCTV di Taman Skateboard depan Pegadaian	1	75.201.000		0		123.228.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
7	2.10.15.17	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Terpeliharanya jaringan komunikasi Pemerintah Kota Magelang	12	90.910.000		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
8	2.10.15.28	Pengelolaan website	Terkelolanya media sosial dalam rangka pencapaian layanan	12	177.041.000		167.851.000		167.851.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
9	2.10.15.21	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika	Tertibnya penyelenggara n jasa di bidang komunikasi dan informatika	3	52.753.000		52.153.000		52.153.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	2.10.15.22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	Terpublikasinya Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika	1	36.860.000	1	36.860.000	1 kegiatan	25.810.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
11	2.10.15.23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Terwujudnya isi siaran siaran P3SPS	9	104.508.000	9	52.738.000	9 lembaga	52.738.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
12	2.10.15.24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Terpublikasinya kebijakan pemerintah	12	150.241.000	12	150.241.000	12 kegiatan	150.241.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
13	2.10.15.9	Siaran keliling	Berkembangnya bidang Komunikasi Informasi dan media masa	1	95.722.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
14	2.10.15.7	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Tersedianya acuan dalam pengelolaan menara	1	49.615.000	1	0	3 dokumen	117.450.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
15	2.10.15.18	Pengelolaan Jaringan Sandi	Kelancaran pengamanan berita	12	58.416.000	12	0	12	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
16	2.10.15.26	Gebyar Offair Radio	Terlaksananya Kegiatan pengembangan bakat dan seni	1 Kegiatan		1 Kegiatan	101.172.000	1 Kegiatan	101.172.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik											
	2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			291.746.000		377.347.000		376.597.000				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%									
			Persentase pemenuhan data statistik	90%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.14.15.14	Penyusunan buku data strategis kota Magelang (DSKM)	Terwujudnya pengembangan data/statistik strategis kota magelang	140	55.146.000	140	72.047.000	140 cetakan	72.047.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.14.15.15	Penyusunan Buku Analisis Perkembangan Laju Inflasi Kota Magelang	terwujudnya perkembangan inflasi Kota Magelang	100	49.100.000	100	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
3	2.14.15.16	Penyusunan Buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang	Terwujudnya pengembangan data AIME Kota Magelang	100	77.500.000	100	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
4	2.14.15.13	Manajemen Data Daerah	Jumlah SKPD Terintegrasi dalam DATAGO	25	110.000.000	25	305.300.000	3 dokumen	304.550.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.14.15.18	Pengembangan SIM DATAGO	Jumlah modul terintegrasi	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
6	2.14.15.19	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Kota Magelang	Jumlah SIM SKPD terintegrasi	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
7	2.14.15.20	Penyusunan Profil Gender Kota Magelang	Jumlah profil gender terintegrasi	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
8	2.14.15.21	Pemutakhiran Data dan hasil pembangunan Daerah Kota Magelang	Jumlah bidang pembangunan yang terintegrasi	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
9	2.14.15.22	Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang	Jumlah KK tersesuai	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
10	2.14.15.27	Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang	Jumlah dokumen profil kesejahteraan rakyat	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	
11	2.14.15.24	Penyusunan Data Spasial Kota Magelang	Jumlah sistem informasi geospasial	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
12	2.14.15.23	Penyusunan Raperda Integrasi Data Strategis Kota Magelang	Jumlah raperda	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	2.14.15.25	Penyusunan Buku Statistik Kemiskinan dan Tenaga Kerja Kota Magelang	Jumlah dokumen profil kemiskinan dan tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
14	2.14.15.26	Survey Infrastruktur dan lingkungan Kota Magelang	Jumlah wilayah tersesuai	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
	2.15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian											
	2.15.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			132.901.000		155.136.000		149.964.000				
					120,000,000								
			Ketersediaan SOP persandian	50%									
			Tingkat kapasitas SDM persandian	100%									
			Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	60%									
1	2.15.15.1	Pengelolaan Jaringan Persandian dan Telekomunikasi	Kelacaran komunikasi persandian	12	111.031.000	12	0	12	0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	
2	2.15.15.2	Penyusun Norma Kebijakan dan Standar di Bidang Persandian	Terwujudnya pedoman persandian	1	21.870.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
3	2.15.15.3	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Keamanan jaringan komunikasi	0	0	0	99.660.000	12 bulan	102.173.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	2.15.15.4	Pengelolaan Jaringan Sandi	Keamanan dokumen bersandi	0	0	0	55.476.000	12 bulan	47.791.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	2.15.15.5	Pelaksanaan Persandian di OPD	Sarana dan prasarana persandian yang tercukupi	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.15.15.6	Sosialisasi Penerapan SOP Persandian	Jumlah kegiatan sosialisasi SOP yang dilaksanakan	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
7	2.15.15.7	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP Persandian	Jumlah laporan monitoring yang dikirimkan	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
8	2.15.15.8	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi	Jumlah SKPD yang dilaksanakan pengamanan persandian/jumlah SKPD	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			484.628.000		478.328.000		478.328.000				
			Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1									
			Interoperabilitas antar system informasi	0									
			Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)	30%									
			Cakupan data yang terpusat dan terkendali	60%									
			Persentase PD yang menerapkan e-government	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.10.16.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi	12	89.105.000	12	89.105.000	12 kegiatan	89.105.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Mempertegas Skenario Kemitraan, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	2.10.16.2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	12	395.523.000	12	389.223.000	12 laporan	389.223.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Pemberantasan Korupsi
	2.10.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			0		0		0				
			Peningkatan SDM di bidang kominfo										
			Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi										
1	2.10.17.5	Orientasi komputer	Jumlah SDM Yang memahami Teknologi Informatika	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	
	2.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			402.224.000		166.775.000		166.775.000				
1	2.10.18.6	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	Terpublikasinya kegiatan pembangunan melalui media tradisional	6	334.828.000	6	141.315.000	6 kegiatan	141.315.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.10.18.8	Publikasi Kegiatan Bela Negara	Peningkatan nilai-nilai nasionalisme	1	24.260.000	1	25.460.000	1 kegiatan	25.460.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.10.18.5	Sosialisasi peraturan perundangan tentang pemilu dan pilkada bagi perangkat daerah	Terlaksana Diseminasi peraturan perundangan tentang pemilu dan pilkada perangkat daerah	2	43.136.000	2	0	2	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	
	2.10.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			3.642.747.000		2.741.020.000		2.743.533.000				
1	2.10.19.1	Penyusunan Kamus Data dan E-GIF (E-Government Interoperability Framework)	Tersedianya basis data SIM pelayanan publik	1	495.982.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
2	2.10.19.2	Pembangunan WAN Kota	Terbangunnya WAN Kota	1	2.999.974.000	1	1.832.349.000	1 kegiatan	1.832.349.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.10.19.3	Pengelolaan WAN	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala	12	146.791.000	12	172.567.000	12 bulan	175.080.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	2.10.19.4	Pengelolaan Aplikasi M City	Terkelola dan ter-updatenya Aplikasi Magelang Cerdas	0	0	0	155.269.000	12 bulan	155.269.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	2.10.19.6	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Interoperabilitas Sistem Informasi/Aplikasi	Tersedianya acuan dalam pengelolaan sistem informasi	1		1	44.255.000	1 Raperwal	23.200.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	2.10.19.7	Pengembangan Aplikasi	Terlaksananya paket interoperabilitas sistem informasi	2		2	429.542.000	2 sistem	450.597.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.10.19.8	Perencanaan Command Center	Tersedianya dokumen perencanaan command center	1		1	107.038.000	1 dokumen	107.038.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2.10.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			303.219.000		253.168.000		268.918.000				
1	2.10.20.9	Pelayanan operasional LPSE	Terpublikasinya rencana pengadaan barang dan jasa	1	303.219.000	1	253.168.000	12 bulan	253.168.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Pemberantasan Korupsi
2	2.10.20.12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan					0		0	Kota Magelang	-	0	
3	2.10.20.5	Penyusunan dan Pengadaan Sarana Informasi	Tersedianya Web LPPL Magelang FM					1 web	15.750.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			99.895.000		83.313.000		83.313.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0									
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tecapainya legalitas DataGo sebagai pusat data informasi Pemerintah Kota Magelang	1	99.895.000	1	83.313.000	1 Raperda	83.313.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				TOTAL	10.381.662.000		8.850.936.000		10.584.584.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 URUSAN : Penanaman Modal

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal											
	2.12.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			714.408.000		566.685.000		592.214.000				
1	2.12.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim	94	1.500.000	90	1.449.000	140	2.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	2.12.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik dan internet	12	80.400.000	5	80.400.000	12	93.720.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
3	2.12.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	23	9.140.000	23	7.690.000	23	8.590.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
4	2.12.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Laporan Pengel ola Keuangan Daerah	12	130.503.000	12	97.591.000	12	97.591.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.12.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12	50.248.000	484 m2	52.240.000	12	54.664.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.12.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Adanya ATK	12	20.263.000	67	20.263.000	12	20.263.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.12.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	29.040.000	7	27.590.000	12	27.590.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	2.12.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	4.136.000	7	3.386.000	12	3.386.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	2.12.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	12	7.800.000	3	5.880.000	12	5.880.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.12.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	12	7.440.000	3	6.594.000	12	4.180.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2.12.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan harian pegawai	12	37.608.000	4	28.518.000	12	23.316.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.12.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	140	234.320.000	18	129.090.000	18	139.410.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	2.12.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Jasa tenaga kontrak dan Petugas keamanan	12	97.390.000	12	101.374.000	12	106.204.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	2.12.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	11	4.620.000	11	4.620.000	11	4.620.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.12.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			696.147.000		218.738.000		468.674.000				
1	2.12.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1	10.670.000	0	0	1	18.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Kota Layak Anak
2	2.12.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	26.500.000	3	1.500.000	1	6.500.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.12.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhiya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	23	209.277.000	22	183.338.000	23	193.874.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.12.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	30	10.950.000	15	10.700.000	30	10.700.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.12.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1	36.750.000	7	23.000.000	1	23.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	2.12.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana mebeleur	1	2.000.000	1	200.000	1	200.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.12.2.4	Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya mobil jabatan		0		0		0	DPMPTSP KOTA MAGELANG	Dana Alokasi Umum	34	
8	2.12.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional	1	0	0	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.12.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional	1	400.000.000	0	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	
10	2.12.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	0	0	0	0	0	114.200.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
11	2.12.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gudang dan dapur	1	0	0	0	2	102.200.000	DPMPTSP KOTA MAGELANG	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
12	2.12.2.16	Perencanaan Bangunan Gedung	Tersedianya DED Bangunan Gedung	1		0	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	29	Rencana
	2.12.3	Program peningkatan disiplin aparatur			9.600.000		8.960.000		8.960.000				
1	2.12.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam pakaian dinas	30	9.600.000	28	8.960.000	30	8.960.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	2.12.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			44.390.000		44.417.000		44.417.000				
1	2.12.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Adanya laporan capaian kinerja SKPD	12	10.538.000	12	10.508.000	12	10.508.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	2.12.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan semesteran OPD	1	3.417.000	1	3.445.000	1	3.445.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.12.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis OPD	1	1.897.000	1	1.897.000	1	1.897.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.12.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	3.407.000	1	3.436.000	1	3.436.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
5	2.12.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya RENJA OPD	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
6	2.12.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA , RKA PERUBAHAN SKPD	2	12.497.000	4	12.497.000	2	12.497.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
7	2.12.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	1	4.634.000	1	4.634.000	1	4.634.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2.12.6.26	Evaluasi Rencana Strategis OPD	Tersedianya dokumen evaluasi renstra OPD		0		0		0		Dana Alokasi Umum	55	
	2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			834.162.500		752.143.000		748.926.000				
					737,395,000								
			Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	2									
1	2.12.15.1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya kerjasama antara pelaku usaha besar dan kecil menengah	15	25.000.000		22.974.000		22.974.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.12.15.6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Tersedianya koordinasi dan kerjasama PM	1	23.900.000		22.185.000		22.185.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	2.12.15.8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Tersedianya laporan pemantauan dan pengawasan PM		0		0		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	
4	2.12.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya Pameran Investasi	7	584.150.000		494.270.000		491.053.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.12.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal		0		0		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	
6	2.12.15.12	Penyusunan profil pameran investasi	Tersusunnya Profil Pameran Investasi	7	104.333.500		89.306.000		89.306.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.12.15.14	Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi	Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Promosi Investasi	1	8.000.000		0		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2.12.15.7	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparaturnya Badan Penanaman Modal Daerah	Tersedianya laporan pengawasan PM	6	0	0	0	6	0	DPMPTSP KOTA MAGELANG	Dana Alokasi Umum	40	
9	2.12.15.4	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Terselesaikannya permasalahan PM lintas sektor melalui Tim Task force	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	2.12.15.19	Fasilitasi Pameran Investasi	Tersedianya buku potensi sumberdaya	200	82.879.000	0	0	200	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
11	2.12.15.16	Peningkatan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Laporan Kegiatan penanaman modal		0	4	37.578.000	4	37.578.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
12	2.12.15.17	Pegawasan penyelenggaraan penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pengawasan penanaman modal	6	0	6	0	6	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	
13	2.12.15.15	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	laporan kegiatan penanaman modal	6	0	1	79.930.000	6	79.930.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	2.12.15.18	Penyelenggaraan Forum Investasi	Dokumen Profil Investasi	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			12.536.000		12.536.000		12.536.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip	12	12.536.000	12	12.536.000	12	12.536.000	DPMPSTP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2,12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal											
	2.12.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah			0		0		0				
1	2.12.17.2	Penyusunan Profil investasi	Dokumen Profil Investasi		0		0		0	Kantor Penanaman Modal Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
2	2.12.17.1	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Tersedianya buku potensi sumberdaya	500	0	500	0	500	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			488.372.000		614.575.000		622.253.000				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%									
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	56%									
1	4.1.17.6	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	4	63.126.000	4	61.629.000	4	61.629.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	4.1.17.7	Survey Pelayanan Perijinan	Pelaksanaan survey perizinan	144	341.000.000	120	394.908.000	144	386.253.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi MKSB
3	4.1.17.8	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	Terselesaikannya pelayanan pengaduan masyarakat	100	36.579.000	10	29.229.000	100	29.229.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.1.17.10	Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan	Terpeliharanya sertifikasi ISO 9001	4	39.952.000	4	44.952.000	4	45.402.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB
5	4.1.17.3	Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat	1	7.715.000	3	7.715.000	1	7.715.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi MKSB
6	4.1.17.14	Penertiban pelaksanaan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya pemutihan IMB	200		200	76.142.000	200	76.142.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	66	Rencana
7	4.1.17.20	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Tersusunnya Peraturan Walikota					1	15.883.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Pemberantasan Korupsi
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		0		0				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0									
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya Rancangan Perda		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			0		0		0				
1	2.10.20.7	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Laporan realisasi investasi dalam spipesi	4	0	0	0	4	0	BP2T Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	
2	2.10.20.1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya sistem informasi	2	0	0	0	2	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	
	2,12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal											
	2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			176.903.000		119.050.000		182.176.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%									
			Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15.00%									
			Jumlah investor baru	164									
1	2.12.16.20	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Walikota					1	12.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.12.16.19	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Walikota					1	16.517.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.12.16.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya buku laporan perkembangan iklim investasi	16	7.000.000	16	7.000.000	16	7.000.000	DPMPTSP KOTA MAGELANG	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.12.16.16	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi	5 PMA 1	39.000.000	0	0	5 PMA 15 PM	0		Dana Alokasi Umum	89	
5	2.12.16.12	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Laporan realisasi investasi dalam spipesi	4	12.503.000	1	55.543.000	4	82.670.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Memperkuat Implementasi MKSB
6	2.12.16.13	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya sistem informasi	2	60.000.000	4	12.503.000	2	12.503.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
7	2.12.16.14	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan pengawasan penanaman modal	48	40.000.000	60	25.604.000	75	32.486.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.12.16.15	Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah investor yang mendapat pelatihan	110	18.400.000	60	18.400.000	60	18.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Mempertegas Skenario Kemitraan
				TOTAL	2.976.518.500		2.337.104.000		2.680.156.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

URUSAN : Pemuda dan Olahraga; Pariwisata

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			729.016.000		703.604.000		783.922.000				
1	2.13.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko dan biaya pengiriman surat	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
2	2.13.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya jasa telephone, air, listrik, dan internet	12 bulan	60.060.000	12 bulan	60.060.000	12 bulan	42.960.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
3	2.13.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas	17 unit	12.000.000	17 unit	10.600.000	17 unit	10.600.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
4	2.13.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelola keuangan dan barang	12 bulan	127.239.000	12 bulan	127.239.000	12 bulan	127.839.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
5	2.13.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor tenaga kebersihan dan tersedianya peralatan kebersihan	12 bulan	85.000.000	12 bulan	87.796.000	12 bulan	115.360.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
6	2.13.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	36.750.000	12 bulan	34.350.000	12 bulan	34.350.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
7	2.13.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotokopi	12 bulan	12.289.000	12 bulan	12.289.000	12 bulan	15.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2.13.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan instalasi listrik yang diperlukan	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
9	2.13.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12 bulan	4.500.000	12 bulan	4.500.000	12 bulan	4.500.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
10	2.13.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas elpiji untuk minuman Pegawai	12 bulan	1.782.000	12 bulan	1.782.000	12 bulan	1.782.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
11	2.13.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	33.796.000	12 bulan	33.796.000	12 bulan	33.796.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
12	2.13.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	180.000.000	12 bulan	153.000.000	12 bulan	208.640.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
13	2.13.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honor daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honor daerah/tidak tetap	12 bulan	165.400.000	12 bulan	167.992.000	12 bulan	180.095.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
	2.13.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			829.500.000		287.244.000		1.196.921.000				
1	2.13.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	175.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
2	2.13.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	201.000.000	12 bulan	161.259.000	12 bulan	161.259.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
3	2.13.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
4	2.13.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	16.500.000	12 bulan	16.010.000	12 bulan	16.010.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
5	2.13.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	12 bulan	6.000.000	12 bulan	3.975.000	12 bulan	5.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.13.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	3 unit	500.000.000	3 unit		0 pengangkut sound	504.510.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
7	2.13.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sound system untuk : Aula dan sound system luara ruangan, AC	21 Unit	0	21 Unit		0 21 Unit	80.935.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
8	2.13.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	23 unit	0	23 unit		0 23 unit	100.255.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
9	2.13.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur	60 unit	0	60 unit		0 60 unit	37.175.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
10	2.13.2.3	Pembangunan gedung kantor	Tesedianya bangunan tiang baliho	-	-	-		- 1 unit	110.777.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	2.13.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			65.436.000		65.436.000		65.436.000				
1	2.13.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 dokumen	10.719.000	12 dokumen	10.719.000	12 dokumen	10.719.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
2	2.13.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	2.383.000	1 laporan	2.383.000	1 laporan	2.383.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
3	2.13.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	10 eksemplar	4.033.000	10 eksemplar	4.033.000	10 eksemplar	4.033.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
4	2.13.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD Disporapar	2 dokumen	14.284.000	2 dokumen	14.284.000	2 dokumen	14.284.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	83	Rencana
5	2.13.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA OPD Disporapar	2 dokumen	23.850.000	2 dokumen	23.850.000	2 dokumen	23.850.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
6	2.13.6.9	Penyusunan LAKIP OPD	Tersesunnya LKJIP	1 dokumen	5.518.000	1 dokumen	5.518.000	1 dokumen	5.518.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.13.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Tersedianya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos	4 kegiatan	4.649.000	4 kegiatan	4.649.000	4 kegiatan	4.649.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
8	2.13.6.19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan OPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan OPD	4	0	4	0	4	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
	2.13.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			33.822.000		33.822.000		33.822.000				
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	79%									
			Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional										
			a.???? Propinsi	6 pemuda									
			b.???? Nasional	0 pemuda									
1	2.13.15.2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Terdatanya jumlah organisasi pemuda	50 buku	12.285.000	50 buku	12.285.000	50 buku	12.285.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	2.13.15.5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terselenggaranya pertemuan peningkatan iman dan taqwa generasi muda	200 orang	21.537.000	200 orang	21.537.000	200 orang	21.537.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	76	Rencana
	3,2	Urusan Pilihan Bidang Pariwisata											
	3.2.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			1.741.792.000		1.670.839.000		2.134.197.000				
			Lama Kunjungan Wisatawan	3-Feb									
			Persentase TIC yang representatif	0									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1,136,435									
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5,185									
1	3.2.15.3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kontribusi Java promo	1 kegiatan	85.140.000	1 kegiatan	84.177.000	1 kegiatan	1.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
2	3.2.15.5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya pameran untuk promosi pariwisata kota Magelang	4 event	271.014.000	4 event	302.281.000	4 event	303.378.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
3	3.2.15.7	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Tersedianya database Pariwisata	400 buku	60.000.000	400 buku	49.868.000	400 buku	49.868.000	Lokasi Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
4	3.2.15.9	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Terlaksananya seleksi Duta wisata	14 orang	252.250.000	14 orang	283.922.000	14 orang	283.922.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
5	3.2.15.12	Pekan Seni Pariwisata	Terlaksananya Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	2 kegiatan	498.147.000	2 kegiatan	497.747.000	2 kegiatan	497.747.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
6	3.2.15.13	Pameran Magelang Tempo Doeloe	Terlaksananya Pameran Magelang Tempo Doeloe	1	222.503.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
7	3.2.15.14	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Terlaksananya pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	2 kegiatan	352.738.000	2 kegiatan	352.738.000	2 kegiatan	865.438.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
8	3.2.15.17	DED/Pembangunan Gedung TIC	Tersedianya dokumen perencanaan Gedung TIC	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	32.638.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
9	3.2.15.15	Gelar Wisata Magelang	Terlaksananya Gelar wisata Magelang	1 kegiatan	0	1 kegiatan	100.106.000	1 kegiatan	100.106.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			1.151.103.000		1.122.415.000		1.122.415.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	94.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,65%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terfasilitasinya organisasi pemuda	35 kelompok	206.997.000	35 kelompok	231.912.000	35 kelompok	231.912.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
2	2.13.16.3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Meningkatnya kepedulian pemuda pada lingkungan	150 orang	19.491.000	150 orang	19.491.000	150 orang	19.491.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
3	2.13.16.4	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terfasilitasinya upacara sumpah pemuda dan pengiriman kontingen	2 kegiatan	55.439.000	2 kegiatan	53.744.000	2 kegiatan	53.744.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
4	2.13.16.5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba pada generasi muda tentang bahaya narkoba	300 orang	30.079.000	300 orang	30.079.000	300 orang	30.079.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
5	2.13.16.7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	50 orang	9.390.000	50 orang	8.685.000	50 orang	8.685.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
6	2.13.16.10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Terlaksananya pelatihan pramuka penggalang SMP	180 orang	12.849.000	180 orang	12.849.000	180 orang	12.849.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.13.16.11	Pelatihan PMR SMP	Terlaksananya pelatihan PMR SMP	50 orang	12.784.000	50 orang	12.784.000	50 orang	12.784.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
8	2.13.16.14	Pelatihan pramuka penegak SMA	Terselenggarap elatihan pramuka penegak	80 orang	15.214.000	80 orang	15.214.000	80 orang	15.214.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
9	2.13.16.18	Lomba tata upacara dan PBB (SMP)	Terlaksananya lomba TUB dan PBB SMP/MTs	1 kegiatan	51.271.000	1 kegiatan	51.271.000	1 kegiatan	51.271.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
10	2.13.16.20	Lomba pramuka penggalang SMP	Terlaksananya lomba pramuka penggalang SMP/MTs	1 kegiatan	23.663.000	1 kegiatan	23.663.000	1 kegiatan	23.663.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
11	2.13.16.21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Terlaksananya lomba paskibraka SMA/SMK	40 orang	326.495.000	40 orang	363.835.000	40 orang	363.835.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
12	2.13.16.22	Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK	Terlaksananya lomba TUB dan PBB SMA/SMK	1 kegiatan	75.271.000	1 kegiatan	72.511.000	1 kegiatan	72.511.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
13	2.13.16.23	Lomba pramuka penegak SMA/ SMK	Terpilihnya juara pramuka penegak SMA/SMK	1 kegiatan	18.569.000	1 kegiatan	18.569.000	1 kegiatan	18.569.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
14	2.13.16.25	Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Terlaksananya Trainning of trainner TUB dan BB	75 orang	37.968.000	75 orang	37.968.000	75 orang	37.968.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
15	2.13.16.26	Lomba Paskibraka SMP	Terlaksananya lomba paskibraka SMP	1 kegiatan	185.620.000	1 kegiatan	79.920.000	1 kegiatan	79.920.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
16	2.13.16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	100 orang	18.732.000	100 orang	38.649.000	100 orang	38.649.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
17	2.13.16.6	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah	1 kegiatan	51.271.000	1 kegiatan	51.271.000	1 kegiatan	51.271.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	3,2	Urusan Pilihan Bidang Pariwisata											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.2.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			610.868.000		1.881.088.000		2.027.271.000				
			Destinasi Wisata Unggulan	3									
			Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	44,44%									
1	3.2.16.13	DED/Pembangunan Gardu Pandang 2	Tersedianya dokumen perencanaan Gardu Pandang Gunung Tidar	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000	Gunung Tidar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
2	3.2.16.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	2	100.000.000	2	0	2	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
3	3.2.16.3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Terlaksananya one day tour	1 kegiatan	53.665.000	1 kegiatan	53.050.000	1 kegiatan	53.050.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
4	3.2.16.6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata	3 kegiatan	51.203.000	3 kegiatan	50.127.000	3 kegiatan	50.127.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
5	3.2.16.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata	Tersedianya dokumen perencanaan desa wisata	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	47.000.000	1 dokumen	47.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
6	3.2.16.9	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	Terlaksananya sosialisasi pengembangan desa wisata	2 kegiatan	386.000.000	2 kegiatan	210.911.000	2 kegiatan	210.911.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
7	3.2.16.12	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Terbangunnya Gardu Pandang Gunung Tidar	1 Kawasan	0	1 Kawasan	1.520.000.000	1 Kawasan	1.535.673.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	40	Rencana
8	3.2.16.14	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Bidang pariwisata	Terwujudnya kontruksi bangunan yang sesuai dengan perencanaan	0	0	0	0	1 kawasan	80.510.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	3.2.17	Program Pengembangan Kemitraan			81.418.000		78.313.000		78.313.000				
					660,410,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	9									
1	3.2.17.7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Tersedianya pelaku UJP yang profesional	2 kegiatan	18.819.000	2 kegiatan	18.819.000	2 kegiatan	18.819.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	3.2.17.8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terwujudnya pelaku UJP yang sadar wisata	2 kegiatan	42.599.000	2 kegiatan	39.494.000	2 kegiatan	39.494.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
3	3.2.17.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev	4 kegiatan	20.000.000	4 kegiatan	20.000.000	4 kegiatan	20.000.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			187.401.000		135.153.000		66.201.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0									
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Raperda RIPP	1 raperda	187.401.000	1 raperda	135.153.000	1 raperda	0	Disporapar	Dana Alokasi Umum	34	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.19.65	Evaluasi Naskah Akademis Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Magelang	Terlaksananya Evaluasi Naskah Akademis Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Magelang (Rippakot)		0			1 naskah akademik	66.201.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			4.075.914.000		4.264.635.000		4.419.279.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	7									
			#NAME?	17									
			#NAME?	22									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	NA									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terpilainya dan terbinanya bibit atlit sepakbola,atleti k,renang,panahan dan taekwondo	95 orang	420.000.000		530.543.000		530.543.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.13.20.4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	215 peserta	140.000.000	215 peserta	104.059.000	215 peserta	104.059.000	Disporabudat kota magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
3	2.13.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kompetisi tenes lapangan	84 tim	699.435.000	84 tim	707.005.000	84 tim	707.005.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
4	2.13.20.7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terlaksananya olahraga massal	3000 orang	65.000.000	3000 orang	215.344.000	3000 orang	215.344.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
5	2.13.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya gerak jalan cepat dan lintas alam	1325 orang	260.000.000	1325 orang	288.311.000	1325 orang	288.311.000	Disporapar kota magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
6	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	3 kegiatan	250.000.000	3 kegiatan	175.068.000	3 kegiatan	175.068.000	Disporapar kota magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
7	2.13.20.18	POPDA SD	Terselenggaranya popda dan pengiriman kontingen tingkat karisidenan dan propinsi	550 sisiwa	270.000.000	550 sisiwa	291.503.000	550 sisiwa	291.503.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
8	2.13.20.21	Liga bola basket SMP	Terlaksananya Liga bola basket SMP/MTs	210 orang	45.000.000	210 orang	48.277.000	210 orang	48.277.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
9	2.13.20.22	Liga sepak bola SMP	Terlaksananya Liga sepak bola SMP/MTs	24 sekolah	160.000.000	24 sekolah	104.793.000	24 sekolah	104.793.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
10	2.13.20.25	POPDA SMP	Terlaksananya POPDA SMP dan pengiriman kontingen ke karesidenan dan propinsi	600 orang	325.000.000	600 orang	303.528.000	600 orang	303.528.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2.13.20.26	POPDA SMA/SMK	Terselenggaranya popda tingkat SMA/SMK dan pengiriman kontingen ke tingkat karisidenan dan propinsi	600 siswa	325.000.000		304.496.000		304.496.000	Disporapar kota magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
12	2.13.20.28	Liga sepak bola SMA	Terselenggaranya liga sepak bola SMA/SMK	400 siswa	160.000.000		38.545.000		38.545.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
13	2.13.20.29	Liga bola basket SMA/ SMK	Terselenggaranya bola basket SMA/SMK	360 siswa	45.000.000		45.087.000		45.087.000	Disporapar kota magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
14	2.13.20.35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	153 orang	370.000.000		345.035.000		345.035.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
15	2.13.20.36	Seleksi Beladiri Pelajar	Terselenggaranya seleksi beladiri pelajar	750 siswa	270.000.000		285.086.000		285.086.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
16	2.13.20.13	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Meningkatnya kualitas pelatih dan guru olahraga	30 orang	60.000.000		90.825.000		90.825.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	61	Rencana
17	2.13.20.1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Terlaksananya identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	1 kegiatan	30.000.000		29.920.000		29.920.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
18	2.13.20.32	Pospeda	Terlaksananya Pospeda	1	50.000.000	1	60.862.000	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
19	2.13.20.8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlet yang berprestasi	150 atlet	75.000.000		86.507.000		302.013.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
20	2.13.20.41	Peparpeda	Terlaksananya Peparpeda	1 kegiatan	0		0		0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	2.13.20.40	Penyelenggaraan Walikota Cup	Terlaksananya Kompetisi Golf	1 kegiatan	0	1 kegiatan	99.332.000	1 kegiatan	99.332.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
22	2.13.20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Meningkatnya kesegaran jasmani dan rereasi masyarakat	2 kegiatan	56.479.000	2 kegiatan	110.509.000	2 kegiatan	110.509.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2.13.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			53.928.000		53.928.000		53.928.000				
			Persentase kelompok wirausaha pemuda	50									
1	2.13.17.1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pemuda	1 kegiatan	53.928.000	1 kegiatan	53.928.000	1 kegiatan	53.928.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			0		0		422.912.000				
					4,337,464,000								
			Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4									
			Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	65%									
1	2.13.21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya refitalisasi lapangan olahraga kantor Disporapar	1 Lapangan	0	1 Lapangan	0	1 Lapangan	422.912.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
				TOTAL	9.560.198.000		10.296.477.000		12.404.617.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 URUSAN : Perpustakaan; Kearsipan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			868.394.000		902.634.000		916.948.000				
1	2.17.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	2 jenis	1.953.000	2 jenis	1.953.000	2 jenis	1.953.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.17.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa langganan telepon, listrik, air dan internet	1 tahun	229.200.000	4 jenis	349.200.000	4 jenis	296.400.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.17.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya js perpanjang STNK	1 tahun	7.825.000	11 kendaraan	7.825.000	12 kendaraan	8.750.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.17.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan	1 tahun	141.639.000	12 laporan	137.639.000	12 laporan	137.639.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.17.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	bahan/peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	1 tahun	95.888.000	31 jenis	98.753.000	31 jenis 6 orang	117.074.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.17.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	1 tahun	15.953.000	41 jenis	15.953.000	41 jenis	15.953.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.17.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	12.453.000	15 jenis	12.453.000	15 jenis	12.453.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	2.17.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan lainnya	1 paket	37.120.000	12 jenis	37.120.000	12 jenis	37.120.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	2.17.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik	1 tahun	2.004.000	2 jenis	4.690.000	2 jenis	2.975.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	2.17.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman serta jasa pembuat minum	1 tahun	36.864.000	6 jenis	37.860.000	6 jenis 1 orang	37.530.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.17.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	198.815.000	35 kegiatan	107.028.000	12 bulan	136.220.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.17.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	jasa penjaga malam dan Jasa Sopir	1 tahun	88.680.000	5 orang	92.160.000	8 orang	112.881.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	2.17.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2.889.591.000		340.515.000		1.528.126.000				
1	2.17.2.3	Pembangunan gedung kantor	fasilitas gd depo		0		0			Lingkungan Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	
2	2.17.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang terpelihara	1 tahun	233.242.000	2162m2	102.842.000	2.162m2	102.842.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.17.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	1 tahun	155.290.000	11 unit	149.290.000	12 unit	144.765.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.17.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	42.740.000	7 jenis	40.836.000	7 jenis	40.836.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.17.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 tahun	49.765.000	9 jenis	47.547.000	9 jenis	47.547.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.17.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	8 unit	537.750.000	0		3 spd motor, 1 blind van	225.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	2.17.2.10	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeler kantor	4 unit	792.474.000	0		105 unit 2 jenis	199.584.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
8	2.17.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	27	397.950.000	0		20 unit	179.750.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.17.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	20	680.380.000	0	0	79 unit	587.802.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	2.17.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			39.978.000		39.978.000		39.978.000				
1	2.17.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	dokumen laporan keuangan	1 tahun	11.557.000	4 laporan	11.557.000	4 laporan	11.557.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.17.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	dokumen renja	1 tahun	8.035.000	2 dokumen	8.035.000	2 dokumen	8.035.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.17.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	dokumen RKA	1 tahun	16.232.000	2 dokumen	16.232.000	2 dokumen	16.232.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.17.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	dokumen LKjIP	1 dokumen	4.154.000	1 dokumen	4.154.000	1 dokumen	4.154.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.17.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	tersedianya dokumen RENSTRA		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			12.071.000		12.071.000		12.071.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.28	Pengelolaan website	terkelolanya website secara berkala	1 tahun	12.071.000	1 tahun	12.071.000	1 tahun	12.071.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1.510.380.000		1.289.514.000		1.293.113.000				
					1,106,484,000								
			Persentase peningkatan judul buku	2,57									
			Persentase peningkatan jumlah buku	2,64									
			Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	47,39									
			Presentase perpustakaan aktif	18,96									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	1%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	8.33%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.17.15.2	Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah peserta	300 orang	74.144.000	300 orang	68.454.000	300 orang	68.454.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
2	2.17.15.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	buku perpustakaan yang sesuai klasifikasi	1500 eksplar	134.450.000	1500 eksplar	133.280.000	1500 eksplar	133.280.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
3	2.17.15.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pelayanan perpustakaan sekolah dan kelurahan	25 unit	14.962.000	20 perpustakaan	14.962.000	20 perpustakaan	14.962.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
4	2.17.15.17	Pameran dan bursa buku	jumlah peserta pameran	10000 orang	253.290.000	10000 orang	253.290.000	10000 orang	253.290.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
5	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	jumlah buku terolah	4000 eksplar	34.521.000	2700 eksplar	34.521.000	4000 eksplar	34.521.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
6	2.17.15.30	Orientasi perpustakaan	terselenggaranya orientasi perpustakaan bagi pengelola perpustakaan se Kota Magelang	120 orang	59.775.000	120 orang	58.100.000	120 orang	58.100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
7	2.17.15.31	Lomba perpustakaan	jumlah peserta	143 unit	59.275.000	4 kegiatan	54.075.000	4 kegiatan	54.075.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
8	2.17.15.32	Layanan perpustakaan keliling	laporan pelaksanaan kegiatan keliling	30000 laporan	47.326.000	4 laporan	48.322.000	4 laporan 30.000 org	49.522.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Kota Layak Anak
9	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	61.000 orang	263.908.000	4 laporan	207.456.000	4 laporan 58.000 orang	209.855.000	Dins Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
10	2.17.15.37	Promosi minat baca	jumlah media promosi	2000 orang	76.145.000	4 kegiatan	75.590.000	2000 orang	75.590.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
11	2.17.15.39	Lomba bercerita	meningkatnya kemampuan siswa bercerita	80 siswa	40.800.000	80 siswa	53.092.000	80 siswa	53.092.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	2.17.15.42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	terselenggarakan pelatihan ketrampilan bagi pelajar dan masyarakat	150 orang	34.649.000	14 kegiatan	34.025.000	14 kegiatan	34.025.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
13	2.17.15.44	Lomba literasi	jumlah peserta	60 siswa	26.600.000	60 siswa	25.608.000	60 siswa	25.608.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
14	2.17.15.47	Penyusunan Buletin	penyebarkan luasan informasi	2 buku	30.960.000	2 buletin	20.860.000	2 buletin	20.860.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
15	2.17.15.21	Lomba sinopsis	terselenggarakan lomba sinopsis bagi pelajar smp se Kota Magelang	80 siswa	34.450.000	80 siswa	36.234.000	80 siswa	36.234.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
16	2.17.15.48	Survey Minat Baca	Hasil survey kajian minat baca	100	0	100	0	100	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	
17	2.17.15.49	Penyusunan Peraturan tentang Perpustakaan	Penyusunan peraturan walikota		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	35	
18	2.17.15.50	Pelayanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja	pelayanan bimbingan belajar bagi siswa yang kurang mampu	3	50.000.000	3	0	3	0		Dana Alokasi Umum	40	
19	2.17.15.46	Workshop Bercerita	terselenggarakan workshop bercerita untuk guru SD se Kota Magelang	95 orang	29.275.000	90 orang	27.675.000	90 orang	27.675.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
20	2.17.15.35	Seminar Lingkar Pena	Terselenggarakan seminar lingkaran pena bagi pelajar, mahasiswa dan umum	150 orang	31.550.000	150 orang	31.000.000	150 orang	31.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
21	2.17.15.12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	peningkatan kualitas layanan	1 buah	18.600.000	1 buah	15.000.000	100%	15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	2.17.15.3	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	terbinanya perpustakaan se Kota Magelang	71	0	71	0	71	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
23	2.17.15.6	Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca	terselenggaranya koordinasi pengembangan budaya baca	175	0	175	0	175	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
24	2.17.15.8	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	pengenalan fungsi perpustakaan	5	0	5	0	5	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
25	2.17.15.38	Pembuatan pojok baca di tempat strategis	terciptanya administrasi TBM sesuai standar perpustakaan	30 lokasi	16.000.000	1 lokasi	13.700.000	1 lokasi	13.700.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Kota Layak Anak
26	2.17.15.15	Lomba penelusuran informasi	pengenalan koleksi perpustakaan	100	0	100	0	100	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	
27	2.17.15.22	Bedah buku	-		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	
28	2.17.15.23	Pemilihan duta baca	terpilihnya duta baca		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	55	
29	2.17.15.27	Lomba pembuatan puisi	terselenggaranya lomba puisi bagi pelajar SD se Kota Magelang	65 orang	28.775.000	65 orang	0	65 orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
30	2.17.15.34	Fasilitasi Taman Bacaan	tersedianya buku bacaan dan administrasi perpustakaan bagi TBM seKota Magelang	24	0	24	0	24	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	
31	2.17.15.51	Penyelenggaraan Workshop Penulisan Artikel	Terselenggaranya workshop menulis artikel untuk pelajar SLTP dan SLTA	65 orang	29.325.000	65 peserta	27.267.000	65 peserta	27.267.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	2.17.15.52	Penyelenggaraan Lomba Pengelolaan Perpustakaan	Terselenggaranya lomba fiksi bagi pelajar SMP se Kota Magelang	50 orang	32.600.000	50 orang	31.705.000	50 orang	31.705.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
33	2.17.15.53	Resensi Buku	jumlah koleksi buku yang di resensi	3000 buku	56.400.000	100 buku	25.298.000	100 buku	25.298.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
34	2.17.15.54	Penyusunan buku kearifan lokal	tersedianya buku buku tentang kearifan lokal	2	0	2	0	2	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	
35	2.17.15.55	Workshop penulisan fiksi	Terselenggaranya pelatihan workshop penulisan fiksi bagi siswa SMP se Kota Magelang	60	0	60	0	60	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	
36	2.17.15.56	lomba pengelolaan perpustakaan terbaik	terselenggaranya lomba perpustakaan se Kota Magelang	60	32.600.000	60	0	60	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
37	2.17.15.27	Lomba pembuatan puisi	terselenggaranya lomba puisi bagi pelajar SD se Kota Magelang		0		0		0		Dana Alokasi Umum	50	
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			596.919.000		494.545.000		531.891.000				
					1,097,069,000								
		SETWAN	12 bln		25,599,000								
		DPPKD			136,130,000								
		KESBANGPOL			25,988,000								
		BKD			15,000,000								
		DPP			23,482,000								
		LITBANG			40,000,000								
		PERPUS			191,243,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.16	Penyusunan peraturan walikota tentang kearsipan	Penyusunan Peraturan Walikota tentang JRA	160 buku	30.136.000	160 buku	29.611.000	160 buku	29.611.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	tertatanya arsip depo sesuai aturan yang berlaku	150 dos	142.475.000	150 dos	136.246.000	150 dos	169.994.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
3	2.18.16.5	Akuisisi Arsip	jumlah arsip yang tertata	150 dos	150.975.000	150 dos	140.946.000	150 dos 500 foto	144.544.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
4	2.18.16.8	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi	78 opd	43.338.000	29 OPD	27.926.000	29 opd	27.926.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
5	2.18.16.10	Fasilitasi Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Terwujudnya tertib administrasi pembangunan gedung sesuai kontrak yang ada	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	35	
6	2.18.16.3	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	tersedianya salinan arsip sebagai penambahan kasanah arsip statis	750 CD/DVD	116.087.000	1000 CD/DVD	91.315.000	1000 CD/DVD	91.315.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
7	2.18.16.12	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	Terseleamatkannya a arsip statis DPRD Kota Magelang	1 buku	29.334.000	10 buku	20.112.000	10 buku	20.112.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2.18.16.13	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	pedoman klasifikasi arsip Pemerintah Kota Magelang	1	29.334.000	1	0	1	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
9	2.18.16.7	Pemusnahan Arsip	terjaminya kemanan fisik dan informasi arsip		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
10	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	terwujudnya tertib administrasi kearsipan		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
11	2.18.16.11	Preservasi Arsip	Terselamatkanya arsip statis DPRD Kota Magelang	500 data	55.240.000	500 lembar	48.389.000	500 lembar	48.389.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2.18.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			160.624.000		151.297.000		168.747.000				
			PERPUS		95,154,000								
			Cakupan pelayanan akses arsip	67%									
			Tingkat Komptensi SDM Pengelola Kearsipan	39%									
1	2.18.18.4	Orientasi arsip dinamis aktif	meningkatnya kemampuan SDM pengelola kearsipan	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
2	2.18.18.8	Pendokumentasian Kota Magelang	terwujudnya dokumentasi Kota Magelang	100 buku	71.934.000	100 buku	63.094.000	100 buku	63.094.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.18.18.10	sosialisasi kearsipan	meningkatnya pengetahuan tentang pentingnya arsip bagi kepala OPD	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.18.18.6	Orientasi Otomasi Kearsipan	meningkatnya kemampuan SDM pengelola kearsipan dibidang arsip	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
5	2.18.18.2	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap arsip	1 ruang pameran	46.925.000	9 set	46.925.000	9 set	64.375.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	2.18.18.5	Orientasi arsip dinamis in aktif	meningkatnya kemampuan SDM pengelola kearsipan	74 unit kerja	41.765.000	74 unit kerja	41.278.000	74 unit kerja	41.278.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2.18.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			64.216.000		36.366.000		36.366.000				
			DKPT		5,000,000								
			PERPUS		50,000,000								
			Presentase implementasi e-arsip	34%									
			Persentase ketersediaan sarpras arsip	20%									
1	2.18.15.8	Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)	tersedianya data base informasi kearsipan	1 paket	64.216.000	1 paket	36.366.000	1 paket	36.366.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.18.15.2	Pengumpulan data	terkumpulnya data arsip / dokumen yang akan diklasifikasi		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
3	2.18.15.3	Pengklasifikasikan data	tertatanya arsip / dokumen yang diklasifikasi		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
4	2.18.15.4	Penyusunan sistem katalog data	tersusunya sistem katalog data arsip		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2.18.15.6	Kajian sistem administrasi kearsipan	terukurnya efektifitas sistem administrasi kearsipan		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
6	2.18.15.7	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	terpeliharanya peralatan jaringan informasi	1	0	1	0	1	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	
	2.18.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			151.878.000		174.278.000		174.278.000				
			PERPUS		25,000,000								
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,4									
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terpeliharanya peralatan kearsipan	10 unit	7.600.000	10 unit	30.000.000	10 unit	30.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	2.18.17.2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	terpeliharanya peralatan kearsipan	750 dos	26.414.000	750 dos	26.414.000	750 dos	26.414.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
3	2.18.17.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	terpantau dan tertatanya arsip di SKPD	74 unit kerja	117.864.000	74 unit kerja	117.864.000	74 unit kerja	117.864.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
			TOTAL		6.294.051.000		3.441.198.000		4.701.518.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Pertanian dan Pangan
 URUSAN : Pertanian, Kelautan dan perikanan; Pangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			911.893.000		826.971.000		893.461.000				
1	3.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko	865	2.595.000	865	2.595.000	865	2.595.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
2	3.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, telpon dan internet	12	171.000.000	12	171.000.000	12	188.700.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
3	3.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional	47	13.520.000	47	13.520.000	47	13.520.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
4	3.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12	114.650.000	12	114.650.000	12	114.650.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
5	3.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	24	54.182.000	24	56.174.000	24	58.573.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
6	3.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	39	33.098.000	39	33.098.000	39	33.098.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
7	3.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13	17.902.000	13	17.877.000	13	17.877.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
8	3.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8	12.499.000	8	12.499.000	8	12.499.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	3.3.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4	3.259.000	4	3.154.000	4	3.154.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
10	3.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan majalah	12	4.620.000	12	4.620.000	12	4.620.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
11	3.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM RPH dan tabung gas kantor	1460	21.728.000	1460	21.603.000	1460	21.603.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
12	3.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan Dinas	12	37.460.000	12	43.050.000	12	43.050.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
13	3.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	84	294.050.000	84	195.825.000	84	235.020.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magel	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
14	3.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/honorar	12	131.330.000	12	137.306.000	12	144.502.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
	3.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			670.061.000		387.585.000		1.167.563.000				
1	3.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala gedung kantor	2	43.108.000	2	48.103.000	2	163.963.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
2	3.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47	314.182.000	47	314.082.000	47	364.082.000	Dinas pertanian peternakan dan perikanan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
3	3.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33	15.000.000	33	15.800.000	33	15.800.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	3.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
5	3.3.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terpasangnya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	1	2.700.000	1	2.700.000	1	2.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	3.3.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	112.908.000	0	0	0	199.048.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	3.3.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	0	11.400.000	0	0	0	100.228.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
8	3.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	16	92.600.000	16	0	16	123.914.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
9	3.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianyaalat pendukung keamanan	1	73.363.000	1	0	1	190.928.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	96	ExBAU
10	3.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala perlengkapan gedung kantor	100 %		100 %	2.100.000	100 %	2.100.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	80	ExBAU
	3.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			12.506.000		5.750.000		5.750.000				
1	3.3.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8	12.506.000	8	5.750.000	8	5.750.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	3.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			90.905.000		74.717.000		74.717.000				
1	3.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	9.820.000	12	9.820.000	12	9.820.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3.3.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2	6.381.000	2	4.381.000	2	4.381.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	3.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4	5.627.000	4	5.627.000	4	5.627.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	3.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	2	9.438.000	2	7.043.000	2	7.043.000	Dinas pertanian dan pangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	3.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya renja	2	8.426.000	2	5.700.000	2	5.700.000	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
6	3.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA	30	46.101.000	30	39.146.000	30	39.146.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
7	3.3.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Tersusunnya Renstra		0		0		0	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
8	3.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)	10	5.112.000	10	3.000.000	10	3.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	2,3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan											
	2.3.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			1.074.927.000		437.672.000		462.022.000				
			Jumlah regulasi ketahanan pangan	1									
			Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	92%									
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%									
1	2.3.15.1	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya pertemuan tim SKPG dan pembinaan kepada masyarakat terhadap sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1	24.126.000	1	17.850.000	1	17.850.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	106	SDGs
2	2.3.15.3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya data konsumsi pangan masyarakat	340	26.749.000	340	28.050.000	340	28.050.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Penanggulangan Kemiskinan
3	2.3.15.4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Tersedianya data neraca bahan makanan	1	7.904.000	1	7.834.000	1	7.834.000	kota Magelang	Dana Alokasi Umum	106	Tema RKPD 2019
4	2.3.15.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Dokumen	12	38.613.000	12	0	12	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	74	
5	2.3.15.9	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan pekarangan	20	17.402.000	20	15.952.000	60	15.952.000	Kota Magelang	DBHCHT	91	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
6	2.3.15.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Laporan harga pasar komoditas pertanian	12	14.530.000	12	0	12	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	
7	2.3.15.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya lomba menu B2SA dan pelatihan	120	54.756.000	120	0	120	0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94	
8	2.3.15.15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Luas lahan yang diintensifkan	15	175.475.000	15	0	15	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.3.15.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Terlaksananya pembinaan budidaya aneka ragam sayuran/tanaman pangan alternatif (lokal)	1	32.382.000		32.382.000		48.932.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	76	Penanggulangan Kemiskinan
10	2.3.15.21	Pengembangan sistem informasi pasar	Pemantauan pasokan dan harga pangan strategis	3 pasar 17 kelurahan 9 agen/distributor pangan	16.661.000	3 pasar 17 kelurahan 9 agen/distributor pangan	19.961.000	3 pasar 17 kelurahan 9 agen/distributor pangan	27.761.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Mempertegas Skenario Kemitraan
11	2.3.15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan uji laboratorium mutu dan keamanan pangan	2	38.453.000		37.903.000		63.903.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Mempertegas Skenario Kemitraan
12	2.3.15.27	Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya	jumlah bibit tanaman siap aklimatisasi	8000	95.732.000	8000	0	8000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	
13	2.3.15.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya pengolahan pangan lokal dan festival pangan lokal	4	102.883.000	4	248.976.000	4	222.976.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Penanggulangan Kemiskinan
14	2.3.15.34	Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida	jumlah Kelompok tani dan kios petani	22	29.007.000	22	0	22	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	
15	2.3.15.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Terlaksananya sosialisasi ketersediaan pangan di masyarakat	1	29.781.000	1	18.050.000	1	18.050.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	95	Penanggulangan Kemiskinan
16	2.3.15.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring toko tani indonesia (TTI)	1	10.714.000	1	10.714.000	1	10.714.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	81	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	2.3.15.35	Pengembangan Urban Farming	Jumlah peserta pelatihan	180	359.759.000	180	0	180	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			14.208.000		9.400.000		0				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggara n pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.28	Pengelolaan website	data informasi berbasis website	48	14.208.000	48	9.400.000	48	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			204.602.000		865.214.000		881.186.000				
			Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	4									
1	3.3.15.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah peserta pelatihan	90	169.252.000	90	207.260.000	90	207.260.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Penanggulangan Kemiskinan
2	3.3.15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Dokumen RDKK dan Lomba Kelompok tani	2	35.350.000	2	24.059.000	2	24.059.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3.3.15.6	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Jumlah kelompok tanaman hortikultura	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	53	
4	3.3.15.7	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	Jenis tanaman yang terpelihara di kebun bibit senopati	jenis		jenis	385.403.000	jenis	401.375.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	104	Kota Sejuta Bunga
5	3.3.15.8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	Prosentase sarpras kebun bibit terpelihara	100 %		100 %	248.492.000	100 %	248.492.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	106	Memperkuat Implementasi MKSB
	3,4	Urusan Pilihan Bidang Kehutanan											
	3.4.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan			0		0		0				
1	3.4.15.6	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Jumlah pengunjung gunung tidar		0		0		0	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	90	
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			39.574.000		0		0				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%									
1	4.3.15.20	Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan	buku database dan profil pertanian dan pangan	1	39.574.000	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			34.611.000		34.611.000		34.611.000				
					1,097,069,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah					0		0	Kota Magelang	-	0	
2	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pengelolaan arsip aktif dan non aktif	2	34.611.000		34.611.000		34.611.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			438.531.000		352.536.000		337.541.000				
			Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	1%									
			Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	10									
1	3.3.16.2	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Jumlah pelaksanaan pasar tani	6	194.203.000		194.203.000		194.203.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	3.3.16.7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	jumlah keikutsertaan pameran tingkat regional dan nasional	3	110.000.000		109.425.000		94.430.000	Dinas Pertanian Peternakan dan perikanan	Dana Alokasi Umum	81	Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3.3.16.12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan	Frekuensi pembinaan pelaku usaha pertanian	0	41.328.000	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	104	
4	3.3.16.10	pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Jumlah laporan informasi pasar	12	93.000.000	12	0	12	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
5	3.3.16.14	Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah peserta pelatihan	90 orang		90 orang	48.908.000	90 orang	48.908.000	Kota magelang	DBHCHT	80	Penanggulangan Kemiskinan
	3,4	Urusan Pilihan Bidang Kehutanan											
	3.4.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan			0		0		0				
1	3.4.16.4	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	Jumlh obyek konservasi yang terpelihara		0		0		0	Kawasan Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	85	
2	3.4.16.5	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pelestarian gunung tidar dan sadar wisata		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			109.821.000		247.278.000		261.927.000				
			DISPETERIKAN	1	171,500,000								
			Luas lahan pertanian organik	0,94									
			Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	45%									
1	3.3.17.9	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Terlaksananya pelatihan pasca panen	keg		keg	34.524.000	keg	34.524.000	Kota magelang	DBHCHT	80	Penanggulangan Kemiskinan
2	3.3.17.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah sosialisasi	7	32.821.000	7	32.821.000	7	32.821.000	Kota Magelang	DBHCHT	84	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.3.17.6	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Luas tanam sawah organik	1,5	37.117.000	1,5	30.008.000	1,5	30.008.000	Kota Magelang	DBHCHT	69	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	3.3.17.5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah petani terlatih per tahun	40	39.883.000	40	20.830.000	40	20.830.000	Kota Magelang	DBHCHT	99	Penanggulangan Kemiskinan
5	3.3.17.8	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	Jumlah bibit tanaman siap aklisasi	8000 bibit		8000 bibit	129.095.000	8000 bibit	143.744.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	80	Memperkuat Implementasi MKSB
	3.3.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			578.460.000		643.124.000		744.972.000				
			Padi	3201									
			Jagung	11									
			Ubi kayu	13,5									
1	3.3.18.28	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	Jumlah kelompok tani dan kios petani	petani dan kios		petani dan kios	29.007.000	petani dan kios	52.257.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	105	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	3.3.18.1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta pelatihan menuju organik	25	44.214.000	25	44.114.000	25	44.114.000	Kota Magelang	DBHCHT	86	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.3.18.23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	Jumlah bibit tanaman hortikultura	7000	417.638.000	7000	0	7000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	
4	3.3.18.25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah pemeliharaan JITU	1	116.608.000	1	116.108.000	1	116.108.000	Dinas Pertanian	Dana Alokasi Umum	71	Mempertegas Skenario Kemitraan
5	3.3.18.26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Dokumen	12 dok		12 dok	23.213.000	12 dok	23.213.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	105	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	3.3.18.27	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Luas lahan yang diintensifkan	15 ha	Furban	15 ha	39.144.000	15 ha	39.144.000	Kota magelang	DBHCHT	106	Penanggulangan Kemiskinan
7	3.3.18.29	Pengembangan Urban Farming	Jumlah peserta pelatihan	180		180	391.538.000	180	470.136.000	Kota magelang	DBHCHT	104	Penanggulangan Kemiskinan
	3.3.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			16.500.000		16.050.000		16.050.000				
			Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	5,88%									
			Rasio petani terlatih	85%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3.3.19.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh pertanian swadaya terlatih	30	16.500.000	30	16.050.000	30	16.050.000	Kota Magelang	DBHCHT	74	Penanggulangan Kemiskinan
2	3.3.19.3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan		0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	
	3,1	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan											
	3.1.20	Program pengembangan budidaya perikanan			803.631.000		596.748.000		626.086.000				
			Produksi hasil perikanan:										
			Produksi Ikan	160,65									
			Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	0									
			Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	30%									
1	3.1.20.1	Pengembangan bibit ikan unggul	Produksi ikan	162,41	23.950.000	162,41	22.080.000	162,41	22.080.000	Kota Magelang	DBHCHT	90	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	3.1.20.2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Prosentase unit pembudidaya ikan yg telah bersertifikat cbib	40	54.350.000	40	50.545.000	50	50.545.000	Kota Magelang	DBHCHT	85	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.1.20.3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Prosentase unit pembudidaya ikan yg telah bersertifikat cbib	40	30.471.000	40	30.171.000	40	30.171.000	Kota Magelang	DBHCHT	91	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	3.1.20.25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Prosesentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikat cbib	50	127.465.000	50	169.805.000	50	199.143.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
5	3.1.20.26	Pelatihan Ikan Hias	Prosentase unit pembudidaya ikan yg telah bersertifikat cbib	30	34.672.000	30	34.147.000	30	34.147.000	Kota Magelang	DBHCHT	95	SDGs
6	3.1.20.27	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI	2	359.625.000	2	250.000.000	2	250.000.000	BBI Jurangombo dan BBI Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
7	3.1.20.24	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan (DAK)	Luas lahan perikanan organik	0,3	123.098.000	0,3	0	0,3	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	99	
8	3.1.20.29	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	Luas lahan perikanan organik	0,3	50.000.000	0,3	40.000.000	0,3	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			319.986.800		352.265.000		437.699.000				
			Persentase hewan sehat	83									
1	3.3.20.1	Pendataan masalah peternakan	Data peternakan dan penyakit hewan serta ternak	1	16.613.000	1	16.013.000	1	16.013.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	3.3.20.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan yang ditangani	1400	52.850.000	1400	70.682.000	1400	71.846.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	3.3.20.4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah lalu lintas hewan yang diperiksa	360	44.979.000	360	44.487.000	360	46.886.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dana Alokasi Umum	94	Mempertegas Skenario Kemitraan
4	3.3.20.6	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong	4350	34.132.000	4350	28.556.000	4350	28.556.000	Disperpa Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	3.3.20.7	Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan	Jumlah bahan/perlengkapan labkeswan	2	23.994.800	2	19.100.000	2	48.257.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	3.3.20.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	jumlah bahan/perlengkapan Puskesmas	2	22.780.000	2	7.650.000	2	7.650.000	Jl.Pahlawan No 8 Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
7	3.3.20.10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	jumlah hewan terperiksa	300	124.638.000	300	165.777.000	300	175.373.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
8	3.3.20.8	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	rehabilitasi puskesmas	1 paket		1 paket	0	1 paket	43.118.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	80	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	3.3.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan			47.645.000		37.150.000		37.150.000				
			Daging Ruminansia	1.177.418									
			Daging Unggas	5.122.583									
			Telur	420,000									
			Susu	193,800									
1	3.3.21.2	Pembibitan dan perawatan ternak	jumlah ternak yang dipelihara	14	11.700.000	14	11.700.000	14	11.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	3.3.21.8	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah pelatihan agribisnis peternakan	3	24.695.000	3	15.000.000	3	15.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	101	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.3.21.20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Jumlah ternak yang diinseminasi	60	11.250.000	60	10.450.000	60	10.450.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3,1	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan											
	3.1.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan			0		0		0				
			Luas lahan perikanan organik	0,2									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3.1.22.3	Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan	Penyuluhan pengelolaan bidang perikanan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	75	
2	3.1.22.2	Penyediaan sarana dan prasarana Penyuluhan / Statistik Perikanan (DAK)	Luas lahan Perikanan Organik	0,3	0	0,3	0	0,3	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			231.301.000		365.504.000		366.668.000				
			Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	1,82									
1	3.3.22.7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Pameran/bursa peternakan	3	105.374.000	3	257.694.000	3	257.694.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Mage	Dana Alokasi Umum	90	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	3.3.22.8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Jumlah usaha peternakan	4	28.967.000	4	28.967.000	4	28.967.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.3.22.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah laporan informasi pasar	16	32.669.000	16	33.185.000	16	34.349.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Mempertegas Skenario Kemitraan
4	3.3.22.11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	Pembinaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan	3	24.291.000	3	21.150.000	3	21.150.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	105	Penanggulangan Kemiskinan
5	3.3.22.12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	Pembinaan pelaku usaha pasca panen peternakan	3	10.000.000	3	9.508.000	3	9.508.000	kota magelang	DBHCHT	105	Penanggulangan Kemiskinan
6	3.3.22.14	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	Prosentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikat nk	2,42	15.000.000	2,42	0	2,42	0		Dana Alokasi Umum	96	
7	3.3.22.14	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	Prosentase pelaku usaha peternakan yang telah bersertifikat NKV	2,42	15.000.000	2,42	15.000.000	2,42	15.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	100	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3,1	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan											
	3.1.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			374.362.000		231.841.000		270.999.000				
					463,602,000								
			Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP	0									
			Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	2									
1	3.1.23.12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3	34.334.000		16.363.000		16.363.000	Kota Magelang	DBHCHT	81	Penanggulangan Kemiskinan
2	3.1.23.13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Terselenggaranya operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	1	43.242.000		43.394.000	4 keg	55.502.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.1.23.14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3	47.393.000		47.389.000		48.589.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Penanggulangan Kemiskinan
4	3.1.23.2	Pengembangan instalasi listrik di Pasar Benih Ikan/Hias	Tingkat konsumsi ikan	19,46	123.098.000	19,46	0	19,46	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	91	
5	3.1.23.15	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	Tingkat Konsumsi ikan	19,46	126.295.000	19,46	124.695.000	19,46	150.545.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			156.675.000		44.250.000		44.250.000				
			DISPETERIKAN		58,500,000								
			DISPETERIKAN		105,201,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah pelaku usaha peternakan organik:										
			Peternak ayam buras/ ayam broiler	1									
			Peternak kelinci	1									
			Peternak kambing/domba	1									
			Rasio peternak terlatih	85%									
1	3.3.23.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Tersedianya sarana dan prasarana RPH	1	45.375.000	1	0	1	0	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	
2	3.3.23.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Jumlah penyuluhan paska panen peternakan	3	26.500.000	3	23.800.000	3	23.800.000	Kota Magelang	DBHCHT	75	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.3.23.5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kegiatan pelatihan	3	20.450.000	3	20.450.000	3	20.450.000	Kota Magelang	DBHCHT	75	Penanggulangan Kemiskinan
4	3.3.23.8	Urban farming (peternakan)	Peternakan ayam buras/ayam broiler, kelinci, peternak kambing/domba	6	64.350.000	6	0	6	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	100	
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			186.784.000		0		0				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	luas RTH yang dipelihara	3550	186.784.000	3550	0	3550	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner			6.381.083.000		400.043.000		507.503.000				
					1,625,606,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	1,82%									
1	3.3.24.1	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	Jumlah pengujian laboratorium kesmavet	12	32.319.000	12	33.315.000	12	35.515.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	3.3.24.2	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	Sosialisasi pangan asuh	1	27.907.000	1	27.507.000	1	27.507.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.3.24.3	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	Jumlah operasi penertiban penjualan daging dan hasil ternak dari luar daerah	4	45.945.000	4	44.595.000	4	57.043.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	3.3.24.5	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesmavet	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong untuk menghasilkan daging yang asuh	4350	239.451.000	4350	260.665.000	4350	270.259.000	Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	3.3.24.7	Pembinaan Pelaku Usaha Potongan di RPH	Pembinaan pelaku usaha di RPH	4	35.461.000	4	33.961.000	4	33.961.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Penanggulangan Kemiskinan
6	3.3.24.4	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)	Rehab RPH	1	3.000.000.000	1	0	1	0	RPH Kota Magelang	DBHCHT	86	
7	3.3.24.6	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	Terpenuhinya sarpras RPH (pengolah pupuk organik)	1	3.000.000.000	1	0	1	83.218.000	RPH Kpta Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			755.223.000		1.478.052.000		1.502.688.000				
			Indeks Kualitas Air,	76%									
			Indeks Kualitas Udara	78%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Indeks Tutupan Hutan	48%									
			Jumlah SDA yang terkonservasi	47,7									
			Jenis flora	8 Jenis									
			Jenis fauna	2 Jenis									
1	2.5.17.4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Jenis flora dan fauna dan tersedianya kebun kecil/bibit/penangkaran	13	384.694.000	13	1.023.296.000	13	1.018.224.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	106	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.5.17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah pengunjung/wisatawan ke Gn. Tidar	90000	129.696.000	90000	198.501.000	90000	228.209.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	105	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.5.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah orang yang dibina dalam pelestarian gunung tidar dan sadar wisata	250	28.751.000	250	28.751.000	250	28.751.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	90	Mempertegas Skenario Kemitraan
4	2.5.17.7	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Tertatanya drainase dan resapan air di kawasan gunung tidar	200	212.082.000	200	227.504.000	200	227.504.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
				TOTAL	13.453.289.800		7.406.761.000		8.672.843.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 URUSAN : Koperasi dan UKM; Perindustrian; Perdagangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.676.518.000		1.673.462.000		1.817.885.000				
1	3.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12	4.802.000	12	4.802.000	12	4.802.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	3.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening komunikasi, air, listrik dan layanan	4	497.280.000	4	539.796.000	4	601.296.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	3.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan	70	45.925.000	70	45.925.000	70	48.675.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
4	3.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12	240.000.000	12	240.000.000	12	253.740.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	3.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	78.660.000	12	82.644.000	12	87.441.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	3.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	37	41.000.000	37	32.820.000	37	32.820.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	3.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blanko cetakan, penggandaan dan penjilidan	11	41.000.000	11	20.368.000	11	22.368.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
8	3.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	23.457.000	11	24.581.000	11	26.049.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	3.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan bahan bacaan	12	11.880.000	12	11.880.000	12	11.880.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
10	3.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan tabung gas dan tabung pemadam kebakaran	12	15.025.000	12	15.024.000	12	22.134.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	3.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan jasa pembuat minum	12	81.419.000	12	82.418.000	12	75.206.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
12	3.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya lintas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	200.000.000	12	170.000.000	12	213.400.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	3.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penyediaan tenaga honorer/tidak tetap dan jasa penjaga malam	12	176.870.000	12	184.004.000	12	192.399.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	3.7.1.20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	PBB Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	2	200.600.000	2	200.600.000	2	200.600.000	Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
15	3.7.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	12	18.600.000	12	18.600.000	12	18.600.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
16	3.7.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	2 jenis		2 jenis		2 jenis	6.475.000	Kantor Disperindag	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	3.7.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.053.440.000		740.558.000		852.891.000				
1	3.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan bahan bangunan dan jasa pemeliharaan gedung	12	101.478.000	12	101.179.000	12	117.612.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	3.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	538.478.000	12	538.478.000	12	538.478.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
3	3.7.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10 jenis perlengkapan yang dipelihara	25	10.872.000	25	10.872.000	25	10.872.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	3.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24 peralatan yang terawat	12	24.729.000	12	24.729.000	12	45.229.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	3.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	30 buah mebelair yang terpelihara	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	3.7.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Jaringan instalasi listrik	0	0	0	0	1 paket	10.000.000	Pasar Sidomukti	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
7	3.7.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah rak arsip	46	0	46	0	2 buah	12.750.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	3.7.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	15	0	15	0	2 jenis	42.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
9	3.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	29	312.583.000	29	0	2 buah	10.650.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
10	3.7.2.33	Pengadaan Papan Informasi	Jumlah papan informasi	2	61.800.000	2	61.800.000	2	61.800.000	Pasar Rejowinangun dan Pasar Kebonpolo	Dana Alokasi Umum	76	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	3.7.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			94.721.000		156.001.000		156.001.000				
1	3.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan triwulanan, RF, LKPJ, LPPD	18	16.800.000	18	16.800.000	18	16.800.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	3.7.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan dan prognosis	2	11.314.000	2	11.314.000	2	11.314.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	3.7.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan dan prognosis	2	10.600.000	2	10.600.000	2	10.600.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	3.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah rencana kerja SKPD	2	6.571.000	2	6.571.000	2	6.571.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
5	3.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2	29.281.000	2	29.281.000	2	29.281.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
6	3.7.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Jumlah rekomendasi dan laporan monev	4	13.720.000	4	75.000.000	4	75.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Penanggulangan Kemiskinan
7	3.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	1	6.435.000	1	6.435.000	1	6.435.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	3.7.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen renstra	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	49	
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			166.164.000		206.428.000		206.428.000				
			DISKOPERINDA G		274,308,000								
			Persentase peningkatan kualits pelaku UKM	3%									
			Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%									
1	2.11.15.8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah sertifikat	2	84.557.000	2	82.217.000	2	82.217.000	Kota Magelang	DBHCHT	74	Mempertegas Skenario Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan
2	2.11.15.18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	Jumlah UMKM yang dibina	155	0	155	63.798.000	155	63.798.000	Kota Magelang	DBHCHT	71	Program 100-0-100
3	2.11.15.23	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	Jumlah UMKM yang dibina	300	40.000.000	300	39.903.000	300	39.903.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	79	Mempertegas Skenario Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan
4	2.11.15.21	Sarasehan Forum UMKM	Jumlah peserta sarasehan	300	20.607.000	300	20.510.000	300	20.510.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	81	Mempertegas Skenario Kemitraan
5	2.11.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	3	21.000.000	3	0	3	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	39	
	3,6	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.6.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			1.275.422.000		1.091.674.000		1.086.767.000				
					3,885,629,000								
			Jumlah alat UTP yang ditera	2,700									
			Data & informasi cukai palsu/ilegal	NA									
1	3.6.15.4	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Pasar tertib ukur	1	256.869.000	1	233.856.000	1	238.653.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	74	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	3.6.15.14	Pembinaan dan Monitoring Barang Legal	Jumlah laporan	6	28.900.000	6	28.900.000	6	28.900.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	94	Pemberantasan Korupsi
3	3.6.15.15	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	Rapat koordinasi da laporan	12	452.253.000	12	450.573.000	12	440.869.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	79	Pemberantasan Korupsi
4	3.6.15.6	Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras	Jumlah laporan	12	31.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
5	3.6.15.16	Operasi harga pasar	Pasar yang tertib ukur	1	195.000.000	1	23.500.000	1	23.500.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	84	Penanggulangan Kemiskinan
6	3.6.15.18	Sosialisasi kemetrolgian	jumlah sosialisasi	4	23.500.000	4	12.145.000	4	12.145.000	Pasar-pasar di kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	3.6.15.19	Monitoring dan eavaluasi kemetrolgian	Jumlah laporan	48	9.455.000	48	9.934.000	48	9.934.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	94	Rencana
8	3.6.15.17	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	Jumlah laporan	12	66.200.000	12	39.822.000	12	39.822.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	89	Penanggulangan Kemiskinan
9	3.6.15.20	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	Jumlah pelayanan tera	100	12.654.000	100	44.884.000	100	44.884.000	Kelurahan kelurahan di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	76	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	3.6.15.22	Pembinaan pedagang informal	Jumlah laporan	12	9.254.000	12	34.000.000	12	34.000.000	UPT Metrologi	Dana Alokasi Umum	94	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	3.6.15.25	Pendataan alat UTTP	Jumlah buku hasil pendataan	7	7.994.000	7	7.709.000	7	7.709.000	Kota Magelang dan sekitarnya	Dana Alokasi Umum	96	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	3.6.15.26	Pengawasan Kemetrolgian	Jumlah laporan	6	6.655.000	6	0	6	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	96	
13	3.6.15.31	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal	Jumlah Raperda	1 buah	109.488.000	1 buah	109.488.000	1 buah	109.488.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	106	Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	3.6.15.3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Data peredaran barang/jasa	12 laporan	66.200.000	12 laporan	65.863.000	12	65.863.000	Pasar se Kota magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			34.574.000		32.586.000		32.586.000				
			Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	4,10%									
1	3.7.15.4	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah peserta sosialisasi bahan tambahan makanan	50	9.130.000	50	9.130.000	50	9.130.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	76	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	3.7.15.5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah peserta	20	25.444.000	20	23.456.000	20	23.456.000	Kota Magelang	DBHCHT	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3.7.15.8	Bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual	IKM yang terfasilitasi pendaftaran merk	20	0	20	0	20	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	81	
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			77.202.000		77.202.000		77.202.000				
			Jumlah wirausaha baru	75 UMKM									
1	2.11.16.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	3	14.527.000	3	14.527.000	3	14.527.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.11.16.18	Penilaian Koperasi Berprestasi	Koperasi yang dinilai	50	17.935.000	50	17.935.000	50	17.935.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	76	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.11.16.22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	Jumlah peserta	80	44.740.000	80	44.740.000	80	44.740.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	76	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.11.16.3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah fasilitasi	2	0	2	0	2	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	81	
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			694.555.000		722.629.000		807.668.000				
				-	449,723,000								
			Peningkatan daya saing IKM Formal	3,1%?									
1	3.7.16.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah operasionalisasi Magelang Craft Center	1	61.867.000	1	63.859.000	1	66.258.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	74	Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3.7.16.8	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	IKM yang dibina	85	66.153.000	85	114.535.000	85	114.535.000	Kota Magelang	DBHCHT	74	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	3.7.16.12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	Jumlah promosi, lomba dan sarasehan	7	375.947.000	7	354.227.000	7	356.867.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Mempertegas Skenario Kemitraan
4	3.7.16.19	Pembinaan Industri Rokok	Jumlah fasilitasi					1 kali	25.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	75	Mempertegas Skenario Kemitraan
5	3.7.16.20	Penyusunan DED Pembangunan IPAL Tahu Skala Kawasan Tidar Campur Kota Magelang	Jumlah dokumen					1 dokumen	55.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	105	Memperkuat Implementasi MKSB, Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Program 100-0-100
6	3.7.16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah industri yang dibina	20	18.285.000	20	17.885.000	20	17.885.000	Disperindag	DBHCHT	89	Penanggulangan Kemiskinan
7	3.7.16.14	Pendataan industri kecil dan menengah	Naskah akademik dan raperda	0	98.398.000	0	98.218.000	0	98.218.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	93	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	3.7.16.15	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	Jumlah buku direktori industri kecil dan menengah	4	34.482.000	4	34.482.000	4	34.482.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	3.7.16.6	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah fasilitasi	60 pelaku usaha	30.000.000	60 pelaku usaha	30.000.000	60 pelaku usaha	30.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	101	Mempertegas Skenario Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	3.7.16.4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Jumlah IUMK	30 orang	9.423.000		9.423.000		9.423.000	Disperindag Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Mempertegas Skenario Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			490.644.000		509.607.000		533.591.000				
			Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	3%									
1	2.11.17.12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	Jumlah rekomendasi	300	443.468.000		462.431.000		486.415.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.11.17.13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan hasil pendataan	1	47.176.000		47.176.000		47.176.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3,6	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan											
	3.6.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			7.835.000		7.835.000		7.835.000				
			Jumlah ekspor produk ke LN	US\$950,000									
1	3.6.17.8	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah peserta	20	7.835.000		7.835.000		7.835.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			9.253.000		9.015.000		9.015.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,04%									
1	3.7.17.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah peserta pembinaan	20	9.253.000	20	9.015.000	20	9.015.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DBHCHT	71	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			131.766.000		125.910.000		125.910.000				
					674,139,000								
			Prosentase koperasi aktif	93,25%									
			Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	25%									
			Jumlah koperasi	225									
			Jumlah koperasi syariah	16									
1	2.11.18.10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	Jumlah pengurus koperasi yang terbina	120	41.097.000	120	41.782.000	120	41.782.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	74	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.11.18.11	Pembentukan Koperasi baru	Jumlah koperasi baru	4	27.667.000	4	27.667.000	4	27.667.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	2.11.18.14	Penyusunan Profil Koperasi	Jumlah buku profil koperasi	10	6.616.000	10	6.616.000	10	6.616.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.11.18.15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah rekomendasi pengawasan pada koperasi	15	6.018.000	15	6.018.000	15	6.018.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	94	Mempertegas Skenario Kemitraan
5	2.11.18.16	Sarasehan Gerakan Koperasi	Jumlah koperasi	150	18.386.000	150	18.386.000	150	18.386.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	74	Mempertegas Skenario Kemitraan
6	2.11.18.19	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta	50	6.572.000	50	6.572.000	50	6.572.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	74	Mempertegas Skenario Kemitraan
7	2.11.18.4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah koperasi peserta sosialisasi	50	6.541.000	50	0	50	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	96	
8	2.11.18.20	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah pengajuan SK Walikota	4	18.869.000	4	18.869.000	4	18.869.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	76	Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,6	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan											
	3.6.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			926.621.000		1.061.630.000		1.064.029.000				
			Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	3%									
1	3.6.18.3	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah pameran	4	866.274.000	4	1.002.583.000	4	1.004.982.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	84	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	3.6.18.10	Penyusunan profil perusahaan	Jumlah buku profil perusahaan	1	60.347.000	1	59.047.000	1	59.047.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	74	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	3.6.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			1.500.213.000		1.707.140.000		2.246.901.000				
			Cakupan PKL yang dibina	8%									
			Jumlah shelter PKL yang dikelola	13									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3.6.19.1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang terbina	400	68.000.000	400	68.000.000	400	68.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	101	Penanggulangan Kemiskinan
2	3.6.19.3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	100	25.000.000	100	19.286.000	100	19.286.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB
3	3.6.19.9	Pendataan pedagang kaki lima	Data PKL yang up to date	1	14.600.000	1	26.739.000	1	26.739.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	96	Mempertegas Skenario Kemitraan
4	3.6.19.17	Pembangunan Shelter PKL Jl. Alibasah Sentot	Shelter Jl. Alibasah sentot	0	0	0	0	1 paket	75.000.000	Jl. Alibasah Sentot	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB, Penanggulangan Kemiskinan
5	3.6.19.18	Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL	Jumlah Tanda Daftar Usaha PKL yang dikeluarkan	750	15.000.000	750	0	750	0	DPP	Dana Alokasi Umum	101	
6	3.6.19.19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	Jumlah pengendalian ketertiban pedagang kaki lima dan asongan	12	128.077.000	12	128.077.000	12	137.577.000	Jalan jalan protokol di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Rencana
7	3.6.19.20	Pemeliharaan shelter PKL	Jumlah shelter PKL yang dipelihara	17	71.000.000	17	71.000.000	17	71.000.000	Shelter PKL di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Rencana
8	3.6.19.24	Rehabilitasi sedang/berat shelter PKL	Shelter yang direhabilitasi	2	0	0	0	1 paket	211.277.000	Shelter PKL Jl. S. Parman	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB, Penanggulangan Kemiskinan
9	3.6.19.26	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	Jasa kewanman shelter PKL	20	235.786.000	20	381.198.000	20	405.182.000	Shelter shelter PKL di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	3.6.19.32	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	Jumlah tenaga kamanan shelter yang terlatih	30	16.500.000	30	18.200.000	30	18.200.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	85	Rencana
11	3.6.19.31	Penempatan PKL	Jumlah kamanan shelter yang dilatih	24	25.000.000	24	93.474.000	24	93.474.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	94	Penanggulangan Kemiskinan
12	3.6.19.15	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Raperwal penataan dan pemberdayaan PKL	0	20.000.000	0	19.928.000	1 paket	19.928.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	101	Mempertegas Skenario Kemitraan
13	3.6.19.34	Pembangunan Shelter PKL Jalan S. Parman	Jumlah Shelter PKL	1 paket	200.750.000	1 paket	200.750.000	1 paket	200.750.000	Jl. S. Parman	Dana Alokasi Umum	86	SDGs, Memperkuat Implementasi MKSB, Penanggulangan Kemiskinan
14	3.6.19.35	Pembangunan Shelter PKL Jalan Tarumanegara	Jumlah shelter PKL	1 paket	664.000.000	1 paket	664.000.000	1 paket	664.000.000	Jl. Tarumanegara	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi MKSB, Penanggulangan Kemiskinan
15	3.6.19.36	Pembangunan shelter PKL	Jumlah shelter PKL					1 paket	220.000.000	Jl. Singosari	Dana Alokasi Umum	106	Memperkuat Implementasi MKSB, Mempertegas Skenario Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan
16	3.6.19.33	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah laporan	30 buku	16.500.000	30 buku	16.488.000	30 buku	16.488.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	94	Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			50.084.000		49.889.000		49.889.000				
			Jumlah sentra industri	11									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3.7.19.5	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	Laporan diagnosis sentra	4	37.350.000	4	37.155.000	4	37.155.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	68	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	3.7.19.4	Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG	Jumlah IKM mainan	20	12.734.000	20	12.734.000	20	12.734.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	76	Penanggulangan Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
	3,6	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan											
	3.6.20	Program Pengelolaan Pasar			4.062.567.000		4.195.835.000		4.687.294.000				
			Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	7%									
			Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%									
			Cakupan pedagang pasar yang dibina	8%									
			Persentase pasar tradisional yang dikelola	75%									
1	3.6.20.1	Penempatan Pedagang Pasar	Jumlah pedagang yang ditempatkan	0	0	0	0	0	0	Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	101	
2	3.6.20.2	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	Peralatan dan bahan pembersih	12	10.770.000	12	10.770.000	12	10.770.000	UPT Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi MKSB
3	3.6.20.3	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	Peralatan dan bahan pembersih	12	42.592.000	12	42.592.000	12	51.565.000	UPT Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	3.6.20.5	Operasi Penertiban Pasar	Jumlah operasi penertiban pasar	8	60.587.000	8	60.587.000	8	60.587.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Mempertegas Skenario Kemitraan
5	3.6.20.6	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	Peralatan dan bahan pembersih	12	24.792.000	12	24.792.000	12	24.792.000	UPT Pasar Kebonpolo	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi MKSB
6	3.6.20.7	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	Peralatan dan bahan pembersih	12	28.130.000	12	28.130.000	12	28.130.000	UPT Pasar Gotong Royong	-	49	Memperkuat Implementasi MKSB
7	3.6.20.8	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	Jumlah pembinaan	4	243.844.000	4	37.884.000	4	37.884.000	Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	75	Mempertegas Skenario Kemitraan
8	3.6.20.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	0	
9	3.6.20.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa kebersihan lingkungan pasar	53	772.416.000	53	1.096.086.000	53	1.165.639.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi MKSB
10	3.6.20.13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	16.080.000	12	16.080.000	12	16.080.000	UPT Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
11	3.6.20.14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	8.646.000	12	8.646.000	12	8.646.000	UPT Pasar Kebonpolo	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
12	3.6.20.15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	11.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	UPT Pasar Gotong Royong	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
13	3.6.20.16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	7.673.000	12	7.673.000	12	7.673.000	UPT Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
14	3.6.20.17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa keamanan lingkungan pasar	48	710.000.000	48	758.390.000	48	832.078.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Mempertegas Skenario Kemitraan
15	3.6.20.18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	12.228.000	12	12.228.000	12	15.788.000	UPT Pasar Sidomukti	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	3.6.20.19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	Peralatan dan bahan pembersih	12	19.980.000	12	15.560.000	12	12.000.000	UPT Pasar Sidomukti	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi MKSB
17	3.6.20.20	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	Jumlah lomba	1	61.347.000	1	61.347.000	1	61.347.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	Memperkuat Implementasi MKSB
18	3.6.20.21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana prasarana pasar	0	0	0	0	1 paket	73.510.000	Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	101	Mempertegas Skenario Kemitraan
19	3.6.20.22	Pendataan Pedagang Pasar	Jumlah buku data pedagang pasar	15	18.500.000	15	0	15	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	88	
20	3.6.20.23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5	84.500.000	5	74.738.000	5	86.658.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	68	Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
21	3.6.20.24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5	43.299.000	5	43.299.000	5	43.299.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
22	3.6.20.25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	Jumlah laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan pasar	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	63	ExBAU
23	3.6.20.27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah laporan administrasi pemungutan retribusi pasar	10	32.000.000	10	32.000.000	10	32.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
24	3.6.20.28	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	Jumlah pasar yang direhabilitasi	3	575.830.000	3	575.830.000	3	918.330.000	Pasar-pasar di kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Memperkuat Implementasi MKSB, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	3.6.20.29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	Jumlah 5 pasar yang dipelihara	12	171.938.000	12	171.938.000	12	259.938.000	Pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Memperkuat Implementasi MKSB, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
26	3.6.20.30	Promosi Pasar Tradisional	Jumlah pentas kesenian tradisional dan grebeg pasar	10	159.794.000	10	159.794.000	8	122.154.000	Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	81	Mempertegas Skenario Kemitraan
27	3.6.20.31	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Induk	Jumlah dokumen perencanaan	0	649.138.000	2 paket	649.138.000	1 paket	384.038.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	74	Memperkuat Implementasi MKSB, Mempertegas Skenario Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
28	3.6.20.33	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		59.242.000		59.242.000	65 buah	80.872.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	106	Memperkuat Implementasi MKSB
29	3.6.20.34	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah peserta pelatihan		35.234.000	70 orang	35.084.000	70 orang	35.084.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi MKSB
30	3.6.20.41	Apraisal Pengadaan Tanah Pembangunan Pasar Induk	Perkiraan harga tanah					1 dokumen	80.050.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	106	Memperkuat Implementasi MKSB, Mempertegas Skenario Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	3.6.20.40	Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat guna Penerapan SNI Pasar Rakyat	Jumlah pembinaan					3 kegiatan	24.375.000	Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi MKSB, Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Penanggulangan Kemiskinan, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
32	3.6.20.32	Verifikasi Permohonan SITU	Jumlah rekomendasi		18.176.000		18.176.000	350 lembar	18.176.000	Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	101	Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
33	3.6.20.36	Pelatihan pengendalian kamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan		47.168.000		47.168.000	75 orang	47.168.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	101	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
34	3.6.20.37	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)	Jumlah laporan		21.162.000		21.162.000	4 dokumen	21.162.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	96	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
35	3.6.20.35	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	Jumlah laporan		21.501.000		21.501.000	4 dokumen	21.501.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			350.000.000		0		0				
			Persentase kawasan strategis yang terbangun?	2 kawasan									
1	1.3.29.31	Pembangunan Infrastruktur Prasarana Perdagangan	Infrastruktur prasarana perdagangan yang terbangun	1	350.000.000		0		0	Pasar-pasar di kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			73.824.000		0		0				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas 3 sektor yang terjalin										
			Jumlah KIM	17									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.27	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Jumlah software	1	61.144.000	1	0	1	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	99	
2	2.10.15.28	Pengelolaan website	Web yang dikelola	12	12.680.000	12	0	12	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	73	
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			23.432.000		23.384.000		23.384.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kemudahan pencarian dokumen yang diarsip										
1	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Tertatanya arsip OPD	12	23.432.000	12	23.384.000	12	23.384.000	Kantor Disperindag	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
				TOTAL	12.698.835.000		12.390.785.000		13.785.276.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			195.417.000		161.512.000		188.297.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat					0		0	Setda Kota Magelang pada Bagian Tata Pemerintahan	-	0	
2	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor	14	11.261.000		11.261.000		11.261.000	setda kota magelang bagian tapem	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	8	11.012.000		11.012.000		11.012.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan selama satu tahun	3	2.660.000		2.660.000		2.660.000	SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman	12	29.794.000		30.074.000		32.799.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya sarana rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47	140.690.000		106.505.000		130.565.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			5.360.000		5.360.000		5.360.000				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor Sekretariat yang layak dan memadai	3	0		0		0	Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai	4	5.360.000		5.360.000		5.360.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			42.040.000		34.074.000		34.074.000				
1	4.1.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja Camat se Kota Magelang & terpenuhinya pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan	2	42.040.000		34.074.000		34.074.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			309.921.000		314.311.000		314.311.000				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	30%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%									
			Persentase zona integritas yang terbentuk	10%									
			Nilai hasil LKJip SKPD	CC									
			Persentase SKPD yang direview LKJip	35%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	90%									
			Temuan ketidakpatuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	60%									
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	90%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	90%									
			Capaian Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan	65%									
			persentase SPM yang mencapai target nasional	65%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban Walikota kepada DPRD	75	181.705.000	75	191.655.000	75	191.655.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	99	Rencana
2	4.2.15.15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pertanggung jawaban Walikota kepada Pemerintah	55	116.471.000	55	111.811.000	55	111.811.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
3	4.2.15.16	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengukuran Kinerja Mandiri	10	11.745.000	10	10.845.000	10	10.845.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			1.089.177.000		1.116.403.000		1.191.116.000				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%									
1	4.1.16.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terfasilitasinya Tamu Kedinasana Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	24	64.088.000	24	84.248.000	24	84.248.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	60	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1.16.7	Koordinasi stabilitas daerah	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi Stabilitas Daerah dan Tersedianya Laporan	12	831.999.000	12	840.467.000	12	850.127.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
3	4.1.16.8	Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Data dan Pengkondisian Situasi Kota magelang pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	1	193.090.000	1	191.688.000	9	191.688.000	Sekretariat Daerah	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
4	4.1.16.9	Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan					0		0	SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TAPEM	-	0	
5	4.1.16.12	Penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah					0		0	Sekretariat Daerah Kota Magelang	-	0	
6	4.1.16.18	Monitoring Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Laporan Fasilitas Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden					3	65.053.000	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			140.807.000		141.057.000		141.057.000				
			DISNAKERTRAN SOS		50,000,000								
			KESBANGPOL		113,200,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%									
			Database ormas yang akurat	69.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%									
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	1	140.807.000		141.057.000		141.057.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	79	Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			300.046.000		286.196.000		362.836.000				
			Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%									
1	4.1.18.6	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	Fasilitasi kerjasama daerah	3	47.187.000		61.069.000		61.069.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	85	Rencana
2	4.1.18.8	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Terbinanya Kerjasama Daerah	2	220.727.000		198.144.000		274.784.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
3	4.1.18.9	Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Terbinanya Kerjasama Daerah	1	32.132.000		26.983.000		26.983.000	Sekretariat Daerah Kota Magelang Bagian Tata Peme	Dana Alokasi Umum	85	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		0		0				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0									
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah					0		0	Bagian Tata Pemerintahan	-	0	
	4.1.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			67.886.000		55.236.000		55.236.000				
			cakupan kebijakan penataan daerah	20%									
1	4.1.20.10	Inventarisasi nama gang/jalan	Tersedianya Nama-nama jalan	4	41.699.000		30.849.000		30.849.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
2	4.1.20.18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	Terpenuhinya penerapan SPM dalam penyelenggaraan Pemerintahan	2	26.187.000		24.387.000		24.387.000	Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	94	Rencana
				TOTAL	2.150.654.000		2.114.149.000		2.292.287.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.877.343.000		1.861.980.000		1.951.552.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meterai	1125	4.500.000		6.000.000		6.000.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						1375		1375					
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengujian kendaraan bermotor/KIR dan perpanjangan STNK	99	68.611.000		114.690.000	123 unit kendaraan	63.803.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						99							
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan pengelolaan administrasi keuangan dan barang	14	771.995.000		773.828.000		732.064.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						14		12					
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat dan bahan kebersihan, tenaga kebersihan, pakaian tenaga kebersihan	31	607.987.000		642.242.000		689.417.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						31		31					
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	14	40.000.000		40.000.000		40.000.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						14		14					
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	6	15.000.000		15.000.000		15.000.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						6		5					
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik	10	45.010.000		45.010.000		75.080.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						10		10 jenis					
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	5	3.160.000		2.160.000		2.160.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
						5		2					
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	BBM dan tabung gas	2	78.570.000		33.588.000	1800 liter, 24 isi ulang gas	17.100.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						2							
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum pegawai dan makan minum rapat	12	19.390.000		19.390.000	4 jenis, 20 keg, 30 orang	27.810.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						12							

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	12	120.320.000	12	102.272.000	27	194.518.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan pimpinan dan kegiatan Setda	12	102.800.000	12	67.800.000	12	88.600.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.824.550.000		2.196.839.000		5.478.039.000				
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor Sekretariat Daerah	5	0	5	0	15	739.350.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	3	0	3	0	5	65.400.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	mebelair kantor	4	0	4	0	2	354.400.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	taman dan gedung yang terpelihara	4	492.400.000	4	492.000.000	2	642.250.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan	2	180.100.000	2	145.250.000	2	102.650.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
6	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4	92	1.108.230.000	92	1.078.230.000	92	906.100.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor yang terawat	7	12.330.000	7	14.505.000	7	19.485.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
8	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor yang terpelihara	10	21.230.000	10	16.610.000	8	11.470.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	mebelair kantor yang terpelihara	5	10.260.000	5	7.604.000	5	7.604.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.2.4	Pengadaan mobil jabatan	Mobil jabatan untuk KDH		0		0		0	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Station Wagon, Sepeda motor	2	0	2	442.640.000	3	1.581.640.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
12	4.1.2.40	Pengawasan pemeliharaan kendaraan dinas OPD	Pengawasan pemeliharaan kendaraan dinas Setda kota Magelang	12	0	12	0	12	0	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
13	4.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terwujudnya pembangunan gedung kantor (kamar mandi)	1	0	1	0	1	0	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
14	4.1.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi	Tercukupinya kebutuhan alat komunikasi	6 unit	0	6 unit	0	6 unit	12.450.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
15	4.1.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan KDH					9 jenis	549.050.000	Rumah Jabatan KDH	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
16	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Inspektorat, Ruang Eks PSC, Gedung A, Ruang Pelayanan Kesra					4	486.190.000	Bagian PKP	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			291.099.000		188.869.000		198.919.000				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Koordinasi laporan capaian kinerja keuangan/anggaran dan monev renja	16	50.000.000	16	50.000.000	12	50.000.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Setda	1	8.260.000	1	8.260.000	1	8.260.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun realisasi APBD dan Neraca Setda	1	8.430.000	1	8.760.000	1	8.760.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja Setda	2	20.066.000	2	12.566.000	2	12.566.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyusunan RKA dan RKPA Setda	2	53.260.000	2	38.260.000	2	38.260.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	4.1.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Laporan sinkronisasi data aset barang dan keuangan	12	56.430.000	12	59.870.000	12	69.920.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP	1	11.153.000	1	11.153.000	1	11.153.000	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
8	4.1.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Renstra Setda	2	0	2	0	2	0	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	54	
9	4.1.6.30	dst.....	Pengelolaan dan penataan dokumen SPM dan SPJ Setda	12	6.500.000	12	0	12	0	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
10	4.1.6.31	dst.....	Konsolidasi Laporan Keuangan Bagian Setda	12	53.000.000	12	0	12	0	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
11	4.1.6.32	dst.....	Rumusan kebijakan pengelolaan keuangan Setda	1	24.000.000	1	0	1	0	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
TOTAL					3.992.992.000		4.247.688.000		7.628.510.000				

**MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018**

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			155.332.000		155.332.000		183.738.000				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	23	18.815.000	23	18.815.000	22	18.815.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penggandaan	30000	6.000.000	30000	6.000.000	30000	6.000.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar	2	2.220.000	2	2.220.000	2	2.220.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jamuan makan dan minum rapat dan harian pegawai	12	11.207.000	12	11.207.000	12	8.303.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi	25	117.090.000	25	117.090.000	25	148.400.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			13.925.000		10.420.000		13.420.000				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	peralatan kantor	0	0	0	0	1 jenis	3.000.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kerja yang dipelihara	18	13.925.000	18	10.420.000	18	10.420.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		86.493.000		86.493.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	90%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum (K3)	94.50%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11.27%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9									
1	1.5.15.9	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	Monitoring kegiatan tarawih keliling Walikota dan Pimpinan Daerah	4 kegiatan (Buka Bersama dan 3 wilayah kecamatan)	0	4 kegiatan (Buka Bersama dan 3 wilayah kecamatan)	86.493.000	4 kegiatan (Buka Bersama dan 3 wilayah kecamatan)	86.493.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			78.232.000		71.422.000		65.647.000				
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%									
			Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	10.00%									
1	1.6.15.6	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	Pengadministrasian permohonan bantuan santunan kematian	12	78.232.000		71.422.000		65.647.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Penanggulangan Kemiskinan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			26.059.000		26.104.000		26.104.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%									
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%									
			Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%									
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat					0		0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	-	0	
2	1.2.16.51	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Terselenggaranya pertemuan tim pembina usaha kesehatan sekolah tingkat Kota Magelang	150	26.059.000	150	26.104.000	150	26.104.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Kota Layak Anak
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			131.409.000		124.211.000		123.219.000				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%									
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20.00%									
1	1.6.16.22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Terpenuhinya permohonan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku	2700 proposal	131.409.000	2700 proposal	124.211.000	2700 proposal	123.219.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	1.6.16.42	Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang hibah dan bantuan sosial	Terciptanya legalitas aturan hukum terkait hibah dan bansos	0	0	0	0	0	0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			60.271.000		63.630.000		63.630.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	44.74%									
1	2.2.16.17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	Laporan indeks Pembangunan Gender	4	60.271.000	4	63.630.000	4	63.630.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			310.507.000		313.367.000		313.367.000				
			DISNAKERTRANSOS		50,000,000								
			KESBANGPOL		113,200,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%									
			Database ormas yang akurat	69.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Pembinaan keagamaan bagi masyarakat	0	0	0	0	1 kegiatan	0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.17.5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Terselenggaranya kegiatan malam Tasyakuran Hari Jadi Magelang	1 Kegiatan	60.544.000	1 Kegiatan	60.544.000	1 Kegiatan	60.544.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Rencana
3	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	3	249.963.000	3	252.823.000	3	252.823.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			0		0		0				
1	2.7.17.3	Pemberian stimulan pembangunan Kelurahan					0		0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	-	0	
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			437.981.000		412.781.000		412.781.000				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.67%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%									
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	10.00%									
			Jumlah Juara FASI	-									
			Jumlah Juara MTQ	1									
1	1.1.18.14	Festival Anak Soleh Indonesia	Terlaksananya festival anak sholeh tingkat Kota Magelang	2	197.745.000	2	172.545.000	2	172.545.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Rencana
2	1.1.18.16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	Terlaksananya lomba MTQ tingkat Kota	2	177.562.000	2	177.562.000	2	177.562.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
3	1.1.18.17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	Pengiriman peserta MTQ pelajar dan MTQ umum ke Tk. Provinsi Jateng	2	62.674.000	2	62.674.000	2	62.674.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			367.807.000		0		0				
			Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	8									
			Terpublikasikannya dialog antar agama	5									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	1									
			Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%									
			Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
1	1.5.18.5	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	Terselenggaranya prosesi pamitan, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta terkirimnya TPHD	0	0		0	3 kegiatan dan 1 orang TPHD	0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
2	1.5.18.6	Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan	3	272.437.000		0	3	0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
3	1.5.18.9	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	Terselenggaranya pelatihan pemulasaraan jenazah	3	95.370.000		0	3	0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.19	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo			36.297.000		36.907.000		36.907.000				
			Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	50%									
1	1.6.19.7	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	Terselenggaranya buka bersama Walikota dengan Anak Yatim, Santri, dan Alim Ulama	1	36.297.000		36.907.000	1	36.907.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			175.350.000		185.000.000		185.000.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	7									
			#NAME?	17									
			#NAME?	22									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	NA									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga Jumat pagi	40	175.350.000		185.000.000	40	185.000.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.6.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			34.393.000		0		0				
			Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%									
			Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	3									
			Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20%									
1	1.6.21.1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya kegiatan Forum CSR Kota Magelang	4	0	4	0	4	0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	
2	1.6.21.9	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)	Tersusunnya Raperwal Tentang Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (CSR)	1	34.393.000	1	0	1	0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			67.524.000		67.524.000		63.564.000				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	37.50%									
			Cakupan tim relawan siaga bencana	2,94									
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	25%									
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	25%									
			Cakupan penanganan korban bencana	100%									
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	5,88%									
			#NAME?	1									
			#NAME?	0									
			#NAME?	0									
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada									
1	1.5.22.9	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Laporan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana	4	67.524.000	4	67.524.000	4	63.564.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			54.369.000		26.642.000		26.642.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada									
1	2.2.15.5	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	Terselenggaranya koordinasi penanganan anak putus sekolah di Kota Magelang	100	27.222.000	100	0	100	0	Bagian Kesra	Dana Alokasi Umum	100	
2	2.2.15.1	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Terselenggaranya koordinasi penanganan anak putus sekolah di Kota Magelang	100	27.147.000	100	0	100	0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	
3	2.2.15.6	Perumusan kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah	terselenggaranya penanganan anak putus sekolah	1 rumusan kegiatan		1 rumusan kegiatan	26.642.000	1 rumusan kegiatan	26.642.000	Bagian Kesra	Dana Alokasi Umum	70	Penanggulangan Kemiskinan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			649.243.000		669.243.000		662.643.000				
			Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	25%									
			Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparat	5%									
			Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	53,33									
			Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	5									
			Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	5%									
			Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	1									
			Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan										
			Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat	-									
			Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	NA									
1	1.5.24.1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terselenggaranya kegiatan pengajian akbar dalam rangka Tahun Baru Islam	1	172.685.000	1	172.685.000	1	172.685.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.24.2	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	Terselenggaranya prosesi pamitan, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta terkirimnya TPHD	3	206.818.000	3	206.818.000	3 dan 1 orang TPHD	206.818.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	1.5.24.3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan	3	242.228.000	3	262.228.000	3	255.628.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
4	1.5.24.4	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	Terselenggaranya pelatihan pemulasaraan jenazah	3	0	3	0	3	0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	
5	1.5.24.5	Pengelolaan BAZNAS Kota Magelang	Terpenuhinya kebutuhan bagi pengelolaan BAZNAS Kota Magelang	0	0	0	0	0	0	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	
6	1.5.24.6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kehidupan beragama dan Toleransi Umat beragama	koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan keagamaan	2	27.512.000	2	27.512.000	2 laporan	27.512.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		35.727.000		35.727.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0									
			Ketersediaan Perwal tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji daerah dan Pembiayaan transportasi haji	1 raperwal	35.727.000								
1	4.1.19.63	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji	ketersediaan raperwal tentang penyelenggaraan haji daerah dan pembiayaan transportasi	1 raperwal		1 raperwal	35.727.000	1 raperwal	35.727.000	Bagian Kesra	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		2.598.699.000		2.284.803.000		2.298.882.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan
URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi			123.648.000		113.238.000		141.518.000				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar	35	15.017.000	35	15.017.000	35	15.017.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar	23375	8.905.000	23375	8.905.000	2 jenis cetakan dan 29200	8.905.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan	tersusunnya peraturan prundang-	2	2.160.000	2	2.160.000	2	2.160.000	Bagian	Dana Alokasi	80	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar	12	28.166.000	12	28.166.000	12	28.166.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar	12 bulan	69.400.000	12 bulan	58.990.000	12 bulan	87.270.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan			46.310.000		40.480.000		68.480.000				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kerja	2 unit PC dan	0	2 unit PC dan 2	0	2 unit PC dan 2	35.000.000	bagian	Dana Alokasi	59	ExBAU
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala	terpeliharanya peralatan kerja	18	46.310.000	18	40.480.000	18	31.480.000	Bagian	Dana Alokasi	79	ExBAU
3	4.1.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi	terpeliharanya perlengkapan kerja	1		1 pemeliharaan		1 pemeliharaan	0	Bagian	Dana Alokasi	69	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala	terpeliharanya perlengkapan kerja	1		1 pemeliharaan		1 pemeliharaan	2.000.000	Bagian	Dana Alokasi	45	ExBAU
5	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala	terpeliharanya mebel	1		1 pemeliharaan		1 pemeliharaan	0	Bagian	Dana Alokasi	40	ExBAU
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi											
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan			23.136.000		23.136.000		23.136.000				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh	30%									
			Persentase Tindak lanjut	80%									
			Persentase zona integritas yang	10%									
			Nilai hasil LKJip SKPD	CC									
			Persentase SKPD yang direview	35%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil	90%									
			Temuan ketidak patuhan UU hasil	60%									
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	90%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil	90%									
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan	65%									
			persentase SPM yang mencapai	65%									
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	meningkatnya peningkatan sistem pengawasan internal dan	1	23.136.000	1	23.136.000	1	23.136.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi											
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan			611.885.000		610.432.000		610.432.000				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang	2									
1	4.3.16.3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia	kerjasama dengan pihak akademisi	12	611.885.000	12	610.432.000	12	610.432.000	Kota Magelang	Dana Alokasi	84	Pemberantasa
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan											
	2.10.20	Program optimalisasi pemanfaatan			650.119.000		628.136.000		666.797.000				
1	2.10.20.10	Pelayanan operasional Unit Layanan	terselenggaranya proses pengadaan	12	567.873.000	12	548.949.000	12	587.333.000	Bagian	Dana Alokasi	70	Rencana
2	2.10.20.12	Verifikasi Rencana Umum	terlaksananya proses pengadaan	2	41.123.000	2	38.167.000	2	34.117.000	bagian	Dana Alokasi	54	Rencana
3	2.10.20.13	Penyusunan Rancangan Peraturan	tersusunnya peraturan prundang-	1 raperwal	41.123.000		41.020.000	1 raperwal	45.347.000	Bagian	Dana Alokasi	54	Pemberantasa
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi											
	4.3.21	Program perencanaan			650.674.000		631.915.000		749.649.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota	2	262.354.000	2	262.039.000	2	262.039.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
2	4.3.21.22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota	3	19.569.000	3	19.569.000	3	19.569.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator
3	4.3.21.32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota	12	66.555.000	12	64.551.000	12	64.551.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	85	Percepatan Pencapaian Indikator
4	4.3.21.33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota	12	54.364.000	12	52.491.000	12	47.371.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator
5	4.3.21.53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota	4	56.134.000	4	56.134.000	4	57.134.000	Bagian Pembangunan Setda Kota	Dana Alokasi Umum	83	Percepatan Pencapaian Indikator
6	4.3.21.65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota	12	61.405.000	12	60.310.000	12 laporan	83.846.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator
7	4.3.21.67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota	12	57.132.000	12	55.676.000	12	78.966.000	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator
8	4.3.21.68	Pengumpulan data dan pelaporan TEPPRA	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota	12 Laporan	73.161.000	12 Laporan	61.145.000	12 Laporan dan 1 paket pengadaan	136.173.000	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator
	4.1	Urusan Pemerintahan Fungsi											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan			42.067.000		0		0				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait	0									
1	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan	tersusunnya peraturan prundang-	1	42.067.000	1	0	1	0	bagian	Dana Alokasi	34	Pemberantasa
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas			88.787.000		91.346.000		94.946.000				
1	4.1.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	terbinanya pengelola kegiatan	4 Pembinaan	88.787.000	4 Pembinaan	91.346.000	4 Pembinaan	94.946.000	bagian	Dana Alokasi	105	Pemberantasa
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan			0		0		0				
				TOTAL	2.236.626.000		2.138.683.000		2.354.958.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	ARGET RENJA P 20	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi			124.619.000		101.273.000		104.823.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, meterai, dan pengiriman paket di	285	1.205.000	285	1.205.000	285 surat, 120 le	845.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	18	13.741.000	18	13.741.000	18	13.741.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	8	7.439.000	8	7.439.000	8	7.439.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan wawasan	24	8.900.000	24	8.900.000	24	8.900.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan konsumsi bagi pegawai dan konsumsi untuk rapat	18	11.274.000	18	11.274.000	18	8.304.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi	18	82.060.000	18	58.714.000	18	65.594.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan			14.135.000		13.495.000		34.920.000				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kantor	5	0	5	0	5	21.425.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja yang terpelihara	6	11.735.000	6	11.095.000	6	11.095.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	4.1.19	Program Penataan Peraturan			1.651.449.000		1.734.493.000		1.760.534.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait	0									
1	4.1.19.5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya publikasi produk-produk hukum dalam bentuk	3	50.937.000	3	50.937.000	3	51.027.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian
2	4.1.19.9	Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah peraturan daerah yang disosialisasikan	6	204.265.000	6	160.415.000	6	160.365.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian
3	4.1.19.10	Pengelolaan JDI Hukum	Petugas JDIIH di semua OPD	53	63.161.000	53	55.811.000	53	61.812.000	Kantor Walikota Magelang dan Perangkat Daerah Kota	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.1.19.14	Rakor aparat penegak hukum	Laporan Rakor dalam penanganan penegakan hukum	12	86.911.000	12	86.911.000	12	86.911.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	44	Pencapaian Indikator
5	4.1.19.18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Raperda yang disosialisasikan	10	57.780.000	10	57.780.000	10	57.780.000	Lantai 1 Kantor Walikota	Dana Alokasi Umum	96	Pencapaian Indikator
6	4.1.19.28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	Tercapainya pemajuan dan pengharmonisasian HAM	3	36.401.000	3	27.751.000	3	27.751.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian
7	4.1.19.42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	Dokumen Naskah Usulan Prolegda/Propemperda	1	12.030.000	1	11.875.000	1	11.875.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	91	Percepatan Pencapaian
8	4.1.19.43	Harmonisasi, Pembedaan dan Pemantapan Raperda	Jumlah raperda yang dikirim ke DPRD untuk dibahas	10	253.535.000	10	377.135.000	10	377.135.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	91	Pencapaian Indikator

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	4.1.19.44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi Raperwal, SK dan MoU	500	100.111.000	500	323.311.000	500	323.311.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	90	Pencapaian Indikator
10	4.1.19.46	Asistensi Pembahasan Raperda	Pembahasan dan persiapan raperda	12	147.825.000	12	102.025.000	12	102.025.000	Bagian Hukum Setda dan DPRD	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian
11	4.1.19.47	Penyuluhan Hukum Terpadu	Terselenggaranya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam	1	24.941.000	1	24.116.000	1	24.116.000	Gedung Kyai Sepanjang Kota	Dana Alokasi Umum	96	Percepatan Pencapaian
12	4.1.19.48	Pemberian Bantuan Hukum	Penanganan perkara Pemerintah Kota Magelang yang mendapatkan	4	153.053.000	4	153.053.000	4	153.053.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	96	Percepatan Pencapaian
13	4.1.19.56	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi terhadap produk hukum	4	39.498.000	4	48.798.000	6 produk hukum	48.798.000	Bagian Hukum	Dana Alokasi	35	Percepatan
14	4.1.19.57	Pemberian Layanan Hukum	Pemberian layanan hukum di	12	198.362.000	12	222.362.000	12	222.362.000	Bagian Hukum	Dana Alokasi	39	Percepatan
15	4.1.19.62	Penatausahaan Produk Hukum	Terlaksananya Penataan Produk	500	74.213.000	500	32.213.000	500	52.213.000	Bagian Hukum	Dana Alokasi	40	Percepatan
	4,6	Urusan Pemerintahan Fungsi											
	4.6.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			54.525.000		54.525.000		54.525.000				
1	4.6.16.7	Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggarakannya workshop legal drafting	2	54.525.000	2	54.525.000	2	54.525.000	Hotel Atria	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	1.844.728.000		1.903.786.000		1.954.802.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			115.200.000		104.115.000		135.062.000				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sediaan alat tulis kantor	12	12.592.000		12.592.000		12.592.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						12		25 jenis					
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12	12.693.000		12.693.000		10.827.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						12		5 jenis					
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sediaan bahan bacaan	12	2.160.000		2.160.000		2.160.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						12		2 jenis					
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu	12	13.845.000		13.845.000		13.845.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						12		11 orang					
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi ke dalam dan keluar daerah	100%	73.910.000		62.825.000		95.638.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						100%		100%					
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			5.940.000		5.835.000		22.466.000				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12	0		0		17.031.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
						12		2 unit					
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kerja yang terpelihara	12	670.000		670.000		270.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						12		12					
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja yang terpelihara	10 unit	5.270.000		5.165.000		5.165.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
						10 unit		10 unit					
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			187.069.000		248.440.000		286.359.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	30%									
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%									
			Persentase zona integritas yang terbentuk	10%									
			Nilai hasil LKJip SKPD	CC									
			Persentase SKPD yang direview LKJIP	35%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	90%									
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	60%									
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	90%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	90%									
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	65%									
			persentase SPM yang mencapai target nasional	65%									
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	Kegiatan Asistensi Penerapan SAKIP	2	75.272.000		78.745.000		58.363.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
2	4.2.15.28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja	4	50.346.000		46.720.000		42.648.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
3	4.2.15.30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Kota	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang	1	61.451.000		90.980.000		90.980.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
4	4.2.15.40	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Laporan monitoring dan evaluasi e-SAKIP	1	0		0		0		Dana Alokasi Umum	34	
5	4.2.15.9	Monitoring dan Implementasi E-SAKIP	Jumlah Dokumen monitoring implementasi SAKIP	1 dokumen		1 dokumen	31.995.000	1 dokumen	94.368.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM
	4,5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian											
	4.5.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			322.891.000		325.206.000		305.111.000				
					5,010,432,000								
			Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:										
			Pendidikan S1	46%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pendidikan S2	8,5%									
			Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100									
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,41									
			Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%									
			Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%									
			Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0.10%									
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	41%									
1	4.5.15.17	Penyusunan Analisis Jabatan	Laporan Analisis Jabatan		0		0		0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	
2	4.5.15.36	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Laporan Analisis Beban Kerja		0		0		0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	
3	4.5.15.49	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Laporan Evaluasi Jabatan	29	190.562.000		250.902.000		254.586.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
4	4.5.15.19	Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan struktural	Tersedianya pedoman standar kompetensi jabatan	112 jabatan	132.329.000		74.304.000		50.525.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM
5	4.5.15.18	Penyusunan Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen budaya kerja aparatur pemerintah daerah		0		0		0		Dana Alokasi Umum	34	
6	4.5.15.70	Manajemen Kinerja Aparatur	Tersusunya pedoman standar kompetensi jabatan	1	0		0		0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			26.918.000		27.319.000		46.648.000				
			Cakupan pemeriksaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	60%									
			Persentase Aparat SPIP aktif	60%?									
			Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	75%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.2.17.3	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	Buku Bagan Jabatan Kota Magelang	2	26.918.000	2	27.319.000	2 dokumen	24.329.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
2	4.2.17.4	Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas	Buku Pedoman Pakaian Dinas		0		0		0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	
3	4.2.17.9	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	0		0		0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
4	4.2.17.14	Monev Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Tersedianya laporan monev pembangunan zona integritas menuju WBBM					3 laporan	22.319.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Pemberantasan Korupsi
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			108.879.000		25.745.000		51.995.000				
			cakupan kebijakan penataan daerah	20%									
1	4.1.20.13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	Laporan Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah	10	26.000.000	10	25.745.000	1 dokumen	51.995.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM
2	4.1.20.15	Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD	dokumen evaluasi tupoksi dan uraian tugas	4	82.879.000	4	0	4	0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	
3	4.1.20.16	Penyusunan Pola Hubungan Kerja	Dokumen pola hubungan kerja		0		0		0		Dana Alokasi Umum	34	
4	4.1.20.16	Penyusunan Pola Hubungan Kerja	Dokumen pola hubungan kerja		0		0		0		Dana Alokasi Umum	34	
5	4.1.20.19	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait SOTK	Buku Profil Kelembagaan Perangkat daerah Kota Magelang	1	0	1	0	1	0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	
6	4.1.20.21	Penyusunan Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya pedoman implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota magelang	1	0	1	0	1	0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	
7	4.1.20.21	Penyusunan Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Laporan pelaksanaan e-SAKIP	1	0	1	0	1	0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	
8	4.1.20.21	Penyusunan Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen Pedoman Pakaian Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang		0		0		0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	
	4.1.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			136.753.000		116.442.000		127.371.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.21.2	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik		0		0		0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	
2	4.1.21.3	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Buku Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	40	86.096.000	40	62.669.000	40	62.669.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Program prioritas RPJM
3	4.1.21.4	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	0	1	0	1	0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
4	4.1.21.2	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1	16.257.000	1	20.651.000	1 dokumen	38.822.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
5	4.1.21.5	Penyusunan Pedoman Pelayanan Publik	Tersusunnya Perwal pedoman pelayanan publik	1	34.400.000	1	33.122.000	1 dokumen	25.880.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			8.278.000		14.828.000		14.828.000				
1	4.3.21.40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kota Magelang	1	8.278.000	1	14.828.000	1	14.828.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.56	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja Utama Kota Magelang	Laporan Monev Indikator Kinerja Utama Kota Magelang	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM
				TOTAL	911.928.000		867.930.000		989.840.000				

**MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018**

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			170.203.000		146.760.000		247.355.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	4	540.000		156.000		156.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	12	9.833.000		9.833.000		9.833.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	12	7.138.000		7.138.000		7.138.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	2	2.160.000		2.160.000		2.160.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	18	12.642.000		10.266.000		11.058.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	12	137.890.000		117.207.000		217.010.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			14.220.000		12.580.000		9.540.000				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	3	0		0		0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	34	
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	5	14.220.000		12.580.000		8.940.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1	0		0		600.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			117.087.000		106.178.000		106.178.000				
			DISKOPERINDAG		274,308,000								
			Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM	3%									
			Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%									
1	2.11.15.20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	terwujudnya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	6	79.800.000		36.890.000		36.890.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
2	2.11.15.22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	terwujudnya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	6	37.287.000		69.288.000		69.288.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	95	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	2,14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik											
	2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			105.373.000		94.132.000		94.132.000				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%									
			Persentase pemenuhan data statistik	90%									
1	2.14.15.11	Pengendalian Inflasi Daerah	Terwujudnya pengembangan data statistik daerah sebagai dasar arah kebijakan pembangunan daerah	6	105.373.000		94.132.000		94.132.000	Bag. Perekonomian	Dana Alokasi Umum	80	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	3,6	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan											
	3.6.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			26.100.000		24.329.000		24.329.000				
					3,885,629,000								
			Jumlah alat UTTP yang ditera	2,700									
			Data & informasi cukai palsu/ilegal	NA									
1	3.6.15.12	Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	Tersedianya data informasi cukai palsu/ilegal	1	26.100.000		24.329.000		24.329.000	Bagian Perekonomian	DBHCHT	59	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			135.655.000		131.834.000		130.027.000				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%									
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20.00%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.6.16.27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Terwujudnya pelaksanaan program raskin sesuai dengan ketentuan	6	66.455.000	6	65.837.000	6	64.030.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	95	Penanggulangan Kemiskinan
2	1.6.16.41	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan daerah	terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses keuangan	4	69.200.000	4	65.997.000	4	65.997.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	70	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			94.909.000		78.909.000		78.909.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%									
1	2.5.16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	6	78.909.000	6	78.909.000	6	78.909.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	71	SDGs, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	2.5.16.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		0		0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	58	
3	2.5.16.35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2	16.000.000	2	0	2	0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	70	
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			48.210.000		45.348.000		50.574.000				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%									
1	4.1.16.15	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	Terselenggaranya koordinasi pemerintah daerah dalam menghadapi lebaran, natal dan tahun baru	2	48.210.000	2	45.348.000	2	50.574.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	76	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			313.135.000		287.725.000		281.125.000				
			Indeks Kualitas Air,	76%									
			Indeks Kualitas Udara	78%									
			Indeks Tutupan Hutan	48%									
			Jumlah SDA yang terkonservasi	47,7									
			Jenis flora	8 Jenis									
			Jenis fauna	2 Jenis									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.17.9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Tercapainya perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan	36	150.370.000	36	134.512.000	36	127.912.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	64	SDGs, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	2.5.17.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA	Tercapainya perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan	12	128.000.000	12	122.723.000	12	122.723.000	Bagian Perekonomian	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	69	SDGs, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.5.17.47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfaatan Energi Terbarukan	Tercapainya perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan	2	34.765.000	2	30.490.000	2	30.490.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			112.367.000		117.905.000		117.905.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0									
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya peraturan perundang-undangan	3	112.367.000	3	117.905.000	3	117.905.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	89	Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah			312.672.000		296.031.000		296.031.000				
1	3.7.20.1	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	12	119.180.000	12	121.347.000	12	121.347.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
2	3.7.20.2	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	10	37.037.000	10	30.427.000	10	30.427.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3.7.20.4	Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	20	26.900.000	20	15.000.000	20	15.000.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	3.7.20.6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	12	90.355.000	12	90.709.000	12	90.709.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
5	3.7.20.8	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	5	39.200.000	5	38.548.000	5	38.548.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
				TOTAL	1.449.931.000		1.341.731.000		1.436.105.000				

**MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018**

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat
URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			304.693.000		271.319.000		298.229.000				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	46 jenis	18.457.000	46 jenis	18.457.000	46 jenis	18.457.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	5 jenis	30.871.000	5 jenis	27.020.000	5 jenis	27.020.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan majalah	11 jenis	69.240.000	11 jenis	69.240.000	11 jenis	69.240.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat	12 bulan	37.930.000	12 bulan	30.636.000	12 bulan	30.636.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	148.195.000	12 bulan	125.966.000	12 bulan	152.876.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			31.232.000		38.160.000		148.610.000				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	0	0	0	0	4 jenis	95.450.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	3.800.000	3 jenis	23.300.000	3 jenis	23.300.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja yang terpelihara	9 jenis	27.432.000	9 jenis	14.860.000	10 jenis	29.860.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1.276.950.000		2.131.765.000		2.234.332.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	OPD se Kota Magelang, BUMD dan instansi terkait	4 kegiatan	148.771.000	4 kegiatan	124.371.000	4 kegiatan	124.371.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
2	2.10.15.9	Siaran keliling	Terpublikasikannya kegiatan Pemerintah Kota Magelang secara lebih cepat	60 kegiatan	17.094.000	60 kegiatan	11.100.000	60 kegiatan	11.100.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
3	2.10.15.11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	Tersedianya sarana publikasi dan dokumentasi berita tentang Kota Magelang	350 informasi	180.067.000	350 informasi	1.099.060.000	350 informasi	1.221.657.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	86	Rencana
4	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Publikasi informasi Pemerintah kota Magelang melalui Media Sosial	12 laporan	14.443.000	12 laporan	25.372.000	12 laporan	25.372.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
5	2.10.15.20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	Meningkatnya kemitraan dengan media massa dan Kinerja Kehumasan	5 kegiatan	518.223.000	5 kegiatan	416.712.000	5 kegiatan	416.712.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	86	Rencana
6	2.10.15.25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Tersedianya foto, baliho/spanduk, naskah sambutan dan rekaman audio video kegiatan pemerintah daerah	12 bulan	398.352.000	12 bulan	455.150.000	12 bulan	435.120.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			227.000.000		211.868.000		211.868.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%									
1	4.1.16.16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya acara resmi di lingkungan pemerintah Kota Magelang	250 kegiatan	227.000.000	250 kegiatan	211.868.000	250 kegiatan	211.868.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			160.000.000		144.440.000		144.440.000				
			DISNAKERTRANSOS		50,000,000								
			KESBANGPOL		113,200,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%									
			Database ormas yang akurat	69.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%									
1	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terlaksananya rangkaian upacara HUT RI, Upacara Hari Jadi Magelang dan upacara bendera lainnya di Kota Magelang	8 kegiatan	160.000.000	8 kegiatan	144.440.000	8 kegiatan	144.440.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			85.651.000		36.475.000		36.475.000				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%									
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	56%									
1	4.1.17.15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan yang dapat ditangani	12 laporan	85.651.000	12 laporan	36.475.000	12 laporan	36.475.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	91	Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			899.565.000		0		0				
1	2.10.18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya materi publikasi pesan pemerintah Kota Magelang	381	899.565.000	0	0	381	0	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	86	
	2.10.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			201.070.000		201.070.000		201.070.000				
			Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1									
			Interoperabilitas antar system informasi	0									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)	30%									
			Cakupan data yang terpusat dan terkendali	60%									
			Persentase PD yang menerapkan e-government	100%									
1	2.10.16.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Tersedianya analisis media Kota Magelang	12 laporan	201.070.000	12 laporan	201.070.000	12 laporan	201.070.000	Bagian Humas Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
				TOTAL	3.186.161.000		3.035.097.000		3.275.024.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Umum
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.898.246.000		4.869.322.000		5.145.202.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat/perangko	12	6.800.000	12	6.800.000	12	6.800.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	12	1.863.468.000	12	1.833.340.000	12	1.890.400.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Laundry pakaian KDH & WKDH	12	154.152.000	12	136.732.000	4 tenaga kebersihan, 10 jenis bahan kebersihan, 130 stel laundry, 4 stel seragam cleaning	145.844.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12	40.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan	12	121.380.000	12	121.380.000	12	121.380.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	10	18.411.000	10	18.633.000	11 komponen listrik	21.241.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan karangan bunga dan cinderamata	12	263.000.000	12	283.000.000	12	308.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	12	30.750.000	12	21.450.000	20 jenis barang	32.150.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan	12	3.160.000	12	2.160.000	12	2.160.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan kebutuhan bahan bakar genset dan pengisian tabung gas rumah tangga	12	67.001.000	12	26.230.000	12	24.900.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan konsumsi harian pegawai, konsumsi rapat dan konsumsi tamu Setda Kota Magelang dan Rumah Jabatan	12	1.068.500.000	12	1.192.150.000	12 bulan	1.358.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakannya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	897.150.000	12	859.097.000	12	865.977.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Pegawai honorer/tenaga kontrak	12	84.179.000	12	84.179.000	12	84.179.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	4.1.1.23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	Medical Check Up KDH & WKDH	8	20.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	4.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bagian yang diampu dan dikelola dalam melaksanakan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kota Magelang	9	52.320.000	9	52.221.000	9	52.221.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
16	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan dan pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	12	207.975.000	12	171.950.000	12	171.950.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			384.159.000		329.588.000		382.802.000				
1	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Meubeleur rumah jabatan terpelihara dengan baik secara rutin/berkala	12		12	50.000.000	12	50.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan KDH&WKDH	2	233.544.000	2	206.953.000	2	188.400.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas Sekda yang terpelihara dan terawat dengan baik	1	76.870.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	12	16.320.000	12	13.910.000	9 jenis barang	17.260.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	12	32.000.000	12	10.720.000	12	12.730.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantoryang terpelihara dan berfungsi dengan baik	12	25.425.000	12	18.005.000	12	18.005.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor	9	0	9	0	5 peralatan gedung kantor	66.407.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			0		0		0				
1	4.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas KDH, WKDH dan Sekda	11	0	11	0	11	0	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	
2	4.1.3.4	Pengadaan pakaian KORPRI	Pakaian Korpri KDH,WKDH dan Sekda	3	0	3	0	3	0	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	
3	4.1.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus hari-hari tertentu KDH&WKDH, Petugas protokoler ajudan, Sekda dan pakaian adat daerah	7	0	7	0	7	0	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			30.964.000		154.462.000		154.462.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah bagian yang diampu dan dikelola dalam arsip surat menyurat dan arsip kepegawaian di lingkungan setda kota magelang	12	30.964.000		29.500.000		29.500.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.18.16.13	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	Dokumen/ Naskah dinas yang diampu dan dikelola dengan baik	12			124.962.000		124.962.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			2.124.252.000		1.858.335.000		1.796.788.000				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%									
1	4.1.16.1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos	12	181.740.000		181.778.000		199.718.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	4.1.16.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kunjungan kerja/inspeksi KDH&WKDH ke SKPD dan institusi lainnya	12	357.280.000		326.629.000		285.709.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terjalin kordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12	485.580.000		702.403.000		604.155.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
4	4.1.16.16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan tamu pemerintah kota mgl	12	868.216.000		647.525.000		707.206.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.16.3	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Terkelolanya dan terdatanya naskah dinas daerah	29	136.144.000	29	0	29	0	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	
6	4.1.16.17	Desk penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019	Terkelolanya dan terdatanya naskah dinas daerah	12	95.292.000	12	0	12	0	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	
			TOTAL		7.437.621.000		7.211.707.000		7.479.254.000				

**MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018**

OPD : Sekretariat DPRD
URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.041.509.000		7.579.656.000		6.724.966.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan paket	12	357.000	12	37.921.000	12 bulan	40.320.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi,air,listrik, internet dan TV kabel	12	212.700.000	12	241.284.000	12 bulan	206.650.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	49	39.600.000	49	21.600.000	49	21.600.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
4	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12	249.524.000	12	223.690.000	12 bulan	227.900.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
5	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor yang bersih dan rapi	12	161.599.000	12	214.306.000	12 bulan	236.306.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Fasilitasi saran dan prasarana	12	26.076.000	12	22.218.000	12 bulan	33.706.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12	44.357.000	12	44.379.000	12	44.379.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
8	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Fasilitasi sarana dan prasarana	12	14.308.000	12	16.329.000	12	16.329.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
9	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	5	59.350.000	5	58.550.000	9 item	64.800.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12	12.800.000	12	12.800.000	12	12.800.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
11	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	13.036.000	12	13.034.000	12 bulan	7.733.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	12	74.419.000	12	275.485.000	12 bulan	218.985.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	12	6.788.300.000	12	6.043.080.000	12 bulan	5.217.320.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorir daerah/tidak tetap	Tersedianya penjaga malam, driver tetap	jaga malam 10,driver 2	214.632.000	jaga malam 10,driver 2	262.948.000	14 THL	279.739.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	4.1.1.24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Terdeteksinya kesehatan anggota DPRD	25 anggota DPRD dan keluarga	101.299.000	25 anggota DPRD dan keluarga	62.500.000	25 anggota DPRD dan keluarga	62.500.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
16	4.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	12	29.152.000	12	29.532.000	12	29.532.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
17	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terfasilitasinya peralatan rumah tangga					6 item	4.367.000	DSetwan	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			5.204.081.000		5.440.319.000		6.071.515.000				
1	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	12	102.241.000	12	84.804.000	12 bulan	7.113.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	190.368.000	1	190.367.000	12 bulan	209.389.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	32	331.782.000	32	434.782.000	31 kendaraan	343.067.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	13	42.450.000	13	13.380.000	2 item	17.146.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5	20.679.000	5	16.284.000	5	16.284.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
6	4.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	0	0	0	0	0	0	Setwan	Dana Alokasi Umum	54	
7	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terbelinya perlengkapan gedung kantor	2	0	2	48.909.000	14 item	191.141.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terfasilitasinya Gedung Kantor					1 keg	229.598.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
9	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terbelinya peralatan gedung kantor	90250000	0	90250000	90.250.000	6 item	159.033.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terbelinya perlengkapan rumah jabatan	44982000	0	44982000	44.982.000	6 item	218.027.000	Rumah dinas	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.2.2	Pembangunan rumah dinas	Terbangunya rumah dinas	1 unit	4.516.561.000	1 unit	4.516.561.000	1 unit	4.516.561.000	Magelang	Dana Alokasi Umum	34	SDGs
12	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terbelinya mebeleur	0		0		15 item	164.156.000	Setwan dan rumdin	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			178.621.000		249.871.000		249.871.000				
1	4.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	125	178.621.000	125	249.871.000	125	249.871.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			872.000.000		790.800.000		545.550.000				
1	4.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	6	872.000.000	6	790.800.000	6	545.550.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			46.520.000		47.479.000		47.479.000				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	4	8.872.000	4	9.662.000	4	9.662.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
2	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1	2.780.000	1	2.230.000	1	2.230.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
3	4.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya laporan realisasi anggaran	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
4	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	2.996.000	1	2.329.000	1	2.329.000	setwan	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
5	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2	10.135.000	2	9.985.000	2	9.985.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
6	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya RKA dan RKPA	2	14.235.000	2	15.771.000	2	15.771.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
7	4.1.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Tersusunnya Renstra		0		0		0	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKjIP	1	7.502.000	1	7.502.000	1	7.502.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
	4.1.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			11.760.084.000		12.306.541.000		12.577.287.000				
			SETWAN		3,298,605,562								
			Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	50%									
1	4.1.15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Rapeda yang ditetapkan	20	704.718.000	20	709.287.000	20 Raperda	533.487.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	4.1.15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	12	292.472.000	12	370.610.000	12 bulan	377.806.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
3	4.1.15.4	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna DPRD	1	184.054.000	1	241.238.000	1	241.238.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
4	4.1.15.5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses	3	987.735.000	3	918.135.000	3	918.135.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
5	4.1.15.6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya studi banding dan kunker DPRD	12	6.098.200.000	12	6.464.140.000	80 keg	8.049.140.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
6	4.1.15.8	Sosialisasi perturan perundang-undangan	Tersosialisasikannya Perda	2	53.023.000	2	101.145.000	2	101.145.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
7	4.1.15.9	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	Risalah rapat	12	35.730.000	12	35.730.000	12	35.730.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
8	4.1.15.11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bintek/workshop	8	2.521.500.000	8	2.917.600.000	6 keg	1.771.950.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
9	4.1.15.12	Kajian pemberian tunjangan perumahan					0		0	Setwan	-	0	
10	4.1.15.13	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama pelaksanaan kegiatan Setwan dan DPRD	Terjalinnnya kerjasama	12	439.325.000	12	313.781.000	12	313.781.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
11	4.1.15.15	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Pembahasan KUA/PPAS, APBD, LKPJ, LPPD	6	105.702.000	6	234.875.000	6	234.875.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
12	4.1.15.14	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Raperda inisiatif yang telah dibahas	6	337.625.000	6	0	6	0	Setwan	Dana Alokasi Umum	59	
13	4.1.15.10	Penyusunan Memori Bhakti DPRD	Tersusunnya memori bakti		0		0		0		Dana Alokasi Umum	54	
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			40.436.000		40.436.000		40.436.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%									
1	4.3.15.23	Penyusunan Profile DPRD	Tersusunnya profile DPRD	200	40.436.000	200	40.436.000	200	40.436.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			27.298.000		51.582.000		51.582.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdapat dan tertatanya dokumen/arsip	12	27.298.000	12	51.582.000	12	51.582.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			284.356.000		168.400.000		168.400.000				
1	2.10.18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa informasi	12	168.400.000	12	168.400.000	12	168.400.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	SDGs
2	2.10.18.9	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Buletin Sekretariat DPRD	4	115.956.000	4	0	4	0	Setwan	Dana Alokasi Umum	59	
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			0		0		0				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Pavingisasi halaman kantor	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	59	
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			15.992.000		115.956.000		115.956.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.28	Pengelolaan website	Terkelolanya web	12	15.992.000	12	0	12	0	Setwan	Dana Alokasi Umum	59	
2	2.10.15.27	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Tercovernya kegiatan Dewan	115956000		115956000	115.956.000	115956000	115.956.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	34	SDGs
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			0		0		0				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%									
1	4.1.16.13	Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Definitifnya kepala daerah dan wakil kepala daerah		0		0		0	Setwan	-	90	
			TOTAL		26.470.897.000		26.791.040.000		26.593.042.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Kecamatan Magelang Selatan
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan; DST

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.628.457.000		1.745.679.000		1.863.200.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	212.180.000		202.180.000		203.100.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
2	4.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana informasi masyarakat melalui media cetak	10	2.400.000		11.040.000		15.340.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perizinan kendaraan dinas/operasional	66	18.840.000		18.840.000		17.840.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung adminstrasi keuangan	12	368.390.000		368.390.000		368.390.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	ExBAU
5	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kebersihan kantor	12	255.376.000		296.698.000		314.696.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan alat tulis kantor	12	112.445.000		112.445.000		112.445.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12	48.244.000		45.068.000		41.968.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12	20.846.000		16.016.000		20.516.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12	27.360.000		27.180.000		27.180.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan logistik kantor	12	9.917.000		16.410.000		14.730.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	12	162.982.000		167.433.000		174.198.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya upaya untuk memfasilitasi rakor dan konsultasi ke luar daerah	12	273.800.000	12	232.730.000	12 bulan	311.850.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan tenaga kontrak/honoror/tidak tetap	3	52.308.000	3	165.888.000	3	176.692.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan pelayanan kedinasan/pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan/kependudukan	12	63.369.000	12	65.361.000	12 bulan	64.255.000	Kantor Kecamatan	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			654.400.000		616.729.000		1.562.255.000				
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perlengkapan gedung kantor	24	91.049.000	24	0	25 buah	109.234.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan peralatan gedung kantor	3	11.500.000	3	0	18 buah	112.712.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	29	ExBAU
3	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	30	14.012.000	30	0	35 buah	43.917.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	29	ExBAU
4	4.1.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terselenggaranya upaya untuk memelihara rumah dinas	100	5.190.000	100	5.190.000	100 meter persegi	5.190.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara gedung kantor	2609	93.615.000	2609	117.616.000	2609 meter persegi	223.097.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk memelihara kendaraan dinas/operasional	60	178.868.000	60	178.860.000	60 unit	180.066.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara perlengkapan gedung kantor	12	13.535.000	12	11.375.000	12 bulan	18.785.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara peralatan gedung kantor	12	54.525.000	12	22.158.000	12 bulan	22.158.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	66	46.501.000	66	0	66	0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	29	
10	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk perbaikan gedung kantor	275	145.605.000	275	281.530.000	275 meter persegi	827.096.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	29	ExBAU
11	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana transportasi pelayanan masyarakat	0	0	2	0	1 unit	20.000.000	Kelurahan	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			109.590.000		113.926.000		104.810.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12	19.796.000	12	22.166.000	12 bulan	22.166.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Pemberantasan Korupsi
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya rencana kerja OPD	2	20.397.000	2	20.397.000	2 dokumen	20.397.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen RKA-OPD	2	29.894.000	2	29.894.000	2 dokumen	29.894.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKj-IP OPD	1	11.678.000	1	12.284.000	1 dokumen	12.284.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	1	9.757.000	1	10.217.000	1 dokumen	10.217.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	Pemberantasan Korupsi
6	4.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	1	7.511.000	1	7.961.000	1	0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	
7	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1	10.557.000	1	11.007.000	1 dokumen	9.852.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	Pemberantasan Korupsi
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			57.635.000		56.624.000		56.624.000				
			APK PAUD	65%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	51%									
1	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	120	8.252.000	120	8.252.000	120 anak	8.252.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Kota Layak Anak
2	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terbinanya kompetensi tenaga pengelola PAUD	12	30.231.000	12	30.181.000	12 bulan	30.181.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Kota Layak Anak
3	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terdidiknya kader sebagai tenaga pendidik PAUD	1	19.152.000	1	18.191.000	1 kelurahan	18.191.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			83.864.000		84.154.000		84.154.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	76	76.774.000	76	76.764.000	76 RW	76.764.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Tema RKPD 2019

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	1	7.090.000	1	7.390.000	1 kegiatan	7.390.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Tema RKPD 2019
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			18.410.000		12.410.000		12.410.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Terwujudnya pengelolaan website	12	18.410.000	12	12.410.000	12 bulan	12.410.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik											
	2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			6.328.000		6.328.000		6.328.000				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%									
			Persentase pemenuhan data statistik	90%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.14.15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen kecamatan dalam angka	1	6.328.000	1	6.328.000	1 dokumen	6.328.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			715.805.000		706.388.000		783.803.000				
			SATPOL PP		2,622,130,000								
			KESBANGPOL		256,987,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	-									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.13%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,78									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung memelihara stabilitas kantrantibmas	12	715.805.000	12	706.388.000	12 bulan	783.803.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	86	Tema RKPD 2019
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			63.588.000		65.050.000		65.050.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 RW se Kecamatan Magelang Selatan	5	63.588.000	5	65.050.000	5 kegiatan	65.050.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Kota Sejuta Bunga
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			9.652.000		9.652.000		9.652.000				
			Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%									
1	2.8.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan	60	9.652.000	60	9.652.000	60 orang	9.652.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Tema RKPD 2019
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			136.028.000		180.299.000		180.299.000				
			DISNAKERTRANSOS		50,000,000								
			KESBANGPOL		113,200,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%									
			Database ormas yang akurat	69.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama	1	11.482.000	1	44.747.000	1 kegiatan	44.747.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Tema RKPD 2019
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai luhur budaya bangsa	6	98.709.000	6	112.028.000	6 kelurahan	112.028.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	76	Tema RKPD 2019
3	1.5.17.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat	100	13.116.000	100	11.704.000	100 orang	11.704.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Tema RKPD 2019
4	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan nilai-nilai kepatriotan masyarakat	100	12.721.000	100	11.820.000	100 orang	11.820.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Tema RKPD 2019
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			96.624.000		93.381.000		93.381.000				
			DISPORA		2,295,018,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14,86									
			Jumlah festival seni dan budaya.	11									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.5	Facilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festifal/karnaval yang diikuti	1	96.624.000	1	93.381.000	1 kegiatan	93.381.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			29.634.000		29.631.000		29.631.000				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.67%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%									
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	10.00%									
			Jumlah Juara FASI	-									
			Jumlah Juara MTQ	1									
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ	275	29.634.000	275	29.631.000	275 orang	29.631.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Tema RKPD 2019
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan			6.221.000		6.222.000		6.222.000				
1	2.7.18.3	Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan	Jumlah aparatur kelurahan yang dibina	90	6.221.000	90	6.222.000	90 orang	6.222.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	44	Tema RKPD 2019
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			27.940.000		142.369.000		163.003.000				
					1,103,852,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	29%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	10									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	41%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	24%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		143								
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	87.50%									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	54%									
			PKK Aktif		100%								
1	2.7.19.2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	30	12.208.000	30	12.208.000	30 orang	12.208.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	66	Penanggulangan Kemiskinan
2	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah pembinaan kader PKK	12	15.732.000	12	130.161.000	12 bulan	150.795.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Penanggulangan Kemiskinan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			10.496.000		24.842.000		35.338.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	90%									
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	-									
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	-									
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	60	10.496.000	60	24.842.000	60 orang	35.338.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			135.480.000		130.688.000		124.988.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	7									
			#NAME?	17									
			#NAME?	22									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	NA									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan	4	117.330.000	4	113.738.000	4 kegiatan	108.038.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	44	Tema RKPD 2019
2	2.13.20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam sehat	24	18.150.000	24	16.950.000	24 kegiatan	16.950.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			126.385.000		121.135.000		121.135.000				
1	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah peserta yang mengikuti pra musrenbang	125	15.666.000	125	14.733.000	125 orang	14.733.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	2	82.525.000	2	81.593.000	2 kegiatan	81.593.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	4.3.21.21	Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan kependudukan	2	1.747.000	2	0	2	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
4	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	9	26.447.000	9	24.809.000	76 RW	24.809.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			33.177.000		32.136.000		37.911.000				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	37.50%									
			Cakupan tim relawan siaga bencana	2,94									
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	25%									
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	25%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan penanganan korban bencana	100%									
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	5,88%									
			#NAME?	1									
			#NAME?	0									
			#NAME?	0									
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada									
1	1.5.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	60	10.320.000	60	32.136.000	60 orang	37.911.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Tema RKPD 2019
2	1.5.22.9	Koordinansi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	100	22.857.000	100	0	100	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			51.498.000		35.896.000		35.896.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.5	Penataan RTH	Luas terbangunnya RTH	-	0	-	0	-	0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	
2	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya taman kantor kecamatan	12	51.498.000	12	35.896.000	12 bulan	35.896.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	Kota Sejuta Bunga
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			18.067.000		14.355.000		14.355.000				
			Persentase kelurahan siaga aktif tigtat mandiri	52,94%									
1	1.2.28.2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	60	9.409.000	60	8.908.000	60 orang	8.908.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Penanggulangan Kemiskinan
2	1.2.28.12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	Terlaksananya lomba administrasi DAWIS	1	8.658.000	1	5.447.000	1 kegiatan	5.447.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulangan Kemiskinan
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			61.541.000		61.757.000		61.757.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	12%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita	4	41.424.000	4	40.440.000	4 kegiatan	40.440.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Penanggulangan Kemiskinan
2	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Posyandu Balita	15	20.117.000	15	21.317.000	15 posyandu	21.317.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Penanggulangan Kemiskinan
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			148.600.000		144.870.000		144.870.000				
1	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Pelaksanaan rehabilitasi infrastuktur pedesaan	1	45.950.000	1	42.850.000	1 kegiatan	42.850.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Tema RKPD 2019
2	1.3.30.19	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	42 dan 60	102.650.000	42 dan 60	102.020.000	42 meter dan 60 meter	102.020.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Tema RKPD 2019
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			18.762.000		19.547.000		19.547.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%									
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%									
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%									
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%									
1	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	75	8.907.000	75	8.927.000	75 orang	8.927.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Penanggulangan Kemiskinan
2	1.2.32.1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	35	9.855.000	35	10.620.000	35 orang	10.620.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulangan Kemiskinan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			236.442.000		107.420.000		142.620.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	90%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum (K3)	94.50%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11.27%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9									
1	1.5.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelaporan bencana dan tindak kriminal	15	61.823.000	15	36.623.000	15 laporan	36.623.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Tema RKPD 2019
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	pelatihan linmas	45	31.859.000	45	31.075.000	45 orang	31.075.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Tema RKPD 2019
3	1.5.15.5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	73.093.000	1	20.627.000	50 orang	55.827.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Tema RKPD 2019
4	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	2	69.667.000	2	19.095.000	2 orang	19.095.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Tema RKPD 2019
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			189.786.000		321.592.000		337.198.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA										
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	930									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	45%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	15%									
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersampainya informasi kependudukan kepada masyarakat	12	11.854.000	12	7.254.000	12 laporan	7.254.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12	164.606.000	12	302.623.000	12 bulan	318.229.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	76	Tema RKPD 2019
3	2.6.15.33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya upaya dialog untuk mendukung tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat	100	13.326.000	100	11.715.000	100 orang	11.715.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Tema RKPD 2019
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			60.000.000		43.192.000		43.192.000				
			Jumlah wirausaha baru	75 UMKM									
1	2.11.16.5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah kegiatan mempromosikan hasil produk UMK wilayah Kecamatan Magelang Selatan di Lapangan Rindam/IV Diponegoro	4	60.000.000	4	43.192.000	4 kegiatan	43.192.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulangan Kemiskinan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			46.751.000		47.811.000		47.811.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	12%									
1	1.2.30.8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Terselenggaranya pembinaan bagi kader posyandu	60	8.580.000	60	8.580.000	60 orang	8.580.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Penanggulangan Kemiskinan
2	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lansia	3	24.390.000	3	25.451.000	3 posyandu lansia	25.451.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulangan Kemiskinan
3	1.2.30.6	Pelayanan kesehatan	Jumlah Posyandu lansia	10	13.781.000	10	13.780.000	10 posyandu lansia	13.780.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			48.420.000		61.301.000		61.301.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	94.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,65%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah peserta pembinaan	60	48.420.000	60	61.301.000	60 orang	61.301.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Tema RKPD 2019
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			78.680.000		76.079.000		74.944.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kegiatan bulan bakti gotong royong di kelurahan se kecamatan magelang selatan	6	78.680.000	6	76.079.000	6 kelurahan	74.944.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Tema RKPD 2019
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			8.276.000		8.276.000		8.276.000				
			Rasio KDRT	0.06%									
			Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	23									
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%									
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%									
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%									
			Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%									
			Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%									
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%									
			Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	3%									
1	2.2.17.8	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	75	8.276.000	75	8.276.000	75 orang	8.276.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Penanggulangan Kemiskinan
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			30.000.000		29.915.000		29.915.000				
			Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100									
			Jumlah pengunjung museum	5,150									
			Jumlah koleksi museum	11									
1	2.16.16.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah lomba yang dilaksanakan	1	30.000.000	1	29.915.000	1 kegiatan	29.915.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Tema RKPD 2019
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			12.758.000		10.660.000		10.660.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%									
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%									
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%									
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.16.4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	40	6.058.000	40	0	40	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
2	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penanggulangan masalah kesehatan	0	6.700.000	0	10.660.000	55 orang	10.660.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulanga n Kemiskinan
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			55.065.000		55.062.000		55.062.000				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100									
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100									
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31									
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi anak balita dan lansia	24	55.065.000	24	55.062.000	24 posyandu	55.062.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulanga n Kemiskinan
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			31.702.000		31.386.000		31.386.000				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.6	Kader piket bersama dawis	Terlaksananya Kader Piket bersama Dawis/PSN pemberantasan Sarang Nyamuk	13	18.950.000	13	18.849.000	13 RW	18.849.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulanga n Kemiskinan
2	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah peserta penyuluhan	1	12.752.000	1	12.537.000	40 orang	12.537.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulanga n Kemiskinan
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			38.566.000		46.109.000		46.109.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<105									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terfasilitasinya forum lembaga WPA	5	23.050.000	5	30.050.000	6 kegiatan	30.050.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulangan Kemiskinan
2	1.2.22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pertemuan pengurus WPA	45	15.516.000	45	16.059.000	35 orang	16.059.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Penanggulangan Kemiskinan
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan			155.000.000		155.038.000		155.038.000				
1	1.3.37.37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	9	35.000.000	9	35.000.000	9 RW	35.000.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.37.35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	148	60.000.000	148	62.850.000	161 meter	62.850.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.37.34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	134,5	60.000.000	134,5	57.188.000	134,5 meter	57.188.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	1.3.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara			96.290.000		96.290.000		96.290.000				
1	1.3.36.30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	50	0	50	16.100.000	50 meter	16.100.000	RW. VI	Dana Alokasi Umum	69	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.36.33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	12	35.000.000	12	35.000.000	12 bulan	35.000.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.36.8	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	10,5	11.540.000	10,5	0	10,5	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
4	1.3.36.41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya pavingisasi dan jalan beton	1	22.200.000	1	22.200.000	102,5 meter	22.200.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.36.46	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terlaksananya rehabilitasi Saluran drainase	46	11.450.000	46	0	46	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
6	1.3.36.47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terlaksananya rehab /pemeliharaan saluran drainase	50	16.100.000	50	0	50	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
7	1.3.36.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	10.50	0	10.50	11.540.000	10.50 meter	11.540.000	RW. VIII	Dana Alokasi Umum	66	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.3.36.29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	46	0	46	11.450.000	46 meter	11.450.000	RW. V	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	1.3.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari			116.691.000		116.941.000		116.941.000				
1	1.3.35.51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	60	0	60	30.000.000	60 meter persegi	30.000.000	RW. XII	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.35.46	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	40	0	40	19.700.000	40 meter	19.700.000	RW. VII	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.35.37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	60	0	60	31.991.000	60 meter persegi	31.991.000	RW. XI	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.35.11	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Terbangunnya jalan dan jembatan pedesaan	100	31.991.000		0		0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
						100		100					
5	1.3.35.25	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terjaganya infrastruktur pedesaan saluran drainase/gorong-gorong	100	30.000.000		0		0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
						100		100					
6	1.3.35.7	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terlaksananya rehab sedang/ berat gedung kantor berupa pagar tembok keliling kantor	40	19.700.000		0		0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	
						40		40					
7	1.3.35.53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	terpeliharanya infrastruktur pedesaan	13	35.000.000		35.250.000		35.250.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
						13		13 RW					
	1.3.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan			149.868.000		133.072.000		133.072.000				
1	1.3.34.31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terjaganya infrastruktur pedesaan jalan dan jembatan	22	17.277.000		17.277.000	132 meter persegi	17.277.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
						22							
2	1.3.34.35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terjaganya infrastruktur pedesaan jalan dan jembatan	31	9.361.000		9.811.000	72 meter persegi	9.811.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
						31							
3	1.3.34.53	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur pedesaan saluran drainase/gorong-gorong	32,25	10.632.000		7.625.000		7.625.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
						32,25		15 meter					
4	1.3.34.44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	Terjaganya infrastruktur pedesaan jalan dan jembatan	88,46	22.751.000		23.859.000	180 meter persegi	23.859.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
						88,46							
5	1.3.34.92	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur pedesaan	1	35.000.000		35.000.000		35.000.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
						1		1 paket					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.3.34.50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	98	54.847.000	98	39.500.000	76 meter	39.500.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	1.3.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan			299.693.000		296.169.000		296.169.000				
1	1.3.39.30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	1	0	1	38.795.000	1 paket	0	RW. VI	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.39.25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	1	0	1	29.150.000	1	29.150.000	RW. I	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.39.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	80	53.331.000	80	52.950.000	80 meter	52.950.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.39.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	12	35.000.000	12	35.000.000	12 RW	35.000.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.39.1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	75	30.312.000	75	0	75	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
6	1.3.39.16	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	80	60.732.000	80	0	80	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
7	1.3.39.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	100	81.523.000	100	80.650.000	100 meter	80.650.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.39.6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	78	38.795.000	78	0	78	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
9	1.3.39.27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	192	0	192	41.950.000	192 meter	41.950.000	RW. III	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
10	1.3.39.48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	1	0	1	17.674.000	40 meter persegi	17.674.000	RW. XII	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
11	1.3.39.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terjaganya infrastruktur Kelurahan	1	0	0	0	95 meter	38.795.000	RW. IV	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	1.3.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara			246.500.000		245.568.000		245.568.000				
1	1.3.38.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	panjang saluran yang terpelihara	141	30.000.000	141	30.018.000	70 meter	30.018.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.38.47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	panjang saluran yang terpelihara	100	40.000.000	100	39.968.000	100 meter	39.968.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.38.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Panjang jalan yang terpelihara	60	7.500.000	60	6.881.000	60 meter	6.881.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.38.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	panjang saluran yang terpelihara	56	30.000.000	56	30.000.000	56 meter	30.000.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.38.42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	panjang saluran yang terpelihara	96	40.000.000	96	40.001.000	96 meter	40.001.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.38.43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	137	51.000.000	137	50.700.000	114 meter	50.700.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.38.44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	33	13.000.000	33	13.000.000	33 meter	13.000.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.38.53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	13	35.000.000	13	35.000.000	13 RW	35.000.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			8.455.000		0		0				
			Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	8									
			Terpublikasikannya dialog antar agama	5									
			Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	1									
			Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%									
			Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
1	1.5.18.4	Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan	Telaksananya upaya kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME	13	8.455.000	13	0	13	0		Dana Alokasi Umum	45	
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan			17.328.000		17.208.000		17.208.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	2									
1	4.3.16.4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terjalinnnya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	4	17.328.000		17.208.000		17.208.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	94	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			53.237.000		45.008.000		45.908.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	44.74%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan anak	100	37.420.000		45.008.000		45.908.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	91	Kota Layak Anak
2	2.2.16.8	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan anak	30	6.380.000		0		0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	86	
3	2.2.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penguatan kelembagaan anak	1	9.437.000		0		0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	71	
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			110.537.000		93.388.000		93.388.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12	110.537.000		93.388.000		93.388.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	-	55	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			7.885.000		6.662.000		6.662.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada									
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya upaya untuk mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	50	7.885.000		6.662.000		6.662.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan				50		50 orang					
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			127.237.000		123.447.000		130.819.000				
					1,106,484,000								
			Persentase peningkatan judul buku	2,57									
			Persentase peningkatan jumlah buku	2,64									
			Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	47,39									
			Presentase perpustakaan aktif	18,96									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	1%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	8.33%									
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12	127.237.000		123.447.000		130.819.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			9.976.000		0		0				
			Rasio KDRT	0.06%									
			Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	23									
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%									
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%									
			Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%									
			Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%									
			Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%									
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%									
			Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	3%									
1	2.2.17.8	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	75	9.976.000		0		0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			30.000.000		0		0				
			Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100									
			Jumlah pengunjung museum	5,150									
			Jumlah koleksi museum	11									
1	2.16.16.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya daerah	1	30.000.000		0		0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			112.353.000		17.559.000		17.559.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%									
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,00%									
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kegiatan organisasi perempuan dalam pembangunan	12	95.653.000	12	0	12	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	
2	2.2.18.2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	2	16.700.000	2	17.559.000	2 kegiatan	17.559.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			37.546.000		33.856.000		33.856.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya data statistik kelurahan dalam angka	1	37.546.000	1	33.856.000	6 dokumen	33.856.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	0	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			40.000.000		40.000.000		40.000.000				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	18.75%									
			Persentase ormas yang difasilitasi	7.87%									
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam kewaspadaan dini masyarakat	6	40.000.000	6	40.000.000	6 kegiatan	40.000.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Tema RKPD 2019
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			402.842.000		411.342.000		423.449.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					24,049,322,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	88%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan sarpras persampahan	70	350.730.000		361.490.000		373.597.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	71	Kota Sejuta Bunga
						70		70 RW					
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya sampah melalui pengembangan kampung organik	4	52.112.000		49.852.000		49.852.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi MKSB
						4		4 RW					
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			28.120.000		30.112.000		31.262.000				
					4,337,464,000								
			Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4									
			Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	65%									
1	2.13.21.7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga yang memadai	12	28.120.000		30.112.000		31.262.000	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Tema RKPD 2019
						12		12 bulan					
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			13.340.000		0		0				
			Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dalam mendukung kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan										
1	2.7.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Teselenggaranya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	6	13.340.000		0		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	64	
						6		6					
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			10.741.000		0		0				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	25%									
			Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur	5%									
			Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	53,33									
			Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	5									
			Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	5%									
			Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	1									
			Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan										
			Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat	-									
			Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	NA									
1	1.5.24.1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama	150	10.741.000	150	0	150	0	OPD Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	
				TOTAL	7.158.267.000		7.154.531.000		8.388.282.000				

**MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018**

OPD : Kecamatan Magelang Tengah
URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan; DST

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.691.945.400		1.819.289.000		2.004.786.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, Air, dan Internet	12	138.336.000	12	174.636.000	12	197.156.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayar	10	15.500.000	10	15.690.000	10	15.690.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12	394.389.000	12	362.589.000	12	362.589.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan dan Alat Pembersih	2	229.381.000	2	313.615.000	2	333.603.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli	61	107.247.400	61	107.189.000	61	110.015.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	2	63.829.000	2	47.308.000	2	56.308.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik	9	15.483.000	9	15.483.000	9	16.683.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Surat Kabar Yang Dibeli Tiap Bulan	2	30.213.000	2	30.213.000	2	30.213.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi Tabung Gas	1	13.099.000	1	15.502.000	1	15.502.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Varian	6	151.039.000	6	163.513.000	6	186.118.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Yang Dilakukan	1	257.180.000	1	229.058.000	1	308.178.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	50	ExBAU
12	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah Laporan PATEN	12	186.129.000	12	194.097.000	12	212.441.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	70	SDGs
13	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai Yang Dibeli	100	2.940.000	100	2.940.000	100	3.240.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Jumlah Bulan	12	87.180.000	12	147.456.000	12	157.050.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			636.650.100		408.589.000		1.254.458.000				
1	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas Rumah Dinas yang Dipelihara	250	0	250	0	250	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	
2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara	800	83.326.000	800	81.826.000	800	91.326.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10	224.607.250	10	223.157.000	10	223.157.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	100	5.700.000	100	10.960.000	100	17.260.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang Dipelihara	9	58.486.000	9	52.906.000	9	52.906.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	10	114.880.000	10	0	10	300.410.000	OPD Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
7	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dibeli	100	47.106.000	100	0	100	127.159.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
8	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional OPD	1	76.750.000	1	39.740.000	1	79.740.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	25.794.850	1	0	1	357.500.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
10	4.1.2.35	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumah pagar yang terbangun	100		100		100	5.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			10.699.000		0		0				
1	4.1.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Program Pembinaan dan Evaluasi Yang Dilaksanakan	1	10.699.000	1	0	1	0	Kelurahan se-Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			99.472.000		98.422.000		104.422.000				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan RFK Yang Tersusun	4	29.620.000	4	24.420.000	4	30.420.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	SDGs
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	2	24.752.000	2	26.052.000	2	26.052.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	2	33.252.000	2	34.552.000	2	34.552.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	SDGs
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) OPD	Dokumen LKIP yang Tersusun	5	11.848.000	5	13.398.000	5	13.398.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	44	SDGs
5	4.1.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Tersusun		0		0		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	
6	4.1.6.26	Evaluasi Rencana Strategis OPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra Yang Disusun	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			44.019.000		44.644.000		44.644.000				
			APK PAUD	65%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	51%									
1	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	4	16.856.000	4	16.431.000	4	16.431.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak
2	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	24.003.000	6	28.213.000	6	28.213.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak
3	1.1.15.66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	6	3.160.000	6	0	6	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			133.899.000		94.091.000		97.291.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	90%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	94.50%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11.27%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9									
1	1.5.15.5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jenis Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	1	52.308.000	1	0	1	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	
2	1.5.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	4	39.598.000	4	39.838.000	4	39.838.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kemampuan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	41.993.000	1	54.253.000	1	57.453.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			72.748.000		60.283.000		60.283.000				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan	90	12.118.000	90	4.988.000	90	4.988.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	SDGs
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah Peserta	100	44.480.000	100	55.295.000	100	55.295.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Peserta	100	16.150.000	100	0	100	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			16.941.000		17.262.000		7.578.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.28	Pengelolaan website	Jumlah Bulan	12	9.684.000	12	9.684.000	12	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	70	
2	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	7.257.000	6	7.578.000	6	7.578.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik											
	2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			12.557.000		0		0				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%									
			Persentase pemenuhan data statistik	90%									
1	2.14.15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah Buku Yang Tersusun	30	12.557.000	30	0	30	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			152.541.000		160.073.000		160.073.000				
			Jumlah gedung kesenian	1									
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	11									
			Cakupan kajian seni 50%	75									
			Cakupan fasilitas seni 30%	35									
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	77									
			Cakupan tempat 100%	100									
			Cakupan organisasi 34%	100									
			DISPORA		330,000,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1	152.541.000	1	160.073.000	1	160.073.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			787.960.000		737.510.000		829.550.000				
			SATPOL PP		2,622,130,000								
			KESBANGPOL		256,987,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	-									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.13%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,78									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	4	29.079.000	4	0	4	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	
2	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi Stabilitas Keamanan	12	758.881.000	12	737.510.000	12	829.550.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			60.274.500		61.994.000		61.994.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	44.74%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	44.852.500		61.994.000		61.994.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak
2	2.2.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	15.422.000		0		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	70	
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			59.671.500		59.288.000		59.288.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Lomba K3	2	59.671.500		59.288.000		59.288.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			146.291.500		109.232.000		106.189.000				
			DISNAKERTRANSOS		50,000,000								
			KESBANGPOL		113,200,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%									
			Database ormas yang akurat	69.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	1	63.276.000		62.547.000		62.547.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	64	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	1.5.17.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah Pertemuan FKDM	6	60.525.500		46.685.000		43.642.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	22.490.000		0		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			165.149.900		190.210.000		190.210.000				
			DISPORA		2,295,018,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14,86									
			Jumlah festival seni dan budaya.	11									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.5	Facilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Kegiatan Karnaval Yang Dilaksanakan	1	87.990.900	1	92.097.000	1	92.097.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	77.159.000	6	98.113.000	6	98.113.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			39.869.000		39.450.000		39.450.000				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.67%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%									
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	10.00%									
			Jumlah Juara FASI	-									
			Jumlah Juara MTQ	1									
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba MTQ	170	39.869.000	170	39.450.000	170	39.450.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	65	SDGs
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			135.282.000		124.116.000		124.116.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%									
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,00%									
1	2.2.18.2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	5	34.491.000	5	0	5	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	64	
2	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang terbina	6	100.791.000	6	124.116.000	6	124.116.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			54.986.000		81.901.000		94.351.000				
					1,103,852,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	29%									
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	10									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	41%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	24%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		143								
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	87.50%									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	54%									
			PKK Aktif		100%								
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah TP PKK Yang Terbina	7	54.986.000		81.901.000		94.351.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			15.551.000		16.330.000		16.330.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	90%									
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	-									
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	-									
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Peserta Penyuluhan	60	12.178.000	60	12.042.000	60	12.042.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak
2	1.5.20.6	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Jumlah Peserta	100	3.373.000	100	4.288.000	100	4.288.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			155.313.600		137.956.000		137.956.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	7									
			#NAME?	17									
			#NAME?	22									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	NA									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Olah Raga Yang Dilaksanakan	2	134.313.600	2	137.956.000	2	137.956.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	65	SDGs
2	2.13.20.10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	21.000.000	6	0	6	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	70	
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			132.786.900		131.853.000		131.853.000				
1	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Laporan Pra Musrenbang	5	13.642.000	5	12.877.000	5	12.877.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang
2	4.3.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah Laporan Monev	4	0	4	0	4	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	90	
3	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	160	96.401.500	160	95.608.000	160	95.608.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	Akomodasi Musrenbang
4	4.3.21.55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja Yang Tersusun	2	0	2	0	2	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah Survey yang Dilaksanakan	6	22.743.400	6	23.368.000	6	23.368.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			60.000.000		0		0				
1	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Paket Pekerjaan	1	35.000.000	1	0	1	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	
2	1.3.30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk Kelurahan	jumlah kegiatan neonisasi	10	15.000.000	10	0	10	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	
3	1.3.30.6	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih Kelurahan	jumlah MCK yang dibuat	1	10.000.000	1	0	1	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			0		0		0				
			Jumlah wirausaha baru	75 UMKM									
1	2.11.16.5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi		1	0	1	0	1	0		Dana Alokasi Umum	60	
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			92.645.500		97.167.000		115.753.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	100	92.645.500	100	97.167.000	100	115.753.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			120.486.600		137.588.000		141.058.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya penataan dokumen kearsipan	100	120.486.600		137.588.000		141.058.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				100		100					
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			47.719.000		46.627.000		46.627.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<105									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	100%	47.719.000	100%	46.627.000	100%	46.627.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	64	SDGs
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			470.532.000		522.199.000		543.889.000				
					24,049,322,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	88%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah TPS yang Dikelola	6	425.963.000		457.655.000		479.345.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah Kampung Organik Yang Terbentuk	6	41.787.000		42.462.000		42.462.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.5.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	12	2.782.000		22.082.000		22.082.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			83.295.600		234.436.000		241.632.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA										
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	930									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	45%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	15%									
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan	12	57.738.000		72.840.000		72.840.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Laporan	12	25.557.600		161.596.000		168.792.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			77.703.000		82.270.000		89.556.000				
					1,106,484,000								
			Persentase peningkatan judul buku	2,57									
			Persentase peningkatan jumlah buku	2,64									
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	47,39									
			Presentase perpustakaan aktif	18,96									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	1%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	8.33%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.17.15.14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	Jumlah Buku	17	3.900.000	17	3.000.000	17	8.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dikelola	6	36.516.000	6	79.270.000	6	81.556.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Jumlah Masyarakat Yang Terlayani	100	37.287.000	100	0	100	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			16.604.600		27.613.000		27.613.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Buku	6	16.604.600	6	27.613.000	6	27.613.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			25.076.000		25.733.000		25.733.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	94.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,65%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Peserta	30	25.076.000	30	25.733.000	30	25.733.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			89.897.000		94.909.000		94.909.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	89.897.000	6	94.909.000	6	94.909.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			19.676.000		20.035.000		20.035.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%									
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%									
			Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%									
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%									
1	1.2.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	2	19.676.000	2	20.035.000	2	20.035.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	SDGs
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			7.000.000		6.250.000		12.250.000				
					4,783,517,000								
			Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat										
1	1.4.16.2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	7.000.000	6	6.250.000	6	12.250.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			109.221.000		128.346.000		133.932.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	12%									
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	109.221.000	6	128.346.000	6	133.932.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			94.133.300		162.629.000		162.629.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	12%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6	94.133.300	6	162.629.000	6	162.629.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			13.653.000		68.471.000		68.471.000				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	18.75%									
			Persentase ormas yang difasilitasi	7.87%									
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1	13.653.000	1	68.471.000	1	68.471.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			26.000.000		0		0				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100									
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100									
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31									
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah warga yang terlayani	100	26.000.000	100	0	100	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo			147.800.000		157.800.000		157.800.000				
1	1.3.45.15	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Tercapainya pembangunan saluran drainase	60 x 0,30	24.000.000	60 x 0,30	24.000.000	60 x 0,30	24.000.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.45.22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terpeliharanya paving RW IV	40	6.400.000	40	6.400.000	40	6.400.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	79	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.45.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya paving RW VI	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	69	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.45.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpeliharanya paving RW VIII	40	6.400.000	40	6.400.000	40	6.400.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	79	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.45.25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Tercapainya pemeliharaan jalan dan jembatan RW VII	96	20.000.000	96	20.000.000	96	20.000.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	79	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.45.32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Tercapainya pemeliharaan saluran drainase RW V	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	79	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.45.37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya insfrastrukturu Kelurahan	100	35.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	79	Akomodasi Musrenbang
	1.3.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang			96.980.000		66.829.000		66.829.000				
1	1.3.49.21	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Panjang jalan dipelihara	60	14.000.000	60	14.000.000	60	14.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.49.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Panjang jalan dipelihara	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.49.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpeliharanya paving RW VII	96	20.000.000	96	0	96	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	79	
4	1.3.49.30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Panjang gorong-gorong dipelihara	52	18.000.000	52	18.000.000	52	18.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.3.49.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Jumlah jalan kampung dipelihara	280	34.980.000	280	24.829.000	280	24.829.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	50	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan			54.600.000		44.459.000		44.459.000				
1	1.3.50.25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan RW V	30 m'	21.000.000	30 m'	21.000.000	30 m'	21.000.000	RW V Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	74	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.50.9	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Sarana dan prasarana lingkungan yang memadai	62 m2	21.600.000	62 m2	11.459.000	62 m2	11.459.000	RW IX Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	74	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.50.39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Sarana dan prasarana lingkungan yg memadai	32 m'	12.000.000	32 m'	12.000.000	32 m'	12.000.000	RW IX Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	74	Akomodasi Musrenbang
	1.3.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban			222.325.000		205.234.000		205.234.000				
1	1.3.46.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	pemeliharaan jalan lingkungan	pemeliharaan jalan lingkungan	46.100.000	pemeliharaan jalan lingkungan	43.685.000	pemeliharaan jalan lingkungan	43.685.000	RW. II	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.46.30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	pemeliharaan jalan lingkungan	pemeliharaan jalan lingkungan	30.550.000	pemeliharaan jalan lingkungan	29.258.000	pemeliharaan jalan lingkungan	29.258.000	RW. VI	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.46.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	pemeliharaan jalan lingkungan	pemeliharaan jalan lingkungan	42.550.000	pemeliharaan jalan lingkungan	39.175.000	pemeliharaan jalan lingkungan	39.175.000	RW. VIII	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.46.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	pemeliharaan jalan lingkungan	pemeliharaan jalan lingkungan	17.300.000	pemeliharaan jalan lingkungan	17.300.000	pemeliharaan jalan lingkungan	17.300.000	RW. IX	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.3.46.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	pemeliharaan jalan lingkungan	pemeliharaan jalan lingkungan	24.100.000	pemeliharaan jalan lingkungan	23.380.000	pemeliharaan jalan lingkungan	23.380.000	RW. X	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	1.3.46.35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	pemeliharaan jalan lingkungan	pemeliharaan jalan lingkungan	8.450.000	pemeliharaan jalan lingkungan	8.450.000	pemeliharaan jalan lingkungan	8.450.000	RW. XI	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.3.46.43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	pemeliharaan saluran air limbah	pemeliharaan saluran air limbah	46.325.000	pemeliharaan saluran air limbah	43.986.000	pemeliharaan saluran air limbah	43.986.000	RW. VII	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.3.46.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	pemeliharaan bak sampah	pemeliharaan bak sampah	6.950.000	pemeliharaan bak sampah	0	pemeliharaan bak sampah	0	RW. V	Dana Alokasi Umum	89	
	1.3.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara			112.153.000		129.905.000		111.053.000				
1	1.3.47.85	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	100			17.452.000		17.452.000	kelurahan rejowinangun utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.3.47.49	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan	67 m2	31.787.000		31.787.000		31.787.000	RW VII Kelurahan rejowinangun utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.47.60	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XVIII	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan	248 m2	61.514.000		61.814.000		61.814.000	RW XVIII kelurahan rejowinangun utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.47.77	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	Terpeliharanya Gorong-Gorong RW XIV	15	18.852.000		18.852.000		0	RW XIV kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
	1.3.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang			162.000.000		162.000.000		360.000.000				
1	1.3.48.31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Jalan Yg Terpelihara	97	20.000.000		20.000.000		20.000.000	RW V Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program 100-0-100
2	1.3.48.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Talud Jalan Yang Terpelihara	50 m2; 247,5 m3	52.000.000		52.000.000		250.000.000	RW VII Kelurahan Magelang yang mengalami kebakaran, masuk kawasan kumuh	Dana Alokasi Umum	94	Program 100-0-100
3	1.3.48.37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Jalan Yg Terpelihara	70	35.000.000		35.000.000		35.000.000	RW XI Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program 100-0-100
4	1.3.48.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Terpelihara	50	35.000.000		35.000.000		35.000.000	RW II Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program 100-0-100
5	1.3.48.47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Terpelihara	80	20.000.000		20.000.000		20.000.000	RW VIII Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program 100-0-100
6	1.3.48.49	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Saluran drainase / gorong-gorong yang terpelihara	60 m		60 m		60 m	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Program 100-0-100
				TOTAL	6.774.108.000		6.812.993.000		8.194.284.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Kecamatan Magelang Utara
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan; DST

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.529.390.000		1.520.171.000		1.695.501.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	124.200.000	12	124.200.000	12	138.480.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	10	20.000.000	10	20.000.000	10	19.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan	12	368.671.000	12	334.965.000	12	352.185.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	163.130.000	12	171.098.000	12	183.726.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	65	87.000.000	65	86.154.000	65	86.154.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	31.500.000	2	31.500.000	2	31.500.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	17.788.000	11	18.634.000	15 item	21.234.000	Kecamatan Magelang utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
8	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	28	45.397.000	28	26.573.000	28	26.573.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	22.670.000	2	24.180.000	2	24.180.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2	13.000.000	2	15.048.000	2	15.048.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	3	105.370.000	3	107.383.000	3	111.327.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	1	216.898.000	1	184.724.000	1	273.844.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	9	156.924.000	9	165.888.000	9	180.094.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan	12	156.842.000	12	164.427.000	12	175.476.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
15	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	25	0	25	45.397.000	25	55.980.000	OPD Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.818.731.000		499.858.000		1.231.220.000				
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	77	228.577.000	77	0	77	152.699.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya peralatan gedung kantor	9	177.000.000	9	0	9	195.983.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur gedung kantor	13	107.474.000	13	0	13	40.812.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala	90	12.000.000	90	12.000.000	90	12.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	2339	180.000.000	2339	180.000.000	2339	180.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	41	154.752.000	41	154.973.000	41	163.836.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	5	21.420.000	5	16.740.000	5	16.740.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
8	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	8	47.580.000	8	40.895.000	8	40.895.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
9	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor	4	767.350.000	4	95.250.000	4	428.255.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
10	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	3	122.578.000	0	0	3	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			85.625.000		84.956.000		84.956.000				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1	26.691.000	1	26.691.000	1	26.691.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD	2	18.739.000	2	18.739.000	2	18.739.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran OPD	2	29.526.000	2	29.526.000	2	29.526.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.1.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Tersedianya Rencana Strategis OPD		0		0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	
5	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	1	10.669.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			49.548.000		49.548.000		49.548.000				
			APK PAUD	65%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	51%									
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik	170	32.734.000	170	32.734.000	170	32.734.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
2	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Terpilainya juara ketrampilan anak PAUD	9	16.814.000	9	16.814.000	9	16.814.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			6.687.000		38.613.000		38.613.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampainya informasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	300	6.687.000	300	38.613.000	300	38.613.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			23.651.000		134.243.000		143.714.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA										
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	930									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	45%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	15%									
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	10	23.651.000	10	134.243.000	10	143.714.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			24.927.000		0		0				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Terkelolanya website kecamatan	1	24.927.000		0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	
	2,14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik											
	2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			3.987.000		0		0				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%									
			Persentase pemenuhan data statistik	90%									
1	2.14.15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terlaksananya penyusunan kecamatan dalam angka	1	3.987.000		0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			43.000.000		41.067.000		44.994.000				
					1,106,484,000								
			Persentase peningkatan judul buku	2,57									
			Persentase peningkatan jumlah buku	2,64									
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	47,39									
			Presentase perpustakaan aktif	18,96									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	1%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	8.33%									
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselelenggaranya pelayanan perpustakaan	12	37.000.000		41.067.000		44.994.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.17.15.12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	Tersedianya rak buku perpustakaan	1	6.000.000		0		0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	35	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			702.866.000		702.866.000		771.311.000				
			SATPOL PP		2,622,130,000								
			KESBANGPOL		256,987,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	-									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.13%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,78									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kecamatan	12	702.866.000		702.866.000		771.311.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			75.047.000		75.047.000		75.047.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kecamatan	2	75.047.000		75.047.000		75.047.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			66.462.000		54.459.000		54.459.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kecamatan	12	54.462.000		54.459.000		54.459.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.18.16.1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya rak penyimpan arsip kantor	2	12.000.000		0	2	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	35	
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan			33.768.000		0		0				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	2									
1	4.3.16.4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terselenggaranya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	1	33.768.000		0	1	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			161.563.000		163.817.000		163.817.000				
			DISNAKERTRANSOS		50,000,000								
			KESBANGPOL		113,200,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%									
			Database ormas yang akurat	69.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	6	51.563.000		53.817.000		53.817.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	11	110.000.000	11	110.000.000	11	110.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			100.030.000		101.805.000		101.805.000				
			DISPORA		2,295,018,000								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14,86									
			Jumlah festival seni dan budaya.	11									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya kegiatan kesenian dan budaya daerah		0		0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	6	100.030.000	6	101.805.000	6	101.805.000	Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Kota Sejuta Bunga
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			28.922.000		29.227.000		29.227.000				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.67%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%									
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	10.00%									
			Jumlah Juara FASI	-									
			Jumlah Juara MTQ	1									
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24	28.922.000	24	29.227.000	24	29.227.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan			2.454.000		2.664.000		2.664.000				
1	2.7.18.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya movev kapasitas aparatur pemerintah kelurahan	1	2.454.000	1	2.664.000	1	2.664.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Tema RKPD 2019
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			82.389.000		82.389.000		99.306.000				
					1,103,852,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	29%									
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	10									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	41%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	24%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		143								
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	87.50%									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	54%									
			PKK Aktif		100%								
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kecamatan/kelurahan	165	82.389.000	165	82.389.000	165	99.306.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			7.187.000		7.187.000		7.187.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	90%									
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	-									
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	-									
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	30	7.187.000	30	7.187.000	30	7.187.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			130.520.000		148.682.000		148.682.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	7									
			#NAME?	17									
			#NAME?	22									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	NA									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	290	130.520.000		148.682.000		148.682.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			141.171.000		142.232.000		142.232.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	12	113.381.000		114.525.000		114.525.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
						12		12					
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	5	27.790.000		27.707.000		27.707.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
						5		5					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			38.276.000		39.689.000		39.689.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<105									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersampainya edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	50	6.636.000		6.956.000		6.956.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampainya informasi penanganan penyakit AIDS	100	31.640.000		32.733.000		32.733.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50.000.000		66.000.000		255.308.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12	50.000.000		66.000.000		66.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.24.5	Penataan RTH	Terselenggaranya penataan RTH	1			0		189.308.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi MKSB, Kota Sejuta Bunga
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			59.507.000		59.873.000		59.873.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	12%									
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	300	54.479.000	300	54.519.000	300	54.519.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
2	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev kegiatan pelayanan anak balita	4	5.028.000	4	5.354.000	4	5.354.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Kota Layak Anak
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			59.433.000		59.333.000		59.333.000				
1	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1	59.433.000	1	59.333.000	1	59.333.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			72.145.000		72.145.000		75.145.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	90%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	94.50%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11.27%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9									
1	1.5.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya movev keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	16.570.000	1	16.570.000	1	16.570.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	150	28.530.000	150	44.580.000	150	44.580.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	150	27.045.000	150	10.995.000	150	13.995.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			46.565.000		46.565.000		46.565.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%									
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%									
			Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%									
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%									
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan masalah kesehatan	150	46.565.000	150	46.565.000	150	46.565.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			48.385.000		76.155.000		76.155.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	12%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	250	48.385.000	250	76.155.000	250	76.155.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			25.390.000		25.352.000		25.352.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%									
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%									
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%									
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pemantapan GSI untuk ibu hamil	100	25.390.000	100	25.352.000	100	25.352.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong			148.000.000		98.477.000		98.477.000				
1	1.3.19.5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	3	148.000.000		98.477.000		98.477.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
	1.3.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari			284.700.000		301.005.000		301.005.000				
1	1.3.41.23	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW II	67	41.200.000		43.835.000		43.835.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.41.24	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW III	1	0	1	0	1	0	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	
3	1.3.41.15	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW I	1	0	1	0	1	0	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	
4	1.3.41.16	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW II	1	0	1	0	1	0	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	
5	1.3.41.17	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW III	1	0	1	0	1	0	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	
6	1.3.41.18	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW IV	1	0	1	0	1	0	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	
7	1.3.41.19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW V	1	0	1	0	1	0	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	
8	1.3.41.20	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW VI	1	0	1	0	1	0	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	
9	1.3.41.21	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW VII	1	0	1	0	1	0	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	
10	1.3.41.22	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW I	1	0	1	0	1	0	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.3.41.25	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW IV	48	61.000.000	48	65.035.000	48	65.035.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
12	1.3.41.26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW V	172	147.500.000	172	157.135.000	172	157.135.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
13	1.3.41.29	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	7	35.000.000	7	35.000.000	7	35.000.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
	1.3.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates			306.940.000		306.940.000		306.940.000				
1	1.3.40.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100	17.500.000	100	17.500.000	100	17.500.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.40.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	70,2	12.290.000	70,2	12.290.000	70,2	12.290.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.40.30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	90	15.750.000	90	15.750.000	90	15.750.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.40.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	50	9.000.000	50	9.000.000	50	9.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.40.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	316	56.500.000	316	56.500.000	316	56.500.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.3.40.43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	447	60.900.000	447	60.900.000	447	60.900.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
7	1.3.40.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	661,5	100.000.000	661,5	100.000.000	661,5	100.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
8	1.3.40.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	13	35.000.000	13	35.000.000	13	35.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
	1.3.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari			390.000.000		390.000.000		518.456.000				
1	1.3.42.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	90	17.000.000	90	17.000.000	90	17.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.42.25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	90	17.000.000	90	17.000.000	90	17.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.42.27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	140	25.000.000	140	25.000.000	140	25.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.42.30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.42.31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	100	40.000.000	100	40.000.000	100	68.633.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.3.42.32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	150	60.000.000	150	60.000.000	150	60.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
7	1.3.42.33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70	34.000.000	70	34.000.000	70	34.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
8	1.3.42.34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	126	60.000.000	126	60.000.000	126	60.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
9	1.3.42.35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	60	30.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
10	1.3.42.36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70	47.000.000	70	47.000.000	70	47.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
11	1.3.42.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	30	10.000.000	30	10.000.000	30	109.823.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
12	1.3.42.41	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
	1.3.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara			135.000.000		135.000.000		135.000.000				
1	1.3.43.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.3.43.28	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.43.29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	204	25.000.000	204	25.000.000	204	25.000.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.43.33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	8	35.000.000	8	35.000.000	8	35.000.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
	1.3.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan			231.000.000		261.000.000		261.000.000				
1	1.3.44.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpeliharanya jlan dan jembatan di tingkat RW	0	0	0	0	100 m2	15.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.44.34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70	17.500.000	70	17.500.000	70	17.500.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.44.35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	80	18.000.000	80	18.000.000	80	18.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.44.36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	75	18.000.000	75	18.000.000	75	18.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.44.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	80	18.000.000	80	18.000.000	80	18.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.3.44.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	60	16.000.000	60	16.000.000	60	16.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
7	1.3.44.39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	75	17.000.000	75	17.000.000	75	17.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB, Akomodasi Musrenbang
8	1.3.44.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	170	24.000.000	170	54.000.000	170	39.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
9	1.3.44.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
10	1.3.44.42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
11	1.3.44.43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
12	1.3.44.44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	20	12.500.000	20	12.500.000	20	12.500.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
13	1.3.44.45	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			58.030.000		58.030.000		58.030.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	44.74%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	250	58.030.000	250	58.030.000	250	58.030.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			32.191.000		32.533.000		32.533.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%									
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,00%									
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga melalui wadah BKR	150	32.191.000	150	32.533.000	150	32.533.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Mempertegas Skenario Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			351.342.000		432.741.000		455.149.000				
					24,049,322,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	88%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	48	286.342.000	48	367.741.000	48	390.149.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	5	65.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi MKSB, Kota Sejuta Bunga

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			146.450.000		146.450.000		146.450.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	279	73.850.000	279	73.850.000	279	73.850.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	125	72.600.000	125	72.600.000	125	72.600.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.7.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan			19.650.000		20.234.000		20.234.000				
1	2.7.16.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya movev LKK kelurahan	5	19.650.000	5	20.234.000	5	20.234.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			34.100.000		31.888.000		31.888.000				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2									
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	125	34.100.000	125	31.888.000	125	31.888.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			24.600.000		24.600.000		24.600.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	94,00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,65%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	150	24.600.000	150	24.600.000	150	24.600.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB
	2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			27.000.000		0		0				
					4,337,464,000								
			Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	65%									
1	2.13.21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya alat olahraga	5	27.000.000	5	0	5	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			99.150.000		99.103.000		99.103.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	5	99.150.000	5	99.103.000	5	99.103.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		39.547.000		39.547.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya profile kecamatan/kelurahan	6		6	39.547.000	6	39.547.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	7.805.779.000		6.701.491.000		8.050.115.000				

**MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018**

OPD : Inspektorat
URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			301.400.000		242.329.000		297.679.000				
1	4.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	1000	3.250.000	1000	3.000.000	1000	3.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Langganan Telepon dan Internet	12	13.000.000	12	12.498.000	12 bulan	12.498.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	21	10.000.000	21	8.800.000	21 unit	8.800.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Belanja Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dan Pengelola Barang Daerah	12	60.000.000	12	63.600.000	12 bulan	63.600.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	15	2.750.000	15	2.498.000	15 jenis	2.498.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor	14	11.000.000	14	10.000.000	14 jenis	10.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	6.500.000	3	6.000.000	3jenis	6.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Belanja Langganan Surat Kabar dan Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	50	20.000.000	50	5.000.000	3 jenis	5.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.2.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas LPG	6	900.000	6	900.000	6 kali	900.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Pegawai dan Tamu Kantor	22	44.000.000	22	39.993.000	22 keg	39.993.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
11	4.2.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	20	130.000.000	20	90.040.000	20 keg	145.390.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	4.2.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			187.565.000		169.895.000		907.681.000				
1	4.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengadaan/pemeliharaan tanaman hias ruangan kantor dan perlengkapannya	5	15.000.000	5	5.000.000	5 jenis	5.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	21	150.000.000	21	144.945.000	21 unit	144.945.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (Komputer, laptop, printer, mesin ketik dan AC)	63	22.565.000	63	19.950.000	63 unit	20.200.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana prasarana					8 unit	56.550.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	35	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.2.2.16	Perencanaan Bangunan Gedung	Jumlah pengadaan gedung kantor (DED gedung kantor)	2018		2018		jasa konsultan perencanaan (1 Paket)	276.217.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
6	4.2.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	2018		2018		1 unit minibus	244.000.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
7	4.2.2.10	Pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2018		2018		Meja/Kursi 3 unit,kursi rapat 25 unit,almari arsip 1 unit, meja/kursi es II,1 unit	47.672.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	30	Rencana
8	4.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2018		2018		sinwas 1 paket,lap top 6 unit,printer A-3 -3,printer injek:1 unit,scanner ADF 1 unit,	113.097.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	30	Rencana
	4.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			38.074.000		32.000.000		32.000.000				
			Persentase LKJP SKPD dengan nilai baik	CC									
			Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	60%									
			Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar	60%?									
			Persentase LKJP SKPD dengan nilai baik	40%									
			Penurunan kasus temuan LKPD	2									
			Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu	85%									
			Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	60%									
			Nilai survey kepuasan penggunaan layanan PD	90									
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP										
			Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP	80%									
			Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP	60%									
			Persentase implementasi SPIP	72%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.2.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capain kinerja	4	11.074.000	4	10.000.000	4 laporan	10.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.2.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	2	2.000.000	2	2.000.000	1 bedel	2.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.2.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1	3.000.000	1	3.000.000	1 buku laporan	3.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.2.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Laporan Renja SKPD	2	4.000.000	2	4.000.000	2 dok	4.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.2.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah RKA dan RKPA SKPD	2	15.000.000	2	10.000.000	2 dok	10.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.2.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah Buku LKj IP SKPD	1	3.000.000	1	3.000.000	1 dok	3.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			10.000.000		5.000.000		5.000.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.28	Pengelolaan website	Jumlah Pengelolaan Sarana Publikasi Website SKPD	4	10.000.000		5.000.000		5.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan				4		2 keg					
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			1.434.172.000		1.227.743.000		1.493.342.000				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	30%									
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%									
			Persentase zona integritas yang terbentuk	10%									
			Nilai hasil LKJip SKPD	CC									
			Persentase SKPD yang direview LKJIP	35%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	90%									
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	60%									
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	90%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	90%									
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	65%									
			persentase SPM yang mencapai target nasional	65%									
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.2.15.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik)	80	400.166.000	80	339.189.000	80 obrik	368.892.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
2	4.2.15.2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik) kasus/khusus	12	101.000.000	12	95.310.000	12 keg	95.310.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Pemberantasan Korupsi
3	4.2.15.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Penyusunan Data Pendukung Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat Kota, Inspektorat Prov, dan pending BPK	1000	240.162.000	1000	220.000.000	1000 rekomendasi	220.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.2.15.8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Evaluasi hasil pelaksanaan pemeriksaan	1	42.833.000	1	35.001.000	1 kek	35.001.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Pemberantasan Korupsi
5	4.2.15.10	Review Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Reviu LKD SKPD dan Reviu BUD	2	45.557.000	2	44.317.000	2 keg	44.317.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.2.15.23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Whistleblowing System dan Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional	2	117.578.000	2	55.000.000	4 laporan	55.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	4.2.15.24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Laporan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	2	46.531.000	2	19.800.000	3 laporan (pejabat negara, pejabat struktural, staf fungsional sampai dengan golongan III)	35.720.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Pemberantasan Korupsi
8	4.2.15.25	Penyelesaian Kerugian Negara	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	6	185.386.000	6	173.106.000	4 laporan	173.106.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Pemberantasan Korupsi
9	4.2.15.33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	RKPD, KUAPPAS, RKA dan RKPA SKPD	20	15.859.000	20	43.619.000	4 laporan	60.192.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Pemberantasan Korupsi
10	4.2.15.37	Evaluasi LKJIP	Laporan Satgas Saber Pungli	12	239.100.000	12	45.500.000	2 keg	45.500.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	4.2.15.35	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Laporan satgas saber pungli	12		12	123.250.000	6 kegiatan, 6 laporan	131.800.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	60	Pemberantasan Korupsi
12	4.2.15.11	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	Laporan Pajak Pribadi PNS	3200		3200	16.223.000	3200	0	inspektorat	Dana Alokasi Umum	30	Pemberantasan Korupsi
13	4.2.15.34	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	Pengawasan	4		4	17.428.000	4 kegiatan	33.432.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	35	Pemberantasan Korupsi
14	4.2.15.40	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Laporan ILHPS guna money pengawasan	2		2		1 keg	23.099.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	60	Pemberantasan Korupsi

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	4.2.15.17	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Terselesaikannya aduan dan permasalahan	3		3		3 laporan	161.574.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	90	Pemberantasan Korupsi
16	4.2.15.12	Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004	Teselenggaranya sosialisasi	100		100		100	10.399.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	30	Pemberantasan Korupsi
	4.2.16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			208.646.000		174.367.000		251.114.000				
			Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 2									
			Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	60%									
			Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	65%									
1	4.2.16.3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor dan P2UPD	18	36.426.000	18	29.999.000	2 keg	29.999.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.2.16.6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pelatihan di kantor Sendiri (PKS) dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan	120	110.000.000	120	86.287.000	480 orang / jamuan	163.034.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Pemberantasan Korupsi
3	4.2.16.8	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	Aktualisasi dan Sinkronisasi laporan Keuangan/Neraca SKPD	12	62.220.000	12	58.081.000	12 bulan	58.081.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Pemberantasan Korupsi
	4.2.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			125.737.000		107.924.000		107.924.000				
			Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	60%									
			Persentase Aparat SPIP aktif	60%?									
			Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	75%									
1	4.2.17.2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengawasan	3	21.000.000	3	18.264.000	3 perwal	18.264.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.2.17.11	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	Sosialisasi dan pemantauan gratifikasi	6	42.045.000	6	40.000.000	4 laporan	40.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Pemberantasan Korupsi
3	4.2.17.10	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan penilaian SKPD pelayanan publik dan laporan reformasi birokrasi	2	62.692.000	2	49.660.000	2 lapopan	49.660.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4.2.9	Program Sinergisitas Penerapan SPI pada OPD			200.941.000		179.377.000		196.332.000				
					1,500,140,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.2.9.1	inventarisasi temuan pengawasan	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut BPK dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	4	58.888.000	4	50.000.000	2 keg	50.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.2.9.2	koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Sinkronisasi Tindak lanjut Pemeriksaan	4	90.226.000	4	80.000.000	4 keg	80.000.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.2.9.3	Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan diagnostic assesment penerapan SPIP	2	51.827.000	2	49.377.000	4 kali koordinasi, 2 kali sosialisasi, 2 kali assesment	66.332.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Pemberantasan Korupsi
				TOTAL	2.506.535.000		2.138.635.000		3.291.072.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
				TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			657.660.000		655.706.000		783.272.000				
1	4.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	85 meterai, 10 paket pengiriman	719.000	85 meterai, 10 paket pengiriman	719.000	85 meterai, 10 paket pengiriman	719.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 rekening telp, 1 rekening listrik	101.430.000	2 rekening telp, 1 rekening listrik, tambah daya	101.430.000	2 rekening telepon, 1 rekening listrik	106.432.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	27 unit kendaraan dinas	7.710.000	27 unit kendaraan dinas	7.710.000	27 unit kendaraan dinas	7.710.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang, 24 bendel	129.500.000	11 orang, 24 bendel	134.750.000	11 orang, 24 bendel	143.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	31 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	62.208.000	31 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	64.396.000	31 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	72.794.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	30 item	17.081.000	30 item	17.081.000	30 item	17.081.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item	36.586.000	3 item	21.586.000	3 item	21.586.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	14 komponen	5.250.000	14 komponen	5.250.000	14 komponen listrik, 1 penambahan daya	5.250.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	5 jenis	7.056.000	5 jenis	7.056.000	5 jenis	7.056.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	18 kali isi ulang tabung gas, BBM genset	1.517.000	18 kali isi ulang tabung gas, BBM genset	14.981.000	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	14.981.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	46 pegawai, 20 rapat, 150 tamu	30.734.000	49 pegawai, 36 rapat, 240 tamu	30.734.000	49 pegawai, 36 rapat, 240 tamu	30.710.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 perjalanan dinas	194.730.000	56 perjalanan dinas	166.450.000	56 perjalanan dinas luar daerah	262.840.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	4.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	1 tenaga kontrak, 1 FO, 2 penjaga malam	63.139.000	1 tenaga kontrak, 1 FO, 2 penjaga malam	83.563.000	1 orang tenaga kontrak, 1 Front Office, 2 Penjaga Malam	88.661.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	4.3.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga					21 jenis peralatan rumah tangga	4.452.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.300.194.000		315.386.000		1.014.011.000				
1	4.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	0	579.800.000	2 item		2 LED proyektor, 2 CCTV	32.620.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	2 jenis pemeliharaan gedung kantor	251.120.000	3 jenis pemeliharaan gedung kantor	34.670.000	4 jenis pemeliharaan gedung	393.270.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit mobil, 20 unit motor	206.320.000	5 unit mobil, 20 unit motor	192.640.000	5 unit mobil, 20 unit motor	187.720.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 item	18.034.000	11 item	11.676.000	11 item	11.676.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14 item	74.620.000	14 item	70.900.000	14	70.900.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
6	4.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	4 item	5.250.000	4 item	5.500.000	12	5.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	0	109.800.000	4 item	0	2 PC, 1 notebook, 6 printer	45.200.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.3.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas operasional	0	55.250.000	1 kendaraan dinas roda 4	0	1 unit mobil, 4 unit motor	261.800.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.3.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur					5 meja lipat, 2 almari arsip, 50 kursi lipat	5.325.000	Magelang	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
	4.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			166.508.000		114.128.000		114.128.000				
1	4.3.5.7	Workshop perencanaan pembangunan daerah	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	45 pegawai	125.628.000	45 orang	73.248.000	45	73.248.000	Bappeda Kota Magelang dan Luar Daerah Provinsi	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	4.3.5.8	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	29 OPD	40.880.000	29 OPD	40.880.000	29 OPD	40.880.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Rencana
	4.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			64.251.000		55.051.000		58.691.000				
1	4.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 laporan	15.250.000	12 laporan	15.250.000	12 laporan	16.485.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	8.500.000	1 dokumen	8.500.000	1 dokumen	8.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
3	4.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	9.200.000	5	0	5	0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
4	4.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 dokumen	10.200.000	2 dokumen	10.200.000	2 dokumen	11.550.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
5	4.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	16.455.000	2 dokumen	16.455.000	2 dokumen	17.510.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
6	4.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	Dokumen LKjIP Bappeda	1 dokumen	4.646.000	1 dokumen	4.646.000	1 dokumen	4.646.000	Bappeda kota magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
7	4.3.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Renstra SKPD dan Dokumen Perubahan Renstra OPD		0		0		0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			59.078.000		59.078.000		109.078.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%									
1	4.3.15.5	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	50 buku profil Kecamatan; 50 buku profil Kota	59.078.000	50 buku profil Kecamatan; 50 buku profil Kota	59.078.000	50 buku profil kecamatan; 50 buku profil kota	109.078.000	Kota Magelang	Banprov & DAU	96	Program prioritas RPJM
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			0		0		0				
					4,783,517,000								
			Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.4.16.15	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)					0		0	Kota Magelang	-	0	
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			12.264.000		12.264.000		7.334.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	1	12.264.000	1 keg	12.264.000	100%	7.334.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan			150.000.000		200.000.000		261.665.000				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	2									
1	4.3.16.7	Fasilitasi FEDEP	tersedianya kegiatan pendukung fedep	(4 Rakoor d, 2 Pameran, 4 Workshop, 2 FGD, 4 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan, 1 dokumen)	150.000.000	(4 Rakoor d, 2 Pameran, 4 Workshop, 2 FGD, 4 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan, 1 dokumen)	200.000.000	(4 Rakoor d, 1 Pameran, 4 Workshop, 2 FGD, 4 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan, 1 dokumen)	261.665.000	Bappeda Kota Magelang	Banprov & DAU	80	Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			2.010.235.000		1.593.735.000		1.761.931.000				
1	4.3.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	2 dokumen	288.696.000	2 dokumen	303.263.000	2 dokumen	303.263.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.3.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang	2 kegiatan	141.200.000	2 kegiatan	133.400.000	2 kegiatan	133.400.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.3.21.10	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen Perwal RKPD	150 buku	34.855.000	150 buku	34.855.000	150 buku	34.855.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.3.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monev	4 laporan	18.871.000	4 laporan	18.871.000	4 laporan	18.871.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
5	4.3.21.14	Forum OPD dan FGD	Jumlah forum SKPD	1 forum OPD, 9 FGD	195.280.000	1 forum OPD, 9 FGD	196.280.000	1 Forum OPD 9 FGD	196.280.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.3.21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah media publikasi	4 media publikasi	34.000.000	4 media publikasi	49.000.000	4 media	92.365.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Rencana
7	4.3.21.31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Jumlah Renja OPD yang diverifikasi	29 OPD	96.120.000	29 OPD	117.633.000	29 OPD	117.633.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	4.3.21.35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Dokumen ranc Perubahan RKPD	1 dokumen	140.657.000	1 dokumen	131.425.000	1 dokumen	131.425.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	4.3.21.36	Penetapan Perubahan RKPD	Jumlah dokumen perubahan RKPD	1 dokumen	29.330.000	1 dokumen	29.330.000	1 dokumen	29.330.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	4.3.21.37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Jumlah perubahan renja OPD yang diverifikasi	29 OPD	93.929.000	29 OPD	117.229.000	29 OPD	117.229.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	4.3.21.39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	Tersedianya dokumen implementasi dan arahan MKSB	30	0	30	0	30	0	Dalam dan luar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	66	
12	4.3.21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4 laporan	48.125.000	4 laporan	48.124.000	4 laporan	75.000.000	Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah.	Dana Alokasi Umum	101	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.3.21.63	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Terevaluasinya RPJP Kota Magelang Tahun 2005-2025	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	
14	4.3.21.64	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standarisasi Harga	200 buku Standarisasi Harga; 200 buku Standar Biaya	164.075.000	200 buku Standarisasi Harga; 200 buku Standar Biaya	164.075.000	200 buku Standarisasi Harga; 200 buku Standar Biaya	164.075.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
15	4.3.21.66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	4 Laporan	111.399.000	4 Laporan	103.919.000	4 Laporan	73.500.000	Dalam dan Luar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
16	4.3.21.25	Evaluasi RPJMD	Hasil Evaluasi RPJMD	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	
17	4.3.21.69	Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan terhadap Pencapaian Indikator Program	Terpetakannya efektifitas kinerja kegiatan pencapaian indikator program	1 dokumen	168.831.000	1 dokumen	146.331.000	1 dokumen	146.331.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
18	4.3.21.70	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1 dokumen	138.018.000	0	0	4	0		Dana Alokasi Umum	105	
19	4.3.21.71	Masterplan Pengembangan Mantyasih		1	138.018.000	1	0	1	0		Dana Alokasi Umum	105	
20	4.3.21.72	Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah		1	168.831.000	1	0	1	0		Dana Alokasi Umum	105	
21	4.3.21.48	Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD	Tersusunnya indikator kinerja RPJMD	29 OPD		29 OPD		1 dokumen	128.374.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
	4.3.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			678.200.000		891.948.000		762.291.000				
1	4.3.22.38	Penyusunan Dokumen Master Plan Minawisata					0		0	Kota Magelang	-	0	
2	4.3.22.40	Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	Tersedianya Dokumen Pengembangan Pertanian Organik		0		0		0	Dalam dan Luar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	
3	4.3.22.41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Ber-NKV	Tersedianya dokumen Rumah Potong Hewan Ber-NKV		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
4	4.3.22.45	Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang	Tersedianya dokumen Potensi Ekonomi Kota Magelang		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.3.22.46	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jangkauan Pemasaran dalam Skema E-Commerce	Tersedianya dokumen pemasaran dalam E-Commerce		0		0		0	Kota Magelang dan Luar Kota Magelang	-	59	
6	4.3.22.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	20 buku	120.866.000	20 buku	127.360.000	20 buku	117.064.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	4.3.22.44	Identifikasi Produk Unggulan Daerah	Tersediannya dokumen identifikasi PUD	1 dokumen	170.000.000	1 dokumen	163.850.000	1 dokumen	163.850.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Mempertegas Skenario Kemitraan
8	4.3.22.43	Penyusunan Dokumen Analisis Daya Saing Kota Magelang	Tersedianya dokumen Daya Saing Kota Magelang	30	0	30	0	30	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
9	4.3.22.39	Penyusunan Dokumen Master Plan Tenaga Kerja Daerah	Tersedianya dokumen Masterplan Tenaga Kerja Daerah		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	
10	4.3.22.51	Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali MKSB	tersedianya dokumen pengembangan KUM	1 dokumen	0	1 dokumen	214.077.000	1 dokumen	214.077.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi MKSB
11	4.3.22.52	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	tersedianya data dan analisa pengembangan industri keratif	0	0	0	225.961.000	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Program prioritas RPJM
12	4.3.22.48	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemasaran Produk dan Jaringan Kemitraan	tersedianya dokumen pengembangan Gunung Tidar sebagai kebun raya	1 dokumen	237.151.000	1 dokumen	160.700.000	1 dokumen	160.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	66	Mempertegas Skenario Kemitraan
13	4.3.22.33	Perencanaan Pengembangan Mina Wisata		30	150.183.000	30	0	30	0		Dana Alokasi Umum	35	
14	4.3.22.69	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Dokumen kebijakan strategi dan implementasi program kegiatan				0	1 dokumen	106.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	SDGs
	4.3.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya			1.429.313.500		686.475.000		828.090.000				
					6,549,235,000								
			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%									
1	4.3.23.9	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah Laporan LP2KD	36	110.690.000	36	110.960.000	36	162.575.000	Kota Magelang	Banprov & DAU	95	Penanggulangan Kemiskinan
2	4.3.23.19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah Dokumen Laporan Monev	2 Dokumen	54.000.000	2 Dokumen	54.000.000	2 Dokumen	104.000.000	Kota Magelang	Banprov & DAU	95	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.3.23.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Jumlah LaporanKegiatan Koordinasi dan pembinaan Penanganan GAKY	2 Laporan 4 Kegiatan	76.452.000	2 Laporan 4 Kegiatan	75.199.000	2 Laporan 4 Kegiatan	115.199.000	Kota Magelang	Banprov & DAU	65	Penanggulangan Kemiskinan
8	4.3.23.27	Kajian Analisis Gender	Jumlah dokumen masterplan pencegahan dan penanggulangan bencana	20	113.118.500	20	0	20	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	
9	4.3.23.28	Penyusunan Grand Design Kependudukan	Jumlah dokumen masterplan pemberdayaan masyarakat		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	
10	4.3.23.29	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Sepanjang Hayat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan	30	0	30	0	30	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	
11	4.3.23.36	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen RAD Pencegahan dan Penanggulangan TB	30	120.000.000	30	0	30	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
12	4.3.23.37	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Jumlah dokumen RAD Inklusif	20	134.057.000	20	0	20	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	
13	4.3.23.9	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah Laporan LP2KD	36	130.000.000	36	0	36	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	
14	4.3.23.38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang sosial dan budaya	4 Dokumen	0	4 Dokumen	29.733.000	4 Dokumen	29.733.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
15	4.3.23.30	Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Pemuda		0		0		0		Dana Alokasi Umum	95	
16	4.3.23.39	Penyusunan Dokumen Kemitraan	Jumlah Dokumen Laporan Monev	40	54.000.000	40	0	40	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	
17	4.3.23.41	Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0	1 Dokumen	101.334.000	1 Dokumen	101.334.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	SDGs
18	4.3.23.31	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Jumlah Dokumen Peningkatan Daya Saing Dan Daya Jual Pariwisata		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	
19	4.3.23.32	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	
21	4.3.23.33	Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDG's	Jumlah Dokumen Pengendalian Stabilitas Daerah		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	
22	4.3.23.42	Penyusun Dokumen Masterplan Rencana Induk Pariwisata Kota	Jumlah Dokumen RIPPARKOT (Rencana Induk Penmbangunan Pariwisata Kota)	1 Dokumen	0	1 Dokumen	105.335.000	1 Dokumen	105.335.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	4.3.23.34	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Revolusi Mental	Jumlah Dokumen RAD - HAM	30	119.848.000	30	0	30	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	
24	4.3.23.43	Perencanaan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	
25	4.3.23.44	Perencanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kerjasama daerah		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	106	
26	4.3.23.35	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan RAD HAM	1 Dokumen	0	1 Dokumen	108.780.000	1 Dokumen	108.780.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	SDGs
27	4.3.23.45	Penyusunan dokumen RAD ASN	Jumlah Dokumen RAD ASN	20	121.846.000	20	0	20	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	
28	4.3.23.47	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) Tahun 2018-2021	Tersedia Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak tahun 2018-2021	1 Dokumen	108.134.000	1 Dokumen	101.134.000	1 Dokumen	101.134.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Kota Layak Anak
29	4.3.23.47	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) Tahun 2018-2021	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota layak Anak Tahun 2018-2021	20	130.000.000	20	0	20	0		Dana Alokasi Umum	95	
	4.3.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana			924.559.000		691.209.000		781.733.000				
			cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%									
1	4.3.26.10	Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman					0		0	Kecamatan Magelang Selatan	-	0	
2	4.3.26.13	Penyusunan Blueprint Universal Design	tersediannya dokumen arahan kebijakan dan strategi penerapan universal access design		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	
3	4.3.26.14	Review Strategi Sanitasi Kota	tersedianya dokumen perencanaan sanitasi (EHRA, Buku Putih, SSK, MPSS)		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	
4	4.3.26.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	tersedianya dokumen manajemen persampahan	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	233.690.000	1 dokumen	233.690.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
5	4.3.26.15	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	tersedianya data sistem informasi perumahan dan permukiman	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	98.832.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.3.26.16	Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Eks Magelang Theatre	tersedianya dokumen manajemen persampahan	30	233.690.000	30	0	30	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
7	4.3.26.17	Pembaruan Data Dasar Usulan Keciaptakarya	tersedianya dokumen rencana pengembangan air limbah	30	0	30	0	30	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
8	4.3.26.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan TPST 3R Induk	tersedianya dokumen rencana drainase berwawasan lingkungan		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
9	4.3.26.19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Bangunan TPST 3R Induk	Tersedianya data sistem informasi jalan dan jembatan		0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
10	4.3.26.20	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan TPST 3R Induk	tersedianya dokumen pengembangan kawasan GOR Samapta sisi selatan		233.350.000		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
11	4.3.26.21	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	tersedianya dokumen antisipasi dan proteksi dini terhadap kebakaran	1 dokumen	0	1 dokumen	203.350.000	1 dokumen	203.350.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	4.3.26.22	Monitoring dan Evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Tersedianya informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di dokumen AMPL	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	89.169.000	1 dokumen	89.169.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
13	4.3.26.24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	Tersedianya dokumen monev capaian kawasan strategis				90.000.000	1 dokumen	85.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	Kota Sejuta Bunga
14	4.3.26.23	Moitoring dan Evaluasi Akses Universal 100-0-100	Tersedianya dokumen capaian terhadap program 100-0-00	1 dokumen	203.350.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	71.092.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program 100-0-100
15	4.3.26.36	Penyusunan Perencanaan Kawasan Strategis	tersedianya dokumen pengembangan kawasan GOR Samapta sisi selatan	30	0	30	0	30	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
16	4.3.26.38	Penyusunan perencanaan kawasan prioritas	tersedianya dokumen perencanaan penataan terminal lama Rejomulyo	30	0	30	0	30	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	61	
17	4.3.26.39	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta		30	89.169.000	30	0	30	0		Dana Alokasi Umum	35	
				TOTAL	7.452.262.500		5.274.980.000		6.482.224.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			313.647.000		588.507.000		611.530.000				
1	4.4.15.12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Laporan Keuangan OPD yang akuntabel				111.590.000	29 OPD	111.590.000	BPKAD	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	4.4.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD	0	0	0	31.805.000	4 laporan	31.805.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
3	4.4.15.135	Penyusunan Raperda Tentang Pencabutan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan	Tercabutnya Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	1 Raperda	21.682.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
4	4.4.15.134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	0	0	0	0	0	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
5	4.4.15.18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12	60.000.000	12	33.900.000	12 laporan	33.900.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
6	4.4.15.131	Workshop penyusunan APBD	Meningkatnya pengetahuan tentang penyusunan APBD	0	12.889.000		0	50 orang	0	BPKAD	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
7	4.4.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	0	0	0	176.747.000	29 OPD	190.884.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
8	4.4.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	3	124.538.000	3	124.398.000	3 dokumen	111.602.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
9	4.4.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	100	116.220.000	100	110.067.000	12 laporan	110.067.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			2.277.227.000		2.303.278.000		2.332.328.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.4.15.56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	arsip dokumen anggaran dalam bentuk elektronik (perda APBD, perwal APBD, perda perubahan APBD, perwal perubahan APBD, RKA, DPA, anggaran kas, RKPA, DPPA, anggaran kas perubahan)	29	40.557.000	10	40.391.000	10 jenis dokumen	40.391.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
2	4.4.15.53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29	54.429.000	48	48.676.000	29 OPD	48.676.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
3	4.4.15.52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	29	44.999.000	29	43.570.000	29 OPD	43.570.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
4	4.4.15.49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2	25.108.000	2	32.878.000	2 laporan	36.688.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
5	4.4.15.44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29	69.670.000	29	69.410.000	29 OPD	69.410.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
6	4.4.15.25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29	49.364.000	29	49.280.000	29 OPD	49.280.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
7	4.4.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	29	41.688.000	29	41.576.000	29 OPD	41.576.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
8	4.4.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2	95.430.000	2	95.268.000	2 dokumen	95.268.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
9	4.4.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2	181.651.000	2	185.093.000	2 dokumen	185.093.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
10	4.4.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2	98.549.000	2	94.308.000	2 dokumen	94.308.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
11	4.4.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2	213.961.000	2	212.945.000	2 dokumen	212.945.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
12	4.4.15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	4	343.857.000	4	343.453.000	2 dokumen	343.453.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.4.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	4	349.841.000	4	367.550.000	2 dokumen	367.550.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
14	4.4.15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	3	241.496.000	3	240.892.000	3	240.892.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
15	4.4.15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	4	426.627.000	4	437.988.000	1 Raperda	463.228.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			505.794.000		447.154.000		448.354.000				
1	4.4.15.59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	12	101.230.000	12	99.608.000	12 laporan	99.608.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
2	4.4.15.66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	1	100.155.000	1	77.993.000	1 kegiatan	77.993.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
3	4.4.15.65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74	228.809.000	148	228.809.000	148 orang dan 1 aplikasi	230.009.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
4	4.4.15.16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	file dokumen pencairan dana belanja langsung	3000	75.600.000	4	40.744.000	4 dokumen	40.744.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.051.143.000		926.937.000		980.740.000				
1	4.4.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	1400	131.474.000	470	129.594.000	470	129.594.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
2	4.4.15.95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	3000	26.925.000	4	26.925.000	4 jenis informasi	80.728.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
3	4.4.15.91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	100	127.063.000	1500	115.451.000	1500 berkas	115.451.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
4	4.4.15.77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1350	75.706.000	1100	56.925.000	1100 SP2D	56.925.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
5	4.4.15.57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	2500	187.101.000	800	159.202.000	800 berkas	159.202.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.4.15.51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	170	16.000.000	10	29.558.000	10 kegiatan	29.558.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
7	4.4.15.43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	1800	35.245.000	700	35.245.000	700 SPM	35.245.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
8	4.4.15.32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	170	86.500.000	10	76.600.000	10 jenis	76.600.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
9	4.4.15.30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregistrasi)	3000	189.300.000	3000	146.321.000	3000 SP2D	146.321.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
10	4.4.15.27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	500	175.829.000	500	151.116.000	500 berkas	151.116.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.578.132.000		1.607.430.000		1.660.141.000				
1	4.4.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	1	37.505.000	2	54.180.000	2 kegiatan	54.180.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
2	4.4.15.104	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12	452.253.000	12	467.753.000	12 laporan	467.753.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
3	4.4.15.81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1	55.880.000	1	55.880.000	1 dokumen	55.880.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
4	4.4.15.72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	100	254.334.000	120	255.483.000	120	304.595.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
5	4.4.15.61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12	64.412.000	12	61.118.000	12 laporan	61.118.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
6	4.4.15.48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	12	90.571.000	12	88.660.000	12 laporan	88.660.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
7	4.4.15.42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	348	125.592.000	348	123.696.000	348	123.696.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
8	4.4.15.36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12	209.121.000	12	251.645.000	12 dokumen	254.044.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
9	4.4.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	3	288.464.000	1	249.015.000	1 aplikasi	250.215.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			254.236.000		214.234.000		220.341.000				
1	4.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2	43.390.000	2	51.660.000	2 dokumen	51.660.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1	12.851.000	1	10.651.000	1 dokumen	10.651.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.4.6.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	12	91.736.000	1500	86.823.000	1500 berkas	92.930.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
4	4.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	renja penetapan dan renja perubahan	2	21.101.000	2	7.000.000	2 dokumen	7.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.4.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2	15.055.000	2	14.100.000	2 laporan	14.100.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	4.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12	70.103.000	12	44.000.000	12 laporan	44.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			248.800.000		396.520.000		291.300.000				
1	4.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12	247.800.000	12	395.520.000	12 bulan	290.300.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	4.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12	1.000.000	12	1.000.000	12 bulan	1.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.857.320.000		1.817.492.000		1.809.454.000				
1	4.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82	125.000.000	82	126.992.000	82 file	130.877.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	23	446.665.000	7	165.877.000	7 orang	169.475.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12	225.475.000	12	170.000.000	12 bulan	260.320.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12	107.004.000	12	108.240.000	12 bulan	130.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	24	12.672.000	3	13.080.000	3 jenis	13.080.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	2	20.000.000	2	20.000.000	2 jenis	20.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	12	26.285.000	26	24.000.000	26 jenis	24.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	32.751.000	18	32.751.000	18 jenis	32.751.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	41.000.000	51	34.500.000	51 jenis	34.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	4.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	12	64.582.000	12	66.166.000	12 bulan	68.565.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	64	18.900.000	79	18.900.000	79 kendaraan	18.900.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	12	736.986.000	12	1.036.986.000	12 bulan	906.986.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			84.578.000		82.598.000		38.520.000				
1	4.4.15.111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	dokumen pedoman penganggaran daerah	2	44.078.000	1	44.078.000	1 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
2	4.4.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1	40.500.000	1	38.520.000	1 dokumen	38.520.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			396.789.000		392.291.000		384.503.000				
1	4.4.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	120	196.711.000	1	192.213.000	1 perwal	188.385.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
2	4.4.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	520	200.078.000	1	200.078.000	1 perda	196.118.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	4.4.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.665.378.000		2.738.170.000		3.099.144.000				
1	4.4.18.21	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	Buku Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	1	61.834.000	1	60.034.000	1 perwal	0	BPKAD	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
2	4.4.18.31	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	0	0	0	0	NULL	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
3	4.4.18.20	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	perwal PBB	0	0	0	0	2 raperwal	35.885.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
4	4.4.18.10	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	Laporan penatausahaan dokumen dan wajib pajak reklame		73.899.000		81.099.000	12 laporan dan 800 WP	81.099.000	BPKAD	Dana Alokasi Umum	59	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.4.18.27	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12	51.731.000	12	51.731.000	12 bulan	51.731.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
6	4.4.18.19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Perizinan Tertentu	0	0	0	0	1 Raperda	79.538.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
7	4.4.18.16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta	200	55.052.000	540	55.052.000	540 WP	65.992.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
8	4.4.18.14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16	140.049.000	16	133.806.000	16 laporan	133.806.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
9	4.4.18.7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28	207.360.000	28	200.160.000	28 laporan	200.160.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
10	4.4.18.17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50	119.916.000	50	103.680.000	50 SK	103.680.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
11	4.4.18.15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	100	281.946.000	17	281.946.000	17 kelurahan	286.946.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
12	4.4.18.13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	20	51.357.000	4	34.560.000	4 LHP atas wajib pajak	73.920.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
13	4.4.18.12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12	114.730.000	12	113.247.000	12 bulan	113.247.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
14	4.4.18.11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	6	145.613.000	6	145.613.000	6 bulan	145.613.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
15	4.4.18.9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12	389.019.000	12	382.689.000	12 bulan	400.189.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
16	4.4.18.6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	4	281.448.000	3 dan 36.200	328.216.000	3 keg dan 36.200 SPPT	376.705.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
17	4.4.18.5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120	160.783.000	120	160.783.000	120 data wajib pajak	160.783.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	4.4.18.4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12	126.500.000	12	126.500.000	12 laporan	126.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
19	4.4.18.24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	12	125.896.000	24	122.929.000	24 laporan	122.929.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
20	4.4.18.2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	2	38.463.000	4	40.263.000	4 laporan	40.263.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
21	4.4.18.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4	239.782.000	4	315.862.000	4 laporan dan 1 keg	500.158.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana, Program prioritas RPJM
22	4.4.18.30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	0	0	0	0	NULL	0	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
23	4.4.18.29	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	0	0	0	0	NULL	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
24	4.4.18.26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT	0	0	0	0	NULL	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
25	4.4.18.22	Penataan Dokumen Pajak Daerah Elektronik	arsip dokumen pajak daerah dalam bentuk elektronik	0	0	0	0	NULL	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
	4.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			711.140.000		1.139.040.000		2.360.268.000				
1	4.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, mic, wireless, stand mic, proyektor	0	0	4	133.950.000	8 set	476.835.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.4.2.10	Pengadaan mebeleur	Kenyamanan pelaksanaan tugas					1 jenis	85.250.000	mess lembah asri	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.4.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Ruangan Ka. Badan dan Ruang Rapat bekas Depo Arsip	0	0	1	295.000.000	2 ruangan	651.261.000	BPKAD	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	komputer, laptop, printer, scanner, mesin perforasi, UPS	0	0	0	0	12 jenis	419.112.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	20	7.200.000	24	7.200.000	24 buah	7.200.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	7	213.675.000	7	210.175.000	7 jenis	210.175.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	33	37.510.000	36	39.960.000	36 unit	39.960.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	64	372.340.000	70	372.340.000	70 unit	372.340.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1	80.415.000	1	80.415.000	1 unit	98.135.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			139.610.000		124.850.000		124.850.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	6	139.610.000	6	124.850.000	6	124.850.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.714.653.000		4.302.836.000		5.723.259.000				
1	4.4.19.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD	3	50.240.000	3	51.275.000	1 kegiatan	33.305.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	4.4.19.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	1	99.960.000	10	105.404.000	2 kegiatan	110.366.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
3	4.4.19.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	3	365.574.000	3	409.495.000	3 unit	427.214.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
4	4.4.19.25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur	2	13.320.000	2	13.770.000	2 bidang	13.770.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
5	4.4.19.23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah	12	321.319.000	12	323.765.000	12 sertifikat	320.627.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
6	4.4.19.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus	10	11.390.000	100	17.248.000	79 kendaraan	30.463.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.4.19.21	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	pemanfaatan dan panatagunaan tanah Pemkot	3	59.402.000	3	54.452.000	3 kecamatan	54.452.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
8	4.4.19.6	Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang	Jalan di Komplek Belakang Kantor Walikota Magelang	0	0	1	297.600.000	1 paket	532.616.000	Komplek Belakang Kantor Walikota	Dana Alokasi Umum	35	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Rencana
9	4.4.19.41	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	0	0	0	0	4 jenis	84.287.000	Rumah Dinas di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.4.19.10	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Pagar depan Rumah Dinas	0	0	0	0	1 paket	151.130.000	Rumdin Jl. Let.Jend.Suprpto dan Rumdin Jl. Diponegoro	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
11	4.4.19.39	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah	0	0	0	0	NULL	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
12	4.4.19.38	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	Peraturan Walikota tentang kodefikasi barang	0	0	0	0	NULL	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
13	4.4.19.36	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	2 paket	256.661.000	Bangunan Tempat Pemilahan Sampah di Komplek Kantor Walikota dan Bangunan Gedung Kantor Samsat Cepat	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
14	4.4.19.5	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur milik Pengelola Barang	0	0	0	0	1 jenis	15.890.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
15	4.4.19.35	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pemanfaatan dan penatagunaan tanah Pemkot	0	0	0	0	NULL	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
16	4.4.19.3	Pemusnahan Barang Milik Daerah	Berita acara pemusnahan aset	1	20.237.000	1	20.108.000	2 dokumen	261.408.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
17	4.4.19.15	Penjualan aset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	1	78.647.000	3	89.768.000	5 kegiatan	94.948.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
18	4.4.19.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	0	0	3	17.849.000	1 kegiatan	24.090.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
19	4.4.19.17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah	4	77.345.000	3	66.843.000	7 keg	98.543.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
20	4.4.19.13	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	pengelolaan BMD	16	548.324.000	16	492.700.000	12 orang	493.837.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	4.4.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	7	577.030.000	7	617.542.000	7 rumdin	634.331.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
22	4.4.19.29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir	12	156.311.000	12	142.444.000	12 bulan	142.444.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
23	4.4.19.12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	1	40.978.000	2	40.978.000	5 paket	77.588.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
24	4.4.19.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2	58.115.000	2	73.075.000	2 lapangan	300.646.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
25	4.4.19.16	Penyelamatan asset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12	216.471.000	12	214.490.000	2 dokumen	214.490.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
26	4.4.19.20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	2	115.190.000	2	124.086.000	2 dokumen	124.086.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
27	4.4.19.18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	4	106.593.000	29	131.745.000	29 OPD	137.144.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
28	4.4.19.14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah	6	83.735.000	8	145.400.000	8 jenis	145.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
29	4.4.19.22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	100	41.581.000	100	39.700.000	100%	39.700.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
30	4.4.19.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD	7	109.609.000	7	123.735.000	7 kategori	123.735.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
31	4.4.19.24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot	1	88.162.000	1	87.529.000	2 laporan dan 1 unit	175.854.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
32	4.4.19.34	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD	0	0	0	0	NULL	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
33	4.4.19.27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	100	31.100.000	6	30.400.000	6 SPPT	30.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
34	4.4.19.32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4	74.048.000	4	58.453.000	4 laporan	58.453.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
35	4.4.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	10	322.272.000	13	450.064.000	13 unit	452.463.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
36	4.4.19.28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	100	47.700.000	3	62.918.000	3 kecamatan	62.918.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
TOTAL					15.798.447.000		17.081.337.000		20.084.732.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian											
	4.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			340.372.000		330.032.000		377.947.000				
1	4.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	100 buah	300.000	100 buah	300.000	100 buah	300.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan speedy	12 bulan	27.600.000	12 bulan	33.600.000	12 bulan	33.600.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	4.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	16 unit	6.000.000	16 unit	6.000.000	16 unit	6.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang	108 ob	104.058.000	108 ob	104.058.000	108 ob	105.258.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
5	4.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan	20 jenis	7.300.000	20 jenis	7.300.000	20 jenis	7.300.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	53 jenis	25.518.000	53 jenis	25.518.000	53 jenis	25.518.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	4.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	13 jenis	21.195.000	13 jenis	21.195.000	13 jenis	21.195.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
8	4.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6 jenis	1.000.000	6 jenis	1.000.000	6 jenis	1.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
9	4.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar, majalah dan buku perpustakaan	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
10	4.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	25.208.000	12 bulan	25.208.000	12 bulan	25.208.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	108.936.000	12 bulan	92.596.000	12 bulan	139.311.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
12	4.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian perorangan	41 dokumen	10.257.000	41 dokumen	10.257.000	41 dokumen	10.257.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	4.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			182.377.000		181.377.000		313.930.000				
			Persentase SKPD yang menerapkan finger print	60%									
1	4.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	16 unit	131.417.000	16 unit	131.417.000	16 unit	131.417.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9 unit	5.965.000	9 unit	5.965.000	9 unit	5.965.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perbaikan peralatan kantor	106 unit	39.995.000	106 unit	39.995.000	106 unit	39.995.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebel kantor yang diservis	30 buah	5.000.000	30 buah	4.000.000	30 buah	4.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.5.2.3	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung diklat dan assesment centre	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	
6	4.5.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	
7	4.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
8	4.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	77 unit	0	77 unit	0	74 unit	132.553.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.5.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
	4.5.3	Program peningkatan disiplin aparatur			130.790.000		129.965.000		189.920.000				
			Persentase kehadiran ASN	97%									
			Persentase pelanggaran disiplin ASN	0.21%									
			Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	94%									
			Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	80%									
			Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%									
			Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	80%									
			Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	96%									
1	4.5.3.6	Penegakan disiplin PNS	Jumlah laporan kehadiran, penegakan disiplin dan kode etik PNS	1020 laporan, 3000 buku kode etik, 2 software	130.790.000	1020 laporan, 3000 buku kode etik, 2 software	129.965.000	1020 laporan, 3000 buku kode etik, 2 software	189.920.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
2	4.5.3.7	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai					0		0	BKD	-	0	
	4.5.4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS			44.838.000		41.936.000		41.936.000				
			Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	85%									
1	4.5.4.3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah surat keputusan pemindahan tugas yang dikeluarkan	150 SK	44.838.000	150 SK	41.936.000	150 SK	41.936.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
	4.5.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			31.203.000		30.761.000		30.761.000				
1	4.5.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	300 orang	31.203.000	300 orang	30.761.000	300 orang	30.761.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
2	4.5.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
	4.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			67.903.000		67.903.000		67.903.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 laporan	12.956.000	12 laporan	12.956.000	12 laporan	12.956.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	4.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	7.156.000	1 laporan	7.156.000	1 laporan	7.156.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
3	4.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan untuk satu tahun anggaran	1 laporan	10.074.000	1 laporan	10.074.000	1 laporan	10.074.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
4	4.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen rencana kerja	2 dokumen	8.087.000	2 dokumen	8.087.000	2 dokumen	8.087.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
5	4.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA	2 dokumen	21.450.000	2 dokumen	21.450.000	2 dokumen	21.450.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
6	4.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP	1	8.180.000	1	8.180.000	1	8.180.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
7	4.5.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah dokumen RENSTRA	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			12.500.000		12.500.000		12.500.000				
				-	6,648,052,000								
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Jumlah berita/informasi yang dipublikasi	12 bulan	12.500.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	12.500.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian											
	4.5.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.288.137.000		2.999.707.000		3.604.966.000				
					5,010,432,000								
			Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:										
			Pendidikan S1	46%									
			Pendidikan S2	8,5%									
			Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100									
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,41									
			Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%									
			Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%									
			Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0.10%									
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	41%									
1	4.5.15.1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah bahan pertimbangan penetapan kebijakan kepegawaian	12	208.145.000	12	198.785.000	12	208.145.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
2	4.5.15.2	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi	3000	465.768.000	3000	458.184.000	3000	499.834.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
3	4.5.15.3	Penempatan PNS	Jumlah SK pengangkatan PNS dan sumpah janji	150 orang	29.128.000	150 orang	29.128.000	150 orang	17.166.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
4	4.5.15.5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS terupdate, kartu ID card, DUK, buku jabatan, layanan informasi kepegawaian	4000	178.864.000	4000	100.483.000	3000 data update, 500 ID Card, 20 buku DUK, 3 buku jabatan, 10 layanan informasi kepegawaian	103.783.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	4.5.15.8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan	150	22.125.000	150	21.218.000	150	21.218.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
6	4.5.15.9	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah PNS yang melakukan konsultasi, pembinaan dan penanganan kasus	12	92.874.000	12	89.405.000	12	89.405.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.5.15.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang diselenggarakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	400	407.909.000	400	405.362.000	300	457.064.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
8	4.5.15.14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Jumlah buku kebutuhan diklat	1	43.424.000	1	40.147.000	1	42.764.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
9	4.5.15.22	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	Jumlah surat ijin belajar dan pemakaian gelar yang diterbitkan	150	9.482.000	150	9.482.000	150	9.482.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
10	4.5.15.23	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas	45	30.531.000	45	28.371.000	45	31.578.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
11	4.5.15.24	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah pegawai yang mendapat kenaikan gaji berkala	300	17.125.000	400	17.125.000	300	17.125.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
12	4.5.15.26	Administrasi pemberkasan CPNSD	Jumlah SK CPNSD yang diterbitkan	150	47.848.000	150	46.723.000	150	46.723.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
13	4.5.15.28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	Jumlah pegawai honorer yang terlayani	66	19.739.000	66	19.739.000	66	19.739.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
14	4.5.15.30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Jumlah updating data dan layanan pensiun, kenaikan pangkat, penggunaan gelar, diklat, buku profil	1400	56.372.000	1400	54.448.000	1400	60.818.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
15	4.5.15.31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	Jumlah surat keputusan Jabatan Fungsional yang diterbitkan	150	47.334.000	150	47.334.000	150	56.464.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
16	4.5.15.33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	Jumlah pegawai yang mengikuti pembekalan	187	319.902.000	189	279.917.000	165	316.526.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
17	4.5.15.34	Pelantikan Pejabat	Jumlah pegawai yang dilantik	3	98.522.000	4	122.608.000	4	122.608.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
18	4.5.15.35	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	Jumlah dokumen formasi PNS	1	55.092.000	1	51.984.000	1	46.784.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
19	4.5.15.38	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti assesment centre	110	141.990.000	100	176.090.000	70	141.850.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
20	4.5.15.39	Penyusunan Buku Profil Pegawai	Jumlah buku profil pegawai	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	
21	4.5.15.40	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	450	84.522.000	350	78.825.000	475	87.670.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
22	4.5.15.41	Penatausahaan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP dan dokumen penilaian prestasi kerja PNS	6560	40.810.000	6106	39.553.000	6106	39.553.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	4.5.15.42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	Jumlah berkas dokumen yang diproses	25000	48.186.000	25000	47.748.000	25000	47.748.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
24	4.5.15.44	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	Jumlah ASN yang diajukan pembayaran pensiun dan THT	182	72.649.000	182	91.947.000	170	108.986.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
25	4.5.15.45	Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN	Jumlah kartu peserta TASPEN	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
26	4.5.15.46	Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU	Jumlah pegawai yang mendapatkan KARIS/KARSU/KARPEG	140	95.847.000	140	0	140	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
27	4.5.15.53	Mutasi dan Seleksi Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah jabatan	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	
28	4.5.15.55	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah JPT terisi	2	336.615.000	1	299.255.000	1	334.335.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	49	Program prioritas RPJM
29	4.5.15.56	Penerbitan dan Update Kartu PNS Elektronik	Jumlah PNS yang mendapat KPE	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
30	4.5.15.59	Penetapan Jabatan Fungsional Umum ASN	Jumlah surat keputusan Jabatan Fungsional Umum yang dikeluarkan	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
31	4.5.15.60	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	Jumlah pegawai	50	100.000.000	109	111.372.000	141	500.160.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
32	4.5.15.61	Verifikasi Berkas Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah keputusan penetapan kecelakaan kerja	6	46.349.000	6	45.359.000	3	36.154.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
33	4.5.15.62	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang	Jumlah dokumen peraturan	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
34	4.5.15.63	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar	18	19.500.000	18	19.500.000	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
35	4.5.15.64	Penyusunan dokumen pengembangan ASN	Adanya dokumen routemap pengembangan ASN	5	50.000.000	0	0	5	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	
36	4.5.15.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	
37	4.5.15.52	Konversi Pangkat, Golongan dan Ruang PNS ke Sistem Kepangkatan Baru	Jumlah pegawai yang dikonversi kepangkatannya	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	
38	4.5.15.19	Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan struktural	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan struktural	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	
39	4.5.15.65	verifikasi dan Monitoring STK SKP	Jumlah dokumen STK SKP dan tugas jabatan yang diverifikasi	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	4.5.15.66	Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai	Jumlah dokumen standar teknis kegiatan SKP	0	0	0	0	29	48.302.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
41	4.5.15.67	Penyusunan peraturan manajemen SDM aparatur	Jumlah dokumen peraturan tentang manajemen SDM aparatur	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
42	4.5.15.38	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti penilaian kompetensi	0	0	0	0	0	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
43	4.5.15.68	Pengukuran index profesionalitas ASN	Tersedianya dokumen Index Profesionalitas ASN Kota Magelang	1	41.485.000	0	0	1	48.367.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	74	Program prioritas RPJM
44	4.5.15.69	Penatausahaan jabatan struktural	Jumlah SK yang dikeluarkan	500	60.000.000	0	0	500	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	
45	4.5.15.54	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan evaluasi layanan kepegawaian	0	0	0	0	0	0	BKPP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
46	4.5.15.27	Penataan dan Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu, KPE/Karpeg, Kartu TASPEN	Jumlah PNS yang mendapatkan Karis/Karsu, KPE/Karpeg, Kartu TASPEN	100 buah		100 buah	69.615.000	100 buah	44.615.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
	4,6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan											
	4.6.15	Program Pendidikan Kedinasan			872.181.000		1.264.691.000		1.228.330.000				
1	4.6.15.1	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan teknis	95	250.000.000	90	244.000.000	90	244.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
2	4.6.15.2	Pendidikan penjenjangan struktural	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural	17	622.181.000	32	1.020.691.000	30	984.330.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			26.102.000		26.102.000		26.102.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah pendataan dan penataan arsip	12 bulan	26.102.000	12 bulan	26.102.000	12 bulan	26.102.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan											
	4.6.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			602.880.000		287.151.000		192.151.000				
1	4.6.16.1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	30	452.880.000	0	0	30	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	78	
2	4.6.16.4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	15	150.000.000	105	287.151.000	105	192.151.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
				TOTAL	5.599.283.000		5.372.125.000		6.086.446.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan											
	4.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			513.300.000		390.856.000		437.632.000				
1	4.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat/Dokumen Terkirim	103 buah	1.000.000	93 buah	1.000.000	93	750.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Layanan Telepon, Internet, Air, dan Listrik	4 jenis	37.000.000	4 jenis	32.000.000	4	25.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Perpanjangan STNK dan PKB Kendaraan Dinas	9 unit	6.300.000	9 unit	6.000.000	9 unit	6.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen Keuangan dan Barang	12 bulan	85.000.000	12 bulan	84.000.000	12	82.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kerja	31 jenis ; 2 TTT	52.000.000	31 jenis ; 2 org TTT	51.992.000	31 jenis	55.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
6	4.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	51 jenis	19.000.000	51 jenis	19.000.000	51 jenis	19.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	4.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Foto Copy Dokumen Kantor	10 jenis	20.000.000	10 jenis	17.000.000	10 jenis	17.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
8	4.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen /Alat Listrik dan Jasa Tukang Listrik	12 jenis	11.000.000	12 jenis	7.000.000	12	7.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
9	4.7.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Rumah Tangga	8 jenis	10.000.000	8 jenis	3.750.000	8 jenis	3.750.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
10	4.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perpustakaan	3 jenis surat kabar	10.000.000	3 jenis surat kabar	4.500.000	3 jenis surat kabar	3.850.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jasa Isi Ulang Tabung Gas	8 tabung	4.000.000	8 tabung	1.750.000	8 tabung	1.225.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
12	4.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum	30 orang	20.000.000	30 orang	20.000.000	60 orang	20.990.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
13	4.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	58 kegiatan	175.000.000	65 kegiatan	102.000.000	53 kegiatan	150.320.000	Jakarta, Tangerang Selatan, Cibinong, Puwokerto, Surabaya	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
14	4.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kontrak	2 orang	54.000.000	2 org	38.117.000	2 orang	43.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	4.7.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Simbol, Lambang negara dan pakaian pengatur Keamanan Kantor	2 jenis	9.000.000	2 jenis	2.747.000	2 jenis	2.747.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4.7.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			499.000.000		135.764.000		379.818.000				
1	4.7.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor	9 jenis	0	5 jenis	0	5 jenis	69.645.000	Balitbang Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
2	4.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung , halaman Kantor Terpelihara	1500 m2	66.000.000	1500 m2	31.064.000	1500 m2	31.064.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
3	4.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	9 kendaraan	210.000.000	9 kendaraan	81.400.000	9 kendaraan	81.400.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
4	4.7.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara	8 unit	25.000.000	8 unit	8.900.000	8 unit	6.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
5	4.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan jaringan	10 unit	40.000.000	10 unit	11.400.000	10 unit	8.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
6	4.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebeleur kantor terpelihara	20 unit	8.000.000	20 unit	3.000.000	20 unit	4.500.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
7	4.7.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas/operasional (roda 4 (1 bah); Roda 2 (2 buah)	3 unit	0	1 unit	0	2 unit kendaraan roda 2	20.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.7.2.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur Kantor	2 jenis	0	3 jenis	0	3 jenis	21.823.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
9	4.7.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya Sekat Ruangan dan Lantai	2 paket	100.000.000	2 paket	0	2 paket	116.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
10	4.7.2.33	Pengadaan Papan Informasi	Tersedianya papan nama Lembaga		0		0		0	badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	54	
11	4.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	2 jenis	50.000.000	2 jenis	0	2 jenis	21.386.000	badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
12	4.7.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya tempat musholla	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4.7.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			69.000.000		52.000.000		54.000.000				
1	4.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja, RFK, Laporan Keuangan dan Prognosis	4 dokumen	12.000.000	4 dokumen	22.000.000	4 dokumen	24.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
2	4.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja OPD dan Renja perubahan OPD	2 dokumen	12.000.000	2 dokumen	11.000.000	2 dokumen	11.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
3	4.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA 2018 dan RKA Perubahan 2017	4	25.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
4	4.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP SKPD	5	10.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
5	4.7.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Revisi RENSTRA sesuai OPD baru		0		0		0	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	
6	4.7.6.26	Evaluasi Rencana Strategis OPD	Terwujudnya Evaluasi Renstra OPD	0	10.000.000	0	0	0	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0		0				
				-	6,648,052,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			SETWAN	12 bln	36,000,000								
			DISHUB		154,500,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-									
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Terpublikasinya Informasi Penelitian dan Pengembangan melalui website	12	0	12	0	12	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	79	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.10.15.11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	Terpublikasinya Kegiatan Balitbang	12	0	12	0	12	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
	4,7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan											
	4.7.15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi			338.376.000		529.586.000		529.586.000				
1	4.7.15.1	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	Jumlah Krenova Terjaring	3 kegiatan	120.000.000	3 kegiatan	93.004.000	3 kegiatan	93.004.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	Program prioritas RPJM
2	4.7.15.2	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	Jumlah Peserta Lomba IPTEK	3 kegiatan	175.876.000	3 kegiatan	177.894.000	3 kegiatan	177.894.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
3	4.7.15.3	Penyusunan Peraturan tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Magelang	Tersusunnya Perwal Inovasi Daerah	1 Perda	0	35 buku Perwal tentang Inovasi Daerah	39.757.000	35 buku Perwal tentang Inovasi Daerah	39.757.000	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.7.15.4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan SIDA sebagai manifestasi daya saing daerah (Sosialisasi & implementasi roadmap SIDA)	2 kegiatan	42.500.000	2 kegiatan	31.327.000	2 kegiatan	31.327.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.7.15.5	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	Terselenggaranya Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	3 kegiatan	0	3 kegiatan	63.145.000	3 kegiatan	63.145.000	Pemerintah Kota Magelang dan Semarang	Dana Alokasi Umum	90	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.7.15.6	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	Jumlah Produk Teknologi yang di Pamerkan	3 kegiatan	0	3 kegiatan	124.459.000	3 kegiatan	124.459.000	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Mempertegas Skenario Kemitraan, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			12.000.000		12.000.000		12.000.000				
					1,097,069,000								
			SETWAN	12 bln	25,599,000								
			DPPKD		136,130,000								
			KESBANGPOL		25,988,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		23,482,000								
			LITBANG		40,000,000								
			PERPUS		191,243,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	47%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip OPD daerah	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Terfasilitasinya arsip OPD	0	0	0	0	0	0	badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan											
	4.7.16	Program Penelitian dan Pengkajian			215.000.000		567.012.000		614.042.000				
1	4.7.16.1	Studi Kelayakan Kawasan Industri Tahu Tidar Campur sebagai Kawasan Wisata Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan	Tersusunnya dokumen study kelayakan sebagai rekomendasi kebijakan	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
2	4.7.16.2	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	Tersajinya data dan analisis potensi PAD Kota Magelang sebagai rekomendasi kebijakan	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	106.889.000	1 dokumen	106.889.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Tema RKPD 2019
3	4.7.16.3	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	Tersusunnya Kajian Strategis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	91.888.000	1 dokumen	91.888.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
4	4.7.16.4	Penyusunan Buku Analisis Indikator Makro Sosial Kota Magelang	Tersusunnya dokumen Buku Analisis Makro Sosial Kota Magelang	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	74	ExBAU
5	4.7.16.5	Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengembangan	Tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	0	0	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Program prioritas RPJM
6	4.7.16.6	Studi Kelayakan Pengelolaan Persampahan Kota Magelang	Tersusunnya dokumen data dan hasil analisis implementasi program Kartu Indonesia Pintar	0	0	0	117.359.000	0	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
7	4.7.16.7	Penelitian Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kota Magelang	Tersusunnya analisis tentang tanggung jawab perusahaan sebagai bahan pengambilan kebijakan	1 dokumen	0	1 dokumen	110.598.000	1 dokumen	110.598.000	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	4.7.16.8	Pengelolaan Open Journal System	Terpublikasinya jurnal karya tulis ilmiah secara online	2 volume	0	2 volume	51.800.000	2 volume	51.800.000	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	4.7.16.9	Riset Unggulan Daerah	Tersusunnya Kajian Persepsi masyarakat tentang pelayanan Pemerintah Kota Magelang	1 dokumen	0	1 dokumen	88.478.000	1 dokumen	88.478.000	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM
10	4.7.16.41	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	Tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan					1 dokumen	56.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
11	4.7.16.11	Analisis Peningkatan prestasi olahraga di Kota Magelang	Tersusunnya dokumen analisis peningkatan prestasi olah raga di Kota Magelang		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
12	4.7.16.10	Persepsi masyarakat tentang kesehatan di kota Magelang	Tersusunnya kajian Persepsi Masyarakat tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Magelang		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	
13	4.7.16.12	Penelitian sarana pengairan dalam mendukung pembangunan pertanian	Tersusunnya data hasil penelitian sarana pengairan dalam mendukung pembangunan pertanian		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
14	4.7.16.13	Konvensi lahan persawahan dan permukiman kota Magelang	Tersusunnya Penelitian konvensi lahan persawahan dan pemukiman Kota Magelang		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	
15	4.7.16.14	Penelitian sarana drainase Kota Magelang	Tersusunnya data hasil penelitian sarana drainase Kota Magelang		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
16	4.7.16.15	Penelitian tingkat pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan	Tersusunnya data hasil penelitian Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan	0	0	0	0	0	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	
17	4.7.16.16	Penelitian peningkatan rumah tidak layak huni	Tersusunnya data hasil penelitian rumah tidak layak huni		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	
18	4.7.16.17	Penelitian Pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal	Tersusunnya hasil penelitian pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	
19	4.7.16.19	Penelitian pengembangan transportasi kota Magelang	Tersusunnya hasil penelitian Pengembangan transportasi Kota Magelang		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
20	4.7.16.20	Penelitian pengembangan kualitas RTH Kota Magelang	Tersusunnya hasil penelitian pengembangan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Magelang		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	
21	4.7.16.21	Penelitian pengembangan E-gov di Kota Magelang menuju satu data	Tersusunnya hasil penelitian pengembangan e Gov di Kota Magelang menuju satu data		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
22	4.7.16.22	Persuasi penerapan WAN di Kota Magelang	Tersusunnya hasil persuasi penerapan WAN di Kota Magelang		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
23	4.7.16.24	Pengukuran pengelolaan sistem informasi di lingkungan pemerintah Kota Magelang	Terukurnya pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	4.7.16.25	Pengukuran peran serta Kelompok Informasi Masyarakat	Terukurnya Indeks Kebahagiaan	0	0	0	0	0	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Pokok Pikiran DPRD
25	4.7.16.26	Optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan tenaga kerja terampil, sesuai tuntutan kebutuhan pasar	Tersusunnya dokumen optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan tenaga kerja terampil, sesuai kebutuhan pasar	1	0	1	0	1	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	
26	4.7.16.27	Peningkatan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan termarginalkan	Tersusunnya dokumen peningkatan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan termarginalkan		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	
27	4.7.16.28	Implementasi skema pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan UMKM	Tersusunnya dokumen implementasi skema pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
28	4.7.16.29	penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di Kota Magelang	Tersusunnya dokumen hasil penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di Kota Magelang		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	
29	4.7.16.30	kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung destinasi wisata Kota Magelang	Tersusunnya dokumen kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung destinasi wisata Kota Magelang		0		0		0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	
30	4.7.16.33	Penelitian peningkatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Tersusunnya dokumen hasil penelitian peningkatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan	1	0	1	0	1	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
31	4.7.16.32	Kajian pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah	Terfasilitasinya jumlah jurnal secara online	7	0	7	0	7	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
32	4.7.16.33	Penelitian peningkatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Tersusunnya Raperwal tentang Open Journal System	1	0	1	0	1	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	
33	4.7.16.40	Pengukuran index kebahagiaan	Terukurnya index kebahagiaan masyarakat Kota Magelang				0		108.389.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Pokok Pikiran DPRD
	4.7.17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan			22.000.000		25.000.000		25.000.000				
			Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	10%									
			Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	50%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	0%									
			Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	7%									
			Cakupan Penguatan SIDA	40%									
			Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	40%									
1	4.7.17.1	Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian	Terlaksananya Sosialisasi dan Vokasi kegiatan penelitian	4	0	4	0	4	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	
2	4.7.17.2	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	Terevaluasinya Hasil Hasil penelitian	3 kegiatan	22.000.000	3 kegiatan	25.000.000	3 kegiatan	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
	4.7.18	Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi			80.380.000		48.401.000		48.401.000				
1	4.7.18.1	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah KI Terdaftar	10 produk	80.380.000	10 produk	48.401.000	10 produk	48.401.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
	4.7.19	Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan			270.020.000		390.990.000		411.990.000				
					2,072,850,000								
			Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	11%									
			Presentase krenova OPD yang berkualitas	4%									
			Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti	30%									
			Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	10%									
1	4.7.19.1	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rakor, Seminar dan Diseminaasi	4 kegiatan	139.195.000	4 kegiatan	67.983.000	4 kegiatan	67.983.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Mempertegas Skenario Kemitraan, Tema RKPDP 2019
2	4.7.19.2	Pemberdayaan Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang	Terlaksananya kajian oleh Foun alumni karya siswa Kota Magelang sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	83	
3	4.7.19.3	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	Tersusunnya rekomendasi kebijakan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan	1 dokumen	130.825.000	1 dokumen	50.705.000	1 dokumen	50.705.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
4	4.7.19.4	Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah lptek dan Inovasi	Terfasilitasinya jumlah tenan	2 kegiatan	0	2 kegiatan	49.461.000	2 kegiatan	49.461.000	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.7.19.5	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	Terfasilitasinya jumlah produk teknologi inovasi	4 produk	0	6 produk	222.841.000	6 produk	243.841.000	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	SDGs, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
6	4.7.19.6	Pengembangan Pusat Iptek Masyarakat	Jumlah pengunjung yang menikmati hasil iptek masyarakat	1	0	1	0	1	0	badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	74	
7	4.7.19.7	Pengembangan dan penerapan hasil teknologi dan inovasi	Terfasilitasinya produk pengembangan dan penerapan hasil teknologi dan inovasi	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	
8	4.7.19.8	Monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan teknologi	Jumlah produk monev pengembangan dan penerapan teknologi	1	0	1	0	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	
9	4.7.19.10	Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan industri tahu Tidar Campur	Tersusunnya kajian pembangunan sarana dan prasarana di kawasan industri tahu Tidar Campur	0	0	0	0	0	0	Tidar Campur, Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	40	
10	4.7.19.11	Penyiapan kawasan Pongangan sebagai kawasan wisata pendidikan berbasis teknologi	Tersusunnya rekomendasi penyiapan kawasan Pongangan sebagai kawasan wisata pendidikan berbasis teknologi		0		0		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	
11	4.7.19.12	Launching kawasan industri tahu sebagai kawasan wisata berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan	Terlaksananya launching kawasan industri tahu sebagai kawasan wisata berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan		0		0		0	Tidar Campur, Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	40	
				TOTAL	2.019.076.000		2.151.609.000		2.512.469.000				

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penetapan Indikator Kinerja Daerah dipertegas dalam bab tersendiri. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pembeda dari regulasi sebelumnya. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Kota Magelang 2005-2025.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah Indikator Kinerja Utama Kota Magelang dalam rangka pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Magelang sebagaimana tertuang pada Tabel 6-1 dan 6-2 sebagai berikut :

Tabel VI.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	5,18% ± 0,25%	5,04% ± 0,25%	5,05% ± 0,25%	5,11% ± 0,25%	5,21% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%
2	PDRB per Kapita (tahundasar 2010, Rp/kapita/tahun)	53.543.836,59*	58.309.122,98	63.394.588,17	68.656.817,64	74.314.414,01	80.296.686,81	86.475.098,49	86.475.098,49
3	Laju Inflasi	2,7%	3,57% - 5,15%	3,36% - 4,94%	3,15% - 4,73%	2,93% - 4,51%	2,72% - 4,30%	2,51% - 4,09%	2,51% - 4,09%
4	Indeks Gini	0,3438 - 0,3762	0,3435 - 0,3637	0,343 - 0,3569	0,3421 - 0,3523	0,341 - 0,3489	0,3397 - 0,3461	0,338 - 0,3438	0,338 - 0,3438
5	Indeks Williamson	0,0806	0,0892	0,0804	0,0725	0,0653	0,0588	0,0530	0,0530
2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan	9,05%	8,36% – 8,89%	7,41% – 8,09%	6,98% – 7,38%	6,65% - 6,90%	6,42% - 6,61%	6,12% - 6,40%	6,12% - 6,40%
2	Indeks Pembangunan Manusia	76,39	76,61	76,9	77,26	77,61	78	78,37	78,37
a	Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,36 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
b	Harapan Lama Sekolah	13,08 Tahun	13,27 Tahun	13,45 Tahun	13,63 Tahun	13,82 Tahun	14 Tahun	14,19 Tahun	14,19 Tahun
c	Angka Harapan Hidup	76,58 Tahun	76,67 Tahun	76,71 Tahun	76,76 Tahun	76,8 Tahun	76,85 Tahun	76,9 Tahun	76,9 Tahun
d	Pengeluaran per Kapita (Rp.)	10.793.000	10.886.000	11.083.570	11.281.140	11.478.710	11.676.290	11.873.860	11.873.860
3	Indeks Pembangunan Gender	95,66	95,79	95,9	95,99	96,08	96,16	96,23	96,23
4	Indeks Pemberdayaan Gender	78,83	78,96	79,2	79,35	86,3	86,95	87,15	87,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6,43% - 6%	6% - 5%	5,8% - 5%	5,5% - 5%	5,2% - 5%	5% – 4,5%	5% – 4,5%
6	Angka Pertumbuhan Penduduk	0,337%	0,353%	0,244%	0,384%	0,199%	0,137%	0,133%	0,133%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar								
a	Pendidikan								
1	Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,36 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
2	Persentase sekolah berstandar nasional								
	- SD	30,66%	35,66%	40,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
	- SMP	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
3	APM SD	96,51%	96,91%	97,31%	97,71%	98,11%	98,51%	98,91%	98,91%
4	APK SD	108,15%	110%	112%	114%	116%	118%	120%	120%
5	APM SMP	74,62%	75%	76%	78%	80%	82%	84%	84%
6	APK SMP	81,92%	82%	85%	88%	90%	96%	100%	100%
7	Angka Melek Huruf	97%	97,35%	97,67%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
8	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
b	Kesehatan								
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	0	3 buah(23%)	5 buah(15%)	7 buah(54%)	10 buah (77%)	13 buah(100%)	13 buah(100%)	13 buah(100%)
2	Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70
3	Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5
4	Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
7	Angka Kesakitan DBD	130.93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
8	Angka Prevalensi TB	128.33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101
9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
10	Persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%
11	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	0%	10%	20%	30%	40%	50%	50%

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau								
	- Privat	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	- Publik	18,37%	18,37%	18,37%	18,42%	18,44%	18,46%	18,50%	18,50%
	2. Rasi obangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%	33%
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%
	2 Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%	100%
	3 Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	4 Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	6%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
	5 Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%
e	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
	2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
	3 Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	4 Angka kriminalitas	14,14%	13,64%	13,14%	12,64%	12,14%	11,64%	11,14%	11,14%
	5 Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	11,50%	12%	12%	12,50%	12,50%	12,50%
	6 Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
f	Sosial								
	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%
	2 Rasi tempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	3 Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1	2
2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar								
a	Tenaga Kerja								

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
b	PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAna k								
	1 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%
	2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%
	3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%
c	Pangan								
	1 Ketersediaan pangan utama beras	12.729 Ton	12.780 Ton	12.831 Ton	12.882 Ton	12.933 Ton	12.985 Ton	13.037 Ton	13.037 Ton
d	LingkunganHidup								
	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,12	58	62	65	67,51	68	68,5	68,5
	2 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84
	3 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1
	4 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56
	5 Volume sampah yang dibuangke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7
e	PemberdayaanMasyarakatdanDesa								
	1 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	51,72%	58,62%	65,52%	75,86%	82,76%	89,66%	89,66%
	2 Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
f	Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana								
	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak
g	Perhubungan								
	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,25

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
h	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
i	Penanaman Modal								
1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%
2	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
j	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5buah	6buah	6buah	7buah	7buah	8buah	8buah	8buah
	- Regional	4buah	4buah	4buah	5buah	5buah	6buah	6buah	6buah
	- Nasional	1buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah
	- internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14buah	17buah	17buah	17buah	17buah	17buah	20buah	20buah
	- Regional	8buah	10buah	10buah	10buah	10buah	10buah	11buah	11buah
	- Nasional	4buah	5buah	5buah	5buah	5buah	5buah	6buah	6buah
	- internasional	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	3buah	3buah
k	Statistik								
1	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
l	Kebudayaan								
1	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
2	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
3	Perlindungan situs a tau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
m	Perpustakaan								
	1 Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%
	2 Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305
n	Kearsipan								
	1 Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%	72%
3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan								
a	Pariwisata								
	1 Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	3,20%	3,40%	3,60%	3,80%	4,00%	4,20%	4,40%	4,40%
	2 Jumlah Wisatawan								
	- Nusantara (orang)	1.133.373	1.134.846	1.136.435	1.138.140	1.139.961	1.141.899	1.143.954	1.143.954
	- Mancanegara (orang)	5.171	5.178	5.185	5.193	5.201	5.210	5.219	5.219
b	Perdagangan								
	1 Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
	2 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar Inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%
	3 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a	Perencanaan								
	1 Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
	2 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
b	Keuangan								
	1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,40%	19,73%	26,34%	30,33%	32,55%	34,21%	36,35%	36,35%
	2 Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
	3 Rasioke tergantungan Keuangan Daerah terhadap dana pusat	83,60%	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
	4 NilaiOpini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
c	Kepegawaian, PendidikandanPelatihan								
	1 Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%
d	PenelitiandanPengembangan								
	1 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
e	Fungsi Lain								
	1 Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
	2 Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14
	3 Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
	4 Persentasepelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	30%	45%	55%	65%	75%	85%	85%
	5 Persentase perkembangan kerja sama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
	6 Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	100%	100%
	7 Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
C	APEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	50,26	56,21	57,00	57,51	58,00	58,51	59,00	59,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71 (B)	74,80 (B)	75 (B)	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	80 (B)
3	Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	79%	79%	82%	83%	84%	85%	86%	86%
4	Tingkat Kematangan Kota Cerdas	Scattered (48,89)	Scattered (48,90 – 51,5)	Scattered (51,6 – 54,5)	Scattered (54,6 – 57,5)	Scattered (57,6 – 59,9)	Integrative (60 – 62,5)	Integrative (62,6 – 65)	Integrative (62,6 – 65)
5	Tingkat Kerukunanhidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 6-2
Indikator Kinerja Utama

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan menuju cerdas dan berdaya saing.	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	Banyaknya murid (SD/MI) dibagi banyaknya penduduk usia (7-12 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid (SD/MI) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 7-12 th
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	Banyaknya murid usia (7-12 th) dibagi banyaknya penduduk usia (7-12 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid usia (7-12 th) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 7-12 th
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	Banyaknya murid (SMP/MTs) dibagi banyaknya penduduk usia (12-15 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid (SMP/MTs) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 12-15 th
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	Banyaknya murid usia (12-15 th) dibagi banyaknya penduduk usia (12-15 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid usia (12-15) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 12-15 th
	5. Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data IPM
	6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data IPM
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur)	- Dinas Kesehatan	- Data IPM

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. AKI/ 1.000 KH	Angka	Jumlah kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dibagi Jumlah kelahiran hidup x 100.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	3. AKB/ 1.000 KH	Angka	Jumlah kematian bayi dibagi Jumlah kelahiran hidup x 1.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	4. AKABA	Angka	Jumlah kematian balita dibagi Jumlah kelahiran hidup x 1.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	5. Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	Jumlah balita penderita gizi buruk berdasarkan pengukuran Berat Badan Menurut Umur serta Berat Badan Menurut Tinggi Badan berada di bawah garis merah Grafik Pertumbuhan Balita pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Balita yang ditimbang x 100%	- Dinas Kesehatan	- Data F3 Gizi
	6. Angka Kesakitan DBD	Angka	Jumlah penderita DBD dalam satu tahun dibagi Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama x 10.000	- Dinas Kesehatan	- Laporan Kewaspadaan Dini RS
	7. Angka Prevalensi Kasus TB	Angka	Jumlah pasien TB yang ditemukan dan diobati selama setahun dibagi Jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan kurun waktu yang sama x 100.000	- Dinas Kesehatan	- Laporan Sistim Informasi TB Terpadu
	8. Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	%	Jumlah penderita HIV usia 15-49 tahun yang ditemukan selama setahun dibagi Jumlah estimasi populasi kunci dalam wilayah dan kurun waktu yang sama x 100%	- Dinas Kesehatan	- Laporan Sistem Informasi HIV-AIDS
Meningkatnya kontribusi sektor, perdagangan bagi perekonomian daerah	1. Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	%	PDRB sektor perdagangan/Total PDRB	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Data PDRB
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks kualitas lingkungan hidup diukur dengan 3 Indeks yaitu: Indek pencemaran air, Indeks	- Dinas Lingkungan Hidup	- Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pencemaran udara dan Indeks tutupan vegetasi; Indeks Pencemaran Air sbb: $P_i = \sqrt{(C_i/L_i) \max^2 + (C_i/L_i) \text{rata-rata}}$ Indeks Pencemaran Udara sbb: IP NO ₂ +IP SO ₂ Indeks Tutupan Vegetasi sbb: LHP + LHS		
Meningkatnya kualitas infrastruktur Kota Magelang	1. Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik	%	Panjang jalan, panjang seluruh jembatan, panjang trotoar dan panjang drainase dalam kondisi baik	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Data Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Trotoar
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Kota Magelang	1. Luas Kawasan Kumuh	ha	Rasio Luas kawasan kumuh (Luas Kawasan Kumuh dalam Ha)	- Dinas Perumahan dan Permukiman	- Data Kondisi Kawasan Kumuh per Kelurahan
	2. Prosentase Rumah Tidak Layak Huni	%	Jumlah RTLH dibagi Jumlah total rumah x 100%	- Dinas Perumahan dan Permukiman	- Data Kondisi Perumahan per Kelurahan
Meningkatnya keamanan, dan keselamatan transportasi di Kota Magelang	1. Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Angka	Tingkat keselamatan lalu lintas tiap km per 100.000 penduduk per 100.000	- Dinas Perhubungan	- Data Keselamatan Lalu Lintas
Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1. Jumlah Investor	Investor	Jumlah investor	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investor
	2. Pertumbuhan nilai investasi PMA	%	$\{(\text{nilai investasi PMA th n} - \text{nilai investasi PMA th n-1}) \text{ dibagi nilai investasi th n-1} \} \times 100\%$	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investasi
	3. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	%	$\{(\text{nilai investasi PMDN th n} - \text{nilai investasi PMDN th n-1}) \text{ dibagi nilai investasi th n-1} \} \times 100\%$	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investasi
Meningkatnya ketahanan pangan	1. Ketersediaan pangan utama beras (ton)	ton	Jumlah Stok Beras (Ton)	- Dinas Pertanian dan Pangan	- Data Ketersediaan Pangan
Meningkatnya daya saing tenaga kerja Kota Magelang	1. Persentase penyerapan tenaga kerja	%	$(\text{Jumlah pengangguran terbuka} / \text{Jumlah angkatan kerja}) \times 100\%$	- Dinas Tenaga Kerja	- Data Ketenagakerjaan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Persentase Penurunan PMKS	%	$(\text{Jumlah PMKS tahun n-1} - \text{jumlah PMKS tahun n} / \text{jumlah PMKS tahun n-1}) \times 100\%$	- Dinas Sosial	- Data Kesejahteraan Sosial
	2. Pendapatan Perkapita	Rupiah	Pendapatan yang diterima oleh masing-masing perkepala penduduk. Pendapatan perkapita	- OPD Lintas Sektor	- Data PDRB

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			tersebut dihasilkan dengan membagi pendapatan regional bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun		
	3. Angka Kemiskinan	%		- OPD Lintas Sektor	- Data Kemiskinan
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1. Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	Angka	Jumlah anak dibandingkan dengan jumlah keluarga	- DP4KB	- Data pertumbuhan penduduk
Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	1. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	- DP4KB	- Data IPG
	2. Rasio KDRT	%	Jumlah KDRT dibagi Jumlah Rumah Tangga x 100%	- DP4KB	- Data KDRT
Meningkatnya pelestarian budaya Kota Magelang	1. Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan	%	Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan dibandingkan jumlah kelompok seni budaya di Kota Magelang dikalikan 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Sarana Prasarana Kebudayaan - Data Pelaku Budaya - Data Jenis Adat Budaya
	2. Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	situs/bcb	Dihitung berdasarkan jumlah situs dan bangunan cagar budaya yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Situs dan Bangunan Cagar Budaya
Meningkatnya daya tarik wisata Kota Magelang	1. Jumlah Wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	a. Nusantara	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	b. Mancanegara	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	2. Lama Tinggal Wisatawan	hari	Lama Tinggal Wisatawan di Kota Magelang	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Lama Tinggal Wisatawan
Meningkatnya toleransi antar umat beragama	1. Prosentase penurunan penyakit masyarakat	%	((Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1)- (Jumlah penyakit masyarakat tahun n)/(Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1))	- Badan Kesbangpolinmas - Satpol PP - Dinas Sosial	- Data Penyakit Masyarakat

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			dikalikan 100%		
	2. Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	%	Komponen dari indikator adalah kerukunan hidup antar suku, adat, ras dan agama. Masing - masing komponen bernilai 25%. Rumus 100% - (% komponen konflik)	- Badan Kesbangpolinmas	- Data Konflik Masyarakat
Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1. Angka kriminalitas	Angka	(Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun/jumlah penduduk) dikalikan 10.000	- Badan Kesbangpolinmas - Satpol PP	- Data Kriminalitas
	2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	(Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan) dikalikan 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran Perda
	3. Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 dikalikan 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran K3

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 yang mengindikasikan perlunya dilakukan perubahan dokumen perencanaan. Sebagaimana diketahui bahwa RKPD tahun 2018 merupakan perencanaan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 hingga triwulan kedua tahun berjalan, terdapat perkembangan-perkembangan kerangka makro ekonomi serta perkembangan kebijakan dan kemampuan daerah. Selain itu dalam upaya pencapaian target indikator pada akhir tahun maupun target RPJMD, termasuk adanya pergeseran kegiatan, munculnya kegiatan baru /alternatif, hingga perubahan lokasi, sasaran maupun perubahan pagu anggaran menjadi penyebab perlunya dilakukan perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

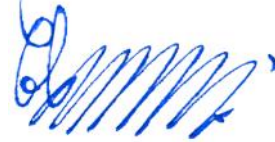
Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2018 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat perubahan atau perkembangan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah;
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2018, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018;

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 sangat dibatasi oleh waktu yang hanya pada triwulan ke empat tahun 2018, maka setiap Perangkat Daerah perlu melakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian setiap kegiatan yang dilaksanakan secara cermat dan berkualitas. Hal ini sangat krusial agar target target yang telah ditentukan mampu tercapai secara memuaskan.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian arah pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kota Magelang pada saatnya nanti dapat tercapai.

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO